BI INSTITUTE

Seri Buku Sejarah & Heritage

# MEMPERKUAT SIMPUL EKONOMI KERAKYATAN WILAYAH PESISIR

## BANK INDONESIA DAN PERKEMBANGAN EKONOMI CIREBON

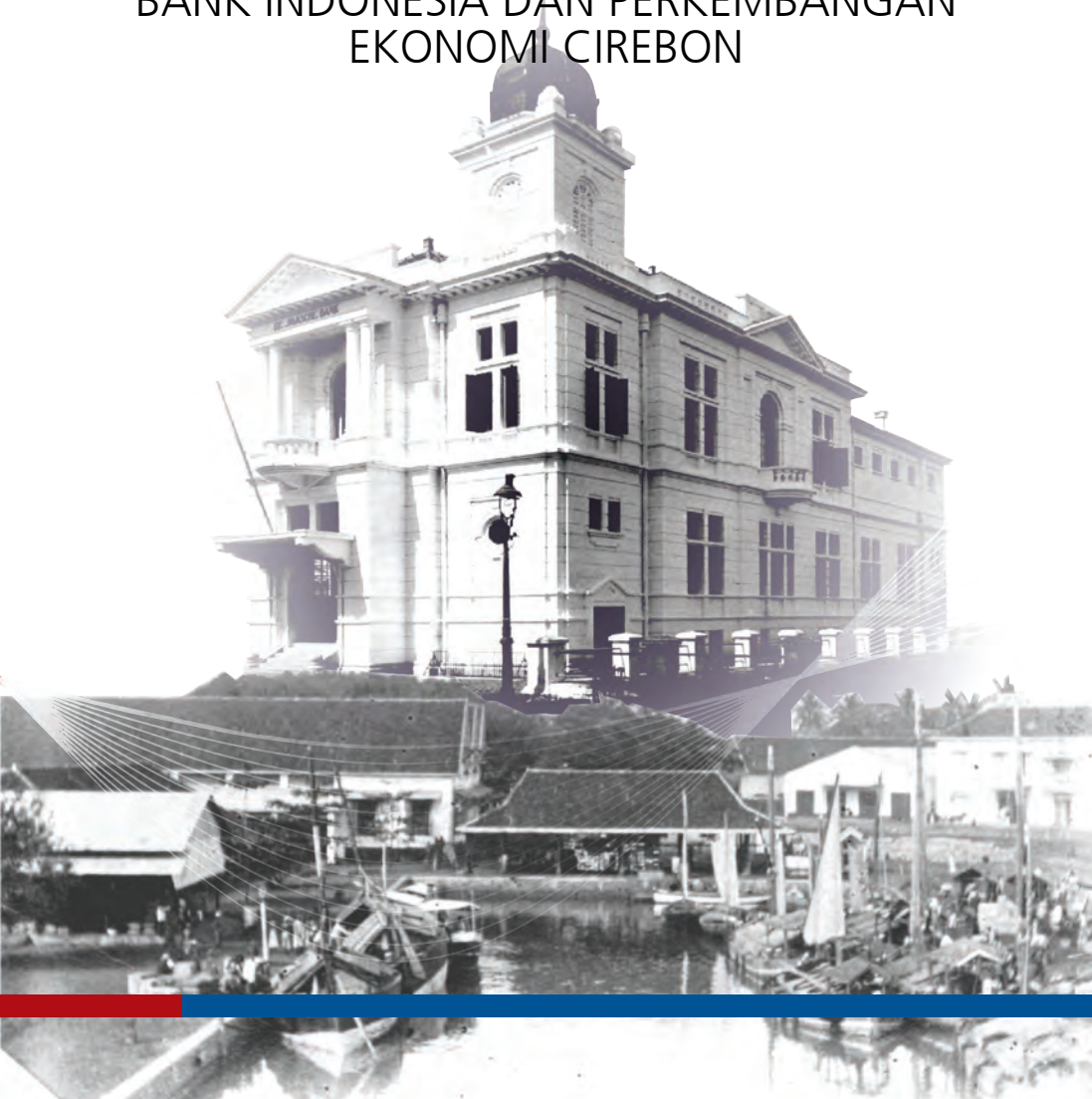

# MEMPERKUAT SIMPUL EKONOMI KERAKYATAN WILAYAH PESISIR:

Bank Indonesia dan Perkembangan Ekonomi Cirebon

# MEMPERKUAT SIMPUL EKONOMI KERAKYATAN WILAYAH PESISIR:

## BANK INDONESIA DAN PERKEMBANGAN EKONOMI CIREBON


**TIM PENYUSUN**

Abdul Wahid
Ahmad Athoillah
Sutrisno Murtiyoso
Rita Krisdiana
Allan Akbar

**EDITOR:**

Kasijanto Sastrodinomo



**BANK INDONESIA INSTITUTE**
**BANK INDONESIA**
**2021**

**Memperkuat Simpul Ekonomi Kerakyatan Wilayah Pesisir:**
**Bank Indonesia dan Perkembangan Ekonomi Cirebon**

Penanggung Jawab Produksi:
Solikin M. Juhro

Kepala Produksi:
Arlyana Abubakar

Tim Penyusun:
Abdul Wahid, Ahmad Athoillah, Sutrisno Murtiyoso, Rita Krisdiana, Allan Akbar

Editor:
Kasijanto Sastrodinomo

Kontributor:
Guruh Suryani Rokhimah, Felicia Virna I. B., Nur Fadhila, Aryni Ayu Widiyawati, Ginisita Dofany, Sintya Aprina

Cetakan Pertama, Agustus 2022
xxiii + 338 hlm, 14,5 x 20,5 cm
ISBN: 978-623-95383-5-4
978-623-95383-6-1 (EPUB)

Bank Indonesia Institute
Jl. M.H. Thamrin No. 2, Jakarta 10350
Indonesia
http://www.bi.go.id

Hak Cipta dilindungi Undang-Undang.
Dilarang mengutip atau memperbanyak sebagian
atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari penerbit.

# SAMBUTAN
# GUBERNUR BANK INDONESIA

*Bismillahirrahmanirrahim*

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Cirebon atau 'Negeri Cirebon' telah ratusan tahun memegang peranan vital bagi arus perdagangan di Nusantara, khususnya di wilayah Pantai Utara Jawa. Semua ini berkat letaknya di titik persimpangan jaringan pelayaran maritim dan jalur tansportasi darat, yang menjadikan Cirebon salah satu kota pelabuhan penting Nusantara, hingga menjadi mata rantai dalam jaringan perdagangan regional. Hal ini juga didukung wilayah pedalaman Cirebon yang subur dan masyarakatnya yang relatif terbuka terhadap pengaruh dari luar, baik dalam bidang ekonomi, politik, budaya dan agama. Bisa dikatakan bahwa Cirebon telah menjadi 'kota kosmopolitan' sejak dahulu, bahkan sejak sebelum kedatangan VOC (Vereenigde Oost-Indische Compagnie), di mana interaksi perdagangan dan monetisasi uang telah menjadi realitas keseharian masyarakatnya. Pihak Belanda yang tertarik untuk datang dan menguasai wilayah ini, berhasil melemahkan kekuatan politik Kraton Cirebon dan mengukuhkan dominasi politiknya di wilayah ini. Cirebon dijadikan sebagai salah satu wilayah untuk ekspoitasi sumber daya ekonomi, dengan menjadikannya wilayah *preangerstelsel*, yaitu wilayah yang diwajibkan sistem tanam wajib kopi sebagaimana wilayah lain di kawasan Priangan.

Memasuki periode Pemerintah Kolonial Hindia Belanda, budidaya tanaman ekspor berbasis tenaga kerja paksa ini diteruskan melalui Sistem Tanam Paksa (1830-1870) dengan skala eksploitasi yang jauh lebih besar. Dapat dikatakan sistem ini bisa berjalan dengan maksimal di Cirebon berkat modal lahan subur, irigasi alam yang melimpah, jumlah penduduk atau tenaga kerja yang besar, dan infrastruktur transportasi yang mendukung. Berbagai komoditas ekspor penting seperti kopi, tebu (gula), indigo, teh, dan kina sukses dibudidayakan di hampir semua wilayah Keresidenan Cirebon. Untuk mendukung kebijakan tersebut, Pemerintah Kolonial Belanda melakukan perbaikan dan memodernisasi infrastruktur transportasi dan perekonomian, termasuk pembangunan jalur kereta api, pelabuhan, jalan raya, dan irigasi. Hingga berakhirnya Sistem Tanam Paksa (STP), Cirebon merupakan salah satu wilayah di Jawa yang mengalami proses eksploitasi paling intens.

Salah satu infrastruktur ekonomi yang dibangun Pemerintah Kolonial Belanda adalah lembaga perbankan. Direksi De Javasche Bank (DJB) yang berkantor pusat di Batavia tertarik untuk membuka kantor cabang di Kota Cirebon melihat peningkatan arus lalu lintas perdagangan yang semakin ramai sejak diberlakukannya Sistem Tanam Paksa. Diharapkan dengan adanya kantor cabang dapat mendorong dan menjamin keberlanjutan sektor ekonomi kapitalis di bidang agro-ekonomi, khususnya perkebunan dan industri gula di wilayah Cirebon dan sekitarnya. Setelah melewati serangkaian rapat direksi DJB, akhirnya disepakati pendirian DJB *Agentschap* Cheribon (DJB Cirebon) secara resmi berdiri pada tanggal 6 Agustus 1866.

DJB pada saat itu mendapatkan mandat dari Pemerintah Hindia Belanda untuk menjalankan fungsi sebagai bank sirkulasi sekaligus bank komersial. Sehingga untuk menjalankan fungsi sebagai cabang dari bank sirkulasi, maka DJB Cirebon bertugas mengedarkan uang Gulden di wilayah kerjanya. Sedangkan sebagai bank komersial, DJB Cirebon memberikan kredit bagi para pengusaha swasta – khususnya yang memperoleh lisensi untuk mengembangkan perkebunan skala besar, terutama perkebunan tebu dan pabrik gula yang jumlahnya cukup banyak. Pemberian kredit dari DJB Cirebon kepada para pengusaha berhasil merangsang perkembangan ekonomi lebih lanjut terutama melalui pemberian kredit permodalan, yang dimanfaatkan oleh para pengusaha –terutama perkebunan– untuk melakukan ekspansi bisnisnya.

Sementara itu, pada sisi lain, sektor ekonomi yang digerakkan oleh masyarakat pribumi juga terus tumbuh, terutama pada sektor industri kecil seperti kerajinan dan batik. Akses permodalan yang terbatas dan terkadang tidak didukung oleh lembaga perbankan, tidak membuat masyarakat pribumi sebagai penggeraknya patah semangat. Justru ekonomi berbasis kerakyatan ini semakin tumbuh subur pada periode awal abad ke-20 yang dapat dikatakan menjadi puncak kejayaan ekonomi di wilayah Cirebon masa kolonial. Bahkan semangat ekonomi berbasis kerakyatan ini terus berlanjut hingga kini, melalui citra Kota Cirebon sebagai destinasi wisata budaya yang dikenal lekat dengan kerajinan tangan, batik, dan kulinernya.

Kehadiran DJB *Agentschap* Cheribon yang kini adalah Kantor Perwakilan Bank Indonesia Cirebon, menjadi perwakilan kehadiran bank sentral di wilayah ini. Kehadirannya melanjutkan semangat awal pendiriannya yaitu untuk mendukung peningkatan perekonomian di wilayah Cirebon. Saat ini komitmen tersebut diwujudkan dengan sinergi dengan pemerintah daerah, melalui fungsi Bank Indonesia dalam kebijakan moneter, melakukan pengawasan dan pengaturan stabilitas sistem keuangan, serta mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran.

Buku berjudul "**Memperkuat Simpul Ekonomi Kerakyatan Wilayah Pesisir: Bank Indonesia dan Perkembangan Ekonomi Cirebon"** menjadi persembahan dari Bank Indonesia untuk masyarakat Cirebon. Menggunakan pendekatan dan metodologi penelitian yang ketat, diharapkan buku ini mampu memberikan hikmah pembelajaran dan solusi dalam rangka pembangunan kawasan regional melalui kacamata sejarah. Buku ini menjadi salah satu kontribusi nyata Bank Indonesia terutama dalam kajian sejarah ekonomi yang kiranya mampu menjadi bahan pertimbangan para pembuat kebijakan.

*Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Jakarta, Januari 2021

Perry Warjiyo

# SAMBUTAN
# DEPUTI GUBERNUR BANK INDONESIA

*Bismillahirrahmanirrahim*

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Kehadiran bank sentral di Cirebon sudah ada sejak lebih dari seratus tahun lalu, bermula dari pendirian De Javasche Bank *Agentschap* Cheribon (DJB Cirebon) pada tanggal 6 Agustus 1866. Sesuai dengan mandat yang diberikan Pemerintah Hindia Belanda, maka DJB Cirebon menjalankan peran sebagai bank sirkulasi yang mengedarkan uang Gulden, di samping peran sebagai bank komersial dalam rangka memperlancar arus uang dan kredit modal kepada para pengusaha Eropa. Dapat dikatakan bahwa DJB berada di balik masifnya pertumbuhan ekonomi Cirebon yang ditandai dengan maraknya perkebunan dan pabrik gula sebagai komoditas unggulan utama. Hanya sayangnya, kegiatan ekonomi yang digerakkan oleh masyarakat pribumi kurang mendapat perhatian dari DJB dan juga perbankan lainnya di masa itu, padahal ekonomi berbasis kerakyatan inilah yang hingga kini tetap kokoh sebagai penyokong tumbuhnya perekonomian di wilayah Cirebon.

Bank Indonesia sebagai bank sentral Republik Indonesia, secara kelembagaan lahir dari nasionalisasi De Javasche Bank pada tahun 1953. Fungsi DJB sebagai bank sirkulasi bisa dikatakan menjadi titik awal yang saat ini dilanjutkan oleh Bank Indonesia sebagai bank sentral di era modern dengan cakupan tugas dan fungsi yang lebih luas. Sedangkan dalam perjalanan evolusi kelembagannya, Bank Indonesia tidak lagi menjalankan peran sebagai bank komersial sejak tahun 1968. Sebagai perwakilan kehadiran bank sentral di

daerah, Kantor Perwakilan Bank Indonesia Cirebon memiliki tugas dan fungsi untuk memastikan kelancaran kebijakan di bidang moneter, sistem keuangan, dan sistem pembayaran di daerah, serta bersinergi dengan pemerintah setempat untuk mendorong pertumbuhan ekonomi lokal terutama ekonomi yang berbasis kerakyatan sebagai kekuatan utama wilayah Cirebon.

Kantor Perwakilan Bank Indonesia Cirebon turut serta mengawal laju perekonomian berbasis kerakyatan melalui program pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) sebagai sektor strategis dalam perekonomian. Program pengembangan UMKM dilaksanakan meliputi berbagai bidang usaha seperti rotan, kerajinan, batik, industri makanan olahan, dan garmen. Sementara itu, sektor pariwisata ikut dikelola untuk menumbuhkan usaha wisata alam seperti di Gunung Ciremai di Kuningan dan Majalengka, serta wisata budaya dan religi di Kota dan Kabupaten Cirebon. Kemudian sektor kelautan dan perikanan mengembangkan usaha penambangan garam, penangkapan ikan dan pertambakan. Program pengembangan UMKM yang kini lebih terkoordinasi tersebut diharapkan dapat turut berperan dalam menggerakkan roda ekonomi Cirebon yang berkesinambungan.

Buku berjudul "**Memperkuat Simpul Ekonomi Kerakyatan Wilayah Pesisir: Bank Indonesia dan Perkembangan Ekonomi Cirebon**" di tangan pembaca merupakan buku yang membahas sejarah panjang perkembangan ekonomi Cirebon yang dikaji secara holistik guna mendapatkan penggambaran yang utuh atas kontribusi bank sentral dalam mengawal pertumbuhan ekonomi di wilayah tersebut. Buku ini diharapkan menjadi sebuah karya yang dapat memantik kemunculan karya sejenis guna melengkapi khazanah pengetahuan sejarah ekonomi untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Tidak lupa, buku ini diharapkan pula dapat menjadi pedoman bersama bagi Bank Indonesia dan para pemangku kepentingan dalam membangun kerja sama sinergis bagi pembangunan ekonomi Cirebon yang lebih baik.

*Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Jakarta, Januari 2021

Dody Budi Waluyo

# PENGANTAR
# KEPALA BANK INDONESIA INSTITUTE

*Bismillahirrahmanirrahim*

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Buku "**Memperkuat Simpul Ekonomi Kerakyatan Wilayah Pesisir: Bank Indonesia dan Perkembangan Ekonomi Cirebon**" yang ditulis oleh Tim Penulis dari Bank Indonesia Institute menjadi wujud kehadiran Bank Indonesia di tengah masyarakat melalui kajian akademik, khususnya sejarah ekonomi. Tujuan penulisan buku ini adalah sebagai upaya perekaman memori institusi (*institutional memory*) Bank Indonesia yang salah satunya dikemas dalam bentuk Buku Seri Sejarah dan *Heritage* Kantor Perwakilan Bank Indonesia. Seri buku yang menyajikan kisah mengenai kiprah bank sentral di beberapa wilayah di Indonesia, yang kehadirannya diawali sejak masa kolonial dengan nama De Javasche Bank yang kemudian dinasionalisasi menjadi Bank Indonesia.

Sebagai bagian dari seri buku tersebut, buku ini menyajikan dengan komprehensif peran dan kontribusi bank sentral dalam mengawal perkembangan ekonomi Cirebon dan sekitarnya dari masa ke masa, yang sekaligus menyajikan sejarah ekonomi kota/wilayah tersebut. Paduan antara kajian ekonomi serta sejarah melalui penggalian sumber arsip yang mendalam, diharapkan dapat melengkapi khazanah referensi sejarah ekonomi dengan topik khusus tentang sejarah bank sentral di daerah yang belum banyak

dituliskan. Melalui informasi yang tersaji dalam buku ini, diharapkan dapat membangkitkan rasa kepemilikan masyarakat terhadap Bank Indonesia sebagai Bank Sentral Republik Indonesia. Dan sebagai referensi pengetahuan, kiranya buku ini juga dapat dimanfaatkan oleh akademisi dan masyarakat luas, termasuk menjadi sumber refleksi bagi para pembuat kebijakan di daerah dalam merumuskan kebijakan berdasarkan hikmah dan pelajaran masa lalu.

Kami menyadari bahwa dalam menulis sebuah buku, idealnya dapat memenuhi 4 (empat) unsur, yakni *uniqueness* (keunikan); *novelty* (kebaruan); *attractiveness* (menarik); dan *accessibility* (aksesabilitas). Maka dalam penulisan buku ini, Tim Penulis berupaya mengisi ruang-ruang kosong yang belum banyak dikaji oleh buku-buku sejenis, dengan memanfaatkan sumber primer berupa arsip-arsip masa De Javasche Bank sebagai referensi utama dalam penelitian dan penulisan. Guna memperluas jangkauan pembaca, buku ini juga ditulis dengan menggunakan gaya penulisan semi populer agar lebih menarik ketika dibaca, disamping juga diterbitkan secara digital melalui *website* Bank Indonesia. Sehingga jangkauan pembaca buku ini tidak hanya di lingkungan akademik, namun juga masyarakat luas khususnya generasi muda yang menaruh minat terhadap sejarah ekonomi Cirebon.

Atas terbitnya buku ini, kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang turut aktif terlibat dalam proses penelitian dan penulisan. Kami berharap informasi yang termuat dalam buku ini dapat memberikan gambaran utuh mengenai peran Bank Indonesia dalam mendukung pengembangan ekonomi khususnya di Cirebon dan sekitarnya.

Selamat membaca.

*Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Jakarta, Januari 2021

Solikin M. Juhro

# DAFTAR GAMBAR


Gambar 1.1. Pemandangan Gunung Ciremai, Cirebon, Jawa Barat, 1938 **18**
Gambar 1.2. Ilustrasi pelayaran di Pelabuhan Cirebon oleh O.G.H. Heldring, 1880 **20**
Gambar 1.3. Lukisan Masjid Agung Demak sebagai simbol kekuasaan Kesultanan Demak di Jawa, 1810 **24**
Gambar 1.4. Masjid Keraton Kasepuhan Cirebon sebagai simbol Islamisasi di wilayah Cirebon **28**
Gambar 1.5. Keraton Kasepuhan Cirebon sekitar tahun 1890 **33**
Gambar 1.6. Masjid Raya Cirebon tahun 1910, yang saat ini bernama Masjid At-Taqwa, berlokasi di sebelah Alun-alun Cirebon **35**
Gambar 1.7. Foto halaman depan Keraton Kasepuhan Cirebon **36**
Gambar 2.1. Ilustrasi pembangunan Jalan Raya Pos yang diinisiasi oleh H.W. Daendels di Jawa **49**
Gambar 2.2. Suasana Perkebunan Kopi di Priangan pada Masa Preangerstelsel **51**
Gambar 2.3. Pabrik Teh Argalingga yang Berlokasi di Kaki Gunung Ciremai, Jawa Barat **53**
Gambar 2.4. Seorang pengrajin batik sedang melakukan proses pewarnaan batik dengan menggunakan larutan indigo **55**
Gambar 2.5. De Javasche Bank sebagai bank sirkulasi yang didirikan di Batavia pada 1828 **62**
Gambar 2.6. De Javasche Bank Agentschap Cheribon yang berdiri pada 6 Agustus 1866 **65**
Gambar 2.7. Gedung DJB Agentschap Cheribon lama yang lokasinya bersebelahan dengan Societiet Phoenix Cheribon **67**
Gambar 2.8. Gedung DJB Agentschap Cheribon baru yang lokasinya bersebelahan dengan Societiet Phoenix Cheribon **68**
Gambar 2.9. DJB Cirebon diterangi lampu-lampu hias pada acara pernikahan Putri Juliana dan Pangeran Bernhard **69**
Gambar 2.10. Pemandangan Ladang Tebu dengan latar Gunung Ciremai **72**
Gambar 2.11. Pabrik Gula Nieuw Tersana yang berlokasi di sebelah Tenggara Cirebon **73**
Gambar 2.12. Situasi Pabrik Gula Karang Soewoeng di Keresidenan Cirebon pada awal abad ke-20 **75**
Gambar 2.13. Suasana jalanan utama di Kota Cirebon pada awal abad ke-20 **76**
Gambar 2.14. Pabrik Rokok British American Tobacco di Kota Cirebon yang dibangun pada tahun 1924 **79**
Gambar 2.15. Situasi kawasan Pasoekatan di Cirebon pada awal abad ke-20 **82**
Gambar 2.16. Situasi kawasan Pekiringan di Cirebon pada awal abad ke-20 **83**
Gambar 3.1. Ilustrasi kedatangan balatentara Jepang di Jawa pada Maret 1942 **89**
Gambar 3.2. Uang Invasi (*Invasion Money*) terbitan Pemerintah Militer Jepang yang masih menggunakan mata uang Gulden **93**
Gambar 3.3. Seri Uang Nanpatsu terbitan NKG dengan menggunakan mata uang Rupiah, pecahan 5 dan 10 Rupiah **94**
Gambar 3.4. Suasana Pelabuhan Cilacap yang menjadi tempat pengiriman persediaan emas DJB ke luar negeri **96**

Gambar 3.5. Logo pertama Bank Negara Indonesia (BNI) yang didirikan pada tahun 1946 **100**
Gambar 3.6. Uang NICA atau lebih dikenal dengan Uang Merah yang dicetak di *American Bank Note Company,* 1943 **104**
Gambar 3.7. Oeang Republik Indonesia (ORI) sebagai alat pembayaran yang sah di masa Revolusi **106**
Gambar 3.8. Kesibukan Rakyat Menukarkan Uang Jepang dengan ORI di Kantor Pos Pasar Baru, Jakarta 29 Oktober 1946 **111**
Gambar 3.9. Uang RIS sebagai alat pembayaran yang sah pada masa Republik Indonesia Serikat (RIS) **115**
Gambar 3.10. Dr. A. Houwink, Presiden De Javasche Bank berkebangsaan Belanda terakhir sebelum digantikan oleh Mr. Sjafruddin Prawiranegara **116**
Gambar 4.1. Gedung Pabrik Rokok British American Tobacco Company Cirebon pada dekade 1950an **122**
Gambar 4.2. Suasana di dalam pabrik British American Tobacco Cirebon, 5 Maret 1952 **124**
Gambar 4.3. Uang Kertas Bank (UKB) Emisi 1952 pecahan 50 dan 5 rupiah yang ditarik peredarannya pada 1959 **136**
Gambar 4.4. Presiden Sukarno disambut rakyat Cirebon dalam rangka kunjungan kerja ke Cirebon, 7 April 1956 **139**
Gambar 4.5. Wakil Presiden Moh. Hatta mengunjungi koperasi perusahaan rotan di Cirebon 25 Juli 1956 **143**
Gambar 4.6. Presiden Soekarno sedang berpidato dalam rapat raksasa mengganyang Malaysia di Gelora Bung Karno tanggal 28 Juli 1963 **154**
Gambar 4.7. Bank Berdjoang sebagai manifestasi Ekonomi Terpimpin dalam dunia perbankan di mana seluruh bank-bank milik negara harus menjadi alat revolusi **154**
Gambar 5.1. Presiden Soeharto dan Ibu Tien Soeharto pada sebuah perayaan panen raya di Jawa Barat **170**
Gambar 5.2. Kondisi Pabrik Gula Gempol di Palimanan, Kabupaten Cirebon, dari masa ke masa **191**
Gambar 5.3. Situasi Pelabuhan Cirebon sebagai lokasi keluar masuknya barang-barang komoditas dari dan menuju Cirebon **193**
Gambar 5.4. Pasar Induk Tegalgubug yang digadang-gadang sebagai salah satu pasar sandang terbesar di Indonesia dan bahkan di Asia Tenggara **197**
Gambar 5.5. Kawasan pusat industri rotan yang berada di Desa Tegal Wangi, Kecamatan Weru, Cirebon **198**
Gambar 6.1. Kepala KPwBI Cirebon Bakti Artanta (tengah) melepas produk UMKM ke Afrika Selatan **214**
Gambar 6.2. Beberapa kegiatan Kantor BI Cirebon (2019) **222**
Gambar 6.3. Program *On Boarding* UMKM (Pelatihan Pemanfaatan *Platform* Digital) **225**
Gambar 6.4. Pemetaan beberapa potensi UMKM melalui pengembangan klaster dan LED **226**

Gambar 6.5. Hambatan pengembangan UMKM **227**
Gambar 6.6. Klaster hortikultura pakcoy di Kabupaten Indramayu **228**
Gambar 6.7. Klaster Argalingga, Kabupaten Majalengka **231**
Gambar 6.8. Klaster padi di Desa Bugistua, Kabupaten Indramayu **233**
Gambar 6.9. Program Wirausaha Bank Indonesia **239**
Gambar 7.1. Peta Kali Cirebon (Cirbon Revier) akhir abad ke-17 **248**
Gambar 7.2. Peta Cirebon akhir abad ke-17 **249**
Gambar 7.3. Kota Cirebon awal **252**
Gambar 7.4. Denah Kota Cirebon (1866) **256**
Gambar 7.5. Peta Cirebon (1921) **259**
Gambar 7.6. Gedung De Javasche Bank Agentschap Cheribon (tengah) dan Pelabuhan Cirebon di sisi utara **262**
Gambar 7.7. Gedung lama De Javasche Bank dan Sociëteit Phoenix di sampingnya (1901) **262**
Gambar 7.8. Eduard Gerardus Hendricus Hubertus Cuypers (1859-1927) **264**
Gambar 7.9. Sisi belakang uang kertas pecahan Rp500 terbitan 1988 **267**
Gambar 7.10. Gambar rencana Gedung De Javasche Bank Agentschap Cheribon oleh Ed Cuypers en Hulswit (1909) **269**
Gambar 7.11. Gedung Javasche Bank Agentschap Cheribon (1926) **270**
Gambar 7.12. Denah lantai dasar gedung setelah perubahan (1972) **273**
Gambar 7.13. Rencana gedung baru Kantor Bank Indonesia Cirebon **275**
Gambar 7.14. Kompleks Kantor Perwakilan Bank Indonesia Cirebon sekarang **276**
Gambar 7.15. Gedung eks-DJB; Bank Indonesia Cirebon sekarang, tampak samping utara **278**
Gambar 7.16. Tampak samping selatan bangunan **279**
Gambar 7.17. Tampak depan bangunan **280**
Gambar 7.18. Gerbang masuk bangunan **281**
Gambar 7.19. Balkon pada lantai atas **282**
Gambar 7.20. Menara dan kubah **283**
Gambar 7.21. Keraton Kasepuhan, bagian depan, *sitihinggil* atau *lemah duwur* **289**
Gambar 7.22. Keraton Kanoman, di bagian depan, *sitihinggil* atau *lemah duwur* **291**
Gambar 7.23. Masjid Agung Sang Cipta Rasa di Alun-alun Kasepuhan **292**
Gambar 7.24. Masjid Panjunan **294**
Gambar 7.25. Astana Gunung Jati **295**
Gambar 7.26. Tamansari Sunyaragi **296**
Gambar 7.27. Kelenteng Tiao Kak Si atau Vihara Dewi Welas Asih **298**
Gambar 7.28. Gedung Negara, bekas Keresidenan Cirebon **300**
Gambar 7.29. Pendapa, Rumah Dinas Bupati Cirebon **302**
Gambar 7.30. Balai Kota Cirebon **303**
Gambar 7.31. Kompleks Gedung British American Tobacco, Co **304**
Gambar 7.32. Stasiun Kereta Api Kejaksan **306**
Gambar 7.33. Gereja Kristen Pasundan Jemaat Cirebon **307**
Gambar 7.34. Gereja Katolik Santo Yusuf **308**

# DAFTAR TABEL DAN GRAFIK


Tabel 2.1. Produksi dan Jumlah Tenaga Kerja Terserap dalam Perkebunan Komoditas Ekspor Terpenting di Keresidenan Cirebon 1835-80 (dalam metrik ton dan jiwa) **53**
Tabel 3.1. Permintaan Beras di Subdistrik Wilayah Cirebon April-Juni 1944 **90**
Tabel 3.2. Angka Kelahiran dan Kematian di Cirebon pada masa Pendudukan Jepang 1939-44 **90**
Tabel 3.3. Daftar Bupati di Cirebon-syû hingga Akhir Masa Pendudukan Jepang **91**
Tabel 3.4. Nama Kepala DJB Cabang Cirebon 1946-54 **102**
Tabel 3.5. Daftar Mata Uang yang Beredar di Pulau Jawa sesuai Makloemat Presiden Repoeblik Indonesia Nomor 1/10 (3 Oktober 1946) **110**
Tabel 4.1. Nama Perusahaan di Cirebon (1956) **126**
Tabel 4.2. Peredaran Uang di Kantor BI Kas Cabang Cirebon (1955/60) **133**
Tabel 4.3. Daftar Wirausaha di Cirebon (1956) **140**
Tabel 4.4. Kas Besar Berdasarkan Emisi Tahun 1959 Kantor BI Kas Cabang Cirebon **144**
Tabel 4.5. Kas Harian Kantor BI Kas Cabang Cirebon **145**
Tabel 4.6. Peningkatan Volume Peredaran Uang di Kantor BI Kas Cabang Cirebon (1960-63) **153**
Tabel 5.1. Daftar Perubahan Nama Bank Indonesia dan Bank-Bank Umum Milik Pemerintah **162**
Tabel 5.2. Rencana Anggaran Keuangan Daerah Kabupaten Cirebon Tahun Anggaran 1965 (dalam Rupiah) **179**
Tabel 5.3. Keuangan Desa Kabupaten Cirebon Tahun Anggaran 1965 (dalam Rupiah) **180**
Tabel 5.4. Jumlah Nasabah dan Realisasi Kredit KIK menurut Sektor Ekonomi di Kabupaten Cirebon (1981) **182**
Tabel 5.5. Jumlah Nasabah dan Realisasi Kredit KMKP menurut Sektor Ekonomi di Kabupaten Cirebon (1981) **183**
Tabel 5.6. Jumlah Nasabah dan Realisasi Kredit KIK menurut Sektor Ekonomi di Kotamadya Cirebon (1985) **184**
Tabel 5.7. Jumlah Nasabah dan Realisasi Kredit KMKP menurut Sektor Ekonomi di Kotamadya Cirebon (1985) **185**
Tabel 6.1. PDRB atas Dasar Harga Konstan 2010 di Wilayah Cirebon 2010-19 (dalam Juta Rupiah) **209**
Tabel 6.2. Peranan Total Nilai Tambah Bruto atas Dasar Harga Berlaku Setiap Sektor dalam Perekonomian Kota Cirebon 2006-09 dan 2010-13 (Persen) **211**
Tabel 6.3. Perusahaan Industri Rotan di Cirebon **215**
Tabel 6.4. Inflasi Kota Cirebon **221**
Tabel 6.5. Program Kemandirian Ekonomi Pesantren **238**

Bagan 6.1. Struktur Organisasi Kantor Bank Indonesia termasuk KBI Cirebon (1996) **204**
Bagan 6.2. Hasil Klasifikasi Kantor Bank Indonesia Cirebon **205**

# DAFTAR ISI

**Sambutan Gubernur Bank Indonesia... v**
**Sambutan Deputi Gubernur Bank Indonesia... viii**
**Pengantar Kepala Bank Indonesia Institute... x**
**Daftar Gambar... xii**
**Daftar Tabel dan Grafik... xv**
**Daftar Isi... xvi**
**Daftar Istilah... xviii**
**Daftar Singkatan... xxi**

**PENDAHULUAN... 1**

15 **Bab 1 Warisan Tradisi Besar dan Fondasi Ekonomi Modern**

Geografi, Demografi, dan Karakteristik Sosial Kultural... **15**
Tatanan Politik Lokal... **30**

45 **Bab 2 De Javasche Bank dan Ekonomi Kolonial**

Terbentuknya Administrasi Politik Ekonomi Kolonial... **45**
Pendirian De Javasche Bank Agentschap Cheribon... **60**
De Javasche Bank Dan Perkembangan Ekonomi Cirebon... **69**

87 **Bab 3 Transisi Kekuasaan, Perbankan, dan Keuangan 1942-53**

Ekonomi Pendudukan, Nanpô Kaihatsu Ginko, dan Peredaran Uang... **87**
Kembalinya Belanda dan De Javasche Bank Cirebon... **98**
Dualisme Bank Sirkuasi dan Kontestasi Sirkulasi Uang...**105**
Upaya Membangun Sistem Perbankan Nasional... **113**

121 **Bab 4 Langkah-langkah Rekonstruksi 1953-68**

Masalah Sektoral Perekonomian Lokal... **121**
Evolusi Kelembagaan Bank Indonesia... **127**
Nasionalisasi Warisan Ekonomi Kolonial... **132**

Kebijakan Ekonomi Nasional dan Perkembangan Kewirausahaan Lokal... **138**
Krisis Politik dan Ekonomi... **150**

161 **Bab 5 Membangun Ekonomi Era Orde Baru 1968-99**

Restrukturisasi Bank Indonesia dan Stabilisasi Perekonomian... **161**
Kredit Mikro dan Pembangunan Ekonomi Kerakyatan... **167**
Realisasi Program Kredit BI dan Perkembangan UMKM di Cirebon... **177**
Perekonomian Cirebon Pada Masa Orde Baru... **188**

203 **Bab 6 Kiprah Bank Indonesia Cirebon Mutakhir**

Penyempurnaan Kelembagaan... **203**
Pembangunan dan Sektor Ekonomi Kota Cirebon... **208**
Kantor Perwakilan BI Cirebon dan Pembangunan Kota... **218**
Kebijakan Moneter, Sistem Pembayaran dan Sistem Keuangan... **241**

247 **Bab 7 Gedung Kantor Perwakilan Bank Indonesia dan Bangunan Cagar Budaya di Cirebon**

Toponimi dan Morfologi Kota Cirebon... **248**
Perkembangan Kota Cirebon... **254**
Gedung Lama De Javasche Bank... **260**
Gedung Baru De Javasche Bank Agentschap Cirebon... **267**
Gedung Kantor Perwakilan Bank Indonesia Cirebon... **272**
Bangunan Cagar Budaya Kantor Bank Indonesia di Cirebon... **277**
Bangunan Cagar Budaya di Cirebon... **288**

**PENUTUP.. 311**
**DAFTAR ACUAN... 319**

## DAFTAR ISTILAH

| | | |
|---|---|---|
| *Afdeeling* | : | Wilayah administratif masa Hindia Belanda setingkat Kabupaten |
| *Agent* | : | Kepala Kantor Cabang |
| *Agentschap* | : | Kantor Cabang |
| *Agrarische wet* | : | Undang-undang Agraria |
| *Cottage industry* | : | Sebuah industri skala kecil yang dilakukan di rumah (industri rumahan) di mana biasanya berupa industri yang bergerak dalam bidang kerajinan. |
| *Cultuurstelsel* | : | Sistem Tanam Paksa adalah peraturan yang dikeluarkan oleh Gubernur Jenderal Johannes van den Bosch pada tahun 1830 yang mewajibkan setiap desa menyisihkan sebagian tanahnya untuk ditanami komoditas ekspor, khususnya kopi, tebu, teh, dan komoditas ekspor lainnya. |
| Dukuh/pedukuhan | : | Pembagian wilayah administratif di Indonesia yang berkedudukan di bawah Kelurahan atau Desa. Orang yang memimpin padukuhan disebut sebagai kepala dukuh |
| Ekonomi *off-farm* | : | Sektor ekonomi yang menitik beratkan pada sektor selain pertanian |
| *f* (florin) | : | Simbol mata uang gulden (Belanda). Diambil dari kata Florence, nama kota di Italia, tempat peleburan uang koin selama abad pertengahan di Eropa. |
| Factorij | : | Sebutan lain dari NHM (Nederlandsche Handel Maatschappij) |
| *Gemeente* | : | Kotapraja |
| *Glebagan* | : | Sistem pola tanam yang menerapkan perguliran komoditas tanaman. Komoditas tanaman yang digulir adalah padi, palawija dan tebu. |
| *Gunseikanbu* | : | Kepala pemerintahan militer |
| *Hinterland* | : | Daerah penyangga atau daerah penghubung |
| *Intermediaries* | : | Pedagang perantara |
| Jalur Sutera | : | Istilah baru yang muncul pada pengembangan kebudayaan pada periode 1988-1997 oleh UNESCO dengan program *World Decade for Cultural Development*. Kata 'sutra' diambil sebagai metafora dari kelembutan dan kehalusan jalinan-jalinan hubungan antar manusia dan antar budaya yang terbawa serta melalui rute-rute perdagangan yang bersejarah |
| Jung | : | Kapal layar dari Negeri Cina yang digunakan untuk mengangkut muatan orang dan barang |

| | | |
|---|---|---|
| *Klappercultuur* | : | Perkebunan kelapa |
| *Kumiai* | : | Lembaga sejenis koperasi bentukan Jepang yang mengawal perdagangan pada tingkat masyarakat umum yang berpengaruh penting pada berdirinya warung, pertokoan, dan pusat perekonomian desa lainnya |
| L/C (*Letter of Credit*) | : | Surat yang dikeluarkan oleh suatu bank atas permintaan importir (nasabah) yang ditujukan kepada eksportir |
| *Landrente* | : | Sistem sewa tanah |
| *Legal tender* | : | Alat pembayaran berupa uang yang secara resmi diterbitkan oleh pemerintah sebagai alat pembayaran yang sah. |
| *Lender of the Last Resort* | : | Salah satu fungsi dari bank sentral untuk memberikan kredit kepada perbankan karena sumber pembiayaan lain telah tertutup. |
| Malaise | : | Keadaan lesu dan serba sulit di bidang perekonomian. Umumnya digunakan untuk menyebut nama lain dari krisis ekonomi tahun 1930. Salah satu dampaknya adalah komoditas ekspor merosot tajam dan mengakibatkan lesunya perekonomian. |
| Mindring | : | Cara penjualan barang yang pembayarannya dapat diangsur. Pembeli tidak harus menyediakan uang sejumlah harga barang, melainkan melakukan pencicilan dalam kurun waktu tertentu |
| *Momi kyoosyutu* | : | Kewajiban setor padi |
| *Pachtstelsel* | : | Mekanisme politik kolonial di mana pengusaha-pengusaha Tionghoa digandeng untuk menjadi partner dalam pengumpulan pajak di sektor-sektor non-produksi, utamanya sektor jasa, konsumsi, dan perdagangan |
| *Particuliere Landerijen* | : | Tanah-tanah milik pribadi yang sangat luas yang pemilik-pemiliknya dapat disebut tuan-tuan tanah yang mempunyai hak feodal para penyewa tanah mereka, termasuk hak istimewa untuk memungut pajak-pajak pribadi dan tugas-tugas kerja paksa yang berat |
| *Policy-based lending* | : | Pemberian kebijakan kredit selektif berbasis kebijakan yang biasanya dialokasikan ke sektor ekonomi prioritas, baik untuk tujuan ekonomi maupun sosial |
| *Preangerstelsel* | : | Tanam paksa kopi yang diberlakukan di wilayah Priangan pada tahun 1720. Rakyat diwajibkan menanam kopi dan menyetorkan hasilnya ke VOC melalui para priyayi daerah |
| Rentenir | : | Orang yang memberi pinjaman uang tidak resmi atau resmi dengan bunga tinggi. |

| | | |
|---|---|---|
| *Rijksdaalders* | : | Uang koin perak VOC yang dijadikan standar pembayaran pada masa VOC |
| *Romusha* | : | Tenaga kerja paksa |
| *Ronggeng* | : | Tari tradisional dengan penari utama wanita, dilengkapi dengan selendang yang dikalungkan di leher sebagai kelengkapan menari |
| Santri | : | Sebutan bagi seseorang yang mengikuti pendidikan agama Islam di pesantren, biasanya menetap di tempat tersebut hingga pendidikannya selesai. |
| *Son* | : | Wilayah administratif masa pendudukan Jepang setingkat Kecamatan |
| *Syomin Ginko* | : | Bank rakyat |
| *Syu* | : | Wilayah administratif masa pendudukan Jepang setingkat Keresidenan. |
| *Tonarigumi* | : | Satuan pemerintahan terbawah setingkat Rukun Tetangga (RT) yang dibentuk pada masa pendudukan Jepang untuk mengawasi aktivitas warga, serta mendukung kebijakan Politik dan Ekonomi Jepang. |
| Tunaskisma | : | Penduduk yang tidak memiliki tanah |
| *Verplichte Leveranties* | : | Penyerahan hasil panen dari produk-produk tertentu misalnya kopi atau lada, yang harganya ditetapkan secara sepihak oleh kompeni. |

## DAFTAR SINGKATAN/AKRONIM

| | |
|---|---|
| Asmindo | : Asosiasi Industri Permeubelan dan Kerajinan Indonesia |
| AVB | : Algemeene Volkscredietbank |
| BANAS | : Badan Nasionalisasi Perusahaan Belanda |
| BAT | : British American Tobacco |
| BDN | : Bank Dagang Negara |
| BI | : Bank Indonesia |
| Bimas | : Bimbingan Massal |
| BIN | : Bank Industri Negara (BIN) |
| BKTN | : Bank Koperasi, Tani dan Nelayan |
| BNI | : Bank Negara Indonesia |
| BPR | : Bank Perkreditan Rakyat |
| BPS | : Badan Pusat Statistik |
| BRI | : Bank Rakyat Indonesia |
| BRRIS | : Bank Rakyat Republik Indonesia Serikat |
| BTC | : *Banking & Trading Corporation Ltd* |
| BULOG | : Badan Urusan Logistik |
| BUNEG | : Bank Umum Negara |
| CIAYUMAJAKUNING | : Kota Cirebon, Kabupaten Cirebon, Kabupaten Indramayu, Kabupaten Majalengka, dan Kabupaten Kuningan |
| CRO | : Commisie Rechtsverkeer in Oorlogstijd (Komisi Urusan Pemerintahan Pasca Perang) |
| Dekon | : Deklarasi Ekonomi |
| DI/TII | : Darul Islam/Tentara Islam Indonesia |
| DJB | : De Javasche Bank |
| DPR | : Dewan Perwakilan Rakyat |
| ESDP | : *Small Enterprises Development Project* |
| FKI | : Fonds Kemerdekaan Indonesia |
| Hansip | : Pertahanan Sipil |
| HSBC | : Hongkong and Shanghai Bank Corporation |
| HVA | : Handelsvereeniging Amsterdam |
| IGGI | : Inter-Governmental Group on Indonesia |
| IMF | : International Monetary Fund |
| JPS | : Jaring Pengaman Sosial |
| KAM | : Kredit Asrama Mahasiswa |

| | |
|---|---|
| KASAD | : Kepala Staf Angkatan Darat |
| KB | : Koloniale Bank |
| KBI | : Kantor Bank Indonesia |
| KIK | : Kredit Investasi Kecil |
| KLBI | : Kredit Likuiditas Bank Indonesia |
| KMB | : Konferensi Meja Bundar |
| KMI | : Kredit Mahasiswa Indonesia |
| KMK | : Kredit Modal Kerja |
| KMKP | : Kredit Modal Kerja Permanen |
| KNI | : Komite Nasional Indonesia |
| KNID | : Komite Nasional Indonesia Daerah |
| Koperta | : Koperasi Produksi Pertanian |
| KPG | : Kredit Profesi Guru |
| KPR | : Kredit Pemilikan Rumah |
| KPwBI | : Kantor Perwakilan Bank Indonesia |
| KPwDN | : Kantor Perwakilan Dalam Negeri |
| KUD | : Koperasi Unit Desa |
| KUK | : Kredit Usaha Kecil |
| KUM | : Karya Usaha Mandiri |
| KUT | : Kredit Usaha Tani |
| LSM | : Lembaga Swadaya Masyarakat |
| N.V. | : Naamloze Venootschap |
| NHM | : Nederlands Handel Maatschappij |
| NICA | : Netherlands-Indies Civil Administration |
| NIEM | : Nederlandsch Indische Escompto Maatschappij |
| NIHB | : Nederlands-Indische Handelsbank |
| NKG | : Nanpô-Kaihatsu Ginko |
| OCBC | : Overseas Chinese Bank Corporation |
| OJK | : Otoritas Jasa Keuangan |
| ORI | : Oeang Repoeblik Indonesia |
| ORIDAB | : Oeang Repoeblik Indonesia Daerah Banten |
| P.P.N | : Perusahaan Perkebunan Negara |
| P4KCK | : Proyek Percontohan Pengembangan Penyempurnaan Kredit Candak Kulak |
| PBB | : Perserikatan Bangsa-Bangsa |

| | |
|---|---|
| PCPM | : Program Pendidikan Calon Pegawai Muda |
| PD II | : Perang Dunia II |
| PDM-DKE | : Program Pemberdayaan Daerah dalam Mengatasi Dampak Krisis Ekonomi |
| PDRB | : Produk Domestik Regional Bruto |
| PHBK | : Program Pengembangan Hubungan Bank-KSM |
| PKI | : Partai Komunis Indonesia |
| PMA | : Penanaman Modal Asing |
| PPKKP | : Program Pusat Pelayanan Kredit Koperasi Pedesaan |
| PPUK | : Proyek Pengembangan Usaha Kecil |
| PRRI | : Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia |
| PSBI | : Program Sosial Bank Indonesia |
| *Rds* | : *Rijksdaalders* |
| RIS | : Republik Indonesia Serikat |
| RUPS | : Rapat Umum Pemegang Saham |
| Satpam | : Satuan Pengamanan |
| SCS | : *Semarang-Cheribon Stroomtram Maatschappij* |
| SIMASKOT | : Simpanan Masyarakat Kota |
| SIMPEDES | : Simpanan Masyarakat Pedesaan |
| SKKK | : *Saibai Kigyô Kanri Kôdam* |
| STP | : Sistem Tanam Paksa |
| TB | : Taiwan Bank |
| TIR | : Tebu Inti Rakyat |
| TNI | : Tentara Nasional Indonesia |
| UED-SP | : Usaha Ekonomi Desa-Simpan Pinjam |
| UKB | : Uang Kertas Bank |
| UKP | : Uang Kertas Pemerintah |
| UMKM | : Usaha Mikro, Kecil dan Menengah |
| UP2K | : Usaha Peningkatan Penghasilan Keluarga |
| UPPB | : Urusan Pengawasan dan Pembinaan Bank |
| VOC | : Vereenigde Oost-indische Compagnie |
| YSB | : Yokohama Specie Bank |

# PENDAHULUAN

## Latar belakang

Bank Indonesia Cirebon merupakan salah satu kantor perwakilan Bank Indonesia yang memiliki sejarah yang sangat panjang dan menarik. Sejarahnya panjang karena – seperti halnya beberapa kantor cabang Bank Indonesia lainnya – akarnya membentang hingga ke periode kolonial di pertengahan abad ke-19, sewaktu bernama De Javasche Bank *Agentschap* Cirebon yang resmi didirikan pada tanggal 26 Juli 1866. Selain itu, sejarahnya menarik karena ia merupakan kantor perwakilan De Javasche Bank kelima setelah setelah Semarang (1829), Surabaya (1829), Padang (1864), dan Makassar (1864). Ini artinya, dalam konteks ekonomi kolonial waktu itu kantor *Agentschap* Cirebon ini merupakan yang pertama di luar kota-kota utama sebagai pusat aktivitas ekonomi dan komersial kolonial di Jawa, yaitu Batavia, Semarang, dan Surabaya. Ini menunjukan posisi Cirebon sendiri yang cukup strategis dalam peta perkembangan ekonomi-politik pada waktu itu, sehingga pemerintah kolonial dan manajemen DJB memandang perlu untuk membuka kantor perwakilan di Kota Cirebon. Daya tarik lain adalah tentunya terkait sejarah Kota Cirebon sendiri sebagai salah satu kota pelabuhan tertua di Jawa yang menjadi mata rantai perekonomian regional, sekaligus tempat berkembangnya Kesultanan Cirebon, salah satu pusat kekuatan Islam awal di pantai utara Jawa sejak akhir abad ke-15.

Oleh karena itu, untuk memahami sejarah Bank Indonesia Cirebon dan perannya dalam perekonomian lokal, maka sudah seharusnya diskusi diawali dengan pembahasan tentang akar sejarahnya sejak periode

kolonial dan perkembangannya dalam kerangka transformasi ekonomi setempat hingga periode mutakhir. Untuk memahami sejarah awal dan perkembangan DJB lokal ini, maka perlu diketahui pula makna penting wilayah Cirebon dalam konteks politik-ekonomi kolonial. Dalam konteks itulah, maka perlu pula dibahas tentang potensi ekonomis dan sejarah perkembangan wilayah ini sejak masa pra-kolonial atau awal kolonial, dan bagaimana ia menjadi bagian dari wilayah kolonial dan kemudian menjadi salah satu daerah terpilih untuk mengembangan lembaga ekonomi modern seperti DJB ini, mengingat sebelumnya ia merupakan wilayah yang dikuasai oleh kekuatan politik lokal, yaitu Kesultanan Cirebon.

Sebagai sebuah konsep geografis nama Cirebon sendiri mengalami sejumlah perubahan penting. Secara kronologis, pertama-tama ia merupakan nama dari sebuah wilayah pemukiman kecil di sekitar Pelabuhan Muara Jati, yang kemudian berkembang menjadi salah satu mata rantai 'jalur sutra' dan menjadi pusat kerajaan Islam Cirebon.[1] Pada puncak kejayaannya, Kesultanan Cirebon menguasai wilayah yang cukup luas hingga ke daerah pedalaman seperti Talaga dan Rajagaluh di sebelah selatan dan Indramayu dan Sumedang di sebelah barat.[2] Pada masa kolonial, terutama sejak awal abad ke-19, nama Cirebon digunakan untuk menyebut nama sebuah kabupaten dan ibukota Keresidenan. Keresidenan Cirebon sendiri meliputi sebagian besar wilayah yang sebelumnya merupakan wilayah Kesultanan Cirebon, yaitu Kabupaten Cirebon, Kabupaten Indramayu, Kabupaten Kuningan, Kabupaten Majalengka dan Kabupaten Galuh/Ciamis, yang belakangan digabungkan dengan Keresidenan Priangan.[3] Kota Cirebon sendiri pada tahun 1906, ditetapkan sebagai sebuah *gemeente* atau kotapraja, yang terpisah dari Kabupaten Cirebon. Kedua wilayah administratif tersebut, yaitu Kabupaten Cirebon dan *Gemeente* Cirebon, menjadi konsep geografis terakhir yang digunakan pada masa kemerdekaan dan bertahan hingga saat ini.

Pemahaman mengenai perubahan konsep geografis menyangkut Cirebon ini penting diperhatikan karena terkait dengan wilayah kerja dari

1 Adeng, dkk, (1998), hlm. 1.

2 Singgih Tri Sulistyono (1995)

3 Jan Breman (2014).

DJB *Agentschap* Cirebon sendiri. Sebagaimana *agentschap* yang lainnya, DJB *Agentschap* Cirebon sendiri awalnya diproyeksikan untuk melayani kebutuhan layanan perbankan di wilayah Keresidenan Cirebon, meskipun penduduk dari luar wilayah itu, seperti dari Tegal atau Brebes juga ikut memanfaatkan. Cakupan wilayah tersebut, meskipun tidak sepenuhnya sama namun dalam tingkat tertentu diteruskan oleh Bank Indonesia Cirebon. Oleh karena itu, meskipun terfokus pada wilayah Kota dan Kabupaten Cirebon sebagai wilayah kerja utama (*core area*) dari Bank Indonesia Cirebon, diskusi buku ini juga mencakup wilayah-wilayah yang sebelumnya masuk dalam wilayah Keresidenan Cirebon, terutama ketika pembahasan menyangkut kinerja DJB *Agentschap* Cirebon dan peran ekonominya disepanjang periode kolonial.

Tidak bisa dipungkiri, pendirian DJB *Agentschap* Cirebon pada tahun 1866 adalah terkait dengan potensi ekonomi dan posisi strategis wilayah ini serta kepentingan politik ekonomi kolonial untuk mengeksploitasinya. Secara geografis, wilayah Cirebon dan sekitarnya merupakan wilayah dataran tinggi dan rendah yang dialiri oleh banyak sungai sehingga tanahnya subur, cocok untuk pertanian pangan dan perkebunan komoditi ekspor. Selain itu, Cirebon juga memiliki infrastruktur transportasi yang lengkap, yaitu pelabuhan dan Jalan Raya Pos, yang menghubungkannya dengan kota dan wilayah lain di Nusantara. Atas pertimbangan itulah, maka wilayah Cirebon dijadikan sebagai bagian dari pengembangan ekonomi perkebunan komoditi ekspor di bawah Sistem Tanam Paksa (STP) sejak tahun 1830an. Sejak saat itu, Cirebon dan sekitarnya menghasilkan sejumlah produk ekspor penting bagi pemerintah kolonial, utamanya gula, kopi, dan indigo. Eksploitasi kapitalistik tersebut berlanjut pada periode-periode berikutnya oleh para pengusaha swasta Eropa dan Tionghoa, sesudah diakhirinya STP pada tahun 1870an. Jelas kiranya, pembukaan DJB *Agentschap* Cirebon memiliki kaitan erat dengan 'liberalisasi' ekonomi tersebut dan dalam rangka modernisasi ekonomi lebih lanjut di wilayah tersebut.

Pembukaan pedalaman Cirebon melalui STP dan kemudian melalui investasi swasta hingga tahun 1930an, telah menyebabkan terjadinya transformasi ekonomi di wilayah tersebut. Kehadiran DJB mempercepat proses tersebut, dan semakin memperdalam ekspansi kapitalistik di satu

sisi dan memperkuat integrasi wilayah ini dengan wilayah lain di Nusantara dan bahkan dengan pasar dunia. Dalam proses tersebut, jelas kelompok Eropa – baik yang bekerja di sektor pemerintahan maupun swasta dan para pengusaha Tionghoa dan Timur Asing lain serta segelintir elite lokal merupakan kelompok yang paling diuntungkan. Penduduk kebanyakan bisa dikatakan hanya menjadi objek eksploitasi dari struktur ekonomi kolonial yang ekstraktif tersebut, dan lembaga perbankan modern seperti DJB tidak memiliki perhatian terhadap kondisi dan kehidupan mereka. Perubahan kebijakan kolonial terjadi di awal abad ke-20, namun hal itu tidak memberikan pengaruh besar secara ekonomis. Struktur ekonomi kolonial di Cirebon dan sekitarnya, seperti halnya di wilayah lain di Nusantara, masih terpasung dalam kerangka ekonomi yang dualistik, di mana ekonomi Barat dan Tionghoa berkembang pesat mengangkangi ekonomi Bumiputra yang tertatih-tatih dalam lingkaran subsisten.[4] Meskipun demikian, ini tidak berarti bahwa masyarakat Bumiputra pasif menerima keadaan, sebaliknya penduduk Cirebon dan sekitarnya terbukti aktif memanfaatkan kesempatan-kesempatan ekonomi yang ada, betapa pun itu terbatas skalanya. Mereka berhasil mengembangkan berbagai aktivitas produktif, baik di sektor pertanian maupun di luar pertanian, seperti kerajinan, industri rumah tangga, perdagangan, dan sebagainya. Meskipun secara umum masih dalam skala terbatas, ekonomi Bumiputra tersebut terbukti lebih tahan banting (*resilience*) dalam menghadapi guncangan ekonomi dan politik, seperti pada masa Depresi Ekonomi tahun 1930an dan peperangan di sepanjang 1940an, dibandingkan sektor ekonomi Barat yang modern dan padat modal-teknologi.

Kenyataan historis tersebut, tentunya disadari sepenuhnya oleh Pemerintah Indonesia sewaktu mengambil alih DJB untuk mengubahnya menjadi bank nasional, Bank Indonesia pada tahun 1953. Sebagai bank sentral sebuah negara yang baru merdeka dan berdaulat, Bank Indonesia melakukan reorganisasi dan perubahan orientasi program. Selain membantu melakukan rekonstruksi ekonomi nasional dan mendukung program pemerintah pusat, Bank Indonesia Cirebon melibatkan diri secara langsung dalam proses rekonstruksi ekonomi dan revitalisasi

4 J.H. Boeke (1953).

lembaga-lembaga ekonomi lokal. Pendek kata, Bank Indonesia Cirebon melakukan 'dekolonisasi' terhadap warisan kelembagaan DJB dan merumuskan berbagai program untuk memperkuat ekonomi nasional dan lokal. Melalui berbagai program kredit, pendampingan dan fasilitasi, Bank Indonesia Cirebon berperan aktif dalam mengembangkan ekonomi kerakyatan yang ditulangpunggungi oleh usaha kecil dan menengah (UKM) di sektor pertanian, industri rumah tangga, kerajinan, perdagangan dan jasa. Dalam perkembangannya kemudian, kontribusi UKM dalam struktur perekonomian lokal di wilayah Cirebon dan sekitarnya terus menunjukan peningkatan dari waktu ke waktu, sehingga menegaskan posisinya sebagai sektor ekonomi utama di Kawasan ini.

Demikianlah, DJB Agentschap Cirebon yang kemudian berubah menjadi Bank Indonesia Cirebon, berada dalam posisi sentral dan bahkan memainkan peran strategis dalam proses tranformasi ekonomi wilayah Cirebon dan sekitarnya, dari sebuah ekonomi kolonial menjadi ekonomi nasional. Proses historis yang membentang hampir satu setengah abad tersebut, merupakan bagian penting dari perjalanan wilayah ini sebagai bagian dari sejarah Indonesia secara keseluruhan. Oleh karena itu, sejarah tersebut sangat penting untuk dituliskan dan diketahui bersama, tidak hanya oleh Bank Indonesia sebagai salah satu lembaga negara, tetapi juga oleh seluruh masyarakat Indonesia. Fakta bahwa kajian tentang sejarah DJB *Agentschap* Cheribon dan Bank Indonesia Cirebon sendiri belum banyak dilakukan, memperkuat makna penting penulisan buku ini. Dengan demikian, diharapkan buku ini bisa menjadi sumbangan awal bagi penelitian tentang sejarah perbankan di wilayah Cirebon dan sekitarnya.

## Fokus dan Permasalahan Buku Ini

Sebagaimana dikemukakan di atas, buku ini membahas tentang perjalanan sejarah Bank Indonesia Cirebon, sejak awal pendiriannya sebagai De Javasche Bank Agentschap Cirebon hingga kondisi mutakhirnya saat ini. Selain fokus pada sejarah kelembagaan, buku ini juga membahas tentang kontribusi lembaga tersebut terhadap perkembangan ekonomi di wilayah

Cirebon dan sekitarnya. Sebagai sebuah lembaga ekonomi modern, perjalanan sejarah DJB Cirebon dan kemudian Bank Indonesia Cirebon, tentu tidak bisa dilepaskan dari fungsinya sebagai penyedia layanan keuangan dan moneter seperti kredit, pertukaran uang, pengawasan perbankan, dan sebagainya. Oleh karena itu, sejarah DJB Cirebon – Bank Indonesia Cirebon tidak bisa dilepaskan dari sejarah ekonomi dan aspek-aspek lain yang terkait dari wilayah tersebut.

Permasalahan utama yang diangkat dalam buku ini adalah bagaimana peran dan kontribusi DJB *Agentschap* Cheribon dan Bank Indonesia Cirebon terhadap perkembangan ekonomi Cirebon dan sekitarnya sejak awal berdiri hingga saat ini, serta bagaimana 'warisan sejarah' lembaga ini bisa diinventarisi dan dilembagakan. Dengan demikian cakupan waktu buku ini membentang sejak pertengahan abad ke-19 hingga awal abad ke-21. Meskipun demikian, untuk memberikan konteks historis dan kelembagaan yang lebih luas bagi seluruh pembahasan buku ini, maka periode sebelum abad ke-19 juga dibahas. Adapun cakupan geografis pembahasan buku ini adalah wilayah Kota dan Kabupaten Cirebon dewasa ini, yang merupakan wilayah kerja inti dari Bank Indonesia Cirebon. Namun dikarenakan pertimbangan historis dan keterkaitan wilayah ini dengan wilayah sekitarnya, maka cakupan pembahasan buku ini juga menyentuh wilayah-wilayah lain di sekitarnya, yaitu Kabupaten Indramayu, Kuningan, dan Majalengka. Secara keseluruhan wilayah-wilayah tersebut merupakan bekas wilayah Keresidenan Cirebon pada masa kolonial.

## Tujuan Penulisan Buku

Penulisan buku dimaksudkan sebagai upaya untuk menggali dan melestarikan *institutional memory* Bank Indonesia, melalui proses inventarisasi, perekaman, penulisan, sosialisasi, dan pelestarian memori kolektif lembaga. Buku ini merupakan bagian dari seri buku sejarah dan *heritage* 16 Kantor Perwakilan Bank Indonesia yang memiliki jejak panjang sejak periode De Javasche Bank. Buku ini diharapkan tidak hanya bermanfaat sebagai sumber pengetahuan bagi insan Bank Indonesia, namun juga bagi masyarakat secara keseluruhan. Buku ini diharapkan bisa

menambah kesadaran sejarah masyarakat terhadap peran Bank Indonesia dalam mengawal perkembangan ekonomi lokal tetapi juga nasional. Dari sisi akademis, buku ini bisa memberikan kontribusi terhadap pengayaan historiografi Indonesia, terutama terkait dengan sejarah Bank Indonesia dan ekonomi perbankan dalam konteks kelokalan, khususnya tentang sejarah Bank Indonesia di kota Cirebon dan sekitarnya.

## Pendekatan, Sumber dan Metode Penelitian

Untuk memperoleh gambaran yang lengkap tentang perjalanan sejarah DJB *Agentschap* Cirebon dan kemudian Bank Indonesia Cirebon, penulisan buku ini menggunakan pendekatan sejarah kelembagaan, yang sebenarnya lebih banyak digunakan dalam kajian sejarah politik.[5] Dengan pendekatan tersebut, buku ini mencoba mengkonstruksikan 'biografi' dari lembaga tersebut beserta lingkungan yang turut membentuk perjalanan sejarahnya tersebut. Selain itu, pendekatan kelembagaan memahami DJB/BI sebagai sebuah lembaga, organisasi atau institusi formal yang pengelolaan atau fungsinya diatur berdasarkan peraturan atau hukum tertulis.[6] Dalam kerangka pendekatan tersebut, maka pembahasan difokuskan pada aspek manajemen, kepemimpinan, pilihan program, serta keterkaitannya dengan lembaga-lembaga lain dan lingkungan di sekitarnya dalam menjalankan fungsinya sebagai lembaga ekonomi modern. Dari sudut pandang politik, DJB dan BI merupakan lembaga resmi yang bekerja dalam kerangka kelembagaan yang menaunginya, sehingga dalam prakteknya ia dipengaruhi oleh lingkungan sosial politik di sekitarnya. Dalam konteks itulah, lingkungan sosial politik eksternal seringkali memainkan peran penting dalam bekerjanya lembaga tersebut sama pentingnya dengan faktor-faktor internal, seperti kepemimpinan, ideologi atau visi/misi organisasi.[7]

Namun demikian, DJB dan BI bukanlah sebuah lembaga ekonomi, politik atau perbankan biasa. Ia merupakan bank sentral, walaupun

5 Lihat dalam Kuntowijoyo (2003: 178)

6 Mark Bevir (2009)

7 R. Murray (2010).

pada masanya DJB juga memainkan peran sebagai bank komersial, yang memiliki kedudukan dan fungsi khusus dalam sebuah negara modern, yaitu di antaranya sebagai penjaga stabilitas moneter, menerbitkan dan menyebarkan mata uang, dan pengatur lembaga perbankan. Dalam literatur, bank sentral digambarkan sebagai lembaga baru yang kemunculan dan perkembangannya berkaitan erat dengan pembentukan negara-negara modern, di sepanjang abad ke-19 dan ke-20. Asumsinya adalah pada saat negara-negara baru terbentuk, maka pendirian sebuah bank sentral merupakan bagian esensial dari pembentukan identitas dan kedaulatan politik negara tersebut.[8] Asumsi tersebut sangat tepat untuk diterapkan dalam konteks sejarah Bank Indonesia, yang pembentukannya menjadi bagian dari upaya menegakan identitas dan kedaulatan Indonesia sebagai negara baru. Selain itu, dalam perkembangannya Bank Indonesia berusaha membedakan dirinya dengan lembaga sebelumnya yang lebih merepresentasikan 'lingkungan politik-ekonomi kolonial' serta merumuskan arah kelembagaan dan kebijakan yang lebih sesuai dengan 'lingkungan politik ekonomi baru', yaitu Indonesia yang merdeka.

Dalam konteks sejarah Bank Indonesia Cirebon, arah baru kebijakan yang dimaksud adalah dengan menjadikan penguatan dan pemberdayaan ekonomi kerakyatan sebagai program prioritas. Hal ini merupakan antitesis dari kebijakan DJB *Agentschap* Cirebon di masa sebelumnya yang lebih memihak ekonomi kapitalis para pengusaha swasta Eropa dan Tionghoa. Ekonomi kerakyatan yang dimaksud mengikuti pendapatnya Mubyarto (1999), yaitu sektor ekonomi yang dikelola secara demokratis oleh rakyat kecil dan ditujukan untuk kemakmuran mereka secara bersama-sama. Dalam wujudnya yang paling sederhana, ekonomi kerakyatan tersebut berisikan usaha-usaha kecil dan menengah (UKM) yang dikelola oleh rakyat secara swadaya, kekeluargaan, dan berkedaulatan di sektor pertanian, kerajinan, perdagangan, dan sebagainya. Dalam literatur sejarah ekonomi, wilayah Cirebon sering digambarkan sebagai wilayah di mana ekonomi kerakyatan di sektor pertanian dan non-pertanian berkembang pesat bahkan sejak periode kolonial dan berlanjut hingga

8 Piet Clement (2008: 1-3).

ke periode kemerdekaan, sehingga keberadaannya bisa menjadi ciri khas ekonomi wilayah ini.[9] Oleh karena itu, buku ini menekankan bahwa kontribusi dan peran sentral Bank Indonesia Cirebon di wilayah Cirebon dan sekitarnya adalah dalam memperkuat sektor ekonomi kerakyatan di wilayah ini, terutama sejak periode kemerdekaan.

Dengan kerangka pikir seperti itu, maka sumber-sumber sejarah yang digunakan buku ini meliputi sumber-sumber primer, sekunder dan tersier. Beberapa sumber primer yang dimaksud adalah arsip-arsip yang diproduksi oleh lembaga ini mulai dari periode De Javasche Bank hingga periode Bank Indonesia. Arsip-arsip ini terdapat di koleksi arsip De Javasche Bank dan arsip Bank Indonesia, di unit penyimpanan arsip Bank Indonesia. Kemudian, arsip-arsip dan publikasi resmi pemerintah kolonial terutama yang berkaitan dengan kebijakan ekonomi, keuangan, perkreditan, dan perpajakan, yang sebagian besar disimpan di Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) dan sebagian lain di Perpustakaan Nasional Republik Indonesia (PNRI). Tidak kalah penting adalah kesaksian langsung dari para pelaku sejarah, utamanya mantan pegawai BI Cirebon tentang pengalaman mereka di lembaga tersebut. Adapun sumber-sumber sekunder, utamanya adalah adalah koran-koran sezaman yang terbit pada masa kolonial hingga masa kemerdekaan, yang sebagian besar bisa ditemukan di PNRI. Literatur dan publikasi ilmiah merupakan sumber tersier yang digunakan untuk melengkapi sumber-sumber primer dan sekunder di atas.

Hanya saja catatan khusus harus diberikan terkait proses pengumpulan sumber-sumber sejarah yang diperlukan tersebut. Pertama-tama, secara prinsipil penelitian untuk buku ini tentunya dilakukan dengan mengikuti prosedur baku dalam metode penelitian sejarah, yang meliputi empat tahapan, yakni heuristik, kritik, interpretasi (analisis), dan penulisan. Namun demikian, khusus untuk tahapan heuristik atau pengumpulan sumber harus dilakukan secara online dengan mengandalkan sumber-sumber digital yang tersedia di sejumlah data base virtual yang bersifat terbuka (*open-access*). Langkah dipilih karena secara kebetulan jadwal

9 Padmo (1991, 2000) dan Fernando (1998).

penelitian untuk penulisan buku ini bersamaan dengan merebaknya Pandemi Covid-19 yang mulai menghantam Indonesia sejak bulan Maret 2020. Akibatnya, semua lembaga penyimpanan arsip dan dokumen sejarah serta perpustakaan yang koleksinya dibutuhkan penelitian ini harus menutup pelayanannya bagi para peneliti sesuai anjuran Pemerintah Indonesia. Kondisi ini tentu saja menjadi pukulan bagi tim peneliti, karena harus membatalkan penelitian lapangan yang diagendakan, sehingga harus mencari jalan alternatif agar penelitian bisa terus berjalan.

Salah satu alternatif yang dipilih adalah dengan melakukan *digital heuristic* dengan mengunjungi berbagai sumber-sumber sejarah digital terkait sejarah Indonesia. Salah satu laman yang sangat penting adalah *delpher.nl* yang dikelola Perpustakaan Nasional Kerajaan Belanda. Laman tersebut memuat secara lengkap hampir semua surat kabar dan sejumlah besar artikel dan buku digital yang pernah terbit di Hindia Belanda, sejak abad ke-18 hingga pertengahan abad ke-20. Selain itu, laman yang dikelola oleh Perpustakaan Nasional Australia (*https://trove.nla.gov.au/*) dan Singapura (https://eresources.nlb.gov.sg/newspapers/), perpustakaan Universitas Leiden juga sangat membantu upaya pengumpulan sumber yang dibutuhkan. Kesulitan terbesar dalam proses *digital heuristic* justru muncul ketika tim peneliti berusaha mengumpulkan sumber-sumber sejarah terkait periode pendudukan Jepang, periode revolusi kemerdekaan dan periode kemerdekaan. Kondisi ini terasa ironis, karena justru arsip-arsip terkait Bank Indonesia pada periode-periode yang lebih mutakhir tidak banyak ditemukan. Untungnya, *Focus Group Discussion* dengan sejumlah mantan pegawai Bank Indonesia Cirebon bisa tetap dilaksanakan melalui format online. Ini bisa sedikit mengurangi kesulitan untuk menemukan sumber-sumber sejarah.

Mengingat Pandemi Covid-19 belum menunjukan tanda-tanda akan berakhir – bahkan hingga proses akhir penulisan dan *editing* hasil penelitian ini – maka penelitian tetap harus dilanjutkan dengan semua keterbatasan yang ada. Berkat kerjasama yang baik antara tim peneliti dengan tim Bank Indonesia Institute dan Bank Indonesia Cirebon, kekurangan data historis bisa diminimalisasi, dan tim peneliti bisa melanjutkan penelitian ke tahapan berikutnya, yaitu kritik dan interpretasi. Dan, akhirnya penulisan

buku ini secara keseluruhan bisa diselesaikan sesuai dengan target waktu yang ditetapkan.

Secara umum, buku ini ditulis dengan mengikuti prosedur ilmiah yang baku sehingga bisa terjaga kualitasnya. Namun demikian, buku ini disajikan dalam format dan gaya bahasa yang lebih popular dengan harapan bisa diakses oleh khalayak pembaca yang luas, tidak hanya kalangan akademis, pembuat kebijakan, namun juga masyarakat luas penikmat sejarah. Oleh karena itu, penyusunan buku ini mempertimbangkan empat unsur ideal sebuah buku, yaitu *uniqueness* (keunikan), *novelty* (kebaruan), *attractiveness* (menarik), dan *accessability* (aksesabilitas). Isi buku ini berusaha mengisi ruang-ruang kosong yang belum dituliskan oleh buku-buku lainnya. Salah satu contohnya adalah dengan memanfaatkan sumber-sumber sejarah dari arsip De Javasche Bank milik Bank Indonesia yang belum banyak dimanfaatkan oleh sejarawan dan peneliti Indonesia.

## Sistematika Pembahasan

Mengikuti format seri buku sebelumnya, pembahasan buku ini dibagi menjadi delapan bab, dengan rincian sebagai berikut: Diawali dengan sebuah pendahuluan yang berisi penjelasan tentang latar belakang, alasan dan tujuan penulisan buku ini, pendekatan, metode penelitian dan sumber-sumber yang digunakan, serta sistematika pembahasan. Selanjutnya Bab Pertama membahas tentang warisan tradisi besar dan fondasi ekonomi modern di wilayah Cirebon. Tradisi besar yang dimaksud mencakup tatanan politik lokal,di mana Keraton atau Kesultanan menjadi poros utamanya, sedangkan fondasi ekonomi modern meliputi struktur geografis, demografis dan karakter sosial kultural masyarakat Cirebon. Secara keseluruhan bab ini menjadi pembuka wacana sekaligus landasan bagi pembahasan di bab-bab berikutnya.

Bab Dua mendiskusikan tentang pendirian De Javasche Bank Agentschap Cirebon dan perannya dalam perekonomian kolonial di Cirebon dan sekitarnya. Pembahasan diawali dengan proses

pembentukan administrasi politik dan ekonomi kolonial, yang tonggaknya sebenarnya mulai ditancapkan sejak pertengahan abad ke-18, ketika VOC (*Vereeniging Oost-Indische Compagnie*) secara perlahan mulai mengikis basis politik Keraton-keraton Cirebon. Proses ini menguat seiring dengan pembentukan negara kolonial Hindia Belanda di awal abad ke-19, dan dimulainya eksploitasi ekonomi perkebunan melalui Sistem Tanam Paksa (STP). Penerapan STP sendiri merupakan pembuka jalan bagi pengembangan ekonomi perkebunan komoditi ekspor, modernisasi infrastruktur ekonomi, dan liberalisasi ekonomi lokal. Semua itu, menjadi latar pendirian De Javasche Bank *Agentschap* Cirebon, yang kemudian menjadi motor penggerak ekonomi Barat di wilayah Cirebon dan sekitarnya, dengan tanpa memberikan ruang bagi penduduk dan ekonomi Bumiputra.

Bab Tiga berisikan uraian rinci tentang periode transisi kekuasaan, perbankan dan keuangan. Pembahasan dimulai dengan periode pendudukan Jepang (1942-1945) yang diwarnai pengambilalihan DJB oleh penguasa militer Jepang, penerbitan mata uang baru, dan penerapan berbagai kebijakan ekonomi perang di wilayah Cirebon dan sekitarnya, termasuk romusha yang kejam dan pengumpulan beras yang mengakibatkan kelaparan. Kemudian dibahas pula tentang periode perang kemerdekaan yang dimulai sejak takluknya tantara Jepang kepada sekutu, dilanjutkan dengan kedatangan tantara sekutu dengan membonceng Belanda. Tentara Belanda kemudian menghidupkan kembali DJB dan mengedarkan mata uang baru yang dikenal uang NICA. Merespons langkah Belanda tersebut, para pemimpin Republik tidak saja melakukan perlawanan secara militer, tetapi juga dengan mengeluarkan mata uang sendiri (Oeang Republik Indonesia, ORI) untuk menandingi uang NICA tersebut. Kondisi tersebut menciptakan 'perang uang' yang berlangsung hingga berakhirnya peperangan. Untuk merayakan pengakuan kedaulatan dan kemerdekaan Indonesia, para pemimpin Republik juga berupaya membangun sistem perbankan nasional, yaitu dengan mendirikan bank nasional dan kemudian dengan menasionalisasi De Javasche Bank dan bank-bank kolonial lainnya.

Selanjutnya Bab Empat menguraikan tentang langkah-langkah rekonstruksi yang diambil Pemerintah Republik Indonesia selepas pengakuan kedaulatan secara penuh oleh Pemerintah Kerajaan Belanda, hingga berakhirnya pemerintahan Presiden Sukarno. Pembahasan dibuka dengan berbagai permasalahan ekonomi yang dihadapi pemerintah Cirebon, utamanya kerusakan infrastruktur, ketiadaan modal, dan instabilitas ekonomi-politik. Kemudian dibahas pula proses kelembagaan Bank Indonesia pasca nasionalisasi dan bagaimana pelaksanaan kebijakan nasionalisasi terhadap sektor-sektor lain di wilayah Cirebon dan sekitarnya. Selain itu, dibahas pula pelaksanaan kebijakan afirmasi ekonomi untuk mendorong perkembangan kewirausahaan bumiputra di wilayah ini. Pembahasan ditutup dengan uraian mengenai krisis ekonomi dan politik di awal tahun 1960an yang memuncak pada meledaknya peristiwa G30S dan kekerasan terhadap anggota dan simpatisan PKI; sebuah peristiwa yang turut menghancurkan sendi-sendi perekonomian nasional dan lokal.

Bab Lima menjabarkan secara ringkas peran Bank Indonesia Cirebon dalam membangun perekonomian Orde Baru di wilayah Cirebon dan sekitarnya. Ada sejumlah topik yang dibahas di dalamnya, yang diawali dengan diskusi tentang restrukturisasi Bank Indonesia dan upaya pemerintah pusat untuk memulihkan inflasi dan stabilitas perekonomian secara umum. Poin berikutnya yang dibahas adalah tentang program kredit mikro yang dicanangkan Pemerintah Orde Baru untuk mendorong dan memperkuat ekonomi kerakyatan. Poin ini terkait dengan poin pembahasan berikutnya yang menguraikan secara ekstensif tentang realisasi program-program kredit tersebut, terutama di wilayah Kota dan Kabupaten Cirebon beserta dampaknya bagi perekonomian kedua wilayah tersebut. Pembahasan bab ini ditutup dengan uraian tentang perkembangan makro perekonomian wilayah Cirebon selama masa Orde Baru.

Bab Enam membahas tentang kiprah Kantor Perwakilan Bank Indonesia Cirebon pada masa mutakhir, sejak runtuhnya Orde Baru hingga sekitar pertengahan 2010an. Pembahasan tersebut diawali dengan review singkat mengenai penyempurnaan kelembagaan KPwBI Cirebon, kemudian dilanjutkan dengan ulasan singkat tentang

pembangunan ekonomi yang dilakukan oleh pemerintah Kota Cirebon. Peran dan kontribusi Bank Indonesia Cirebon dalam program-program pembangunan di sekitar Kota Cirebon dibahas pada bagian berikutnya. Pembahasan bab ini ditutup dengan diskusi singkat mengenai pelaksanaan kebijakan moneter, sistem pembayaran, dan sistem keuangan di wilayah Kota dan Kabupaten Cirebon.

Bab Tujuh merupakan bab khusus yang berbeda dengan bab-bab sebelumnya, karena pembahasannya difokuskan pada aspek-aspek arsitektural gedung eks-De Javasche Bank Cirebon dan upaya pelestariannya sebagai bangunan cagar budaya, yang dilengkapi dengan berbagai ilustrasi visual yang kaya. Pembahasan dimulai dengan uraian historis tentang perkembangan morfologi kota Cirebon, dari sebuah kota tradisional menjadi kota kolonial. Kemudian pembahasan dilanjutkan dengan sejarah perkembangan bangunan dan arsitektur Gedung De Javasche bank hingga ke periode Bank Indonesia. Berdasarkan uraian di dua bagian sebelumnya, bagian terakhir bab ini mengkaji berbagai upaya-upaya yang dilakukan oleh berbagai pemangku kepentingan (*stakeholders*) untuk mewujudkan Bangunan eks-De Javasche Bank tersebut sebagai Bangunan Cagar Budaya, sebagai bagian penting dari warisan sejarah Cirebon yang perlu dilestarikan.

Akhirnya Bab Delapan menjadi penutup seluruh pembahasan buku ini. Bab ini menyajikan kesimpulan dan temuan-temuan penting dari seluruh pembahasan buku ini. Selain itu, berdasarkan temuan-temuan tersebut, dirumuskan sejumlah poin yang bisa diproyeksikan sebagai bahan pembelajaran (*lesson learned*) bagi insan Bank Indonesia, para peneliti, pembaca dan masyarakat luas, terutama dari kalangan generasi muda yang tertarik untuk memahami sejarah Bank Indonesia Cirebon dan kontribusinya bagi perkembangan ekonomi wilayah ini.

BAB 1

# Warisan Tradisi Besar dan Fondasi Ekonomi Modern

Seperti ditemukan pada sebagian rupa bumi di Tanah Air, geografi Cirebon berupa pantai dan lereng pegunungan. Mengikuti kontur itu, masyarakat Cirebon pun bercorak plural, pesisir dan pedalaman, tetapi tidak terpisahkan dalam satu ruang besar geografis tersebut. Mereka justru berpadu melalui berbagai jalinan kekerabatan, politik, dan perdagangan. Baik masyarakat pesisir maupun sebagian masyarakat pedalaman di Cirebon memiliki karakteristik kosmopolis, terbuka, dan moderat; terbentuk dari interaksi dan adaptasi dengan budaya luar yang masuk melalui jalur perdagangan, agama, politik, dan kolonialisme. Meskipun terlihat berbeda jalan, pembentukan karakter masyarakat Cirebon dapat dikatakan melalui satu "pintu" yaitu peran kelas penguasa yang umumnya berstatus sebagai pedagang dan agamawan. Tipologi dan karakteristik sosial-budaya masyarakat Cirebon itu tetap bertahan dalam perjalanan sejarah selanjutnya.

## GEOGRAFI, DEMOGRAFI, DAN KARAKTERISTIK SOSIAL KULTURAL

Cirebon atau 'Negeri Cirebon' adalah pusat permukiman dan perdagangan yang terletak di sebelah timur laut daerah Galuh yang

legendaris. Wilayah tersebut pernah menjadi pusat kerajaan Sunda.[1] Letak Cirebon juga berdekatan dengan batas wilayah dan gerbang perdagangan kerajaan Sunda di sebelah timur yaitu Pelabuhan Cimanuk.[2] Pada 1513, Tome Pires, pelaut Portugis, mengunjungi permukiman di muara Cirebon dan melewati beberapa sungai, seperti Cimanuk, Pekik, Kesunean, dan Losari, yang menjadi jalur transportasi jung-perahu kayu- dari pesisir menuju pusat permukiman di pedalaman yaitu Cherimon. Tome Pires menggambarkan Cherimon dalam catatannya, "Cherimon berlokasi di sekitar 3 *league* di dekat sungai. Orang-orang berkata bahwa kita memakai jung untuk memasuki tempat ini."[3]

Salah satu sungai yang ramai dilalui jung adalah Kasunean yang mempertautkan pantai dengan pusat pedalaman di Cirebon Girang. Dalam perkembangannya, transportasi jung di Sungai Kesunean lebih ramai dibandingkan dengan di Sungai Cimanuk dan Sungai Losari yang juga menghubungkan pesisir dengan wilayah pedalaman. Meskipun demikian, tidak semua wilayah di sekitar pesisir Cirebon dan Cimanuk dapat dirapati jung untuk membongkar-muat barang.[4] Sekilas, Tome Pires menyinggung keterbatasan fungsi Pelabuhan Cimanuk dan perkembangan Pelabuhan Cirebon pada 1513,

> *Pelabuhan Cimanuk merupakan pelabuhan keenam. Pelabuhan ini bukanlah tempat bagi jung untuk merapat, melainkan hanya tiang pelabuhan, demikian kabar yang disampaikan oleh orang-orang, sebagian lainnya*

1 Istilah Cirebon dikenal juga sebagai Coroban (dalam sumber Portugis); Charabon (dalam sumber Belanda abad ke-16) dan Grage (atau Garage sebagai istilah 'Sunda Cirebon', walaupun dua sejarawan H. J. de Graaf dan Th. Pigeaud kurang sependapat dengan pemaknaan tersebut). Dalam kajian ini istilah Kerajaan Sunda dipilih karena nama Pajajaran lebih identik dengan nama pusat Keraton Pakwan Pajajaran (sekitar kota Bogor). Menurut Ekadjati (1995: 6), sebutan Pajajaran bagi nama kerajaan Sunda berdasar tradisi lisan Mataram dan Banten yang mulai berkembang pada abad ke-17/18 dan beberapa karangan pada abad ke-19 yang menyuratkan nama 'Pakwan Pajajaran' dari prasasti batu tulis, cerita pantun, dan tradisi lisan (lihat juga Cortesao 2018: 224; Johan 1997:10; Lapian dan Sedyawati 1997: 5; De Graaf dan Pigeaud 1985). Bdk. uraian toponimi, Bab 7 buku ini.

2 Pelabuhan Cimanuk merupakan bandar pelabuhan penting Kerajaan Sunda, selain Banten, Pontang, Tamgara, dan Kalapa (Poesponegoro dan Notosusanto, ed. 1984: 389).

3 *League* adalah satuan jarak yang digunakan oleh orang Eropa dalam mengukur jarak yang dapat ditempuh oleh seseorang selama satu jam berjalan kaki, setara dengan 4,8 kilometer (Cortesao 2018: 224).

4 Sulistiyono (1997: 78–9); Poesponegoro dan Notosusanto, ed. (1984: 389).

*mengiyakan . . .. Cirebon adalah sebuah pelabuhan yang indah dan selalu ada empat sampai lima kapal yang berlabuh di sana.*[5]

Antara Cirebon dan Cimanuk memiliki kemiripan geografis pesisir yang hampir sama, yaitu luas dan tekstur daerah endapan lumpur yang membuat pangkalan laut mudah dangkal.[6] Di sepanjang sungai hingga muara tersebut jung-jung dan perahu kecil bisa mengangkut barang dagangan dari bibir pantai ke pedalaman ataupun sebaliknya. Aktivitas perahu dan jung di Pelabuhan Cirebon terlihat sibuk dan ramai ketika kapal-kapal besar dari berbagai pulau di Nusantara dan lainnya merapat di sana, terutama pada saat musim angin muson timur mulai berembus. Seorang pengunjung, William Thorn, yang juga pernah mendatangi muara Cirebon pada dasawarsa pertama abad ke-19 menyatakan,

*Kota ini terletak di kaki sebuah teluk yang dalam yang terbentuk ke tenggara ujung Indramayu, di mana sisi baratnya merupakan area pelabuhan yang bagus terutama selama musim angin muson timur. Teluknya terlindung dengan amannya dari hembusan angin muson barat laut oleh sebuah gundungan beting, yang merentang dari titik utara ke arah timur.*[7]

Menurut laporan orang Belanda yang pernah singgah di Cirebon pada abad ke-18, selain sungai dan pantai, keadaan permukiman di dataran rendah Cirebon masih dipenuhi hutan belantara dan banyak ditumbuhi pohon kelapa.[8] Di sebelah selatan Cirebon juga terdapat pegunungan dan beberapa gunung berapi, antara lain Ciremai, Sawal, dan Cakrabuana.[9] Gunung-gunung itu menjadi batas geografis antara pesisir Cirebon dan wilayah pedalaman serta gunung vulkanik yang masih terlihat aktif pada pergantian abad ke-19. Tulis Thorn, "Pegunungan memisahkan bagian utara dengan pantai Cirebon . . . bukit tinggi yang ada di Cirebon dulunya adalah kawah, dan masih menyemburkan asap di musim tertentu."[10]

---

5 Cortesao (2018: 221); lihat juga Johan (1997: 10).

6 De Graaf dan Pigeaud (1985: 137); Sjamsudin, dkk. (1992: 2).

7 Thorn (2004: 261).

8 Potret gunung dan pegunungan di Cirebon disajikan lengkap oleh William J. O'Malley yang memotret berbagai obyek di daerah Cirebon pada 1830 (Padmo 1989: 1–2).

9 Sulistiyono (1997: 79).

10 Thorn (2004: 87).

**Gambar 1.1.** Pemandangan Gunung Ciremai, Cirebon, Jawa Barat, (1938)
Sumber: KITLV

Kesaksian Thorn tersebut menunjukkan bahwa pegunungan menjadi batas penting geososial-budaya bagi wilayah pesisir Cirebon dan wilayah pedalaman. Dari celah-celah pegunungan dan gunung tersebut mengalir sungai-sungai yang membawa endapan tanah vulkanis yang membentuk bentangan luas endapan tanah aluvial yang subur. Keadaan geografis yang subur tersebut menjadikan beberapa tempat di wilayah Cirebon penuh dengan lahan perkebunan dan sawah yang sangat produktif. Tome Pires juga menyebutkan bahwa Cirebon dikenal sebagai wilayah subur penghasil beras dan kayu terbaik untuk pembuatan jung di Jawa. Khusus tentang kayu bahan baku pembuatan jung di Cirebon, Pires mencatatnya, "Tempat ini menghasilkan kayu yang terbaik, dibandingkan dengan semua tempat di Jawa, untuk membangun jung, meski sesungguhnya memang tidak banyak kayu yang dapat ditemukan di Jawa."[11]

Berbagai komoditas utama Cirebon pada abad ke-16, seperti beras dan kayu, tampaknya menjadi faktor utama kedatangan pedagang dari luar wilayah itu. Selain beras dan kayu, terdapat komoditas hasil tumbuhan hutan dan perkebunan tradisional, seperti asam, merica, buncis putih,

11 Cortesao (2018: 224).

kapulaga (*cardamom*), mangga, pisang, cabai, tembakau, dan buah pinang. Industri tradisional menghasilkan gula dan minyak kelapa yang ditukar dengan kain atau cita kain dari Keling dan Cambay, India. Pada abad berikutnya, industri tradisional makin berkembang dengan produk-produk gula hitam dan putih, *arax pullenkens*, ibung asinan, kapuk randu, telur asin, pot, bakul kosong begal, candermongo, olahan kulit kerbau, air mawar, emas cetakan, kain khas, dan lain-lain.[12] Peternakan dan hasil tangkapan nelayan lokal berupa kerbau, unggas, bebek, daging kijang (rusa), babi, kambing, domba, dan ikan. Pada waktu itu mata uang asing, terutama *rijksdaalders*,[13] mulai beredar di pasar sebagai alat tukar dalam perdagangan, sementara mata uang lokal telah digunakan dalam transaksi dagang jauh sebelum abad ke-17.[14]

Berkembangnya perdagangan dan peredaran uang tersebut menjadikan wilayah Cirebon memiliki arti penting bagi pembangunan identitas pusat perdagangan dalam jaringan niaga di Kepulauan Nusantara. Cirebon kemudian terhubung dengan pusat-pusat perdagangan di kawasan Samudra Hindia dan Pasifik abad ke-16, yakni Fansur (Sumatera), Pariaman, Andalas, Tulangbawang, Palembang, Tanjungpura, hingga Malaka, Makassar, Madura, Maluku, Maladewa, Keling, Cambay, dan Coromandel. Perekonomian di Cirebon tidak lepas dari ciri khas pusat perdagangan pesisir di Pulau Jawa yang umumnya bersifat makro dan

12 Dalam kesaksian William Thorn disebutkan bahwa hingga awal abad ke-19 di Cirebon masih ditemukan komoditas beras, gula, kopi, lada, benang kapas, sarang burung, dan lain-lain. Kain khas belum diketahui pasti jenisnya, tetapi jelas bukan jenis kain yang sangat diminati masyarakat Sunda pada awal abad ke-16 seperti kain putih *sinabaff, synhavas, paschauelezes, balachos*, dan *atobalachos*, ataupun kain *enrolados de ladrilho* (kain wol berpetak yang kasar) yang didatangkan dari Keling, *bretangis* (kain katun biru) dari Cambay, *turias* (atau *terendam* 'kain kasa') dari Bengal, *tiricandies* (*tucamdya nylora* atau kain hijau dan merah dengan lukisan burung), dan *candya azares* (kain tebal) berasal dari Khorasans, yang seluruhnya dijual di pasar Cambay (Cortesao 2018: 207–8; Ekadjati 1995: 92; Thorn 2004: 261; Tjandrasasmita 1997: 64–5).

13 Mata uang *rijksdaalders* atau *rijksdollar*, lazim disingkat Rds, memiliki nilai tukar berikut: 1 Rds sama dengan 48 *stuivers* (van Niel 2005: 283; Tjandrasasmita 1997: 65).

14 Jenis mata uang yang digunakan di Cirebon sebelum abad ke-17 berasal dari Cina, berciri khas memiliki lubang di tengahnya seperti *ceitis* (atau uang *cash* yang umum digunakan di Jawa) yang dapat dirangkai dalam nilai angka ratusan, ataupun uang pecahan besar yang menggunakan emas lokal cetakan 8 *mate* (setara 300 *celai* atau 9 *cruzado* atau *tumdaya* yang setara dengan 15 *dram*). Sejak awal perdagangan Eropa di Cirebon, uang emas sangat jarang digunakan untuk transaksi dagang. Nilai mata uang di Cirebon dan daerah lain di Jawa seperempat lebih tinggi dibandingkan di Malaka. Selain itu, nilai emas yang dibawa dari Pulau Jawa, seperti juga di Cirebon, bertambah sebanyak satu pada setiap lima emas di Malaka (Cortesao 2018: 208, 222; Johan 1997: 10).

terbuka. Peran Cirebon sebagai bandar pelabuhan perdagangan makin meningkat ketika Sunan Gunung Jati berusaha mendirikan jaringan perdagangan dan pusat kekuasaan di Banten, Sunda Kelapa, dan Cirebon. Selanjutnya, Cirebon menjadi bandar pelabuhan, perdagangan dan gerbang diplomasi politik Mataram terpenting di wilayah barat pada akhir abad ke-16. Selain itu, tradisi perdagangan tersebut juga menunjukkan bahwa letak geografis Cirebon memiliki posisi perekonomian penting pada pergantian abad ke-17 di Jawa selain Pati, Juwana, dan Jepara.[15]

**Gambar 1.2.** Ilustrasi pelayaran di Pelabuhan Cirebon oleh O.G.H. Heldring, (1880)
Sumber: KITLV

Sebagian besar pusat perdagangan di Cirebon abad ke-16 dibangun melalui kekuasaan Islam yang baru, terutama oleh aktivitas pedagang pesisir yang umumnya para penguasa muslim seperti di beberapa kawasan di pantai utara Jawa pada abad ke-15/16. Mereka menempatkan Cirebon sebagai bandar perdagangan penting di pantai utara Jawa. Oleh karena itu, Cirebon kemudian menjadi bagian penting dari jalur perdagangan lama yang disebut Jalur Sutra, selain Banten, Sunda Kelapa, Tegal, Demak,

15 Lapian dan Sedyawati (1997: 4); Cortesao (2018: 207–12).

Jepara, dan Gresik.[16] Dari sisi lokal, letak geografis Cirebon berada di antara Sunda bagian timur dan Jawa bagian barat yang membuat posisinya menjadi jembatan penting dari berbagai hal, baik budaya dan ekonomi antara Jawa dan Sunda maupun penghubung jalur kapal-kapal perdagangan pantai antara Jawa dan Sunda.[17]

Secara umum masyarakat Cirebon terdiri dari masyarakat pesisir dan pedalaman, yang memiliki kecenderungan budaya yang berbeda. Masyarakat pedalaman terlihat lebih dekat dengan kehidupan sosial-budaya Sunda pedalaman yang identik budaya pertanian dan keagamaan Syiwa-Budha. Sementara itu, masyarakat pesisir umumnya lebih menerima budaya Jawa-Islam dan budaya multietnik lain. Mereka kemudian menjadi lebih sedikit terbuka dalam interaksinya dibandingkan dengan masyarakat di pedalaman meski tidak semua penduduk di pesisir Cirebon bekerja sebagai pedagang dan nelayan.

Kemajuan masyarakat pesisir Cirebon pada abad ke-16 terlihat dari luas wilayah permukiman nelayan dan pedagang yang meramaikan aktivitas perdagangan. Hal itu berpengaruh penting terhadap Pelabuhan Cirebon yang berkembang menjadi cukup besar sebagai aktivitas pusat perdagangan pada zamannya. Kemajuan perdagangan di desa-desa pedagang dan nelayan juga terlihat pada keberadaan pasar dan pelabuhan yang diramaikan kapal-kapal dagang seperti digambarkan oleh Tome Pires. Pasar Cirebon diperkirakan terletak di dekat istana dan dapat ditempuh dengan jung dari pantai melalui sungai yang berjarak sekitar satu kilometer. Pasar sangat ramai dan menjadi tempat bertemu para pedagang dari Cirebon ataupun yang berdatangan dari luar daerah itu.[18]

Selain pasar di pusat permukiman, titik-titik keramaian di Cirebon juga terlihat di pusat-pusat pengajaran Islam yang dipenuhi komunitas

16 Jalur Sutra (*Silk Roads*) merupakan sebutan yang muncul dalam program pengembangan kebudayaan, World Decade for Cultural Development (1988–97), oleh Badan Perserikatan Bangsa-Bangsa UNESCO. Kata 'sutra' diambil sebagai metafora kelembutan dan kehalusan jalinan hubungan antarmanusia dan antarbudaya yang terbawa serta melalui rute perdagangan yang bersejarah. Sutra sendiri merupakan komoditas penting dari timur, selain rempah-rempah, yang memacu pedagang Eropa mencarinya (Lapian dan Sedyawati 1997: 1).

17 Lapian dan Sedyawati (1997: 1).

18 Sulistiyono (1997: 80).

muslim campuran. Dalam naskah *Babad Cerbon* disebutkan tentang pusat pengajaran Islam di sekitar Dukuh Caruban dan Dukuh Pesambangan yang diikuti oleh santri dari kalangan nelayan, pedagang, dan lain-lain. Pada awalnya, Dukuh Pesambangan tidak banyak berperan dalam perdagangan dan keagamaan, tetapi setelah kedatangan kaum muslim desa itu menjadi salah satu titik penting kegiatan ekonomi dan keagamaan pada pergantian abad ke-16.[19] Naskah lain, *Carita Purwaka Nagari*, melukiskan Dukuh Pesambangan berada di kaki bukit Amparan Jati dan muara sungai sehingga dikenal sebagai Muhara Jati atau Muarajati. Dukuh itu menjadi tempat singgah pedagang berbagai negeri, seperti dari Cina,[20] Arab, Parsi, India, Malaka, Tumasik, Paseh, Palembang, Madura, dan beberapa pusat perdagangan di Pulau Jawa.

Meskipun masih bisa diperdebatkan kebenarannya, deskripsi historis sumber-sumber lokal tersebut secara tidak langsung menggambarkan interaksi dan hubungan perdagangan yang luas antara penduduk Cirebon dan pedagang dari luar wilayah itu. Ramainya kegiatan perdagangan di Muarajati dan kedatangan orang Cina di sana dilukiskan sebagai berikut,

> *Pada waktu itu Muarajati didatangi kapal-kapal dari Cina di bawah pimpinan panglimanya yang bernama Wai Ping dan laksamananya Te Ho dengan pengikutnya yang tidak terbilang banyaknya. Mereka singgah di Pasambangan dalam perjalanannya ke Majapahit. Pada waktu itu mereka mendirikan mercusuar di atas bukit Amparajati. Mereka dijamu oleh Ki Gedeng Jumajanjati selama tujuh hari tujuh malam dan mercusuar yang telah selesai diberi imbalan oleh Juru Labuhan Dukuh Pasambangan dengan garam, terasi, beras tumbuk, rempah-rempah, serta kayu jati.*[21]

Munculnya tokoh penting dari Cina, Te-Ho, dalam *Purwaka Caruban Nagari* dihubungkan dengan nama besar Laksamana Cheng Ho. Disebutkan, pada awal abad ke-15 Cheng Ho pernah melakukan ekspedisi

19 Dukuh Pasambangan terletak sekitar lima kilometer di sebelah utara Kota Cirebon sekarang (Ambary 1997: 39–40).

20 Istilah *cina* bersifat umum, mengacu kepada orang/etnis/bangsa ataupun negara. Istilah lain, *tionghoa*, mengacu khusus pada orang. Dalam buku ini, condong digunakan sebutan *cina* semata-mata agar konsisten dengan sumber-sumber (primer) penulisan yang lazim menggunakan istilah itu; meski demikian kadang-kadang dipakai sebutan (orang) *tionghoa* sebagai varian.

21 Tjandrasasmita (1997: 57).

melalui Che-Li-Wen atau Cirebon.[22] Namun, patut dicatat bahwa sebelum naskah lama itu terbit, masyarakat pesisir Cirebon telah berhubungan luas dengan pedagang dari berbagai belahan dunia sehingga langsung ataupun tidak langsung berpengaruh terhadap pembentukan karakter yang kompleks pada masyarakat pesisir.

Geografi Cirebon terletak di bagian tengah Pulau Jawa, di antara batas sosio-budaya Sunda dan Jawa sehingga menjadikannya titik hubung kultural dan ekonomi di Pulau Jawa secara makro. Titik hubung geografis dan budaya itu bertalian dengan jaringan dan sirkulasi perdagangan yang digerakkan oleh kaum pedagang. Secara mikro, Cirebon menjadi pelabuhan penting penyangga perdagangan Demak pada abad ke-16 dan Mataram pada abad ke-17 serta perniagaan VOC setelahnya. Sejak abad-abad itulah, Pelabuhan Cirebon menghubungkan jalur pelayaran kapal pantai antar-pelabuhan kecil di Jawa, seperti Losari, Tegal, dan Semarang, dengan berbagai pelabuhan di Sunda.[23]

Posisi geografis tersebut sangat menguntungkan perdagangan di Cirebon yang tentu berpengaruh terhadap sistem dan mekanisme perdagangan Islam yang mulai berkembang hingga kawasan pedalaman pada abad ke-16. Tome Pires menyebutkan bahwa Cirebon pada awal abad itu merupakan pelabuhan dan pusat perdagangan penting selain enam pelabuhan Kerajaan Sunda, yakni Banten, Pontang, Cigede, Tanara, Calap, Cimanuk, dan beberapa pelabuhan di Pulau Jawa yaitu Japura, Tegal, Semarang, Demak, Jepara, Rembang, Tuban, Giri, dan Surabaya.[24] Berbagai hasil pertanian, perkebunan, hutan dan rawa, serta tangkapan ikan di sepanjang pantai bisa dipasarkan melalui Pelabuhan Cirebon.[25]

Pada pergantian abad ke-16, perkembangan ekonomi Cirebon diperkuat dengan dukungan politik Islam oleh penguasa Demak berupa pendirian *factorij* atau 'kantor perdagangan'.[26] Perekonomian Cirebon

22 Tjandrasasmita (1997: 57), mengutip pendapat Ma Huan dan Mils.

23 De Graaf dan Pigeaud (1985: 137).

24 Johan (1997: 10).

25 Tjandrasasmita (1997: 61).

26 De Graaf dan Pigeaud (1985: 137).

pada awal abad ke-16 umumnya digerakkan oleh saudagar muslim[27] yang menghubungkan poros perdagangan Cirebon-Malaka sejak abad sebelumnya.

**Gambar 1.3.** Lukisan Masjid Agung Demak sebagai simbol kekuasaan Kesultanan Demak di Jawa, 1810
Sumber: KITLV

Masyarakat Cirebon awalnya dibentuk oleh beberapa keluarga dan kumpulan orang Sunda (*urang Sunda*) yang berkembang secara homogen. Mereka merupakan kelompok berdasarkan keturunan dan latar belakang sosio-budaya tersendiri yang berbeda dari masyarakat Cirebon setelah kedatangan Islam. Hal itu dibuktikan dengan panggilan orang-orang Cirebon kepada orang Sunda, yang mulai berakhir eksistensinya di pesisir pada abad ke-16, dengan sebutan "orang gunung" (*urang gunung*) karena lokasi permukiman mereka di pegunungan Priangan.[28]

27 Pate Quedir ditunjuk oleh Alburquerque menggantikan Timuta Raja sebagai pemimpin di Upeh, permukiman etnis Jawa di tepi Sungai Malaka (Cortesao 2018: 224; De Graaf dan Pigeaud 1985: 136).

28 De Graaf dan Pigeaud (1985: 137); Ekadjati (1995: 8–9).

Menjelang kedatangan Islam di Cirebon, beberapa pendatang asing yang umumnya berprofesi sebagai pedagang turut serta membentuk masyarakat heterogen di sana. Seiring dengan kemajuan Islam, masyarakat Cirebon berkembang ke arah multietnik dengan populasi mencapai sekitar seribu orang pada 1513. Salah satu pendatang asing ialah etnis Cina atau Tionghoa yang bertanam tebu dan padi di sekitar tempat tinggal mereka.[29] Awalnya, permukiman Cina di Cirebon didirikan oleh etnis muslim Tionghoa bernama Cu-Cu yang secara perlahan menggeser kedudukan orang asli Sunda di Cirebon. Selain etnis Cina, dijumpai orang-orang Moor yang sejak awal kedatangannya sebenarnya kurang disambut Raja Sunda.[30] Artinya, bisa dikatakan bahwa orang Cina muslim cepat diterima oleh komunitas muslim Cirebon secara umum.

Dengan demikian, baik etnis Jawa, Cina muslim, dan etnis campuran yang lain beserta keturunannya menjadi elemen demografis utama dalam pembentukan dan perkembangan masyararakat Cirebon-baik di wilayah kota maupun di pinggiran-pada pergantian abad ke-16. Mereka berperan sebagai pedagang perantara yang menjual barang kebutuhan sehari-hari kepada masyarakat pedalaman dan pesisiran. Peran etnis keturunan Tionghoa di Cirebon dapat dilihat dari berbagai peninggalan, antara lain berupa guci, porselen hiasan dinding di kompleks makam Sunan Gunung Jati, situs makam Dewi Ong Tien dan Astana Gunung Jati.[31]

Menurut catatan Tome Pires, jumlah penduduk Cirebon pada 1513 lebih sedikit daripada daerah Japura, di dekat Losari, yang mencapai 2.000 orang. Keterangan itu mengindikasikan bahwa proses pertumbuhan demografi di Cirebon pada awal abad ke-16 lebih lambat dibandingkan dengan perkembangan penduduk di Cimanuk dan Japura. Pertumbuhan

29 Cortesao (2018: 224); Padmo (1989: 2).

30 Mengutip Tome Pires, De Graaf dan Pigeaud menyebutkan bahwa Cu-Cu merupakan keluarga Tionghoa Islam yang menurunkan raja-raja Demak setelah 1490-an; Sultan Demak memintanya untuk meningkatkan perekonomian di kesultanan. Cu-Cu dan para pedagang Cina Islam kemudian menjadi sebuah bagian penting dari komunitas saudagar di pantai utara Jawa, termasuk Cirebon. Sementara itu, populasi orang Moor terkonsentrasi di Cimanuk yang memiliki pemimpin wilayah seorang pagan (De Graaf dan Pigeaud 1985: 136–7; Cortesao 2018: 221).

31 Menurut sumber lokal, pembauran orang Cina dengan orang Cirebon berawal dari pernikahan Nyi Rara Rudra (kakak Ki Gede Tapa) dengan Ma Huang (Dampu Awang); dan pernikahan Sunan Gunung Jati dengan putri Kaisar Cina, yakni Ong Tien, yang kemudian berganti nama Nyi Ratu Rara Sumanding (Basyri 1989: 17).

jumlah penduduk di Cirebon juga dipengaruhi oleh kekuatan politik di Sunda dan Jawa yang kemudian menentukan struktur baru stratifikasi sosial di Cirebon setelah abad ke-15. Salah satunya ialah faktor golongan agamawan yang menempati strata sosial tinggi, semisal Syaikh Datuk Kahfi di Dukuh Pesambangan beserta 20 orang laki-laki dan dua perempuan pengikutnya dari Kerajaan Parsi.[32]

Berbagai sumber lokal, seperti *Carita Purwaka Caruban Nagari*, menjelaskan bahwa keluarga agamawan umumnya juga berstatus sebagai bangsawan dan sebagian besar berketurunan Melayu, Arab, dan Cina. Mereka tinggal berbaur di permukiman umum penduduk dan membentuk identitas sosial tersendiri sebagai golongan santri, berdampingan dengan golongan sosial lain seperti pedagang, nelayan, petani dan buruh kecil. Dalam perkembangannya, golongan santri dan keturunanya merupakan kelompok elite sosial-ekonomi yang ditandai dengan kepemilikan modal dominan dan penguasaan sah wilayah tertentu di Cirebon.

Sebelum kedatangan Islam, banyak warga di dukuh-dukuh Cirebon menganut agama yang memuja Dewa Wisnu seperti umumnya para penguasa Sunda kala itu. Sejak kehadiran penyiar Islam, banyak masyarakat Cirebon yang beralih ke Islam dan menimbulkan berbagai bentuk perubahan sosial keagamaan. Dalam sumber lokal disebutkan bahwa para tokoh Islam di Dukuh Pesambangan dan Dukuh Caruban merupakan perintis penyiaran agama Islam dan menjadikan kedua dukuh itu sebagai pusat pengajaran dan politik Islam sepanjang abad ke-15 dan awal abad berikutnya.[33]

Faktor yang mendukung masuknya Islam di wilayah Cirebon ialah lemahnya kontrol kekuatan politik dan keagamaan Kerajaan Sunda di wilayah pesisir Sunda paling timur tersebut. Selain itu, masyarakat Sunda kurang aktif mengorganisasikan penganut agama Syiwa-Budha di wilayahnya. Setelah kedatangan Islam, penganut Syiwa-Budha di pesisir dan pusat-pusat pemerintahan lokal secara bertahap tergeser ke wilayah pedalaman di daerah pegunungan. Dengan sendirinya hubungan mereka terputus dari pusat-pusat jaringan kekuatan Syiwa-Budha yang pernah

32 Cortesao (2018: 225); Tjandrasasmita (1997: 61), mengutip sumber lokal.

33 Tjandrasasmita (1997: 61).

dibangun oleh Kerajaan Sunda sebelum dikalahkan Banten. Di sisi lain, terutama pada akhir abad ke-15 komunitas Muslim yang terpusat di Cirebon, Sunda Kelapa, dan Banten justru mengalami perkembangan cukup pesat karena tumbuhnya kekuatan perekonomian yang terhubung dengan jaringan perdagangan Islam di Nusantara.[34]

Dalam tradisi lisan disebutkan bahwa proses pengembangan agama Islam di wilayah Cirebon dan sekitarnya melibatkan tokoh-tokoh muslim lokal keturunan Raja Sunda. Salah seorang di antaranya adalah Walangsungsang atau Ki Cakrabumi atau Kuwu Caruban yang menjadi pemimpin wilayah dan agama di Dukuh Caruban. Ia disebutkan memiliki nama dan gelar baru yaitu Ki Samadullah yang merintis pusat pengajaran Islam di Caruban Larang.[35]

Proses pembentukan identitas keislaman masyarakat Cirebon tidak terbatas pada lembaga pengajaran tradisional pesantren, melainkan juga perintisan berbagai tradisi Islam lainnya. Hal itu terlihat dalam pengajaran mistik Islam (sufi) dan pengajaran agama yang berpusat di *tajuk* atau langgar dan masjid di wilayah Cirebon. Tradisi pengajaran Islam itu kemudian merambah ke daerah pedalaman, berkembang dalam kegiatan *pangaosan* atau pengajian yang masif dan terbuka. Aktivitas itu terus berlangsung intensif sehingga berkembang sebagai tradisi Islam yang umum di Cirebon dan sekitarnya.[36]

Selain membentuk identitas keagamaan, kehadiran Islam juga mengkonstruksi budaya baru umum di Cirebon yang berciri khas islamis pula. Secara historis, hal itu terjadi seiring dengan jatuhnya kekuasaan Sunda oleh kekuatan Kesultanan Banten.[37] Budaya baru itu mewujud sebagai masyarakat Cirebon yang heterogen-multikultur, lebih dari sekadar "gabungan" budaya Jawa dan Sunda yang menjadi gambaran konstruksi sosial lama sebelumnya. Akan halnya konstruksi sosial yang baru itu disebut 'Jawa Cerbonan' sebagai bentuk subetnik Sunda baru.

34 Andrieu (2017: 49).

35 De Graaf dan Pigeaud (1985: 135).

36 Andrieu (2017: 51).

37 Andrieu (2017: 49).

**Gambar 1.4.** Masjid Keraton Kasepuhan Cirebon sebagai simbol Islamisasi di wilayah Cirebon

Sumber: KITLV

Salah satu aspek penting budaya baru tersebut ialah bahasa *Cirebonan* yang, dalam banyak unsur, berbeda dari bahasa Sunda ataupun Jawa. Bahasa itu menjadi bahasa multietnik yang berfungsi sebagai komunikasi sehari-hari sekaligus identitas baru 'orang Cerbon' sebagai subetnik Sunda.[38] Pada unsur tertentu-misalnya kosakata-bahasa *Cirebonan* juga memperlihatkan identitas kejawaan yang kuat. Meskipun demikian, dalam persebarannya bahasa *cirebonan* justru berkembang di wilayah Sunda bagian timur dan tidak di daerah Jawa yang berdekatan dengan Cirebon. Jauh sebelumnya, De Graaf dan Pigeaud menyatakan senada, "Penyebaran agama Islam dan meluasnya bahasa dan kesenian Jawa ke tanah Sunda bagian timur merupakan pengaruh Cirebon."[39]

Kenyataan tersebut menunjukkan bahwa ciri khas budaya masyarakat Cirebon, terutama unsur bahasa, terpengaruh oleh budaya Jawa yang mewakili kekuasaan Majapahit dibandingkan dengan budaya Sunda yang

38 Ambary (1997: 44).

39 De Graaf dan Pigeaud (1985: 143).

merepresentasikan kekuasaan Sunda. Hal itu diperjelas dengan posisi Cirebon sebagai daerah perbatasan antara Jawa dan Sunda. Oleh karena itu, budaya Cirebon memperlihatkan karakter budaya perbatasan yang secara geografis "disekat" oleh Sungai Pemali dan Distrik Lebaksiu yang dalam cerita tutur Jawa dianggap sebagai perbatasan Majapahit dan Pajajaran.[40]

Bahasa di Cirebon juga menunjukkan bahasa etnisitas yang menggunakan langgam dan corak mirip bahasa Sunda sekarang.[41] Secara budaya, telah disebutkan, muncul subetnis Sunda baru pada masyarakat Cirebon yang terbentuk dari aliansi politik dan kekerabatan antara Sunda dan Jawa, atau antara Cirebon dan Demak sepanjang abad ke-16. Dengan demikian, kehadiran Islam di wilayah Cirebon telah melahirkan sebuah corak peradaban baru yang menggantikan peradaban lama (Sunda) yang memiliki agama, bahasa, dan budaya yang berbeda dengan lainnya.

Beberapa tradisi penting bentuk baru budaya Islam di Cirebon ialah pesantren seperti di Indramayu, Karawang, Majalengka, dan Kuningan. Dalam kesenian, muncul arsitektur sakral dan profan pada bangunan masjid dan istana yang mengadaptasi rancang bangun dan ornamen lokal termasuk pra-Islam serta dilengkapi seni lukis dengan anasir antropomorfis khas Cirebon yang tidak lazim dalam seni rupa Islam. Beberapa napas Islam juga muncul dalam pertunjukan seni tari, membatik, alunan dan alat musik, serta karya sastra keagamaan yang ditulis para pujangga dan bangsawan Keraton Cirebon.[42] Aspek kebudayaan Islam yang penting lainnya ialah penggunaan kalender Islam mirip dengan Mataram, hanya untuk bulan Bakdal Mulud diganti dengan Sawal Mulud, Dulkaidah diganti dengan Khapit, dan Besar diganti Rayaagung. Juga terdapat penyelenggaraan tradisi Islam seperti maulid Nabi dengan nasi kuning, upacara *panjang jimat* dan *sekaten* yang diadakan oleh Keraton Kanoman dan Kesepuhan.[43]

---

40 De Graaf dan Pigeaud (1985: 135).

41 De Graaf dan Pigeaud (1985: 135).

42 Ambary menyebutkan bahwa karya sastra Cerbonan ditemukan dalam naskah klasik babad, serat, dan suluk—seperti tarekat Syatariyah—serta karya sastra klasik di daerah Jawa Barat lainnya seperti di Geusan Ulun, Sumedang, dan Cigugur, Kuningan, ataupun tradisi sastra tulis yang berpengaruh terhadap tradisi sastra di Surakarta.

43 Sulendraningrat (1987: 68. 81, 84, 86).

# TATANAN POLITIK LOKAL

Telah disebutkan, kedatangan Islam di wilayah Cirebon-menurut sumber-sumber lokal-dibawa dan dikembangkan pedagang dan kelompok kecil masyarakat muslim di Muarajati (Pasambangan) dan Caruban. Islam datang di Cirebon dalam kurun antara 1470 hingga 1475.[44] Tentang waktu pengislaman di Cirebon, William Thorn mengisahkan,

> *. . . Sheik Melana [Maulana] yang menurut orang telah memperkenalkan ajaran agama Islam ke Pulau Jawa, tetapi periode tepatnya tidak bisa dipastikan kapan, yang mestinya tak lama setelah abad kesembilan, yang selang waktu sesudahnya yaitu abad keempat belas, orang-orang Arab diceritakan menguasai perdagangan bebas di kawasan ini.*

Keterangan tersebut memperkuat bahwa Islam sudah hadir di Cirebon sebelum Tome Pires datang pada awal abad ke-16. Islam diajarkan kepada masyarakat pesisir, termasuk di Cirebon, yang masih pagan melalui pedagang Persia, Arab, Gujarat, Bengal, Melayu, dan lain-lain. Di antara para pedagang tersebut, orang-orang Moor paling berperan sebagai penyebar Islam di wilayah pesisir utara Jawa, termasuk di Cirebon. Selain berdagang, mereka mendirikan masjid, mendatangkan *mullah* (ulama dari Arab, Persia, dan India), dan membentuk komunitas Moor di beberapa pusat perdagangan di Jawa.[45]

Secara tidak langsung, kedatangan pedagang Moor memberikan dukungan kuat atas munculnya tatanan baru kekuasaan Islam di Cirebon. Pada 1470, seorang saudagar, bernama Lebe Upa, diangkat sebagai perwakilan penguasa Demak di Cirebon.[46] Tentang Lebe Upa, Tome Pires menyebutkan,

---

44 Tentang periode tahun kedatangan Islam di Cirebon ini dikutip Ambary dari Prodjokusumo dkk. (1991) yang bersandar pada catatan perjalanan Tome Pires (Ambary 1997: 40). Periode 1470–75 dapat dibandingkan dengan tahun 1337 sebagai indikasi temporal masuknya Islam di Cirebon versi sejarah lokal tentang ketokohan Haji Purba—juga disebut sebagai Syaikh Nurjati atau Sunan Gunung Jati Purba—setelah ia diislamkan oleh saudagar Arab di India sebelum akhirnya berhaji ke Makkah. Catatan ini dikutip Ambary (1997: 60) dari Hageman dan Tjandrasasmita.

45 Cortesao (2018: 223).

46 Sulistiyono (1997: 81).

*Penguasanya dikenal dengan Lebe Upa, ia merupakan bawahan dari Pate Rodim [Raden Patah], tuan Negeri Demak . . . kurang lebih empat puluh tahun yang lalu, Cirebon merupakan negeri para pagan. Pada waktu itu, penguasa Demak memiliki seorang budak dari Gresik. Budak tersebut ia jadikan sebagai kapten untuk melawan Cirebon, ia juga diberi gelar Pate Cirebon. Budak Gresik ini, yang akhirnya menjadi penguasa Cirebon, merupakan kakek dari Pate Rodim [Raden Patah], yakni penguasa Demak yang sekarang.*[47]

Dalam catatannya, Tome Pires menulis bahwa penguasaan Demak di wilayah Cirebon hingga mencapai Japura dan Cimanuk, di perbatasan timur Cirebon, pada 1513.[48] Islam masuk di daerah Cirebon dan sekitarnya ketika Kerajaan Sunda masih memiliki otoritas politik yang kuat di wilayah-wilayah tersebut.[49]

Menurut sumber lokal, awalnya Islam di Cirebon dikenalkan oleh tokoh Islam di Karawang yaitu Syaikh Kuro dan Haji Purba.[50] Kajian sumber lokal juga menunjukkan bahwa proses Islamisasi di Cirebon menguat ketika kekuatan jalinan kekeluargaan baik antara putra dan putri bangsawan lokal maupun kalangan mereka dengan para penyiar Islam mulai terbentuk pada pergantian abad ke-16. Contohnya adalah perkawinan putri bangsawan Sunda muslim bernama Rara Subang Larang (putri Mangkubumi Singapura/Mertasinga Caruban) dengan Prabu Siliwangi di Pakuan Pajajaran.[51] Keturunan Subang Larang disebut-sebut melahirkan para penyiar Islam di Cirebon pada abad ke-15/16.

Peran penyiar agama Islam, baik keturunan bangsawan Sunda maupun hasil perkawinan campuran dengan etnis muslim asing tersebut, direkam dalam berbagai kisah dalam karya tulis dan tradisi lisan masyarakat Cirebon. Masyarakat juga melestarikan situs-situs yang dipercaya sebagai

47 Cortesao (2018: 224).

48 Letak negeri Japura dalam wilayah Cisanggarung di Tanjung Losari. Awalnya, negeri itu dikuasai ayah Pate Rodim dan dilanjutkan oleh perwakilan (kapten) Pate Rodim yang juga sepupu tuanya bernama Pate Codia, seorang ksatria yang sangat patuh kepada Pate Rodim (Cortesao 2018: 225).

49 Catatan P. A. Sulendraningrat berdasar perjalanan Fa Hien di Tarumanegara (Sulendraningrat 1987: 14).

50 Sulendraningrat (1987: 15); Ambary (1997: 60).

51 Sulendraningrat (1987: 15).

makam dan peninggalan tokoh-tokoh Islam setempat. Salah satu tokoh yang sangat terkenal ialah Sunan Gunung Jati atau dikenal sebagai Syarif Hidayatullah yang dianggap sebagai peletak dasar dan penerus kekuasaan politik keagamaan Islam di Cirebon. Ia juga diakui bagian dari anggota walisanga yang berperan penting dalam Islamisasi di bagian barat Pulau Jawa pada abad ke-16. Sunan Gunung Jati juga memiliki nama Nurullah yaitu agamawan dari Pasai (Aceh) yang pergi ke Makkah pada 1521 setelah Portugis menguasai wilayah tersebut. Sekembali dari Makkah, Nurullah menikahi saudara perempuan Sultan Trenggana di Demak dan mendirikan komunitas muslim di Banten pada 1524. Setelah Sultan Trenggana wafat, Nurullah mendirikan kekuasaan otonom di Cirebon yang bebas dari kekuasaan Demak.[52]

Dalam perkembangannya, Sunan Gunung Jati menjadikan Cirebon sebagai pusat pengajaran dan penyebaran Islam di wilayah Sunda selain Banten.[53] Ia kemudian diakui sebagai Raja Sepuh[54] oleh keluarga Kesultanan Demak, Kesultanan Banten, Ratu Kalinyamat di Jepara dan Kesultanan Pajang yang berdiri pada abad ke-16.[55] Dengan berbagai kekuatan tersebut, Sunan Gunung Jati berhasil membentuk dinasti kekuasaan politik agama baru di Cirebon dan Banten yang otonom dari kekuasaan Sunda dan Demak. Pembentukan kekuasaan tersebut pada dasarnya bukan semata-mata bersifat politik melainkan juga berfokus pada penyebaran agama Islam.[56]

52 De Graaf dan Pigeaud (1985: 142). Dalam *Sadjarah Banten*, Hoesein Djadjadiningrat juga menyebut Syaikh Nurullah atau Syaikh Ibnu Molana sebagai Sunan Gunung Jati. Dikatakan bahwa Falatehan dan Tagaril (menurut penulis Portugis) sebenarnya orang yang sama. Keterangan itu berbeda dengan pendapat Tjandrasasmita, berdasar *Purwaka Caruban Nagari*, yang menyebutkan bahwa Fadhilah Khan atau Faletehan berbeda dengan Sunan Gunung Jati, berasal dari Pasai dan menyerang ekspedisi Portugis pimpinan Fransisco de Sa (Franko Bule) di Sunda Kelapa (De Graaf dan Pigeaud 1985: 139–40; Tjandrasasmita 1997: 63).

53 Lapian dan Sedyawati (1997: 4).

54 Sunan Gunung Jati wafat pada usia 120 tahun, disusul Fatahillah (Bagus Pasai) dua tahun kemudian (Basyri 1989: 21; De Graaf dan Pigeaud 1985: 143–4).

55 Basyri (1989: 21); De Graaf dan Pigeaud (1985: 143–4).

56 Tjandrasasmita (1997: 56).

**Gambar 1.5.** Keraton Kasepuhan Cirebon sekitar tahun 1890
Sumber: KITLV

Awalnya, pemerintahan lokal Islam di Cirebon dibentuk oleh para *kuwu* atau 'ki ageng' yang mendirikan dan memerintah dukuh-dukuh (*pedukuhan*) sebelum Sunan Gunung Jati hadir. Begitu pula jika dilihat secara urut, Sunan Gunung Jati bukan sebagai pemimpin agama dan wilayah yang pertama di Cirebon. Menurut *Babad Cerbon,* pemerintahan lokal di Cirebon paling awal justru dimulai oleh Walangsungsang (Cakrabumi atau Cakrabuwana) yang melimpahkan kekuasaanya kepada Sunan Gunung Jati pada 1479. Sunan Gunung Jati lalu memusatkan kekuatan politik keagamaannya di Lemahwungkuk dan mendirikan Istana Pakungwati. Oleh karena itu, Sunan Gunung Jati pantas disebut sebagai penerus dari kekuasaan lama sebelumnya, yaitu Kerajaan Sunda, meskipun sistem dan model pemerintahannya mirip dengan Kesultanan Demak karena ia sendiri anggota keluarga kerajaan itu. Kekuatan pemerintahan lokal Islam di Cirebon kemudian menjadi penyeimbang antara ruang politik di bagian barat dan timur Jawa.[57]

57 Ambary (1997: 40–1).

Dalam hal pemerintahan lokal, *Sadjarah Banten* menjelaskan bahwa ketika masih tinggal di Banten, Sunan Gunung Jati telah memercayakan kekuasaan politik, ekonomi, dan keagamaan di wilayah Cirebon kepada putranya yang bernama Pangeran Pasareyan. Sunan Gunung Jati kemudian pindah ke Cirebon sehubungan dengan wafat Pangeran Pasareyan[58] dan atas permintaan istrinya yang lebih senang tinggal di Cirebon karena dekat dengan Masjid Demak.[59] Sunan Gunung Jati mulai tinggal menetap di Cirebon ketika berumur 60 tahun. Ia membangun masjid besar,[60] memperluas tempat ibadah dengan gaya Demak, dan menerima Raden Sahid (Sunan Kalijaga) sebagai menantunya.[61] Hingga periode selanjutnya, masjid tersebut tetap menjadi identitas penting bagi Kota Cirebon karena dalam pembangunan pusat pemerintahan dan perekonomian yang baru-seperti pembangunan permukiman baru yang masif di Cirebon pada 1680-an-beberapa bangunan penting masa lalu seperti masjid tetap dipertahankan.[62]

Tome Pires melihat bahwa pemerintahan di Cirebon pada awal abad ke-16 tidak begitu kuat sebab kebijakan Sunan Gunung Jati lebih berorientasi pada pengajaran Islam daripada membangun kekuatan politik seperti di Banten.[63] Lemahnya kekuatan politik di Cirebon makin nyata setelah Sunan Gunung Jati wafat. Penerus Sang Sunan sering mengalami kesulitan memilih "berlindung" dalam kekuatan Banten ataukah Mataram, ataupun menghindar dari tekanan politik VOC pada pergantian abad ke-18. Faktor lain yang tidak kalah penting ialah ketiadaan gelar resmi[64] bagi

58 Pangeran Pasareyan adalah gelar dari Muhammad Arifin yang dinobatkan sebagai penguasa Cirebon; bersaudara kandung Ratu Wulung Ayu, dan merupakan putra-putri Sunan Gunung Jati dengan Nyi Ageng Tepasari (putri Ki Ageng Tepasari, komandan pasukan Majapahit yang mengikuti pasukan Demak ke Cirebon) (Basyri 1989: 19–20; De Graaf dan Pigeaud 1985: 142–3).

59 De Graaf dan Pigeaud (1985: 143–4).

60 Pada 1811, William Thorn menyaksikan masjid milik Syaikh Maulana (Sunan Gunung Jati) itu masih terlihat utuh, tetapi beberapa bagian bangunan mengalami sedikit aus (Thorn 2004: 260).

61 De Graaf dan Pigeaud 1985: 143–4. Dalam keterangan Basyri (1989: 21) disebutkan bahwa Sunan Gunung Jati wafat dalam usia 120 tahun disusul dengan wafatnya Fatahillah (Bagus Pasai) dua tahun kemudian.

62 Basyri (1989: 21).

63 Cortesao (2018: 224).

64 Kern (1973: 17) menyebutkan bahwa gelar Sunan Gunung Jati sendiri baru muncul ketika ia tinggal di Cirebon dan merupakan sebutan anumerta; semasa hidupnya ia lebih dikenal sebagai *ingkang sinuhun atau* 'paduka yang mulia'—seperti sebutan di kesultanan Jawa.

**Gambar 1.6.** Masjid Raya Cirebon tahun 1910, yang saat ini bernama Masjid At-Taqwa, berlokasi di sebelah Alun-alun Cirebon
Sumber: KITLV

Sultan Cirebon hingga masa Panembahan Girilaya. Gelar 'sultan' baru berlaku resmi setelah kekuasaan lokal Islam di Cirebon terpecah-pecah dan dikuasai oleh VOC pada abad ke-18.

Pada mulanya, tatanan politik, hukum, dan ekonomi di Cirebon dilaksanakan berdasarkan hukum Islam seperti di Kesultanan Demak. Pelimpahan kekuasaan juga dilakukan berdasarkan genealogi, seperti dalam pengangkatan Pangeran Pasareyan (berkuasa 1547-52) setelah penaklukan daerah Talaga (sebelah barat daya Cirebon) dan Rajagaluh pada awal abad ke-16.[65] Begitu pula pengangkatan Sultan Hasanudin di Banten juga berdasarkan keturunan sebab ia adalah putra Sunan Gunung Jati. Sunan juga mengangkat cucunya bernama Arya Kamuning (Pangeran Swarga atau Dipati Carbon I; putra Pangeran Pasareyan) untuk memimpin Cirebon. Penerus Dipati Carbon I adalah putranya bernama

65 Basyri (1989: 19–20).

Pangeran Mas (Panembahan Ratu I) pada 1565.[66] Walaupun Panembahan Ratu I sangat berwibawa di Jawa, tetapi kekuatan politik dan keagamaan di Cirebon justru melemah karena rumitnya posisi Cirebon di antara dua kekuatan besar-Banten dan Mataram (De Graaf 1985:114). Panembahan Ratu I wafat pada 1650 dan diteruskan oleh penggantinya yakni Pangeran Girilaya (Panembahan Ratu II).[67]

Secara politis Cirebon selalu berada di belakang Mataram ketika berkonflik dengan Banten dan VOC meskipun jarang terdapat usaha politik yang kuat dari Panembahan Ratu.[68] Berbeda dengan hal itu, Cirebon disebutkan pernah beraliansi dengan Mataram di bawah Sunan

**Gambar 1.7.** Foto halaman depan Keraton Kasepuhan Cirebon
Sumber: KITLV

66 Menurut Basyri (1989: 21, 30), Dipati Carbon I adalah suami Ratu Wanapeti (putri Bagus Pasai atau Fatahillah) yang memimpin Cirebon selama 12 tahun; sementara Tjandrasamita (1977: 64) menyebutkan bahwa Panembahan Ratu I memerintah Cirebon (1572–1649) dua tahun setelah wafat Sunan Gunung Jati.

67 Berbeda dengan keterangan De Graaf dan Pigeaud, Basyri menyebutkan bahwa Pangeran Girilaya bukan penerus langsung dari Penembahan Ratu I, tetapi putra Pangeran Sendang Gayam (Dipati Cerbon II) yang menikahi putri Panembahan Senopati Mataram (De Graaf dan Pigeaud 1985: 145; Basyri 1989:21).

68 De Graaf dan Pigeaud (1985: 145).

Amangkurat I ketika menyerang Banten dalam peristiwa Pagaregeg (1650).[69] Pada 1667, Panembahan Girilaya wafat di Yogyakarta dan tiga putranya diangkat menjadi pemimpin baru di Cirebon, yaitu Pangeran Martawijaya (Kesultanan Kesepuhan), Pangeran Kertawijaya (Kesultanan Kanoman), dan Pangeran Wangsakerta (Kacirebonan). Kemudian, kekuasaan atas wilayah Cirebon diserahkan oleh Susuhunan di Kartasura kepada VOC pada 1705 dengan tetap memberikan kekuasaan kepada keturunan Sunan Gunung Jati.[70]

Melemahnya kekuatan politik penguasa Cirebon tersebut dilukiskan William Thorn yang mengunjungi Cirebon bersama pasukan Inggris pada 1813,

> *Tetapi menurut cerita, kemegahan raja sebelumnya yang berdaulat kini telah terpuruk bersama kekuasaannya. Tak kurang dari empat sultan tinggal di tempat ini, di mana seluruh wilayah ini dulunya pernah menjadi milik leluhur mereka, tetapi setelah diberlakukan peraturan dan perjanjian baru, sebagian besar wilayah ini menjadi milik orang Belanda, di mana bangsawan-bangsawan sebelumnya akhirnya harus memakai gelar sultan bohong-bohongan, dengan distrik yang sangat kecil untuk dikelola, di mana dari lahan yang sempit itu mereka diharuskan membayar beberapa porsi tertentu dari hasil produksi mereka kepada master mereka yang baru.*[71]

Sejak kedatangan dan kekuasaan Islam berkembang, tatanan politik-hukum dan ekonomi di Cirebon menggunakan undang-undang Jawa Kuno. Berbagai regulasi politik, hukum, agama, dan ekonomi tersebut lahir bersamaan dengan migrasi kelompok prajurit dan pedagang Islam baik dari Demak maupun sisa-sisa pembesar militer Majapahit yang ikut serta dalam proses Islamisasi di Cirebon dan Banten.[72] Pemimpin tertinggi, atau raja, bergelar *maulana* 'pemimpin yang kita hormati'; ataupun *imam* (pemuka atau *imām*) yang memimpin pemerintahan dan keagamaan.

69 Lapian dan Edi Sedyawati (1997: 5).

70 Menurut Basyri (1989: 31), sejak Pangeran Girilaya tinggal di Mataram, pemerintahan di Cirebon telah diserahkan kepada putra termuda yaitu Pangeran Wangsakerta. Sementara itu, dalam catatan De Graaf (1985: 140, 145), putra Pangeran Girilaya yang diberi mandat memimpin Cirebon bukan Wangsakerta, tetapi Martadipa.

71 Thorn (2004: 261).

72 Kern (1973: 12–3).

Selain itu, pemimpin wilayah di Cirebon juga merangkap sebagai pedagang dan tokoh keagamaan. Seorang bangsawan Banten, Djajadiningrat, menuliskan kesan-kesannya, "Berdagang dan menjalankan kewajiban agama, hingga kini masih dilakukan bersama-sama. Sudah barang tentu, bahwa pengertian tentang agama pada seseorang pedagang yang satu dapat lebih mendalam daripada yang lain, baik dahulu, maupun sekarang."[73]

Peran pedagang dalam kepemimpinan Islam di Cirebon juga ditunjukkan dengan gelar *lebe* yang berarti "seorang pedagang yang beragama Islam."[74] Dengan demikian makin jelas bahwa, sejak awal, tradisi kepemimpinan di Cirebon tidak terlepas dari basis ekonomi perdagangan. Pada abad ke-17/18, sistem dan wujud pranata hukum, politik, agama, dan ekonomi di Cirebon terlihat lebih "utuh" yang berakar tidak jauh dari ajaran Jawa-Islam sejak kekuasaan Demak. Beberapa aspek di antaranya diambil dari kitab-kitab Jawa Kuno seperti Raja Niscaya, Jaya Lengkara, Kontara Manawa, Solokantara, Jugul Muda, Angaskartabasa, dan Raja Niti. Warna muatan Islam-Jawa dalam tatanan hukum-politik di Cirebon mulai terlihat lebih kuat ketika beberapa kitab seperti Undang-Undang Mataram dan Adilulah yang telah mengalami pembaruan digunakan sebagai aturan baku hukum dan politik pada awal pertengahan abad ke-18.[75]

Pada 1768, ditetapkan sebuah kitab hukum dan pedoman pengadilan disebut *Pepakem Cerbon* (*Pêpakêm Cêrbon*). Munculnya kitab itu didorong oleh keinginan Residen Cirebon, Joan Frederik Gobius (menjabat 1714-17), menyusun pranata baru yang dapat berlaku bagi raja-raja di Cirebon. Fungsinya untuk memisahkan tugas dan jabatan penghulu dengan jaksa di Cirebon pada akhir abad ke-18. Kitab tersebut memiliki tiga bagian penting yaitu organisasi pengadilan, hukum acara, dan hukum materiel yang dilaksanakan oleh lembaga pengadilan (*karta*) dan tujuh mantri atau tujuh jaksa.[76]

---

73 Djajadiningrat (1973: 30–1).

74 Dicatat Tome Pires. Sementara, di Aceh, *lebe* atau *leube* juga diartikan sebagai orang yang cerdik pandai dalam bidang agama dan dihormati dengan gelar *teungku* (Djadjadiningrat 1973: 24, 301).

75 Kern (1973: 12).

76 Kern (1973: 11–2, 17); Ekadjati (1995: 92); Sunami (2016: 213).

Secara umum dapat disimpulkan bahwa pemerintahan dan tatanan hukum di Cirebon menjalankan hukum Islam-Jawa dengan peran lembaga-lembaga Islam untuk mendukung penyelenggaraan penguasaan politik serta pengembangan agama Islam.[77] Terang pula bahwa di Cirebon dan kawasan Priangan pada awal abad ke-18 telah mengikuti tata usaha pengadilan di Mataram sehingga di setiap wilayah kabupaten terdapat seorang jaksa yang bekerja di bawah perintah bupati dan khusus kasus perdata dilimpahkan ke Mataram. Pada Resolusi 18 April 1712, disebutkan bahwa bupati di Cirebon dan Priangan memiliki hak memeriksa penduduk dengan hukum adat Jawa seizin Pangeran Aria Cirebon dan Residen Cirebon. Diketahui, di Cirebon dan Priangan terdapat tiga jenis pengadilan yaitu pengadilan agama, pengadilan *drigama* (adat), dan pengadilan *cilaga* (perniagaan).[78]

Dapat pula dikatakan bahwa terbentuknya masyarakat (pesisir) Cirebon setelah kedatangan Islam merupakan hasil diaspora perdagangan yang dijalankan saudagar muslim.[79] Struktur sosialnya mirip dengan Banten, menunjukkan corak masyarakat kesultanan yang secara garis besar terdiri atas empat golongan sosial, yaitu (1) raja dan keluarganya sebagai pemangku status sosial tertinggi politik dan ekonomi; (2) golongan elite yang ditentukan fungsi dan jabatan yakni bangsawan, mangkubumi, mantri, laksamana, senapati, tumenggung, ulama, dan syahbandar; (3) golongan bukan-elite berdasarkan profesi yakni pedagang, tukang, pelayan, prajurit, petani, seniman, dan pejabat rendahan; dan (4) golongan terakhir dan terendah adalah budak yakni kalangan yang tidak mampu membayar pajak[80]

Dalam masyarakat Cirebon juga terdapat pola hubungan khusus di antara kelompok pedagang Islam yang didasari oleh jalinan kekerabatan campuran. Mereka adalah pedagang keturunan Jawa dan keturunan Cina serta beberapa keturunan campuran etnis asing lainnya. Pola hubungan itu terjadi karena banyak pedagang keturunan campuran yang berperan sebagai agen pemasok material perdagangan ke pedalaman Galuh dan

77 Ambary (1997: 38).

78 Sunami (2016: 213).

79 Priyono (1991: 26).

80 Harkatiningsih (1983: 183).

sekitarnya, serta penyalur komoditas dari pedalaman Cirebon. Para pedagang tersebut umumnya memiliki darah keturunan Sunda, Jawa, Bugis, Melayu, Cina, Persia, Keling, dan Arabia yang berperan penting dalam perdagangan di Samudra Hindia pada akhir abad ke-15 dan awal abad ke-16.

Lapisan elite agama dan politik di wilayah Cirebon umumnya memiliki karakter personal dan kolektif yang khas yaitu berupa struktur sosial urban masyarakat Islam di pesisir utara Jawa pada masa awal kedatangan Islam.[81] Kebanyakan penguasa Islam di pesisir Jawa, seperti di Cirebon pada umumnya, adalah keturunan bangsa Moor yang kaya dan keturunan para *mullah* yang selama hampir satu abad sebelum awal abad ke-16 telah "menjadi Jawa." Mereka menjadi penguasa politik di wilayah pusat-pusat perdagangan di pantai utara Jawa karena dukungan kuat para penguasa lokal bekas kerajaan Sunda dan Majapahit yang telah masuk Islam. Kebangsawanan mereka dapat dilihat dari beberapa ciri utama tradisinya yang mengirimkan kaumnya sendiri berdagang dengan jung, mengalahkan pesaingnya yaitu para penguasa Sunda dan Jawa, mengangkat diri mereka menjadi penguasa yang baru, dan mengambil alih perdagangan serta kekuasaan di Jawa.[82]

Etnis keturunan tersebut mengadopsi bahasa, gaya hidup, dan tata cara lokal dengan proses asimilasi yang cepat untuk menjadi kelompok hibrida.[83] Secara tidak langsung, para penguasa (*pate*) memiliki karakter hibrida yang merasa lebih unggul secara keseluruhan dibandingkan dengan penguasa Jawa dan Sunda asli. Situasi itu digambarkan oleh Tome Pires sebagai berikut,

> *Para pate atau penguasa ini bukanlah orang Jawa asli yang berasal dari negeri ini, melainkan berdarah Cina, Persia, Keling, dan berbagai negeri . . .. Namun, mengingat mereka dibesarkan dalam lingkungan orang Jawa yang suka pamer, ditambah kekayaan yang mereka warisi dari para nenek moyang, orang-orang ini pun merasa lebih penting di kalangan bangsawan dan negeri Jawa secara keseluruhan, bahkan melebihi orang-orang asli*

81 Priyono (1991: 30).

82 Cortesao (2018: 223).

83 Alatas (2010: xxxiii).

*yang tinggal di pedalaman. Orang-orang ini begitu dihormati di negerinya, seolah-olah mereka memiliki posisi sosial yang lebih tinggi dari itu.*[84]

Dalam kisah lokal, beberapa tokoh penting yang menjadi elite sosial adalah para pendiri pedukuhan (desa) atau cikal bakal yang umumnya merangkap peran sebagai juru labuhan dan agamawan.[85] Mereka membangun fasilitas pusat pemerintahan lokal, perdagangan, keagamaan, permukiman, pasar, dan tajuk yang ramai dipenuhi warga pendatang.[86] Bangunan rumah milik masyarakat umum hingga kurun 1680-an terbuat dari bambu, kecuali beberapa rumah milik penguasa yang terbuat dari bahan batu atau papan kayu.[87]

Penduduk yang mendirikan permukiman di Kota Cirebon tersebut tidak saja dari kalangan orang biasa, tetapi juga bangsawan Sunda yang secara suka rela dan damai memeluk Islam ataupun dengan warga taklukan. Mereka pada umumnya datang dari sekitar pusat Cirebon seperti Babadan, Luragung, Kuningan, Indramayu, Karawang, dan lain-lain, yang melakukan perkawinan campur. Hasilnya ialah terbentuknya corak baru status sosial dalam masyarakat Cirebon yang menghiasi keragaman struktur sosial baru.[88]

Raja-raja yang membangun dinasti di Cirebon berusaha mempertahankannya secara turun-temurun hingga kini. Mereka merupakan hasil tranformasi elite sosial Jawa dan Sunda yang melakukan perkawinan campur baik dengan etnis muslim asing, menjadi elite sosial Jawa-Islam, maupun Sunda-Islam. Mereka mengaku sebagai keluarga keturunan pendiri wilayah ataupun agamawan seperti Sunan Gunung Jati.[89] Bangsawan Islam di Cirebon tersebut merupakan golongan

84 Cortesao (2018: 223–4).

85 Salah seorang tokoh elite sosial desa ialah Ki Gedeng Tapa atau Ki Gedeng Jumanjati sebagai Juru Labuhan di Dukuh Pesambangan. Dalam *Carita Purwaka Caruban Nagari* juga disebutkan beberapa nama seperti Walangsungsang dan istrinya (Endang Ayu) serta adiknya (Nyai Lara Santang yang membuka Desa Kebon Pesisir atau Tegal Alang-alang) di selatan bukit Amparanjati. Nama agamawan di Cirebon dari Makkah dan Campa ialah Syaikh Hasanudin (putra Syaikh Yusuf Sidiq) dari Campa dan Syaikh Datuk Kahfi (Syaikh Idhofi atau Syaikh Nuruljati) (Tjandrasasmita 1997: 61).

86 Sulistiyono (1997: 82).

87 Padmo (1989: 2); bdk. Bab 7 buku ini.

88 Sulistiyono (1997: 82).

89 Lapian dan Sedyawati (1997: 4).

menengah keturunan dari "tanah seberang" yang mengubah tingkah laku dan cara hidup mereka sebagai pedagang, *cavaleiros*, bangsawan yang mendapatkan hak memiliki lahan atau wilayah.[90] Raja dan keluarganya mendapatkan penghasilan dari pajak, bea cukai, upeti, hadiah, dan berbagai jenis hasil pengolahan tanah, dan lain-lain.[91]

Yang tidak kalah penting ialah saudagar Cirebon yang memiliki posisi rangkap sebagai kelompok elite sosial utama dan sebagai agamawan ataupun bangsawan. Beberapa nama dan peran mereka disebut dalam catatan perjalanan Tome Pires,

> *Ia [Pate Quedir] bukan satu-satunya pria berpengaruh di Cirebon, ada setidaknya lima atau enam pedagang yang sama hebatnya dengan dirinya, namun mereka semua dan penguasa Cirebon memberi penghormatan pada Pate Quedir. Mereka semua menganggapnya sebagai seorang pedagang dan ksatria yang hebat.*[92]

Mattassary mungkin merupakan salah seorang dari beberapa saudagar Cirebon abad ke-16 yang disebut-sebut oleh Tome Pires.[93] Dari keterangannya bisa diartikan bahwa saudagar merupakan elemen penting dalam lapisan sosial baru di Cirebon pada pergantian abad ke-16. Walaupun beberapa di antara mereka merupakan keturunan asing, mereka memiliki silsilah yang dihasilkan dari perkawinan campur. Hal itu berpengaruh terhadap sistem keberlanjutan yang linear dan pentingnya hubungan keluarga yang memegang peran primordial yang kemudian diwarisi oleh tokoh-tokoh agama pesantren dalam bentuk hubungan kekeluargaan baru.[94]

Para saudagar yang memegang perdagangan pantai dan pedalaman pada umumnya juga memiliki relasi dengan elite penguasa Cirebon, bahkan beberapa dari mereka merupakan anggota keluarga bangsawan lokal. Mereka kemudian membentuk lapisan sosial baru yang memiliki

90 Sulistiyono (1997: 82).

91 Harkatiningsih (1983: 86).

92 Cortesao (2018: 223); lihat juga Sulistiyono (1997: 80).

93 Nama Mattassary juga disebutkan Tjandrasasmita (1997: 64) berdasarkan catatan harian (*dagregister*, April 1632); Mattassary dikatakan memimpin seribu orang Cirebon mendukung pasukan Mataram menyerang Batavia.

94 Andrieu (2017: 50).

peran sosial, politik, perekonomian, dan keagamaan lebih dominan dibanding masyarakat umumnya di Cirebon. Salah satu unsur penting dalam kalangan saudagar ialah syahbandar yang ditunjuk oleh raja, baik dari orang asing maupun keturunannnya yang dipandang memiliki kemampuan ilmu perdagangan, pelayaran, serta koneksi dengan India, Cina, dan Arab. Mereka juga berperan menguasai pajak pelayaran dan rumah penarikan pajak (*tol huis*) ketika kapal masuk ke pelabuhan.[95]

Akan halnya golongan non-elite di Cirebon meliputi petani, penangkap ikan, buruh, budak dan kelompok kelas menengah ke bawah lainnya. Walaupun dalam ajaran Islam tidak dikenal sistem kasta, tetapi dalam realitas pembangunan lapisan sosial berdasarkan tingkat perekonomian, genealogi, dan keagamaan, pelapisan tetap terjadi di Cirebon sejak awal pembentukan kekuasaan lokal Islam pada abad ke-15. Meskipun demikian, bentuknya berbeda dari model kasta pada masa sebelum kedatangan Islam.

Hingga awal abad ke-19, raja dan kerabat serta aparatnya di Cirebon merupakan pemilik lahan kerajaan dan bidang bidang-bidang tanah lainnya yang juga dimiliki oleh sebagian masyarakat.[96] Klaim kepemilikan lahan oleh para elite sosial-politik di Cirebon tersebut menunjukkan bukti bahwa mereka bukan saja berpengaruh penting pada politik, tetapi juga menguasai basis-basis kapital perekonomian hingga munculnya pengaruh kekuasaan kolonialisme.

Dari seluruh uraian bab ini dapat diikhtisarkan kembali bahwa secara sosial-geografis, masyarakat Cirebon terdiri dari masyarakat pesisir dan pedalaman. Geografis Cirebon berupa pantai dan lereng pegunungan tidak memisahkan antara dua kategori masyarakat tersebut, tetapi sebaliknya justru terpadu melalui berbagai interaksi jalinan kekerabatan, politik, dan perdagangan. Perpaduan itu menjadi basis politik dan perekonomian yang kuat di Cirebon, baik sebelum menguatnya pengaruh Islam maupun pada masa-masa sesudahnya.

Baik masyarakat pesisir maupun sebagian masyarakat pedalaman di Cirebon memiliki karakteristik sosial-budaya yang kosmopolis, terbuka,

95 Harkatiningsih (1983: 86).

96 Van Niel (2005: 247–8).

dan moderat pada setiap perkembangan zaman. Masyarakat pesisir lebih awal mencapai keterbukaan terutama setelah kedatangan Islam pada abad ke-15, sementara masyarakat pedalaman secara perlahan mulai terbuka khususnya pada transisi abad ke-17 ketika wilayah pedalaman Cirebon digunakan sebagai pengembangan perkebunan oleh pedagang Eropa. Meskipun terlihat berbeda, pembentukan karakteristik masyarakat Cirebon dapat dikatakan melalui satu "pintu," yaitu peran kelas penguasa yang umumnya berstatus sebagai pedagang dan agamawan. Hal itu membuat karakteristik masyarakat Cirebon hampir sama dengan karakteristik masyarakat umumnya di pusat-pusat perdagangan pantai utara Jawa yang dipimpin oleh bangsawan-religius yang menafsirkan bahwa perdagangan atau wirausaha adalah model baru tercepat dalam membangun kekuasaan politik dan ekonomi. Dengan demikian, para penguasa di pedalaman Cirebon mulai terjaring oleh usaha aliansi penguasa pesisir yang menempatkan diri sebagai perantara politik dan ekonomi bagi ruang daratan dan lautan setelah abad ke-15.

Tipologi dan karakteristik sosial-budaya masyarakat Cirebon tersebut tetap bertahan hingga periode sejarah berikutnya. Nilai-nilai budaya masyarakat Cirebon yang berbeda dengan Jawa dan Sunda telah mengakar kuat dalam entitas ekonomi dan politik khas "cerbonan" yang berbeda dengan pusat-pusat perdagangan lain di pantai utara Jawa. Nilai-nilai tersebut tumbuh dari proses panjang komodifikasi dan hibridasi dari berbagai pengaruh, seperti perdagangan etnis asing, kekuasaan Demak, Mataram, VOC, dan kolonialisme, yang membentuk 'Kawasan Cirebon' sebagai pusat perniagaan maritim hingga awal abad ke-20.

BAB 2

# De Javasche Bank dan Ekonomi Kolonial

Pembentukan De Javasche Bank Agentschap Cirebon tidak dapat dilepaskan dari politik ekonomi kolonial Sistem Tanam Paksa (STP). Tidak dimungkiri bahwa STP merupakan "peneroka" dan peletak dasar ekonomi perkebunan dan modernisasi infrastruktur di wilayah Cirebon. DJB dibentuk untuk mengelola keuangan hasil perkebunan dan perdagangan yang berhubungan dengan praktik STP. Fungsi dan perannya sebagai bank sirkulasi sekaligus bank komersial makin berarti sejalan dengan kegiatan perdagangan global berskala besar yang berkembang pesat pada masanya. Posisi pengusaha Tionghoa dan masyarakat pribumi dibahas di bagian selanjutnya dalam bab ini untuk melihat bagaimana STP memberikan dampak jangka pendek dan jangka panjang bagi kelompok masyarakat non-Eropa di Cirebon. Ditutup dengan survei singkat tentang perkembangan DJB dan kondisi ekonomi wilayah kota dan Keresidenan Cirebon secara keseluruhan hingga akhir masa kolonial.

## TERBENTUKNYA ADMINISTRASI POLITIK EKONOMI KOLONIAL

Kekuasaan kolonial di wilayah Cirebon merupakan hasil dari proses panjang sejak kedatangan pedagang di bawah bendera VOC (Vereenigde Oost-Indische Compagnie) hingga keruntuhan basis politik kekeratonan Cirebon seiring menguatnya posisi dan pengaruh politik Belanda di wilayah itu sejak awal abad ke-18. Posisi tersebut dicapai

melalui serangkaian perjanjian dan kontrak politik antara VOC dengan Keraton Cirebon, yang secara bertahap menggerus kekuatan politik dan ekonominya sekaligus melepaskannya dari Kesultanan Mataram. Pada 1705, Kesultanan Mataram secara resmi menyerahkan wilayah keraton Kanoman, Kasepuhan dan Panembahan (kemudian menjadi Kacirebonan) kepada VOC yang selanjutnya menjadikannya sebagai Keresidenan Cirebon dan menempatkan seorang residen sebagai perwakilan di sana. Adapun cakupan wilayah keresidenan itu meliputi Indramayu dan Gebang (telah berada di bawah VOC sejak 1689), tanah-tanah Sultan Cirebon (Kandanghaur, sebagian Indramayu, Cirebon, Majalengka, dan Kuningan), serta wilayah Cirebon Priangan (Galuh, Limbangan, dan Sukapura).[1]

Dalam perkembangannya, Residen Belanda memainkan peran sangat penting, yaitu sebagai penghubung langsung antara VOC, Sultan, dan penduduk (di) Cirebon. Selain itu, ia menguasai monopoli perdagangan pelabuhan, hasil produksi pertanian di pedalaman, dan menuntut penyerahan tenaga wajib kerja.[2] Melalui residen, VOC menyewakan tanahnya—disebut *particuliere landerijen* (tanah partikelir)—kepada pengusaha Eropa dan Tionghoa secara individual dengan melibatkan elite Keraton Cirebon yang mendapatkan bagian dari hasil penyewaan tanah tersebut.[3] Selain itu, pada saat yang sama, Residen juga berupaya mencari keuntungan pribadi—praktik yang kemudian dianggap sebagai korupsi yang berkontribusi pada kebangkrutan VOC pada 1799.[4] Permasalahan

1 Proses tersebut berawal ketika kekuasaan Mataram atas Cirebon berakhir pada 1677 dan proses peralihannya dilakukan pada 1684 (Jacobs 2006: 241; Siddique 1977: 34–5; Breman 2014: 19). Wilayah-wilayah itulah yang menjadi inti Keresidenan Cirebon (batasan spasial buku ini), kecuali wilayah Cirebon Priangan yang kemudian menjadi bagian dari Keresidenan Priangan pada awal abad ke-19. Lihat juga deskripsi latar belakang morfologi kota Cirebon dalam Bab 7 buku ini.

2 Setoran hasil produksi dan hasil alam serta kerja wajib penduduk meliputi beras, gula, lada, kopi, indigo, kayu jati, pala, minuman fermentasi beralkohol (*spirits*), pengolahan garam, penebangan kayu di hutan, penggalian kanal, pembangunan jalan, jembatan, dan pengerukan lumpur pada 1790. Kerja wajib paling berat pada waktu itu dipikul oleh kelompok *wuwung* (petani tak bertanah), *penumpang* (petani yang menumpang hidup di tanah orang), dan *bujang* (petani muda tak bertanah yang belum menikah yang dipekerjakan di pabrik gula di pedalaman Batavia dan menggali kanal di dalam kota) (Siddique 1977: 39; Breman 1983: 12).

3 Hoadley (1994: 184–5); Molsbergen (1931: 11).

4 Siddique (1977: 38); Molsbergen (1931: 2–5, 10–1). Sementara itu, menurut Nierstrasz (2012: 187–202), berbagai faktor yang menyumbang pada kemunduran VOC ialah perang Inggris melawan Belanda (1780–4), perubahan politik di Asia (keruntuhan Dinasti Mogul di India dan Safawid di Persia), meningkatnya instabilitas dan ancaman kekuatan baru Asia, munculnya Inggris dan Prancis sebagai kompetitor perdagangan komoditi baru serta perbedaan penyelengaraan perdagangan swasta, dan maraknya praktik korupsi.

lainnya ialah perselisihan internal antar-keraton di Cirebon yang tidak kunjung usai dengan intervensi VOC sehingga memunculkan putra mahkota Sultan Cirebon pada 1793 dan pemberontakan Ki Bagus Rangin pada 1802.[5]

Proses pembentukan kekuasaan kolonial di Cirebon selanjutnya ditandai oleh pemerintahan transisi di bawah H. W. Daendels yang mewakili kekuasaan Prancis-Belanda (1808-11), dan Thomas Stamford Raffles yang mewakili kekuasaan Inggris (1811-16). Kedua tokoh itu dikenal sebagai pengusung gagasan liberal dan kebijakan reformatif. Daendels dengan ideologi revolusioner Prancis ala Napoleon dan Raffles dengan gagasan liberalisme-humanitarian dianggap membawa pemikiran dan ideologi baru bagi Jawa.[6] Daendels membagi (Pulau) Jawa menjadi sembilan wilayah prefektur, setingkat keresidenan, dan Rembang sebagai wilayah kehutanan khusus. Ia juga menghapuskan hak-hak *privilege* dan feodal para bupati dengan menjadikan mereka sebagai pegawai negara kolonial. Lebih lanjut, Daendels juga mengubah pola relasi pemerintah kolonial dengan kerajaan lokal dengan menempatkan kepentingan dan harga diri Pemerintah Belanda sebagai prioritas. Di sektor peradilan, Daendels menciptakan Pengadilan Lokal (*Landgericht*) yang dikepalai oleh bupati dan kepala prefektur. Dalam sektor ekonomi dan fiskal, Daendels menghapus berbagai kerja dan penyerahan wajib yang bersifat feodal, mengusir orang Tionghoa dari perdesaan, menerbitkan uang kertas, dan mempertahankan sistem penyewaan tanah kepada pengusaha swasta dan sewa lisensi pajak. Dengan demikian, Daendels hampir mengubah secara total sistem administrasi kolonial di Jawa.[7]

Bagi wilayah Cirebon dan sekitarnya, berbagai kebijakan Daendels tersebut menyebabkan merosotnya posisi para sultan Cirebon dari raja menjadi bupati yang tunduk kepada prefektur dan gubernur jenderal sejak 1809. Selain itu, Daendels menggabungkan wilayah kekeratonan Cirebon menjadi dua prefektur yaitu tanah/ wilayah milik para sultan dan milik Kabupaten Cirebon Priangan; masing-masing sultan mendapatkan

5 Menurut van der Kemp, perlawanan rakyat Cirebon terus berlangsung setelah Ki Bagus Rangin terbunuh pada 1807, yang berlanjut hingga 1818 meskipun dalam skala yang lebih kecil (Broek 1891: 363–83; ENI [I]: 494–7; Kemp 1920: 310–65).

6 Day (1904: 163); Bastin (1954).

7 Furnivall (1976: 64–5); Breman (1983: 16–7); Wahid (2012: 255–68).

sekitar 80.000 subjek (penduduk) dan sejumlah bidang sawah, meski tetap harus membayar pajak. Usaha mendepolitisasi sultan juga dilakukan Daendels dengan mengembangkan sekolah *ronggeng* dan mengarahkan para sultan menyibukan diri pada kegiatan seni dan budaya.[8] Cirebon juga merupakan salah satu wilayah yang terdampak pembangunan Jalan Raya Pos, sebuah proyek raksasa yang diprakarsai Daendels. Pembangunan jalan raya itu melewati Cirebon, terutama jalur Karangsembung–Semarang, berdampak buruk terhadap rakyat, terutama karena memicu serangan malaria. Terlepas dari dampak negatif itu, pembangunan Jalan Raya Pos, dari sudut pandang kolonial, memberikan kemudahan mobilisasi pasukan militer dan manfaat ekonomis bagi pemerintah ataupun penduduk di Tanah Jawa secara umum—antara lain mendukung aktivitas pengangkutan hasil perkebunan kopi dan panen padi dari wilayah pedalaman ke pelabuhan dan menghubungkan Cirebon dengan berbagai kota lainnya di Jawa.[9] Selain itu, dalam jangka panjang Jalan Raya Pos memicu pertumbuhan kota-kota di pantai utara Jawa lengkap dengan fasilitas pasar, permukiman, dan gedung pemerintahan.[10]

Warisan terpenting pemerintahan Raffles ialah kebijakannya di bidang pajak tanah (*landrent*). Pada dasarnya, kebijakan itu untuk mengganti sistem pengerahan tenaga kerja dan penyerahan wajib petani, mengakui hak kepemilikan lahan yang digarap petani, memberikan kebebasan petani menanam komoditi yang diinginkan, dan mendorong mereka terlibat lebih jauh dalam ekonomi uang.[11] Sistem pajak tanah merupakan bagian dari rencana besar Raffles mereformasi administrasi di Jawa untuk mengurangi jumlah dan pengaruh kaum priayi pegawai pribumi, menekan pengeluaran, meningkatkan tabungan negara, mengubah sistem pengumpulan pajak dari petani, dan meningkatkan areal persawahan dan aktivitas pertanian.[12] Di Cirebon, untuk

8 Siddique (1977: 43–4).

9 Wahid (2011: 237–59); Stapel (1940: 38); Knaap dan Boomgaard (1989: 26).

10 Nas dan Pratiwo (2002: 707–25).

11 Sebagai gambaran, pajak di Cirebon pada 1814 dikenakan pada produksi garam, opium dan bea kota yang mencapai 255.306 rupee, belum termasuk 32.270 rupee pada lahan yang diurus para sultan. Penerapan sistem tersebut baru dilaksanakan secara seragam pada 1920 (Hugenholtz 1994: 139–40; Cribb dan Kahin 2004: 235; Thorn 2004: 261).

12 Bastin (1954: 115).

**Gambar 2.1.** Ilustrasi pembangunan Jalan Raya Pos yang diinisiasi oleh H.W. Daendels di Jawa.
Sumber: KITLV

mewujudkan kebijakannya tersebut Raffles melakukan perjanjian dengan sultan-sultan Cirebon (April 1812) untuk menghapus sejumlah kebijakan Daendels, membebaskan utang mereka kepada negara, dan memberikan tunjangan tahunan sebesar 5.000 *rixdollar*. Di sisi lain, perjanjian tersebut juga semakin melemahkan kedudukan politik kekeratonan Cirebon sebab para sultan ditempatkan sebagai bawahan Raffles dengan kompensasi uang sebesar 18.000 gulden per tahun. Sistem *landrent* baru berlaku pada Juli 1813 dan setelah sekitar satu tahun berjalan Residen Crawfurd melaporkan bahwa pelaksaanaan pengumpulan pajak tanah di wilayah Cirebon berjalan tanpa hambatan berarti.[13]

Setelah memperoleh kembali Jawa dari kekuasaan-antara Inggris, Pemerintah Belanda merumuskan kebijakan penting untuk mengeksploitasi Jawa berdasarkan usulan Johannes van den Bosch (Gubernur Jenderal Hindia Belanda, 1830-33). Raja William I menginginkan bahwa kebijakan

13 Bastin (1954: 127–30, 163).

tersebut bisa mengatasi darurat keuangan Kerajaan Belanda secara cepat akibat krisis politik dan perang di Eropa dan Jawa.[14] Kebijakan Van den Bosch—dikenal sebagai *Cultuurstelsel* atau Sistem Tanam Paksa (STP)—segera diterapkan setelah pemerintah kolonial berhasil memadamkan Perang Jawa (1825-30).

Dalam pelaksanaannya, STP hanya terpusat di Pulau Jawa, terutama di wilayah yang dikuasai langsung oleh Belanda, di luar wilayah kekuasaan Keraton Surakarta dan Yogyakarta (*Vorstenlanden*) serta tanah-tanah partikelir milik pribadi. Sementara itu, di luar Jawa praktik mirip STP dikembangkan di Sumatera bagian barat dan Minahasa untuk monopoli kopi dan melanjutkan monopoli cengkih di Kepulauan Maluku.[15] Konsep dasar STP adalah melanjutkan sistem *Preangerstelsel* yang fokus pada budidaya kopi yang dalam pelaksanaanya sangat bergantung pada tenaga kerja penduduk sekaligus lahan persawahan terbaik milik mereka terutama untuk budidaya tebu dan indigo yang ditanam bergantian dengan padi, dan budidaya kopi di lereng pegunungan. Selain itu, untuk menjamin keberlanjutannya STP melibatkan pejabat dan elite lokal, mulai dari bupati hingga kepala desa dengan imbalan sejumlah persen dari hasil panen mirip dengan sistem kerja wajib tradisional (*heerendiensten*). Atas keterlibatan para petani dalam STP, pemerintah kolonial memberikan kompensasi finansial yang bisa mereka gunakan membayar pajak tanah.[16]

Keresidenan Cirebon yang sejak dekade 1820-an meliputi kabupaten Indramayu, Cirebon, Majalengka, Kuningan dan Galuh,[17] menjadi salah satu lokasi pelaksanaan STP dan, sebelumnya, bagian dari penanaman kopi *Preangerstelsel*. Hampir semua komoditas ekspor penting dalam skema STP dibudidayakan di wilayah itu, tetapi yang paling bernilai ekonomis adalah kopi, tebu, dan indigo.[18] Terdapat beberapa alasan mengapa wilayah Keresidenan Cirebon dipilih sebagai lokasi pelaksanaan STP. Pertama, Cirebon merupakan wilayah yang sudah lama berada di bawah

14 Abdurrachman (1982: 63); Schrikker (t.t.: 132–44); Furnivall 1976: 108–12.

15 Fasseur (1992: 28).

16 Elson (1994: 42); Furnivall (1976:115–6); Van Niel (1992:115–6).

17 Pada awal abad ke-20, nama Kabupaten Galuh diubah menjadi Ciamis dan secara administratif dipisahkan dari Keresidenan Cirebon untuk digabungkan dengan wilayah Keresidenan Priangan (ENI 1896: 343).

18 Fernando (1982).

**Gambar 2.2.** Suasana Perkebunan Kopi di Priangan pada Masa Preangerstelsel
Sumber: Tropenmuseum

kekuasaan Belanda sehingga otoritas politik lokal, khususnya keraton-keraton Cirebon, terikat dengan perjanjian dan membuat mereka tunduk kepada kekuasaan kolonial. Kedua, penduduk perdesaan Cirebon masih terikat pada struktur, norma, dan ikatan sosial feodal yang memudahkan penguasa Belanda memobilisasi tenaga kerja dan lahan yang dibutuhkan untuk mengembangkan perkebunan komersial. Ketiga, wilayah Cirebon memiliki dukungan sumber daya alam dan manusia yang sesuai dan melimpah untuk pengembangan STP. Sebagian lanskap geografisnya yang berupa dataran tinggi sangat cocok untuk budidaya kopi dan sebagian lain berupa dataran rendah yang subur sangat cocok untuk budidaya tebu dan indigo. Selain itu, pada 1834, Cirebon berpenduduk padat, yang pada awal pelaksanaan STP berjumlah 425.061 jiwa, ditambah 4.320 orang Cina, 195 orang Asia lainnya, dan 214 orang Eropa.[19] Keempat, letak wilayah Cirebon strategis dan memiliki infrastruktur transportasi darat

19 Boomgaard dan Gooszen (1991: 106, 127, 130); Molsbergen (1931: 24).

dan laut yang lengkap sehingga memudahkan pengangkutan hasil panen dari pedalaman ke pelabuhan, dan selanjutnya dikapalkan ke Eropa.

Selain kopi, tebu dan indigo, tanaman lain yang dibudidayakan secara luas dan berskala besar dalam kerangka STP di Cirebon ialah rosela (bahan karung goni), kayu manis, dan teh dalam skala terbatas. Tanaman rosela tidak lama dibudidayakan (1837-44), total menghasilkan panen senilai 133.143 gulden—tidak ada penjelasan mengapa komoditi ini tidak dikembangkan lebih lanjut. Kayu manis dikembangkan sejak 1837 hingga 1850 di lahan seluas 185 hektar. Selama periode tersebut, jumlah pembayaran untuk produk yang dihasilkan adalah sebesar 5.472 gulden. Komoditas lain yang dikembangkan ialah teh dengan mengambil lokasi di daerah dataran tinggi sebelah selatan Gunung Ciremai. Penanaman dirintis sejak pertengahan 1836 di lahan seluas 30 hektar dan bertahan hingga 1862 di atas lahan yang berkembang menjadi 4.883 hektar dan melibatkan tenaga sekitar 5.239 petani. Selama kurang lebih 25 tahun perkembangannya, perkebunan teh di Cirebon menghasilkan panen yang dibayar dihargai sebesar 1.789.017 gulden.[20] Tembakau mulai dibudidayakan pada 1844 di atas lahan seluas 43 bau (1 bau = 0,71 hektar), melibatkan 3.985 petani, dan menghasilkan panen sebanyak 344 pikul (1 pikul = 61,76 kilogram).[21] Tembakau merupakan tanaman musim kemarau yang dibudidayakan petani sambil menunggu datangnya musim hujan.

Pada Tabel 2.1 terlihat bahwa hanya tiga komoditas ekspor yang menghasilkan produksi tertinggi dan berkesinambungan sejak awal hingga akhir STP. Ketiga komoditas tersebut adalah kopi, tebu/gula, dan indigo. Budidaya kopi di Cirebon, secara resmi mulai masuk dalam skema STP pada 1832 dalam bentuk sistem wajib setor kepada pemerintah dengan imbalan sebesar 25 gulden per pikul. Dari jumlah tersebut, 2/5 dipotong untuk pembayaran sewa tanah, 3 gulden lagi dipotong untuk biaya pengangkutan, dan 12 gulden sisanya baru dibayarkan kepada mereka yang menyetorkan panen kopinya ke gudang-gudang

20 Baardewijk (1993: 71–8).

21 Elson (1994: 79–80).

**Gambar 2.3.** Pabrik Teh Argalingga yang Berlokasi di Kaki Gunung Ciremai, Jawa Barat.

Sumber: Tropenmuseum

**Tabel 2.1.**
**Produksi dan Jumlah Tenaga Kerja Terserap dalam Perkebunan Komoditas Ekspor Terpenting di Keresidenan Cirebon 1835-80**
**(dalam metrik ton dan jiwa)**

| Tanaman | | 1835 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kopi | (a) | 429 | 2.740 | 2.485 | 1.738 | 1.858 | 951 |
| | (b) | 16.093 | 22.513 | 22.502 | 27.169 | 35.129 | 65.287 |
| Tebu/gula | (a) | 1.434 | 3.777 | 6.640 | 9.771 | 18.082 | 15.303 |
| | (b) | 10.197 | 12.514 | 13.004 | 18.961 | 20.526 | 21.749* |
| Indigo | (a) | 81,4 | 261,1 | 52,4 | 15,5 | - | - |
| | (b) | 38.882 | 42.546 | 15.128 | 7.822 | - | - |
| Teh | (a) | 0,3 | 1,3 | 7,1 | 110,9 | - | - |
| | (b) | 523 | 120 | 250 | 554 | - | - |

Sumber: Diolah dari Baardewijk (1993)

Catatan: (a) jumlah produksi dalam metrik ton
(b) Jumlah tenaga kerja yang dipekerjakan
*Tahun 1877

pemerintah. Di bawah skema STP, ujung tombak pembudidayaan kopi berada di tangan para kepala desa dan priayi setempat karena mereka memiliki otoritas tradisional untuk mengerahkan *cacah*-nya. Wilayah perkebunan kopi terpusat di lereng Gunung Ciremai dan Gunung Sawal di Kabupaten Kuningan dan Galuh, sedangkan di wilayah lain kopi ditanam secara terbatas.[22] Tabel 2.1 menunjukkan bahwa jumlah produksi kopi cenderung positif sepanjang pemberlakuan STP; jumlah tenaga kerja juga terus meningkat hingga mencapai puncaknya pada 1850 ketika 441.319 petani terlibat dalam penanaman, tetapi setelah itu menurun hingga STP berakhir.[23]

Seperti halnya kopi, indigo juga telah dibudidayakan penduduk Cirebon untuk memenuhi kebutuhan sendiri atau diperjualbelikan secara lokal jauh sebelum STP. Van Den Bosch sendiri sejak awal memilih indigo untuk mengawali pelaksanaan STP di Cirebon pada akhir 1831, dengan perhitungan bahwa dalam waktu sekitar tiga bulan komoditas ini bisa dipanen dan dijual dengan harga tinggi sehingga menghasilkan keuntungan yang cepat. Hal itu diwujudkan dengan memanfaatkan kebun indigo yang telah ada sebagai penyedia bibit untuk memperluas budidaya komoditas itu di lahan-lahan baru. Selain itu, pemerintah kolonial menyediakan dana sebesar 60.000 gulden untuk membangun 12 pabrik dan membiayai petani yang bersedia bekerja di kebun-kebun indigo tersebut. Semua proses dijalankan dengan melibatkan kepala desa dan elite lokal, mulai dari menentukan lahan, memobilisasi dan mengelola tenaga kerja, mengawasi perawatan tanaman, memanen hingga mengangkutnya ke pabrik pengolahan.[24]

---

22 Menurut laporan pemerintah kolonial, jumlah petani kopi di Karesidenan Cirebon pada 1834 adalah 17.141 orang. Mereka mengurus pohon kopi yang jumlahnya terus meningkat, dari 23.3 juta pohon pada 1836 menjadi 29.5 juta pohon pada 1840 dan turun kembali menjadi 23.9 juta pohon. Dari pekerjaannya tersebut, setiap rumah tangga petani menerima rata-rata pembayaran 8.13 gulden (1836), kemudian meningkat menjadi 9.27 gulden (1840) dan 18.73 gulden (1844) (Fernando dan O'Malley 1988: 243–4, 246; Elson 1994: 65, 68, 71).

23 Menurut Fernando dan O'Malley (1988: 253–6), penurunan kopi disebabkan oleh umur pohon kopi yang menua, lahan yang jenuh, lokasi perkebunan semakin jauh dari perdesaan, hasil produksi tidak lagi seimbang dengan input tenaga kerja yang sejak 1830-an terus meningkat dan pembayaran (atau penghasilan) petani menurun. Pemerintah kolonial berusaha mendekatkan perkebunan ke perdesaan dan memastikan penanaman pohon baru, tetapi kurang berhasil karena jangkanya tidak seimbang serta diperparah oleh hama *hemilia vestatrix* yang berjangkit di kebun kopi di Cirebon hingga akhir 1890-an, kemudian berhenti pada 1905.

24 Elson (1994: 45–6).

**Gambar 2.4.** Seorang pengrajin batik sedang melakukan proses pewarnaan batik dengan menggunakan larutan indigo.
Sumber: KITLV

Sebagaimana terlihat dalam Tabel 2.1, perkebunan indigo berkembang pesat dengan melibatkan makin banyak petani penggarap di Cirebon. Pada 1835, indigo telah dibudidayakan di lahan seluas 4.599 hektar oleh 38.882 orang, dengan produksi senilai 255.995 gulden. Capaian itu meningkat dua kali lipat pada 1840, saat perkebunan indigo berkembang menjadi 7.182 hektar, melibatkan petani penggarap sebanyak 42.546 orang, dan menghasilkan pembayaran produksi senilai 660.581 gulden. Sementara itu, dari 12 pabrik awal hanya tiga yang bertahan, digantikan oleh 133 pabrik kecil yang tersebar di seluruh wilayah Cirebon berakhirnya era budidaya indigo pada 1864, seiring penemuan bahan pewarna kimia pengganti indigo.[25]

25 Elson (1994: 48). Hingga akhir masa STP, Keresidenan Cirebon merupakan salah satu wilayah konsentrasi pembudidayaan indigo, menyumbang sekitar 20–24 persen kepada total produksi indigo Jawa, khususnya pada 1840.

Komoditas terakhir yang paling penting secara ekonomi dalam skema STP di wilayah Cirebon ialah tebu atau gula. Sejak awal, Van den Bosch berpendapat bahwa tebu akan menghasilkan lebih banyak keuntungan. Oleh karena itu, petani lokal diminta mengalokasikan seperlima dari lahan garapannya untuk menanam tebu dan mereka diberi imbalan berupa pengurangan pembayaran pajak tanah ketika menyerahkan hasil panen tebu kepada pemerintah kolonial. Selain itu, pemerintah menggandeng pengusaha swasta untuk mengolah tebu menjadi gula yang siap dipasarkan dan dikapalkan ke Eropa. Penanaman tebu dilakukan di wilayah timur Cirebon, terutama di Distrik Sindanglaut dan Distrik Gebang, atas kesepakatan Residen dengan para kepala dan sesepuh desa. Kepada petani dijanjikan mendapat bayaran tunai berdasarkan jumlah tebu yang diserahkan ke pabrik gula. Berkaitan dengan langkah itu, Residen membuat kontrak dengan pengusaha swasta Eropa lokal terkemuka, W. Denisson, untuk membangun pabrik gula berbahan baku tebu yang disetorkan penduduk desa, dan menyerahkan hasil olahannya kepada pemerintah untuk selanjutnya diekspor ke Eropa. Pengecualian di Distrik Gebang, Residen menunjuk seorang Kapitan Cina sebagai pemegang kontrak pembangunan pabrik.[26]

Secara statistik, seperti tertera pada Tabel 2.1, perkebunan tebu dan produksi gula di Cirebon menunjukkan perkembangan positif sejak awal hingga masa akhir STP, dan mengalami penurunan sesudahnya. Pada 1835, tebu dibudidayakan di lahan seluas 1.065 hektar oleh 10.197 petani yang wajib menyerahkan hasil panennya kepada empat pabrik yang sudah disiapkan untuk mengolahnya menjadi gula. Total nilai panen tebu pada tahun tersebut mencapai 69.520 gulden. Sementara itu, tahun 1870 merupakan puncak perluasan perkebunan tebu di Cirebon hingga 3.033 hektar, mempekerjakan 20.809 petani, dan menghasilkan panen senilai 728.648 gulden. Sesudah itu, tanaman tebu dan produksi gula di Cirebon mengalami penurunan seperti terjadi di wilayah lain di Jawa. Kontraksi pasar internasional yang dipicu oleh kelebihan produksi telah memicu krisis gula pada 1880 yang dampaknya terasakan di Tanah Jawa.[27]

26 Elson (1994: 52–3). Pemerintah Belanda memberikan konsesi penuh kepada NHM (Nederlands Handels-Maatschappij) untuk mengangkut produk STP, terutama gula, ke pasar Eropa.

27 Knight (1996: 155–73).

Demikianlah, budidaya tebu, bersama dua komoditas utama lain—kopi dan indigo—menjadi tulang punggung pelaksanaan STP di Keresidenan Cirebon, bahkan memberikan kontribusi cukup signifikan di Jawa secara keseluruhan. Dari sisi kolonial, STP mampu menyelamatkan perekonomian "negeri induk" yang terpuruk terutama dalam kurun 1830-an. Antara 1832 hingga 1882, keuntungan dari tanah jajahan mengisi sekitar 19 persen pendapatan negara Belanda.[28] Perhitungan lain,[29] menyatakan bahwa pada periode 1850-an, keuntungan dari STP memberikan kontribusi sebesar 3,8 persen per tahun terhadap GDP (*Gross Domestic Product* atau hasil kotor nasional) Belanda. Bahkan, pada masa puncaknya antara 1860 hingga 1866, sepertiga dari pendapatan negara Belanda langsung diperoleh dari STP.[30] Hal itu menjadikan STP sebagai bentuk eksploitasi kolonial paling sukses yang tidak ditemukan di tanah jajahan lain di Asia, Afrika, ataupun Amerika Latin. Fakta tersebut memunculkan sejumlah pertanyaan seperti "harga" apa yang harus dibayar untuk kesuksesan finansial STP; apa dampak pelaksanaan STP bagi penduduk Jawa; siapakah yang diuntungkan atau dirugikan dari kebijakan eksploitatif tersebut.

Tidak dapat dimungkiri bahwa penduduk pribumi—khususnya di Pulau Jawa— menjadi pihak yang harus membayar mahal sukses STP baik secara sosial maupun ekonomi. Pembudidayaan kopi, indigo dan tebu, dalam dua dekade pertama pelaksanaan STP di Cirebon telah menimbulkan berbagai kesengsaraan penduduk desa di pedalaman. Situasi kritis itu menimbulkan gerakan protes mulai dari yang bersifat tertutup seperti penolakan bekerja hingga protes terbuka dalam bentuk unjuk rasa, sebagaimana terjadi pada 1830 dan 1836 saat pemerintah memaksa penduduk desa menanam indigo.[31]

Kondisi menyengsarakan juga dialami penduduk Cirebon yang dipaksa menanam kopi dan tebu pada dekade awal pelaksanaan STP karena alokasi tenaga mereka yang dibayar sangat rendah dan waktu

28 Houben (2012).

29 Van Zanden dan Marks (2012).

30 Houben (2012: 50).

31 Breman (1986: 28–9).

penanaman sering kali berbenturan dengan musim tanam padi. Selain itu, para petani juga kehabisan lahan terbaik untuk tanaman padi serta kehilangan siklus penanaman padi karena digunakan untuk penanaman tebu dan indigo selama sekitar 18 bulan dalam sekali musim tanam. Bila lahan tersebut bisa digunakan menanam padi, hasilnya sering kali kurang baik karena kesuburan tanahnya sudah terserap habis oleh tanaman tebu dan indigo. Hal itu diperberat dengan kenyataan bahwa petani juga harus mengangkut hasil panen tebu dan indigo ke gudang-gudang pemerintah dengan tenaga dan waktu tambahan yang sebenarnya bisa dipakai untuk membajak dan menyiapkan sawah.[32]

Kondisi tersebut, kadang kala ditambah faktor cuaca yang kurang mendukung, menyebabkan produksi padi di lumbung beras utama Cirebon, khususnya Indramayu, mengalami penurunan drastis jauh di bawah kebutuhan lokal. Sementara, pemerintah tidak bisa dengan cepat mendatangkan beras dari daerah lain untuk mengatasinya. Akibatnya, terjadi bencana kelaparan diikuti dengan pemiskinan akut petani lokal dan banyak petani meninggalkan kampung halamannya.[33]

Di sisi lain, STP mendorong perkembangan struktural dan infrastruktural yang dalam jangka panjang mendukung munculnya berbagai kesempatan ekonomi baru. Pada akhir 1830-an dan awal 1840-an (sebelum terjadi kelaparan pada dekade 1860-an), misalnya, penduduk Cirebon menikmati peningkatan "kemakmuran" yang ditunjukkan oleh fakta bahwa mereka memperoleh surplus uang setelah dikurangi pembayaran pajak tanah dari upah bekerja di perkebunan pemerintah. Dengan surplus tersebut, mereka bisa membeli barang-barang di luar kebutuhan subsisten. Selain keberhasilan proses penguatan monetisasi, aktivitas perdagangan dalam berbagai skala berkembang luas. Penduduk Cirebon makin terbiasa dengan ekonomi uang dan dengan sistem kerja

32 Elson (1988: 38–73), menilai kondisi tersebut sebagai faktor yang dijadikan bukti sejarawan untuk merumuskan dampak negatif STP di Jawa.

33 Sepanjang 1840-an, peristiwa gagal panen dan kelaparan juga terjadi simultan di beberapa daerah lain di Pulau Jawa sehingga diadakan perbaikan pelaksanaan STP. Khusus daerah Cirebon, kelaparan serupa juga terjadi pada 1880-an karena produksi beras yang cenderung stagnan tidak bisa lagi memenuhi kebutuhan subsisten akibat pertumbuhan demografi dan tekanan pajak yang dihadapi petani, serta komersialisasi beras yang tidak memperhatikan keseimbangan kebutuhan konsumsi lokal (Elson 1994:100–1; Fernando 2010: 291–320).

bayaran, sebagai pengganti sistem kerja paksa feodal (*corvee*), yang makin banyak tersedia bagi mereka.[34]

Perkembangan perdagangan selama masa STP juga terkait dengan diversifikasi ekonomi, terutama dengan makin berkembangnya sektor industri dan aktivitas ekonomi non-pertanian yang didukung peningkatan infrastruktur transportasi. Seperti di daerah Pulau Jawa lainnya, aktivitas perdagangan di Cirebon didominasi orang Cina dan sejumlah kecil pribumi. Para pedagang Cina memfasilitasi pertukaran barang dan komoditi baik yang diproduksi setempat maupun di tempat lain (impor) dari skala besar hingga eceran.[35] Industri di Cirebon bisa dikelompokkan menjadi tiga, yaitu (1) industri manufaktur yang mencakup penenunan, pemintalan dan pewarnaan kain (batik), pembuatan alat rumah tangga dan perkakas pertanian, tembikar, batu bata, kerajinan kayu, bambu, dan lain-lain; (2) industri pengolahan hasil pertanian dan perikanan, antara lain penggilingan padi, pembuatan minyak kelapa, pembuatan cerutu, dan pembuatan ikan asin dan terasi; dan (3) kegiatan jasa angkutan dan hiburan. Sebagian besar aktivitas industri tersebut berlokasi di perdesaan dan sebagian kecil di perkotaan.[36]

Sebagian besar industri tersebut sudah ada sejak sebelum STP, dan mengalami intensifikasi serta ekstensifikasi seiring industrialisasi sektor pertanian dan perbaikan sarana pendukung, terutama jalur transportasi, sejak praktik STP. Di wilayah Cirebon, perbaikan dan pengembangan infrastruktur transportasi terjadi dalam bentuk perbaikan jalan darat dan pelabuhan. Jalanan di Cirebon mengalami perbaikan sejak 1841 sehingga pengangkutan hasil produksi perkebunan dari pedalaman bisa dilakukan dengan kendaraan beroda. Hingga 1851, wilayah Cirebon—terhubung oleh 121 ruas jalan sepanjang 850 kilometer—memiliki konektivitas dengan daerah sekitarnya yang sebelumnya sudah terhubung melalui

34 Menurut Boomgard (1989: 113), pada 1810, terdapat 52 pasar dan 104 warung di Cirebon; jumlah itu meningkat pada 1852 menjadi 3.000 warung seiring perkembangan infrastruktur sejak STP diberlakukan (lihat juga Elson 1994: 263; Elson 1988:58).

35 Padmo (2000: 174–5).

36 Elson 1994: 266. Sementara, menurut Boomgaard (1989: 125), industri yang berkembang kala itu berskala kecil, dipengaruhi oleh aktivitas orang-orang Cina dan Eropa, dan bisa dikelompokan menjadi dua, yaitu (1) kerajinan dan keterampilan, dan (2) industri rumahan.

Jalan Raya Pos Daendels, sedangkan jalur kereta api baru dibuka pada akhir abad ke-19.[37] Jalan darat tersebut terhubung langsung dengan Pelabuhan Cirebon yang difungsikan sebagai titik pemberangkatan ekspor produk perkebunan dari pedalaman sejak STP beroperasi. Daya tampungnya terus ditingkatkan dengan perluasan dermaga pada 1865, serta pengerukan kolam labuh sedalam 150 meter pada 1887 untuk menampung kapal uap bertonase besar.[38] Pembangunan infrastruktur tersebut memberikan fondasi kuat bagi perkembangan ekonomi modern di Keresidenan Cirebon setelah STP dihapus pada 1870.

## PENDIRIAN DE JAVASCHE BANK AGENTSCHAP CHERIBON

Sekitar empat dekade beroperasi, STP benar-benar telah membuka pedalaman Jawa bagi aliran kapital, teknologi dan nilai-nilai baru, sekaligus mengintegrasikannya dengan pasar dan ekonomi dunia. Meskipun negara kolonial berperan sentral pada semua lini produksi hingga distribusi, STP mampu melibatkan tiga kelompok pemangku kepentingan lainnya yaitu elite Jawa pemegang kekuasan, orang-orang swasta Eropa, dan pengusaha Cina.[39] Kelompok pertama dilibatkan karena posisi politiknya yang strategis untuk memastikan ketersediaan pasokan faktor produksi utama yaitu tenaga kerja dan lahan; sementara dua kelompok lainnya dilibatkan karena mereka memiliki "spirit dan visi kapitalis," keterampilan dan jaringan ekonomi yang sangat dibutuhkan untuk menunjang pelaksanaan STP. Oleh karena itu, tidak mengherankan jika kedua kelompok terakhir tersebut, sejak awal sangat dibutuhkan penguasa kolonial sebagai partner dalam mewujudkan agenda ekonomi-politik STP.

Orang-orang swasta Eropa bahkan menjadi kelompok paling ambisius untuk memperoleh peran dan ruang ekonomi yang lebih

37 Elson (1994: 253).

38 Bagelaar (1931: 131); Sulistiyono (1994).

39 Houben (2002: 65).

luas, serta menuntut pengurangan peran negara dalam perekonomian. Adapun pengusaha Cina digandeng sebagai mitra dalam pengumpulan pajak sektor non-produksi, terutama jasa, konsumsi, dan perdagangan melalui sebuah mekanisme politik yang disebut *pachtstelsel*. Dengan posisi itu, para pengusaha Cina terpilih berhasil melakukan akumulasi kapital sehingga bisa berinvestasi dalam pelbagai sektor ekonomi modern non-perdagangan, sektor tradisional yang mereka kuasai sebelumnya.[40]

Baik pengusaha swasta Eropa—terutama Belanda—maupun Cina muncul sebagai kelompok kapitalis penting yang memainkan peran penting dalam industri perkebunan dan sektor ekonomi modern setelah STP berakhir pada 1870. Pemerintah kolonial kemudian memandang politik ekonomi konservatif-intervensionis sebagai kebijakan yang tidak efisien, dan karena itu segera menggantinya dengan kebijakan liberal yang memberikan ruang lebih luas bagi kelompok swasta untuk berperan dalam perekonomian tanah jajahan. Dalam kaitan itulah, posisi dan keberadaan kelompok swasta yang mapan sangat dibutuhkan sebagai motor penggerak ekonomi dan penjamin berlanjutnya pembudidayaan komoditi ekspor di Jawa.

Tugas utama pemerintah kolonial ialah memastikan bahwa semua kebutuhan kelompok pengusaha swasta bisa dipenuhi. Untuk itulah, pada 1870 pemerintah kolonial mengeluarkan undang-undang agraria baru sebagai perangkat hukum yang bisa menjamin ketersedian tanah bagi pengusaha swasta Eropa. Jauh sebelum itu, pemerintah juga telah mendirikan sebuah lembaga perbankan, yaitu De Javasche Bank, yang sejak awal pendiriannya pada tahun 1828 diberi kewenangan menerbitkan mata uang dan bertanggung jawab atas pengedaran mata uang kertas di Hindia Belanda. Pada saat yang sama, DJB berfungsi sebagai bank komersial swasta yang bisa memberikan kredit kepada swasta. Dalam kapasitas terakhir itulah DJB menjadi penjamin ketersediaan kredit bagi pemerintah dan pengusaha swasta terpilih sebagai partner dalam operasional STP, kemudian berlanjut sebagai bank pendukung aktivitas komersial swasta pada masa sesudahnya.[41]

---

40 Rush (1993).

41 Van Laanen (1980: 33–4); *The Java Bank (De Javasche Bank)* (1918: 5).

**Gambar 2.5.** De Javasche Bank sebagai bank sirkulasi yang didirikan di Batavia pada 1828

Sumber: Koleksi Arsip Bank Indonesia

Pilihan atas Cirebon untuk memiliki kantor cabang (*agentschap*) DJB tidak bisa dilepaskan dari fakta tentang posisinya sebagai salah satu wilayah penting di Hindia Belanda dalam skema pengembangan ekonomi perkebunan pasca-STP. Selain itu, keberadaan DJB di Cirebon akan memperlancar proses modernisasi ekonomi, memenuhi kebutuhan peredaran uang, dan menyediakan akses kredit bagi pelaku ekonomi untuk mengembangkan bisnis mereka. Pendirian DJB *Agentschap* Cirebon sendiri melalui proses yang cukup panjang dan berliku.

Cukup jelas bahwa DJB digunakan pemerintah kolonial untuk membantu pelaksanaan program STP yang dicetuskan oleh Van Den Bosch Gubernur Jenderal Hindia Belanda menggantikan Du Bus Gisignies pada 1830. DJB berfungsi sebagai bank sirkulasi sekaligus bertindak sebagai bank komersial. Sebagai bank komersial, DJB memiliki fasilitas perbankan berupa penerimaan simpanan nasabah dan pemberian pinjaman bagi pengusaha perkebunan yang terikat dalam Cultuurstelsel. Sementara

dalam menjalankan fungsinya sebagai bank sirkulasi, DJB mengatur peningkatan peredaran uang akibat sistem upah yang digalakkan di kalangan petani perkebunan. STP telah meningkatkan sirkulasi dan lalu lintas uang, suatu faktor ekonomi yang mempercepat timbulnya ekonomi uang.[42]

Dalam menjalankan fungsinya, DJB memperoleh mandat mencetak uang gulden Hindia Belanda dengan rancang paritas satu banding satu atau bernilai setara dengan uang gulden Belanda. Kedua uang tersebut bebas tukar dan dapat dianggap sebagai satu mata uang. Koin yang digunakan sama baik di Belanda maupun di Hindia Belanda, tetapi dalam hal uang kertas, DJB menerbitkan uang gulden sendiri dengan desain lokal. Uang itu dapat digunakan layaknya gulden Belanda di Negeri Belanda dan, sebaliknya, gulden cetakan Belanda berlaku pula sebagai *legal tender* di Hindia Belanda.[43]

Seperti telah disebutkan, DJB merupakan bank swasta dengan saham yang diperjualbelikan di pasar saham. Pemberian wewenang khusus oleh pemerintah kolonial itu membuat DJB berbeda dari bank-bank lainnya. Pada awalnya, DJB dirancang menjadi *banker's bank* atau bank utama di Hindia Belanda, tetapi tidak pernah terwujud hingga Indonesia merdeka. Kegagalan tersebut lantaran DJB tidak mampu berfungsi sebagai puncak sistem moneter Hindia Belanda karena sistem keuangan dan perusahaan Hindia Belanda terintegrasi dengan sistem di negeri induk. Bagaimanapun, segala kebijakan mengenai sistem moneter Hindia Belanda harus melalui persetujuan Negeri Belanda sehingga keleluasaan pengaturan moneter tidak pernah terwujud. Selain itu, integrasi sistem keuangan membuat banyak perusahaan di Hindia Belanda berpusat di Negeri Belanda dan oleh karena itu banyak laba ataupun penjualan dikirim langsung ke Belanda. Sebaliknya, banyak perusahaan mendapatkan kredit langsung dari bank-bank di Negeri Belanda tanpa perlu melalui perbankan di Hindia Belanda.[44]

Pimpinan DJB melihat prospek usahanya cukup cerah, terbukti dari keuntungan yang diterima. Hingga 1850-an, DJB merupakan satu-

42 Creutzberg dan Van Laanen (1987: 341); Kartodirdjo (1988: 319).

43 De Bree (1928: 44).

44 De Bree (1928: 44).

satunya lembaga perbankan yang memberikan kredit kepada pengusaha di Hindia Belanda. Kondisi tanpa saingan itu membuat DJB pada tahun-tahun pertama operasionalnya mampu meraih keuntungan besar, yakni sebanyak 4.183.794,94 gulden.[45] Optimisme inilah yang kemudian mendorong pembukaan dua kantor cabang di pelabuhan pantai utara Jawa masing-masing Semarang (1 Maret 1829) dan Surabaya (15 September 1829).

Selanjutnya, untuk memperluas jaringan operasi dan memperbesar keuntungan, Direksi DJB diperbolehkan membuat kebijakan membuka kantor cabang di kota-kota yang dianggap strategis dan menguntungkan. Awalnya, pola kebijakan pembukaan kantor cabang DJB diarahkan kepada kota-kota yang memiliki pelabuhan besar yang menjadi pintu masuk perdagangan ekspor-impor dengan dukungan dana besar— seperti terlihat pada pembukaan kantor cabang di Semarang dan Surabaya tersebut, yang berjarak hanya satu tahun setelah DJB didirikan di Batavia. Dalam perkembangan kemudian, kantor cabang DJB juga dibuka di wilayah pedalaman sehubungan dengan maraknya pembukaan perkebunan pasca-1870. Keberadaan kantor perwakilan DJB di kota-kota pelabuhan dan sentra perdagangan tersebut mendorong peningkatan kebutuhan akan uang dan sokongan kredit permodalan di kota-kota tempat kantor cabang berdiri dapat terpenuhi. Secara tidak langsung hal itu memberikan dampak positif bagi masyarakat setempat. Perkembangan perkebunan di beberapa daerah dan kelancaran arus perdagangan ekspor-impor, pada sisi lain, juga menguntungkan Hindia Belanda dari segi pertumbuhan dan peningkatan ekonomi.[46]

Arus lalu-lintas perdagangan di Cirebon yang makin ramai, terutama sejak STP beroperasi, mendorong Direksi DJB membuka kantor cabang di Kota Cirebon. Rencana pembukaan kantor cabang itu pertama kali dibicarakan dalam rapat Direksi DJB pada 22 Juni 1866 dan berlanjut empat hari kemudian, 26 Juni. Dalam rapat terakhir, gagasan membuka kantor cabang di daerah kota itu ditentang beberapa anggota direksi dengan alasan bahwa saat itu Cirebon sebagai kota pelabuhan dinilai

45 Hartono (1976: 21).

46 Darsono, dkk. (2016: 42).

belum begitu berkembang sehingga kurang menguntungkan secara komersial. Menurut mereka, sebagian besar tugas kantor itu hanya akan berupa pemindahan uang dari dan ke Cirebon. Argumen lain didasarkan pada pertimbangan bahwa Pelabuhan Cirebon tidak akan mampu menyaingi kebesaran Pelabuhan Batavia dan Semarang sebagai gerbang ekspor-impor komoditas hasil STP. Meskipun demikian, Dewan Direksi DJB akhirnya mencapai kata sepakat membuka kantor cabang baru di Cirebon. Selanjutnya, Dewan Direksi membawa usulan tersebut ke Rapat Umum Pemegang Saham De Javasche Bank yang dilaksanakan pada 14 Juli 1866. Setelah disepakati oleh para pemegang saham, usulan itu disampaikan kepada Gubernur Jenderal Hindia Belanda untuk mendapatkan persetujuan.[47]

**Gambar 2.6.** De Javasche Bank Agentschap Cheribon yang berdiri pada 6 Agustus 1866

Sumber: Koleksi Arsip Bank Indonesia

47 Museum Bank Indonesia (1991: 1).

Gubernur Jenderal Hindia Belanda memberikan persetujuan pembukaan kantor cabang DJB di Kota Cirebon melalui Surat Keputusan Nomor 63 tanggal 31 Juli 1866. Proses pembukaan kantor cabang DJB itu tergolong singkat, hanya memakan waktu sekitar tiga minggu sejak pengusulan. Berdasarkan persetujuan Gubernur Jenderal, kantor cabang baru itu secara resmi berdiri dengan nama De Javasche Bank *Agentschap* Cheribon pada 6 Agustus 1866.[48] Secara kronologi, DJB *Agentschap* Cirebon merupakan kantor cabang kelima setelah Semarang (1829), Surabaya (1829), Padang (1864), dan Makassar (1864).[49]

Dalam rapat Dewan Direksi DJB, 3 Agustus 1866, diputuskan mengenai waktu pelaksanaan pembukaan DJB *Agentschap* Cheribon, pimpinan dan pegawai kantor serta gaji tahunan atau bulanan. Keputusan itu tercantum dalam risalah rapat (butir IV) sebagai berikut,[50]

> *IV. Wordt ter tafel gebragt het gouvernement besluit dd. 31 Julij 1866 No. 63, waarbij vergunning wordt verleend tot het oprigten van een Agentschap der Javasche Bank te Cheribon. Waarop wordt besloten:*
>
> *a. Dat Agentschap te openen op den 6 Augustus 1866.*
>
> *b. Tot Agent te benoemen der Heer P. J. Janssens, notaris aldaar.*
>
> *c. Tot Commissaris den Heer J. H. Peter, Agent van de Factorij der Nederlansche Handel Maatschappij aldaar.*
>
> *d. Tot Plaatsvervangend Commissaris den Heer P. van Waasdijk, eerste geemployeerde can gemelde Factorij.*
>
> *e. De belooming van den Agent te bepalen op 25pct. Der winst, als minimum te stellen op f1.200,- 's jaar, zonder daarvan voor als nog kennis te geven aan belanghebbende, daar her mogelijk, zeker wenschelijk is dat het nimmer zal te pas komen.*
>
> *f. Den Agent voor lokaalhuur, Kassier, Klerken, Oppasser, toe te staan in eens f75 's maands.*

48 Museum Bank Indonesia (1991: 1).

49 Setelah tiga dekade sejak didirikan pada 1828, wilayah operasional DJB tidak mengalami perubahan atau perluasan. Namun, dalam waktu tiga tahun sejak 1864, DJB berurutan membuka lima kantor cabang baru, yakni Padang (1864), Makassar (1864), Cirebon (1866), Pasuruan (1867), dan Solo (1867) (Bree, 1928: 82–8; Claver 2014: 60).

50 Arsip Bank Indonesia, "Notulen van de Vergadering der Directie van De Javasche Bank" (3 Agustus 1866).

Inti keputusan rapat tersebut ialah bahwa kantor cabang dibuka pada 6 Agustus 1866; pimpinan cabang terdiri dari P. J. Janssens, notaris setempat, sebagai *agent* atau kepala kantor cabang; komisaris adalah P. H. Peter, pemimpin NHM Cabang Cirebon; dan P. Waasdijk, pejabat senior NHM, sebagai wakil komisaris. Gaji kepala kantor sebesar 25 persen dari laba bersih dengan batas minimum 1.200 gulden per tahun; sedangkan biaya sewa kantor, gaji kasir, pegawai tata usaha, dan pesuruh dialokasikan 75 gulden per bulan. Dalam risalah itu juga disebutkan bahwa pembukaan dan pengangkatan para pejabat kantor akan diumumkan dalam lembaran berita resmi dan harian umum lainnya, serta akan disampaikan pula pemberitahuan kepada semua kantor cabang lainnya.

**Gambar 2.7.** Gedung DJB Agentschap Cheribon lama yang lokasinya bersebelahan dengan Societiet Phoenix Cheribon.
Sumber: KITLV

Meskipun secara resmi DJB *Agentschap* Cheribon [secara berselang-seling disebut DJB Cirebon] telah beroperasi, masih terdapat beberapa kendala yang harus dihadapi bank tersebut, antara lain belum tersedia ruang kantor (tetap) untuk melakukan kegiatan operasionalnya. Masalahnya, penyediaan gedung kantor baru memerlukan lahan, biaya

pembangunan, material, tenaga kerja, dan tenaga ahli yang harus didatangkan dari Batavia. Pada 5 Juli 1867, DJB mengajukan permohonan kepada pemerintah untuk membeli sebidang tanah seluas 600 meter persegi seharga 1.100 gulden di Kampung Cangkol. Di atas lahan itu dibangun gedung kantor baru yang rampung pada 1868; artinya kebutuhan akan gedung permanen DJB Cirebon baru terpenuhi dua tahun setelah pembukaan resminya.[51]

**Gambar 2.8.** Gedung DJB Agentschap Cheribon baru yang lokasinya bersebelahan dengan Societiet Phoenix Cheribon.
Sumber: KITLV

Dalam operasional, DJB Cirebon harus bersaing dengan bank lain atau perusahaan pembiayaan swasta sejenis. Dalam sektor industri gula dan perdagangan ekspor, misalnya, sejak 1880-an setidaknya terdapat enam perusahaan pembiayaan atau penyedia kredit, yaitu Nederlandsche Handels Maatschappij (NHM), Dorrepaal & Company; Nederlands-Indische Handelsbank (NIHB), Handelsvereeniging Amsterdam (HVA); Koloniale Bank (KB); dan Internationale Crediet- en Handelsvereeniging Rotterdam (Internatio). Keenam lembaga pembiayaan tersebut bersaing ketat mendapatkan nasabah yang umumnya perusahaan gula berbasis keluarga Eropa atau Indo-Eropa dan Cina. Tidak jarang di antara bank

51 Museum Bank Indonesia (1991: 4).

dan perusahaan jasa keuangan tersebut terlibat dalam menyehatkan manajemen perusahaan mitranya yang mengalami kesulitan keuangan; apabila tidak bisa diperbaiki, perusahaan itu diambil alih.[52] Namun, ketika perusahaan penyedia uang itu sendiri mengalami kesulitan (likuiditas) dana, umumnya meminta bantuan kepada DJB.

**Gambar 2.9.** DJB Cirebon diterangi lampu-lampu hias pada acara pernikahan Putri Juliana dan Pangeran Bernhard
Sumber: KITLV

## DE JAVASCHE BANK DAN PERKEMBANGAN EKONOMI CIREBON

Dilihat dari segi waktu pembentukannya, DJB *Agentschap* Cirebon menjadi pertanda awal era baru perekonomian dalam kerangka kebijakan ekonomi politik liberal yang memberi peran penting kepada sektor swasta untuk berkiprah. Kondisi Cirebon dan masyarakatnya kala itu tentu berbeda dari masa awal STP pada dekade ketiga abad ke-19. Pada 1870, Keresidenan Cirebon berpenduduk 1.021.077 jiwa pribumi,

52 Prince (1996: 55–70).

14.511 orang Cina, 1.343 orang Asia Timur lainnya, dan 747 orang Eropa. Jumlah itu melonjak rata-rata hampir dua kali lipat bagi masing-masing golongan dari jumlah pada awal STP beroperasi, yaitu 425.061 orang pribumi, 4.320 orang Cina, 195 orang Asia Timur lainnya, dan 184 orang Eropa. Kenyataannya, STP mendorong pertumbuhan penduduk yang pesat di Cirebon dan Jawa secara keseluruhan.[53] Selain itu, seperti telah disebutkan, dari sisi infrastruktur ekonomi, Cirebon mengalami banyak kemajuan.

Meskipun demikian, perubahan garis kebijakan politik kolonial tersebut tidak terjadi serta merta, melainkan melalui proses bertahap dan sebenarnya tidak mengubah secara struktural formasi ekonomi kolonial yang digariskan STP. Arah perkembangan ekonomi Cirebon, seperti halnya wilayah lain di Jawa, terpolakan ke dalam tiga lapisan besar ekonomi, yaitu sektor ekonomi Barat, sektor ekonomi perantara, dan sektor ekonomi pribumi. Formasi ekonomi itu menciptakan siklus ekonomi yang berdaya-gerak sendiri (*self-sustained*) dan tertutup, artinya hampir tidak terjadi terobosan yang bisa mengatasi sekat tersebut. Negara kolonial dalam hal ini menjadi fasilitator dan penjaga keseimbangan ketiga sektor tersebut. Kondisi itulah yang menciptakan apa yang disebut ekonomi dualistik yang dipopulerkan J.H. Boeke—bahwa sektor Barat terpisah dari sektor pribumi, dan keduanya hanya bisa dihubungkan oleh sektor perantara.[54] Pengusaha swasta Eropa dan segelintir kecil pengusaha kaya Cina muncul sebagai pemain utama yang menggantikan peran pemerintah kolonial dalam melanjutkan sektor perekonomian Barat berskala besar, berorientasi ekspor dan padat modal serta teknologi, khususnya ekonomi perkebunan, perdagangan ekspor dan sektor modern lain. Sementara, penduduk pribumi tetap berada dalam posisinya sebagai penyedia tenaga kerja atau bergelut dalam ekonomi pertanian dan non-pertanian berskala kecil dan menengah. Sementara itu, mayoritas orang Cina dan Timur Asing lainnya, yaitu Arab dan India, bekerja di sektor perdagangan perantara, berperan sebagai kelompok '*trading minority*', yang menghubungkan kedua sektor ekonomi terdahulu.[55]

53 Boomgaard dan Gooszen (1991: 106, 110, 124, 127, 130).

54 Boeke (1953); Kartodirdjo (2002: 69).

55 Wertheim (1964: 39–82).

Berkaitan dengan peran DJB sebagai bank penyedia kredit yang berorientasi komersial, tidaklah terlalu mengherankan jika hanya sektor ekonomi Barat dan sebagian dari sektor perantara yang bisa memenuhi persyaratan untuk menjadi klien DJB dan mengakses fasilitas kredit yang disediakan. Sementara sektor ekonomi pribumi, praktis tidak tersentuh oleh fasilitas kredit dari DJB dan lembaga perbankan modern lainnya. Sebagian orang Cina lalu memanfaatkan kondisi itu untuk mengembangkan bisnis peminjaman uang—dikenal sebagai *cina mindring*—atau usaha pegadaian bagi masyarakat pribumi yang membutuhkan. Seiring perjalanan waktu, aktivitas peminjaman uang itu pun menjadi salah satu bagian dari sektor ekonomi perantara yang didominasi pengusaha Cina dan berkembang di sepanjang periode kolonial.

Perlu diingat bahwa keterlibatan pihak swasta, khususnya pengusaha Eropa dan Cina dalam pelaksanaan STP di Cirebon, sudah terlihat sejak 1850-an. Misal, pada 1851 pemerintah kolonial mengizinkan lima pengusaha manufaktur Cina menyewa dan mengolah lahan 'mati' untuk ditanami tumbuhan komoditas ekspor. Kemudian, pada 1854, pemerintah kolonial memberi izin kepada seorang pengusaha gula Belanda, atas dasar hukum Staatsblad Nomor 50 tahun 1838, menyewa lahan kosong untuk ditanami tebu. Sebuah laporan mengungkapkan bahwa perkembangan industri gula swasta di Cirebon paling pesat di Pulau Jawa; sekitar 4,000 bau perkebunan tebu tidak dikontrakkan kepada pemerintah melainkan kepada swasta.[56] Perlu dicatat pula bahwa selama masa STP, terdapat beberapa daerah kantong tanah milik swasta (*particuliere landerijen*) di Cirebon, seperti Kandanghaur dan Indramayu, yang dikuasai orang Eropa/Indo Eropa, dan mereka kembangkan sendiri sebagai perkebunan. Beberapa contoh itu menunjukkan bahwa pelaksanaan STP tidak sepenuhnya berada di tangan pemerintah karena pada situasi dan masa tertentu kalangan swasta juga diberi peran. Berkat peran yang diberikannya tersebut, para pengusaha swasta selama STP memperoleh pengalaman langsung untuk ikut ambil bagian dalam proses eksploitai sumber daya lokal, khususnya sektor perkebunan.

56 Elson (1994: 150); Bosma (t.t.: 275–91).

**Gambar 2.10.** Pemandangan Ladang Tebu dengan latar Gunung Ciremai
Sumber: KITLV

## SEKTOR EKONOMI BARAT

Yang dimaksud dengan sektor ekonomi Barat di sini meliputi seluruh aktivitas ekonomi produktif dan manufaktur berskala besar, padat modal, padat tenaga kerja, padat teknologi, dan berorientasi ekspor. Perkebunan tebu dan kopi, industri gula, dan industri manufaktur, merupakan sektor utama disusul perdagangan skala besar dan menengah, serta sektor jasa yang berkembang terakhir. Perbankan modern seperti DJB yang mengarahkan fasilitas dan program kreditnya termasuk sektor jasa ini. Kebanyakan sektor ini dikuasai orang Eropa dan Indo-Eropa, dan sedikit pengusaha elite Cina—sering disebut sebagai kalangan "cabang atas" yang muncul di perkotaan Jawa sejak pertengahan abad ke-19.[57] Merekalah pionir industri gula swasta berskala besar di Keresidenan Cirebon di luar pabrik pengolahan tebu berskala kecil yang berjumlah sangat banyak.[58]

57 Thian Joe (2004).

58 Post (2015).

Pada 1879, di wilayah Keresiden Cirebon berdiri 24 pabrik pengolahan gula, 10 pabrik di antaranya milik pengusaha Eropa/Indo-Eropa yang masih beroperasi di bawah kontrak pemerintah, dan 14 sisanya merupakan *vrij fabrieken* atau "pabrik bebas" milik swasta. Dari jumlah tersebut, 8 pabrik milik pengusaha Cina dan 6 pabrik milik orang Eropa. Seluruh pabrik gula milik pengusaha Cina berada di wilayah selatan Cirebon yaitu Kuningan, Sindanglaut, dan Losari-Ciledug. Pengusaha Eropa pemilik pabrik gula ialah Louis Theodore Gonsalves, yang tercatat memiliki pabrik gula di Tersana, Cileduk (bersama Kapiten Cina Tan Tiang Keng), Cigobang, Waled, dan Kalimaro. Selain itu, keluarga B. Feist dan keluarga Hovenaar masing-masing menguasai pabrik gula di Sindanglaut, dan Karangsembung. Pabrik Gula Luwunggajah yang cukup besar tercatat milik Kapiten Cina Cirebon Tan Tiang Keng, sedangkan Pabrik Gula Pangang yang lebih kecil dimiliki Oei Giok Lan. Pengusaha lain, Kwee Boen Ping, memiliki pabrik gula besar di Jatipiring yang dibeli dari J. Cezard & Co. seharga 36.000 gulden pada 1873. Namun, tidak semua pabrik gula tersebut bisa melanjutkan operasionalnya ketika krisis gula 1883/84 menghantam industri gula di Jawa.[59]

**Gambar 2.11.** Pabrik Gula Nieuw Tersana yang berlokasi di sebelah Tenggara Cirebon
Sumber: KITLV

59 Post dan Ling Thio (2019: 114–5).

**Gambar 2.11.** Pabrik Gula Nieuw Tersana yang berlokasi di sebelah Tenggara Cirebon (Lanjutan)
Sumber: KITLV

Tokoh Belanda penting yang tidak bisa dilepaskan dari industri gula di Cirebon ialah Tjaling Ament. Kelahiran Dokkum, Ament mula-mula bekerja di lingkungan Binnenlands Bestuur hingga mencapai puncak kariernya sebagai Residen Cirebon (1843-54). Setelah pensiun dari jabatan di pemerintahan, Ament menjadi pengusaha perkebunan tebu dan pengolahan gula di bawah payung perusahaan keluarga Aments Sugar Factory Co. Ia salah seorang pengusaha swasta yang menerima konsesi dari pemerintah kolonial untuk mengolah tebu hasil STP di Cirebon pada 1858.[60] Dengan konsesi itulah, Tjaling Ament mengembangkan usahanya di bidang industri gula. Setelah meninggal pada 1870, perusahaan Ament diwariskan dan diteruskan oleh anak-anaknya yaitu Jan Abraham Ament, J. L. Ament, H. M. Ament, dan D. Ament. Setelah krisis gula 1883/84,

60 Bosma dan Raben (2008: 216).

kelompok usaha Ament menguasai dan mengelola empat pabrik gula di Cirebon yaitu Arjawinangun, Gempol, Parungjaya, dan Glagamidang. Pabrik gula terakhir ditutup pada 1899 dan operasionalnya digabungkan dengan pabrik lainnya. Meskipun seluruh pabriknya beroperasi di daerah Indramayu dan Cirebon, Aments Sugar Factory Co. dikendalikan dari kantor pusatnya di Batavia.[61]

**Gambar 2.12.** Situasi Pabrik Gula Karang Soewoeng di Keresidenan Cirebon pada awal abad ke-20
Sumber: KITLV

Masih cukup banyak orang Belanda yang dikenal di lingkaran perkebunan atau pabrik gula di wilayah Cirebon dan sekitarnya. Antara lain Van der Broek d'Obrenen, J. E. Court dan F. de Groof. Nama pertama, Van der Borek d'Obrenen, tercatat sebagai pemilik pabrik-pabrik gula Jatiwangi, Cepiring, dan Gemoe; sementara Court dan De Groof merupakan pemilik Pabrik Gula Surawinangun di Plumbon. Di tengah kekuasaan kolonial yang "perkasa," masuk akal jika sumber-sumber

61 Wiseman (2001: 45).

ekonomi besar—semisal industri perkebunan—dikuasai oleh orang-orang di lingkaran dalam kekuasaan.

Tidak banyak diketahui bagaimana pabrik-pabrik gula tersebut berinteraksi atau bekerja sama dengan DJB ataupun lembaga perekreditan yang lain. Informasi yang beredar umumnya berkaitan dengan upaya pabrik-pabrik gula tersebut menghadapi krisis gula 1883/84 dan hama *sereh* yang mewabah pada waktu yang hampir bersamaan. Kisah perusahaan keluarga Gonsalves—sebagai contoh kasus—cukup memberikan gambaran situasi sulit waktu itu. Pada 1885, tiga pabrik miliknya yaitu Waled, Cigobang dan Kalimaro harus ditutup karena kesulitan keuangan. Sementara dua pabrik lainnya, Tersana dan Cileduk, masih bisa beroperasi karena sebagian dibiayai dari hasil kontrak kerja dengan pemerintah. Namun ketika kontrak berakhir, perusahaan itu harus mencari bantuan keuangan dengan mencoba memanfaatkan koneksinya di Belanda meski tidak sepenuhnya berhasil. Pada 1899, empat pabrik gula milik keluarga Gonsalves diambil alih oleh NHM. Maskapai dagang itu juga mengambil alih separuh saham keluarga Gonsalves di Pabrik Gula Cileduk miliknya, dan membiarkan separuh saham lainnya tetap dikuasai keluarga Tan Tiang Keng.[62]

**Gambar 2.13.** Suasana jalanan utama di Kota Cirebon pada awal abad ke-20
Sumber: KITLV

62 Post (2015: 118); Wiseman (2001: 364–5).

Nasib yang sama dialami perusahaan keluarga B. Feist, pemilik Pabrik Gula Sindanglaut. Pada 1893, manajemen dan operasional pabrik tersebut diambil alih oleh Nederlandsch-Indische Landbouw Maatschappij (NILM), sebuah perusahaan di bawah bendera Nederlandsch-Indische Handelsbank (NIHB) yang kemudian menjadi pemegang mayoritas saham kepemilikan pabrik tersebut. Sekitar pertengahan 1880, NILM juga membeli Pabrik Gula Kalitanjung di Distrik Cirebon milik Court, tetapi kemudian menjualnya kembali pada 1900 kepada Letnan Cina Kwee Keng Eng, sepupu Kwee Boen Eng. Perusahaan keluarga Hoovenaar juga tidak luput dari kesulitan sehingga pada 1896 menggabungkan tiga pabrik miliknya, Karangsuwung, Adiwerna, dan Jatibarang, ke dalam konsorsium Maatschappij tot Exploitatie der Suikerondernemingen Karangsoewoeng, Adiwerna en Djatibarang yang berkantor di Amsterdam, Negeri Belanda. Dengan demikian, mereka menjalankan ketiga pabrik tersebut bersama-sama dengan agensi manajemen Kooy & Co. di bawah payung Hoevenaar Concern hingga menjelang Perang Dunia II.[63] Sementara itu, pabrik-pabrik gula milik pengusaha Cina umumnya bisa terhindar dari dampak krisis karena berjejaringan keluarga yang luas dan mampu menghimpun cukup besar dana untuk mengamankan pabrik-pabriknya. Selain itu, produksi mereka diarahkan pada pasar domestik dan Asia Timur (tidak lagi ke pasar Eropa) sehingga terhindar dari dampak melemahnya pasar Eropa.

Dengan demikian, pada awal abad ke-20, tepatnya akhir 1911, jumlah pabrik gula yang masih bertahan di wilayah Keresidenan Cirebon tinggal 13 buah. Pabrik-pabrik itu ialah Tersana Baru (luas lahan 2.375 bau), Surawinangun Plumbon (1.375 bau), Gempol (700 bau), Arjawinangun (675 bau), Sindanglaut (1.625 bau), Karang-suwung (900 bau), Jatipiring (575 bau), Luwunggajah (1.000 bau), Losari Baru/ Panggang (375 bau), Parungjaya (725 bau), Jatiwangi (1.175 bau), Kadipaten (1.025 bau), dan Cidahu (150 bau). Dari jumlah tersebut, perusahaan keluarga Aments menguasai tiga pabrik, yaitu Gempol, Parungjaya dan Arjawinangun. Sementara lima pabrik lainnya milik pengusaha Cina, yaitu Jatipiring, Sindanglaut, Losari-Ciledug, Panggang, Luwunggajah, dan Tersana. Pada awal abad ke-20 pula, pabrik-pabrik milik pengusaha Cina mengalami kesulitan. Pada 1911, Pabrik Gula Cileduk berhenti beroperasi dan

63 Post (2015: 118).

akhirnya diambil alih oleh NHM; menyusul kemudian pada 1922 Pabrik Gula Luwunggajah milik keluarga Tan juga bangkrut dan diambil alih oleh NILM, tetapi kemudian dijual ke NHM. Pabrik Gula Panggang miliki Souw Soen Liang mengalami nasib yang sama, pada 1925 tidak mampu lagi beroperasi dan akhirnya dijual kepada NHM. Pabrik Gula Jatipiring milik Kwee Keng Liem menjadi satu-satunya pabrik milik pengusaha Tionghoa yang mampu bertahan hingga Depresi Ekonomi menjelang bersama dengan pabrik-pabrik gula milik keluarga Aments dan pengusaha Belanda lainnya.[64]

Depresi Ekonomi 1930 memukul telak industri gula di Cirebon. Jumlah pabrik gula yang masih bisa bertahan setelah Krisis Malaise itu hanya tinggal 8 buah dengan kapasitas produksi yang terus menurun. Areal penanaman tebu juga menjadi semakin berkurang dari sekitar 13.151 hektar pada 1930 menjadi hanya 699 hektar pada 1936. Kondisi itu berdampak berat tidak saja bagi pemilik dan manajemen pabrik gula tetapi juga bagi semua orang yang bekerja dan menggantungkan hidupnya di sektor padat modal tersebut. Tingkat upah menurun drastis yang pada 1936 tinggal 6 persen dari standar pada 1928, sedangkan kesempatan kerja di lingkungan pabrik gula juga menyusut hingga melebihi 50 persen. Akibatnya, manajemen harus mengurangi jumlah pegawai dan melakukan berbagai upaya penghematan serta efisiensi agar mampu menjaga "napas" pabrik. Manajemen pabrik gula berupaya meminta bantuan likuiditas dan permodalan kepada DJB ataupun penyedia jasa keuangan yang lain. Manajemen Pabrik Gula Kadipaten di Majalengka, sebagai contoh, diketahui mengajukan proposal bantuan teknis dan finansial kepada DJB. Tidak diketahui berapa dana bantuan yang dikucurkan DJB, tetapi setidaknya hingga akhir 1930-an, Pabrik Gula Kadipaten masih bisa mempertahankan eksistensinya.[65] Secara umum, Depresi Ekonomi 1930 menjadi ujian terakhir bagi sektor industri gula era kolonial sebelum invasi pemerintahan militer Jepang pada 1942 mengakhirinya.

Selain industri gula, sektor ekonomi Barat lainnya juga mulai berkembang di Cirebon, khususnya transportasi, jasa, perdagangan skala besar, dan jasa-jasa lain yang sebagian besar berpusat di daerah perkotaan.

64 Post (2015: 120–1); ANRI (1977: CXVII–CXVIII).

65 Arsip DJB, "Crediet Verleening van DJB No. 1708 (1931–1941)"; koleksi Bank Indonesia.

Perkembangan itu seiring dengan peningkatan infrastruktur kota pada pergantian abad ke-20. Salah satu yang terpenting ialah pembangunan jalur kereta api yang menghubungkan wilayah (kota) Cirebon dengan wilayah lain di Pulau Jawa. Jalur kereta api yang dibangun oleh SCS (Semarang-Cheribon Stroomtram Maatschappij) menghubungkan Cirebon dan Semarang (1893), berlanjut ke jalur Cirebon-Cikampek (dibangun pada 1909), dan jalur Cirebon-Kroya (1912). Dengan tersedianya jaringan kereta api tersebut, Kota Cirebon memiliki infrastruktur yang lengkap baik darat maupun laut sehingga mempercepat mobilitas barang dan manusia yang secara keseluruhan mendorong perkembangan ekonomi. Tidak mengherankan jika kemudian banyak perusahaan besar multinasional membuka cabang di Kota Cirebon, salah satunya ialah British American Tobacco. Jumlah penduduk Eropa pun meningkat tajam dari 398 orang pada 1890 menjadi 1653 orang pada 1930. Kondisi tersebut menasbihkan posisi Kota Cirebon sebagai (salah satu) kota kolonial menyusul status administratifnya sebagai *stadsgemeente* yang ditetapkan pada 1906.[66]

**Gambar 2.14.** Pabrik Rokok British American Tobacco di Kota Cirebon yang dibangun pada tahun 1924
Sumber: KITLV

66 Wahid (2009: 37–42).

Berdasarkan data nasabah DJB diketahui bahwa pengusaha Cina yang bergerak di sektor perdagangan umum dan industri berskala menengah merupakan mayoritas klien DJB. Para pengusaha Cina tersebut umumnya mengajukan pinjaman modal kepada DJB untuk membuka usaha baru, beberapa di antaranya untuk memperkuat usaha dagangnya yang telah berjalan. Selain bergerak di sektor perdagangan umum, beberapa pengusaha masih terikat dengan sektor perkebunan dan pabrik gula. Salah satu contohnya adalah Liem Thay Liang yang mengajukan pinjaman kepada DJB untuk memperkuat usaha perdagangan gula.[67] Data lain mengungkapkan bahwa cukup banyak di antara nasabah DJB Agentschap Cirebon, khususnya orang-orang Eropa, yang menggunakan pinjaman dana untuk membiayai usahanya yang berlokasi di luar Keresidenan Cirebon—yang paling banyak disebut ialah Tegal, Brebes, dan Pekalongan. Hal itu menunjukkan bahwa DJB Cirebon tidak hanya melayani pengusaha Eropa dan Cina yang berdomisili dan berbisnis di dalam wilayah administratif yang sama dengan lokasi kantornya.

## SEKTOR EKONOMI PRIBUMI

Setelah praktik STP berakhir, struktur ekonomi pribumi mengalami beberapa segi perubahan, meskipun masih dalam skala moderat. Jumlah penduduk pribumi yang bekerja untuk memperoleh upah, sebagai salah satu warisan STP, bertambah setiap waktu tetapi sebagian besar lainnya masih bergantung pada sektor pertanian. Jenis pekerjaan di luar pertanian berkembang pesat, tetapi masih terkendala dalam pemasaran dan permodalan sehingga banyak aktivitas industri kerajinan dan rumahan—sebagai contoh kasus—tidak berkembang menjadi industri besar. Keterjangkauan akses pasar dan permodalan sering disebut sebagai dua soal klasik yang dihadapi penduduk pribumi. Untuk mengakses pasar, mereka harus melewati "peran" pedagang Cina; hingga 1880-an harus membayar pajak pasar yang dikelola *pachter* Cina. Sementara akses terhadap kredit dan permodalan masih sangat terbatas karena kesulitan memenuhi persyaratan administratif yang rumit; juga karena tidak ada

67 Arsip DJB, "Vertrouwelijk brieven van DJB Cheribon No. 1406 (1906–1942)"; koleksi Bank Indonesia.

lembaga perkreditan formal yang bersedia memberikan akses kepada mereka. Suatu kondisi yang akhirnya mendorong petani dan penduduk desa beralih ke praktik peminjaman uang informal yang sering kali menjerat mereka dengan bunga tinggi.[68]

Hingga menjelang pergantian abad ke-20, pertanian pangan di Cirebon masih menjadi sektor penting. Wilayah seperti Indramayu dan Cirebon barat merupakan penghasil padi yang produktif, sering menghasilkan surplus sehingga bisa mengekspor hasilnya ke daerah sekitarnya. Pada 1880, tercatat 84 persen areal sawah di daerah Cirebon merupakan lahan sawah beririgasi. Persentase ini merupakan yang tertinggi di wilayah Jawa Barat, hanya sedikit di bawah Pekalongan (91 persen), Pasuruan (96 persen), Besuki (98 persen), dan Banyuwangi (100 persen).[69] Adapun luas areal persawahan di Keresidenan Cirebon pada 1880 adalah 150.400 hektar dari total pertanian yang mencapai 162.400 hektar. Jumlah tersebut sedikit meningkat pada 1915 menjadi 228.200 hektar sawah dan 297.800 hektar bidang lahan tanaman lain. Dari luas areal persawahan tersebut hanya 144.5 hektar yang dimanfaatkan atau ditanami padi (pada 1880), yang kemudian ternyata menghasilkan panen sebanyak 321.700 metrik ton gabah. Selama periode akhir kolonial produksi padi di wilayah Keresidenan Cirebon juga menunjukkan tren positif dari 331.100 metri ton pada 1900 menjadi 400.600 metri ton pada 1915, kemudian naik kembali menjadi 476.000 metri ton (1930) dan 783.000 metrik ton (1940). Kondisi stabil itulah yang menyebabkan wilayah Cirebon dianggap sebagai lumbung padi di Pulau Jawa, dan memungkinkan terjadi komersialisasi beras oleh penduduk setempat.[70]

Sebagaimana tecermin dalam Sensus Penduduk (*volkstelling*) 1930, mayoritas penduduk Keresidenan Cirebon masih menggantungkan hidupnya pada sektor pertanian. Di Kabupaten Kuningan, misalnya, dari 100 orang dewasa yang bekerja 75 orang di antaranya bertani; di Kabupaten Majalengka sebanyak 71 orang; di Kabupaten Indramayu 65 orang; dan di Kabupaten Cirebon berjumlah 35 orang. Dari data tersebut terlihat jelas bahwa Kabupaten Cirebon merupakan wilayah dengan

68 Zanden (2009: 160–5).

69 Boomgaard dan Zanden (1990: 68).

70 Boomgaard dan Zanden (1990: 118–21); Fernando (2010: 421–48).

jumlah agregat penduduk yang bekerja sebagai petani paling rendah—artinya paling urban; sedangkan Kabupaten Kuningan merupakan yang paling besar jumlah agregat penduduknya yang bekerja sebagai petani, artinya wilayah ini adalah paling 'rural'.[71]

**Gambar 2.15.** Situasi kawasan Pasoekatan di Cirebon pada awal abad ke-20
Sumber: KITLV

Data statistik yang lebih terperinci[72] tentang komposisi angkatan kerja penduduk Keresidenan Cirebon berdasarkan sektor ekonomi (1880) menunjukkan bahwa total angkatan kerja di Keresidenan Cirebon pada waktu itu berjumlah 962.263 orang atau 22 persen dari total penduduk. Dari jumlah tersebut, angkatan kerja di sektor pertanian sebanyak 166.000 orang (68,2 persen), selanjutnya sektor manufaktur 7.225 orang (3 persen), sektor perdagangan 37.292 orang (15,3 persen), sektor pelayanan masyarakat 5.358 (2,2 persen), sektor pelayanan 25.556 orang (10,5 persen), dan sektor lain-lain sebanyak 4.167 orang (0,4 persen). Persentase angkatan kerja di sektor pertanian Cirebon (68,2 persen) adalah paling rendah di seluruh Jawa Barat, bahkan di seluruh Pulau

71 *Volkstelling 1930* (1931).

72 Dalam Fernando (1998).

Jawa. Ini bisa dimaknai sebagai indikator bahwa Karesidenan Cirebon merupakan wilayah dengan tingkat industrialisasi atau diversifikasi ekonomi dan pertumbuhan kegiatan non-pertanian yang paling tinggi.[73] Diasumsikan, wilayah Keresidenan Cirebon terletak pada jalur transportasi yang strategis dan penduduknya bisa melakukan mobilitas atau menerima informasi tentang berbagai kesempatan ekonomi baru dari luar dengan mudah.

Dalam naskah Memori Serah Jabatan Residen C. J. A. E. T. Hiljee (3 Juni 1930) diungkapkan berbagai aktivitas ekonomi luar-tani (*non-farm* dan *off-farm*) yang digeluti penduduk perdesaan Cirebon. Perdagangan hasil bumi—padi, kapok, ketela, bawang merah, kacang tanah, sayuran, dan buah-buahan—merupakan salah satu aktivitas yang digeluti penduduk perdesaan terutama dalam skala kecil dan lokal karena usaha berskala besar dan ekspor/impor hampir sepenuhnya berada di tangan pedagang Cina. Hasil bumi tersebut dijual ke Karawang, Jakarta, dan Semarang menggunakan angkutan kereta api. Dalam pada itu, perusahaan rokok British American Tobacco menyerap sekitar 1.700 tenaga buruh pribumi,

**Gambar 2.16.** Situasi kawasan Pekiringan di Cirebon pada awal abad ke-20
Sumber: KITLV

73 Fernando (1998: 133–4).

menambah jumlah buruh upahan yang bekerja pada delapan pabrik gula tersisa yang masing-masing menyerap sekitar 400 orang. Pekerjaan sebagai buruh juga ditawarkan oleh industri manufaktur di Kota Cirebon, antara lain pabrik es (6 buah), perusahaan roti (3 buah), pabrik minuman (3 buah), pabrik pupuk (1 buah), pembakaran kapur (2 buah), perusahaan pembuat kecap dan minyak kacang, serta bengkel pedati.[74]

Residen Hiljee juga mengungkapkan bahwa perusahaan pribumi pada umumnya merupakan usaha rumah tangga bermodal kecil. Termasuk di dalam kategori usaha ini ialah pandai besi dan tukang tembaga yang tersebar di sebagian besar wilayah Keresidenan Cirebon; usaha pembuatan genteng dan batu bata di Waled, gerabah di Plered (Plumbon); dan perusahaan tenun di Kota Cirebon, Beber, dan Kuningan. Perusahaan batik banyak terdapat di desa-desa Trusmi, Karangtengah, Plered, dan Batembat. Awalnya, perusahaan batik tersebut milik pribumi, tetapi karena kesulitan keuangan dan bahan baku secara perlahan berpindah ke tangan orang Cina. Para pembatik pribumi lalu menjadi buruh upahan dan bekerja secara borongan yang hasilnya disetorkan kepada pemodal Cina dengan imbalan tertentu. Terdapat perusahaan daging di Kedawung. Perusahaan transportasi berkembang di Kota Cirebon dan sekitarnya, menyediakan jasa penyewaan delman dan kuda, serta beberapa mobil taksi—biasanya mobil bekas yang dibeli secara mengangsur. Ada perusahaan sepatu dan penjahit yang cukup dikenal orang kota. Sementara itu, sektor perikanan sebagai usaha sampingan di luar pertanian hampir tidak ditemukan di Cirebon; yang ada usaha penangkapan ikan laut yang dilakukan nelayan di desa-desa pantai. Sebagian besar dari mereka adalah nelayan buruh yang mendapatkan upah berdasarkan hasil tangkapannya.[75]

Dapat disimpulkan bahwa sektor ekonomi pribumi di Cirebon era kolonial sebagian besar berskala kecil, tradisional dan minim inovasi teknologi. Sebagian aktivitas ekonomi sudah mengarah ke manufaktur dan industri, tetapi skalanya masih terbatas, dan sering kali bergantung pada pihak lain dalam pengadaan bahan baku dan pemasaran. Industri

74 ANRI (1977: CLIII–CLIV).

75 ANRI (1977: CLIV–CLV).

batik, misalnya, awalnya merupakan sektor yang dikuasai pribumi, tetapi karena kekurangan akses pasar dan permodalan, akhirnya dikuasai pengusaha Cina. Sangat masuk akal jika sektor ekonomi pribumi tidak tersentuh oleh pelayanan kredit bank modern. Intervensi pemerintah untuk mengatasi masalah kredit bagi pengusaha pribumi pada awal abad ke-20, di bawah payung skema koperasi dan pegadaian, semestinya bisa menjadi alternatif jalan keluar. Hingga akhir masa kolonial, kondisi dualistik ekonomi di Cirebon belum sepenuhnya teratasi.

BAB 3

# Transisi Kekuasaan, Perbankan, dan Keuangan 1942-53

Pemerintah pendudukan Jepang di Indonesia mengambil alih De Javasche Bank Agentschap Cirebon yang sudah berlangsung selama 76 tahun dan menggantinya dengan Nanpô Kaihatsu Ginko. Tidak berlangsung lama, pemerintahan pendudukan harus menyerah kepada kekuatan Sekutu dalam Perang Dunia. Masalah perbankan timbul ketika DJB *Agentschap* Cirebon dibuka kembali dengan dukungan kekuatan militer Belanda yang mencoba menghidupkan kembali kekuasaan kolonial di Indonesia setelah kekalahan Jepang. Pemerintahan baru Republik Indonesia, di lain pihak, berusaha mendirikan lembaga perbankan sendiri sebagai bagian dari upaya memperkuat posisi negara merdeka dan berdaulat. Terjadi "perang bank" (dan mata uang) di tengah perang fisik bangsa Indonesia mempertahankan kemerdekaan. Perang berakhir setelah Belanda mengakui kedaulatan Indonesia, dan masa hidup DJB pun selesai setelah pemerintah menasionalisasinya menjadi Bank Indonesia cabang Cirebon pada 1953.

## EKONOMI PENDUDUKAN, NANPÔ KAIHATSU GINKO, DAN PEREDARAN UANG

Setelah menguasai wilayah Jawa dan Hindia Belanda, pasukan pendudukan militer Jepang mengambil alih berbagai sektor

perekonomian milik pemerintah kolonial Belanda. Di Cirebon, yang dikenal sebagai lumbung padi di Pulau Jawa, pasukan pendudukan Jepang menguasai panenan padi setempat yang ditaksir berjumlah 713.900 ton (catatan 1940) dengan perhitungan hasil panen 345 kilogram produksi per kapita.[1] Untuk mendukung kampanye perangnya, penguasa militer Jepang juga berupaya mengeksploitasi berbagai potensi alam dan sumber daya manusia penduduk Cirebon yang mencapai lebih dari dua juta orang setelah 1942.[2]

Di bidang pemerintahan, penguasa militer Jepang mengubah sistem administrasi wilayah. Kota administratif Cirebon diubah menjadi Tjirebon-Si, yang dikepalai oleh *Eenhoofdig Bestur Sityo*, setara wali kota.[3] Melalui perangkat perekonomiannya, yaitu Mitsui Nôrin, tentara pendudukan Jepang menguasai perdagangan kapas di atas kebun seluas 2.712 hektar pada 1943. Mereka juga menguasai perkebunan rami di Keresidenan Cirebon yang dikelola perusahaan Jepang, Nomura Higashi Indo Shokusan, sebagai perkebunan baru pengganti kebun teh di Cijeruk, Sumedang. Sementara itu, sejak Mei 1944, industri gula dikelola oleh badan usaha, Meiji Seito, bekerja sama dengan Divisi Pengaturan Perkebunan Gula milik Jepang hingga akhir pemerintah pendudukan pada pertengahan Agustus 1945.[4]

Untuk mencukupi logistik perangnya, pemerintahan militer Jepang berupaya menguasai hampir seluruh produksi padi, mulai dari penyediaan lahan, penanaman, pemanenan, hingga penjualan dan distribusi di Keresidenan Cirebon baik berupa gabah maupun yang telah menjadi beras.[5] Pemerintah militer berhasil mengekspor padi dari Cirebon

1 Inomata (1988: 35).

2 Jumlah penduduk Keresidenan Cirebon ini merupakan taksiran berdasarkan hasil sensus penduduk Cirebon 1930 yang mencapai 2.066.311 jiwa.

3 Sewaka (t.t.: 8).

4 Inomata (1988: 72-93).

5 Proses pengolahan padi menjadi beras di Cirebon didukung oleh 24 usaha penggilingan padi yang telah berdiri sejak 1941 milik pengusaha Cina (Inomata 1988: 132).

**Gambar 3.1.** Ilustrasi kedatangan balatentara Jepang di Jawa pada Maret 1942
Sumber: Public Source

sebanyak 15.519 ton (April-Agustus 1943).[6] Pada Maret 1944, penguasa militer Jepang memberikan target agar petani menyetor 152.903 ton padi, tetapi petani hanya mampu menyetorkan 21,4 persen dari jumlah yang diminta.[7] Penguasa militer juga meminta 15 kuintal panenan padi per hektar atau 70 persen dari luas lahan petani di Indramayu dan hanya meninggalkan jatah 25 gram beras per minggu kepada setiap petani di subdistrik Klanganan.[8] Militer Jepang juga membuka lahan padi baru yang dikoordinasikan oleh laskar perempuan (Fujinkai) atau Gerakan Goegoer Boenga.[9] Berbagai faktor tersebut mengakibatkan kelaparan di Cirebon hingga masa pemerintahan pendudukan Jepang berakhir.

6 Jumlah ekspor beras tersebut, jika dihitung secara keseluruhan selama satu tahun, menempatkan Keresidenan Cirebon pada nomor dua daerah penghasil padi terbanyak di Pulau Jawa setelah Keresidenan Besuki yang mencapai 205.000 ton.

7 Pada tahun terakhir kekuasaannya, pemerintah militer Jepang meminta penduduk Cirebon menyetorkan 84,2 persen dari target 128.692 ton padi dan 87.399 ton (80,9 persen) dari target 108.000 ton (21,4 persen dari rata-rata) (Inomata 1988: 132, 158, 139, 140).

8 Inomata (1988: 162).

9 Fatimah (2010: 294).

**Tabel 3.1.**
**Permintaan Beras di Subdistrik Wilayah Cirebon**
**April-Juni 1944**

| Subdistrik | Penyetoran (rata-rata %) | Subdistrik | Penyetoran (rata-rata %) |
|---|---|---|---|
| Cirebon | 97,4 | Babahan | 53, 0 |
| Cirebon Utara | 99,6 | Losari | 63, 0 |
| Cirebon Barat | 83,0 | Plumbon | 91,0 |
| Surakun | 52,0 | Weru | 73,0 |
| Beber | 21,6 | Sumber | 47,0 |
| Lemahabang | 37,0 | Palimanan | 73,0 |
| Karangsugun | 83,0 | Klangenan | 90,0 |
| Astanapura | 49,0 | Gegesik | 88,0 |
| Ciledug | 71,0 | Kapetakan | 49,0 |
| Waled | 74,0 | | |

Sumber: Inomata (1988: 142).

Hingga April 1944, di wilayah Cirebon terdapat 601 desa, 2.522 *aza jôkaī* (rapat berkala kampung), 16.816 *tonarigumi* (rukun tetangga), 301,004 rumah tangga, dan 1.200.411 jiwa penduduk. Jumlah penduduk Cirebon pada 1944 menunjukkan angka menurun (Tabel 3.2). Meskipun demikian, pada tahun yang sama terdapat 20 persen penduduk usia muda Cirebon dipaksa mengikuti program mobilisasi tentara Jepang melalui Seinendan (laskar pemuda) dan 30 persen melalui Keibodan (pembantu polisi), dengan jumlah 90.216 orang.[10] Mereka bukan saja berasal dari Kota Cirebon, tetapi juga dari wilayah kabupaten di bawah Keresidenan Cirebon seperti Indramayu, Cirebon, Majalengka, dan Kuningan.

**Tabel 3.2.**
**Angka Kelahiran dan Kematian di Cirebon pada masa Pendudukan Jepang 1939-44**

| Tahun | Kelahiran (jiwa) | Kematian (jiwa) | Surplus Kematian (jiwa) |
|---|---|---|---|
| 1939 | 73 | 50 | - |
| 1943 | 76 | 57 | - |
| 1944 | 65 | 80 | 15 |

Sumber: Inomata (2008: 171).

10 Inomata (1988: 285, 487).

Selama pendudukan militer Jepang, wilayah Keresidenan Cirebon (Cirebon-syû) dipimpin oleh residen (*syunchôkan*) bernama Ichibangase Yoshio[11] yang menjabat sejak Agustus 1942. Ia membawahkan beberapa bupati (*kenchô*) yang memimpin kabupaten (*ken*) Cirebon, Kuningan, Indramayu, dan Majalengka. Namun, beberapa bupati di daerah tersebut tidak seluruhnya diangkat oleh pemerintah pendudukan melainkan telah menjabat sejak masa kolonial (lihat Tabel 3.3). Dengan demikian, pemerintah militer mengakui kedudukan bupati-bupati tersebut dan kelanjutan pemerintahan yang sudah berjalan sejak masa kolonial Hindia Belanda. Pada 1 Desember 1944, posisi Ichibangase Yoshio bahkan digantikan oleh R. M. A. A. Suriatanubrata.[12]

**Tabel 3.3.**
**Daftar Bupati di Cirebon-syû hingga Akhir Masa Pendudukan Jepang**

| Kabupaten (ken) | Bupati (kenchô) | Periode Jabatan |
|---|---|---|
| Kuningan | R. Umar Said | 1940-42 |
| | Rifai | 1942-45 |
| Majalengka | M. A. Suriatanubrata | 1922-44 |
| | A. Umar Said | 1944-45 |
| Indramayu | A. A. Moh. Soediono | 1933-44 |
| | Dr. Mujani | 1944-45 |

Sumber: Muhsin Z. (2009: 7).

Secara umum, kegiatan perekonomian di Cirebon tetap berjalan biasa walau tidak sebaik di kota-kota penting lain di Pulau Jawa. Penguasa Jepang membentuk badan usaha baru bernama Nôgyô Kumiai—semacam koperasi unit desa—yang telah aktif sejak Juni 1944. Dengan adanya Nôgyô Kumiai di tingkat kampung atau desa, pemerintah militer dapat bertindak dalam banyak hal, yaitu mengontrol pengumpulan produk lokal pertanian dan perkebunan, mengawasi gudang pertanian dan perdagangan, mengatur transportasi pengangkutan pertanian dan perdagangan; juga menjual alat-alat pertanian dan menyediakan kebutuhan pokok harian masyarakat. Fungsi *kumiai* ialah mendistribusikan barang dagangan seperti beras, sereal, tahu, tempe, minyak kelapa, garam, gula, kopi, teh, rokok,

11 Sebelum menjabat Residen Cirebon, Ichibangase Yoshio adalah Gubernur Provinsi Tanial (Inomata 1988: 540).

12 Muhsin Z. (2019: 7).

bahan kain, bensin, dan sabun.[13] Dengan fungsi itu, *kumiai* berpengaruh penting terhadap berdirinya warung dan pertokoan di sepanjang Pasar Pagi, Karanggetas, Jagabayan, Pasuketan, Lemahwungkuk, Pasar Balong, dan pusat-pusat perekonomian desa lainnya. Perdagangan hasil nelayan juga terselenggara di Pekatipan dan Pasar Kanoman yang menjual aneka ikan asin dan beragam jenis hasil laut tangkapan nelayan.[14]

Denyut kegiatan ekonomi tersebut secara tidak langsung menunjukkan bahwa peredaran uang—sebagai alat pembayaran yang sah dalam transaksi perdagangan— tetap berlangsung di Cirebon. Meskipun demikian, uang bagi masyarakat Cirebon di tengah pendudukan kekuasaan militer asing merupakan "materi" yang sangat bernilai karena harga-harga barang kebutuhan sehari-hari melambung tinggi tak terkendali. Contohnya terlihat pada harga sebutir telur yang semula tiga sen menjadi 4 gulden [mata uang Belanda masih berlaku]; 1 liter beras dari 8 sen menjadi 4 gulden, dan sepasang sepatu dengan harga 8 sen kemudian menanjak menjadi 600 gulden.[15]

Peredaran uang yang "pesat" di Cirebon tampaknya berkorelasi kuat dengan adanya lokasi pusat pelatihan milisi Jepang dan pemberangkatan tenaga kerja paksa (*romusha*) dari wilayah Jawa tengah selatan dan Yogyakarta melalui Pelabuhan Cirebon.[16] Uang digunakan untuk pembayaran gaji pelatih milisi dan anggota militer Jepang di markas Kenpetai pimpinan Kapten Matsuoka Takezo, serta para pegawai militer yang memberangkatkan romusha dari Pelabuhan Cirebon.[17] Selain itu, sirkulasi uang di Cirebon diperlukan untuk menopang usaha Nomura East Indies Co., yang ditunjuk sebagai pengelola 64 perusahaan perkebunan bekas milik Belanda yang bergerak di bidang pembuatan galangan kapal, tambang kuarsa, tanin,[18] dan produksi tekstil.[19]

13 Inomata (1988: 302–5).

14 Musthofa (t.t.: 43).

15 Van Horn (2010: 233).

16 Sato (2010: 136); Suwarno (2010: 210).

17 Post (2010: 154).

18 Tanin adalah bahan penyamak kulit agar lebih awet dan mudah digunakan, misal untuk menyamak (mengubar) jala, tali, dan layar agar lebih tahan terhadap air laut, dan sebagai bahan pewarna dan perekat (Lemmens, dkk, 1997: 15-38).

19 Hayashi (2010: 241).

**Gambar 3.2.** Uang Invasi (*Invasion Money*) terbitan Pemerintah Militer Jepang yang masih menggunakan mata uang Gulden

Ket.Gambar: pecahan: 1 & 10 gulden, penandatangan: -, ukuran: 161x78 mm, warna dominan/ desain utama depan: coklat/ nilai nominal, pohon sukun dan kelapa (1 gulden) dan pohon pisang & kelapa (10 gulden), tulisan bahasa Jepang, belakang: coklat/ angka 1& 10 dan guilloche, pohon kelapa dan laut, pencetak: Djakarta Insatsu Kodjo, tanggal penerbitan: 1942, tanggal penarikan kembali: -.

Sumber: *Lintasan Masa Numismatika Nusantara: Koleksi Museum Bank Indonesia*, (Jakarta: Bank Indonesia, 2015), hlm. 183-188.

Di Cirebon, pada waktu itu beredar dua mata uang dalam masyarakat, yaitu uang keluaran DJB dan uang pendudukan Jepang. Sebelum kedatangan tentara Jepang, uang DJB yang beredar di Hindia Belanda mencapai 360 juta gulden.[20] Uang kertas dan logam cetakan DJB (*guilder*/gulden) serta uang Jepang dengan nilai rupiah tetap digunakan di Cirebon karena Pemerintah Jepang tidak pernah mencetak uang *yen* yang khusus berlaku di Hindia Belanda.[21] Sirkulasi uang Jepang seri kedua terbitan Kerajaan Jepang Hebat di Cirebon pada 1943 makin meningkat karena didatangkan secara masif dari Jakarta. Uang Jepang seri kedua yang nilainya disetarakan dengan gulden DJB mengalami perubahan bentuk dan tampilan penting yaitu istilah 'guilder' diganti dengan 'roepiah' dan denominasinya menjadi ½, 1, 5, 10, 100 dan 1.000 rupiah.[22]

20 Van Horn (2010: 230).

21 Nilai tukar mata uang *yen* setara dengan gulden pada 1943. Untuk membiayai invasi tentara dan Angkatan Laut di Hindia Belanda, Pemerintah Jepang di Tokyo memproduksi *gunpyō* (uang invansi atau uang pisang) yang dibawa oleh pasukan Jepang dengan denominasi 1, 5, 10, 50 sen dan 1, 5 dan 10 gulden (Van Horn 2010: 230, 323).

22 Sejak 1942, uang Jepang telah beredar di penjuru Jawa dan Nusantara, berjumlah 400 juta gulden dan meningkat menjadi 8 miliar gulden pada 1945 (Van Horn 2010: 323).

**Gambar 3.3.** Seri Uang Nanpatsu terbitan NKG dengan menggunakan mata uang Rupiah, pecahan 5 dan 10 Rupiah

Ket.Gambar: pecahan: 5 & 10 roepiah, penandatangan: -, ukuran: 149x72 mm (5 roepiah) dan 159x77 mm (10 roepiah), warna dominan/ desain utama depan: hijau (5 roepiah) dan coklat (10 roepiah) / nilai nominal, rumah Minangkabau (5 roepiah) dan penari wayang Gatotkaca (10 roepiah), tulisan bahasa Jepang, belakang: hijau/ angka 5 dan guilloche, Wanita Minangkabau (5 roepiah), ungu / angka 10 dan guilloche, Arca Buddha dan Stupa (10 roepiah), pencetak: Djakarta Insatsu Kodjo, tanggal penerbitan: 1943, tanggal penarikan kembali: -.

Sumber: *Lintasan Masa Numismatika Nusantara: Koleksi Museum Bank Indonesia*, (Jakarta: Bank Indonesia, 2015), hlm. 191-194.

Peredaran uang Jepang untuk pembiayaan perang melawan tentara Sekutu dikendalikan oleh pemerintah militer Jepang dengan cara mengambil alih perbankan milik Pemerintah Kolonial Hindia Belanda. Kasus tersebut juga terjadi di Cirebon, ketika beberapa bank milik pemerintah kolonial dan asosiasinya dilikuidasi dan digantikan dengan bank-bank milik Jepang. DJB Cabang Cirebon juga tidak luput dari proses likuidasi yang dilakukan oleh pemerintah pendudukan Jepang di bawah koordinasi Nampô-Bank Ginko (NKG) atau Dana Pembangunan Area Asia Tenggara.[23]

23 NKG didirikan pada Maret 1942; adalah lembaga keuangan resmi terbesar milik Jepang di Asia Timur yang berfungsi mendukung pendanaan angkatan perang dan invansi yang diawasi oleh Menteri Keuangan Jepang di Tokyo serta disubsidi langsung oleh Zaibatsu—gabungan perusahan Mitsui Bussan Kaisha yang berkantor di Jakarta dan Mistsubishi Shôji yang mengekspor komoditi pertanian dan perkebunan di Hindia Belanda. NKG memiliki cabang di Singapura, Rangoon, Jakarta, dan Manila (Keppy 2010: 220–1).

Pengambilalihan NKG atas DJB Cabang Cirebon terjadi setelah 8 April 1943 ketika semua cabang DJB telah diambil alih oleh NKG untuk kawasan Jawa dan Sumatera. Peristiwa tersebut terjadi seiring dengan usaha penyelamatan kekayaan DJB berupa emas dan uang kertas lainnya[24] dari gudang keuangan di Bandung menuju Australia dan Afrika Selatan melalui Pelabuhan Cilacap.[25] Pengambilalihan dilaksanakan oleh militer Jepang ketika pimpinan DJB Cabang Cirebon dijabat oleh W. Ch. Van Slooten (menjabat 1938-42). Hingga kedatangan pasukan militer Jepang, Direksi DJB menginstruksikan kepala cabang dan jajarannya di Cirebon tetap menempati posnya dan menjalankan aktivitas perbankan seperti biasa agar perekonomian tidak lumpuh secara total. DJB cabang Cirebon juga membatalkan pemusnahan kas, dan berusaha memindahkan kantor beserta kasnya ke Bandung pada 28 Februari 1942 secara bertahap, tetapi tidak berhasil karena Jepang sudah menguasai Pulau Jawa.

Pada 20 Oktober 1942, DJB Cabang Cirebon dan seluruh bank milik Belanda di Cirebon dilikuidasi oleh Jepang. Sangat mungkin semua karyawan DJB agen Cirebon dan bank-bank Belanda lainnya yang beretnik Belanda atau Indo-Belanda ditahan di kamp tahanan Jepang atau dipaksa membantu kegiatan perbankan Jepang di wilayah Cirebon setelah Oktober 1942.[26]

Nasib DJB Cabang Cirebon beralih ke tangan otoritas NKG, dipegang oleh agen utamanya di Jawa dan Sumatera, yaitu Yokohama Specie Bank (YSB). Bank ini didirikan pada 1880, dimiliki oleh keluarga kaisar Jepang untuk menjadi sponsor dana bagi Pasukan Ke-16 dan Pasukan Ke-25 yang dikiriim ke Jawa dengan dukungan jaringannya di Asia. Tidak diketahui informasi lebih jauh mengenai penguasaan NKG atau YSB atas DJB cabang Cirebon kecuali bahwa bank utama kolonial Belanda tersebut

24 Penyelamatan kekayaan DJB dari serangan Jepang dilakukan oleh Presiden DJB Mr. Dr. G. G. Van Buttingha Wichers (menjabat sejak 1 Juli 1925; meninggal 17 November 1945) yang dikenal sebagai penolong tahanan Eropa di kamp-kamp Jepang pada masa pendudukan militer Jepang; lihat dalam *Verslag over het 114 e t/m 118e Boekjaar (1941-1946) en het 119e Boekjaar (1946-1947) van De Javasche Bank* (t.t.: 12-9).

25 Usaha penyelamatan kekayaan DJB dari Bandung melalui Pelabuhan Cilacap menuju Australia dan Afrika Selatan bisa dilihat dalam "DJB pada Masa Pendudukan Jepang (1942-1945)," dalam https://www.bi.go.id/museum/sejarah-bi/pra-bi/Default.aspx, diunduh 1 Juni 2020; lihat juga Keppy (2010: 220); Van Horn (2010: 230).

26 Van Horn (2010: 232).

**Gambar 3.4.** Suasana Pelabuhan Cilacap yang menjadi tempat pengiriman persediaan emas DJB ke luar negeri.
Sumber: Tropenmuseum

dilaporkan telah dilikuidasi dan digantikan oleh bank-bank milik Jepang. Namun, tidak disebutkan secara jelas bank Jepang yang menggantikan DJB Cabang Cirebon[27]—apakah Taiwan Bank, Mitsui Bank atau Kan'an Binko, yang ditengarai sebagai pengganti bank-bank milik Eropa dan Cina.[28]

Beberapa bank milik Belanda dan asosiasinya yang dilikuidasi oleh NKG ialah Algemeene Spaar- en Deposito Bank (Jakarta), Algemeene Centrale Bank (Jakarta, Bandung, Surabaya, Semarang), Bataviasche Spaarbank (Jakarta dan Semarang), Gemente Spaarbank (Surabaya), Nederlandsch-Indië Hypotheekbank (Jakarta), dan Javasche Hypotheekbank (Jakarta). Bank-bank itu dilikuidasi pada 1 September 1944,[29] 80 persen di

27 Beberapa perusahaan milik Jepang (atau dibentuk oleh Jepang) yang bergerak di Cirebon ialah Mitsui Nôrin, Nomura Higashi Indo Shokusan, Meiji Seito, Beikoku Oroshiuri Kumiai, Beikoku Kouri Kumiai, Nôgyô Kumiai, dan Koperasi Kawedanan.

28 Van Horn (2010: 232).

29 Sumber-sumber Jepang menggunakan angka tahun Showa 2604.

antaranya melalui Tekisan Kanribu Ginko Seisan Jimusho (Departemen Manejemen Properti Musuh), yang berpusat di Javabankstraat Jakarta, 31 Oktober 1944. Baik NKG ataupun YSB tidak memiliki cabang di Cirebon, kecuali di Jakarta, Surabaya, Semarang, dan Bandung.[30]

Penutupan DJB Cabang Cirebon dan ketidakjelasan bank penggantinya disebabkan beberapa faktor. Pertama, Kota Cirebon tidak sebesar kota-kota penting lain di Pulau Jawa seperti Jakarta, Bandung, Semarang, dan Surabaya. Kedua, DJB Cabang Cirebon dipandang oleh NKG kurang memiliki cakupan strategis operasional keuangan yang luas seperti kota-kota besar lain di Pulau Jawa. Perlu dipertimbangkan bahwa situasi sosial-ekonomi di Cirebon melemah lantaran wabah penyakit malaria (1942-43) dan pandemi cacar (1944-45).[31] Selain itu, ketika pengusaha Eropa dan Cina menghentikan operasi usaha ekonominya, masyarakat Cirebon umumnya kurang tertarik dengan bank karena kefanatikan pada agama dan enggan berurusan dengan kerumitan administrasi bank.[32] Permasalahan selanjutnya adalah munculnya gerakan perlawan rakyat Kaplongan[33] di Indramayu terhadap militer Jepang karena sistem tanam padi dan kewajiban setor padi (*momi kyoosyutu*) sangat memberatkan penduduk. Faktor-faktor tersebut membuat pihak Jepang sulit membuka YBS sebagai agen NKG di Cirebon. Ketiga, manajeman perbankan di Cirebon disatukan dengan YSB dan NKG di Bandung.

Alasan ketiga tersebut sangat logis karena Bandung ditetapkan sebagai penyedia dana perekonomian ke Cirebon. Bandung adalah "kota

30 Keppy (2010: 220).

31 Dilaporkan, wabah penyakit cacar membunuh ribuan nyawa penduduk di Grubugan, Cangkol, dan Pekutukan (Dahlan, t.t.: 69; Sudjana 1997: 224).

32 Oostindie (2016: 95). Menurut Enoeh (t.t.: 19), alasan keagamaan ini belum seluruhnya diterima karena pada masa pendudukan Jepang dilakukan penghentian paksa praktik lintah darat yang menjangkiti masyarakat Cirebon di lapisan bawah. Sementara itu, Iryana (2017: 377) menyebutkan bahwa praktik renternir muncul lantaran pengusaha Cina mendominasi kepemilikan lahan dari Arahan hingga Eretan dan menguasai berbagai sektor ekonomi di Cirebon. Di atas lahan partikelir, pengusaha Cina menarik berbagai pajak seperti pajak kepala, pajak jembatan, pajak bumi, pajak rumah, dan lain-lain, kepada masyarakat pribumi dengan sistem membangun usaha rentenir (lihat juga Van Horn 2010: 232; Alexander dan Alexander 1991: 382).

33 Perlawanan di Kaplongan dimotori oleh petani pemilik lahan yang luasnya lebih dari 20 hektar yang merasa dirugikan militer Jepang. Gerakan itu didukung kaum ulama dan santri tarekat Qadiriyah wa Naqsyabandiyah (Fauzi 2012: 20; Iryana 2017:376).

brankas" keuangan Jepang terpenting di Jawa.[34] Selain itu, di Bandung terdapat kantor YSB, agen resmi NKG. Di Bandung, YSB bersinergi dengan perusahaan Jepang seperti Mitsui Bussan Kaisha dan Mistsubishi Shôji (Zaibatsu) yang memiliki saham terbesar dari NKG. Diketahui, NKG juga bekerja sama dengan Saibai Kigyô Kanri Kôdam (koperasi manejemen agrikultur, berdiri sejak 5 Juli 1942) yang mengelola ekspor hasil pertanian dan perkebunan dari Pulau Jawa, termasuk dari Cirebon.[35]

Dengan demikian cukup jelas bahwa sirkulasi uang yang disuntikkan NKG hanya menyentuh lembaga-lembaga usaha ekonomi resmi milik Jepang. Beberapa perusahaan besar milik Jepang di Cirebon adalah (1) Mitsui Nôrin, industri dan perdagangan kapas; (2) Nomura Higashi Indo Shokusan, mengelola perkebunan Rami; (3) Meiji Seito, bekerja sama dengan Divisi Pengaturan Perkebunan Gula milik Jepang untuk produksi gula; (4) Beikoku Oroshiuri Kumiai, koperasi pedagang beras; (5) Beikoku Kouri Kumiai, koperasi pemilik warung penjual beras; dan (6) Nôgyô Kumiai, koperasi desa; di Distrik Karang Ampel, Indramayu, lebih dikenal sebagai Koperasi Kawedanan.[36]

## KEMBALINYA BELANDA DAN DE JAVASCHE BANK CIREBON

Menjelang Agustus 1945, arus transaksi keuangan di NKG dan perbankan Jepang mengalami penurunan, kecuali beberapa transaksi dengan pengusaha Tionghoa dan Jepang sendiri. Sejak pendudukan di Asia, NKG sengaja tidak memfokuskan pada pemeliharaan sistem moneter dan keuangan yang kuat melainkan mendanai angkatan perang dan pengangkutan kekayaan alam, seperti bahan baku besi, baja, karet, dan minyak bagi keperluan industri Jepang.[37] Ketika Jepang menyerah tanpa syarat kepada pasukan Sekutu setelah pemboman Kota Hiroshima

34 Van Horn (2010: 232).

35 Keppy (2010: 220, 224).

36 Inomata (1988: 135).

37 Inomata (1988: 233).

(6 Agustus 1945) dan Nagasaki (8 Agustus 1945) serta pernyataan kemerdekaan bangsa Indonesia oleh Sukarno dan Mohammad Hatta, NKG dan bank-bank milik Jepang lainnya pun "menghilang."[38]

Pasukan Inggris, mewakili Sekutu, tiba dengan misi membebaskan tawanan Eropa dan menerima penyerahan kekuasaan dari Jepang kepada Indonesia. Namun, kedatangan pasukan Inggris tersebut mendapatkan perlawanan dari para pemuda dan pejuang Indonesia sebab di belakangnya membonceng tentara Belanda—NICA atau Netherlands Indies Civil Administration—yang ingin berkuasa kembali di Indonesia. Puncaknya terjadi pertempuran di Surabaya pada 10 November 1945 antara pemuda melawan pasukan Sekutu, yang kemudian menjalar ke wilayah Pulau Jawa lainnya. Pada awal 1946, Belanda membentuk negara federal di wilayah Indonesia Timur dengan dukungan Australia, Inggris, dan 39 tokoh masyarakat Kalimantan dan Indonesia bagian timur.[39]

Sejak kemerdekaan, wilayah Keresidenan Cirebon menjadi bagian dari Provinsi Jawa Barat. Pemerintahan Kotapraja tetap berjalan sambil menunggu pembentukan Komite Nasional Indonesia Daerah kebupatian.[40] Pada waktu yang sama terbentuk Dewan Pertahanan Daerah Tjirebon yang dipimpin oleh Residen Cirebon Hamdani; sedangkan bupati pertama setelah kemerdekaan ialah Mr. R. Ma'mun Sumadipradja (menjabat 1945-47).[41]

Selanjutnya, pemerintahan baru, Republik Indonesia, mendirikan Bank Negara Indonesia pada 5 Juli 1946 (disingkat BNI 1946) di Jakarta. Setelah itu menyusul pembukaan kantor di Yogyakarta pada 17 Agustus 1946. Embrio pembentukan BNI berawal dari "Permoesjawaratan Kaoem Ekonomi Internasional" di Bandung pada 20 Juli 1945. Rencana berlanjut dengan pembukaan bank milik pemerintah melalui Jajasan Poesat Bank Indonesia yang berfungsi serupa bank, yaitu menyediakan kredit, menerbitkan obligasi, simpanan giro, tabungan, deposito, dan memberikan penerangan mengenai perekonomian kepada masyarakat.

38 Ricklefs (2001: 259–60); Koch (1951: 185); Inomata (1988: 233).

39 Ricklefs (2001: 265–6, 275–8).

40 Sjamsudin (1992: 10–1).

41 Soesilo (t.t.: 64); lihat juga Cirebon.go.id/sekilas-kab-cirebon/nama-nama-bupati, diunduh 6 Juni 1981.

Jajasan Poesat Bank Indonesia kemudian dilebur ke dalam wadah Bank Negara Indonesia 1946 sesuai dengan konsep awal yang dirumuskan oleh R. M. Margono Djojohadikoesoemo— salah seorang pendiri—sebagai pusat pengedaran uang dan kesehatan moneter.[42]

Kantor perwakilan BNI juga dibuka di Cirebon yang dinyatakan sebagai lembaga perseroan bank dan perniagaan atau Banking & Trading Corporation.[43] Menempati bekas Gedung DJB, pembukaan kantor BNI Perwakilan Cirebon menandakan bahwa Cirebon dipandang penting oleh Pemerintah Republik Indonesia sebagai daerah yang memiliki potensi ekonomi di Pulau Jawa. Cirebon juga dipilih sebagai wilayah sirkulasi keuangan resmi milik Pemerintah Republik Indonesia melalui BNI bersama beberapa daerah lainnya di Pulau Jawa.

**Gambar 3.5.** Logo pertama Bank Negara Indonesia (BNI) yang didirikan pada tahun 1946

(Sumber: Public Source)

Sementara itu, dinamika politik pasca-kemerdekaan tampak tidak mendukung proses pengembangan perbankan di Cirebon. Meski Belanda mengakui kedaulatan Republik Indonesia di wilayah Jawa, Sumatera, dan Madura—sebagai hasil Perjanjian Linggarjati (12 November 1946)—tetapi niat Belanda membentuk negara federal (yang juga bagian dari kesepakatan tersebut) tetap sulit diwujudkan dari sisi Indonesia. Lantaran

42 Saubari (1986: 40); Djiwandono, dkk. (2005: 3); lihat juga Kusuma (2014: 80–2).

43 Dalam foto yang ditampilkan Keppy (2010: 229), terlihat dengan jelas papan nama bank tersebut (tersusun vertikal): *Perseroan Bank dan Perniagaan/ Banking & Trading Coorporation Ltd./ B.T.C./ Perwakilan Bank Negara Indonesia*. Foto tersebut koleksi F. J. Goedhart (1904–30) milik National Archives, di Negeri Belanda.

menemui jalan buntu, Belanda melancarkan agresi militer (20 Juli 1947)—dikenal sebagai Agresi Militer I—bertujuan menduduki wilayah Jawa Barat dan bagian pulau lainnya. Cirebon tidak luput dari serbuan pasukan Belanda NICA seperti terjadi di daerah-daerah Kota, Gebang, Babakan, Waled, Cidahu, Lebakwangi, Garawangi, dan Kuningan. Sejumlah aset milik Belanda yang sempat dikuasai militer Jepang selama pendudukan direbut kembali pasukan Belanda.[44]

Langkah pasukan Belanda diikuti pejabat DJB Cabang Cirebon yang "menghidupkan kembali" bank tersebut di bawah administrasi NICA. Argumennya, DJB Cabang Cirebon dibuka kembali dengan tujuan "merehabilitasi perekonomian kolonial berbasis ekspor serta sistem perbankan yang menanganinya."[45] Dengan bantuan kekuatan militer, Gedung DJB—yang telah digunakan sebagai kantor BNI Perwakilan Cirebon—diambil alih Belanda. Selanjutnya, DJB Cabang Cirebon dibuka kembali pada 5 Agustus 1947 di bawah pimpinan H. Plantema.[46] Bahkan kemudian, hingga 1954, pemimpin DJB Cabang Cirebon masih dijabat oleh orang Eropa (Tabel 3.4).

Tugas utama DJB Cabang Cirebon "baru" ialah mengelola aset dan keuangan NICA.[47] Belanda berupaya keras mengambil alih kembali berbagai aset miliknya di Cirebon karena potensi ekonominya tinggi,

---

44 *Sekilas Sejarah Pemerintahan Kota Cirebon 1906-2008* (t.t.: 25); Ricklefs (2001: 275-8).

45 Tidak hanya DJB, beberapa bank milik Belanda dan asosiasinya di Cirebon dan di kota-kota lain di Jawa dibuka kembali seiring dengan keberhasilan Belanda membentuk negara federal dan melancarkan agresi militer. Bank-bank itu ialah Nederlandsch Handel Maatschaapij dan Escompto; beberapa bank Inggris yaitu The Chartered Bank of India, Australia, China, Hongkong and Sanghai Banking Corporation. Begitu pula bank-bank lokal yang berafiliasi dengan Belanda di daerah pendudukan militer dibuka kembali, seperti N.V. Bankvereeniging Oei Tiong Ham di Semarang, Chung Hwa Shangieh Maatschappij di Medan, N.V. Batavia Bank dan Bank Boemi IMA di Jakarta. (Kusuma 2014: 85; BI Institue 2020: 147).

46 Kusuma (2014: 85). Dalam Museum Bank Indonesia (1991) disebutkan bahwa Plantema menjadi pimpinan DJB Cabang Cirebon periode 1946-47, artinya sebelum agresi militer Belanda dilancarkan. Sumber lain menyebutkan bahwa pembukaan kantor cabang DJB di Cirebon dilakukan pada 21 Juli 1947. Meski berbeda, terdapat pendapat yang sama bahwa pembukaan DJB cabang Cirebon dilakukan setelah agresi militer 20 Juli 1947. Lihat "Periode Pengakuan Kedaulatan RI s.d. Nasionalisasi," dalam https://www.bi.go.id/museum/sejarah-bi/pra-bi/Default.aspx, diunduh 1 Juni 2020.

47 Tugas serupa berlaku bagi kantor cabang DBJ di kota lain yang dibuka kembali, seperti Makassar, Manado, Jakarta, Banjarmasin, Pontianak, Bandung, Semarang, Surabaya, dan Medan (Santosa 2010: 5).

**Tabel 3.4.**
**Nama Kepala DJB Cabang Cirebon**
**1946-54**

| Nama | Periode Jabatan |
|---|---|
| H. Plantema | 1946-47 |
| F. C. van Rosse (P.J,) | 1947-50 |
| M. A. Hofland | 1950-51 |
| Jhr. J. H. J. M. van de Poll | 1951-52 |
| B. Buys | 1952-53 |
| C. Vos | 1954 |

Sumber: Museum Bank Indonesia (1991: 10).

khususnya perkebunan tebu dan pabrik gula.[48] Termasuk dalam upaya itu ialah mengambil alih pabrik rokok terkenal British American Tobacco, yang pada masa jaya pada 1930-an mampu memproduksi 17,5 juta batang rokok putih dalam sehari dengan dukungan 1.700 karyawan.[49] Perusahaan milik Belanda yang pernah dikuasai militer Jepang selama pendudukan ialah Nederlandsch-Indische Escompto Matschappij, Internationale Crediet en Flandeligvereeniging Rotterdam, N.V. Exploitatie en Handel Maatschappij, Nederlandsch Flandelig Maatschappij Sub-Agent, Empachment SCS, Empachment SS, Internatio Bank, Koninklijke Paketvaart Maatcshappij, dan lain-lain—seluruhnya diambil alih kembali.[50]

Selain menyangkut kepentingan politik dan ekonomi "tingkat tinggi," DJB Cabang Cirebon digunakan secara emosional untuk mendekati pengusaha lokal yang pernah menjalin hubungan baik sebagai nasabah, terutama perajin batik di sekitar Cirebon. DJB Cabang Cirebon sangat membantu industri batik setempat dalam penyediaan modal. Di luar bantuan keuangan itu, perajin batik Cirebon umumnya memperoleh pinjaman modal non-institusional—disebut modal *alapan*— yang disediakan para pemodal Cina, Arab, dan lain-lain. Modal *alapan* berupa

48 Sjamsudin (1992: 14).

49 Farihah (1999: 75).

50 Masduqi (2010: 131–3).

uang muka pembelian, dan sesuai dengan perjanjian yang disepakati perajin batik akan mengembalikan pinjaman tersebut dengan cara menyetorkan hasil batikannya kepada pemberi modal.[51]

Dalam format baru manajemennya, DJB menerapkan sistem *pooling*.[52] Dalam sistem itu, DJB Cabang Cirebon bersama cabang kota lain dikelola dalam satu *pool*. Tujuannya untuk mengatasi pengelolaan yang terpisah-pisah mengingat wilayah kekuasaan Belanda—sebelum kesepakatan Konferensi Meja Bundar dicapai pada 1949—terpisah-pisah pula. Di lain sisi, situasi perekonomian di Indonesia juga belum kondusif karena masih sering terjadi gangguan keamanan, seperti kontak senjata antara Tentara Nasional Indonesia dengan NICA, krisis politik baik personal maupun kelompok dan gerakan separatis pada masa kepemimpinan Sukarno. Dalam situasi seperti itu, DJB Cabang Cirebon hanya dapat melayani kebutuhan keuangan pejabat kolonial, pasukan NICA, dan nasabah dari kalangan Eropa.

Sesuai dengan fungsinya, DJB Cabang Cirebon mengedarkan uang NICA di daerah Cirebon dan sekitarnya. Pemberlakuan mata uang itu telah direncanakan oleh Pemerintah Kolonial Hindia Belanda sejak pengungsiannya di Australia.[53] Dalam laporan tahunan DJB 1941/46 dan 1946/47,[54] disebutkan bahwa berdasarkan keputusan kerajaan (*koninklijk besluit*) tanggal 2 Maret 1943 Nomor 1 Staatsblad D-8, uang NICA (*Nicageld*) sengaja digunakan untuk mendukung rencana Pemerintah Belanda membangun kembali Hindia Belanda setelah pendudukan tentara Jepang berakhir.

---

51 Farihah (1999: 75).

52 Kusuma (2014: 88).

53 Rencana pembuatan uang NICA diawali dengan pembentukan Komisi Urusan Pemerintahan Pasca-Perang (*Commissie Rechtsverkeer in Oorlogstijd*) yang melibatkan pejabat DJB di Australia guna membantu DJB menyelesaikan berbagai tagihan di luar daerah wilayah Belanda (daerah lawan perang). Sebelumnya, pemerintah Belanda di London juga telah mengeluarkan Surat keputusan E-10, 3 Februari 1944, tentang pelarangan kegiatan perbankan di Hindia Belanda tanpa seizin Gubernur Jenderal, serta pembentukan De Bank voor Nederlansch Indië—gabungan saham milik DJB, Nederlandsch Handel Maatschappij NV, Nederlandsch Indische Handelsbank Maatschappij, dan Nederlandsch Indische Escompto Maatschappij, berdasarkan Surat Keputusan tanggal 21 Februari 1944 di Paramaribo, Suriname (*DJB pada Masa Pendudukan Jepang*, t.t.: 4).

54 Lihat dalam *Verslag over het 114 e t/m 118e Boek Jaar (1941-1946) en het 119e Boekjaar (1946-1947) van De Javasche Bank* (t.t.: 24).

**Gambar 3.6.** Uang NICA atau lebih dikenal dengan Uang Merah yang dicetak di *American Bank Note Company,* 1943

**Ket.Gambar:** pecahan: 1 & 5 gulden, dicantumkan juga pecahan dengan nama roepiah, penandatangan: Dr. H.J. van Mook dan Dr. R.E. Smits, ukuran: 126x73 mm (1 gulden) & 151x73 mm (5 gulden) warna dominan/ desain utama depan: biru dongker/ Lambang Belanda dan Ratu Wilhelmina dalam bingkai oval (1 gulden) dan biru/ Lambang Belanda dan Ratu Wilhelmina dalam bingkai oval (5 gulden), belakang: hijau/ nilai angka 1 dan teks undang-undang dua bahasa (1 gulden), hijau/ prajurit, penerbang & kapal perang (5 gulden), pencetak: American Banknote Company, tanggal penerbitan: 2 Maret 1943, tanggal penarikan kembali: -.

Sumber: *Lintasan Masa Numismatika Nusantara: Koleksi Museum Bank Indonesia*, (Jakarta: Bank Indonesia, 2015), hlm. 134-138.

# DUALISME BANK SIRKUASI DAN KONTESTASI SIRKULASI UANG

Rintisan pembentukan lembaga keuangan bisa ditelusuri sejak Fonds Kemerdekaan Indonesia (FKI) menghimpun uang dan barang berharga untuk menyumbang tentara Jepang dalam Perang Asia-Pasifik. Setelah proklamasi kemerdekaan, para pejuang Indonesia mengambil alih FKI dan menjadikan asetnya—sebesar 350.000 rupiah Jepang—sebagai modal awal Pusat Bank Indonesia (didirikan 14 Oktober 1945).[55] Pembentukan lembaga keuangan tersebut dilandasi semangat menjalankan amanah Undang-Undang Dasar 1945, mendukung sendi dasar perekonomian bangsa, serta membangun wilayah ekonomi dan moneter yang utuh. Pendirian Pusat Bank Indonesia menunjukkan bahwa bangsa Indonesia telah merdeka dan berdaulat dalam perekonomian.

Namun, masalah mendesak dalam keuangan yang dihadapi oleh Pemerintah Republik Indonesia yang baru merdeka ialah urgensi memiliki mata uang sendiri untuk menghadapi peredaran uang NICA yang tersebar di Pulau Jawa. Menteri Keuangan A. A. Maramis kemudian memerintahkan penerbitan Oeang Repoeblik Indonesia (ORI) melalui Surat Keputusan tanggal 29 September 1945. Tujuannya untuk menguasai seluruh uang di setiap kas negara, mengeluarkan uang belanja negara, dan melarang pembayaran mandat yang tidak memiliki tanda tangan pegawai Republik pada 1 Oktober 1945.[56]

Untuk mengatasi peredaran uang NICA terutama di Pulau Jawa dan daerah lain di Indonesia, Pemerintah Republik Indonesia dengan cepat mengeluarkan maklumat untuk mencegah peredaran uang tersebut sejak 2 Oktober 1945.[57] Bunyi maklumat (dalam ejaan asli) sebagai berikut,

55 Saubari (1986: 36–7).

56 Saubari (1986: 37).

57 ANRI (2018: 98); Saubari (1986: 37).

**Gambar 3.7.** Oeang Republik Indonesia (ORI) sebagai alat pembayaran yang sah di masa Revolusi

Ket.Gambar: pecahan: 5 & 10 rupiah, penandatangan: A.A. Maramis, ukuran: 149x70 mm (5 rupiah) & 158x76 mm (10 rupiah) warna dominan/ desain utama depan: coklat/ Presiden Soekarno dan Tangkai Padi (5 rupiah), dan biru gelap/ Presiden Soekarno dan gambar pemandangan alam (10 rupiah), belakang: biru / teks undang-undang dan tangkai padi (5 rupiah), dan coklat / teks undang-undang & ornament (10 rupiah), pencetak: Pertjetakan Negara Republik Indonesia 1946, tanggal penerbitan: 17 Oktober 1945, tanggal penarikan kembali: -.

Sumber: *Lintasan Masa Numismatika Nusantara: Koleksi Museum Bank Indonesia*, (Jakarta: Bank Indonesia, 2015), hlm. 209-212

*Oeang Nica Tidak Berlakoe*

*Makloemat Pemerintah Republik Indonesia*

*Oleh pihak Nica telah disebarkan oeang kertas "Nederlande Indie" jang baroe*

*Oempamanja oeang kertas f0.50 jang berwarna merah sebelah dan hidjau sebelah.*

*Oeang ini kita anggap tidak lakoe; janganlah diterima, soepaja djangan timboel inflasi disini.*

*Pemerintah Republik Indonesia*

*Djakarta, 2 Oktober 1945.*

Meskipun maklumat telah disebarkan, uang NICA tetap beredar di Jawa dan daerah lain di Indonesia. Dari sudut Pemerintah Republik Indonesia, tindakan itu sengaja dilakukan Belanda untuk mengacaukan situasi perekonomian.[58] Oleh karena itu, Menteri Keuangan Maramis memutuskan untuk melaksanakan pencetakan ORI pada 24 Oktober 1945—hampir satu bulan sejak surat keputusan terbit—dan proses pencetakannya sendiri dimulai pada 7 November 1945, diketuai oleh T. R. B. Sabaruddin.[59]

Seiring dengan pencetakan ORI, di Cirebon, seperti umumnya daerah di titik konflik antara Belanda dan Indonesia, uang kertas NICA beredar dalam jumlah yang diperkirakan cukup besar, berupa pecahan ƒ0,50 (lima puluh sen). Uang NICA berwarna merah berkombinasi hijau—sehingga masyarakat menjulukinya "uang merah" sebagai sebutan populer. Sebutan itu menjadi ciri pembeda antara uang NICA dan ORI (mulai beredar 1946), yang dikenal sebagai "uang putih" karena kertas lembarannya berwarna putih.[60]

58 ANRI (2018: 4, 137).

59 Menteri Maramis menugaskan sebuah tim Panitia Penyelenggara Percetakan Uang Kertas Republik Indonesia dari Serikat Buruh Percetakan G. Kolff di Jakarta dan wakil buruh percetakan dari Surabaya, Departemen Keuangan, dan Bank Rakjat Indonesia, melalui Surat Keputusan Nomor 3/RO tanggal 1 November 1945 (ANRI 2018: 3; Saubari 1986).

60 ANRI (2018: 98, 137).

Peredaran dan penggunaan uang NICA menimbulkan pro- dan kontra- dalam masyarakat, bahkan menimbulkan semacam "isu nasionalisme" populer. Apabila pemilik dan pengguna "uang merah" itu orang Belanda tentu wajar adanya. Namun, jika kepemilikan dan pengunaan itu terjadi pada orang pribumi akan menimbulkan tuduhan atau sangkaan dari pendukung Republik bahwa yang bersangkutan sebagai pihak yang pro-Belanda ataupun mata-mata musuh.[61] Dengan demikian, peredaran uang NICA menimbulkan ketegangan bahkan dalam tingkat tertentu cenderung sebagai konflik sosial di beberapa kota besar di Pulau Jawa, seperti Jakarta, Bogor, dan Bandung.

Di Cirebon dilaporkan terjadi penimbunan "uang merah" di bank, kantor pos, dan rumah tinggal. Pelakunya orang Belanda sendiri dan orang Tionghoa— mungkin pedagang atau pengusaha. Pada 22 Desember 1945, diketahui sejumlah 20.000 gulden ditimbun di Bank-Rahajat Oemoem; hal serupa ditemukan di Kantor Pos Cirebon pada 26 Desember sebanyak 23.109,50 gulden. Uang kertas dan perak Belanda berjumlah 43.109,50 gulden milik Thio Tjok Sam dan Thio Tjo Liang ditemukan disimpan di rumah, Bank-Rahajat, dan Kantor Pos, pada 27 Desember. Laporan temuan uang yang diduga disimpan secara tidak wajar itu selanjutnya dilaporkan kepada pengurus Komite Nasional Indonesia Ranting Pekalipan Utara, Kota Cirebon.[62]

Kasus serupa di atas terjadi pada Jacob, seorang warga Cirebon yang diketahui memiliki uang kertas Belanda. Uang tersebut diakuinya milik tujuh orang rekannya. Dalam keterangan pemeriksaan di Jakarta disebutkan,

> *Jacob tinggal di Cirebon Republik dan pergi ke Batavia dengan total NLG 1.242,50. Jumlah ini, katanya, merupakan milik bersama tujuh orang. Pada tanggal 17 Juni 1947, jumlah ini disita oleh polisi militer di Krandji atas dasar pelanggaran pasal 2 (sub 2) dari peraturan otoritas militer pada 3 April 1947 no XLVIII. Peraturan ini membatasi pengangkutan barang dan uang dari dalam ke wilayah republik".*[63]

61 ANRI (2018: 98, 137).

62 Dokumen laporan dalam arsip Algemeene Secretarie No. 479 (ANRI 2018: 32).

63 Dikutip dari arsip Algmeeen Secretarie 44–49, No. 471 (ANRI 2018: 32).

Fakta-fakta tersebut menunjukkan bahwa di Cirebon cukup banyak warga yang memiliki uang Belanda-NICA setelah Indonesia merdeka. Di luar keabsahan hak dan kepemilikannya, hal tersebut mengindikasikan ada unsur pelanggaran terhadap pengaturan peredaran uang dalam masyarakat sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 1946 tanggal 5 Juli 1946 terkait dengan tugas BNI 1946 sebagai bank sirkulasi, yakni

> *Mengatur pengeluaran dan peredaran uang kertas bank dengan harga yang tetap menurut keperluan masyarakat terhadap alat penukaran, untuk memperbaiki peredaran alat pembayaran lain, untuk memenuhi kebutuhan kredit masyarakat dan umumnya, supaya dapat bekerja untuk kepentingan umum.*[64]

Dengan demikian, BNI berfungsi menjalankan tugas sebagai bank sentral untuk menjaga stabilitas nilai mata uang, stabilitas sektor perbankan dan sistem finansial secara keseluruhan di Indonesia. Walaupun demikian, masih terdapat kendala yang dihadapi Pemerintah Republik Indonesia pada waktu itu yaitu masalah peredaran uang Jepang, uang DJB, dan uang kolonial Belanda. Pemerintah Indonesia memang mengizinkan peredaran tiga jenis mata uang tersebut di Pulau Jawa (Tabel 3.5) seperti dinyatakan dalam maklumat Presiden, "Bahwa mata uang yang dikeluarkan Jepang dan Belanda masih berlaku sebagai alat pembayaran yang sah di seluruh wilayah Republik, yang termuat dalam maklumat Presiden Republik Indonesia Nomor 1/10."[65]

Maklumat Presiden tersebut bertujuan menjaga agar tidak terjadi inflasi dan mengatasi kekacauan situasi keuangan yang beredar dalam masyarakat.[66] Namun, masyarakat tampaknya telah terbiasa dan cenderung memilih menggunakan uang Jepang dan Belanda sebagai alat tukar dan pembayaran. Oleh karena itu, Pemerintah Republik Indonesia akhirnya melarang peredaran dan menyatakan mata-mata uang asing tersebut—Jepang, DJB, dan kolonial Belanda—tidak berlaku lagi setelah 30 Oktober 1946.[67]

---

64 Djiwandono 2005: 3; "Sejarah" dalam https://www.bni.co.id/id-id/perusahaan/tentangbni/ sejarah, diunduh 1 Juni 2020.

65 ANRI (2018: 1, 98–100).

66 ANRI (2018: 1).

67 ANRI (2018: 98); Saubari (1986: 37).

**Tabel 3.5.**
**Daftar Mata Uang yang Beredar di Pulau Jawa**
**sesuai Makloemat Presiden Repoeblik Indonesia Nomor 1/10**
**(3 Oktober 1946)**

| Produksi Uang | Jenis | Nilai Mata Uang (gulden/rupiah) |
|---|---|---|
| De Javasche Bank (tahun produksi 1925-41) | Uang kertas | ƒ1000 (seribu rupiah) |
| | | ƒ500 (lima ratus rupiah) |
| | | ƒ200 (dua ratus rupiah) |
| | | ƒ100 (seratus rupiah) |
| | | ƒ50 (lima puluh rupiah) |
| | | ƒ25 (dua puluh lima rupiah) |
| | | ƒ10 (sepuluh rupiah) |
| | | ƒ5 (lima rupiah) |
| Pemerintah Kolonial Belanda (1940, 1941) | Uang kertas | ƒ2,50 (dua rupiah puluh puluh sen) |
| | | ƒ1 (satu rupiah) |
| | Uang logam emas | ƒ10 (sepuluh rupiah) |
| | | ƒ5 (lima rupiah) |
| | Uang logam perak | Ringgitan: ƒ2,50 (dua rupiah puluh puluh sen) |
| | | Perakan : ƒ1 (satu rupiah) |
| | | Tengah : ƒ50 (lima puluh sen) |
| | | Talenan : ƒ0, 25 (dua puluh lima sen) |
| | | Picisan : ƒ0,10 (sepuluh sen) |
| | Uang logam nikel | ƒ0.50 (lima sen) |
| | Uang logam tembaga/brons | ƒ0,025 (dua setengah sen) |
| | | ƒ0,005 (setengah sen) |
| Bala Tentara Dai Nippon (Pemerintah Pendudukan Jepang) | Uang kertas | ƒ100 (seratus rupiah) |
| | | ƒ10 (sepuluh rupiah) |
| | | ƒ5 (lima rupiah) |
| | | ƒ1 (satu rupiah) |
| | | ƒ0,50 (lima puluh sen) |
| | | ƒ0,10 (sepuluh sen) |
| | | ƒ0,05 (lima sen) |
| | | ƒ0,01 (satu sen) |

Sumber: ANRI (2018: 98-9).

Pada November 1946, Pemerintah Republik Indonesia resmi mengedarkan ORI bersamaan waktunya dengan pelaksanaan Perjanjian Linggarjati. Peluncuran ORI juga bersamaan dengan meningkatnya keresahaan masyarakat di Pulau Jawa secara umum karena gagal panen, kemarau panjang, konflik senjata, dan penimbunan barang kebutuhan sehari-hari.[68] Dalam situasi seperti itu pula, peredaran ORI bisa makin menumbuhkan kepercayaan masyarakat Indonesia kepada pemerintahnya sendiri, sebagaimana seruan Wakil Presiden Mohammad Hatta.[69] Tidak berlebihan pula bila dikatakan bahwa selain diterbitkan untuk memenuhi fungsi keuangan, ORI sekaligus sebagai salah satu bentuk alat revolusi untuk menegakkan kedaulatan Republik Indonesia.[70]

**Gambar 3.8.** Kesibukan Rakyat Menukarkan Uang Jepang dengan ORI di Kantor Pos Pasar Baru, Jakarta 29 Oktober 1946

Sumber: Arsip Kompas

68 Saubari (1986: 44).

69 ANRI (2018:1, 3–4).

70 BI Institute (2020: 164).

Peredaran ORI, tidak terelakkan, menimbulkan kontestasi dalam distribusi dan sirkulasi terhadap mata uang Belanda-NICA yang disebarkan DJB. Di tengah masyarakat beredar ungkapan "perang uang" yang menggambarkan situasi tersebut, seperti tertulis dalam arsip dokumen, "Beredarnya dua mata uang ini tentu akan menimbulkan permasalahan yang rumit, maka terjadilah perang uang di daerah-daerah pendudukan seperti Jakarta, Bogor, Bandung, dan kota-kota lainnya yang diduduki Belanda."[71]

Selama tentara NICA menguasai Cirebon (1947-49), DJB Cabang Cirebon mengedarkan "uang merah" secara masif di berbagai wilayah Jawa Barat. Kerja DJB Cirebon itu juga didukung oleh DJB cabang Bandung dan Jakarta yang memasok material uang NICA dalam jumlah besar di wilayah Cirebon dan Jawa Barat. Sementara itu, ORI beredar dengan dukungan bank-bank milik pemerintah Indonesia dan sebagian masyarakat yang berusaha menyusup masuk di wilayah perbatasan kekuasan pendudukan militer Belanda dengan Pemerintah Republik Indonesia.

Pada waktu itu jutaan uang NICA secara cepat beredar pada hampir seluruh kawasan pendudukan Belanda atau negara federal yang terdiri dari 15 negara (setelah 1948), termasuk Cirebon. Peredaran uang NICA oleh kantor DJB Cabang Cirebon didukung munculnya Negara Pasundan (Februari 1948).[72] Sementara itu, sejumlah tokoh Republiken berusaha membentuk struktur pemerintahan di Cirebon berupa gabungan pemerintahan sipil dan tentara, antara lain melibatkan R. Hasan Musthopa (Residen), Manadi (Wakil Residen), R. Musthapa Suriadi (Wali Kota), Tjinung Moch Michrad (Bupati Cirebon), Tikok Mochammad Ichlas (Bupati Indramayu), Mohammad Chafit (Bupati Kuningan), dan Mochammad

71 ANRI (2018: 137).

72 Dengan masuknya Cirebon ke dalam bagian Negara Pasundan, pemerintahan otonominya diatur dengan Staatsblad 1948 Nomor 179. Kotapraja Cirebon dipimpin oleh *burgermester* dengan dukungan dewan pengurus bersama (*medebesturend college*) yang dibentuk pada 31 Mei 1948. Negara Pasundan kemudian berakhir setelah para wakil rakyat yang terdiri dari 2 orang Haminte Cirebon, 11 orang dari Cirebon, 10 orang dari Indramayu, 7 orang dari Majalengka, dan 7 orang dari Kuningan menyatakan bergabung ke Negara Kesatuan Republik Indonesia di Gedung Parlemen Pasundan, Bandung, pada 8 Maret 1950 serta diperkuat dengan Surat Keputusan Republik Indonesia Serikat Nomor 113 tanggal 11 Maret 1950 (*Sekilas Sejarah Pemerintahan Kota Cirebon* [t.t.]: 27–9; Sjamsudin 1992: 84).

Noer (Bupati Majalengka).[73] Pembentukan pemerintahan pro-Republik itu tentu memengaruhi sirkulasi ORI di wilayah Cirebon.

Dualisme bank dan kontestasi sirkulasi uang tersebut akhirnya menimbulkan pengaruh pada kompensasi Pemerintah Indonesia agar tidak menimbulkan masalah perekonomian baru.[74] Namun, sirkulasi ORI memiliki banyak kendala, seperti keterbatasan jumlah produksi dan peredaran yang hanya tersebar di jalur gerilya pejuang Indonesia,[75] serta harus bersaing dengan uang Jepang yang dibagi-bagikan kepada penduduk oleh militer Belanda untuk memicu inflasi di pihak Republik. Posisi ORI di Cirebon juga terpuruk karena ditolak penggunaannya oleh sebagian pedagang Cina, diikuti pemalsuan dan kesulitan pemakaian pecahan ratusan sebagai alat pembayaran.[76] Di tengah situasi yang tak menentu itu, beberapa daerah, seperti Banten mencetak uang sendiri yaitu Uang Republik Indonesia Daerah Banten. Uang-uang kedaerahan tersebut hilang setelah penarikan ORI oleh Pemerintah Republik Indonesia di Jawa (per 1 Mei 1950) dan Sumatera (per 1 Juni) sesuai dengan Maklumat Menteri Keuangan 1 Januari 1950.[77]

## UPAYA MEMBANGUN SISTEM PERBANKAN NASIONAL

Konferensi Meja Bundar (KMB) antara Pemerintah Indonesia dengan Pemerintah Belanda di Den Haag (1949) menjadi tonggak penting sejarah bangsa Indonesia. Belanda akhirnya menyerahkan kedaulatan

73 "Simpang-Siur Revolusi" (*Buku Peringatan 50 Tahun Kota Besar Tjirebon, 1906-1956*, t.t.: 99-100).

74 ANRI (2018: 5).

75 Soal keterbatasan penerbitan ORI, Menteri Keuangan Sjafruddin Prawiranegara mengatakan pemerintah Republik Indonesia baru mampu mencetak 310 juta rupiah dari target 350 juta rupiah, padahal harus selesai dicetak. Keterbatasan penerbitan ORI pada masa revolusi karena pusat produksinya di Kendal Payak, Malang, diserang oleh Belanda dan kemudian dipindahkan ke Desa Kanten (antara Madiun dan Ponorogo) ditambah dengan gugurnya Sutjipto (koordinator pencetakan ORI) setelah ditembak pasukan Belanda (Saubari 1986: 44-5).

76 ANRI (2018: 65). Salah satu kasus pemalsuan ORI dilakukan oleh Yang Wei Pin hingga mencapai 2 juta rupiah (Saubari 1986: 45).

77 ANRI (2018: 6); Saubari (1986: 47).

atas Indonesia, kecuali wilayah Papua, kepada Republik Indonesia Serikat (RIS), yang diikuti dengan kesanggupan RIS membayar ganti rugi sebesar 4,3 miliar gulden kepada Belanda atas kerugian yang dialaminya selama revolusi kemerdekaan. Utang Indonesia kepada Belanda tersebut akhirnya dibayar dengan uang NICA karena jumlah ORI tidak mencukupi.[78] Sesuai dengan hasil Perjanjian KMB, DJB berfungsi sebagai bank sirkulasi bagi seluruh wilayah Republik Indonesia, menggeser peran BNI yang awalnya berfungsi sebagai bank sirkulasi Republik Indonesia.[79]

Berhubung masih terdapat kaitan antara DJB di Indonesia dengan pemerintah Belanda setelah KMB, perubahan undang-undang atas bank itu harus dirundingkan dengan Den Haag. Langkah moneter pertama yang dilakukan pemerintah RIS ialah menyatukan mata uang dengan memilih uang NICA sebagai alat pembayaran yang sah pada 1 Januari 1950 di seluruh wilayah RIS.[80] Pada saat bersamaan, Pemerintah RIS berencana memiliki bank sirkulasi yang dapat dikembangkan menjadi bank sentral sebagai unsur penting dalam penguatan kedaulatan negara.[81] Sebelum rencana itu terwujud, Pemerintah RIS berusaha mengatasi defisit negara sebesar 5 miliar rupiah dan memadamkan inflasi dengan jalan mengganti uang lama yang beredar dengan uang baru serta mengurangi peredaran uang kartal dan giral.[82] Langkah tersebut diatur dalam Undang-Undang Darurat Nomor 13 Tahun 1950 tanggal 18 Maret 1950 yang berbunyi, "Untuk mengambil segala tindakan, untuk mengadakan pinjaman bagi negara Republik Indonesia Serikat dan untuk mewajibkan turut serta dalam pinjaman sedemikian itu . . .."[83]

78 Saubari (1986: 45).

79 Pasca-KMB, BNI diubah menjadi bank nonsirkulasi (Bank Pembangunan) dengan nama Bank Industri Negara (Djiwandono 2005: 7; BI Institute 2020: 159).

80 Saubari (1986: 46).

81 Djiwandono (2005: 9).

82 Purwanto (1991: 298).

83 Saubari (1986: 46).

**Gambar 3.9.** Uang RIS sebagai alat pembayaran yang sah pada masa Republik Indonesia Serikat (RIS)

Sumber: Koleksi Arsip Bank Indonesia

Menteri Keuangan Sjafruddin Prawiranegara mengajak masyarakat untuk menggunting uang *pre-federal* (uang NICA) di atas nominal ƒ2,50 menjadi dua bagian. Bagian sebelah kiri dinyatakan sah sebagai alat pembayaran dengan nilai separuh dari nilai semula, dan bagian tersebut dapat ditukar dengan uang kertas DJB baru (mulai 20 Maret s.d. 16 April 1950). Bagian sebelah kanan ditarik dari peredaran, ditukarkan dengan surat obligasi pemerintah bernilai separuh dari nominal semula. Obligasi itu disebut Obligasi Pinjaman Darurat 1950 berdasarkan Putusan Menteri Keuangan Nomor PU 2 tanggal 19 Maret 1950.[84] Langkah tersebut kemudian dikenal sebagai 'gunting Sjafruddin'.

Pemerintah Indonesia kemudian memutuskan menasionalisasi DJB yang diikuti dengan penggantian Presiden DJB dari Dr. A. Houwink kepada Mr. Sjafruddin Prawiranegara pada Juli 1951.[85] Sesuai dengan Keputusan Pemerintah Nomor 118 tanggal 2 Juli 1951, panitia nasionalisasi yang telah bekerja sejak 19 Juni 1951 disahkan, terdiri atas Mohammad

84 Saubari (1986: 46).

85 Djiwandono (2005: 9).

Soediono (ketua), Mr. Soetikno Slamet, Dr. Sumitro Djojohadikusumo, T. R. B. Sabaruddin, Drs. Oudt, dan Drs. Khouw Bian Tie.[86] Nasionalisasi atas DJB akhirnya diputuskan per 15 Desember 1951, dan berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1951 tanggal 6 Desember 1951 DJB dinyatakan sebagai bank sirkulasi milik Pemerintah Indonesia, bukan milik swasta Belanda lagi yang diatur sesuai De Javasche Bankwet 1922.

**Gambar 3.10.** Dr. A. Houwink, Presiden De Javasche Bank berkebangsaan Belanda terakhir sebelum digantikan oleh Mr. Sjafruddin Prawiranegara.
Sumber: www.nationaalarchief.nl

Dengan keputusan baru tersebut, nama DJB diubah menjadi Bank Indonesia (BI) sebagai bank sentral yang dikuatkan melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1953 tanggal 2 Juni 1953 dan mulai berlaku

86 Tugas utama panitia ini merancang undang-undang bank sentral dengan penawaran saham DJB. Prosesnya, pemerintah Republik Indonesia membeli 99,4 persen saham DJB di bursa saham Belanda dengan harga 20 persen di atas nilai nominal (120 persen) dalam mata uang Belanda dengan kurs 360 persen dalam mata uang rupiah. Harga nominal saham dan sertifikat tersebut adalah 8,95 juta gulden ("Periode Pengakuan Kedaulatan RI s.d. Nasionalisasi DJB," t.t.: 5).

sejak 1 Juli 1953.[87] Sejak berfungsi sebagai bank sentral, BI berusaha memajukan perbankan dengan cara memberikan perhatian kepada usaha perluasan dan peningkatan operasi bank-bank umum nasional swasta. Tujuannya agar bank-bank nasional di tingkat pusat dan daerah dapat menyalurkan dana pada bidang produktif terutama dalam memerangi renternir. Usaha selanjutnya ialah membagi tipologi bank, termasuk bank-bank swasta dan bekas milik Belanda, menjadi tiga golongan utama, yaitu bank pemerintah, bank swasta nasional, dan bank asing.[88]

Kebijakan pemerintah di sektor perbankan setelah 1950 tidak saja fokus dalam menahan invasi uang Jepang dan uang Belanda (dimulai sejak 15 Juli 1946) terutama melalui pengumpulan para pengusaha dalam Program Benteng, melainkan juga meleburkan Bank Rakyat Republik Indonesia Serikat (BRRIS, awalnya dikenal sebagai Algeemene Volkscreediet Bank/AVB) ke dalam Bank Rakyat Indonesia (BRI) pada September 1951. Pemerintah Indonesia juga mendirikan Bank Industri Negara, pengalihan dari Bureau Herstel Financiering bentukan NICA yang bergerak di bidang perkebunan, perindustrian, dan pertambangan sebagai Perseroan Terbatas sesuai dengan Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1952. Postpaarbank in Nederlandsch-Indië, kemudian diubah menjadi Bank Tabungan Pos (1953), juga diaktifkan kembali oleh Pemerintah Indonesia.[89]

Dalam mengatasi persoalan renternir, pembangunan perbankan nasional berimplikasi kuat di tingkat lokal. Salah satunya ialah kehadiran beberapa bank di Cirebon yang berperan dalam membebaskan masyarakat dari jeratan utang kepada rentenir yang sangat meresahkan.[90] Sejak 1930-an, DJB Cabang Cirebon juga telah dikenal membantu memberikan

87 Djiwandono (2005: 9).

88 Sejak 1946, beberapa bank di Indonesia—BNI, Bank Rakyat Indonesia, Bank Surakarta, Bank Nasional, Bank Tabungan Pos dan Rumah Gadai—telah berjuang menyelamatkan moneterisasi, membantu menyimpankan sisa uang tunai Jepang dan Belanda milik masyarakat untuk mengatasi laju inflasi pasca-kemerdekaan ("Periode Pengakuan Kedaulatan RI s.d. Nasionalisasi DJB," t.t.: 45).

89 Keputusan menjadi Bank Tabungan Pos (BTP) pada 1953 dilakukan berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1953 yang mengatur kedudukannya di bawah tanggung jawab Menteri Perhubungan ("Periode Pengakuan Kedaulatan RI s.d. Nasionalisasi DJB," t.t.: 4-5).

90 Enoeh (t.t.: 12).

pinjaman modal kepada para pengusaha dan perajin tradisional.[91] Model peminjaman itu dilanjutkan ketika DJB memiliki program peminjaman model kupon yang diluncurkan pada 1951, seperti disebutkan dalam dokumen berikut,[92]

> *Republik Indonesia Serikat mengadakan pinjaman dengan mengeluarkan surat pinjaman atas nama pemegang (aan tooder). Jumlah pinjaman itu didasarkan pada penetapan dalam Pasal 4 dan 8 dari keputusan kami tanggal 19 Maret 1950 No. P.U/1; Surat pinjaman berbunga 3 persen perseratus dalam satu tahun, yang dibayar atas kupon tahunan pada tiap-tiap tanggal 1 September, pertama kali pada tanggal 1 September 1951. Atas kupon pertama bunga dibayar 17 bulan; kupon dapat ditunaikan pada semua kantor dari Javasche Bank di Indonesia dan jika perlu pada tempat lain yang akan kami tunjuk.*

Dipastikan, program peminjaman model kupon tersebut dapat diakses dari semua cabang DJB, termasuk di Cirebon pada 1951. Dengan model kupon tersebut, secara perlahan terjadi peningkatan jumlah perusahan dan industri kecil di Cirebon seperti kantor dagang, toko tekstil, P & D, *kramerijen* (pertanian), obat-obatan, *metaalwaren* (industri logam), penjualan buku, percetakan, perusahaan jasa angkutan bus dan truk, perusahaan batik, pembuatan sohun, roti/kue, dan industri kerajinan kulit.[93] Tumbuhnya perekonomian lokal di kawasan utara (atau daerah pelabuhan) Cirebon pada awal 1950 didukung oleh keberadaan berbagai bank yang mengakomodasi kepentingan para pengusaha lokal.[94]

Pada 1952, satu tahun sebelum berubah menjadi BI, DJB Cabang Cirebon di bawah pimpinan Jhr. J. H. J. M. van de Poll (menjabat 1951-52) berperan penting dalam memberikan bantuan finansial baik kepada masyarakat maupun perusahaan. DJB Cabang Cirebon menyediakan dana program penting kepada beberapa bank lokal maupun cabang bank untuk pembiayaan pembangunan fisik Kota Cirebon, terutama program

91 Farihah (1999: 55).

92 Lihat Surat Kementerian Keuangan Putusan Menteri Kerja Republik Indonesia Serikat, 19 Maret 1950, Pasal 1 (ANRI 2018: 126).

93 Aruman (t.t.: 41).

94 Musthofa (t.t.: 45); Kusnandar (2002: 19).

pembangunan perumahan rakyat.[95] Pada 1953, terdapat beberapa bank yang bekerja sama dengan Jawatan Perumahan Rakyat (Kementerian Pekerjaan Umum dan Tenaga) mendukung dana pembangunan perumahan rakyat di Cirebon. Dana kas milik Pemerintah Kota Cirebon untuk pembangunan perumahan rakyat mencapai 166.313 rupiah ditambah dengan pinjaman kas Kota-Besar Cirebon berjumlah 180.000 rupiah.

Pembangunan perumahan rakyat di Cirebon—dilaksanakan oleh Jajasan Kas Pembangunan yang dibentuk oleh Wali Kota—difokuskan di daerah Gunungsari, Argapura, dan Kesunean. Beberapa bank di Cirebon disebutkan juga ikut bekerja sama menyuntikan modal kepada NV Volkhuisvestig—perusahaan properti dan jasa penyewaan rumah—yang menyewakan 89 rumah di Pamitran dan Kesunean dengan harga 1,75 rupiah per bulan hingga 58,50 rupiah per bulan. Kerja sama perbankan dengan Pemerintah Cirebon dalam pembangunan kota berhasil mengubah citra Kota Cirebon yang semula rawan wabah penyakit dan bau ikan asin menjadi kota yang sehat dan bersih. Bukti penting peningkatan kebersihan dan kenyaman kota terlihat ketika Kota Cirebon dinominasikan menjadi kota terbersih di Indonesia pada 1952.[96]

Jajasan Kas Pembangunan didirikan (1955) ketika DJB Cabang Cirebon telah berubah menjadi BI Cabang Cirebon. Pimpinan BI Cirebon tercatat dalam akta yayasan sebagai anggota, selain nama pemimpin Koperasi Margomulyo. Susunan pengurus Jajasan Kas Pembangunan selengkapnya ialah Wali Kota-Besar Cirebon (ketua); Ny. S. Sudibio Pusponegoro (Wakil Wali Kota/wakil ketua); dan empat orang anggota masing-masing Anwar Djarkasih (anggota Dewan Pemerintah Daerah), R. Ramli Bratawidjaja (anggota Dewan Pemerintah Daerah), Kepala Bank Indonesia (*ex-officio*), dan Djimun (ketua Koperasi Margomulyo).

---

95 Pada 26 Agustus 1952, Pemerintah Kota Cirebon membentuk panitia pembangunan perumahan rakyat. Ketua panitia pembangunan adalah wali kota Cirebon sendiri, R. Musthafa Suriadi (menjabat 1950-54). Selanjutnya, bersama beberapa tokoh pemerintahan Kota, ia merintis pembentukan Jajasan Kas Pembangunan (1955), yang berperan penting dalam pembangunan infrastruktur di Cirebon, seperti pembangunan dan perbaikan jalan raya kota, kampung, dan kawasan pedesaan (Museum Bank Indonesia 1991: 10; Musthofa, t.t.: 45).

96 Sudjana (1997: 224).

Belum ditemukan data tentang nama kepala BI Cabang Cirebon yang menjadi anggota Jajasan Kas Pembangunan pada waktu itu.[97] Namun, hampir dipastikan bahwa Kepala BI tersebut berasal dari kalangan pribumi. Setelah proses nasionalisasi dari DJB ke BI, pemimpin BI Cirebon masih dijabat orang Belanda yaitu D. B. Buys (menjabat (1952-53)) dan C. Vos (menjabat 1954). Keterlibatan nama pejabat Bank Indonesia kantor cabang Cirebon tersebut menjadi bukti bahwa pada paruh pertama dekade 1950, BI Cabang Cirebon telah bersinergi dengan pemerintahan setempat dalam pembangunan kesejahteraan kota. Bentuk kerja sama tersebut menjadi alternatif penting dalam mengenalkan tugas dan peranan BI di Cirebon dalam kurun 1950-an ketika situasi ekonomi dan politik lokal sangat tergantung pada kebijakan pemerintah pusat.[98]

Proses panjang transisi DJB Cabang Cirebon ke BI (1942-53) membuktikan bahwa peran bank sentral di tingkat daerah sangat dipengaruhi oleh dinamika ekonomi dan politik. Pola tersebut berulang pada periode selanjutnya, baik ketika BI Cabang Cirebon berubah menjadi Bank Tunggal (BNI Unit I) pasca-1965 maupun saat berubah kembali menjadi BI pada 1968. Pada saat situasi ekonomi dan politik tidak menentu menjelang akhir Orde Lama, BI Cabang Cirebon tetap berjalan melaksanakan tugas dan fungsi perbankan dan perekonomian di wilayah tugasnya.

97 Dalam sumber *Buku Peringatan 50 tahun Kota Besar Tjirebon 1906-1956* disebutkan hanya 'Kepala Bank Indonesia', artinya pada atau setelah 1951 ketika DJB telah berganti nama menjadi Bank Indonesia; lihat juga Museum Bank Indonesia 1991: 10).

98 Ketergantungan pada kebijakan ekonomi negara (pusat) menyangkut aspek mikro seperti kenaikan harga beberapa kebutuhan pokok—minyak tanah, bensin, gula pasir, tekstil, bahan-bahan industri dan lain-lain; sedangkan yang bersifat makro menyangkut defisit negara, ancaman bahaya inflasi, ketiadaan perencanaan ekonomi, dan kelangkaan investasi modal asing. Patut pula dicatat bahwa pada 1953 di wilayah Jawa Barat terjadi gangguan keamanan (Aruman, t.t.: 41).

BAB 4

# Langkah-langkah Rekonstruksi 1953-68

Episode tahun 1953-68 merupakan awal penting bagi Bank Indonesia cabang Cirebon dalam mengembangkan fungsinya sebagai bank sentral menggantikan De Javasche Bank. Tumbuh berkembang dalam gerak politik dan ekonomi yang sangat dinamis: dari pemerintahan federalis, kembali ke negara kesatuan, kemudian transisi dari 'orde lama' ke 'orde baru'. Selama rentang waktu itu, BI bukan saja menyaksikan tetapi juga terlibat—langsung ataupun tak langsung—dalam gejolak sosial-politik pada aras lokal, nasional, bahkan internasional sehubungan dengan kebijakan politik pemerintah pusat menasionalisasi institusi ekonomi milik asing. Dengan kata lain, kiprah BI senantiasa berhadapan dengan dua elemen penting yang tak terpisahkan yakni politik dan ekonomi. Sementara itu, dalam tubuhnya sendiri, BI mengalami fragmen perubahan dari Bank Sentral menjadi Bank Tunggal dengan segala implikasinya. Di tengah situasi yang penuh gelora itu, Kantor BI cabang Cirebon tetap teguh menjalankan peran utamanya menjaga tegaknya rupiah.

## MASALAH SEKTORAL PEREKONOMIAN LOKAL

Latar belakang pembentukan kantor Bank Indonesia di Cirebon, bisa dikaitkan secara langsung ataupun tak langsung dengan situasi sosial-ekonomi setempat setelah KMB (1949). Kala itu, Cirebon ditandai oleh urbanisasi yang makin meningkat, terutama di wilayah perkotaan.

Sebenarnya, gejala urbanisasi telah dimulai sekitar dekade 1930-an, seperti terlihat pada pabrik rokok BAT yang mempekerjakan banyak karyawan yang berasal dari luar wilayah Cirebon. Sebagian besar dari keluarga dan keturunan karyawan tersebut tetap bermukim di Kota Cirebon, melanjutkan pendahulunya bekerja di pabrik yang sama, atau menjadi pedagang "pasar tumpah" dan berbagai jenis pekerjaan lain. Bahkan, kemudian, pasar tumpah menjadi "lanskap" tersendiri di jalanan Kota Cirebon dan sekitarnya meskipun pemerintah setempat telah membangun sarana di Pasar Pagi dan Lawanggada pada 1960. Banyak pedagang pasar membangun gubuk liar sebagai hunian, dan bersama "keluarga besar" karyawan pabrik berangsur-angsur menambah padat populasi Kota Cirebon.[1]

**Gambar 4.1.** Gedung Pabrik Rokok British American Tobacco Company Cirebon pada dekade 1950an.

Sumber: ANRI, KIT Jawa Barat No: 781/45

1 Dahlan (t.t.: 68–9).

Secara umum, perekonomian masyarakat Cirebon hingga 1960-an itu masih terkena imbas perang kemerdekaan yang berkecamuk lebih dari satu dekade sebelumnya. Berbagai soal yang terjadi, seperti perampasan lahan permukiman dan pertanian akibat pembangunan lapangan terbang Jatiwangi pada masa pendudukan militer Jepang, dan pembongkaran ratusan rumah rakyat untuk kepentingan pertahanan tentara Belanda, meninggalkan masalah sosial-ekonomi tersendiri bagi masyarakat Cirebon.[2] Beban masalah itu masih ditambah dengan perekonomian masyarakat yang belum stabil karena pengaruh kondisi politik nasional era demokrasi parlementer yang sering bergonta-ganti kabinet pemerintahan dan gangguan keamanan lokal di Cirebon oleh gerakan Darul Islam/Tentara Islam Indonesia (DI/TII) pimpinan Kartosuwiryo (1949-62).[3]

Jumlah penduduk Cirebon pada 1955 mencapai 102.485 jiwa, meningkat menjadi 106.747 jiwa setahun kemudian, dengan komposisi 393 orang Eropa, 22.620 orang Cina, 90 orang India, 3 orang Asia lain dan selebihnya adalah pribumi.[4] Sektor perekonomian di Cirebon pada dekade 1950-an masih didominasi oleh pengusaha Eropa dan Cina. Sementara itu, banyak penduduk Cirebon Timur yang tidak memiliki tanah (*tunakisma*) memilih pergi ke wilayah sekitar Jakarta dan Banten menjadi buruh pemanen padi.[5] Pengusaha asing merupakan produsen barang kebutuhan masyarakat, penyedia lapangan kerja dan pemilik perdagangan ekspor/impor di Pelabuhan Cirebon.[6] Tidak hanya pengusaha asing, beberapa

2 Aruman (t.t.: 41); *Buku Peringatan 50 Tahun Kota Besar Tjirebon* (t.t.: 58).

3 Farihah (1999: 43); Kartodirdjo, dkk. (1976: 813).

4 Data ini dihasilkan dari Pendaftaran Penduduk Kota Cirebon yang disajikan oleh pejabat berpangkat kepala bagian bernama Muhamad pada 1 Februari 1956. Berbeda dengan laporan Muhamad, Musthofa (t.t.: 47–8) menyatakan bahwa hingga 1955 jumlah penduduk Kota Besar Cirebon mencapai 180.000 jiwa dan total seluruh Keresidenan adalah 3.500.000 jiwa (lihat juga Poesponegoro, t.t.: 55).

5 Santosa (2000: 11); Breman dan Wiradi (2004: 56, 77); Luthfi (2011: 77).

6 Pengusaha asing atau keturunannya yang dimaksud adalah keturunan Tionghoa yang dapat memilih satu status kewarganegaraan (atau langsung mengikuti status kewarganegaraan ayahnya) karena kemudahan hukum dwi-kewarganegaraan antara Indonesia dan RRC setelah Konferensi Asia-Afrika di Bandung (1955). Meskipun demikian, pernah terjadi sedikit masalah anti-Cina di Cirebon pada 1956 ketika semua modal Belanda di Indonesia dibeli oleh pengusaha Cina setelah Presiden Sukarno secara sepihak membatalkan Undang-Undang Konferensi Meja Bundar pada 3 Mei 1956. Namun, disebutkan bahwa di Cirebon tidak terdapat gerakan anti-Cina dan antiasing yang terjadi secara masif—terutama sejak terbit Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1959 yang mengatur identitas kewarganegaraan ganda—dibandingkan dengan yang terjadi di kota-kota lain seperti Solo, Jakarta, Bandung, dan Semarang; meski terdapat etnis Cina yang memilih mempertahankan kewarganegaraan Cina dengan meninggalkan wilayah Cirebon (Kartodirdjo 1976: 92–9).

pengusaha pribumi (atau pengusaha nasional) menggeluti bidang usaha industri, pertanian, dan perdagangan, seiring dengan perluasaan areal Kota Cirebon dari 1.110 hektar menjadi 3.300 hektar ketika Kecamatan Harjamukti digabung ke dalam wilayah admistratif Kota-Besar Cirebon pada 1954.[7]

**Gambar 4.2.** Suasana di dalam pabrik British American Tobacco Cirebon, 5 Maret 1952.

Sumber: ANRI, Kementerian Penerangan Jawa Barat AV 920117

Geliat sektor perekonomian di Cirebon mulai terlihat pada 1956 ketika perdagangan dan penghasilan cukai di Cirebon mencapai jumlah 30 juta rupiah, termasuk cukai tembakau, seperti tembakau andalan dari Darma (Kuningan) dan Majalengka,[8] serta dari 78 perusahaan yang mayoritas (95 persen) milik orang asing. Namun, seperti telah disebut, kebanyakan penyumbang cukai tersebut adalah perusahaan besar asing sehingga "nasib" pengusaha pribumi tetap menjadi pertanyaan,

> *Dari seluruh pabrik2, perusahaan2, toko dsb. sampai pada permulaan 1956 hampir 95% bukan kepunjaan Nasional aseli, sedangkan Indonesia Merdeka sudah lebih 10 tahun. Dengan demikian timbullah suatu pertanjaan:*

7 *Buku Peringatan 50 Tahun Kota Besar Tjirebon* (t.t.: 58); Dahlan (t.t.: 67); ejaan kutipan sesuai dengan aslinya.

8 Tembakau yang dihasilkan di Cirebon, Majalengka dan Kuningan adalah jenis Mole, Virginia serta Barley yang menjadi bahan baku rokok BAT (Radjab 2013: 35; Musthofa, t.t.: 47–8).

*Siapakah jang menguasai hadjat hidup orang banjak dalam dunia ekonomi Tjirebon ini? Mungkinkah usaha2 nasional akan mendapat tempat jang lajak sebagai bangsa merdeka? Ataukah malah berlarut-larut akan lebih tenggelam?*[9]

Pada 1956, di Cirebon terdapat lima pengusaha dan perusahan asing milik Belanda dan aliansinya, sering disebut 'The Big Five', yang bergerak dalam bidang ekspor/impor. Beberapa jenis usaha baru juga berkembang di Cirebon pada waktu itu, antara lain percetakan, perdagangan gula pasir, distribusi rokok, es, minyak tanah, pengangkutan, serta impor dan produksi kebutuhan barang untuk kelas ekonomi menengah (Tabel 4.1). Selain itu, terdapat pabrik minyak Hoo Yen dan sepuluh gedung bioskop, antara lain Murni, Abadi, Mars, Ceres, Paradise, Royal, dan Park, yang hampir tiap malam ramai dikunjungi penonton.[10]

Dalam bidang pertanian, banyak petani di wilayah Cirebon bekerja sebagai buruh di perkebunan tebu, kopi dan teh; serta produsen berbagai produk pertanian seperti padi, bawang, wortel, kubis, kacang tanah, kedelai, palawija, mangga, padi, dan jenis tanaman lain. Beberapa kalangan penduduk juga mengembangkan peternakan ikan darat, usaha tambak di pesisir, memelihara tanaman keras, terutama pohon jati, pinus dan karet di lerang Gunung Ciremai. Wilayah Cirebon memiliki hasil bumi andalan seperti mangga dermayu, tembakau darma, padi di Indramayu (yang dikenal sebagai "gudang padi" di Jawa Barat), dan sumber minyak Bongas di Majalengka.[11]

9 Musthofa (t.t.: 47–8); ejaan kutipan sesuai dengan aslinya.

10 Aruman (t.t.: 42–6); Musthofa (t.t.: 4).

11 Suroto (t.t.: 61).

**Tabel 4.1.**
**Nama Perusahaan di Cirebon**
**(1956)**

| Nama/ Jenis Perusahan | Jumlah | Produksi (per bulan) | Nama/ Jenis Perusahan | Jumlah | Produksi (per bulan) |
|---|---|---|---|---|---|
| Pengeringan ikan | 22 | 8.900 kg | Perusahaan sabun | 14 | 50,5 ton |
| Perusahaan roti | 16 | 31.250 kg | Pabrik fosfat | 1 | 350 ton |
| Perusahaan biskuit | 2 | 3.000 kg | Pabrik tegel dan beton | 9 | 208.000 bd., tegel<br>1.470 bd., beton |
| Perusahaan kue kering/basah | 30 | 24.000 kg | Pabrik kaca raga | 1 | 150 $m^2$ |
| Perusahaan tapioka | 13 | 1.685 kg | Perusahaan vernikel | 7 | 22.100 bd. |
| Perusahaan es lilin/ balok | 8 | 430.000 batang | Pabrik pol listrik | 2 | 120.000 bd. |
| Perusahaan minuman keras/ anggur kolesom | 7 | 27.000 botol | Pabrik es | 3 | 869 ton |
| British American Tobacco | 1 | 390.200.000 batang | Perusahaan tenun | 43 | 47.460 potong |
| Perusahaan rokok kretek | 1 | 1.480.000 batang | Perusahaan tenun | 43 | 47.460 potong |
| Perusahaan barang karet | 5 | 160.000 bd., untuk ban sepeda<br>50.000 bd., untuk sandal | Perusahaan gips | - | - |
| Pabrik gelas | 1 | 400.000 bd. | Perusahaan tutup botol | 2 | 1.200.000 bd. |

Sumber: Musthofa (t.t.: 45).

Pertumbuhan ekonomi di Cirebon yang masih dipenuhi perusahaan milik asing ataupun pribumi membutuhkan kehadiran (cabang) bank nasional sebagai penyedia utama kebutuhan modal. Kantor BI Kas Cabang Cirebon kemudian hadir sebagai bank sirkulasi keuangan di beberapa titik perekonomian di wilayah eks Keresidenan Cirebon yang belum tersentuh

oleh program pembangunan pemerintah pusat.[12] Permasalahan itu diikuti berbagai kesulitan ekonomi masyarakat Cirebon ketika harga kebutuhan pokok— seperti minyak tanah, bensin, gula pasir, tekstil, dan bahan-bahan industri—mengalami kenaikan harga karena keterbatasan distribusi dan penimbunan barang kebutuhan pokok pada pertengahan 1950-an.

Keadaan tersebut juga akibat dari permasalahan ekonomi nasional[13] seperti defisit negara, ancaman inflasi, ketiadaan perencanaan ekonomi yang jelas, dan absennya undang-undang yang mengatur investasi dan modal asing.[14] Masalah lain ialah aktivitas perekonomian di Cirebon masih berkutat di pusat kota karena daerah pinggiran belum sepenuhnya pulih dan bebas dari gangguan keamanan lokal, sementara beban kehidupan masyarakat melonjak 225 persen (kurun 1961-62). Situasi tersebut berlangsung hingga menjelang peristiwa Gerakan 30 September 1965 meletus.[15]

## EVOLUSI KELEMBAGAAN BANK INDONESIA

Gagasan pembentukan bank sentral telah muncul sejak pembahasan materi Undang-Undang Dasar 1945 dalam sidang-sidang Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia dan Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia**.** Gagasan tersebut selanjutnya dituangkan dalam Penjelasan Pasal 23 UUD 1945 tentang Hal Keuangan. Surat kuasa Soekarno-Hatta tanggal 16 September 1945 kepada R. M. Margono Djojohadikusumo dipersiapkan sebagai langkah pembentukan bank sentral. Hal itu didasarkan pada pertimbangan dan kenyataan bahwa setiap negara berdaulat tentu memiliki bank sentral.

12 Tentang kelembagaan Bank Indonesia dibahas dalam subbab berikutnya.

13 Buruknya situasi perekonomian Indonesia pada dekade kelima (1950–60) disebabkan penurunan produksi yang drastis per kapita. Selama periode tersebut, permintaan bensin di dalam negeri meningkat sampai 64,5 persen dan minyak tanah meningkat hingga 200 persen, diikuti angka fluktuasi di beberapa daerah di Jawa yang tajam dengan peningkatan biaya hidup masyarakat sampai 100 persen serta tingginya harga-harga kebutuhan umum masyarakat (Ricklefs 2001: 260).

14 Aruman (t.t.: 41).

15 Kartodirdjo, dkk. (1976: 109).

Keberadaan bank sentral pada awal pemerintahan Republik Indonesia tidak terlepas dari De Javasche Bank dan Bank Negara Indonesia. Seperti telah disebutkan sebelumnya, DJB merupakan bank sirkulasi yang didirikan pada 1828 berdasarkan oktroi (hak-hak istimewa) yang diberikan oleh Kerajaan Belanda. Tidak lama setelah proklamasi kemerdekaan, pemerintah Republik Indonesia mengeluarkan keputusan mengenai pendirian BNI pada 5 Juli 1946 yang pada awalnya dimaksudkan sebagai bank sirkulasi. Akibat perang dan kondisi politik dan ekonomi yang tidak stabil, BNI tidak dapat menjalankan fungsinya sebagai bank sirkulasi secara maksimal.

Pada 1951, panitia nasionalisasi DJB merumuskan Rancangan Undang-Undang Pokok Bank Indonesia yang merupakan aturan bagi keberadaan bank sentral. Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 11/1953 tentang penetapan Undang-Undang Pokok Bank Indonesia pada 1 Juli 1953, DJB diambil alih dan diganti menjadi Bank Indonesia sebagai Bank Sentral Republik Indonesia**.** Dengan demikian dapat dikatakan bahwa DJB merupakan cikal bakal Bank Indonesia. Berdasarkan undang-undang tersebut, BI mengemban tiga fungsi dasar, yaitu (1) kebijakan moneter, (2) kebijakan perbankan, dan (3) memperlancar lalu lintas pembayaran. Sebagai badan hukum milik negara**,** BI berhak melakukan tugas-tugas berdasarkan Undang-Undang Bank Sentral**.** Adapun tugas BI antara lain menjaga stabilitas rupiah, menyelenggarakan peredaran uang di Indonesia, memajukan perkembangan urusan kredit, dan melakukan pengawasan dalam urusan kredit tersebut.[16]

Pada awal didirikan, struktur organisasi BI meliputi 12 kantor cabang dan satu di kantor pusat Jakarta, serta dua cabang BI di luar negeri sebagai kantor perwakilan. Bank Indonesia Wilayah III Cirebon menjadi bagian dari 12 kantor cabang yang berdiri pada masa awal tersebut. Pembagian kerja BI yang berlokasi di kantor pusat terdiri dari bagian pembukuan, bagian kas dan uang kertas bank, bagian urusan efek, bagian pemberian kredit Jakarta, bagian sekretaris dan urusan pegawai, bagian urusan wesel, bagian pemberian kredit pusat, dana devisa, bagian statistik ekonomi, urusan umum, bagian luar negeri, dan bagian administrasi pusat.

16 Tim Penulis Bank Indonesia (2005: 22).

Berdasarkan UU Nomor 11/1953, struktur pimpinan BI adalah Dewan Moneter, Direksi, dan Dewan Penasihat. Pada saat itu Dewan Moneter terdiri atas Menteri Keuangan, Menteri Perekonomian, dan Gubernur BI. Dewan tersebut bertugas menetapkan kebijakan moneter secara umum dan memberi petunjuk kepada direksi berkaitan dengan kebijakan bank. Ketetapan tentang Dewan Moneter dalam undang-undang tersebut tidak sesuai dengan pemikiran Sjafruddin Prawiranegara, Presiden DJB terakhir dan Gubernur BI pertama. Sjafruddin berpendapat bahwa keberadaan Dewan Moneter dalam jajaran pimpinan BI menjadikan batas organisatoris antara pemerintah dan BI menjadi tidak jelas. Hingga 1968, keberadaan Dewan Moneter tetap dipertahankan sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1953.[17]

Pada masa antara 1959-66, Gubernur Bank Indonesia berturut-turut dijabat R. Soetikno Slamet, Soemarmo, T. Jusuf Muda Dalam, dan Radius Prawiro. Selama periode tersebut dilakukan pembukaan dan penutupan kantor cabang dan kantor perwakilan, yaitu pembukaan kantor cabang Bandar Lampung (2 Desember 1961), Biak (19 Februari 1963), Sorong (14 Maret 1963), Manokwari (17 Maret 1963), Merauke (19 Maret 1963), Tanjung Pinang (15 Oktober 1963), Banda Aceh (2 Maret 1964), Samarinda (10 November 1964), Pekanbaru (21 Desember 1964), Sabang (28 Desember 1964), dan Kupang (10 Februari 1965).[18]

Modal perseroan terdiri atas saham-saham yang telah ditempatkan seluruhnya yang dimiliki oleh Bank Negara Indonesia. Adapun susunan pengurus terdiri atas Dewan Komisaris, ketua yang dijabat oleh M. Djoeana Koesoemahardja, dan sebagai wakil ketua adalah Sudjarwo Tjondronegoro, sedangkan sekretaris dijabat oleh A. Oudt. Dewan Direksi terdiri atas R. B. Gandasoebrata, sebagai direktur, dan E. R. D. Elias sebagai direktur pengganti.[19]

Pada 4 Juni 1965, terbit Penetapan Presiden Nomor 8 Tahun 1965. Ditetapkan bahwa semua bank umum negara dan Bank Tabungan Negara (BTN) diintegrasikan ke dalam bank sentral dalam sistem baru disebut

17 Tim Penulis Bank Indonesia (2005: 20).

18 Tim Penulis Bank Indonesia (II) (2005: 78).

19 Tim Penulis Bank Indonesia (II) (2005: 193), Lampiran XIV.

Bank Tunggal. Langkah ini diambil untuk menyederhanakan struktur dan organisasi yang bersifat tunggal.

Selanjutnya, pada 30 Juli 1965, lahir Penetapan Presiden Nomor 17 Tahun 1965 tentang pembentukan 'bank tunggal' milik negara dengan nama Bank Negara Indonesia. Mulai 17 Agustus 1965, kantor BI, Bank Koperasi Tani dan Nelayan, BNI, Bank Umum Negara, dan BTN dilebur ke dalam BNI, masing-masing beroperasi dengan nama BNI Unit I, Unit II, Unit III, Unit IV, dan Unit V. Menurut Surat Keputusan Menteri Urusan Bank Sentral Nomor 72/UBS/65, 19 Agustus 1965, salah satu tujuan bank tunggal adalah mengantarkan jasa-jasa bank dengan segala cara dan daya hingga pelosok. Maksudnya ialah agar lebih mengintegrasikan diri dengan masyarakat dan aktif dalam memberikan potensi rakyat.[20]

Tidak semua pihak setuju terhadap kebijakan itu. Direktur Utama Bank Dagang Negara, J. D. Massie, yang juga Menteri Urusan Penertiban Bank dan Modal Swasta, tidak sependapat dengan pemberlakuan kebijakan unifikasi bank tersebut. Alasannya, pengintegrasian bank-bank ke dalam bank tunggal justru akan membingungkan koresponden di luar negeri.

Struktur organisasi bank tunggal dalam masa peralihan (per 17 Agustus 1965) terdiri atas 14 urusan dan satu biro. Masing-masing adalah biro menteri, urusan pencetakan dan pengedaran uang, urusan pengerahan dana dan jasa-jasa, urusan kredit pertanian dan perikanan, urusan kredit perkebunan dan kehutanan, urusan kredit perindustrian dan pertambangan, urusan kredit perdagangan, urusan kredit prasarana, urusan penyertaan, urusan hubungan lalu-lintas pembayaran luar negeri, urusan pengawasan dan administrasi, urusan pembimbingan/pengawasan perbankan, urusan riset, perencanaan, pengembangan, urusan personalia dan pendidikan, serta urusan logistik.

Pada 27 Maret 1966, Radius Prawiro diangkat menjadi Gubernur BNI Unit I, menggantikan Menteri Urusan Bank Sentral T. Jusuf Muda Dalam. Penggantian tersebut diikuti dengan perubahan struktur organisasi. Jumlah unit kerja dikurangi dari 14 urusan dan 1 biro menjadi 6 urusan

20 Tim Penulis Bank Indonesia (II) (2005: 24).

dan 1 biro dengan 36 bagian. Masing-masing adalah biro menteri (4 bagian), urusan luar negeri (7 bagian), urusan administrasi, organisasi dan pengawasan (6 bagian), urusan pengadaan uang dan pencetakan uang (4 bagian), urusan perbankan dan pembimbingan (4 bagian), dan urusan umum (6 bagian).

Pada 31 Desember 1968, pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1968. Undang-Undang ini memiliki perbedaan sangat prinsip dibandingkan dengan Undang-Undang Nomor 11/1953 sebelumnya. Dalam UU Nomor 13/1968 yang baru itu, BI tidak lagi diperkenankan melakukan jenis usaha bank yang bersifat komersial. Undang-Undang sebelumnya masih mengizinkan BI menjalankan usaha-usaha komersial tersebut.

Pada awal periode itu, fungsi bank sentral masih dilakukan oleh Bank Negara Indonesia Unit I sebagai salah satu unit dari Bank Tunggal. Dalam pembentukan Kabinet Ampera (Juli 1966), bank sentral ditetapkan sebagai salah satu dari lembaga tinggi negara di luar struktur pemerintahan. Hal itu merupakan proses awal penataan perbankan pada umumnya dan pengembalian fungsi bank sentral, yaitu mengusahakan secara bertahap agar fungsi bank sentral yang masih dilakukan oleh BNI Unit I bisa menjaga tingkat kebebasan dari pengambilan keputusan politik.

Sesuai dengan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara Nomor XXIII/MPRS/1966, dalam rangka pengamanan keuangan negara pada umumnya dan penyehatan tata perbankan pada khususnya, pemerintah menganggap perlu segera menghidupkan kembali suatu bank sentral yang dapat menjalankan tugas dengan sebaik-baiknya dalam menjaga dan memelihara kestabilan nilai rupiah, guna mendorong kelancaran produksi dan pembangunan**.**

Upaya pembentukan bank sentral yang lebih mandiri tersebut berhasil dilaksanakan setelah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1968 tentang Bank Sentral yang mulai berlaku 31 Desember 1968 diundangkan**.** Selanjutnya, terdapat keputusan untuk mengganti nama Bank Negara Indonesia Unit I menjadi Bank Indonesia kembali sebagai bank sentral Republik Indonesia**.**

# NASIONALISASI WARISAN EKONOMI KOLONIAL

Nasionalisasi, atau Indonesianisasi, terhadap De Javasche Bank menjadi Bank Indonesia ditandai dengan penggantian pejabat berkebangsaan Belanda ke tangan orang Indonesia sejak 1957. Perubahan itu menjadikan fungsi Kantor BI Kas Cabang Cirebon—sebagai representasi Bank Indonesia di daerah—lebih aktif dan efektif menangani perekonomian masyarakat di wilayah tugasnya. Program nasionalisasi juga diarahkan pada perusahaan dan usaha perseorangan milik Belanda dalam perkebunan, pertanian, dan industri terutama pabrik gula di wilayah Cirebon.

Kantor BI Kas Cabang Cirebon diberi wewenang penuh sebagai bank sirkulasi yang membantu BI Pusat dalam melayani kegiatan perbankan baik yang berhubungan dengan bank lain milik pemerintah dan swasta maupun nasabah lain di wilayah eks Keresidenan Cirebon.[21] Dalam keterangan lain, status kantor BI Kas Cabang Cirebon disebutkan,

> *Tjabang Cirebon jang memiliki kas dengan pengaliran kembali uang kertas bank dan uang kertas pemerintah karena perdagangan, hasil bumi (beras, tapioka, bawang katjang dll.), dan 1960 (akhir-akhir ini) perdagangan tekstil [….] Tjabang Tjirebon adalah suatu tjabang dengan kas jang uangnja mengalir kembali (toevloeiende kas).*[22]

Dalam laporan pembukuan pertama (1953/54), nama De Javasche Bank tidak lagi digunakan di Cirebon, melainkan diganti menjadi Bank Indonesia. Kantor BI Kas Cabang Cirebon disebutkan telah beroperasi dalam kegiatan perbankan di wilayah Cirebon dan sekitarnya pada periode antara 1 Januari 1953 sampai dengan 16 Agustus 1965. Dilaporkan pula bahwa BI Kas Cabang Cirebon setelah nasionalisasi dipimpin oleh pribumi yaitu R. H. Kamarga (menjabat 1957-58 dan 1958-59). Tampuk pimpinan selanjutnya ialah R. P. Soemadipradja (menjabat 1959-60).[23]

Pada 1955, Kantor BI Kas Cabang Cirebon memiliki sepuluh orang pegawai. Jumlah kasir jauh lebih dari cukup karena memiliki kas pengaliran

21 ANRI (2006: 2, 10).

22 Arsip Bank Indonesia, "Laporan Pemimpin Tjabang Tjirebon Pada Tanggal 6-2-1961 (t.t.: 4); ejaan kutipan sesuai dengan aslinya [selanjutnya "Laporan Pemimpin Tjabang Tjirebon"]

23 Museum Bank Indonesia (1991: 10).

ke dalam, meski keberadaan kas tersebut juga menyebabkan Kantor BI Kas Cabang Cirebon menghadapi berbagai kesulitan jika menghadapi setoran dalam jumlah besar. Setoran dalam jumlah besar terjadi ketika bank-bank di Cirebon menyetor dalam waktu bersamaan[24] setelah banyak dilakukan transaksi perbankan dengan perusahaan dan usaha ekonomi yang lain. Namun, setoran tinggi tidak hanya terjadi di Cirebon karena setelah 1950 muncul gerakan otonomi dan sentimen kedaerahan yang menuntut pemerintah pusat lebih memperhatikan pembangunan daerah. Gerakan tersebut berpengaruh terhadap perekonomian yang tidak kondusif di Cirebon.[25]

Dalam suasana seperti itu, Kantor BI Kas Cabang Cirebon berhasil melakukan pengaliran uang kembali sebanyak empat kali lipat pada periode kerja 1955/60. Di tengah situasi rawan konflik politik—dalam dan luar negeri—tersebut, BI Kas Cabang Cirebon tetap menjalankan fungsinya sebagai bank sirkulasi keuangan di Cirebon dengan baik (lihat Tabel 4.2).

**Tabel 4.2.**
**Peredaran Uang di Kantor BI Kas Cabang Cirebon**
**(1955/60)**

| Tahun | Penyetoran (rupiah) | Disposisi (rupiah) |
|---|---|---|
| 1955 | 372.399.000,00 | 341.276.000,00 |
| 1960 | 1.346.253.000,00 | 929.301.000,00 |

Sumber: "Laporan Pemimpin Tjabang Tjirebon" (t.t.: 3).

Jumlah setoran uang dalam jumlah besar menjadi masalah teknis-kinerja tersendiri di Kantor BI Kas Cabang Cirebon khususnya pada akhir dasawarsa 1950-an sampai tahun-tahun pertama 1960-an. Oleh karena itu, diputuskan kebijakan jam kerja baru untuk pelayanan ekstra sampai dengan pukul 13.00. Selain waktu ekstra dalam pelayanan, Kantor BI Kas Cabang Cirebon melakukan langkah ekstra untuk bekerja lembur bagi 10 karyawannya dengan konsekuensi pembayaran gaji dihitung dobel.

24 "Laporan Pemimpin Tjabang Tjirebon" (t.t.: 3).

25 Kartodirdjo (1976: 82, 88).

Uang setoran dari bank-bank di Cirebon dimasukkan ke dalam peti atau koper yang dikunci dan disegel oleh bank penyetor serta disimpan sebagai simpanan tertutup. Kepada bank penyetor diberi tanda terima dengan keterangan, "Telah diterima sebuah peti/koper yang seharusnya berisi suatu jumlah yang sebelum dimasukkan di peti telah diperiksa oleh kasir."

Langkah selanjutnya ialah koper uang yang dikunci tersebut pada keesokan harinya baru dibuka dan diperiksa di hadapan para pejabat BI Kas Cabang Cirebon dan pejabat bank yang bersangkutan. Kepala Kantor BI Kas Cabang Cirebon mengeluhkan jumlah kasir yang menurutnya sangat terbatas (hanya 10 orang pada 1961) untuk melayani setoran tunai tersebut. Kerepotan kasir terjadi ketika mereka harus membukukan jumlah penyetoran tunai secara langsung sehingga kerja pembukuan baru dapat diselesaikan pada keesokan harinya setelah setoran disampaikan. Jika pada pagi hari bank sudah menyetorkan kembali uang dalam jumlah besar, maka sudah terjadi jaminan simpanan (*achterstand*) dan menyebabkan masalah *likwiditet* pada bank yang bersangkutan karena jumlah yang disetorkan di khazanah belum dapat dimasukkan dalam administrasinya.[26]

Musim giling pabrik gula dan kegiatan kampanye dalam Pemilihan Umum 1955 merupakan faktor membesarnya setoran dana nasabah ke Kantor Kas BI Cirebon dalam kurun 1955-60.[27] Pada 1959, sejumlah pabrik gula (PG) di wilayah eks Keresidenan Cirebon berhasil dinasionalisasi oleh Pemerintah Indonesia berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1959; antara lain PG Sindanglaut, PG Karangsuwung, PG Kadipaten, PG Tersana Baru, PG Sindanglaut,[28] PG Jatiwangi, dan PG Gempol. Selama masa giling pabrik-pabrik gula itu, Kantor BI Kas Cabang Cirebon menyediakan stok Uang Kertas Bank (UKB) dari lembaran Rp100 ke bawah untuk keperluan pembayaran upah buruh pabrik gula yang

26 "Laporan Pemimpin Tjabang Tjirebon" (t.t.: 3).

27 "Laporan Pemimpin Tjabang Tjirebon" (t.t.: 3).

28 Awalnya, Pabrik Gula Singdanglaut didirikan oleh NV Mij tot Exsploitatie der Suiker Fabriek Sindanglaoet; kantor direksi berada di Jakarta dengan nama CV Waller & Plato. Pada masa pendudukan Jepang PG Sindanglaut dikuasai oleh Gunseikanbu dan setelah kemerdekaan dikelola oleh Badan Penyelenggaraan Perusahaan Gula Negara. Lihat "PG Sindanglaut," http://pg-rajawali2.com/pg-sindang-laut/, diunduh 9 Juni 2020.

meningkat. Demikian pula ketika musim kampanye pemilihan umum, dana serupa akan disediakan oleh kantor BI Cirebon.[29] Kedekatan BI Kas Cabang Cirebon dengan pabrik gula setempat tidak lepas dari warisan sinergis antara pengusaha gula dan tebu Eropa dengan DJB Cabang Cirebon.[30]

Ketika Pemerintah Indonesia pada 25 Agustus 1959 memutuskan menarik kembali UKB Emisi 1952 pecahan Rp50 dan Rp5, Kantor BI Kas Cabang Cirebon berperan melaksanakan putusan itu untuk wilayah eks Keresidenan Cirebon, sebagai bagian dari menjalankan kebijakan nasional Konsolidasi Juanda melalui devaluasi (*sanering* 1959) dan pembekuan deposito[31] untuk mengurangi pasokan uang dari 34 miliar rupiah menjadi 21 miliar rupiah. Pada tingkat nasional, pelaksanaan Konsolidasi Juanda telah berhasil meningkatkan peredaran jumlah uang pada 1959 dan menciptakan keuntungan negara sebesar Rp 8.521 juta untuk mengurangi kerugian kas Pemerintah.

Selain pabrik gula, beberapa perusahaan milik asing di Cirebon juga dinasionalisasi oleh pemerintah.[32] Nasionalisasi terhadap perusahaan

29 Arsip Bank Indonesia, "Laporan Pemimpin Tjabang Bandung, Tjirebon, Semarang, Jogjakarta, Solo" (1963: 11); ejaan sesuai dengan aslinya [selanjutnya "Laporan Pemimpin Tjabang Bandung"].

30 Keppy 2010: 16.

31 Laju inflasi pada 1958 mencapai 26 persen dan meningkat menjadi 38 persen pada 1960, dan defisit keuangan negara mencapai 13,324 juta rupiah. Devaluasi dilakukan untuk mata uang rupiah sebesar 75 persen dengan nilai mata uang kertas Rp500 menjadi Rp50 dan Rp1.000 menjadi Rp100. Pembekuan deposito dilakukan pada nominal yang mencapai 90 persen dengan jumlah simpanan di atas 25.000 rupiah dan diganti menjadi simpanan jangka panjang. Konsolidasi Juanda dimulai pada 25 Agustus 1959 dengan mekanisme uang kertas Bank Indonesia seri hewan (tanpa tanda tahun) pecahan Rp500 diubah menjadi Rp1.000 serta uang kertas Bank Indonesia Emisi 1952 pecahan Rp500 diubah menjadi Rp1.000, dan uang kertas DJB Emisi 1946 pecahan Rp500 (Kusuma 2014: 119, 121; Ricklefs 2001: 323).

32 Program nasionalisasi dijalankan karena beberapa alasan: merosotnya devisa negara, menurunnya angka ekspor, kegagalan diplomasi masalah Irian Barat (Papua) dalam Sidang Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa, kekecewaan rakyat atas tingginya nilai rupiah, menurunnya harga ekspor karet pada 1957, dan inflasi tinggi pada 1959. Nasionalisasi dilakukan pertama kali atas 38 perusahaan tembakau dan 205 perusahaan pertanian termasuk 22 perusahaan perkebunan yang dimasukkan ke dalam Perusahaan Perkebunan Negara (Desember 1957); dan perusahaan pertambangan seperti Nederlandsch Indische Ardolie Maatschappij (berubah menjadi PT Pertambangan Minyak Indonesia [Permindo], 1959); pertambangan minyak di Sumatera Utara menjadi PT Perusahaan Minyak Nasional (Permina), di Jambi, Ogan (Sumatera Selatan) dan Bunyu (Kalimantan Timur) yang dilebur ke dalam Perusahaan Tambang Minyak dan Mineral (Pertamina) pada 1968. Selain itu, sebanyak 46.000 warga negara asing karyawan Royal Dutch Shell diminta meninggalkan Indonesia pada 13 Desember 1957 (Ricklefs 2001: 316–7; Isnaeni, "Inilah Bidang Usaha yang Dinasionalisasi," dalam https://historia.id/politik/articles/inilah-bidang-bidang-usaha-yang-dinasionalisasi-6joz1, diunduh 12 Juni 2020).

**Gambar 4.3.** Uang Kertas Bank (UKB) Emisi 1952 pecahan 50 dan 5 rupiah yang ditarik peredarannya pada 1959.

Sumber: Koleksi Arsip Bank Indonesia

asing dilakukan secara sepihak dengan mengambil alih seluruh aset perusahaan Belanda dan aliansinya[33] di wilayah Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nasionalisasi Perusahaan Belanda Nomor 8 Tahun 1958.

33 Beberapa perusahaan transportasi yang dinasionalisasi adalah Koninklijk Paketvaart Matschappij (Desember 1957); perusahaan galangan kapal dan dok serta kapal uap (Nederlandsch Indonesische Scheepvaart Establisementen, Tanjung Priok; Droogdok Maatschappij Tandjung Priok; Vereenigde Prauwen Veeren Jakarta; Radio Holland; Drogdok Maatschappij Surabaja, Industriele Maatschappij Palembang; Dock-Works Semarang), kapal uap dan *prau* (Semarang Stoomboot en Prauwen Veer dan Semarang Veer, digabung menjadi Perusahaan Angkutan Air dan Dok Negara Semarang); 11 perusahaan kereta api dan telepon (NV Deli Spoorweg-Maatschapij menjadi PT Kereta Api Indonesia); dan berbagai bank seperti Nederlandsch Handel Maatschappij (NHM), Nederlandsch Handelsbank (NHB, berubah menjadi Bank Umum Negara pada 1959 kemudian menjadi Bank Bumi Daya [BBD], 1968), Escompto (menjadi Bank Dagang Negara [BDN], 1960); gabungan NHM dengan Bank Rakyat Indonesia (BRI) dan Bank Tani Nelayan menjadi Bank Koperasi Tani dan Nelayan (BKTN). Pada 1968, BKTN dibagi menjadi dua yaitu BRI dan Bank Export Import Indonesia (Bank Exim; kemudian bersama BBD, BDN dan Bank Pembangunan Indonesia dilebur menjadi Bank Mandiri, 1999) (Isnaeni, t.t.; "PG Sindanglaut", http://pg-rajawali2.com/pg-sindang-laut/, diunduh 9 Juni 2020).

Selanjutnya, eksekusi nasionalisasi dilaksanakan pada 27 Desember 1958 oleh Badan Nasionalisasi Perusahaan Belanda sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1959.

Di Cirebon, program nasionalisasi "menyasar" kepada perusahaan perdagangan komoditi perkebunan NV Jacobson van den Berg, salah satu dari The Big Five.[34] Selain itu, dinasionalisasi pula The Borneo-Sumatera Maatschappij, Geo Wehry, The International Crediet- en Handels Vereniging Rotterdam (Internatio) dan Lindeteves yang didukung penuh oleh kekuatan militer.[35] Selanjutnya, nasionalisasi atas perusahaan rokok BAT bersamaan dengan BAT Grand Hotel pada 26 November 1964 melalui Penetapan Presiden Nomor 6 Tahun 1964 tentang penguasaan dan pengurusan perusahaan milik Inggris di Indonesia.[36]

Setelah pelaksanaan program nasionalisasi aset asing tersebut, Kantor BI Kas Cabang Cirebon menampung setoran hasil perdagangan dari perusahaan yang telah dinasionalisasi.[37] Telah disebutkan, perkembangan itu menyebabkan jumlah setoran dana di Kantor BI Kas Cabang Cirebon "membengkak" tajam. Untuk merespon kondisi tersebut, Kantor BI Kas Cabang Cirebon mengeluarkan dua langkah yang disesuaikan dengan Surat Edaran Rahasia Penerangan Nomor 8/20 (24 Januari 1961). Pertama, setoran yang hingga pukul 13.00 belum habis terhitung, diterima BI dengan perhitungan dalam garis besar masing-masing 100 lembar; uang kemudian dimasukkan ke dalam peti di bawah pengawasan dan disegel oleh pejabat BI dan jumlahnya dimasukkan ke rekening bank bersangkutan

34 The Big Five dilebur ke dalam PT Negara (atau Bhakti) yaitu PT Budi Bhakti (leburan dari Borsumij); PT Aneka Bhakti (leburan dari The International Crediet- en Handels Vereniging Rotterdam [Internatio]); PT Tulus Bhakti (leburan dari Lindeteves); PT Marga Bhakti (leburan dari Geo Wehry); PT Djaja Bhakti (leburan dari Usindo); PT Tri Bhakti (leburan dari CTC); PT Sedjati Bhakti (leburan dari Jajasan Bahan Penting); dan PT Sinar Bhakti (leburan dari Java Steel Stokvis). The Big Five sendiri dimerger menjadi tiga Badan Usaha Milik Negara Niaga yaitu PT Tjipta Niaga (Persero), PT Dharma Niaga (Persero), dan PT Pantja Niaga, yang dilebur menjadi Indonesia Trading Company, sebuah usaha dagang untuk kegiatan ekspor, impor, dan distribusi (Isnaeni, t.t).

35 Terjadi sedikit ketegangan dalam eksekusi nasionalisasi NV Jacobson van den Berg; Pemerintah didukung penuh kekuatan militer dan serikat buruh menekan direksi cabang NV Jacobson van den Berg di Cirebon untuk mempercepat proses penandatanganan syarat nasionalisasi. Hingga kini, bekas gedung NV Jacobson van den Berg di Cirebon difungsikan sebagai kantor bank (pada 2020 digunakan sebagai kantor Panin Bank) (Ardanareswari 2019).

36 Poesponegoro dan Notosusanto, ed. (2008: 211); Hadi (2017: 111); Hanusz (2000: 47).

37 "Laporan Pemimpin Tjabang Bandung" (1963: 11).

dengan syarat memberi kuasa kepada BI; selisih jumlah yang terjadi dapat diperhitungkan kemudian. Cara tersebut dapat membantu likuiditas bank bersangkutan dan menjaga (*sparen*) kekuatan dan kapasitas menghitung kasir-kasir BI Cirebon. Kedua, menggunakan mesin penghitung modern, terutama untuk keperluan pemeriksaan oleh kuasa kas dan pemimpin-pemimpin cabang, untuk mempercepat langkah. Mesin penghitung modern tidak disarankan digunakan oleh para kasir karena sulit untuk mendeteksi uang palsu.[38]

Pada 1961, mesin penghitung modern digunakan untuk mempercepat penghitungan uang keluar dari peti sehingga meringankan tugas kasir dan pejabat bank. Setoran uang dalam jumlah besar sejak awal 1955 menjadikan kerja pengawasan BI meningkat. Pengawasan pun ditingkatkan dengan berbagai cara, seperti keharusan pembubuhan paraf oleh dua kasir pada setiap dua pak uang; untuk pecahan Rp100 dan Rp500 diperiksa lagi secara *bridge system* oleh kuasa kas, sedangkan untuk pecahan Rp50 ke bawah cukup memuat paraf dua orang kasir dan pemeriksaan kuasa kas menyamai pecahan ini hanya secara sampel (*steekproef*). Kepala Kantor BI Kas Cabang Cirebon meminta agar masyarakat Cirebon dapat memahami sistem dan mekanisme kerja perbankan, dan menjadi nasabah baru melalui rekening Pos dan Giro di Kantor Pos Cirebon. Dengan cara itu, kerja perbankan menjadi lebih mudah dan efektif.[39]

## KEBIJAKAN EKONOMI NASIONAL DAN PERKEMBANGAN KEWIRAUSAHAAN LOKAL

Perekonomian di Cirebon dari akhir 1959 hingga awal 1960 sangat terpengaruh oleh berbagai kebijakan Pemerintah Pusat, terutama kebijakan Gunting Sjafruddin dan Sanering 1959. Secara tidak langsung, kebijakan tersebut memunculkan berbagai masalah, seperti pasar yang sepi karena pedagang sulit menjual barang dagangannya; melemahnya

38 "Laporan Pemimpin Tjabang Tjirebon" (t.t.: 4).

39 "Laporan Pemimpin Tjabang Tjirebon" (t.t.: 4).

daya beli masyarakat;[40] kesulitan likuiditas bank karena pembekuan simpanan saldo; penghentian layanan kredit bank kepada pelaku usaha; aktivitas bisnis (produksi, ekspor, impor, dan distribusi) macet; sirkulasi hasil produksi menipis; kenaikan harga barang; dan meningkatnya biaya hidup masyarakat. Pada akhir 1959, dilaporkan bahwa jumlah uang rupiah yang beredar menjadi empat kali lipat lebih banyak sebelum program *sanering* dilakukan karena kebijakan sentralistik dari pemerintahan Demokrasi Terpimpin yang meninggalkan peran BI.[41] Hingga Dekrit Presiden 5 Juli 1959 diumumkan—ketika pemerintah memilih kembali ke Pancasila

**Gambar 4.4.** Presiden Sukarno disambut rakyat Cirebon dalam rangka kunjungan kerja ke Cirebon, 7 April 1956

Sumber: ANRI, Kementerian Penerangan 560407 FY 22

40 Kebijakan Gunting Sjarifudin dan Sanering 1959 tidak didukung oleh sosialisasi yang baik kepada masyarakat, khususnya di pedesaan, sehingga berpengaruh pada pendistribusian uang pecahan ribuan dan lima ratusan oleh sebagian masyarakat kota melalui kunjungan sekadar membeli buah-buahan dan hasil bumi yang lain. Lantaran keterbatasan informasi Pemerintah, masyarakat desa di Jawa kecewa dan kaget ketika mengetahui nilai uang yang mereka miliki turun (Kusuma 2014: 119, 121).

41 Ricklefs (2001: 323); Kusuma (2014).

dan UUD 1945—serta pemerintahan Kabinet Djuanda berakhir, tidak ada tanda-tanda yang menunjukkan perubahan kondisi perekonomian nasional ke arah lebih baik.[42]

Pada aras lokal di Cirebon, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1959 mengamanatkan kuasa pemerintah daerah untuk menjalankan pemerintahan daerah sesuai kewajiban, kekuasaan dan wewenang, serta ketertiban dan keamanan umum.[43] Aturan pemerintah tersebut sedikit berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi rakyat di Cirebon, seperti wirausaha konveksi di Tegalgubug,[44] dan tumbuhnya berbagai koperasi batik (antara 1952-60) setelah warga Tionghoa eksodus dari Trusmi dan Kali Tengah—semisal Koperasi Batik Budi Tresno yang memiliki 716 orang anggota pada 1959[45]—dan wirausaha lain-lain (lihat Tabel 4.3).

**Tabel 4.3.**
**Daftar Wirausaha di Cirebon**
**(1956)**

| Jenis Usaha | Jumlah | Produksi (per bulan) | Jenis Usaha | Jumlah | Produksi (per bulan) |
|---|---|---|---|---|---|
| Jagal kerbau/sapi | 4 | 8.900 kg | Jagal babi | 5 | 11.900 kg |
| Pemerasan susu sapi | 2 | 7.000 liter | Jagal kambing | 22 | 9.900 kg |
| Penggilingan padi | 1 | 10.000 kg | Penyosohan beras | 10 | 31.250 kg |
| Penggorengan kopi | 11 | 4.470 kg | Pembuatan mi | 12 | 3.400 kg |
| Pembuatan bihun | 4 | - | Pembuatan krupuk | 7 | 6.400 kg |
| Pembuatan sohun | 13 | 1.680 kg | Pembuatan kacang goreng/kwaci | 3 | 8.000 kg |
| Pembuatan kecap | 19 | 10.100 botol | Pembuatan sirup | 22 | 18.850 kg |

42 Tidak adanya perubahan kebijakan perekonomian memunculkan kritik terhadap kepemimpinan Presiden Sukarno yang dinilai lebih berpihak kepada kelompok komunis dan militer. Salah satunya adalah Sjafruddin Prawiranegara yang mengambil sikap meninggalkan Jakarta dan bergabung dengan gerakan Pemerintah Revolusioner Republik Indonesia di Sumatera. Kedudukan Sjafruddin sebagai pimpinan tertinggi Bank Indonesia kemudian digantikan oleh Lukman Hakim yang kemudian ikut mengundurkan diri pada September 1959 (Kartodirdjo 1976: 101; Kusuma 2014: 126–8).

43 *Sekilas Sejarah Pemerintahan Kota Cirebon* (t.t.: 32).

44 Penggunaan mesin jahit dalam usaha konveksi di Tegalgubug diawali pada kurun 1950-an (Arovah 2019: 60, 77, 83).

45 Jumlah anggota Koperasi Batik Budi Tresno meningkat tajam menjadi 1.173 orang pada 1970 (Farihah 2019: 73–94).

**Tabel 4.3.**
**Daftar Wirausaha di Cirebon**
**(1956) (Lanjutan)**

| Jenis Usaha | Jumlah | Produksi (per bulan) | Jenis Usaha | Jumlah | Produksi (per bulan) |
|---|---|---|---|---|---|
| Pembuatan limun/air soda | 5 | 250.000 botol | Perusahaan permadani | 1 | - |
| Pembuatan benang jahit/bordir | 4 | - | Pembuatan tali ijuk | 1 | 30 ton |
| Pengolahan kapuk | 2 | 25 ton | Vulkanisir | 4 | 72 bd |
| Pembuatan sepatu/ sandal | 32 | 2.085 pasang | Pembuatan minyak kacang | 5 | 16 ton |
| Pembuatan topi/helm | 1 | 4.600 biji | Pembuatam wangi-wangian | 2 | - |
| Industri batik | 30 | 60.980 potong | Pembuatan minyak kelapa | 2 | 3.400 ton |
| Penggergajian kayu | 1 | - | Pembuatan bedak | 3 | 13 ton |
| Kerajinan mebel rotan | 1 | 9 stel | Kerajinan gerabah | 1 | 450 bd. |
| Kerajinan mebel | 14 | 153 m3 | Pembakaran kapur | 1 | 50 $m^3$ |
| Percetakan | 13 | 45 ton | Pengolahan batu pualam | 1 | 10 $m^3$ |
| Kerajinan kulit | 10 | 13.250 kg/ 5.150 lembar | Kerajinan pandai besi | 6 | - |
| Pembuatan timbangan | 4 | 106 bd | Pemasangan instalasi listrik | 8 | - |
| Pembuatan kaleng | 36 | 12.960 bd | Reparasi mesin tulis | 6 | - |
| Pengecoran kastrol krekan | 1 | 15.000 bd | Bengkel radio | 8 | - |
| Pembuatan ranjang | 4 | 600 bd | Bengkel mobil | 5 | - |
| Konstruksi werkplaats | 8 | - | Bengkel dan asembling sepeda | 13 | - |
| Pembuatan karoseri truk | 3 | - | Jasa potret | 10 | - |
| Sport | 1 | - | Veem (pemeliharaan gudang dan barang) dan stuwador (jasa petugas bongkar muat di pelabuhan) | 9 | 128.000 |

**Tabel 4.3.**
**Daftar Wirausaha di Cirebon**
**(1956) (Lanjutan)**

| Jenis Usaha | Jumlah | Produksi (per bulan) | Jenis Usaha | Jumlah | Produksi (per bulan) |
|---|---|---|---|---|---|
| Pembuatan obat nyamuk | 1 | - | Dagang kayu | 20 | - |
| Kerajinan perak | 25 | - | Dagang hasil bumi | 160 | - |

Sumber: *Buku Peringatan 50 tahun Kota Besar Tjirebon* (t.t: 47-9).

Dari Tabel 4.3 dapat diketahui bahwa baik wirausaha maupun jasa usaha mikro di Cirebon meliputi penyedian barang-barang kebutuhan pokok, jasa penting pada piranti kehidupan sehari-hari dan aktivitas perdagangan hasil bumi mulai tumbuh berkembang. Pertumbuhan perekonomian lokal tersebut membutuhkan modal sebagai unsur penting dalam kegiatan wirausaha lokal. Hingga 1956, peran bank di Kota Cirebon masih menguasai basis perekonomian daerah. Setelah itu, kemajuan wirausaha di pinggiran kota atau pedesaan justru makin tumbuh dengan diberlakukannya kebijakan Pemerintah (Mei 1959) yang mewajibkan pedagang Cina ataupun orang asing lain yang berbisnis di pedalaman Cirebon pindah ke pusat kota per 1 Januari 1960.[46] Kebijakan itu berhasil menumbuhkan basis baru perekonomian di wilayah Cirebon karena pengusaha kecil telah kehilangan kompetitor dan memicu peredaran uang di seluruh penjuru wilayah Cirebon pasca-1960.

Laporan pimpinan Kantor BI Kas Cabang Cirebon menyebutkan bahwa masyarakat di Cirebon menyukai menyimpan uang pecahan Rp500 ke atas karena mudah dan ringan dibawa dalam jumlah besar. Untuk menjaga kelancaran lalu lintas giral dan stabilisasi harga, Kantor BI Kas Cabang Cirebon membatasi pengeluaran UKB lembaran Rp500 ke atas.[47] Meningkatnya pertumbuhan ekonomi lokal tersebut membuat Kantor BI Kas Cabang Cirebon mengalami remises (*remittance*) karena tidak tersedia *locker* atau *schatkistkamer* di Pelabuhan Cirebon. Selain itu, pengiriman

46 Musthofa (t.t.: 44); Ricklefs (2001: 323).

47 "Laporan pemimpin Tjabang Bandung" (1963: 11).

**Gambar 4.5.** Wakil Presiden Moh. Hatta mengunjungi koperasi perusahaan rotan di Cirebon 25 Juli 1956.

Sumber: ANRI, Kementerian Penerangan 560725 FY 5-7

uang ke Jakarta terbentur pada kesulitan pengawalan polisi setempat yang terbatas hanya pengamanan di wilayah Cirebon selama satu hari. Jika harus mengawal penyetoran uang BI Kas Cabang Cirebon ke Jakarta atau ke Semarang, petugas polisi Cirebon tidak dapat melaksanakannya dalam waktu sehari. Untuk mengatasi masalah itu, Kantor BI Kas Cabang Cirebon memilih mengirimkan uang setoran kepada "kakak besar," yaitu BI Cabang Bandung yang siap menerimanya kemudian mengirimkannya ke BI Pusat di Jakarta.[48]

Berhubung kapasitas ruang khasanah terbatas, Kantor BI Kas Cabang Cirebon bisa mengirimkan kembali uangnya. Berturut-turut jumlah uang yang dikembalikan dari BI Kas Cabang Cirebon adalah 31.123.000 rupiah (pada 1955), 71.534.000 rupiah (1956), 44.790.000 rupiah (1957),

48 "Laporan Pemimpin Tjabang Tjirebon" (t.t.: 4).

65.583.000 rupiah (1958), 3.729.000 rupiah (1959), dan 416.952.000 rupiah (1960). Luas ruang khasanah Kantor BI Kas Cabang Cirebon adalah sebagai berikut.

Kas Besar memiliki luas 72,28 meter$^3$; 15,68 meter$^3$ ditempati 75 buah hok uang, sehingga tersedia 56,60 meter$^3$ sebagai tempat peti asli berisi uang kertas bank. Dari 75 buah hok uang kas besar tersedia 50 buah untuk uang dan 25 buah untuk arsip.

Kas Harian Kas memiliki luas 43,55 meter$^3$; 8,03 meter$^3$ ditempati 45 hok uang, sehingga tersedia 35,50 meter$^3$ ruang kosong. Dari 45 hok uang tersedia 40 buah untuk uang dan 5 buah untuk arsip.

**Tabel 4.4.**
**Kas Besar Berdasarkan Emisi Tahun 1959**
**Kantor BI Kas Cabang Cirebon**

| Pecahan Uang | Hok Uang | Jumlah UKB Terlepas (juta rupiah) | Jumlah Peti | Luasan (meter$^3$) | Jumlah UKB dalam Peti Asli (juta rupiah) | Jumlah Seluruhnya (juta rupiah) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1000 | 1 | 80 | 5 | 0,52 | 100 | 180 |
| 500 | 2 | 80 | 10 | 1,07 | 100 | 180 |
| 100 | 5 | 40 | 50 | 2,65 | 100 | 140 |
| 50 | 10 | 50 | 100 | 5,31 | 100 | 150 |
| 25 | 10 | 30 | 200 | 9,08 | 100 | 130 |
| 10 | 10 | 12 | 100 | 9,03 | 50 | 62 |
| 5 | 10 | 6 | 200 | 17,17 | 50 | 56 |
| 2,5 | 1 | 0,25 | 6 | 0,62 | 0,75 | 1 |
| 1 | 1 | 0,10 | 18 | 1,87 | 0,90 | 1 |
| Jumlah | 50 | 298,35 | 689 | 47,32 | 601,66 | 900 |

Sumber: "Laporan Pemimpin Tjabang Tjirebon" (t.t.: 5).

Daya tampung khazanah Kantor BI Kas Cabang Cirebon dapat memuat total 900 juta (Tabel 4.4). Kapasitas maksimum khasanah dalam peti asli mencapai 600 juta rupiah dan yang terlepas mencapai 500 juta rupiah. UKB di wilayah Cirebon mencapai jumlah 416 juta rupiah dan yang mengalir kembali dalam bentuk uang lusuh adalah 101 juta rupiah atau kira-kira 25 persen sebelum Emisi 1952 ditarik. Penarikan uang

lusuh oleh Kantor BI Kas Cabang Cirebon dengan pembaruan 20 persen tidak mengalami kesulitan karena didukung oleh kinerja Kantor Pos, Kas Negara, dan bank-bank pemerintah di Cirebon yang tidak mengedarkan uang lusuh serta memberikan pedoman kriteria uang lusuh kepada nasabah dan masyarakat. Dengan demikian, peredaran uang lusuh di Cirebon dapat terkendali dengan baik. Selain itu, Kantor BI Kas Cabang Cirebon juga diberi wewenang membakar uang lusuh pecahan Rp10 dan Rp25 dengan oven yang tersedia di pekarangan kantor.[49]

Dalam uang lusuh terdapat Uang Kertas Pemerintah (UKP) yang menumpuk di bank-bank serta relasinya di Cirebon. Kejadian tersebut disebabkan oleh pembatasan alokasi penyetoran di Kantor Pos rata-rata 100.000 rupiah per minggu dari masyarakat; juga karena kemampuan BI Kas Cabang Cirebon yang hanya dapat menerima uang lusuh dengan penyetoran berangsur dan penyetoran (*afstorting*) cabang BI dalam UKP ke Kantor Pos q.q. Kas Negara dalam jumlah sangat terbatas. Selain itu, BI Kas Cabang Cirebon sangat membatasi dalam menerima setoran UKP dari bank-bank di Cirebon. Akibatnya, UKP tertumpuk di bank-bank Cirebon dan nasabah atau relasinya.

**Tabel 4.5.**
**Kas Harian Kantor BI Kas Cabang Cirebon**

| Pecahan | Hok | UKB Beredar (juta rupiah) | Hok | UKB Lusuh (juta rupiah) | Jumlah (juta rupiah) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1000 | 1 | 80 | - | - | 80 |
| 500 | 1 | 40 | - | - | 40 |
| 100 | 3 | 24 | - | - | 24 |
| 50 | 4 | 20 | 1 | 4 | 24 |
| 25 | 4 | 12 | 2 | 2 | 14 |
| 10 | 5 | 5 | 5 | 4,5 | 9,5 |
| 5 | 4 | 2 | 5 | 2,5 | 4,5 |
| 2,50 | 2 | 0,5 | 1 | 0,2 | 0,7 |
| 1 | 1 | 0,1 | 1 | 0,1 | 0,2 |
| Jumlah | 25 | 183,6 | 15 | 13,3 | 196,9 |

Sumber: "Laporan Pemimpin Tjabang Tjirebon" (t.t.: 6).

49 "Laporan Pemimpin Tjabang Tjirebon" (t.t.: 6).

Pekerjaan penting BI Kas Cabang Cirebon adalah penarikan UKB yang 31 Januari 1961 mencapai 122,17 juta rupiah, terdiri dari 34,97 juta rupiah per 3 Januari dan jumlah penerimaan per 4 Januari hingga 31 Januari 1961 mencapai 87,20 juta rupiah. Jumlah 122,17 juta rupiah tersebut terdiri dari:[50]

1. Pecahan Rp100, total 0,40 juta rupiah, dikembalikan ke Kantor Pusat melalui BI Cabang Bandung 0,25 juta rupiah.
2. Pecahan Rp50, total 31,9 juta, dikembalikan ke Kantor Pusat melalui BI Cabang Bandung 12,40 juta rupiah.
3. Pecahan Rp25, total 45,75 juta rupiah, dikembalikan ke Kantor Pusat melalui BI Cabang Bandung 19,62 juta rupiah.
4. Pecahan Rp10, total 36,16 juta rupiah, dikembalikan ke Kantor Pusat melalui BI Cabang Bandung 13,55 juta rupiah.
5. Pecahan Rp5, total 8,47 juta, dikembalikan ke Kantor Pusat melalui BI Cabang Bandung 4,69 juta rupiah.

Jumlah total UKB yang dikembalikan ke Kantor Pusat melalui BI Cabang Bandung mencapai 50,51 juta rupiah. Sekitar dua pekan (17-31 Januari 1961), di Kantor BI Kas Cabang Cirebon terdapat 109 kantong pos berisi uang senilai 37.416.000 rupiah; 46 buah kantong dengan jumlah total 19.481.950 juta rupiah telah selesai dihitung. Dengan demikian, jumlah UKB Emisi 1952 yang diterima oleh BI Kas Cabang Cirebon (3-31 Januari 1961) seluruhnya mencapai 141 juta rupiah atau rata-rata 5 juta rupiah per hari. Kinerja tersebut menunjukkan kerja keras segenap karyawan BI yang melakukan lembur hingga pukul 22.00.[51]

Peran penting Kantor BI Kas Cabang Cirebon adalah pengawasan dan kerja sama dengan bank-bank lain di Cirebon. Beberapa bank di Cirebon antara lain Bank Negara Indonesia, Bank Koperasi Tani dan Nelayan (BKTN), Bank Dagang Negara (BDN), BKTN Urusan Exim, dan PT Bank Nusantara. Seluruh bank tersebut berstatus kantor cabang yang memiliki kantor pusat di Jakarta dan empat di antaranya merupakan anggota kantor kliring (*clearing*) setempat. Disebutkan, nasabah BKTN

50 "Laporan Pemimpin Tjabang Tjirebon" (t.t.: 6).

51 "Laporan Pemimpin Tjabang Tjirebon" (t.t.: 7–8).

Urusan Exim sering terkendala saat akan masuk atau keluar pelabuhan, dan harus melalui pemeriksaan keamanan jika akan melakukan transaksi di bank. Hal itu mengakibatkan BKTN Urusan Exim agak lambat berkembang dibandingkan dengan bank lain. Akan halnya BDN— hasil nasionalisasi dari Escomptobank—mengalami kemajuan pesat di Cirebon karena disambut antusias masyarakat luas, meski bank itu bersifat khusus bagi pedagang (*kruideniersbankala*) seperti terdapat di Negeri Belanda.

Dengan kemajuan yang dicapai, bank-bank negara dapat menampung *commercial-exchange business* Cabang BI Cirebon. Dari 20 relasi kredit sebelum akhir Juni 1960 milik BI Kas Cabang Cirebon, empat relasi dapat ditampung oleh BDN dan 5 relasi dapat ditampung oleh BNI. Sementara untuk urusan wesel cabang Cirebon pada 1960 hanya membuka 14 L/C impor, di antaranya 10 L/C dilayani oleh PT Escomptobank. Dengan pelepasan *commercial exchange busines* ini, BI Kas Cabang Cirebon justru merugi 1.162.036,92 rupiah per 31 Januari 1961. Kantor BI Kas Cabang Cirebon juga menyelenggarakan pembiayaan bank atas realisasi impor barang dari jatah perusahaan industri swasta dengan kredit bank maksimal 6 juta rupiah. Pelayanan tersebut juga dilakukan oleh BDN dengan angka kredit maksimal 5,5 juta rupiah. Sebagai bank termaju di Cirebon, BDN (pada 1960) memberikan pagu kredit terhadap beberapa perusahaan, seperti pabrik sandal dan barang-barang karet sebesar 3 juta rupiah; usaha pertenunan 2 juta rupiah; pabrik besi 1 juta rupiah; dan 2 juta rupiah untuk pabrik lampu.

Seluruh bank di Cirebon tersebut diawasi oleh Kantor BI Kas Cabang Cirebon terutama dalam pengiriman laporan cabang ke bank pusat mereka masing-masing. Pengawasan perlu dilakukan karena pada umumnya bank di Cirebon berkantor pusat di Jakarta; tidak satu pun yang memiliki kantor pusat di Cirebon. Pada 1960, Kantor Perwakilan Bank Surakarta di Cirebon ditutup, meskipun masih melayani pemberian garansi kepada bea cukai yaitu cukai tembakau. Hal tersebut dikarenakan—Kantor Perwakilan Bank Surakarta tidak memiliki kantor pusat di Cirebon—yang menyebabkan tidak adanya pengawasan yang ketat atas laporan-laporan likwiditat dan triwulan. [52]

52 "Laporan Pemimpin Tjabang Tjirebon" (t.t.: 11–2).

Beberapa masalah penting yang terjadi pada 1961 adalah perkembangan industri yang terkait dengan tekstil yang disalurkan oleh PT Negara sebesar 10,9 juta yard. Dalam pendistribusiannya, PT Negara sudah memiliki aturan sendiri dari pusat, tetapi diubah oleh peraturan lokal di Cirebon. Hal itu menjadikan industri berbahan tekstil di Cirebon agak tersendat. Komoditas ekspor tertinggi di Cirebon adalah bungkil kopra yang pada 1949 berjumlah 10.191 ton dan meningkat menjadi 24.800 pada 1960.[53] Meski demikian, kegiatan ekspor bungkil kopra sering terhambat oleh ketidakteraturan kapal yang berlabuh di Pelabuhan Cirebon. Bungkil kopra Cirebon sangat diminati di Jerman Barat sebagai *vervoer* dan harus menjalani transit terlebih dulu di Singapura, padahal seharusnya dapat langsung meneruskan perjalanan tanpa transit. Akibatnya, terjadi *chek-price* dan ketika dikirim ke Eropa telah dikenai tarif baru Singapura. Sebagai gambaran, harga di pelabuhan untuk ekspor bungkil kopra dengan bobot 10.191.200 kilogram adalah 11.766.092,80 rupiah pada 1959, kemudian meningkat pada 1960 menjadi 24.800.000 kilogram dengan harga 53.329.542,14 rupiah.[54]

Panen padi tertinggi di Cirebon pada 1959 mencapai 656.000 ton, dan terendah adalah 1.000 ton; sedangkan pada tahun berikutnya (1960) panen tertinggi 684.000 ton, dan terendah 6.000 ton. Sementara itu, produksi gula mencapai 755.191 kuintal (pada 1959); kemudian 737.030 kuintal untuk lahan seluas 8.169 hektar (1961), dan 857.460 kuintal dengan lahan seluas 7.882 hektar. Pada 1961, wilayah Cirebon diterjang banjir akibat hujan deras dua hari berurut-turut (15-16 Januari 1961) yang menghanyutkan 15.000 hektar tanaman padi dan 2.000 hektar persemaian padi serta 11.000 hektar pekarangan di wilayah Indramayu. Sementara itu, di daerah kota 850 hektar lahan padi, 149 hektar persemaian, dan 7 hektar lahan palawija terendam air. Kerugian

53 Dalam peraturan pusat disebutkan bahwa PT Negara menyalurkan 10 persen untuk koperasi, 20 persen untuk toko-toko nasional, 10 persen untuk SPNI, 5 persen untuk veteran, 20 persen untuk langganan PT Negara dan 35 persen untuk grosir nasional lain. Namun, di Cirebon peraturan tersebut diubah menjadi 85 persen untuk Gredenit (Gabungan Distributor Indonesia Tjirebon) dan 15 persen untuk perusahaan industri bahan baku tekstil. Ekspor kacang tanah putih menurun, hanya 1.905 ton pada 1960; dan kacang tanah kulit malah kosong. Komoditas ekspor dengan jumlah terendah adalah minyak *keceng* yang hanya mencapai 260 ton ("Laporan Pemimpin Tjabang Tjirebon," t.t.: 12–3).

54 "Laporan Pemimpin Tjabang Tjirebon" (t.t.: 3).

akibat banjir diperkirakan mencapai 29 juta rupiah.[55] Permasalahan tersebut sangat berpengaruh pada kinerja BI Kas Cabang Cirebon yang menurun dalam penerimaan penyetoran hasil perdagangan pertanian dan perkebunan di kawasan Cirebon.[56]

Berbagai fakta di atas menunjukkan bahwa BI Kas Cabang Cirebon telah melakukan aktivitas perbankan sesuai posisinya sebagai bank sirkulasi yang dekat dengan bank-bank di wilayah Cirebon. Dari beberapa sumber disebutkan bahwa BI Kas Cabang Cirebon melayani jasa pelayanan bagi nasabah di wilayah eks Keresidenan Cirebon (inkaso) seperti penagihan antarbank/antarcabang BI sendiri yang berada di luar wilayah kliring atau kota yang berbeda, jasa pengiriman uang melalui bank, cek, bilyet giro, kuitansi, surat promes/askep dan pengadaan hadiah undian. Hal itu dapat dilihat pada warkat yang tercetak pada BI Kas Cabang Cirebon sejak 2 Januari 1962 hingga 31 Maret 1963 dan sejumlah rekening koran yang tercetak sepanjang tahun 1963.[57]

Peran Kantor BI Kas Cabang Cirebon terbukti dapat bertahan pada masa-masa sulit (1955-60) karena masih berkembang wirausaha yang permodalannya tergantung pada bank-bank di Cirebon. Secara tidak langsung, BI Kas Cabang Cirebon juga mengalami masalah rumit pengelolaan keuangan daerah yang sebenarnya telah menjadi hak Pemerintah Daerah Cirebon, tetapi secara organisatoris, administratif, dan politik personalia masih menjadi wewenang Pusat yang sangat sentralistik. Sistem tersebut menimbulkan kesulitan Pemerintah Daerah Cirebon untuk mengatur sendiri keuangannya, memberikan bantuan modal, dan mengambil kebijakan kerja sama dengan bank-bank di Cirebon. Sistem sentralistik tersebut juga masih terbawa dalam karakter pegawai pusat di berbagai instansi yang ditempatkan di cabang Cirebon. Mereka pada umumnya belum memahami secara utuh dan sungguh-sungguh dalam melayani masyarakat karena merasa sebagai pegawai pusat yang ditempatkan di cabang. Kegiatan wirausaha yang berkembang dengan sokongan perbankan pada pertengahan dasawarsa 1950/60 sangat

55 "Laporan Pemimpin Tjabang Tjirebon" (t.t.: 14).

56 "Laporan Pemimpin Tjabang Bandung" (1963:11).

57 ANRI (2006: 2, 10).

berpengaruh dalam pengahasilan pajak dan pendapatan kas Pemerintah Daerah Cirebon.[58]

Selain itu, fungsi Kantor BI Kas Cabang Cirebon pada 1960 dan sesudahnya tidak lagi menjadi bank tumpuan pembangunan di Cirebon seperti yang terjadi pada kurun waktu sebelumnya. Peran BI Kas Cabang Cirebon digantikan oleh Bank Pembangunan Indonesia (Bapindo) yang menjadi penyedia dana pembangunan daerah. Berkurangnya peran Kantor BI Kas Cabang Cirebon terlihat dalam pembiayaan beberapa proyek pembangunan di Kota Cirebon pada masa pemerintahan R. S. A. Prabowo, seperti pembangunan menara air Gunungsari, persiapan pembangunan Pasar Pagi, dan taman lalu lintas, yang tidak lagi disediakan oleh BI Cirebon, melainkan ditalangi Bapindo.[59]

## KRISIS POLITIK DAN EKONOMI

Pada dasawarsa 1960-an, Indonesia mengalami krisis politik luar negeri akibat kebijakan konfrontatif 'Ganyang Malaysia' yang bersemangat menentang imperialisme. Krisis politik dengan Malaysia tersebut juga didasari beberapa faktor seperti situasi politik dalam negeri yang ditandai dengan penguasaan parlemen oleh partai-partai politik yang defensif setelah Pemiihan Umum 1955, upaya mendapatkan akses modal asing sesuai basis ideologis kelompok dan membina hubungan dekat dengan presiden.[60] Dengan dukungan militer dan Partai Komunis Indonesia, pemerintahan Sukarno melancarkan konfrontasi terhadap Malaysia pada 1963. Negeri jiran itu dipandang sebagai "antek" imperialisme/

58 Poesponegoro (t.t.: 57).

59 Pembangunan menara air memperoleh dana pinjaman dari Bapindo sebesar 44.663.000 rupiah dengan angsuran 1.000.000 rupiah per bulan, merupakan usaha pengembangan penyediaan air minum di Kotapraja Cirebon dengan kapasitas 130 liter per detik dari Cipaniis; begitu pula pembangunan Pasar Pagi dan Taman Lalu Lintas didanai dari pinjaman bank yang sama (*Sekilas Sejarah Pemerintahan Kota Cirebon*, t.t.: 33–4; Pimpinan Tjabang Bank Indonesia 1964; 69).

60 Peta kekuatan politik di Indonesia kala itu terlihat dalam pemerintahan Kabinet Karya Djuanda Kartawidjaja (1957) yang dipenuhi dukungan politisi, seperti Hardi (PNI), K. H. Idham Chalid (NU) dan J. Leimena (Partai Kristen). Terjadi koalisi politik dalam pemerintahan, baik PNI dengan NU maupun PKI untuk menyusun langkah tandingan terhadap Dewan Nasional yang dipimpin oleh Roeslan Abdulgani, arsitek sistem Demokrasi Terpimpin (Ricklefs 2001: 314, 323).

kapitalisme yang disponsori Inggris dan Amerika Serikat; kemerdekaan Malaysia (1957) bukan dari hasil revolusi. Hal lain, ekonomi Malaysia diakui lebih unggul dibandingkan dengan Indonesia; dan Malaysia dianggap membantu gerakan Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia yang memberontak kepada Pemerintah Indonesia yang sah.[61]

Efek konfrontasi Indonesia versus Malaysia terasakan dalam kinerja BI Kas Cabang Cirebon. Secara makro, sejak pemberlakuan Deklarasi Ekonomi (Dekon)[62] pada 28 Maret 1963, perekonomian Cirebon makin memburuk karena banyak koperasi di berbagai tingkatan tidak menjual barangnya ke Malaysia dan Singapura. Pemutusan hubungan diplomatik Indonesia dari Malaysia dan Singapura pada 21 September 1963 membuat kegiatan ekspor dari Cirebon ke kedua negara itu terhenti. Padahal, 95 persen eksportir di wilayah Cirebon berlangganan dengan Malaysia dan Singapura sehingga mereka kesulitan mencari pasaran baru. Pada September 1963, juga terjadi pembatalan kontrak-kontrak valuta ekspor untuk Singapura dan mereka berusaha mengalihkan arah ekspor dari Cirebon ke Hongkong. Meski demikian, beberapa kegiatan ekspor seperti tepung tapioka dan minyak *keceng* tidak terlalu terpengaruh, hanya agak tersendat dalam pengangkutan kapal. Pengaruh konfrontasi terhadap kegiatan impor terasakan pada terhentinya mobil mewah masuk ke Cirebon.[63]

Produksi rokok PT BAT Cirebon juga menurun pada masa konfrontasi; dari 365 juta batang dengan nilai 696 juta rupiah (Agustus 1963) menjadi 314 juta batang dengan nilai 571 juta rupiah (September 1963), karena terkendala oleh sulitnya pengangkutan bahan baku tembakau dari daerah lain. Pabrik gula sebagai industri perkebunan terbesar di Cirebon tampaknya tidak terlalu terpengaruh oleh konfrontasi karena penjualan gula hanya untuk memenuhi pasar dalam negeri, seperti ke Palembang, Jakarta, dan Medan. Kerepotannya ialah suku cadang mesin pabrik

61 Ricklefs (2001: 328–30).

62 Deklarasi Ekonomi ditetapkan oleh Presiden Sukarno sebagai strategi dasar ekonomi nasional Indonesia, demokratis (bebas imperialisme dan feodalisme) dan mencapai tahap-tahap ekonomi sosialis tanpa pengisapan manusia oleh manusia, meskipun akhirnya justru membuat stagnasi ekonomi Indonesia karena dijalankan oleh segelintir orang dekat istana dan senjang dengan kepentingan rakyat banyak (Kartodirdjo, dkk. 1976: 110, 215; Lubis 2008: 15).

63 Ricklefs (2001: 326–7, 331); "Laporan Pemimpin Tjabang Bandung" (1963: 2, 5, 8, 13).

terhambat masuk Cirebon. Permasalahan ekonomi di Cirebon makin rumit ketika terjadi musim kemarau panjang dan serangan hama tikus yang merusak pertanian sehingga harga bahan pokok seperti beras, jagung dan gaplek meningkat pada Oktober 1963. Gagal panen padi terjadi hingga 1964 diikuti peningkatan inflasi tinggi mencapai 134 persen. Situasi itu memengaruhi penyetoran hasil perdagangan ke kas BI Cirebon.[64]

Konfrontasi telah menghambat teknis pekerjaan BI Kas Cabang Cirebon dan bank-bank yang lain karena tindak lanjut dari peraturan mengenai barang-barang yang telah dikirimkan ke Malaysia dan Singapura menjadi terlambat. Aktivitas perkreditan bank-bank di Cirebon, seperti BNI, BKTN, BDN dan Bank Siliwangi pun terdampak. Hanya BNI Kas Cabang Cirebon yang boleh dikata tidak terlalu terpengaruh konfrontasi karena tidak melayani kredit pada sektor produksi dan impor, meskipun mengalami penurunan debitur pada Oktober. Penurunan tersebut terjadi karena pembatalan kontrak valuta ekspor di Singapura sebesar 1,2 juta rupiah dan pencabutan kembali kredit yang pernah diberikan pada sektor perdagangan dalam negeri karena pedagang antarpulau tidak dapat mengirimkan barang-barangnya karena kesulitan angkutan kapal. Sementara BKTN— yang biasa memberikan kredit pada produksi gula, kacang kedelai, kacang hijau—dan BDN dapat dikatakan tidak terpengaruh sama sekali. Pada masa konfrontasi, terutama tahun 1963, Kantor BI Kas Cabang Cirebon masih bertahan sebagai bank *cash supply* baik yang menerima maupun mengembalikan UKB, dan justru dapat memberikan *cash supply* kepada BI Cabang Bandung.[65]

Selain soal konfrontasi, Cirebon menghadapi masalah tekanan demografis. Jumlah penduduk di daerah itu telah mencapai 3.096.959 jiwa pada 1961 dengan kepadatan rata-rata 587 jiwa per kilommeter persegi. Populasi tersebut tentu menimbulkan masalah sosial tersendiri ketika terjadi inflasi tinggi (1962-65) dan timbul disintegrasi sosial-ekonomi (1964-66). Kenaikan harga dan kelangkaan sediaan barang pokok kebutuhan sehari-hari bagi kota dengan jumlah populasi yang padat diwarnai antrean panjang pembeli di perkotaan dan perdesaan.

64 Ricklefs (2001: 332); "Laporan Pemimpin Tjabang Bandung" (1963: 1–2, 11, 13).

65 Farihah (1999: 67); "Laporan Pemimpin Tjabang Bandung" (1963: 9–10, 13).

Belum lagi penunjang sarana kehidupan vital yang lain, seperti pasokan air bersih yang tersendat dan aliran listrik yang sering padam.[66] Pada akhirnya, semua masalah tersebut berdampak pada volume peredaran uang di Kantor BI Kas Cabang Cirebon yang makin meningkat setiap tahun (Tabel 4.6).

**Tabel 4.6.**
**Peningkatan Volume Peredaran Uang di Kantor BI Kas Cabang Cirebon (1960-63)**

| Tahun | Penyetoran (rupiah) | Pengeluaran (rupiah) |
|---|---|---|
| 1960 | 1.346.253.000 | 929.301.000 |
| 1963 (November) | 6.085.312.000 | 4.079.579.000 |

Sumber: "Laporan Pemimpin Tjabang Bandung" (1963: 11).

Masih berkaitan dengan politik konfrontasi, pada 1964 pemerintah memberlakukan program pelatihan dasar militer bagi elemen masyarakat untuk menggalang kesiagaan menghadapi musuh. Artinya, program tersebut juga mencakup kalangan perbankan dan institusi pemerintahan dan swasta lain sebagai elemen masyarakat. Dalam hal ini, pelatihan dasar militer tersebut diikuti oleh pemimpin BI Kas Cabang Cirebon, bersama para pemimpin cabang bank-bank negara atau swasta lain, kepala jawatan, dan kepala PDN. Pelatihan berlangsung 2,5 bulan oleh pelatih dari Mator Pertahanan Sipil VIII/20 Kotapraja Cirebon.

Sejalan dengan semangat Demokrasi Terpimpin, BI yang berfungsi sebagai bank sentral dan sirkulasi diubah menjadi 'Bank Tunggal'. Perubahan tersebut diputuskan oleh Presiden Sukarno melalui Sidang Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara pada 11 April 1965. Sesuai dengan Penetapan Presiden Nomor 8 Tahun 1965 tanggal 4 Juni 1965 beberapa bank seperti BKTN, Bank Umum Negara, BTN dan BNI dilebur ke dalam Bank Indonesia. Dalam perubahan itu, Bank Tunggal adalah bank sirkulasi, sedangkan Bank Sentral adalah bank umum sebagai "alat revolusi" sesuai dengan Penetapan Presiden Nomor 17 Tahun 1965

66 Ekadjati (1985: 36–7); Lubis (2008:161, 236).

**Gambar 4.6.** Presiden Soekarno sedang berpidato dalam rapat raksasa mengganyang Malaysia di Gelora Bung Karno tanggal 28 Juli 1963.
Sumber: IPPHOS

**Gambar 4.7.** Bank Berdjoang sebagai manifestasi Ekonomi Terpimpin dalam dunia perbankan di mana seluruh bank-bank milik negara harus menjadi alat revolusi.
Sumber: Koleksi Arsip Bank Indonesia

tanggal 27 Juli 1965. Fungsi BI sebagai bank sentral digantikan oleh Bank Tunggal dan berubah nama menjadi Bank Negara Indonesia Unit I. [67]

Kebijakan tentang Bank Tunggal tidak dapat dilaksanakan langsung oleh BI Kas Cabang Cirebon karena situasi politik dan kondisi perekonomian di Cirebon mulai menghangat. Situasi dan kondisi itu terjadi karena meningkatnya indeks biaya hidup yang mencapai 50 persen (Desember 1965 hingga Januari 1966); memburuknya situasi politik dan perekonomian nasional; merosotnya produksi akibat menurunnya daya beli masyarakat; bangkrutnya beberapa koperasi karena dituduh sebagai wadah kapitalis kontra-revolusioner dan aksi sepihak massa dan elite Partai Komunis Indonesia (PKI).[68] Setelah peristiwa Gerakan 30 September berlalu, situasi politik dan ekonomi di Cirebon tidak langsung kondusif karena penumpasan terhadap anggota dan simpatisan PKI—yang ditengarai sebagai dalang tragedi peristiwa tersebut—terus digencarkan aparat militer Orde Baru yang menggantikan pemerintahan Sukarno.[69] Situasi panas tersebut berdampak membatasi kegiatan wirausaha

67 Terdapat beberapa bank yang tidak bersedia dilebur ke dalam Bank Indonesia sebagai bank tunggal yaitu BDN dan Bapindo karena dapat membingungkan koresponden dari luar negeri. Bapindo beralasan bukan termasuk Bank Umum tetapi 'bank pembangunan' yang berada di bawah wewenang Kompartemen Pembangunan, bukan Kompartemen Keuangan (Kusuma 2014: 139, 141, 143).

68 Ricklefs (2001:349); Kasenda (2015:145); Fariha (1999:49). Krisis politik lokal di Cirebon menjelang peristiwa Gerakan 30 September 1965 berupa aksi sabotase sinyal kereta api oleh organ dan simpatisan PKI, yaitu Serikat Buruh Kereta Api (14 Maret 1964) serta perampasan hutan milik negara di Karticala dan Tugu oleh 2.000 anggota Barisan Tani Indonesia dan Pemuda Rakyat. Mereka juga mengeroyok 7 anggota polisi hutan Telagadua dan Pajengkolan serta 3 penjaga tanaman perkebunan negara. Pertentangan politik di kalangan elite juga terjadi antara Wali Kota Cirebon R. S. A. Prabowo (menjabat 1960–65, sebagai kader Partai Komunis Indonesia) versus Keraton Kasepuhan Cirebon karena penyerobatan tanah milik keraton oleh PKI (Hadi 2017: 72, 103). Lihat juga Nurdin M Noor "Raden Slamet Ahmad Prabowo Kader PKI, Menaranya Sambut Kota Cirebon," dalam https://www.radarcirebon.com/2019/02/11/raden-slamet-ahmad-prabowo-kader-pki-menaranya-sambut-kota-cirebon/, diunduh 17 Juni 2020; "Kader PKI pernah Jadi Walikota," https://www.rakyatcirebon.id/kader-pki-pernah-jadi-walikota-20151001.html, diunduh 18 Juni 2020.

69 Operasi penumpasan terhadap PKI di wilayah Cirebon diarahkan kepada pengurus dan organisasi bawahan (*onderbouw*) PKI, yaitu Comitee Sentral PKI, Pemuda Rakyat, Gerwani, SOBSI dan BTI di beberapa lokasi seperti alun-alun Majalengka (14 Oktober 1965), Jatiwangi, Karangtinggi (Kecamatan Kapetakan), Cikecuk (Kecamatan Plumbon), dan Indramayu (16 November 1965). Operasi juga menyasar para anggota dan simpatisan PKI oleh militer serta mengamankan para pejabat pemerintah yang diduga terlibat PKI (Hadi 2017: 515, 874; Herlina 2012: 69–70). Lihat juga Irvan Sjafari, "Bandung 1965, Runtuhnya PKI Jabar," dalam https://www.kompasiana.com/jurnalgemini/5e5bb682d541df6da514b532/ bandung-1965-keruntuhan-pki-jabar?page=all, diunduh 17 Juni 2020.

dan profesi serta merusak kepercayaan antarpersonal dalam kegiatan perekonomian.

Setelah situasi sosial di Cirebon berangsur pulih, pada 6 April 1967 BI Kas Cabang Cirebon—yang telah berganti nama menjadi BNI Unit I Cirebon—diperintahkan oleh BNI Unit I Pusat melakukan berbagai perubahan, seperti pembuatan papan nama baru dengan dasar warna putih dan huruf hitam yang dipasang tanpa upacara; perubahan formulir dan stempel; penomoran surat dan kawat dengan Tahun Buku I (buku baru); perjanjian kliring terkait pergantian nama BI menjadi BNI Unit I dilengkapi dengan akta tambahan serta pembukuan. Semuanya harus berubah untuk menunjang kerja BNI Unit I sebagai "alat juang." Beberapa hal yang tetap bertahan adalah kedudukan pegawai (pangkat, wewenang dan kewajiban), akta-akta transaksi lama, penomoran surat dan kawat untuk koresponden di luar negeri. BNI Unit I Cirebon juga diperintahkan melakukan sosialisasi dan publikasi tentang perubahan tersebut kepada khalayak ramai, instansi pemerintahan seperti Kantor Pos, bank, dan nasabah di Cirebon. Juga dilakukan penutupan kantor untuk pelayanan umum yang disarankan diumumkan melalui surat kabar dan memberi waktu karyawan tetap masuk bekerja untuk mempersiapkan neraca sisa dan menutup buku. Tentang pemberitahuan perubahan BI menjadi BNI Unit I juga dilakukan oleh Direksi BNI Unit I pusat kepada pimpinan cabang BNI Unit I Cirebon pada 4 Agustus 1967.[70]

Atas instruksi BNI Unit I Pusat tersebut, maka BNI Unit I Cirebon pada 22 Mei 1967 menyusun skema keorganisasian[71] sebagai berikut.

1. Seksi kas yang terdiri dari seksi kasir, seksi loket kas dan seksi anggaran.
2. Seksi pengawasan bank-bank/ekspor/kehansipan, terdiri dari subseksi pengawasan bank-bank, subseksi ekspor dan subseksi kehansipan.
3. Seksi pembukuan meliputi subseksi jurnal, subseksi kliring, subseksi loket pemindahbukuan (kliring) dan subseksi kontrole (pengawas).

70 Arsip Bank Indonesia, Surat Direksi BNI Unit I kepada Pemimpin Tjabang BNI Unit I Tjirebon No. 3/5/UOP/OT, Djakarta, 6 April 1967: 1–4; Surat Direksi BNI Unit I kepada Pemimpin Tjabang Bank Negara Indonesia Unit I Tjirebon No. 3/10/UOP/OT, Djakarta 4 Agustus 1967.

71 Arsip Bank Indonesia No.3/…/UOP/OT, Tjirebon 22 Mei 1967.

4. Seksi umum yang terdiri dari subseksi rumah tangga (bagian keamanan, bagian kendaraan dan bagian arsip/ekspedisi), subseksi pegawai dan subseksi 'djurutik' [juru ketik].
5. Seksi BLLD (Biro Lalu Lintas Devisa).

Belum sempat bekerja maksimal, BNI Unit I Cirebon dipersiapkan untuk kembali berubah menjadi Bank Indonesia Cabang Cirebon. Langkah tersebut dilakukan berdasar Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1967 tentang pokok-pokok perbankan dan Surat Keputusan Menteri Keuangan Nomor Kep. 01/MK/IV/I/1968 tanggal 10 Januari 1968 yang dimulai diberlakukan sejak1 Januari 1968. Dalam perintah selanjutnya, BNI Unit I Cirebon untuk sementara diminta tetap menjalankan tugasnya seperti biasa sambil menunggu penyelesaian rencana undang-undang yang dibahas di Dewan Perwakilan Rakyat. BNI unit I Cirebon dan bank-bank swasta serta bank pembangunan daerah juga diminta bersiap-siap jika perubahan bank terjadi. Tugas penting yang diberikan oleh BNI Unit I Cirebon dari Pusat adalah menyampaikan salinan undang-undang tentang pokok-pokok perbankan kepada bank-bank di Cirebon, seperti kantor-kantor cabang bank pemerintah, kantor-kantor pusat bank swasta, dan bank pembangunan daerah. Disebutkan pula bahwa pimpinan pusat bank-bank cabang di Cirebon juga telah diberi tembusan surat oleh BNI Unit I Pusat yang diteruskan melalui BNI Unit I Cirebon.[72]

Selama masa persiapan perubahan, BNI Unit I Cirebon sempat menjual kekayaan berupa perak berkadar 999 sebanyak 100 kilogram dengan harga jual 6.000 rupiah per kilogram. Perak tersebut dijual kepada PT Karya Bhakti, dipimpin oleh direkturnya bernama Noerdin, yang dikuasakan pada 28 Januari 1968. Dari hasil penjualan perak seluruhnya yang mencapai 600.000 rupiah, 2 persen dimasukkan ke rekening provinsi. Penjualan tersebut berdasarkan izin dari Departemen Keuangan yang terbit pada 20 Desember 1967.[73]

72 Arsip Bank Indonesia, Surat Pejabat Unit I Kepada Pemimpin Tjabang Bank Negara Indonesia Unit I Tjirebon, 22 Januari 1968.

73 Arsip Bank Indonesia, Surat Pejabat Bank Negara Unit I kepada Pemimpin Tjabang Bank Negara Indonesia Unit I Tjirebon, 25 Djanuari 1968; juga dapat dilihat dalam Arsip Bank Indonesia, Surat Kuasa Noerdin kepada H. A. M. Widjajakusumah, Tjirebon, 28 Djanuari 1968.

Agenda penting kerja BNI Unit I Cirebon pada akhir 1968 adalah melakukan perubahan status, yang berakhir pada 30 Desember 1968, menjadi BI Cabang Cirebon. Persiapan dan langkah tersebut mulai terlihat ketika BNI Unit I Pusat menginstruksikan perubahan kembali BI sebagai bank sentral sesuai keputusan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1968 yang berlaku sejak 31 Desember 1968.[74] Sosialisasi kembali dilakukan oleh BNI Unit I Cirebon dalam bentuk pengumuman bersama seluruh bank pemerintahan pada 24 Desember 1968 melalui berbagai cara, seperti berita pengumuman daerah yang disiarkan Radio Republik Indonesia, pendistribusian pengumuman kepada seluruh pejabat pemerintah atau instansi setempat, dan pemberitahuan langsung kepada relasi atau nasabah masing-masing bank. Sosialisasi tidak dapat dilakukan melalui surat kabar karena tidak tersedia media cetak di Cirebon pada waktu itu; tetapi ditempelkan lembar pengumuman di ruang tunggu umum di kantor BI dan bank-bank di Cirebon.[75]

Sosialisasi kepada masyarakat Cirebon tersebut juga menandakan bahwa sistem politik dan ekonomi "gaya" Demokrasi Terpimpin sudah berakhir. Beberapa perubahan yang terjadi pada bank-bank pemerintah di Cirebon sejak 31 Desember 1968[76] adalah sebagai berikut.

1. BNI Unit I berubah menjadi BI Cabang Cirebon, beralamat di Jalan Yos Sudarso 5, Cirebon, berdasar Undang-Undang tentang Bank Sentral Nomor 13 Tahun 1968 jo. Surat Keputusan Menteri Keuangan Nomor Kep. 600/M/IV/12/1968 tanggal 18 Desember 1968.
2. BNI Unit II Rural berubah menjadi Bank Rakyat Indonesia, beralamat di Jalan R. A. Kartini 85, Cirebon, berdasar Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1968.
3. BNI Unit II Exim berubah menjadi Bank Ekspor Impor Indonesia, beralamat di Jalan Yos Sudarso 9, berdasar Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1968.

74 Museum Bank Indonesia (1991: 13).

75 Surat Pimpinan Tjabang Bank Negara Indonesia Unit I Tjirebon kepada BNI Kantor Pusat Unit Djakarta, 27 Desember 1968.

76 Arsip Bank Indonesia, Pengumuman Bersama BNI Unit I s/d IV dan Bank Dagang Negara, Tjirebon 24 Desember 1968.

4. BNI Unit III berubah menjadi BNI 1946, beralamat di Jalan Singaraja, Cirebon, berdasar Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1968.
5. BNI Unit IV berubah menjadi Bank Bumi Daya, beralamat di Jalan Siliwangi 131, berdasar Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1968.
6. Bank Dagang Negara tetap bernama Bank Dagang Negara, beralamt di jalan Kantor 4, Cirebon, berdasar Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1968.

Setelah pengumuman 24 Desember 1968 itu, kantor-kantor bank di Cirebon yang telah disebutkan masih dibuka untuk pelayanan umum hingga 29 Desember 1968, kemudian ditutup pada 30 dan 31 Desember. Dalam jeda dua hari tersebut, semua kas dan kliring ditutup. Bank-bank tersebut baru dibuka untuk pelayanan seperti biasa pada 2 Januari 1969. Pemimpin BI Cabang Cirebon pada masa peralihan tersebut adalah Sumarto kemudian digantikan oleh N. Hartono Hardjopranoto.[77]

Perubahan penting dalam perbankan—yang sebenarnya telah dimulai ketika Radius Prawiro diangkat sebagai Gubernur Bank Indonesia pada 15 Agustus 1966 disusul dengan pengembalian fungsi BI sebagai bank sentral dan penghapusn sistem bank tunggal—berkaitan dengan perbaikan sistem politik dan ekonomi pemerintahan Orde Baru. Kebijakan pemerintah pada waktu itu menitikberatkan pembangunan ekonomi nasional, dan peningkatan taraf pendidikan dan kesejahteraan rakyat. Oleh karena itu, secara umum BI bertanggung jawab pada perbaikan sistem moneter, perbankan, lalu lintas pembayaran, menjaga stabilitas nilai rupiah, mendorong kelancaran produksi, mengawal pembangunan dan memperluas kesempatan kerja.[78] Dari sisi politik internasional, akhir Sistem Demokrasi Terpimpin menjadi pertanda baik pemulihan hubungan diplomasi antara Pemerintah Indonesia dan Malaysia pada 11 Agustus 1967 dan pembekuan hubungan diplomasi dengan Cina pada 31 Oktober 1967, serta penyelenggaraan Pemilihan Umum 1968. Kemudian, sejak 1 April 1969, Indonesia resmi memasuki era pembangunan stabilisasi ekonomi melalui Rencana Pembangunan Lima Tahun I (Repelita I, 1969-74).[79]

77 Arsip Bank Indonesia, Pengumuman Bersama (1968); Arsip Bank Indonesia, *Sekilas Sejarah BI Cirebon* (t.t.: 10).

78 Kusuma (2014: 155, 159, 167).

79 Ricklefs (2001: 357–8); Kasenda (2015: 145).

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa selama periode 1953 hingga 1968, Kantor BI Kas Cabang Cirebon masih merupakan "penerus" DJB Agen Cirebon dalam melayani kebutuhan uang bagi para pengusaha dan industri milik asing seperti The Big Five di Cirebon. Peran BI Cirebon sebagai bank kas pengaliran ke dalam atau bank sirkulasi keuangan tersebut tetap berlanjut walaupun pemerintah secara bertahap mulai melakukan nasionalisasi beberapa perusahaan asing di Cirebon pada 1953. Kantor BI Kas Cabang Cirebon juga mengalami berbagai periode sulit, terutama ketika tingkat ekonomi menurun akibat kebijakan pemerintah yang tidak ramah pada perekonomian nasional, yaitu Program Dekon dan konfrontasi terhadap Malaysia; belum lagi ditambah gejolak politik dalam negeri pada 1965. Meskipun demikian, Kantor BI Kas Cabang Cirebon tetap menjadi bank sirkulasi walau dengan depo penyimpanan uang terbatas bergantung pada Kantor BI di Bandung, terutama ketika melayani musim giling pabrik gula dan kampanye politik. Peran BI Cabang Cirebon tetap berlangsung hingga 1968, walaupun sempat berubah nama menjadi BNI Unit I Cirebon pada 1967.

BAB 5

# Membangun Ekonomi Era Orde Baru 1968-99

Kebijakan dan langkah penting dikembangkan Kantor Perwakilan Bank Indonesia Cirebon selama periode 1968-98. Berbagai program dirancang untuk mendorong perkembangan ekonomi di wilayah kota dan kabupaten di Cirebon serta daerah sekitarnya, terutama yang sebelumnya termasuk eks Keresidenan Cirebon, yaitu Indramayu, Kuningan, dan Majalengka. Secara umum, selama kurun masa itu, Cirebon mengalami perkembangan signifikan di berbagai sektor ekonomi seperti industri manufaktur, perdagangan dan jasa, mulai dari skala kecil hingga skala besar. Sektor industri berskala kecil dan menengah berkembang sebagai ekonomi kerakyatan yang menonjol dan mampu menopang sektor pertanian dan kelautan yang menyumbang terhadap perekonomian lokal. Situasi itu menunjukkan kesinambungan historis yang menarik—bahwa sektor ekonomi luar-tani yang telah berkembang sejak zaman kolonial, terutama pada dekade awal abad ke-20, terus berlanjut hingga kini.

## RESTRUKTURISASI BANK INDONESIA DAN STABILISASI PEREKONOMIAN

Sebagai tindak lanjut Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1967 tentang Pokok-pokok Perbankan dan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1968 tentang Bank Sentral, Pemerintah Pusat melakukan berbagai perubahan

dan penyesuaian di dalam tubuh Bank Indonesia dan bank-bank lain milik pemerintah. Perubahan tersebut terutama berkaitan dengan nama, sekaligus menegaskan "pembagian kerja" bank-bank tersebut. Untuk wilayah Cirebon, perubahan dan penyesuaian tersebut secara resmi diumumkan pada 24 Desember 1968, dalam matriks berikut.[1]

**Tabel 5.1.**
**Daftar Perubahan Nama Bank Indonesia dan Bank-Bank Umum Milik Pemerintah**

| Dasar Hukum | Nama Lama | Nama Baru |
|---|---|---|
| UU Nomor 13 Tahun 1968 | Bank Negara Indonesia Unit I | Bank Indonesia Jalan Yos Sudarso 5 |
| UU Nomor 18 Tahun 1968 | Bank Negara Indonesia Unit III | Bank Negara Indonesia 1946 Jalan Sisingamangaraja |
| UU Nomor 18 Tahun 1968 | Bank Dagang Negara | Bank Dagang Negara Jalan Kantor 4 |
| UU Nomor 19 Tahun 1968 | Bank Negara Indonesia Unit IV | Bank Bumi Daya Jalan Siliwangi 131 |
| UU Nomor 21 Tahun 1968 | Bank Negara Indonesia Unit II Rural | Bank Rakyat Indonesia Jalan R. A. Kartini 85 |
| UU Nomor 22 Tahun 1968 | Bank Negara Indonesia Unit II Exim | Bank Ekspor Impor Indonesia Jalan Yos Sudarso 9 |

Sumber: Arsip Bank Indonesia

Bagi Bank Indonesia, perubahan tersebut tidak hanya mengenai perubahan nama, tetapi diikuti reorganisasi internal untuk mendukung fungsinya sebagai bank sentral. Di tingkat pusat, reorganisasi dilakukan secara menyeluruh pada semua bagian organisasi dan fungsi BI. Dalam organisasi fungsi moneter, empat fungsi dipertahankan, yaitu fungsi riset, perencanaan, pengawasan kredit, dan fungsi hubungan luar negeri, dengan penambahan satu fungsi baru yaitu fungsi terkait bursa dan efek. Dalam organisasi pengedaran uang (sirkulasi), dibentuk bagian penelitian uang palsu, tetapi kemudian dibubarkan dan dialihkan ke fungsi kas yang terdiri dari dua bagian yaitu urusan pengedaran uang dan perencanaan dan administrasi uang.

1 Arsip Bank Indonesia, Koleksi De Javasche Bank (DJB), *Arsip BNI Unit I NO. DJB 1520.*

Organisasi bidang tugas pengawasan perbankan tetap dilakukan oleh urusan pengawasan dan pembinaan bank yang membawahkan lima bagian, tetapi kini pengelompokan tugasnya bergeser dari semula berdasarkan kepemilikan (bank pemerintah dan bank swasta) diubah menjadi berdasarkan sifat usahanya, yaitu bagian pengawasan bank umum bank devisa dan pengawasan bank umum bukan devisa. Selanjutnya, organisasi bidang tugas manajemen internal, yang semula didukung oleh tiga urusan dan satu biro, diperluas menjadi empat urusan dan satu biro ditambah satu administrator keuangan. Pada 1981, dilakukan perubahan kembali menjadi enam urusan dan satu biro. Selain organisasi tersebut, pemerintah membentuk Tim Screening Perbankan sejak 1966 di luar struktur BI, tetapi berada langsung di bawah Gubernur BI, dengan tugas utama untuk membersihkan BI dari unsur-unsur yang dianggap terlibat dalam peristiwa Gerakan 30 September 1965.[2]

Pada tingkat kantor cabang, UU Nomor 13/1968 tersebut juga berimplikasi pada perubahan manajemen dan struktur kerja organisasi Bank Indonesia cabang lokal. Di Kantor BI Cirebon,[3] struktur organisasinya meliputi enam seksi, yaitu (1) Seksi Kas yang terdiri dari subseksi kasir, subseksi loket kas, dan subseksi anggaran; (2) Seksi Pengawasan Bank-bank/Ekspor/Kehansipan terdiri dari subseksi pengawasan bank, subseksi ekspor, dan subseksi kehansipan; (3) Seksi Pembukuan terdiri dari subseksi jurnal, subseksi *clearing,* subseksi loket pemindahbukuan, dan subseksi kontrol; (4) Seksi Umum terdiri dari subseksi rumah tangga, membawahkan bagian keamanan, bagian kendaraan, dan bagian arsip/ekspedisi; subseksi pegawai, dan subseksi juru tik; (5) Seksi Pemberian Kredit/Riset Ekonomi Umum; dan (6) Seksi BLLD.

Perubahan struktur organisasi tersebut tidak mengubah kedudukan dan posisi para pejabat dan pegawai Bank Indonesia. Mereka tetap memiliki kedudukan, pangkat, wewenang dan kewajiban yang sama.[4] Dalam reorganisasi itu, N. Hartono Hardjopranoto diangkat sebagai

2 Termasuk dalam kebijakan ini adalah pembubaran Serikat Sekerja Bank Indonesia, organisasi pekerja di lingkungan Bank Indonesia. Sebagai pengganti, dibentuk Korps Pegawai Republik Indonesia Unit Bank Indonesia pada 1972. Kebijakan skrining terus dilanjutkan hingga akhir 1970-an (Djiwandono [III] 2006: 116–26, 133).

3 Sebutan singkat untuk Kantor Perwakilan Bank Indonesia Cirebon.

4 Arsip Bank Indonesia, Koleksi De Javasche Bank (DJB), Arsip BNI Unit I No. DJB 1520.

pimpinan pertama Kantor Perwakilan Bank Indonesia Cirebon periode bank sentral (1969/70 dan 1970/71). Setelah itu, pimpinan selanjutnya ialah Tom Hartono (1971/72 dan 1974/75), Soetedja Trisnaatmadja (1976/77; 1978/79), Abdullah Ali (1979/80; 1982/83), Abdullah Syukur (1983/84; 1985/86), Muchtar Surindihardjo (1986/87; 1989/90), Soerjanto (1990/91; 1993/94), K. Kuswara (1994/95; 1996/97), Djatiwaluyo (1997/98; 1998/99).[5]

Di tingkat pusat, reorganisasi dilakukan dengan menutup kantor cabang di wilayah Irian Barat (1968), dan membuka sejumlah kantor cabang baru, antara lain di Palu dan Denpasar (1970). BI Pusat juga membuka sejumlah kantor kas di kota selain ibu kota provinsi yang perekonomiannya memerlukan pelayanan bank sentral, termasuk kantor kas di Purwokerto dan Balikpapan (1972), Tegal (1974), Lhokseumawe dan Ternate (1976), Sibolga (1978), dan Tasikmalaya (1979). Secara keseluruhan hingga 1979, BI memiliki 29 kantor cabang dan kantor kas; dan pada 1982/83 seluruh kantor kas diubah statusnya menjadi kantor cabang sehingga total di seluruh Indonesia menjadi 36 kantor cabang. Sementara itu, pada 1966 BI menutup dua kantor perwakilannya di luar negeri, yaitu di Meksiko dan Kairo, Mesir; tetapi membuka dua kantor perwakilan baru di Kuala Lumpur dan Singapura, sehingga total BI memiliki lima kantor perwakilan di luar negeri.[6]

Untuk memperkuat proses restrukturisasi, BI melakukan pembenahan internal terhadap sumber daya manusia. Pada awal menjalankan fungsinya sebagai bank sentral, BI memang masih menghadapi persoalan SDM baik secara kualitatif maupun kuantitatif. Untuk mengatasinya BI menyusun program perencanaan dan pengembangan pegawai, termasuk penyusunan pola kepangkatan baru, skema perbaikan kesejahteraan, peningkatan kedisiplinan, dan pola pengembangan karier. Penambahan pegawai dilakukan melalui program rekrutmen sarjana, rekrutmen tenaga pemeriksa bank, dan rekrutmen tenaga untuk tugas-tugas khusus. Rekrutmen sarjana dilakukan secara terpola mulai 1974 melalui Program Pendidikan Calon Pegawai Muda, dengan merekrut sarjana dari luar dan sebagian dari internal BI, yang dilakukan secara berkesinambungan setiap

5 Museum Bank Indonesia (1991: 10).

6 Djiwandono (III) 2006: 131.

tahun. Selain itu, untuk memenuhi kebutuhan akuntan, BI merekrut sarjana akuntansi; dan mengembangkan program pendidikan jangka panjang bagi pegawai BI untuk memperoleh pendidikan lanjutan di luar negeri. Untuk tenaga pemeriksa bank, sejak 1966 BI merekrut sarjana-sarjana muda yang dipersiapkan menjadi tenaga Pegawai Tata Usaha melalui proses pendidikan selama dua tahun. Skema yang kurang-lebih sama dikembangkan sejak 1982 untuk merekrut tenaga dengan pengetahuan atau keterampilan khusus, antara lain pendidikan calon pemrogram komputer, pendidikan akuntansi, pendidikan statistik, pendidikan *dealer* dan pendidikan satuan pengamanan.[7]

Selain banyak merekrut tenaga baru untuk memenuhi kebutuhan sejumlah tenaga, BI menyelenggarakan berbagai pelatihan dan pendidikan pengembangan kualitas SDM bagi pegawai internalnya. Pendidikan dan pelatihan itu bertujuan meningkatkan keterampilan pegawai BI di kantor-kantor cabang. Kesaksian dua mantan pegawai Kantor BI Cirebon, Sutejo dan Linardi Wongkar, memberikan gambaran tentang program pendidikan dan pelatihan yang diberikan BI untuk meningkatkan keterampilan dan kualitas SDM pegawainya di kantor-kantor cabang. Sutejo menceritakan bahwa ia mengawali kariernya di Kantor BI Cirebon sebagai pesuruh (setingkat golongan D/I) dengan mengandalkan ijazah SMA (Sekolah Menengah Atas), bersama dengan enam rekannya yang seluruhnya "hanya" memiliki ijazah Sekolah Dasar. Selama delapan tahun berkarier di Kantor BI Cirebon, Sutejo mengikuti sejumlah pelatihan, antara lain pembukuan dan akuntansi, dan kariernya pun berkembang dari pesuruh dipromosikan ke Seksi Kredit, kemudian ke Seksi Umum. Cerita kurang-lebih sama disampaikan oleh Linardi Wongkar, yang menghabiskan sepanjang kariernya di Kantor BI Cirebon sejak 1955 hingga 1988. Linardi mengawali pekerjaannya sebagai kasir dan setelah mengikuti berbagai pelatihan ia dipromosikan ke bagian Tata Usaha, bahkan kemudian diangkat sebagai kepala bagian Tata Usaha.[8]

Restrukturisasi dan reorganisasi internal BI seiring dengan upaya membantu pemerintah mengatasi masalah besar nasional yaitu hiperinflasi

7 Djiwandono (III) 2006: 140–1.

8 Wawancara (virtual) simultan dengan Sutejo dan Linardi Wongkar, pensiunan pegawai Bank Indonesia Cabang Cirebon (Cirebon, 23 Juli 2020).

dan kemunduran ekonomi. Pada 1965, kondisi moneter Indonesia sangat mengkhawatirkan karena hiperinflasi telah mencapai 600 persen sedangkan pendapatan per kapita riil mengalami penurunan sebesar 20 persen per tahun. Di wilayah Cirebon, buruknya kondisi perekonomian tergambar dari kenaikan harga-harga kebutuhan pangan pokok, terutama beras, jagung, dan gaplek. Harga beras per 100 kilogram pada Januari 1963 tercatat 6.700 rupiah meningkat tajam menjadi 12.000 rupiah pada Oktober. Demikian pula harga jagung dan gaplek yang meningkat pada saat yang sama dari 3.500 rupiah per 100 kilogram menjadi 6.000 rupiah, dan dari 2.000 per 100 kilogram menjadi 3.000 rupiah. Kenaikan harga tersebut juga terjadi pada 16 macam bahan pokok lain yang tingkat kenaikannya cukup bervariasi.[9] Pada tingkat eceran, harga beras juga terus mengalami kenaikan pesat. Dalam waktu singkat, harga eceran beras per kilogram naik dari 70 rupiah (Agustus 1963) menjadi 130 rupiah pada Oktober tahun yang sama; dan kembali naik menjadi 220 pada Februari 1964. Kondisi itu cukup memberatkan karena pada saat yang sama, kegiatan perdagangan ekspor/impor juga mengalami kelesuan akibat terputusnya jalur transportasi laut dengan Malaysia, ditambah upah minimum buruh di wilayah Cirebon yang tidak mengalami peningkatan berarti, masih berkisar antara 150 rupiah per bulan di sektor perkebunan hingga 496 rupiah per bulan di sektor tembakau (Pabrik BAT), yang secara riil nilai ekonomisnya sangat rendah bahkan untuk memenuhi kebutuhan subsisten.[10]

Untuk mengatasi kondisi tersebut, pemerintah Orde Baru meluncurkan Program Stabilisasi dan Rehabilitasi berjangka pendek. Program terdiri dari pengendalian inflasi, pemulihan produksi, pencukupan kebutuhan sandang dan pangan, rehabilitasi prasarana ekonomi, dan peningkatan ekspor. Berkaitan dengan pengendalian inflasi, pemerintah mengeluarkan kebijakan suku bunga tinggi, sedangkan di bidang keuangan diterbitkan kebijakan APBN berimbang yang ketat untuk menekan ekspansi uang beredar, dan pemberlakuan kebijakan kredit baru dengan suku bunga tinggi. Dalam pelaksanaannya, kebijakan kredit

9 Arsip Bank Indonesia, "Laporan Pemimpin Tjabang Bandung" (1963: 7–8).

10 Arsip Bank Indonesia, "Laporan Sementara Kedua Mengenai Keadaan Ekonomi dari Wilayah Bank Indonesia Tjabang Tjirebon (Tahun Buku Ke-XI) (Oktober 1963 – Maret 1964)," hlm. 17–8.

baru tersebut dialokasikan pada sektor ekonomi tertentu, yaitu 85 persen untuk pembiayaan produksi barang-barang ekspor dan 15 persen untuk pembiayaan perdagangan dalam negeri dan impor. Selain itu, pemerintah menentukan bahwa kredit bank-bank pemerintah itu 60 persen harus dialokasikan untuk membiayai sektor pemerintah dan 40 persen lainnya untuk membiayai sektor swasta.[11]

Dengan kebijakan tersebut, pemerintah berhasil mengendalikan ekspansi peredaran uang dari 763 persen pada 1965 menjadi 59 persen pada 1969 sehingga mendukung penurunan laju inflasi dari 600 persen pada 1965 menjadi 112,2 persen pada 1967, dan terus membaik hingga ke level 8,9 persen (1969). Angka inflasi tersebut masih tergolong tinggi, tetapi sudah cukup untuk mengeluarkan Indonesia dari pusaran hiperinflasi dan kebangkrutan ekonomi. Indikator lain keberhasilan kebijakan pemerintah tersebut ialah harga beras di pasaran makin terkendali sebagai dampak dari kredit langsung yang diterima Badan Urusan Logistik untuk mengimpor beras dan membeli beras dalam negeri. Pada 1971, pemerintah berhasil menekan inflasi hingga ke level 2,5 persen sehingga makin mendorong terciptanya stabilitas moneter yang akan membantu kebijakan pembangunan ekonomi selanjutnya.[12]

## KREDIT MIKRO DAN PEMBANGUNAN EKONOMI KERAKYATAN

Keberhasilan mengendalikan inflasi dan melakukan rehabilitasi ekonomi pada awal pemerintahannya, menjadi momentum bagi Presiden Suharto mengambil langkah strategis selanjutnya untuk mendorong pembangunan ekonomi yang diperkuat oleh stabilitas politik nasional. Langkah strategis pertama yang diambil pemerintahan Orde Baru dalam perbankan ialah melakukan sejumlah kebijakan liberalisasi sektor keuangan nasional. Selain menerbitkan undang-undang tentang perbankan (1967 dan 1968), yang menegaskan kedudukan BI sebagai bank sentral dan menjadi dasar

11 Djiwandono (III), 2006: 152.

12 Djiwandono (III) 2006: 154, 158.

bagi pembentukan tujuh bank milik pemerintah,[13] pemerintahan Suharto menerapkan kebijakan *open door policy* bagi penanaman modal asing dengan bergabung kembali ke dalam IMF (International Monetary Fund), Bank Dunia, menjalin kerja sama multilateral dengan negara-negara donor Barat, yang mengorganisasikan diri dalam IGGI (Inter-Governmental Group on Indonesia),[14] dan mengizinkan kembali bank-bank internasional masuk ke Indonesia.[15] Semua langkah tersebut bertujuan membangun kembali kepercayaan masyarakat Indonesia dan masyarakat internasional terhadap sistem perbankan nasional Indonesia.[16]

Selain itu, didukung oleh berkah ekonomi dari *oil boom* pada 1972/73 yang memperkuat cadangan devisa negara, pemerintah Orde Baru mengeluarkan kebijakan strategis lain di bidang perkreditan, terutama untuk memperkuat sektor pertanian, pembangunan pedesaan, dan pengembangan ekonomi kerakyatan. Sudah tentu tidak berarti pemerintah mengabaikan sektor ekonomi industri strategis, tetapi kebijakan ekonomi kerakyatan merupakan prioritas, sekaligus sebagai koreksi terhadap kebijakan ekonomi sebelumnya yang bahkan sejak periode kolonial cenderung pro-kapitalis dan berorientasi ekspor. Dalam konteks pengembangan skema kredit baru tersebut, BI memainkan peran strategis melalui kewenangan yang dimilikinya untuk memberikan pengarahan dan pembinaan kepada bank-bank pemerintah dalam mengelola administrasi perkreditan mikro, menentukan tingkat suku bunga dan merumuskan batasaan kredit yang terukur dan disesuaikan dengan kebutuhan serta kemampuan masyarakat pengguna atau debitur.

13 Ketujuh bank pemerintah tersebut masing-masing melayani bidang yang spesifik, yaitu industri (BNI), pertambangan (BDN), pertanian dan kehutanan (BBD), pertanian dan perikanan (BRI), perdagangan luar negeri (Bank Eksim), tabungan nasional (BTN)), dan pembangunan (Bapindo). Dalam perkembangannya, spesialisasi tersebut terus dikurangi seiring dengan kebijakan deregulasi (Bennet 1995: 456).

14 IGGI merupakan sebuah konsorsium negara-negara Barat, diketuai oleh Belanda, yang memberikan bantuan dana pembangunan bagi Indonesia; dirintis sejak 1962 dan dinyatakan resmi didirikan pada 1967; disponsori oleh Jepang, IMF, dan Bank Dunia (Dick, dkk., ed. 2002: 196, 205).

15 Hingga 1972, setidaknya terdapat sepuluh bank internasional yang membuka cabangnya di Indonesia; empat di antaranya berasal dari Amerika Serikat, yaitu Chase Manhattan, Citibank, American Express Bank, dan Bank of America; bank-bank lain ialah Bank of Tokyo, Hong Kong & Shanghai Bank, Bangkok Bank, The Chartered Bank, ABN-AMRO Bank, dan The European Asian Bank (Bennet 1995: 456–57).

16 Fakih, dkk. (2020: 212).

Kebijakan pertama mengenai kredit melalui BI ialah kredit Bimbingan Massal (Bimas), yang dirintis sejak 1965 tetapi baru resmi diperkenalkan secara luas pada 1969. Skema kredit ini ditujukan secara khusus bagi petani di wilayah pedesaan untuk membantu meningkatkan kemampuan produksi mereka, terutama padi dan palawija, dan pada gilirannya bisa meningkatkan pendapatan serta kesejahterannya. Selain itu, termasuk dalam skema ini ialah bantuan insentif bagi petani untuk mengadopsi teknik dan teknologi baru dalam rangka meningkatkan produksinya. Skema kredit ini, dikenal sebagai kebijakan kredit selektif berbasis kebijakan (*policy-based lending*) atau dikenal pula sebagai 'kredit langsung' atau 'kredit prioritas', yang biasanya dialokasikan ke sektor ekonomi prioritas, baik untuk tujuan ekonomi maupun sosial.[17] Dengan demikian, jelas bahwa kredit Bimas Nasional merupakan kredit pertanian.

Secara garis besar, pelaksanaan kredit pertanian Bimas sejak perintisannya (1965-80) bisa dibagi ke dalam dua fase, yaitu fase Kredit Bimas Nasional dan Gotong Royong (1965-70), dan fase Bimas Nasional yang disempurnakan (1970-84). Pada fase pertama, program kredit Bimas diberikan sebagai bantuan modal kepada petani dengan tingkat bunga rendah yang, dengan itu, petani diharapkan bisa membeli dan memenuhi kebutuhan produksinya tanpa harus masuk dalam jeratan lintah darat atau sistem ijon. Kredit tersebut disediakan oleh BRI Unit Desa. Di beberapa daerah, penyaluran kredit Bimas dari BRI ke petani dilakukan melalui Koperasi Produksi Pertanian (Koperta), dan untuk memperolehnya petani harus memberikan jaminan produksinya yang belum dipanen. Kredit Bimas diberikan kepada petani dalam bentuk bibit, pupuk, obat-obatan, dan uang garapan. Kredit itu dikenai bunga 3 persen, dengan jangka waktu pinjaman 7 bulan sesudah diterima dan denda sebesar 50 persen jika tidak mengembalikan pada waktu yang ditetapkan. Sebuah laporan mengungkapkan bahwa program kredit Bimas mendapatkan sambutan positif dari petani di wilayah Pulau Jawa dan Madura dan mendorong peningkatan hasil panen padi mereka. Meski demikian, para petani masih mengeluhkan sejumlah kelemahan dari skema kredit ini, antara lain prosedur pengambilan kredit berbelit-belit, membutuhkan waktu lama,

17 Azis dan Rusland (2009: 47–8).

dan tempat pengambilannya jauh dari desa. Selain itu, bunga 3 persen yang dikenakan pada kredit ini masih terlalu tinggi sehingga kemudian diturunkan pada 1969 menjadi satu persen. Pengembalian kredit juga masih tersendat dan penyaluran sarana produksi berupa pupuk, obat-obatan, dan alat-alat lain, masih mengalami kesulitan, sedangkan Koperta belum menjalankan fungsinya dengan maksimal.[18]

**Gambar 5.1.** Presiden Soeharto dan Ibu Tien Soeharto pada sebuah perayaan panen raya di Jawa Barat

Sumber: ANRI, Kementerian Penerangan

Untuk mengatasi kesulitan tersebut, pemerintah mengeluarkan skema kredit Bimas Gotong Royong (Bimas GR), dimulai pada masa tanam 1969. Berbeda dengan skema kredit Bimas Nasional yang sumber pendanaannya berasal dari pemerintah/BI, pembiayaan kredit Bimas GR berasal dari kerja sama dengan pihak swasta asing, terutama perusahaan produsen obat dan pestisida antara lain CIBA, COOPA, dan Hoechst.[19] Organisasi penyaluran kredit Bimas GR juga berbeda; diberikan bukan kepada individu petani tetapi kepada kelompok petani yang memiliki

18 Taryoto, dkk. (1992: 21–2).

19 CIBA atau Chemishce Industrie Basel merupakan perusahaan kimia asal Swiss; COOPA merupakan perusahan pestisida dari Italia, dan Hoechst merupakan perusahan pestisida dari Jerman (Barat). Lihat dalam Rieffel (1969

lahan garapan sekitar 50 hektar. Kredit Bimas GR juga berbentuk bibit, obat-obatan, pupuk, alat-alat produksi dan uang yang dialokasikan untuk membayar penyemprotan udara. Penyaluran kredit tersebut melalui proses lebih sederhana tanpa melibatkan BRI, PN Pertani ataupun Koperta, tetapi langsung melalui kepala desa. Kredit tersebut tidak dikenai bunga, dan pengembaliannya dalam bentuk natura, yaitu seperenam bagian dari hasil panen kotor sebelum dikurangi *bawon* (upah). Seperti halnya kredit Bimas Nasional, pelaksanaan kredit Bimas GR juga menghadapi sejumlah kendala. Di antaranya proses penyaluran sarana produksi dan uang garapan dan biaya penyemprotan berjalan lambat, jumlah dan jenis sarana produksi ditentukan secara sentralistik oleh pusat sehingga sering tidak sesuai dengan kebutuhan setempat, dan pengembalian kredit dalam bentuk natura sebesar seperenam hasil panen menimbulkan beragam masalah, mulai dari kerumitan penghitungannya, harus melibatkan banyak petugas, besarannya memberatkan petani, hingga tidak tersedia gudang penyimpanan padi yang mengakibatkan kerusakan hasil panen.[20]

Mempertimbangkan berbagai kekurangan tersebut, pemerintah merumuskan skema penyempurnaan—yang kemudian menandai awal fase kredit Bimas Nasional yang disempurnakan. Dalam fase ini, konsep Unit Desa yang diperkenalkan sebagai sebuah kesatuan agronomi menjadi sangat sentral; di dalamnya kebutuhan petani akan penyuluhan, perkreditan, dan sarana produksi bisa dipenuhi dengan cepat, mudah dan murah. Oleh karena itu, kredit Bimas yang disempurnakan ini disebut juga sebagai Bimas Unit Desa. Adapun hal-hal yang disempurnakan antara lain: (1) kegiatan penyuluhan, pengadaan dan penyaluran sarana produksi, kredit dan pemasaran tidak diserahkan kepada satu lembaga tunggal, tetapi kepada sejumlah lembaga yang dianggap berkompeten; (2) kegiatan yang bersifat nonekonomi dilakukan oleh agen pemerintah; (3) petani diarahkan untuk memanfaatkan jasa-jasa ekonomi dari berbagai lembaga secara langsung dan tanpa perantara; (4) koperasi diarahkan untuk tetap memainkan peran; dan (5) penyediaan kredit diberikan oleh BRI Unit Desa langsung kepada petani tanpa perantara dan dengan prosedur yang sederhana tetapi aman.

20 Taryoto, dkk. (1992: 25–6).

Untuk mendukung pelaksanaan kredit tersebut, pemerintah membuka 18 BRI Unit Desa sebagai pilot proyek di wilayah Yogyakarta (1969). Jumlah itu terus meningkat seiring dengan perluasan dan perkembangan Bimas Unit Desa ke seluruh wilayah Indonesia. Pada 1970, telah dibangun 537 kantor BRI Unit Desa di wilayah Pulau Jawa dan Madura, untuk menyalurkan total kredit sekitar 8,6 miliar rupiah. Lima tahun kemudian, kantor BRI Unit Desa mencapai 3001 buah, dengan jumlah pengelola sebanyak 9.591 orang, dan berhasil menyalurkan kredit sebesar 55,07 miliar rupiah. Puncak pelaksanaan skema kredit ini terjadi pada 1984, saat jumlah kantor BRI Unit Desa mencapai 3.626 buah dengan tenaga pengelola sebanyak 13.668 orang.[21] Pada tahun itulah, Pemerintah Indonesia berhasil mencapai ambisinya mewujudkan swasembada pangan untuk pertama kalinya sejak Indonesia merdeka. [22]

Keberhasilan pelaksanaan kredit Bimas Unit Desa mendorong pemerintah mengeluarkan skema kredit yang sama untuk komoditas lain, seperti tanaman perkebunan, peternakan, dan perikanan. Termasuk dalam skema dimaksud adalah kredit Tebu Inti Rakyat, Kredit Mini/ Midi, dan sebagainya. Namun, tidak satu pun dari ketiga komoditas tersebut yang skala cakupan dan intensifikasi kreditnya bisa menyamai kredit Bimas padi dan palawija. Selama periode 1983 hingga 1993, setidaknya terdapat tujuh jenis program perkreditan Pemerintah yang secara khusus ditujukan untuk pengembangan sektor Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) non-pertanian. Ketujuh program itu ialah: (1) Program Kredit Investasi Kecil (KIK) dan Kredit Modal Kerja Permanen (KMKP) yang disediakan oleh BI bekerja sama dengan sekitar 55 bank pelaksana yang didukung oleh sekitar 600 kantor wilayah; (2) Program Kredit Usaha Kecil (KUK) yang diselenggarakan oleh sejumlah bank umum dan bank nasional di Indonesia, dirancang sebagai pengganti KIK/KMKP sejak 1991; (3) Program Kredit Umum Pedesaan (Kupedes) dan Simpanan Pedesaan (Simpedes) bagi masyarakat perdesaan bersama program Simpanan Masyarakat Kota (Simaskot) yang diselenggarakan oleh BRI melalui sekitar 3.200 Unit Desa pada 1984; (4) Program Pusat Pelayanan

21 Seorang pengamat *microfinance* internasional, Robinson (2002: 58), menilai bahwa sistem *microbanking* yang dikembangkan BRI melalui jaringan BRI Unit Desa merupakan sebuah contoh paling maju mengenai revolusi *microfinance* di dunia.

22 Taryoto, dkk., (1992: 29–30).

Kredit Koperasi Pedesaan (PPKKP) yang dilayani oleh Bank Bukopin melalui sekitar 150 KUD dan sekitar 1.600 kelompok simpan pinjam; (5) Proyek Percontohan Pengembangan Penyempurnaan Kredit Candak Kulak (P4KCK) yang dilayani KUD di bawah bimbingan dan koordinasi Departemen Koperasi; (6) Program Pengembangan Hubungan Bank-KSM (PHBK) yang diselenggarakan oleh BI melalui sekitar 40 bank pelaksana, 18 lembaga swadaya masyarakat (LSM), dan sekitar 760 kelompok usaha; dan (7) Program kredit kecamatan yang diberikan oleh beberapa Badan Kredit Kecamatan (BKK), Lembaga Penjamin Kredit Daerah (LKPD), Kredit Usaha Rakyat Kecil (KURK), dan lain-lain.[23]

Dari ketujuh program kredit tersebut, dua program merupakan skema yang diberikan oleh Bank Indonesia, yaitu Program KIK/KMKP dan Program PHBK. Dari keduanya, Program KIK/KMKP bisa dikatakan sebagai program kredit yang skala persebaran dan besaran jumlahnya hampir mendekati Program Bimas. Bedanya, program KIK/KMKP diarahkan untuk menjadi instrumen kebijakan BI dalam memberdayakan UMKM di berbagai sektor ekonomi non-pertanian yang berbasis di perkotaan, mulai dari perdagangan, kerajinan hingga industri manufaktur berbasis rumah tangga (*cottage industry*). Dengan dukungan KLBI, program ini secara resmi diperkenalkan pada 1973 kepada masyarakat sebagai skema kredit yang menawarkan persyaratan ringan, prosedur yang sederhana dan mudah, suku bunga rendah dan jangka waktu kredit yang relatif panjang (3-5 tahun). Selain itu, program kredit ini secara otomatis diasuransikan kepada PT Askrindo dengan biaya premi yang relatif rendah. Berbeda dengan Program Bimas yang "hanya" memberikan likuiditas dan permodalan, Program KIK/KMKP dirancang sebagai program komprehensif yang memberikan modal sekaligus pendampingan teknis kepada para pelaku UMKM serta bantuan untuk menghubungkannya dengan pasar.[24]

---

23 Sadoko, dkk. (1995: 62–4). Di luar program kredit nasional/daerah, terdapat pula beberapa program sektoral yang dikembangkan sebagai skema kredit kecil (*microfinance*), antara lain adalah Kredit Usaha Tani melalui Bulog/KUD, kredit P4K bagi kelompok tani dan nelayan dari BRI, serta kredit bagi kelompok keluarga berencana dari BPKKB. Selain itu, sejumlah lembaga perkreditan swasta termasuk LSM mengembangkan program kredit, termasuk di antaranya Karya Usaha Mandiri, bank pasar dan bank pegawai termasuk Bank Perkreditan Rakyat yang berfungsi secara komersial di wilayah perdesaan dan perkotaan; dan Koperasi Unit Desa (berjumlah sekitar 7.000 unit pada 1990-an) juga menawarkan fungsi tabungan dan perkreditan, selain menjalankan fungsi produksi dan perdagangan.

24 Azis dan Rusland (2009: 49).

Seperti Program Bimas, Program KIK/KMKP merupakan program selektif atau "diskriminasi positif" khusus bagi pelaku ekonomi pribumi, terutama dari kalangan menengah dan bawah, untuk meningkatkan kesejahteraan mereka. Dalam pelaksanaannya, BI berupaya untuk memastikan program tersebut tepat sasaran, antara lain dengan menetapkan kriteria kelompok sasaran, yaitu usaha kecil dan menengah berdasarkan pada status pemilikan usaha dan besarnya aset. Berkaitan dengan upaya itu, pada 1977 BI membentuk Proyek Pengembangan Usaha Kecil (PPUK) atau Small Enterprises Developmen Project (ESDP) dengan bantuan finansial dari Bank Dunia. Selain bertujuan memberikan bantuan teknis terhadap penerima Program KIK/KMKP, PUPK dirancang sebagai instrumen untuk mengidentifikasi pelaku usaha dan proyek-proyek yang layak memperoleh kredit dari skema ini. Berhubung target penerima skema kredit ini cukup beragam, maka dalam perkembangannya mengalami diferensiasi yang disesuaikan dengan sektor usaha penerimanya. Jenis-jenis kredit tersebut antara lain Kredit Modal Kerja (KMK), Kredit Investasi, Kredit Mahasiswa Indonesia (KMI), Kredit kepada Koperasi, Kredit Mini, Kredit Midi, Kredit Profesi Guru (KPG), dalam rangka Keputusan Presiden Nomor 29/1984, Kredit Umum Pedesaan (Kupedes), Kredit Usaha Tani (KUT), Kredit kepada Penyuluh Pertanian (PPL), Kredit Pemilikan Rumah (KPR), dan Kredit Asrama Mahasiswa (KAM).[25]

Dalam pelaksanaannya, kredit tersebut mengalami perubahan dari sisi plafon besaran kredit, suku bunga, dan jangka waktu. Pada awalnya, pagu kredit KIK ditetapkan sebesar 5 juta rupiah dengan bunga 12 persen untuk jangka waktu 5 tahun, dan KMKP dengan bunga 15 persen untuk 3 tahun. Pada 1977, pagu tersebut naik menjadi 10 juta rupiah dengan bunga 10,5 persen untuk KIK, dan 12 persen untuk KMKP. Pada 1984, plafon KIK dan KMKP dinaikkan kembali menjadi 75 juta rupiah. Sebuah laporan mengungkapkan bahwa pada 1980 Program KIK/KMKP menyalurkan kredit sebesar 524 juta rupiah. Dari nilai total kredit tersebut, sebanyak 34 juta rupiah disalurkan ke sektor pertanian; 49 juta rupiah ke sektor manufaktur; 20 juta rupiah ke sektor konstruksi; 237 juta rupiah ke sektor perdagangan; 50 juta rupiah ke sektor transportasi; dan 24 juta rupiah sisanya ke sektor lain (29 subsektor). Kredit tersebut menghasilkan

25 Azis dan Rusland (2009: 49).

aset tetap (*fixed asset*) senilai 169 juta rupiah; menciptakan 67.000 lapangan kerja; meningkatkan nilai produksi/penjualan hingga 279 juta rupiah per tahun; dan menghasilkan nilai tambah tahunan sebesar 107 juta rupiah.

Dengan fakta-fakta tersebut, studi itu menyimpulkan bahwa program kredit KIK/KMKP cukup memberikan dampak positif bagi usaha skala kecil, padat karya dan penting secara ekonomi. Meski demikian, hasil yang dicapai akan jauh lebih signifikan seandainya Pemerintah Indonesia dan BI bisa mengatasi dan meminimalisasi masalah koordinasi sektoral dan antarlembaga pemerintahan terkait yang menjadi salah satu kendala terbesar program itu.[26]

Kajian lain melaporkan bahwa selama periode 1974–1982 Program KIK/ KMKP telah menyalurkan jumlah kredit yang terus meningkat, yaitu dari 75 miliar rupiah menjadi 2,5 triliun rupiah, atau rata-rata meningkat sebesar 54,8 persen per tahun. Hingga 1990, KIK telah disalurkan kepada 322.000 nasabah/pengusaha dengan besaran kredit rata-rata sebesar 4,8 juta rupiah, sedangkan KMKP disalurkan kepada 416.000 nasabah/ pengusaha dengan besaran kredit rata-rata 1,95 juta rupiah. Besaran rerata tersebut dinilai masih rendah dan relatif jauh dari yang ditargetkan oleh program KIK/KMKP. Meski demikian, secara umum program itu juga telah menunjang program pemerintah yang lain, seperti intensifikasi tebu rakyat, intensifikasi tambak, intensifikasi ternak dan unggas, motorisasi nelayan, angkutan kota, pembanguan pertokoan dan usaha perdagangan, pengadaan rumah rakyat, dan lain-lain.[27]

Pada 1 Juni 1983, Pemerintah menerbitkan kebijakan deregulasi perbankan (populer disebut Pakjun 83) yang cukup memengaruhi tata kelola perkreditan nasional. Dalam hal itu, bank-bank pemerintah diberi kebebasan menentukan kebijakan perkreditannya sendiri, termasuk suku bunga kredit dan deposito. Selain itu, kebijakan tersebut menetapkan bahwa KLBI hanya diberikan kepada sektor prioritas, yaitu swasembada pangan, ekspor nonmigas dan perkebunan, serta pengembangan usaha kecil dan koperasi. Atas dasar itulah, beberapa skema kredit mengalami

26 Bolnick dan Nelson (1999: 308–10).

27 Azis dan Rusland (2009: 50).

perubahan, di antaranya Kredit Mini dan Midi disempurnakan menjadi Kredit Umum Pedesan dan kredit Bimas disempurnakan menjadi Kredit Usaha Tani (KUT). Selain itu, diperkenalkan skema kredit baru, yaitu KMKK mengacu Keputusan Presiden Nomor 29/1984 dan Kredit Penyuluh Pertanian.[28]

Untuk menyempurnakan lebih lanjut sistem perkreditan nasional, pada 29 Januari 1990 Pemerintah kembali mengeluarkan paket kebijakan di sektor keuangan, yang dikenal dengan Paket Januari 1990 (Pakjan 90). Intinya, kebijakan itu untuk mengurangi peran KLBI secara mendasar dan merampingkan skema kredit prioritas yang ditunjang oleh dana bank sentral. Sasaran yang dituju ialah mengurangi secara bertahap KLBI dalam pemberian kredit perbankan; memberikan KLBI dalam jumlah yang terbatas hanya untuk mendukung upaya pelestarian swasembada pangan; pengembangan koperasi; serta peningkatan investasi untuk sektor tertentu; menyederhanakan suku bunga sehingga dapat terbentuk suku bunga pasar dengan tingkat yang wajar; dan mewajibkan semua bank untuk menyediakan kredit kepada usaha kecil minimum 20 persen dari jumlah pemberian kredit setiap bank, yang disebut dengan Kredit Usaha Kecil (KUK).

Implikasi dari Pakjan 90 ialah KLBI hanya diberikan kepada tiga jenis skema kredit, yaitu kredit koperasi, kredit Bulog, dan kredit investasi untuk sektor tertentu. Skema kredit koperasi mencakup KUT, kredit kepada KUD (KKUD), dan Kredit kepada Koperasi Primer untuk Anggotanya (KKPA); sedangkan skema kredit Bulog adalah kredit untuk pengadaan pangan nasional. Adapun kredit investasi untuk sektor tertentu mencakup kredit sektor perkebunan seperti Perkebunan Inti Rakyat Transmigrasi (PIR Trans), PIR Perkebunan Swasta Nasional (PSN) dan Perkebunan Rakyat Peremajaan Tanaman Ekspor (PRPTE); dan KPR. Skema kredit investasi ini pun tidak bertahan lama karena secara bertahap dikurangi dan akhirnya dihapuskan pada Maret 1994 untuk Kawasan Barat Indonesia dan Maret 1995 untuk Kawasan Timur Indonesia. Di luar itu, aktivitas dan program kredit harus dibiayai oleh dana masyarakat yang dihimpun perbankan. Dengan demikian, Pakjan 90 pada prinsipnya telah mengubah secara

28 Azis dan Rusland (2009: 51).

mendasar kebijakan kredit di Indonesia yang diperankan oleh Bank Indonesia, yaitu dari *subsidized selective credit policy* menjadi *market-oriented credit policy*.[29]

Disimpulkan ringkas, berbagai program kredit yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia, terutama kredit Bimas dan KIK/KMKP, terbukti berdampak positif. Bagi Pemerintah Orde Baru, program tersebut sejak awal merupakan instrumen penting dalam mewujudkan ambisinya menciptakan stabilisasi, rehabilitasi dan perbaikan perekonomian nasional sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sementara bagi masyarakat luas, kredit Bimas dan KIK/KMKP merupakan kebijakan pro-rakyat yang membukakan akses mereka terhadap pasar modal dan perkreditan, satu hal yang sejak periode kolonial menjadi faktor penghambat utama bagi perkembangan kewirausahaan dan mobilitas ekonomi di kalangan penduduk pribumi. Kebijakan tersebut, meskipun tidak melahirkan wirausahawan pribumi dalam jumlah besar, tetapi cukup membantu membentuk kelas menengah, yang secara ekonomis memiliki independensi terhadap negara, inovatif dan kreatif dalam memanfaatkan atau menciptakan berbagai kesempatan ekonomi baru, dan karena itu menjadi tulang punggung perekonomian nasional.

## REALISASI PROGRAM KREDIT BI DAN PERKEMBANGAN UMKM DI CIREBON

Sejak awal abad ke-20, bahkan jauh sebelumnya, wilayah eks Keresidenan Cirebon[30] telah terintegrasikan secara mendalam dengan perekonomian modern. Pertanian merupakan sektor tradisional yang tetap menjadi tulang punggung perekonomian kawasan ini. Meski demikian, kawasan ini juga diwarnai dengan maraknya aktivitas ekonomi skala kecil dan menengah luar-tani (*off-farm*), seperti kerajinan, industri rumah tangga, perdagangan, dan lain-lain, yang sebagian besar digerakkan

29 Azis dan Rusland (2009: 53–4).

30 Kini meliputi Kota Cirebon, Kabupaten Cirebon, Kabupaten Indramayu, Kabupaten Majalengka, dan Kabupaten Kuningan.

oleh masyarakat pribumi.[31] Sektor ekonomi rakyat tersebut memiliki kedudukan hampir sama pentingnya dengan sektor pertanian. Selain menyumbang kebutuhan ekonomi setempat, eksistensinya terus berlanjut hingga kini. Bahkan ketika ekonomi kapitalistik berskala menengah dan besar berguguran, terutama pada masa sulit kurun 1940 hingga 1950-an, sektor ekonomi rakyat menunjukkan daya tahan cukup kuat.

Sebelum program perkreditan dari Bank Indonesia diperkenalkan, Pemerintah Kabupaten Cirebon sejak awal Orde Baru telah memiliki beberapa program di bidang perkreditan khususnya untuk mendorong peningkatan produksi pertanian di wilayah pedesaan. Catatan pribadi pejabat Bupati Cirebon (1965-66), R. Soemioto, mengungkapkan bahwa pada masa transisi politik awal Orde Baru, saat kondisi perekonomian nasional lesu dan terancam paceklik, Kabupaten Cirebon justru memperoleh capaian panen yang cukup baik dan melampaui kebutuhan tempatan, khususnya di wilayah penghasil beras utama seperti kecamatan Palimanan, Klangenan, Gegesik dan Arjawinangun. Secara umum, hasil panen yang baik tersebut membantu meringankan beban penduduk di Cirebon dari impitan inflasi.[32]

Keberhasilan tersebut, menurut Soemioto, antara lain berkat kebijakan dan bantuan dari Pemerintah Kabupaten Cirebon. Kebijakan yang dimaksud ialah pembentukan Bank Produksi Desa dan Lumbung Produksi Desa, yang bertugas menyalurkan kredit, membantu penyediaan bibit dan pembelian hasil panen petani. Selanjutnya, terdapat kebijakan pembelian hasil panen masyarakat dan bantuan pemberantasan hama oleh Badan Produksi Daerah dan Dinas Pertanian Kabupaten. Dicatat pula bahwa dari 294 desa di seluruh Kabupaten Cirebon pada 1966 terdapat 115 Bank Desa dan 214 Lumbung Desa, yang penyelenggaraan dan operasionalnya di bawah pengawasan Bank Negara Indonesia Unit

31 Menurut budayawan Cirebon, T. D. Sudjana, riwayat industri kerajinan tangan di Cirebon bisa ditelusuri dari awal berdiri Kota Cirebon dan proses Islamisasi. Hampir semua industri kerajinan, katanya, memiliki keterkaitan dengan sejarah perkembangan Islam di daerah ini (lihat "Kerajinan Cirebon, Produk Lokal Pasaran Global," *Kompas,* 12 Februari 2001).

32 Lihat buku R. Soemioto, *Buku Tjoretan dan Tjatatan serta Sorotan Kabupaten Tjirebon* (2007). Buku ini merupakan catatan pribadi dari R. Soemioto, pejabat Bupati Kabupaten Cirebon (1965–66). Dengan posisi dan karyanya itu, R. Soemioto, dalam hal ini tidak hanya sebagai sumber rujukan melainkan dipandang sebagai (salah satu) pelaku/saksi sejarah. Kami ucapkan terima kasih kepada Sutrisno Murtiyoso, kontributor Bab 7 buku ini, yang telah meminjamkan memoar tersebut.

II (setelah 1968 menjadi Bank Rakyat Indonesia). Hingga Januari 1966, dilaporkan bahwa bank-bank desa tersebut memiliki saldo simpanan di BNI Unit II sebesar 49.860.000 rupiah, sedangkan lumbung-lumbung desa memiliki sisa sediaan padi sebanyak 213.581 kilogram.[33]

Selanjutnya, R. Soemioto menjelaskan bahwa kebijakan dan bantuan kredit tersebut sebagian besar diambil dari sumber keuangan Pemerintah Kabupaten Cirebon pada periode tersebut. Meski tidak disebutkan secara detail berapa besar dana yang tersedia, sebagai perkiraan bisa dilihat dari Keuangan Desa Anggaran Tahun 1965 (Tabel 5.1). Kondisi keuangan Pemerintah Kabupaten Cirebon pada waktu itu dilaporkan cukup baik dibandingkan kabupaten lain di Pulau Jawa. Sebagai contoh, Rencana Anggaran Keuangan Daerah Kabupaten Cirebon untuk tahun anggaran 1965 tersebut adalah dilaporkan sebagai berikut.

**Tabel 5.2.**
**Rencana Anggaran Keuangan Daerah Kabupaten Cirebon Tahun Anggaran 1965 (dalam Rupiah)**

| | |
|---|---|
| Pengeluaran Dinas Biasa | Rp. 635.585.270 |
| Pengeluaran Dinas Luar Biasa | Rp. 15.858.000 |
| Penerimaan Dinas Biasa | Rp. 635.585.270 |
| Penerimaan Dinas Luar Biasa | Rp. 15.858.000 |

Sumber: Soemioto (2007)

Lebih lanjut, R. Soemioto mengungkapkan bahwa realisasi penerimaan yang diterima Pemerintah Kabupaten Cirebon pada 1965 adalah 455.645.119,55 rupiah, sedangkan realisasi pengeluaran sebesar 373.917.053,95 rupiah, atau menyisakan dana tabungan sebesar 81.728.065,60 rupiah. Jumlah tersebut tentu masih cukup jauh dari target yang ditetapkan Pemerintah Kabupaten Cirebon. Namun, tidak ada penjelasan tentang sebab kegagalan untuk mencapai target tersebut.

33 Soemioto (2007: 43). Sebuah sumber resmi mengungkapkan bahwa jumlah bank desa dan lumbung desa di wilayah Kabupaten Cirebon pada 1992, sekitar 27 tahun kemudian berjumlah 424 buah. Namun, laporan tersebut tidak merinci jumlah tabungan atau dana simpanan dari lembaga-lembaga kredit milik pemerintahan desa tersebut. Lihat *Laporan Hasil Pembangunan Desa Dalam Data dan Angka di Propinsi Jawa Barat Tahun 1992/1993* (Bandung: Direktorat Pembangunan Desa, Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat, 1992), Tabel 22, hlm. 62.

Sebaliknya, ditunjukkan bahwa penerimaan keuangan Pemerintah Kabupaten Cirebon justru mengalami kenaikan cukup siginifikan meskipun baru berjalan selama caturwulan pertama (1966), yaitu sebesar 588.643.891,30 rupiah, dengan jumlah pengeluaran 570.509.949,60 rupiah. Menurut R. Soemioto, sumber utama pendapatan keuangan Pemerintah Kabupaten Cirebon berasal dari pajak (10 jenis pajak), retribusi pasar, dan hasil usaha dari sejumlah perusahaan milik pemerintah Kabupaten Cirebon di berbagai sektor.[34]

**Tabel 5.3.**
**Keuangan Desa Kabupaten Cirebon Tahun Anggaran 1965**
**(dalam Rupiah)**

| Nama Bekas Kawedanan | Sisa akhir Desember '64 | Penerimaan | | Pengeluaran | Sisa Akhir Desember '65 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | Bunga | Penyetoran | | |
| 1. Cirebon | 5.135.973,34 | 78.746,04 | 13.420338 | 2.735.000,00 | 15.900.057,38 |
| 2. Sindanglaut | 21.235.155,70 | 755.689,30 | 164.853.728,62 | 28.618.611,06 | 158.225.962,56 |
| 3. Ciledug | 27.613.173,27 | 752.606,64 | 115.499.364,91 | 28.644.083,15 | 115.221.061,67 |
| 4. Plumbon | 9.275.938,78 | 242.421,22 | 39.400.034,53 | 11.606.186,37 | 37.312.208,16 |
| 5. Palimanan | 17.570.904,98 | 419.308,24 | 58.107.300,91 | 16.486.464,41 | 59.611.049,72 |
| 6. Arjawinangun | 15.848.894,29 | 377.062,18 | 94.656.485,80 | 13.024.239,18 | 97.858.203,09 |
| Total | 96.680.040,36 | 2.625.833,62 | 485.937.252,83 | 101.114.584,23 | 484.128.542,58 |

Sumber: Soemioto (2007: 100).

Secara umum bisa dikatakan bahwa program-program Pemerintah Kabupaten Cirebon merupakan "modal awal" bagi pembangunan sektor pertanian dan ekonomi rakyat di wilayah tersebut. Memasuki kurun 1970-an, wilayah Cirebon menjadi salah satu penerima program perkreditan yang disediakan Bank Indonesia. Pada tingkat nasional, laporan tahunan Bank Indonesia (1970/71) mengungkapkan bahwa program kredit BI pada triwulan pertama tahun tersebut berjumlah 260,75 miliar rupiah, meningkat secara berurutan menjadi 291,16 miliar rupiah (triwulan II), 343,3 miliar rupiah (triwulan III), dan 362,3 miliar (triwulan IV). Secara garis besar, jumlah tersebut dialokasikan untuk dua jenis kredit, yaitu kredit langsung sebagai bagian dari skema Bimas dan kredit tidak langsung;

34 Soemioto (2007: 60–3).

artinya disalurkan melalui bank-bank pemerintah. Skema kredit langsung tersebut mencakup pembelian pupuk, pembelian gabah, kredit Bimas Gotong Royong, mengimpor gula, dan pinjaman lain.[35]

Lima tahun kemudian nilai kredit yang disalurkan BI meningkat tajam seiring bertambahnya skema kredit yang ditawarkan BI, termasuk program KIK/KMKP. Laporan BI (1975) mengungkapkan bahwa kredit untuk sektor pertanian (Bimas) adalah 260 rupiah miliar (meningkat 114 persen); sektor industri, terutama tekstil dan industri logam sebesar 741 miliar rupiah (meningkat 84 persen); sektor perdagangan 790 miliar (naik 29 persen); dan sektor jasa dan lainnya total sebesar 200 miliar rupiah. Sementara itu, nilai kredit yang disalurkan untuk program KIK/KMKP juga mengalami peningkatan. Pada akhir Maret 1976, dilaporkan total permintaan yang disetujui memperoleh kredit KIK berjumlah 19.804 dengan total nilai kredit sebesar 34,1 miliar rupiah, dan nilai serapan sebesar 25,5 milyar rupiah. Adapun untuk program KMKP, permintaan yang disetujui adalah 83.281 dengan total nilai kredit sebesar 40,8 miliar rupiah dan dengan nilai serapan sebesar 26,7 miliar rupiah. Jadi, nilai rata-rata masing-masing permintaan kredit KIK dan KMKP adalah 1,7 juta rupiah dan 0,5 juta rupiah. Dibandingkan dengan nilai serapan tahun sebelumnya (Maret 1975) masing-masing kategori mengalami kenaikan sebesar 64 persen dan 94 persen.[36] Pada Maret 1981, nilai kredit KIK yang tersalurkan meningkat menjadi 366 miliar rupiah dengan jumlah peminjam sebanyak 125.000 orang; sedangkan nilai kredit KMKP yang disetujui pada akhir Maret 1981 mencapai 384 miliar rupiah, dengan jumlah nasabah 125.000 orang.[37]

Terkait dengan realisasi penyaluran kredit Bank Indonesia, terutama Program KIK dan KMKP di wilayah Kabupaten Cirebon, informasi resmi yang berhasil didapatkan adalah berasal dari tahun 1981; sedangkan data penyaluran untuk wilayah Kota Cirebon berasal dari tahun 1985, keduanya diterbitkan oleh Badan Pusat Statistik yang mengutip data dari Kantor BI Cirebon.

35 Bank Indonesia (1971: 18).

36 Bank Indonesia (1976: 19–21).

37 Bank Indonesia (1981: 13).

Untuk wilayah Kabupaten Cirebon, laporan tersebut mengungkapkan bahwa jumlah total dana program kredit KIK yang tersalurkan di wilayah itu adalah 3.192.124.000 rupiah dengan total penerima kredit sebanyak 663 orang. Sebagian besar dari kredit tersebut diterima oleh 562 nasabah dari tiga sektor ekonomi utama, yaitu perdagangan, perindustrian dan perhubungan dengan total nilai kredit 2.746.335.000 rupiah (sekitar 85 persen); sisanya disalurkan ke sektor pertanian, peternakan, perikanan, dan lain-lain. Perdagangan merupakan sektor ekonomi yang menerima kucuran kredit paling besar, yaitu 1.314.487.000 rupiah (sekitar 42 persen) dengan jumlah nasabah sebanyak 276 orang. Sementara sektor peternakan menjadi penerima kredit KIK paling rendah dengan total kredit sebesar 16.200.000 rupiah yang disalurkan kepada 4 orang nasabah.

**Tabel 5.4.**
**Jumlah Nasabah dan Realisasi Kredit KIK menurut Sektor Ekonomi di Kabupaten Cirebon (1981)**

| Sektor Ekonomi | Nasabah | Realisasi (Rp1000) |
|---|---|---|
| 1. Pertanian | 22 | 45.934 |
| 2. Peternakan | 4 | 16.200 |
| 3. Perikanan | 8 | 32.000 |
| 4. Perindustrian | 174 | 910.489 |
| 5. Perdagangan | 276 | 1.314.487 |
| 6. Perhubungan | 112 | 521.359 |
| 7. Lain-lain | 67 | 351.655 |
| Jumlah | 663 | 3.192.124 |

Sumber: Badan Pusat Statistik (1981: 140).

Dari Tabel 5.4 diketahui bahwa besaran kredit rata-rata tertinggi diterima oleh para nasabah yang bekerja di sektor perindustrian, yaitu 5.232.695 rupiah, sedangkan nasabah dari sektor pertanian menerima kucuran kredit paling rendah yaitu 2.087.909,10 rupiah. Sementara itu, pada sektor ekonomi lain besaran kredit rata-rata yang diterima per nasabah ialah: sektor perdagangan sebesar 4.762.634 rupiah, sektor perhubungan 4.654.991 rupiah, sektor peternakan 4.050.000 rupiah, dan sektor perikanan 4.000.000 rupiah. Perbandingan tersebut mengecualikan sektor ekonomi "lain-lain" karena ketidakjelasan cakupannya, meskipun

secara riil sektor ini menerima kucuran kredit yang cukup besar yaitu 351.655.000 rupiah dengan jumlah nasabah 67 orang (atau 5.248.582 rupiah per nasabah).

Adapun untuk program Kredit KMKP total dana yang berhasil disalurkan di wilayah Kabupaten Cirebon pada tahun yang sama berjumlah sedikit lebih besar dari skema kredit KIK, yaitu 3.471.475.000 rupiah, dengan jumlah penerima kredit yang juga jauh lebih besar yaitu 913 orang nasabah. Namun, dari sisi sektor ekonomi penerima, pola persebaran kredit KMKP sedikit berbeda karena terkonsentrasi dalam sektor perdagangan dan perindustrian (sekitar 90 persen). Sektor perdagangan tampaknya menjadi sektor utama yang didukung oleh skema kredit KMKP dengan besaran kredit mencapai 2.084.675.000 rupiah yang diterima oleh 495 orang nasabah, sedangkan sektor perindustrian menerima total dana sebesar 961.900.000 rupiah dengan jumlah nasabah 329 orang. Artinya, jumlah rata-rata kredit yang diterima nasabah pada kedua sektor tersebut cukup jauh berbeda. Nasabah dari sektor perdagangan rata-rata menerima kredit sebesar 4.211.464,65 rupiah, sementara nasabah dari sektor perindustrian rata-rata hanya menerima kredit 2.923.708,20 rupiah. Ini menunjukkan bahwa mayoritas penerima kredit dalam sektor perindustrian dari kalangan industri skala kecil (*cottage industry*). Tabel 5.5 memberikan informasi lengkap tentang serapan kredit KMKP di Kabupaten Cirebon (1981).

**Tabel 5.5.**
**Jumlah Nasabah dan Realisasi Kredit KMKP menurut Sektor Ekonomi di Kabupaten Cirebon (1981)**

| Sektor Ekonomi | Nasabah | Realisasi (Rp1000) |
|---|---|---|
| 1. Pertanian | 2 | 10.000 |
| 2. Peternakan | 9 | 24.150 |
| 3. Perikanan | 7 | 7.000 |
| 4. Perindustrian | 329 | 961.900 |
| 5. Perdagangan | 495 | 2.084.675 |
| 6. Perhubungan | 6 | 23.000 |
| 7. Lain-lain | 67 | 360.750 |
| Jumlah | 913 | 3.471.475 |

Sumber: Badan Pusat Statistik (1981: 141).

Sementara itu, di wilayah Kota Cirebon, total kredit KIK yang disalurkan pada 1985 mencapai 10.347.663.000 rupiah, mengalami kenaikan cukup berarti dari 8.545.163.000 pada 1984. Jumlah kredit tersebut disalurkan kepada 1.872 orang nasabah, yang juga mengalami kenaikan dari 1.633 orang nasabah pada tahun sebelumnya. Seperti halnya di wilayah Kabupaten Cirebon, tiga sektor utama ekonomi Kota Cirebon—yaitu industri, perdagangan, dan perhubungan— merupakan penerima terbesar Program KIK. Sektor perdagangan menerima total kredit sebesar 4.562.438.000 rupiah yang diterimakan kepada 844 orang nasabah atau rata-rata sekitar 5.405.732 rupiah per nasabah. Sektor industri menyusul di urutan kedua dengan total kredit sebesar 1.837.445.000 rupiah yang diterimakan kepada 432 orang nasabah atau rata-rata 4.253.345 rupiah per nasabah. Selanjutnya, sektor perhubungan yang menerima total kredit 1.846.814.000 rupiah untuk 235 orang nasabah atau sekitar 7.858.7823 rupiah per nasabah. Adapun sektor perikanan menjadi penerima kredit terkecil di wilayah ini yaitu sebesar 71.650.000 rupiah yang disalurkan kepada 17 orang nasabah atau 4.214.705 rupiah per orang. Informasi selengkapnya tentang penyaluran kredit KIK di Kota Cirebon (1985) dapat dilihat pada Tabel 5.6.

**Tabel 5.6.**
**Jumlah Nasabah dan Realisasi Kredit KIK menurut Sektor Ekonomi di Kotamadya Cirebon (1985)**

| Sektor Ekonomi | Nasabah | Realisasi (Rp1000) |
|---|---|---|
| 1. Pertanian | 56 | 153.834 |
| 2. Peternakan | 17 | 71.750 |
| 3. Perikanan | 17 | 71.650 |
| 4. Perindustrian | 432 | 1.837.445 |
| 5. Perdagangan | 844 | 4.562.438 |
| 6. Perhubungan | 235 | 1.846.814 |
| 7. Lain-lain | 271 | 1.803.732 |
| Jumlah | 1.872 | 10.347.663 |

Sumber: Kantor Statistik Kotamadya Cirebon (1985: 110-1).

Seperti halnya di wilayah Kabupaten Cirebon, realisasi penyaluran Kredit KMKP di wilayah Kotamadya Cirebon jauh lebih besar bahkan hampir dua kali lipat dibandingkan Program KIK. Laporan BPS (1985) menyebutkan bahwa total kredit KMKP yang disalurkan di wilayah Kota Cirebon pada tahun itu mencapai 20.498.164.000 rupiah dengan jumlah penerima sebanyak 4.266 orang nasabah. Jumlah itu meningkat cukup berarti dari total kredit yang disalurkan pada tahun sebelumnya yang mencapai 14.953.671.000 rupiah. Seperti bisa dilihat pada Tabel 5.7 sebagian besar dari kredit KMKP disalurkan ke sektor perdagangan yaitu 13.783.131.000 rupiah yang diterimakan kepada 2.953 orang nasabah, atau rata-rata 4.667.501 rupiah per orang. Industri adalah sektor ekonomi berikutnya yang juga menikmati bantuan Kredit KMKP; sebanyak 638 nasabah menerima total kredit sebesar 2.379.140.000 rupiah atau sekitar 3.729.060 per orang. Menariknya, jumlah kredit untuk sektor perhubungan yang merupakan terbesar ketiga setelah sektor perdagangan dan industri, yaitu 153.500.000 rupiah disalurkan hanya kepada 19 nasabah atau sekitar 8.078.947 rupiah per orang. Artinya, pada tahun tersebut nasabah dari sektor ekonomi ini secara individual merupakan penerima kredit terbesar dari Program KMKP.

**Tabel 5.7.**
**Jumlah Nasabah dan Realisasi Kredit KMKP menurut Sektor Ekonomi di Kotamadya Cirebon (1985)**

| Sektor Ekonomi | Nasabah | Realisasi (Rp1000) |
|---|---|---|
| 1. Pertanian | 22 | 89.620 |
| 2. Peternakan | 23 | 78.700 |
| 3. Perikanan | 7 | 7.000 |
| 4. Perindustrian | 638 | 2.379.140 |
| 5. Perdagangan | 2.953 | 13.783.131 |
| 6. Perhubungan | 19 | 153.500 |
| 7. Lain-lain | 604 | 3.507.073 |
| Jumlah | 4.266 | 20.498.164 |

Sumber: Kantor Statistik Kotamadya Cirebon (1985: 110-1).

Selain Program KIK dan KMKP yang dananya bersumber dari KLBI, data lain tentang penyaluran program kredit pemerintah di wilayah Kabupaten Cirebon terkait dengan Kredit Usaha Kecil (KUK, 1994). Terungkap bahwa penyaluran KUK di wilayah Cirebon mengalami kenaikan rata-rata 24 persen dalam kurun waktu empat tahun dari 14 triliun rupiah pada 1989 menjadi 27,7 triliun rupiah pada 1993. Nasabah penerima kredit KUK tersebut terdiri dari empat kategori besaran plafon, yaitu nasabah dengan besaran kredit hingga 25 juta rupiah (41,2 persen); nasabah dengan plafon kredit antara 25–100 juta rupiah (26,9 persen); nasabah dengan plafon kredit antara 100–200 juta rupiah (23,8 persen); dan nasabah dengan plafon kredit antara 200–250 juta rupiah. Peningkatan penyaluran KUK tersebut merupakan hasil dari serangkaian kebijakan perbankan dan strategi pendekatan baru kepada masyarakat, termasuk melakukan kerja sama dengan BPR yang memiliki jaringan hingga ke pelosok perdesaan sehingga bisa membantu pengembangan dunia usaha setempat, khususnya usaha kecil di perdesaan.[38]

Bagi masyarakat pedesaan Cirebon, sebagaimana diungkapkan oleh sebuah studi,[39] lembaga perbankan yang paling dekat dan mudah diakses oleh mereka adalah Bank Perkreditan Rakyat (BPR) dan tentunya Bank Rakyat Indonesia yang memiliki cabang-cabang di pedesaan (BRI Unit Desa). Berbeda dengan BRI yang merupakan milik pemerintah pusat dan memiliki program unggulan seperti Simpedes dan Kupedes, BPR umumnya merupakan badan usaha milik daerah (BUMD) atau milik individu/ organisasi swasta. Studi tersebut mengungkapkan bahwa di Cirebon—seperti di daerah lain—BPR tidak mampu mengimbangi popularitas BRI yang profesional dan *bonafide*, meskipun dari segi jangkauan BPR relatif lebih luas dibandingkan BRI. Barangkali itulah yang mendorong BPR menawarkan plafon kredit lebih rendah dengan persyaratan yang mudah dan sederhana. Sebagai contoh, BPR Klayan, Kecamatan Cirebon Utara, menawarkan pinjaman di bawah 1 juta rupiah dengan sistem *fiducia,* yaitu dengan jaminan surat pemilikan barang berharga, seperti BPKB kendaraan bermotor. Selain itu, BPR Klayan menawarkan plafon kredit

38 "Penyaluran KUK Sudah Capai Rp27,7 Trilyun," *Kompas*, 14 April 1994.

39 Sartono, dkk. (2000).

hingga 3-5 juta rupiah, dengan menandatangani surat ikatan utang dengan notaris. Selain BRI dan BPR, lembaga kredit formal lain yang bisa mereka akses dengan mudah adalah KUD dan Kredit Program.

Di Cirebon, KUD merupakan lembaga penyalur dan pengelola KUT (Kredit Usaha Tani), yang bisa memberikan kredit 1 juta rupiah atau lebih. Selain program kredit perbankan, terdapat pula sejumlah program bantuan dana berbentuk pinjaman dana bergulir yang dikeluarkan pemerintah untuk membantu pengembangan usaha kecil di perdesaan. Program itu antara lain Takesra/Kukesra dari Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional; UEDSP (Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam) dari Pemerintah Pusat melalui Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa; UP2K (Usaha Peningkatan Penghasilan Keluarga) dari Pemerintah Daerah Cirebon; dan PDMDKE (Program Pemberdayaan Daerah dalam Mengatasi Dampak Krisis Ekonomi) dari Pemerintah Pusat sebagai Jaring Pengaman Sosial.[40]

Selain lembaga perbankan dan perkreditan formal tersebut, penduduk perdesaan Cirebon juga mengenal dan menggunakan jasa berbagai kredit informal, semisal bank harian atau bank keliling, rentenir, kredit barang atau *mindring*, warung/kios, arisan, dan kredit jaringan usaha/kerja. Kredit-kredit informal ini menjadi alternatif bagi penduduk desa ketika lembaga perbankan/perkreditan formal tidak tersedia atau berlokasi jauh dari tempat tinggal mereka, atau karena kendala tertentu. Penelitian Tim Smeru di Desa Mertasinga, Cirebon Utara, mengungkapkan sejumlah kendala orang-orang desa yang menghambat mereka untuk mengakses kredit, yakni

> *"kendala budaya" berupa rasa minder dan takut berhubungan dengan lembaga resmi, kendala pola pendapatan (pendapatan tidak tetap vs sistem angsuran teratur), kendala kepemilikan jaminan tambahan (tidak memiliki jaminan tambahan), prosedur dan persyaratan pinjaman perbankan yang rumit, kendala takut menghadapi tunggakan, rentabilitas dan tingkat pengembalian yang tinggi.*[41]

40 Sartono, dkk. (2000: 15–28).

41 Sartono, dkk. (2000: 41–3).

Dapat disimpulkan bahwa tidak semua penduduk di wilayah Kabupaten Cirebon dan Kotamadya Cirebon bisa memanfaatkan bermacam program kredit yang disalurkan pemerintah, terutama yang diarahkan untuk mendorong usaha produktif. Program seperti KIK/KPMK hanya bisa diakses oleh penduduk/nasabah yang berkemampuan mengembangkan usaha kreatif, membentuk organisasi produksi, dan memiliki pengetahuan tentang teknologi dan pasar. Dengan kata lain, kredit-kredit tersebut lebih banyak dimanfaatkan oleh para pengusaha, khususnya yang memiliki skala usaha tingkat menengah. Sementara usaha berskala kecil terutama di sektor pertanian, perikanan, dan peternakan hanya sedikit yang mampu mengakses program perkreditan yang disediakan baik oleh Bank Indonesia maupun Pemerintah Pusat dan Daerah.

## PEREKONOMIAN CIREBON PADA MASA ORDE BARU

Bagi pelaku usaha kecil dan menengah di Cirebon, peran Bank Indonesia dalam mendorong perkembangan dan pembangunan ekonomi di wilayah itu, melalui program perkreditan sejak awal 1970-an, sangat dirasakan manfaatnya. Meski demikian, patut pula dicatat bahwa tidak (atau belum) seluruh pelaku ekonomi kerakyatan bisa menikmati program tersebut. Data penyaluran kredit KIK dan KMKP (1981), misalnya, menunjukkan hanya 663 orang/usaha yang menerima KIK dan 913 orang menerima KMKP.[42] Jumlah tersebut relatif kecil dibandingkan dengan total perusahaan atau pengusaha yang bergerak di berbagai sektor ekonomi di wilayah Cirebon.

Sebagai gambaran, berdasarkan catatan Kantor Statistik Cirebon, dalam sektor industri saja, terdapat 7.498 perusahaan pada 1981. Dari jumlah tersebut, 4 perusahaan berskala besar yang seluruhnya bergerak dalam industri makanan; 4 perusahaan industri sedang bergerak dalam kimia; 6.219 perusahaan industri kecil, yang bergerak dalam pengolahan

42 Lihat kembali Tabel 5.2 dan Tabel 5.3.

tanah (274), industri logam (59), industri tekstil (408), penggaraman (5.052), industri kerajinan rotan dan kayu (426); serta 883 usaha industri rumah tangga meliputi kerajinan bambu (460), makanan (414), dan sisanya (9) industri minuman. Sementara itu, pada tahun yang sama jumlah perusahaan perdagangan mencapai 1.804 buah, yang terdiri dari 14 perusahaan perdagangan besar, 312 perusahaan perdagangan sedang, dan 1.478 perusahaan perdagangan kecil.[43]

Situasi sedikit berbeda terlihat di wilayah Kota Cirebon, di mana distribusi Program KIK dan KMKP, berdasarkan data tahun 1985, lebih banyak tersalurkan ke sektor perdagangan.[44] Hal ini cukup masuk akal mengingat perdagangan merupakan sektor ekonomi utama di wilayah Kota Cirebon. Laporan Kantor Statistik Kotamadya Cirebon (1985) menunjukkan terdapat 4.476 perusahaan bergerak dalam sektor perdagangan, yang terdiri dari 134 perusahaan perdagangan partai besar, 2.770 partai menengah, dan 1.572 partai kecil. Sementara itu, tidak seperti di wilayah Kabupaten Cirebon yang mencatat cukup banyak industri kecil dan menengah, di daerah Kota terdapat 63 industri berskala besar, yang sebagian besar (40 perusahaan) beroperasi dalam bidang makanan, minuman dan tembakau. Laporan yang sama tidak menyebutkan sama sekali keberadaan perusahaan industri berskala kecil dan menengah beroperasi di kota itu.[45]

Data-data tersebut baru sebatas menggambarkan persebaran dan serapan kredit KIK/KMKP pada 1980-an di wilayah Kota dan Kabupaten Cirebon.[46] Selain itu, sepanjang periode Orde Baru cukup banyak program kredit dan stimulus finansial lain untuk mendorong perkembangan ekonomi masyarakat luas. Namun, penyaluran kredit KIK/KMKP tersebut setidaknya memberi gambaran umum tentang peran penting Bank Indonesia dalam mendorong perkembangan UMKM atau ekonomi kerakyatan di wilayah Kabupaten dan Kota Cirebon. Betapapun program

43 Badan Pusat Statistik (1981: 116, 140).

44 Lihat kembali Tabel 5.4 dan 5.5.

45 Kantor Statistik Kotamadya Cirebon (1985: 93, 108–11).

46 Diperlukan kajian mendalam lebih lanjut dengan dukungan data yang lengkap untuk mengetahui bagaimana dampak program perkreditan tersebut bagi perkembangan dunia usaha dan perekonomian di kedua wilayah administratif tersebut.

kredit itu baru dinikmati oleh sebagian kecil pengusaha atau pedagang di wilayah tersebut, tetapi sudah cukup membantu kesinambungan dari salah satu sektor ekonomi tradisional yang telah menjadi tulang punggung ekonomi sejak periode akhir kolonial.

Sepanjang sejarahnya, sektor ekonomi kerakyatan senantiasa berdampingan dan mendapatkan stimulan ekonomis tidak langsung dari aktivitas ekonomi modern berskala besar, terutama di sektor agroindustri dan perdagangan. Di wilayah Kabupaten Cirebon, sektor agroindustri terpenting tentu saja perkebunan tebu dan pabrik gula. Tidak seperti wilayah lain di Pulau Jawa, daerah Cirebon dan sekitarnya masih menyaksikan sejumlah pabrik gula yang semuanya didirikan pada masa kolonial dan mampu terus beroperasi pada masa kemerdekaan di bawah pengelolaan Pemerintah Indonesia. Pejabat sementara Bupati Cirebon R. Soemioto mencatat bahwa pada 1966 terdapat empat pabrik gula yang masih beroperasi di wilayah Cirebon, yaitu Pabrik Gula Gempol (dipimpin oleh Mayor R. A. Sanoesi), Pabrik Gula Tersana Baru (dipimpin oleh R. Hantio), Pabrik Gula Sindanglaut (dipimpin oleh R. Sumitro), dan Pabrik Gula Karangsuwung (dipimpin oleh Mayor Basaari).[47] Keempat pabrik gula tersebut didirikan pada akhir abad ke-19, sekitar akhir 1950-an dinasionalisasi oleh Pemerintah Indonesia; berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 159 Tahun 1961 keempatnya kemudian dioperasikan sebagai Perusahaan Perkebunan Negara (PPN) dan dikelola oleh PT Rajawali Nusantara Indonesia.[48]

Pada awal Orde Baru, keempat pabrik gula tersebut beroperasi dengan tetap menggunakan pola lama, yaitu menyewa tanah penduduk untuk ditanami tebu dengan sistem *glebagan* dan masa sewa antara satu hingga lima tahun. Menurut catatan R. Soemioto, pada 1966 keempat pabrik gula tersebut menyewa total 6.020 hektar lahan tanaman tebu. Dengan pola operasi seperti itu, pabrik-pabrik gula tersebut memberikan manfaat ekonomi bagi para petani pemilik lahan, selain bagi buruh tani yang bekerja baik di perkebunan maupun di pabrik gula. Sayangnya, operasional keempat pabrik tersebut tidak didukung upaya peremajaan

47 Soemioto (2007: 41).

48 Lihat https://rajawali2.co.id/pg-sindang-laut/ diunduh 7 Oktober 2020.

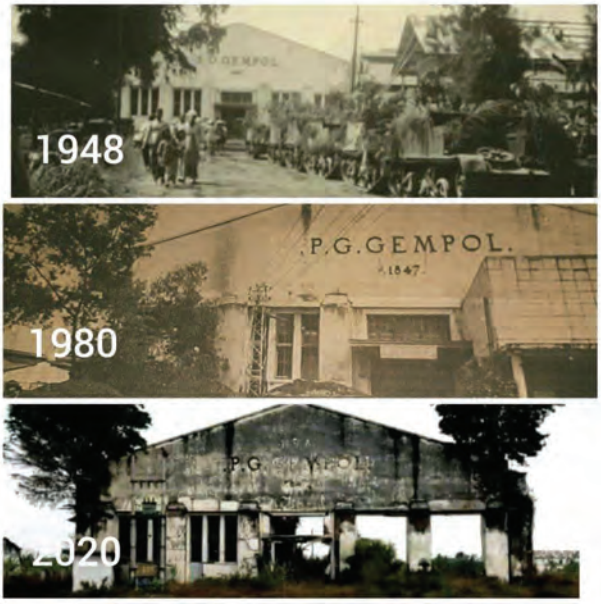


**Gambar 5.2.** Kondisi Pabrik Gula Gempol di Palimanan, Kabupaten Cirebon, dari masa ke masa

Sumber: Public Source

mesin dan teknologi, jaminan ketersediaan bahan baku tebu, dan proteksi atas produk yang dihasilkan. Setelah beroperasi sekitar satu abad, keempat pabrik gula tersebut mengalami kesulitan beroperasi, dan bahkan akhirnya harus tutup. Pabrik Gempol, misalnya, menjadi yang pertama harus berhenti beroperasi pada 1995, kemudian disusul oleh PG Karangsuwung (2014), dan terakhir PG Sindanglaut yang harus menghentikan operasinya pada Februari 2020. PG Tersana Baru menjadi satu-satunya pabrik yang masih beroperasi hingga saat ini, tetapi juga menghadapi berbagai kondisi yang makin sulit.[49]

49 Tentang PG Gempol dan Karangsuwung lihat https://money.kompas.com/read/2014/08/18/101900426/RNI.Hentikan.Operasional.Pabrik.Gula.Karang.Suwung.di.Cirebon; sedangkan tentang PG Sindanglaut lihat https://www.radarcirebon.com/2020/02/19/pg-sindanglaut-berhenti-setelah-122-tahun-beroperasi, diakses 7 Oktober 2020.

Perusahaan besar lain yang terhitung penting di Cirebon adalah British American Tobacco, perusahaan Inggris yang bergerak di bidang industri tembakau, dan membuka cabangnya di Cirebon pada 1924. Keberadaan fisiknya cukup menonjol karena memiliki gedung besar bergaya *artdeco* yang terletak di kawasan kota tua Cirebon dan berdekatan dengan pelabuhan. Seperti halnya pabrik gula, BAT termasuk "perusahaan kolonial" yang mampu bertahan hingga beberapa dekade setelah Indonesia merdeka. Pada 1930, perusahaan itu dilaporkan mampu memproduksi 17,5 juta batang rokok sehari dan mempekerjakan 1.700 karyawan. Sempat tutup pada masa perang, BAT kembali buka pada 1949 dan mampu bertahan hingga saat ini. Sejak 2010, perusahaan itu mengakuisisi mayoritas saham PT Bentoel dan memutuskan memindahkan kantor pusatnya ke kota Malang.[50]

Keberadaan perusahaan multinasional besar seperti BAT di Cirebon, tidak bisa dilepaskan dari posisi strategis kota itu sebagai kota perdagangan yang didukung infrastruktur transportasi, yaitu pelabuhan untuk perdagangan maritim dan kereta api serta bus antarkota sebagai sarana angkutan darat. Kota Cirebon, dengan demikian, menjadi simpul jaringan transportasi Jawa, baik laut, darat dan terakhir angkutan udara. Tidak mengherankan jika sektor perdagangan juga berkembang sebagai sektor ekonomi "tradisional" di kota itu; didukung banyak bangunan kantor dan gudang milik perusahaan besar nasional di pusat kota dan terutama di kawasan pelabuhan.[51] Menurut BPS, jumlah perusahaan nasional yang "hidup" di Kota Cirebon dan sekitarnya pada 1978 berjumlah 1.457 buah. Jumlah itu meningkat tajam pada 1980 menjadi 2.363 buah, dan kembali meroket menjadi 4.476 buah pada 1985.[52]

Pelabuhan Cirebon dipandang sebagai pintu gerbang ekonomi Jawa Barat. Meski demikian dalam perkembangannya, pelabuhan itu

50 Lihat https://merahputih.com/post/read/gedung-bat-cirebon-saksi-bisu-kejayaan-tembakau-di-cirebon. Tentang BAT, lihat laman resmi PT Bentoel: http://www.bentoelgroup.com/group (diakses 7 Oktober 2020). Informasi singkat tentang BAT dan perusahaan Inggris lain di Indonesia pada masa Orde Lama, bisa dibaca dalam Nicholas J. White, "Surviving Sukarno: British Business in Post-Colonial Indonesia, 1950–1967," *Modern Asia Studies*, 46 (5), 2012, hlm 1277–1315.

51 Liputan "HUT ke-637 Kota Cirebon: Kota Dagang dan Industri, Tetapi Daya Beli Rendah," *Kompas*, 19 Januari 2007.

52 Kantor Statistik (1985: 93, Tabel 7.1)

mengalami kemunduran dan kalah bersaing dengan pelabuhan lain di sekitarnya, seperti Pelabuhan Tegal dan Cilacap. Menurut sebuah sumber, kemerosotan itu mulai terlihat setelah tahun 1975, terutama setelah beberapa komoditi, yaitu minyak bumi, semen dan pupuk, tidak lagi dibongkar-muat di sana. Pada 1976, volume kegiatan bongkar-muat di Pelabuhan Cirebon tercatat 867.713 ton; kemudian menurun drastis pada 1980 menjadi 487.316. Padahal dari segi fasilitas, Pelabuhan Cirebon sebagai pelabuhan Nusantara Plus atau Pelabuhan Samudra Kelas II termasuk cukup memadai.[53] Untuk mengatasi kemerosotan itu, pada akhir 1980-an, Pemerintah Kota Cirebon menjadikan Pelabuhan Cirebon sebagai kawasan industri dan pembangunannya dijadikan prioritas tinggi sehingga bisa menjadi "pemimpin" bagi pembangunan kota pada tahun-tahun berikutnya.[54]

**Gambar 5.3.** Situasi Pelabuhan Cirebon sebagai lokasi keluar masuknya barang-barang komoditas dari dan menuju Cirebon

Sumber: //www.wikiwand.com/id/Pelabuhan_Cirebon

53 "Mengintip Pelabuhan Cirebon (I), Sampai Masuk Iklan Bioskop Segala," *Kompas*, 26 Oktober 1981.

54 "Kawasan Industri dan Pelabuhan, Prioritas Pembangunan Cirebon," *Kompas*, 17 Maret 1988. Sayangnya tidak ditemukan informasi lanjutan tentang realisasi program tersebut dan bagaimana dampaknya bagi perekonomian Kota Cirebon.

**Gambar 5.3.** Situasi Pelabuhan Cirebon sebagai lokasi keluar masuknya barang-barang komoditas dari dan menuju Cirebon (Lanjutan)

Sumber: //www.wikiwand.com/id/Pelabuhan_Cirebon

Meskipun aktivitas Pelabuhan Cirebon mengalami penurunan, kondisi itu tidak terlalu mengganggu perkembangan perdagangan di Kota Cirebon. Hal itu terbukti dari pertumbuhan jumlah perusahaan perdagangan yang terus meningkat. Pada 1975, terdapat 58 perusahaan perdagangan besar, 187 perusahaan menengah, dan 222 perusahaan kecil, sehingga total 468 buah perusahaan. Pada 1980, jumlah itu naik berlipat ganda menjadi 2.363 buah perusahaan, yang terdiri dari 186 perusahaan besar, 1.308 perusahaan menengah, dan 669 perusahaan kecil. Pada 1985, jumlah itu kembali meningkat menjadi 4.476 buah perusahaan, yang terdiri dari 134 perusahaan besar, 2.770 perusahaan menengah, dan 1.572 perusahaan kecil. Pada saat yang sama kontribusi sektor perdagangan terhadap Produk Domestik Bruto Kota Cirebon juga terus meningkat. Pada 1975, kontribusinya mencapai 14,7 miliar rupiah atau sekitar 30 persen, terbesar kedua setelah sektor industri. Kemudian pada 1980, jumlah itu meningkat menjadi 44,8 miliar rupiah atau sekitar 32 persen—kali ini menjadi penyumbang terbesar terhadap PDRB.[55]

55 Kantor Statistik (1985: 133, Tabel 10.1).

Seperti halnya di wilayah Kota Cirebon, sektor perdagangan menempati posisi penting dalam perkonomian Kabupaten Cirebon. Bedanya, jika di Kota sektor perdagangan menjadi penyumbang terbesar dalam PDRB setempat, di Kabupaten merupakan penyumbang terbesar kedua setelah sektor pertanian. Struktur perkonomian di wilayah Kabupaten Cirebon memang masih bersifat tradisional, di mana pertanian menjadi sektor ekonomi utama tempat sebagian besar penduduknya menggantungkan hidup. Bahkan hingga 2001, sektor pertanian masih menjadi penyumbang terbesar dalam PDRB lokal yaitu 2.2 triliun rupiah atau sekitar 38 persen dari total PDRB, jauh di atas sektor perdagangan yang hanya menyumbang 1.2 triliun rupiah (21,4 persen) atau sektor industri yang menyumbang 644,9 miliar (11 persen). Ironisnya, besarnya kontribusi pertanian terhadap PDRB tersebut terjadi bersamaan dengan makin berkurangnya lahan persawahan dan meningkatnya tekanan demografis di wilayah itu. Sebagai gambaran, pada 1966 luas lahan pertanian (sawah) di wilayah Kabupaten Cirebon adalah 65.655.8 hektar yang menopang kebutuhan pangan bagi 945.678 jiwa penduduknya. Pada 2001, luas lahan sawah telah menurun lebih dari separuhnya menjadi 36.073 hektar, dengan jumlah penduduk yang berlipat ganda menjadi 1.939.955 jiwa. [56]

Dalam kondisi dan struktur perekonomian seperti itulah, sektor ekonomi luar-tani menjadi alternatif bagi banyak penduduk pedesaan untuk mencari sumber kehidupan. Sektor tersebut antara lain meliputi perdagangan dan industri (dalam berbagai skala), transportasi, pertambangan, dan jasa. Dalam konteks wilayah Cirebon, aktivitas non-pertanian tersebut memiliki akar historis panjang yang membentang hingga periode akhir kolonial. Dua sektor ekonomi non-pertanian terpenting di wilayah ini adalah perdagangan dan industri kecil dan industri rumah tangga.[57] Pada awal masa jabatannya (1966), Bupati Cirebon R. Soemioto menegaskan posisi penting pekerjaan di luar pertanian tersebut sebagai sumber pendapatan penduduknya. Di antara aktivitas non-pertanian yang dimaksud ialah kerajinan batik yang berkembang di Trusmi dan

56 Data tahun 1966 diambil Soemioto (2007: 66, 83); dan data tahun 2001 diambil dari *Kabupaten Dalam Angka Tahun 2005/2006* (Tabel 5.1.1, hlm 41).

57 Padmo dalam Lindblad, ed. (1991: 11022); Tim Peneliti SMERU (2002).

Kalitengah, Kecamatan Weru; pertenunan di Desa Megu, Bodelor, Kasugengan, dan Marikangen di Kecamatan Plumbon; kerajinan tangan di Desa Danawinangun, Kecamatan Klangenan, pembuatan genteng dan bahan bangunan di Kecamatan Ciwaringin dan Karangsembung; tambang kapur di Kecamatan Palimanan dan Ciwaringin; kerajinan emas di Desa Keduanan, Kecamatan Plumbon, dan usaha penangkapan dan penambakan ikan/udang di Kecamatan Losari, Kapetakan, Cirebon Utara, Astanajapura, dan Babakan.[58]

Dalam perkembangannya, sebagian dari aktivitas ekonomi tersebut mengalami pasang-surut, sebagian bisa bertahan dan sebagian harus berhenti karena berbagai faktor. Meski demikian, kreativitas ekonomi penduduk di wilayah Cirebon tidak pernah berhenti, mereka terus berupaya menciptakan berbagai usaha produktif dan menangkap berbagai kesempatan ekonomi baru. Sebagai contoh ialah munculnya kawasan Tegalgubug, Arjawinangun, sebagai pusat perdagangan sandang dan industri kerajinan berbasis tekstil yang dirintis oleh kiai dan pemimpin di desa tersebut. Sebuah studi mengungkapkan bahwa industri dan perdagangan sandang di Tegalgubug itu berawal dari Pasar Klemprakan yang menjual produk hasil kerajinan sandang penduduk lokal pada 1970-an. Saat itu jumlah pedagang yang aktif berjualan belum banyak karena sebagian besar berasal dari pasal lokal. Pasar tersebut berkembang pesat sehingga ditetapkan menjadi Pasar Induk Sandang Tegalgubug pada 1966 yang menampung lebih dari 3.000 pedagang dari berbagai daerah di Cirebon ataupun dari luar Cirebon.[59] Saat ini, Pasar Tegalgubug dianggap sebagai salah satu pasar sandang terbesar di Indonesia, dan bahkan di Asia Tenggara.[60]

58 Soemioto (2007: 39–40. Sayangnya, Soemioto tidak melengkapi informasi tersebut dengan data-data kuantitatif seputar kapasitas produksi dan jumlah tenaga kerja atau rumah tangga yang terserap dalam sektor ekonomi tersebut.

59 Arovah (2019: 77–86, 109–15).

60 Lihat https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-3584499/cirebon-bakal-punya-pusat-belanja-pakaian-terbesar-di-asia, diunduh 8 Oktober 2020.

**Gambar 5.4.** Pasar Induk Tegalgubug yang digadang-gadang sebagai salah satu pasar sandang terbesar di Indonesia dan bahkan di Asia Tenggara
Sumber: http://ditjenpdn.kemendag.go.id/files/pdf/2014/10/03/pdnmjl09ioktober2010-1412270444

Aktivitas ekonomi non-pertanian lain yang juga muncul belakangan ialah industri kerajinan rotan, yang kemudian berkembang menjadi sektor ekonomi primadona andalan Kabupaten Cirebon karena besarnya sumbangan ekonomi yang dihasilkan. Pada saat ini industri kerajinan rotan telah berkembang dan menyebar di wilayah Weru, Plumbon, Depok, dan Plered. Pada 2005,total ada 864 unit usaha kerajinan rotan yang aktif berproduksi, menyerap 47.794 tenaga kerja. Produknya berupa kerajinan serba-rotan, seperti *furniture*, mainan, dan perlengkapan rumah tangga dengan total kapasitas produksi 56.669 ton per tahun; nilai ekonomisnya mencapai 1,048 triliun rupiah. Sekitar 93 persen produk kerajinan mebel rotan itu diekspor ke luar negeri dan hanya 7 persen dipasarkan di dalam negeri. Pada 2005, volume ekspor mebel rotan dari Cirebon mencapai 1.757 kontainer dengan nilai ekenomis sebesar 125.378.467,61 dolar Amerika Serikat.[61]

Dibandingkan dengan industri kerajinan lain di Cirebon, khususnya batik yang memiliki sejarah panjang, industri kerajinan rotan relatif baru. Setidaknya terdapat dua versi cerita yang menjelaskan tentang awal mula industri rotan berkembang di Cirebon. Versi pertama mengatakan bahwa

61 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Cirebon (2005: III–2).

industri kerajinan rotan di Cirebon dirintis pada 1938 oleh dua orang pengusaha yaitu The A Hock dan Shobari, dibantu oleh seorang penduduk lokal yang berasal dari Desa Tegalwangi, bernama Sama'un. Perlahan tapi pasti usaha berkembang, dan mulai menghasilkan keuntungan ekonomis sehingga menarik minat penduduk setempat ikut bergabung. Usaha rumahan itu berkembang menjadi industri modern berorientasi ekspor pada awal 1970-an berkat bantuan teknis dan finansial dari pemerintah.[62]

Sementara itu, versi kedua menyebutkan bahwa sejarah awal industri kerajinan rotan di Cirebon tidak terlalu jelas, diusahakan di rumah-rumah tinggal di Desa Tegalwangi, Kecamatan Weru. Awalnya, usaha berjalan secara tradisional, tetapi mengalami perubahan sejak awal 1970-an ketika Pemerintah Daerah, bersama-sama dengan sejumlah lembaga perbankan, pendidikan, dan lembaga swadaya masyarakat, memberikan pelatihan dan pendampingan teknis kepada perajin rotan setempat. Hasilnya, para perajin mampu menghasilkan berbagai produk baru yang menarik dan berkualitas lebih baik sehingga memiliki nilai ekonomis tinggi untuk dijual di pasar lokal ataupun internasional. Sejak

**Gambar 5.5.** Kawasan pusat industri rotan yang berada di Desa Tegal Wangi, Kecamatan Weru, Cirebon

Sumber: https://blog.negerisendiri.com

62 Guritno dan Manulang (1999: 20).

saat itu, industri kerajinan rotan menyebar ke desa-desa sekitarnya dan menjadi sumber kehidupan penduduk setempat. Pada 1980/90-an aliran investasi mulai mengalir dan beberapa pabrik rotan berskala besar berdiri di Desa Tegalwangi, mengubah karakter usaha ini menjadi industri skala besar; bahkan investor asing mulai ikut bermain di dalam bisnis ini.[63]

Aspek positifnya, berkembangnya pabrik-pabrik rotan berskala besar tersebut tidak mematikan pengusaha rotan skala kecil dan menengah; sebaliknya justru mendorong peningkatan jumlahnya. Hal itu karena pabrik besar mengembangkan kerja sama melalui mekanisme subkontrak dengan perajin dan pengusaha lokal. Hasilnya, industri kerajinan rotan di Cirebon terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Sebuah studi melaporkan bahwa pada 1996 usaha rotan di Cirebon berjumlah 828 unit dan meningkat menjadi 909 unit pada 2000. Pada waktu itu, 50.644 tenaga kerja terserap, dengan nilai investasi 102 miliar rupiah yang mampu menghasilkan 604 ribu ton produk meubel senilai 839 miliar rupiah.[64] Hampir seluruh produk industri rotan Cirebon diekspor ke pasar internasional. Menariknya, krisis ekonomi yang terjadi pada 1998 justru memberikan keuntungan besar bagi industri rotan Cirebon. Depresiasi nilai rupiah terhadap dolar ternyata justru melipatgandakan keuntungan yang diraih para pengusaha eksportir rotan. Asosiasi Industri Permebelan dan Kerajinan Indonesia (Asmindo) Komisariat Cirebon melaporkan bahwa pada 1999 nilai ekspor produk rotan Cirebon mencapai 84,38 juta dolar AS. Nilai itu terus meningkat pada tahun selanjutnya menjadi 91,55 juta dolar AS (2000), kemudian 101,67 juta dolar AS (2003), dan sekitar 116,57 dolar AS pada 2004. Jumlah penduduk lokal yang menggantungkan hidupnya di sektor itu mencapai 400.000 orang.[65]

Terlepas dari berbagai kemajuan dan pencapaian tersebut, industri rotan Cirebon menghadapi sejumlah kendala dan tantangan baru. Salah satu masalah besar yang dihadapi industri rotan Cirebon ialah tidak

63 Tim Peneliti Smeru (2002: 7).

64 Tim Peneliti Smeru (2002: 4).

65 Liputan "Mebel Rotan Cirebon, dari Industri Rumahan sampai Eksportir," *Kompas*, 24 Februari 2005. Dengan fakta-fakta tersebut, tidak berlebihan jika media nasional itu menyebut Cirebon seharusnya tidak lagi dijuluki sebagai Kota Udang, tetapi Kota Rotan.

adanya paten atau hak cipta atas produk atau desain kreasi para perajin. Akibatnya, model-model yang mereka hasilkan sering diduplikasi oleh sesama perajin atau bahkan diklaim oleh pabrik besar atau produsen mebel rotan luar negeri.[66] Selain itu, para perajin menghadapi masalah modal, pemasaran, dan bahan baku. Sejumlah perajin mengeluhkan lesunya pasar *furniture* internasional yang menyebabkan ekspor mereka turun hingga 35 persen. Pada saat yang sama mereka harus membayar bunga kredit bank yang tinggi dan cukup memberatkan. Berkenaan dengan bahan baku, para pengusaha rotan Cirebon mengaku kesulitan mendapatkan pasokan yang berkualitas. Persoalan suplai bahan baku ini juga dirasakan perajin sandang di Tegalgubug dan perajin batik di Trusmi. Rupanya, industri kerajinan Cirebon tengah menghadapi tantangan berat yang membutuhkan dukungan pemerintah untuk mengatasinya. Sebenarnya, dukungan sudah diberikan, tetapi seberapa jauh bisa membantu mengatasi persoalan masih belum bisa diketahui. [67]

Pada 2005, Pemerintah Kabupaten Cirebon menerbitkan studi proyeksi pengembangan industri di wilayah itu.[68] Disebutkan bahwa Pemerintah Kabupaten memproyeksikan delapan kawasan yang akan dikembangkan sebagai klaster industri di wilayah Kabupaten Cirebon; sekaligus sebagai motor penggerak perekonomian wilayah ini. Klaster tersebut ialah:

1. Plered dan Tengah Tani sebagai kawasan industri batik tulis dan batik cap
2. Dukupuntang, Palimanan, Gempol, dan Depok sebagai kawasan industri batu alam dan ornamen
3. Kedawung sebagai kawasan industri melinjo
4. Arjawinangun sebagai kawasan industri pakaian jadi
5. Plered dan Weru sebagai kawasan industri makanan ringan, roti dan kue

66 Tim Peneliti Smeru (2002: 5).

67 "Sejumlah Kendala Hadang Industri Cirebon. Pemkab Kucurkan Modal dan Siapkan Padat Karya," *Kompas*, 14 April 2009.

68 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Cirebon (2005: IV–7).

6. Dukupuntang dan Depok sebagai kawasan industri mebel kayu
7. Plered, Weru, Plumbon, dan Depok sebagai kawasan industri rotan
8. Plumbon sebagai kawasan industri sandal

Proyeksi tersebut jelas disusun dengan mempertimbangkan perkembangan sektor perdagangan dan industri yang makin saling terkait dan kontribusinya yang terus meningkat bagi PDRB Kabupaten Cirebon. Data yang dikeluarkan BPS pada 2005 menunjukkan bahwa di wilayah Kabupaten Cirebon terdapat 251 perusahaan industri besar/sedang yang mempekerjakan sekitar 26.000 orang; sedangkan di sektor perdagangan tercatat 17 perusahaan berskala besar, 47 berskala sedang, dan 646 berskala kecil. Kedua sektor ekonomi tersebut pada 2005 secara bersamaan menyumbang sekitar 15 persen terhadap PDRB Cirebon. Dari sisi komoditas, terdapat setidaknya empat komoditi di sektor industri dan perdagangan ini yang memiliki nilai ekonomis dan ekspor paling tinggi, yaitu kerajinan rotan (130.234.772 dolar AS), benang tenun/tekstil (20.404.141 dolar AS), udang beku (4.486.776 dolar AS), dan batik (1.167.373 dolar AS).[69] Data-data tersebut makin menegaskan bahwa perdagangan dan industri merupakan sektor unggulan yang menjadi ciri khas dan jati diri perekonomian Kabupaten Cirebon pada masa mendatang. Sektor-sektor itulah yang menjadi tulang punggung UMKM di wilayah itu, yang sejak 1970-an turut dibina dan dibantu perkembangannya oleh Kantor Perwakilan Bank Indonesia Cirebon.

Dapat disimpulkan bahwa Bank Indonesia berperan penting membantu keberhasilan program pembangunan sejak awal pemerintahan Orde Baru. Peran tersebut diwujudkan melalui penyediaan skema kredit untuk pengembangan dan penguatan sektor pertanian dan masyarakat pedesaan sejak awal 1970-an yang berhasil menyokong kesuksesan program swasembada pangan pada pertengahan dasawarsa berikutnya. Selain itu, BI membantu mewujudkan komitmen pemerintah untuk menciptakan program pembangunan yang bersifat *pro-poor* melalui program kredit bagi usaha mikro, kecil dan menengah sejak awal 1980-an, yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat kecil di perdesaan dan

69 Badan Pusat Statistik (2006: 90).

perkotaan. Melalui skema kredit tersebut, BI berkontribusi langsung pada upaya pemberdayaan ekonomi kerakyatan yang menjadi tulang punggung perekonomian nasional. Dalam konteks wilayah Cirebon dan sekitarnya, program perkreditan BI tersebut berkontribusi menjaga keberlangsungan sektor ekonomi kerakyatan, pertanian dan perdagangan yang merupakan sektor-sektor ekonomi tradisional di wilayah itu, di mana akar sejarahnya telah tertanam sejak periode kolonial dan menjadi identitas ekonomi wilayah ini.

BAB 6

# Kiprah Bank Indonesia Cirebon Mutakhir

Keberadaan Bank Indonesia di Cirebon direpresentasikan oleh Bank Indonesia Wilayah III Cirebon. Cakupan wilayah kerjanya cukup luas meliputi Kota Cirebon, Kabupaten Cirebon, Kabupaten Indramayu, Kabupaten Majalengka, dan Kabupaten Kuningan. Sebagai bagian dari organisasi besar Bank Indonesia, Kantor BI Cirebon terus menyempurnakan kelembagaan sejalan dengan perubahan kebijakan kantor Pusat. Mengikuti perkembangan masyarakat Cirebon mutakhir yang makin komples, kiprah Kantor BI Cirebon pun makin dinamis. Berbagai program dijalankan secara inklusif, mulai dari pembangunan perkotaan hingga perhatian kepada pedesaan; dari pembangunan ekonomi berskala besar hingga keberpihakan kepada usaha ekonomi kerakyatan, pengembangan klaster ketahanan pangan, komoditas unggulan daerah, dan pengembangan ekonomi syariah.

## PENYEMPURNAAN KELEMBAGAAN

Penyebutan nama kantor Bank Indonesia di Cirebon beberapa kali mengalami perubahan seiring dengan perubahan struktur organisasi di internal Bank Indonesia. Awalnya, disebut Kantor Cabang Bank Indonesia Cirebon yang berlaku mulai 1 April 1986.[1] Pada 5 Juni 1996, sebutan

1 Arsip Bank Indonesia, SE No. 18/82/INTERN tanggal 20 Maret 1986 perihal Penyempurnaan Organisasi Kantor Cabang Bank Indonesia. Selanjutnya, dalam penulisan buku ini digunakan sebutan BI Cirebon.

berganti menjadi Kantor Bank Indonesia Cirebon.[2] Dalam perkembangan selanjutnya, sejak 30 September 2016 sampai dengan sekarang (2021), berganti menjadi Kantor Perwakilan Bank Indonesia Cirebon.[3]

Wilayah cakupan kerja BI Cirebon, menurut Surat Edaran No. 5/81 tanggal 14 September 1972 tentang Wilayah Kerja Pemimpin Cabang/ Kantor Kas Bank Indonesia, meliputi Kotamadya Cirebon dan daerah-daerah tingkat II Cirebon, Kuningan, Indramayu dan Majalengka. Sementara itu, per 1996 KBI Cirebon memiliki struktur organisasi seperti pada Bagan 6.1.

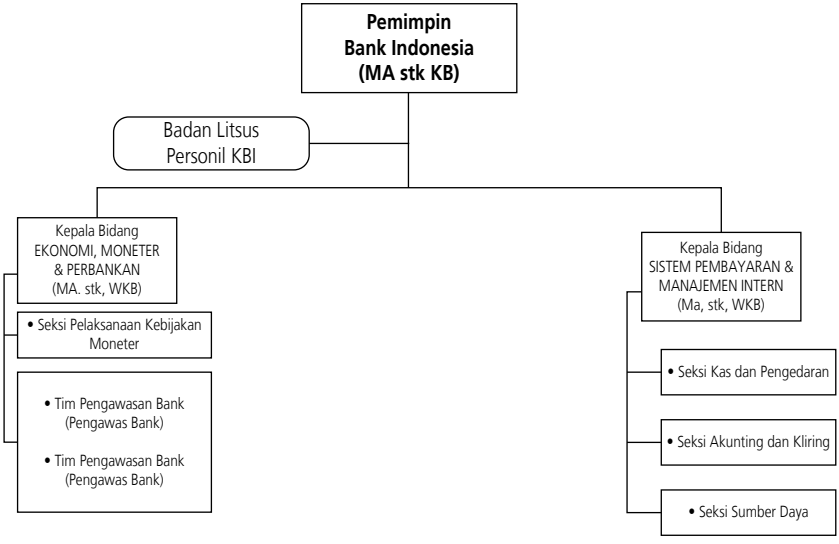


**Bagan 6.1.** Struktur Organisasi Kantor Bank Indonesia termasuk KBI Cirebon (1996)
Sumber: Arsip Bank Indonesia.

Salah satu aspek perubahan dalam penyempurnaan organisasi Kantor Bank Indonesia ialah pengklasifikasian Kantor BI ke dalam lima

2 Arsip Bank Indonesia, SE No. 29/8/INTERN tanggal 5 Juni 1996 tentang Penyempurnaan Organisasi Kantor Bank Indonesia.

3 Arsip Bank Indonesia, SE No. 18/13/INTERN tanggal 30 Maret 2016 tentang Perubahan Ketiga atas Surat Edaran No. 15/62/INTERN Perihal Organisasi Kantor Perwakilan Bank Indonesia Dalam Negeri (KPWDN).

kelas yakni Kelas I, Kelas II, Kelas III, Kelas IV, dan Kelas V. Klasifikasi tersebut didasarkan pada beban tugas di bidang ekonomi dan moneter, perbankan dan sistem pembayaran, serta tugas pengkoordinasian pada beberapa Kantor BI. Kriteria klasifikasi beban tugas masing-masing kantor membuktikan bahwa bobot masing-masing faktor menentukan urutan (kelas) kantor. Penentuan bobot ini betul-betul dikaitkan dengan strategi dan fokus BI untuk kantor cabang/perwakilan BI. Kantor BI Cirebon termasuk ke dalam kelompok Kantor BI Kelas III (Bagan 6.2).[4]

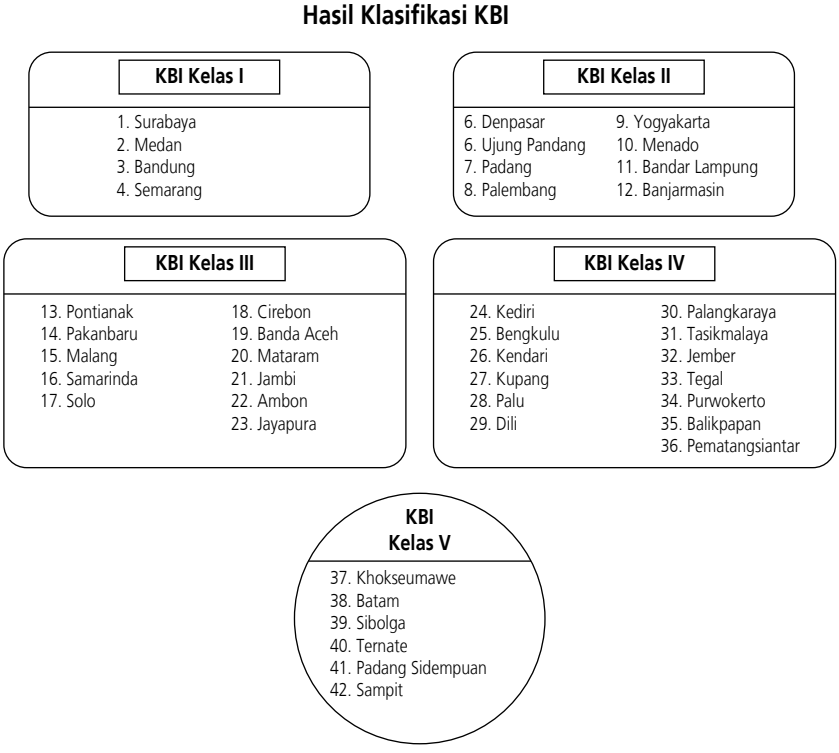


**Bagan 6.2.** Hasil Klasifikasi Kantor Bank Indonesia Cirebon

Sumber: Arsip Bank Indonesia.

4 Arsip Bank Indonesia, SE No. 29/8/INTERN tanggal 5 Juni 1996 tentang Penyempurnaan Organisasi Kantor Bank Indonesia.

Perubahan visi, misi, fungsi dan tugas Bank Indonesia—di tingkat pusat maupun kantor cabang/perwakilan—dilakukan pada 1994. Misi BI ialah mewujudkan stabilitas moneter, sistem perbankan yang sehat serta sistem pembayaran yang efisien dan terpercaya dalam rangka mendorong pembangunan nasional. Adapun bidang tugasnya terdiri dari empat sektor yaitu (1) Sektor moneter, sebagai perumus dan pelaksanaan kebijaksanaan moneter dan nilai tukar, serta menjadi pemelihara dan pengelola devisa nasional; (2) Sektor perbankan, sebagai pengatur, pembina, dan pengawas perbankan; (3) Sektor sistem pembayaran, sebagai pengatur dan pusat pengembangan sistem pembayaran, serta pengelola pengedaran uang kartal, dan (4) Manajemen intern.[5] Pada 2007, fungsi kantor cabang/perwakilan BI meliputi (a) Fungsi di Bidang Ekonomi Moneter, mencakup pemberdayaan sektor riil termasuk UMKM, melakukan kajian riset serta menjadi pusat informasi dan data ekonomi dan bisnis di daerah, termasuk melakukan fungsi kehumasan; (b) Fungsi di Bidang Sistem Pembayaran, dan (3) Fungsi di Bidang Perbankan, yang mencakup kegiatan pengawasan bank, perizinan, investigasi, mediasi dan intermediasi. [6]

Selanjutnya, pada 17 Mei 1999, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Sentral diundangkan dan disahkan. Undang-Undang ini dibuat untuk lebih mewujudkan independensi Bank Indonesia. Pada tanggal yang sama, diundangkan pula Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1999 tentang Lalu Lintas Devisa dan Sistem Nilai Tukar. Dengan UU yang baru ini, UU Nomor 32/1964 tentang Peraturan Lalu Lintas Devisa dinyatakan tidak berlaku. Berstatus sebagai Bank Sentral Republik Indonesia, BI ditetapkan sebagai lembaga negara yang independen, bebas dari campur tangan pemerintah dan/atau pihak-pihak lain, kecuali untuk hal-hal yang secara tegas diatur dalam undang-undang. Sebagai bank sentral, BI berkedudukan di Jakarta, ibu kota negara Republik Indonesia.

Terdapat banyak perubahan ketentuan dalam UU Nomor 23/1999, antara lain mengenai tujuan dan tugas, jumlah modal, serta ketentuan

5 Arsip Bank Indonesia, SE No. 27/39/KEP/DIR, Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia tentang Misi, Visi, Fungsi, dan Prinsip-prinsip Pengorganisasian Bank Indonesia, tanggal 1 Juli 1994.

6 Arsip Bank Indonesia, SE No. 9/12/INTERN tanggal 30 Maret 2007 perihal Penyempurnaan Organisasi Kantor Bank Indonesia Tahap I.

hubungan antara BI dengan pemerintah. Secara lebih spesifik, dalam undang-undang itu disebutkan tujuan BI ialah mencapai dan memelihara stabilitas nilai rupiah. Untuk mencapai tujuan itu, BI memiliki tugas menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter, mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran, serta mengatur dan mengawasi bank. Dalam hubungannya dengan pemerintah, BI bertindak sebagai pemegang kas pemerintah. BI dilarang memberikan kredit kepada pemerintah dan membeli untuk diri sendiri surat-surat utang negara, kecuali di pasar sekunder.

Akibat krisis ekonomi berkepanjangan, pada 1 November 1998 atau sesaat menjelang berakhirnya periode UU Nomor 13/1968, dilakukan penutupan kantor perwakilan Kuala Lumpur. Langkah ini diambil untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi tugas BI di luar negeri. Selanjutnya, operasional kantor perwakilan BI Kuala Lumpur, dialihkan ke kantor perwakilan BI Singapura.

Berhubungan dengan pemberlakuan UU Nomor 23/1999, terjadi perubahan dalam susunan jabatan di lingkup Bank Indonesia. Dalam hal ini, BI dipimpin oleh dewan gubernur yang terdiri atas seorang gubernur, seorang deputi gubernur senior, dan sekurang-kurangnya empat orang atau sebanyak-banyaknya tujuh orang deputi gubernur. Kala itu (1997-99), Gubernur BI dijabat oleh Syahril Sabirin. Sebutan satuan kerja urusan dan kepala urusan dalam struktur organisasi BI juga diubah menjadi direktorat dan direktur. Melalui Undang-Undang Nomor 23/1999 tersebut, BI memperoleh status sebagai Bank Sentral yang independen. Dengan demikian, BI merupakan lembaga negara yang independen, bebas dari campur tangan pemerintah dan/atau pihak-pihak lainnya, kecuali untuk hal-hal yang secara tegas diatur dalam undang-undang.

Tugas BI diarahkan pada satu sasaran (single objective), yaitu mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah. Setelah melalui perdebatan politik yang cukup intensif, pada pengujung 2003 disepakati amandemen terhadap UU Nomor 23/1999 yang kemudian ditetapkan sebagai Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 pada 15 Januari 2004. Dalam amandemen tersebut, tujuan BI tetap difokuskan pada pengendalian moneter, dengan tetap mengupayakan prinsip-prinsip keseimbangan antara independensi dan pengawasan, tanggung jawab

atas kinerja, serta akuntabilitas publik yang transparan. Selain itu, jika suatu bank mengalami kesulitan keuangan yang berdampak sistemik dan berpotensi mengakibatkan krisis yang membahayakan sistem keuangan nasional, BI akan memberikan pembiayaan darurat yang pendanaannya menjadi beban pemerintah.

## PEMBANGUNAN DAN SEKTOR EKONOMI KOTA CIREBON

Pembangunan ekonomi merupakan serangkaian usaha yang dilakukan dengan tujuan meningkatkan taraf hidup masyarakat; agar pendapatan masyarakat meningkat disertai tingkat pemerataan yang baik. Indikator ekonomi selalu digunakan untuk melihat pertumbuhan suatu daerah/wilayah. Indikator ekonomi yang digunakan ialah Produk Domestik Bruto (PDB) pada tingkat nasional, sedangkan untuk tingkat daerah dikenal dengan sebutan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Menurut data BPS, PDRB adalah jumlah nilai tambah bruto (*gross value added*) seluruh barang dan jasa yang tercipta atau dihasilkan di wilayah domestik suatu negara yang timbul akibat berbagai aktivitas ekonomi dalam suatu periode tertentu tanpa memperhatikan apakah faktor produksi yang dimiliki residen atau non-residen.[7]

Selain itu, digunakan data laju pertumbuhan ekonomi sebagai pelengkap. Pada 1995, laju pertumbuhan ekonomi (LPE) Kotamadya Cirebon meningkat pesat dibandingkan tahun sebelumnya. Tahun 1995, LPE Kotamadya Cirebon mencapai 9,13 persen, sedangkan tahun 1993 dan 1994 masing-masing 8,02 persen dan 7,03 persen. Laju pertumbuhan ekonomi tahun ini bahkan lebih tinggi dibanding rata-rata Jawa Barat yang mencapai 7,5 persen.[8]

Keberhasilan pembangunan Kota Cirebon merupakan usaha dan upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Cirebon. Sebagaimana

7 Residen adalah unit institusi yang mencakup penduduk/rumah tangga, perusahaan, pemerintah lembaga nonprofit bila mempunyai/melakukan kegiatan ekonomi di suatu wilayah (Indonesia).

8 "Cirebon Tak Kembangkan Industri Berskala Besar," *Kompas*, 4 November 1996.

tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Kota Cirebon menjadi kota perdagangan dan jasa yang maju dan sejahtera.[9] Dalam melihat perkembangan ekonomi Kota Cirebon, indikator makro yang digunakan sebagai penilaian kinerja perekonomian adalah PDRB. PDRB dapat menggambarkan pertumbuhan ekonomi dalam kurun waktu tertentu dan hasilnya menggambarkan kinerja sektor perekonomian. Pertumbuhan ekonomi Kota Cirebon dalam periode 2010-19 terlihat pada Tabel 6.1.

**Tabel 6.1.**
**PDRB atas Dasar Harga Konstan 2010 di Wilayah Cirebon 2010-19**
**(dalam Juta Rupiah)**

| Tahun | PDRB | Laju PDRB (%) |
|---|---|---|
| 2010 | 10,093,709.3 | 3,81 |
| 2011 | 10,677,433.0 | 5,93 |
| 2012 | 11,309,383.0 | 5,57 |
| 2013 | 11,863,884.9 | 4,90 |
| 2014 | 12,541,219.5 | 5,71 |
| 2015 | 13,269,243.4 | 5,81 |
| 2016 | 14,077,046.5 | 6,09 |
| 2017 | 14,893,138.8 | 5,80 |
| 2018 | 15,817,650.0 | 6,21 |
| 2019 | 16,812,908.0 | 6,29 |

Sumber: BPS Kota Cirebon, PDRB Kota Cirebon Menurut Lapangan Usaha 2010-14, 2013-17, 2015-19.

Dalam Tabel 6.1 terbaca PDRB Kota Cirebon terus mengalami peningkatan tiap tahun. Pada 2017, nilai PDRB Kota Cirebon terus menanjak yang dipengaruhi oleh meningkatnya produksi di seluruh lapangan usaha yang bebas dari pengaruh inflasi. Nilai PDRB menurut harga konstan pada 2017 sebesar 14,89 triliun rupiah naik sebesar

9 http://bappeda.jabarprov.go.id/documents/rpjmd-kota-cirebon-2018-2023/, diunduh 23 November 2020.

0.82 persen dari tahun 2016 sebesar 14,07 triliun rupiah. Pertumbuhan ekonomi Kota Cirebon pada 2017 sebesar 5.79 persen melambat dari tahun sebelumnya sebesar 5.98 persen. Perlambatan pertumbuhan ekonomi tersebut disebabkan oleh melambannya pertumbuhan beberapa lapangan usaha yang berperan cukup signifikan seperti lapangan usaha konstruksi, penyediaan akomodasi dan makan/minum, informasi dan komunikasi, jasa keuangan dan asuransi, serta administrasi pemerintah, pertahanan dan jaminan sosial wajib. Namun, di sisi lain terdapat lapangan usaha yang mampu melakukan percepatan pertumbuhan pada 2017 antara lain industri pengolahan, perdagangan besar dan eceran, dan reparasi mobil.[10]

## SEKTOR EKONOMI KOTA CIREBON

Perekonomian suatu daerah biasanya sangat dipengaruhi oleh potensi sumber daya alam yang tersedia dan akan berbeda-beda di setiap wilayahnya. Peranan sektor ekonomi terhadap suatu daerah biasanya dilihat menggunakan distribusi persentase PDRB sektoral, makin besar persentase suatu sektor makan makin besar pula pengaruhnya terhadap perkembangan daerah tersebut. Kegiatan ekonomi dikelompokkan ke dalam tiga sektor yaitu (1) sektor primer meliputi pertanian dan pertambangan/penggalian; (2) sektor sekunder meliputi industri pengolahan, listrik, gas, air bersih dan sektor bangunan/konstruksi); dan (3) sektor tersier meliputi perdagangan, pengangkutan dan komunikasi, bank dan lembaga keuangan, sewa rumah, pemerintah, dan jasa-jasa).

Pada kurun 2006-13, kelompok sektor primer dan sektor sekunder mengalami penurunan kontribusi yang cukup signifikan. Pergeseran kontribusi sektor ini sangat terasa bagi pertumbuhan ekonomi Kota Cirebon. Kontribusi sektor primer dari 0,33 persen menjadi 0,32 persen dan kontribusi sektor sekunder dari 38,35 persen menjadi 30,23 persen. Sementara sektor tersier makin memberikan kontribusi yang besar bagi

10 BPS Kota Cirebon, "Produk Domestik Regional Bruto Kota Cirebon Menurut Lapangan Usaha 2013-2017," hlm. 101.

perekonomian Kota Cirebon dari 61,33 persen menjadi 69,45 persen.[11] Kelompok sektor yang paling berpengaruh dalam sektor tersier adalah perdagangan. Pembentukan PDRB Kota Cirebon sangat didukung oleh sektor industri dan sektor perdagangan. Terdapat tiga jenis kegiatan usaha pada sektor industri yaitu industri rokok, makanan ternak, dan industri jaring, yang sebagian besar dipasarkan keluar Kota Cirebon. Pada sektor perdagangan kegiatan usaha yang dilakukan cukup beragam mulai dari pedagang kecil hingga pedagang besar.

**Tabel 6.2.**
**Peranan Total Nilai Tambah Bruto atas Dasar Harga Berlaku Setiap Sektor dalam Perekonomian Kota Cirebon 2006-09 dan 2010-13**
**(Persen)**

| Lapangan Usaha | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PRIMER | 0,33 | 0,31 | 0,30 | 0,29 | 0,36 | 0,35 | 0,31 | 0,32 |
| Pertanian | 0,33 | 0,31 | 0,30 | 0,29 | 0,36 | 0,35 | 0,31 | 0,32 |
| Pertambangan | - | - | - | - | - | - | - | - |
| SEKUNDER | 38,35 | 38,03 | 36,75 | 35,28 | 30,73 | 30,63 | 30,49 | 30,23 |
| Industri | 32,37 | 31,92 | 30,34 | 28,50 | 22,28 | 21,93 | 21,83 | 21,59 |
| Listrik, Gas, Air | 2,83 | 1,82 | 1,83 | 1,93 | 2,39 | 2,26 | 2,23 | 2,28 |
| Bangunan | 4,15 | 4,49 | 4,58 | 4,85 | 6,06 | 6,41 | 6,41 | 6,37 |
| TERSIER | 61,33 | 61,66 | 62,95 | 64,43 | 68,91 | 69,02 | 69,20 | 69,45 |
| Perdagangan | 33,05 | 33,16 | 35,50 | 37,04 | 35,44 | 35,19 | 35,45 | 35,46 |
| Pengangkutan | 16,54 | 15,88 | 14,28 | 13,56 | 14,82 | 15,34 | 15,23 | 15,46 |
| Lembaga Keuangan | 5,82 | 6,33 | 6,72 | 7,19 | 10,68 | 10,49 | 10,53 | 10,52 |
| Jasa | 5,92 | 6,10 | 6,44 | 6,64 | 7,98 | 8,00 | 7,98 | 8,01 |
| Jumlah | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |

Sumber: BPS Kota Cirebon, 2006-2009 dan 2010-2013.

Kegiatan ekonomi di sektor perdagangan dapat dilihat hampir pada tiap wilayah Kota Cirebon. Dilihat dari nilai PDRB tergambar cukup kuat bahwa basis kegiatan ekonomi Kota Cirebon tidak bersumber dari kekayaan alam yang terdapat di Kota Cirebon. Sektor pertanian dan

11 BPS Kota Cirebon, "Produk Domestik Regional Bruto Kota Cirebon Menurut Lapangan Usaha 2006-2009 dan 2010-2013," hlm. 34-5.

sektor listrik, gas, dan air, memberikan kontribusi terendah bagi PDRB Kota Cirebon. Seperti terlihat pada Tabel 6.2, kontribusi sektor pertanian makin menurun dari tahun 2006 hingga 2009. Namun, berdasarkan data BPS 2010-13, kontribusi sektor pertanian meningkat sebesar 0,29 persen pada 2009 persen menjadi 0,36 persen pada 2010, dan terus mengalami penurunan hingga 2013 sebesar 0,32 persen.

Sektor sekunder yang didukung oleh sektor industri, sektor listrik, gas dan air (LGA), serta sektor bangunan terus mengalami penurunan kontribusi terhadap PDRB Kota Cirebon. Besaran kontribusi masing-masing sektor ialah 21,59 persen (industri), 2,28 persen (LGA) dan sektor bangunan sebesar 6,37 persen. Sementara itu, sektor tersier selalu memberikan kontribusi tertinggi dibandingkan dengan sektor lainnya. Kelompok sektor tersier ini didukung oleh sektor perdagangan sebesar 35,46 persen, pengangkutan dan komunikasi 15,46 persen, lembaga keuangan 10,52 persen, dan sektor jasa dengan kontribusi sebesar 8,01 persen.

Sektor perdagangan merupakan urat nadi kehidupan Kota Cirebon sejak abad ke-15. Dulu, berdagang mengandalkan bandar dan pelabuhan, kini berdagang menjadi lebih mudah dengan membuat kompleks pertokoan dan pasar modern. Berdasarkan data Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Cirebon pada 2005 terdapat 11 pasar modern, 15 *minimarket* dan 8 kompleks rumah toko. Selain itu, terdapat 11 pasar tradisional dengan 6.651 pedagang. Perdagangan di Kota Cirebon makin maju karena letak Kota Cirebon yang strategis berada di simpul perlintasan wilayah Jawa Barat dan Jawa Tengah. Kota Cirebon kerap disebut sebagai kota transit bagi mereka yang menggunakan jalur pantai utara. Berdagang dan belanja menjadi kebutuhan pokok bagi warga Ciayumajakuning—akronim bagi kabupaten Cirebon, Indramayu, Majalengka, dan Kuningan. Selain sektor perdagangan, sektor industri menjadi tulang punggung perekonomian Kota Cirebon pada 2003-05. Pada tahun tersebut, sektor industri menyumbang 40,3 persen terhadap perekonomian daerah dengan nilai kegiatan tidak-kurang dari 1,87 triliun rupiah setiap tahun. Terdapat tiga perusahaan besar dengan nilai investasi di atas 1 miliar rupiah yaitu PT British American Tobacco Indonesia, PT Arteria Daya Mulia (Arida), dan PT Niri. Selain itu, terdapat 31 unit perusahaan menengah

dan 500 unit perusahaan kecil yang telah menggerakan sektor industri pengolahan di Kota Cirebon.[12]

Sejalan dengan itu, ketiga sektor ekonomi tersebut berperan sangat besar dan menyumbang lebih dari 65 persen dalam lima tahun terakhir terhadap PDRB Kabupaten Cirebon. Penggerak utama ekonomi daerah Kabupaten Cirebon adalah sektor industri yang terdiri dari industri mebel, rotan, tekstil, batik, dan udang beku. Pada 2005, industri mebel menghasilkan devisa sebesar 130 juta dolar AS, tekstil 20,2 juta dolar AS, dan batik sebesar 1,2 juta dolar AS. Sementara, ekspor udang beku menghasilkan devisa sebesar 4,5 juta dolar AS. Penggerak roda perekonomian kedua adalah sektor perdagangan yaitu 20 persen dari nilai PDRB. Kegiatan ini terdiri dari 17 perusahaan besar, 47 perusahaan sedang, dan 583 perusahaan kecil. Sektor pertanian merupakan penyumbang terbesar ketiga pada nilai PDRB Kabupaten Cirebon yaitu sebesar 19 persen. Setiap tahun, sekitar 450.000 ton padi gabah kering giling dihasilkan di Kabupaten Cirebon dan menjadikannya sebagai penghasil padi terbesar ke-10 di Jawa Barat.[13]

## INDUSTRI ROTAN CIREBON

Sektor Industri sebagai salah satu sektor unggulan Cirebon memiliki segudang potensi usaha yang terkenal. Salah satu usaha yang menjadi sorotan dan sebagai salah satu penggerak perekonomian adalah kerajinan rotan di Kota ataupun Kabupaten Cirebon. Karena keunggulan produknya, kerajinan berbahan dasar rotan yang dikelola oleh masyarakat setempat ini dipasarkan hingga mancanegara. Industri rotan di Cirebon mengalami masa kejayaan pada kurun 1980/90-an. Di Kecamatan Plumbon, Kabupaten Cirebon, bermunculan usaha rumah tangga berskala kecil hingga usaha-usaha berskala besar.

12 Indah Surya Wardhani, "HUT Ke-637 Kota Cirebon: Kota Dagang dan Industri, Tetapi Daya Beli Rendah," *Kompas*, 19 Januari 2007.

13 Eri, "HUT Kabupaten Cirebon: Sektor Pertanian dan Perdagangan, Motor Perekonomian," *Kompas*, 3 April 2007.

Menurut catatan Asosiasi Industri Permebelan & Kerajinan Indonesia (Asmindo) Komisariat Daerah Cirebon, yang dikutip dari sumber data kantor perindustrian dan perdagangan Kabupaten Cirebon, nilai ekspor rotan Cirebon mencapai 84,38 juta dolar AS pada 1999, dan menjadi 91,55 juta dolar AS pada 2000. Grafik ekspor terus bergerak naik; pada 2003 menjadi 101,67 dolar AS kemudian meningkat menjadi 116,57 dolar AS pada 2004.[14] Industri mebel rotan Cirebon terus meningkatkan ekspor dengan memperluas pembeli mancanegara. Tidak hanya menghidupi para pekerjanya di perusahaan, industri rotan juga menafkahi penduduk setempat yang menopangnya dengan bekerja dari rumah masing-masing.

**Gambar 6.1.** Kepala KPwBI Cirebon Bakti Artanta (tengah) melepas produk UMKM ke Afrika Selatan.

Sumber: kumparan.com (November 2020)

Namun, kerajinan rotan terpuruk ketika pemerintah mengeluarkan kebijakan membuka ekspor rotan mentah melalui Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 12 Tahun 2005. Kekhawatiran para pelaku industri adalah hancurnya pasar ekspor furnitur berbasis rotan dari Cirebon. Dari

14 "Mebel Rotan Cirebon, dari Industri Rumahan sampai Eksportir Furnitur" (Liputan Khusus), *Kompas*, 24 Februari 2005.

162 industri rotan yang menjadi anggota Asmindo Cirebon, 31 perusahaan bangkrut, 16 perusahaan menyusul gulung tikar, dan 15 perusahaan lainnya dalam keadaan mati suri atau masih punya papan nama tetapi tidak berproduksi. Menurunnya ekspor rotan dari Cirebon telah terlihat sejak wacana ekspor rotan mentah digulirkan ke publik. Diawali sejak Indonesia mengikat perjanjian dengan Dana Moneter Internasional (IMF), pajak ekspor rotan setengah-jadi makin kecil. Pajak bulan April 1998, misalnya, sebesar 30 persen, kemudian menjadi 20 persen pada akhir tahun itu; selanjutnya merosot menjadi 15 persen pada Desember 1999, dan akhirnya hanya 10 persen dari harga patokan pada 2003.[15]

**Tabel 6.3.**
**Perusahaan Industri Rotan di Cirebon**

| No. | Perusahaan | Produk | No. | Perusahaan | Produk |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CV Agung Jaya | Furnitur rotan | 43 | CV Manunggal Furniture | Mebel rotan |
| 2 | PT Aida | Furnitur rotan | 44 | PT Blok Cengkaruk | Furnitur rotan |
| 3 | CV Archipelago Eksports | Furnitur rotan | 45 | CV Mekar Asih Rotan | Furnitur rotan, meja makan, kursi |
| 4 | CV Aurora Rotan | Furnitur rotan | 46 | CV Mekar Sari | Mebel rotan |
| 5 | CV Avanticollection | Furnitur rotan | 47 | PT Metrix Rotan | Furnitur rotan |
| 6 | CV Bahama Rotan | Furnitur rotan | 48 | CV Modena | Kerajinan kayu/ rotan |
| 7 | PT Balagi Rattan | Meja/kursi rotan | 49 | CV Mulia Jaya Furniture | Furnitur rotan |
| 8 | PT Bendera Rotan | Furnitur sintetis | 50 | PT Mutiara Habemindo Rotan/ HBM Furnit | Furnitur rotan |
| 9 | CV Berliana (Berjaya Rattan) | Furnitur rotan | 51 | CV Niagara Rattan Furniture | Mebel rotan |
| 10 | PT Bines Raya Cirebon | Mebel, kerajinan rotan/kayu | 52 | Pengesub Rotan (Kasbiyah) | Rangka kursi aluminium |
| 11 | PT Bines Raya | Furnitur rotan | 53 | CV Pesona Ratan Nusantara | Furnitur rotan |
| 12 | Bodesari Rattan | Furnitur rotan | 54 | PT Plasindo Semesta | Rotan sintetis |

15 "Industri Rotan: Menunggu Lonceng Kematian," *Kompas*, 27 Agustus 2005.

**Tabel 6.3.**
**Perusahaan Industri Rotan di Cirebon (Lanjutan)**

| No. | Perusahaan | Produk | No. | Perusahaan | Produk |
|---|---|---|---|---|---|
| 13 | PT Boneta Indo Utama | Kursi rotan | 55 | CV Property | Furnitur rotan |
| 14 | PT Cahaya Agung Abadi | Furnitur rotan | 56 | Rotan Jensen/ Danindo Jensen | Furnitur |
| 15 | CV Capricorn Design | Furnitur rotan/kayu | 57 | PT Rotan Totumbiba | Keranjang rotan |
| 16 | PT Cirebon Furniture | Furnitur rotan | 58 | CV Sami Jaya Rotan | Furnitur rotan |
| 17 | CV Delapan Delapan | Furnitur rotan | 59 | PT Siaga Ratindotama | Furniture rotan |
| 18 | PT Equator Jingga | Furnitur kayu/rotan | 60 | PT Silcane | Meja/kursi rotan |
| 19 | PT Erlangga BNH Rotani | Mebel rotan | 61 | PT Sinar Gemilang Basket Indonesia | Nampan rotan |
| 20 | Felladhica | Furnitur rotan | 62 | Sub Anyaman Laci Rotan "Maskeni" | Anyaman laci rotan |
| 21 | PT Findora Internusa | Kursi rotan | 63 | Sub Ikat Kursi Rotan "Sumanta" | Kursi rotan |
| 22 | PT Gerbang Surya Permai Rotan | Flooring | 64 | Sub Kursi Rotan "Disi Supriyadi" | Kursi rotan |
| 23 | PT Gracia Kreasi Rotan | Fiberglass | 65 | Sudini Rotan | Meja/kursi rotan |
| 24 | PT Gunung Meganusa Perkasa | Rotan/kerajinan kayu | 66 | PT Tafa Rottan Industry Indonesia | Furnitur rotan |
| 25 | CV Home Fashions Indonesia | Furnitur rotan | 67 | PT Tana Mas | Furnitur rotan/kayu |
| 26 | PT House of Rattan | Mebel rotan | 68 | CV Tanda Mata Kita | Furnitur rotan |
| 27 | CV Independent Furniture | Furnitur, kerajinan rotan/kayu | 69 | PT Tango | Furnitur rotan/kayu |
| 28 | PT Indigo Mandiri Sejahtera | Anyaman rotan | 70 | PT Tengo Indonesia | Furnitur rotan, meja, kursi |
| 29 | CV Indo Surya Mahakam | Furnitur rotan | 71 | CV TMD Indo Rotan (Jojo) | Furnitur sintetis |
| 30 | Industri Kursi Rotan | Furnitur rotan | 72 | Tosin Rotan | Anyaman laci lesio |
| 31 | CV Infinitife Rattan Creation | Furnitur rotan | 73 | CV Tropica | Furnitur rotan |
| 32 | PT Inspiro Indoraya | Furnitur rotan | 74 | PT Tulus Asih | Rotan |

**Tabel 6.3.**
**Perusahaan Industri Rotan di Cirebon (Lanjutan)**

| No. | Perusahaan | Produk | No. | Perusahaan | Produk |
|---|---|---|---|---|---|
| 33 | Jamal | Furnitur rotan | 75 | Ucok Rotan | Furnitur rotan |
| 34 | PT Jeil Basket Indonesia | Keranjang rotan | 76 | PT Vincent Sheppard Indonesia | Furnitur rotan |
| 35 | PT Jhon Sam Rotan | Furnitur rotan | 77 | PT Visi Jaya Pasifik | Kerajinan/keranjang rotan |
| 36 | CV Khalim | Furnitur rotan | 78 | CV Wicker Kang Industri | Furnitur rotan/kayu |
| 37 | CV Kharisma Jaya/ Sutrisno Rotan | Rotan pitrit | 79 | PT Wikcer Desain Indonesia | Kursi rotan |
| 38 | PT Khavindo | Furnitur rotan | 80 | PT Wirasindo Santakarya (Wisanka) | Kerajinan lampu dan rotan sintetis |
| 39 | CV Kotska Adhi Sentosa | Furnitur rotan/kayu | 81 | PT Yamokawa Rattan Industry | Furnitur rotan/kayu |
| 40 | CV Lentera | Furnitur rotan | 82 | PT Yuni Bali | Furnitur rotan |
| 41 | CV Limindo Utama | Kursi rotan, meja furnitur | 83 | Zimer Rotan CU | Furnitur rotan |
| 42 | CV Mandiri Cipta Karya | Anyaman kursi rotan | | | |

Sumber: Diolah kembali dari Kementerian Perindustrian Republik Indonesia.

Asosiasi Mebel dan Kerajinan Rotan Indonesia (AMKRI) bekerja sama dengan Asmindo merencanakan membuat kampung rotan karena industri rotan mengalami pasang-surut.[16] Rencana itu bertujuan menjaga kerajinan dan industri rotan tetap lestari di Cirebon. Saat ini, kedua asosiasi tersebut telah melebur menjadi Himpunan Industri Mebel dan Kerajinan Indonesia (HIMKI). Desa Tegalwangi di Kecamatan Weru sampai Bode di Kecamatan Plumbon akan menjadi sentra industri rumahan kerajinan rotan. Menurut anggota Dewan Pertimbangan AMKRI, kampung rotan diresmikan pada 2017.

Pada 2016, industri rotan di Cirebon kembali menunjukkan kemajuan dan siap bangkit kembali. Menteri Perdagangan Gita Wirjawan telah

16 "Sentra Industri Rotan Cirebon Mulai Bergairah," https://industri.kontan.co.id/news/sentra-industri-rotan-cirebon-mulai-bergairah, diunduh 23 November 2020; 21.00 WIB

menutup keran ekspor bahan baku rotan pada 2011. Nilai ekspor produk rotan perlahan mulai meningkat dari 60 juta dolar AS per tahun menjadi 170 juta dolar AS pada Desember 2016.[17] Selain itu, beroperasinya Jalan Tol Cipali serta infrastruktur lain seperti pelabuhan dan bandara kian mendukung pertumbuhan industri rotan di dalam maupun luar negeri.

## KANTOR PERWAKILAN BI CIREBON DAN PEMBANGUNAN KOTA

Bank Indonesia memiliki konsep pembangunan untuk semua orang dan merangkai mozaik perbankan. Untuk itu Bank Indonesia Wilayah III Cirebon berperan serta secara aktif dalam pembangunan di Kota Cirebon, Kabupaten Cirebon, Kabupaten Indramayu, Kabupaten Majalengka, dan Kabupaten Kuningan. Peran tersebut dilakukan bekerja sama dengan berbagai pihak untuk membentuk "orkestra" besar dalam mendorong pembangunan. Kerja sama dilakukan dengan pemerintah setempat ataupun dengan instansi dan lembaga lain. Pihak BI melakukan kerja sama untuk mengatasi permasalahan multidimensi dalam pembangunan masyarakat.

Sesuai dengan UU perbankan, fungsi bank adalah menghimpun dana masyarakat dan menyalurkannya ke sektor produktif demi tercapainya sasaran pembangunan. Bank Indonesia Wilayah III Cirebon berusaha menjalankan fungsi sentral dalam memfasilitasi pembangungan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

### MENGAWAL INFLASI DAN KEBERPIHAKAN PADA UMKM

Inflasi pada lingkup nasional terbentuk melalui inflasi yang terjadi di beberapa daerah. Dapat dikatakan bahwa inflasi nasional secara umum merefleksikan inflasi yang terjadi di daerah-daerah di Indonesia. Meski

17 Ani Nunung Aryani, "Industri Rotan Cirebon Kembali Menggeliat," *Pikiran Rakyat*, 13 Desember 2016. https://www.pikiran-rakyat.com/jawa-barat/pr-01269837/industri-rotan-cirebon-kembali-menggeliat-387689, diunduh 23 November 2020; 11.51 WIB.

demikian, terdapat beberapa daerah dengan tingkat inflasi yang tinggi dan daerah dengan tingkat inflasi yang rendah. Perbedaan ini mencerminkan karakteristik pada tekanan harga yang disebabkan oleh perbedaan kualitas, infrastruktur logistik, kemampuan produksi pangan lokal, kebijakan harga barang dan jasa yang diatur pemerintah (*administered prices*) serta struktur pasar di daerah.

Harga BBM dan komoditas lain yang diatur oleh pemerintah dapat merupakan salah satu faktor dominan penyumbang inflasi secara menyeluruh. Dalam mengukur tingkat inflasi, indikator yang sering digunakan adalah Indeks Harga Konsumen (IHK). Indeks ini mencerminkan pergerakan harga suatu barang dan jasa yang dikonsumsi oleh masyarakat. Dalam mencerminkan pergerakan harga barang dan jasa, Badan Pusat Statistik berperan penting dalam melakukan Survei Biaya Hidup (SBH). Survei yang dilakukan oleh BPS ini selanjutnya digunakan sebagai dasar dalam menentukan IHK. Inflasi yang diukur dengan menggunakan IHK diklasifikasikan menjadi tujuh kelompok pengeluaran yaitu (1) Kelompok Bahan Makanan; (2) Makanan Jadi, Minuman, Rokok dan Tembakau; (3) Perumahan, Air, Listrik, Gas, dan Bahan Bakar; (4) Sandang; (5) Kesehatan; (6) Pendidikan, Rekreasi, dan Olahraga; dan (7) Transpor, Komunikasi, dan Jasa Keuangan.

Pihak Pemerintah dan Bank Indonesia berkepentingan dalam pengelolaan inflasi baik pada lingkup daerah maupun nasional. Kepentingan kedua pihak ini tercantum dalam suatu kerja sama serta koordinasi yang sinergis dalam suatu Tim Pengendali Inflasi (TPI) pada 2005 dan Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) sejak 2008. Saat ini, koordinasi dalam pengendalian inflasi diperkuat dalam aspek hukum dengan diterbitkannya Keputusan Presiden Nomor 23 Tahun 2017 tentang Tim Pengendalian Inflasi Nasional. Tim Pengendali Inflasi terbagi menjadi tiga yaitu Tim Pengendalian Inflasi Pusat (TPIP), Tim Pengendalian Inflasi Daerah Provinsi, dan Tim Pengendalian Inflasi Daerah Kabupaten/Kota. Beberapa peraturan terkait dengan TPI antara lain Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 10 Tahun 2017 tentang Mekanisme dan Tata Kerja TPIP, TPID Provinsi dan TPID Kabupaten/Kota, Keputusan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 148 Tahun 2017 tentang Tugas dan Keanggotaan Kelompok Kerja dan Sekretariat Tim

Pengendalian Inflasi Pusat, dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 500.05-8135 Tahun 2017 tentang Tim Pengendalian Inflasi Daerah.

Dalam Nota Kesepahaman antara Pemerintah dan Bank Indonesia, sasaran inflasi ditetapkan untuk tiga tahun ke depan melalui Peraturan Menteri Keuangan. Melalui peraturan tersebut, dapat diketahui bahwa TPI merupakan serangkaian kebijakan yang dilakukan dengan pendekatan *top down*. Misalnya, untuk Jawa Barat yang merupakan TPID Provinsi dari TPID Kota dan Kabupaten Cirebon, *roadmap* program pengendalian inflasi di Jawa Barat merupakan turunan dari strategi 4K (Keterjangkauan Harga, Kesediaan Pasokan, Kelancaran Distribusi, dan Komunikasi yang Efektif) yang disampaikan oleh Presiden pada Rapat Koordinasi Nasional TPID. Melalui *roadmap* tersebut dapat diidentifikasi bahwa penyumbang inflasi yang paling dominan di Provinsi Jawa Barat adalah *volatile food*. Fluktuasi harga komoditas pangan ini sangat dipengaruhi oleh keterbatasan pasokan dan hambatan distribusi. Meski demikian pada 2020 terjadi pandemi Covid 19 yang mungkin berdampak sementara terhadap perubahan faktor-faktor penyumbang utama pada inflasi daerah maupun nasional.

Indikator pencapaian inflasi suatu daerah dapat dilihat melalui inflasi yang ditargetkan dengan inflasi aktual. Target inflasi ini ditentukan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan secara berkala setiap tiga tahun. Misalnya, target inflasi untuk tahun 2016, 2017, dan 2018 ditetapkan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 93/PMK.011/2014 tentang Sasaran Inflasi tahun 2016, 2017, dan 2018; serta target inflasi tahun 2019, 2020, dan 2021 ditetapkan dalam Peraturan Menteri Keuangan No. 124/PMK.010/2017.

Mengambil data tiga tahun terakhir, target inflasi nasional tahun 2018 sampai dengan tahun 2020 masing-masing sebesar 3,5 persen (berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 93/PMK.011/2014 tentang Sasaran Inflasi tahun 2016, 2017, dan 2018 tanggal 21 Mei 2014), 3,5 persen, dan 3,0 persen (berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan No. 124/PMK.010/2017) dengan deviasi masing-masing ±1 persen. Inflasi aktual nasional dari tahun 2018 sampai dengan 2019 masing-masing sebesar 3,13 persen dan 2,71 persen. Sedangkan data terkini mengenai inflasi tahun 2020 pada September sebesar 1,42 persen.

Sementara angka inflasi aktual di Cirebon selama tiga tahun terakhir yaitu pada tahun 2018, 2019, dan 2020 masing-masing sebesar 2,8 persen, 2 persen, dan pada September 2020 sebesar 1,14 persen seperti tertera pada Tabel 6.4.

**Tabel 6.4.**
**Inflasi Kota Cirebon**

| | | 2018 | 2019 | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Des | Jan | Feb | Mar | Apr | Mei | Jun | Jul | Ags | Sep | Okt | Nov | Des |
| Inflasi IHK | % yoy | 2,80 | 1,97 | 1,21 | 1,68 | 2,03 | 2,25 | 1,71 | 1,75 | 2,33 | 2,36 | 2,26 | 2,14 | 2,00 |
| | % mtm | 0,58 | 0,20 | -0,16 | 0,18 | 0,27 | 0,37 | 0,15 | 0,24 | 0,24 | -0,24 | 0,03 | 0,26 | 0,44 |

| | | 2020 | | | | | | | | | Proyeksi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Jan | Feb | Mar | Apr | Mei | Jun | Jul | Ags | Sep | Okt |
| **Inflasi IHK** | % yoy | 1,39 | 1,76 | 1,97 | 1,83 | 1,48 | 1,76 | 1,51 | 1,05 | 1,14 | 0,98 |
| | % mtm | 0,10 | 0,17 | 0,29 | 0,02 | -0,09 | 0,45 | -0,12 | -0,23 | -0,25 | -0,05 |

Sumber: Internal Kantor Perwakilan BI Cirebon.

Berbagai upaya yang dilakukan Kantor Perwakilan BI Cirebon (selanjutnya Kantor BI Cirebon) dalam mengendalikan tingkat inflasi daerah seperti melalui kerja sama dengan para akademisi dalam melakukan kajian mengenai faktor-faktor yang mendeterminasi inflasi di Cirebon berdasarkan Produk Domestik Bruto, menjadi bagian dari TIPD (Kabupaten/Kota), dan mengkoordinasikan setiap TPID yang berada dalam Wilayah III Cirebon yang meliputi Kota Cirebon, Kabupaten Cirebon, Kabupaten Indramayu, Kabupaten Majalengka, dan Kabupaten Kuningan (Ciayumajakuning) yang merupakan cakupan Kantor BI Cirebon. Selain itu, Kantor BI Cirebon melakukan evaluasi secara periodik untuk menentukan langkah yang tepat dalam menjaga tingkat inflasi daerah yang lebih rendah dibandingkan dengan target inflasi nasional. Kantor BI Cirebon juga melakukan analisis terhadap kondisi perekonomian saat ini yang menghasilkan *outlook* kondisi perekonomian di masa depan suatu daerah sebagai salah satu dasar dalam menetapkan rencana tindakan, dan kebijakan di masa mendatang.

Peningkatan inflasi tahunan tertinggi terjadi pada saat hari raya keagamaan dan perayaan hari besar lainnya seperti tahun baru. Selama bulan menjelang dan setelah idul fitri dan hari besar lainnya terjadi permintaan yang sangat tinggi pada beberapa komoditas yang menyebabkan inflasi. Khususnya kenaikan harga pada beberapa bahan pokok makanan dan pakaian. Untuk meminimalisasi hal itu TPID menyelenggarakan pasar murah bagi masyarakat umum, inspeksi mendadak pasar pada harga komoditas pangan, operasi pasar, dan inspeksi mendadak kualitas barang dagang. Secara tidak langsung, hal itu juga merupakan imbauan Kantor BI Cirebon kepada para pedagang agar tidak menaikkan harga terlalu tinggi dan senantiasa menjaga kualitas yang akan berdampak pada kenaikan tingkat inflasi daerah di wilayah Cirebon.

**Gambar 6.2.** Beberapa kegiatan Kantor BI Cirebon (2019)
Sumber: Data internal Bank Indonesia Cirebon.

Kantor Bank Indonesia Cirebon senantiasa berkomitmen melakukan koordinasi berkesinambungan melalui berbagai forum koordinasi pengendalian inflasi daerah pada 2020; menekankan pentingnya upaya memitigasi dampak dari kenaikan harga bahan makanan dan menjaga persediaan komoditas di pasar untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Hal itu sesuai dengan program rutin TPID Provinsi Jabar. Dalam suatu pertemuan "tingkat tinggi" Kepala Kantor BI Cirebon dengan seluruh kepala daerah di wilayah kerja Kantor BI Cirebon—yaitu Bupati/ Walikota Cirebon, Bupati Indramayu, Bupati Kuningan, dan Wakil Bupati Majalengka—dibahas upaya perbaikan perekonomian wilayah kerja Kantor BI Cirebon dengan menekankan pada lima program pemulihan ekonomi termasuk pengendalian inflasi, pengembangan UMKM, dan digitalisasi di berbagai sektor.

Rencana TPID dalam upaya pengendalian inflasi antara lain ialah, pertama, melaksanakan program pengembangan Kampung Peduli Inflasi di Kota Cirebon bersinergi dengan program Peningkatan Peranan Wanita Menuju Keluarga Sehat dan Sejahtera Kota Cirebon oleh Dinas Sosial melalui *urban farming*, khususnya komoditas pangan yang menjadi penyumbang inflasi di kota Cirebon. Kedua, cakupan pelaksanaan *urban farming* diperluas di Kabupaten Cirebon melalui optimalisasi organisasi warga antara lain Karang Taruna. Ketiga, pengembangan klaster komoditas bawang merah di Kecamatan Losari, Kabupaten Cirebon, dan Kabupaten Majalengka. Keempat, pengembangan klaster komoditas beras di Kabupaten Cirebon dan Kabupaten Indramayu. Kelima, selain itu, memperluas identifikasi klaster komoditas pangan potensial lain yang dapat dikembangkan seperti bawang putih dan telur ayam ras.

Konsisten dengan TPID Provinsi Jawa Barat, kegiatan TPID Ciayumajakuning berfokus pada ketersediaan pasokan, keterjangkauan harga, kelancaran distribusi, dan komunikasi melalui berbagai bentuk kegiatan. Antara lain,

- Ketersediaan pasokan: koordinasi data monitoring pasokan, melaksanakan Operasi Pasar Cadangan Beras Pemerintah.
- Keterjangkauan harga: pelaksanaan inspeksi mendadak bersama, pasar murah, pemantauan harga secara rutin

- Kelancaran distrbusi: rekomendasi pengaturan tarif angkutan umum, revitalisasi pasar
- Komunikasi: rapat TPID, pertemuan tak berkala, iklan belanja bijak, pertemuan dengan wartawan.

Beberapa program kerja TPID meliputi Program BTM (*back to traditional market*), yang mendorong masyarakat di Kota Cirebon untuk berbelanja di pasar tradisional. Fokus untuk mengendalikan harga komoditas juga untuk menggiatkan ekonomi kerakyatan khususnya bagi UMKM di pasar-pasar tradisional yang mulai kalah bersaing dengan pasar modern. Juga merupakan rangkaian program yang telah dimulai pada 2017 melalui *pilot project* Lomba Pasar Tanggap Inflasi. Program Konektivitas TPID dengan Pengembangan *Smart City* Kota Cirebon merupakan kolaborasi antar-SKPD untuk mengintegrasikan seluruh data, termasuk data inflasi ke dalam sistem satu data yang dibuat oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Cirebon.

Fungsi pengendalian inflasi yang dilakukan Bank Indonesia sejalan dengan keberpihakan BI kepada usaha mikro, kecil, dan menengah. Bank Indonesia terus menggali potensi munculnya usaha baru yang dilakukan masyarakat, ataupun terus mendorong dan mengembangkan UMKM yang sudah berjalan. Keberpihakan Kantor BI Cirebon terhadap UMKM terlihat dalam (1) pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah; (2) mengindentifikasi potensi UMKM di Ciayumajakuning; (3) mengenali permasalahan UMKM di Ciayumajakuning; (4) program pengembangan komoditi unggulan; (5) program Wirausaha Bank Indonesia; (6) Program UMKM Tematik.

Beberapa sektor ekonomi di Ciayumajakuning memiliki potensi berkembang. Sektor pertanian, misalnya, menumbuhkan UMKM Indramayu dalam penanaman padi, atau mangga gincu produk dari daerah Majalengka, Cirebon, dan Indramayu. Sektor industri jasa dan manufaktur menumbuhkan UMKM di bidang usaha rotan, kerajinan, batik, industri makanan olahan, dan garmen. Sementara, sektor pariwisita menumbuhkan usaha wisata alam seperti di Gunung Ciremai di Kuningan dan Majalengka, serta wisata budaya dan religi di Kota dan Kabupaten Cirebon. Sektor kelautan dan perikanan mengembangkan usaha penambangan garam, penangkapan ikan dan pertambakan.

**Gambar 6.3.** Program *On Boarding* UMKM (Pelatihan Pemanfaatan *Platform* Digital)
Sumber: Data internal BI Cirebon

Potensi Ciayumajakuning semakin besar berkat pengembangan infrastruktur yang dilakukan oleh pemerintah pusat, seperti pengoperasian jalan tol Palikanci, peningkatan sarana kereta api, optimalisasi pelabuhan, dan pembangunan Bandar Udara Kertajati. Data riil menunjukkan bahwa sejak 2008 hingga 2014 kawasan Ciayumajakuning mampu menyumbang 10 persen pertumbuhan ekonomi Jawa Barat.[18] Pada Gambar 6.4 terlihat peta potensi pengembangan ekonomi masyarakat yang menjadi sumber kegiatan UMKM di Ciayumajakuing. Pengembangan UMKM melalui program klaster dapat menggerakkan usaha masyarakat di suatu daerah yang dikelola dari sektor hulu ke hilir.

Keberpihakan Bank Indonesia Cirebon tidak lepas dari komitmen pemerintah daerah seluruh Wilayah III Cirebon dalam program pengembangan UMKM. Melalui Forum Bersama Ciayumajakuning (September 2010), seluruh pemimpin daerah itu kompak bersepakat memproyeksikan Ciayumajakuning sebagai pusat pertumbuhan ekonomi yang prestisius pada 2028.

18 Abdurahman (2015)

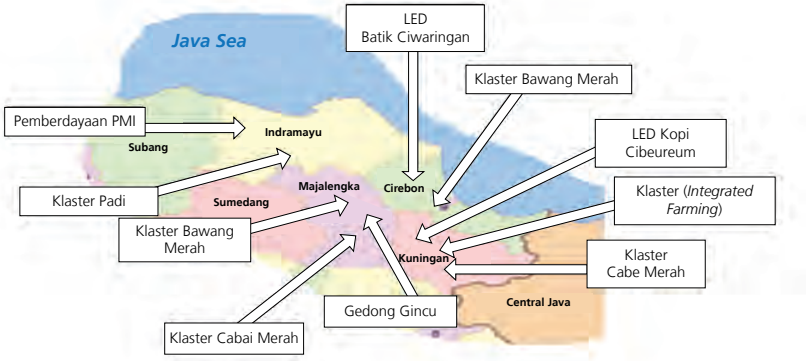


**Gambar 6.4.** Pemetaan beberapa potensi UMKM melalui pengembangan klaster dan LED

Sumber: Data Internal Bank Indonesia Cirebon

Di sisi lain, upaya pengembangan UMKM tidak lepas dari permasalahan; salah satunya kesulitan memperoleh biaya pengembangan usaha dari bank. Pembiayaan menjadi bermasalah karena banyak UMKM tidak "bankable" dari segi permintaan pembiayaan. Dari sisi bank, kondisi tersebut dipandang tidak layak memperoleh dana pengembangan usaha dan berisiko tinggi. Pada umumnya bank sangat selektif dan berhati-hati, bahkan berkeberatan, memberikan kredit kepada UMKM karena faktor risiko tersebut. Walaupun demikian, BI menyalurkan Kredit Usaha Kecil sebesar 20 persen dari portofolio kreditnya.

Permasalahan UMKM bersifat banyak dan multidimensional[19] sehingga tidak bisa diselesaikan oleh hanya satu instansi yang bidang tugas dan kewenangannya pasti terbatas. Masalah pembiayaan, misalnya, akan diselesaikan oleh bank, tetapi untuk meningkatkan pemberdayaan dan kompetensi UMKM dilakukan oleh Kementerian Koperasi dan UKM. Belum lagi jika dilihat dari bidang usaha UMKM, maka harus bekerja sama dengan instansi atau pihak ketiga lain yang lebih luas.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (2003), teridentifikasi permasalahan umum yang sering dihadapi oleh UMKM. Antara lain, (1) kekurangan modal, (2) kesulitan pemasaran, (3) persaingan usaha

19 Nasution (2013).

yang ketat, (4) kesulitan bahan baku, (5) kelemahan teknis produksi dan keahlian, (6) keterampilan manajerial kurang, (7) kurang pengetahuan manajemen keuangan, dan (8) iklim usaha yang kurang kondusif khususnya dalam perizinan, aturan atau perundangan-undangan.[20] Kesulitan dominan yang dihadapi UMKM menyangkut permodalan (51,09 persen). Untuk mengatasi masalah itu, sebanyak 17,50 persen UMKM menambah modalnya dengan meminjam ke bank, sisanya 82,50 persen memilih meminjam ke lembaga non-bank seperti koperasi simpan pinjam, perorangan, keluarga, dan lain-lain.[21]

Kendala yang banyak dialami UMKM di Indonesia, pada dasarnya merupakan masalah serupa yang dihadapi usaha kecil di negara-negara berkembang.[22] Beberapa persoalan menjadi masalah besar dan "laten"—seperti permodalan, urusan perizinan, *mindset*, kualitas produksi, dan sumber daya manusia—sehingga mendesak diatasi.[23] Dengan prioritas itu, kesempatan hidup dan peningkatan kualitas UMKM secara berangsur akan tercapai.

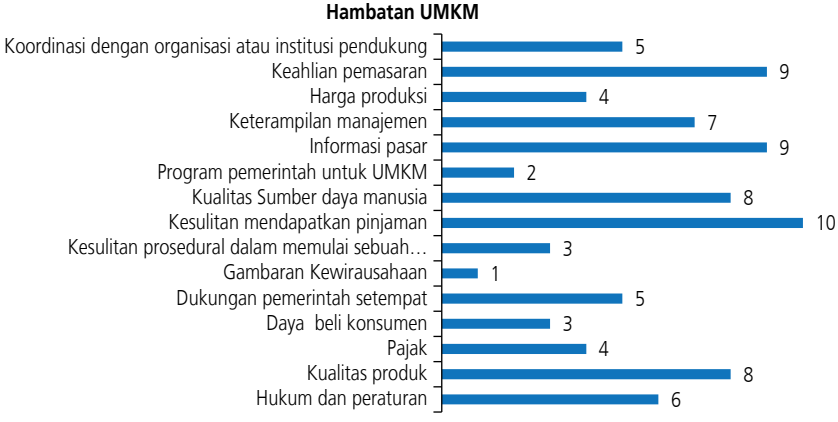


**Gambar 6.5.** Hambatan pengembangan UMKM

Sumber: Diolah dari Tambunan (2009).

20 Winarni (2006).

21 Winarni (2006).

22 Tambunan (2009).

23 Tambunan (2009: 43).

Memahami latar belakang permasalahan UMKM di Ciayumajakuning, Bank Indonesia Cirebon melakukan berbagai upaya seperti (1) mendukung strategi keuangan inklusif; (2) mendorong kegiatan kerja sama antarpihak yang bertujuan mengoptimalkan pemberdayaan masyarakat; (3) memperkuat pengembangan dan ekonomi masyarakat melalui berbagai program pengembangan kapasitas UMKM; dan (4) membantu meningkatkan daya saing UMKM yang berkelanjutan. Sejak 2011, sebagai contoh, BI Cirebon mengembangkan program ekonomi yang berfokus pada klaster ketahanan pangan yaitu pakcoy, klaster bawang merah di Kabupaten Cirebon, kemudian dikembangkan ke Kabupaten Majalengka (sejak 2014) serta klaster cabai merah di Kabupaten Kuningan dan klaster komoditi padi/beras.[24] Selain itu terdapat pengembangan komoditi unggulan daerah, seperti pengembangan batik Ciwaringin dan pengembangan kopi Cibeureum.

Apa yang dilakukan Kantor BI Cirebon merupakan bentuk dukungan terhadap pemberdayaan dan pengembangan usaha ekonomi kerakyatan di wilayah tugasnya. Dukungan itu sekaligus mendorong dan memperkembangkan fungsi intermediasi perbankan dan menciptakan kondisi perbankan yang sehat. Disadari bahwa upaya memperkuat fundamental usaha mikro, kecil dan menengah tersebut perlu kerja sama dengan pelbagai unsur yang terkait.

**Gambar 6.6.** Klaster hortikultura pakcoy di Kabupaten Indramayu
Sumber: Data Internal Bank Indonesia Cirebon.

24 Lihat gambaran lebih terperinci di bagian selanjutnya tulisan ini.

## PENGEMBANGAN KLASTER KETAHANAN PANGAN

**Klaster Hortikultura Pakcoy.** Terletak di pesisir utara Pulau Jawa dengan ketinggian 0 – 100 meter di atas permukaan laut, Kabupaten Indramayu menjadi salah satu sentra produksi padi yang cukup besar, dan hasil pertanian lain seperti sayuran dan buah-buahan serta palawija. Jenis sayuran yang ditanam biasanya bersifat genetis yang sesuai dengan iklim dataran rendah.

Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) Sadar sebagai mitra klaster mencoba mengembangkan teknologi budidaya sayuran dataran tinggi di dataran rendah seperti bunga kol, kubis dan pakcoy. Uji coba pertama budidaya sayuran merupakan bantuan jaring pelindung sinar matahari (*shedding net*) dengan dukungan dana CSR (*Corporate Social Responsibility*) dari Kantor BI Cirebon. Hasilnya sangat menggembirakan, kualitas sayuran sangat baik dan diterima pasar ekspor.

Pada 2011, Kantor BI Cirebon memprogramkan pembentukan klaster sayuran pakcoy di Desa Wanakaya, Kecamatan Haulgeulis, Kabupaten Indramayu, di atas lahan seluas sekitar 8 hektar. Dibentuk pula klaster manajemen dalam wadah koperasi hortikultura Indonesia. Untuk mendukung kegiatan klaster tersebut Kantor BI Cirebon memberikan bantuan BSR berupa *shedding net*, mobil *cold storage*, dan sarana produksi yaitu bibit, pupuk, dan obat-obatan tanaman.

**Perluasan Klaster Bawang Merah.** Bawang merah merupakan komoditas yang sering "berkontribusi" terhadap inflasi di Indonesia. Di wilayah Ciayumajakuning, tanaman bawang merah ditemukan pada hampir setiap kabupaten, dan yang terluas terhampar di Kabupaten Cirebon. Total luas lahan bawang merah di kabupaten itu mencapai lebih dari 4.500 hektar dengan jumlah petani bawang sekitar 3.500 orang yang tersebar di kecamatan Gebang, Pangenan, Losari, Pabedilan, dan Ciledug. Di Desa Ender, Kecamatan Pangenan, lahan tanaman bawang sekitar 286 hektar. Pokok masalahnya bagaimana meningkatkan produksi tanaman tersebut.

Sehubungan dengan itu, Kantor Perwakilan Bank Indonesia Wilayah III Cirebon melakukan kerja sama dengan pemerintah daerah dalam

Program Pengembangan Klaster Bawang Merah. Bantuan teknis dan PSBI (Program Sosial Bank Indonesia) yang diberikan kepada petani klaster bawang merah Desa Ender berupa bibit dan sarana produksi pertanian, palet besi, *cold storage*, alat dan mesin pertanian (traktor, dll.), *capacity building*, dan pameran.

Secara umum, program tersebut lebih mengutamakan proses kegiatan dari hulu ke hilir, seperti penanaman, pendampingan, dan pemantauan kepada petani agar pembudidayaannya sesuai dengan petunjuk teknis sehingga dapat meningkatkan produksi. Kegiatan pascapanen berupa monitoring hasil panen dan memperkuat akses pemasaran. Dalam perbibitan, dilakukan pendampingan untuk memproduksi bibit dengan tujuan mendukung ketersediaan bibit di lingkungan klaster secara mandiri.

Pada 2014, Kantor BI Cirebon melakukan pengembangan program klaster bawang merah di Kabupaten Majalengka. Pengembangan itu merupakan kerja sama dengan kelompok tani dalam memenuhi pasokan kebutuhan pasar yang meningkat saat itu. Program pengembangan klaster di kabupaten itu dimaksudkan sebagai ekstensifikasi dan intensifikasi untuk meningkatkan produksi. Terkait dengan itu, dilakukan pula kerja sama dengan kantor Badan Pertanahan Nasional Majalengka untuk peningkatan sertifikasi hak atas tanah petani.

Potensi luas lahan tanaman bawang merah di Kabupaten Majalengka ditaksir sekitar 3.000 hektar. Sejak 2014 hingga 2020, program pengembangan berlangsung di Desa Kulur, Kecamatan Majalengka (luas lahan tanaman 213 hektar); dan di Desa Payung, Kecamatan Rajagaluh (50 hektar) mulai 2019 hingga sekarang. Bantuan teknis dan PSBI yang diberikan kepada klaster bawang merah Desa Kulur berupa sarana produksi, alat dan mesin pertanian, alat transportasi (motor tiga roda), gudang bibit, *capacity building*, akses pemasaran dan intermediasi perbankan. Kini, klaster bawang merah di Desa Kulur memasuki tahap mandiri. Sebelum program tersebut benar-benar dilepas secara mandiri, kegiatan diarahkan untuk membuat replikasi program yang sama ke wilayah lain. Pada 2019, replikasi dikembangkan di Desa Payung yang diberi bantuan teknis dan PSBI berupa bibit bawang merah, demplot penangkaran bibit dan gudang bibit.

**Gambar 6.7.** Klaster Argalingga, Kabupaten Majalengka
Sumber: Data Internal Bank Indonesia Cirebon.

**Klaster Komoditas Cabai Merah.** Cabai merah merupakan komoditas yang paling sering memberi andil dalam perhitungan inflasi. Komoditas yang telah lama dikembangkan di berbagai wilayah Ciayumajakuning itu masih banyak menghadapi kendala, umumnya berupa faktor alam, seperti serangan hama dan penyakit tanaman, ditambah dengan perubahan iklim membuat komoditas ini rentan terhadap gangguan hama. Berbagai upaya mengatasi kendala telah dilakukan oleh pemerintah setempat, mulai dari pemberian bantuan obat-obatan dan teknologi.

Dalam pada itu, Kantor BI Cirebon, bersama TPID, berperan mengendalikan inflasi. Salah satu program pengendalian inflasi Kantor BI Cirebon ialah membentuk klaster ketahanan pangan komoditas cabai merah di Kabupaten Kuningan pada 2017, yang berlokasi di Kecamatan Kramatmulya, Cikaso, kemudian diperluas ke Desa Seda. Bekerja sama dengan Universitas Padjajaran, Kantor BI Cirebon membuat perjanjian pendampingan untuk mencapai tujuan program klaster cabai merah yaitu pencapaian produksi yang baik dan pemberdayaan masyarakat.

Kantor BI Cirebon memberikan bantuan teknis dan PSBI kepada klaster cabai merah di Kecamatan Kramatmulya (luas lahan tanaman 15

hektar) beranggotakan 25 orang petani, dan Desa Argalingga (25 hektar) dengan 20 orang anggota. Bantuan yang diberikan berupa bibit dan sarana produksi pertanian, demplot cabai merah, *cultivator*, *rain shelter*, akses pemasaran, obat-obatan, pupuk, dan gudang bibit.

**Klaster Komoditas Padi/Beras.** Seperti cabai, beras sering menjadi salah satu komoditas yang memberikan kontribusi terhadap inflasi di Indonesia. Di wilayah Ciayumajakuning, tanaman padi praktis ditemukan di setiap kabupaten; yang terluas berada di Kabupaten Indramayu, yang merupakan lumbung beras nasional dan diharapkan dapat menjaga pasokan kebutuhan pokok itu. Akan tetapi, sisi distribusi beras masih bermasalah; banyak pihak terlibat dalam rantai pemasaran sehingga menyebabkan harga beras tidak stabil dan memengaruhi inflasi.

Sebagai upaya mengendalikan inflasi, Kantor BI Cirebon bekerja sama dengan Pemerintah Kabupaten Indramayu membentuk program klaster padi/beras. Program itu diharapkan dapat menjadi jalan keluar permasalahan petani di wilayah klaster, dan dapat meningkatkan minat petani muda untuk mengembangkan pertanian— apalagi ditunjang teknologi modern sehingga menjadi daya tarik bagi petani muda. Terdapat dua lokasi pengembangan klaster padi yaitu Desa Mundakjaya (luas lahan tanaman 15 hektar), sejak 2017 hingga sekarang, beranggotakan 60 orang petani; dan Desa Bugistua (25 hektar), sejak 2018 hingga sekarang, dengan 40 orang anggota.

Saat ini klaster padi di Desa Mundakjaya melakukan sistem produksi kolektif yaitu melakukan kerja sama dengan beberapa kelompok tani di berbagai desa untuk melakukan produksi; kemudian Koperasi Gapoktan Tani Mulus bertindak sebagai pihak yang memasarkan. Bahkan, pada 2020, Koperasi Mulus ditetapkan sebagai *pilot project* program korporasi petani oleh Kementerian Koperasi dan UMKM dan Kementerian Pertanian. Dalam program tersebut, Kantor BI Cirebon berperan memperkuat kelembagaan dan akses keuangan kepada perbankan.

Klaster padi kedua di Desa Bugistua, wilayah Indramayu barat, didukung oleh pengairan irigasi teknis maupun nonteknis sehingga panen dapat dilakukan tiga kali dalam setahun. Luas hamparan per satu orang sekitar 2 hektar. Saat ini, kelompok cinta tani di Desa Bugistua telah

bergabung dalam Koperasi Gapoktan Tani Mulus, mendukung program korporasi petani.

Pembentukan klaster beras di Kabupaten Indramayu sejalan dengan Rencana Strategi 2017 Pemerintah Kabupaten Indramayu tentang pengembangan pertanian padi/beras. Pelaksanaan kegiatan dilakukan bersinergi dengan masing-masing SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah). Pengembangan klaster beras di Indramayu diharapkan dapat membuka peluang kerja untuk masyarakat terutama kaum muda yang keterlibatannya dalam pengembangan usaha pertanian dirasakan mulai berkurang.

Seperti pada klaster tanaman komoditas yang lain, Kantor BI Cirebon memberi bantuan teknis dan PSBI kepada petani anggota klaster. Bantuan berupa bibit dan sarana produksi pertanian, demplot padi Hazton, alat mesin *continues sealer*, *capacity building*, mesin pengering gabah, obat-obatan, pupuk. dan *transplanter*.

**Gambar 6.8.** Klaster padi di Desa Bugistua, Kabupaten Indramayu
Sumber: Data Internal Bank Indonesia Cirebon.

## PENGEMBANGAN KOMODITAS UNGGULAN DAERAH

Batik Ciwaringin. Batik Ciwaringin yang diproduksi oleh sebagian besar kaum perempuan ini menjadi komoditas unggulan Kabupaten Cirebon. Diproduksi dalam usaha rumahan dan sampingan secara turun-temurun dengan melibatkan perempuan ibu-ibu rumah tangga yang sudah tua. Khas Kabupaten Cirebon, batik Ciwaringin menggunakan pewarna alami yang berasal dari ekstrasi kayu-kayuan, dedaunan dan akar. Hal itu mengantarkannya mendapatkan penghargaan internasional Clean Batik Initiative sebagai produk yang ramah lingkungan. Terdapat kelembagaan koperasi, tetapi belum secara optimal menjalankan fungsi layanan kepada anggota.

Berikut adalah beberapa aspek penting batik Ciwaringan.

1. Aspek budidaya/produksi
    a. Memberi pelatihan eksplorasi warna alam
    b. Memfasilitasi kegiatan studi banding ke Bali
    c. Memfasilitasi kegitan pelatihan teknis motif pembatikan
    d. Mengembangan program *local economic development*
2. Aspek pengolahan pascapanen (peningkatan nilai tambah)
    a. Mendorong pengembangkan teknis pembatikan dan pengembangan motif melalui studi banding
    b. Mendorong pengembangan desain pakaian
3. Aspek kelembagaan dan manajemen
    a. Pelatihan manajemen keuangan
    b. Pelatihan manajemen koperasi
4. Aspek pemasaran (pelatihan pengemasan, fasilitasi akses pasar, *e-commerce*, dll).
    a. Memfasilitasi kegiatan pameran di berbagai *event* seperti Karya Kreatif Indoneisa, Indonesia Sharia Economic Forum, Cirebon Entrepreneur Fest, Tasikmalaya Entrepreneur Fest, Karya Kreatif Manado dan lain-lain.

b. Memfasilitasi pelatihan manajemen pemasaran
c. Pelatihan pengemasan produk
d. Memfasilitasi pemasaran melalui *e-commerce* Koperasi Karya Bina Bank Indonesia Cirebon
e. Memberi bantuan pembangunan gedung *showroom/gallery* batik Ciwaringin

5. Aspek pendukung lainnya
   a. Membantu kegiatan promosi ke berbagai wilayah

Kopi Cibeureum. Kopi ini merupakan salah satu komoditas unggulan Desa Cibeureum, Kecamatan Cilimus, Kabupaten Kuningan, di kaki Gunung Ciremai dengan ketinggian 500-700 mdpl. Dikelola oleh salah satu kelompok tani Ratu Asih yang saat ini dibina oleh Bank Indonesia Cirebon. Namun, masih terdapat masalah dalam kegiatan pertanian kopi tersebut yaitu kebiasaan petani memetik biji kopi secara parol (campur antara hijau dan merah) sehingga hanya dihargai rendah oleh pasar. Selain itu, minim penggunaan teknologi sehingga kopi yang diolah tidak standar. Kopi Cibeureum adalah jenis kopi robusta yang memilki cita rasa yang unik dengan sensasi rasa yang unik yaitu *nuty*, *brown sugar*, dan *dark chocolate* yang menyerupai rasa kopi arabica.

Jangkauan pasar kopi Cibeureum masih terbatas karena kurang promosi dan strategi dalam pemasaran. Untuk mengatasi masalah tersebut, Kantor BI Cirebon menjalin kerja sama dengan para pemangku kepentingan yaitu, pertama, Pemerintah Daerah Kabupaten Kuningan berkaitan dengan pengembangan ekonomi daerah, pengendalian inflasi dan penggunaan rupiah. Kedua, dengan SCOPI (*Sustainable Coffee Platform Indonesia*) Jakarta tentang pengembangan pengolahan kopi robusta berkelanjutan dan pasacapanen. Ketiga, Pemerintah Desa Cibeureum mengenai pelaksanaan kegiatan LED (*local economic develompment*).

Pada 2018, Kantor BI Cirebon mencanangkan program LED komoditas kopi dengan tujuan mengembangkan ekonomi desa sehingga diharapkan tercipta ekosistem ekonomi masyarakat yang berbasis pada komoditas unggulan kopi, pemberdayaan perempuan serta

pengembangan konservasi lingkungan. Selain itu, program LED bertujuan memperkenalkan dan mendorong pemasaran kopi robusta Cibeureum masuk pasar lebih luas melalui berbagai kegiatan dan penciptaan Desa Wisata Kopi Cibeureum yang dapat menarik minat wisatwan untuk datang.

Jenis kegiatan pengembangan kopi Cibeureum sebagai berikut.

1. Pengembangan Desa Wisata Kopi Cibeureum.
    a. Kampung warna-warni; *spot* daya tarik bagi wisatawan untuk mengunjungi obyek wisata Setu Sanghiang Kendit.
    b. Kedai kopi Lakeside Cafe; mengenalkan kopi Cibeureum kepada wisatawan sambil menikmati panorama alam Setu Cibeureum dan Gunung Ciremai.
    c. Ruang edukasi kopi; memberikan paket pelatihan perkopian
    *d.* *Coffee walk*; sarana olah raga berupa *jogging track* untuk memperkenalkan aktivitas petani kopi Cibeureum dengan mengitari area kebun kopi.
    e. Wisata fauna monyet ekor panjang; "atraksi" monyet-monyet berekor panjang yang keluar dari kawasan Taman Nasional Gunung Ciremai untuk mencari makanan pada jam-jam tertentu.
    f. Wisata *agroforesty*; edukasi umum tentang kawasan hutan di Taman Nasional Gunung Ciremai.
2. Pengembangan Kewirausahaan dan Pemberdayaan Perempuan
    a. Penciptaan produk olahan makanan berbahan kopi sebagai oleh-oleh khas Desa Cibeureum.
    b. Pemberdayaan masyarakat perempuan dalam melaksanakan kegiatan ekonomi desa.
3. Pengembangan Konservasi Lingkungan
    a. Pengolahan sampah; pembangunan tempat pembuangan sampah untuk mengolah sampah rumah tangga baik organik maupun nonorganik menjadi produk bernilai ekonomi

b. Kawasan rumah pangan lestari; pengembangan lingkungan melalui pemanfaatan pekarangan rumah dengan tanaman kebutuhan sehari-hari (sayur, palawija dan buah-buahan).

c. Program reboisasi; penanaman kembali hutan dan peremajaan tanaman kopi.

4. Pengembangan Pemasaran Kopi
   a. Mengikuti pameran kopi berskala nasional dan international; kerja sama dengan berbagai pihak (kedai dan barista).
5. Pengembangan Kapasitas Petani
   a. Pelatihan *onfarm* dan *off-farm*.
6. Pengembangan Kelembagaan Kelompok Usaha
   a. Pengembangan kelompok wanita tani.
   b. Pengembangan Badan Usaha Milik Desa.

## PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI SYARIAH

Program Pengembangan kegiatan ekonomi syariah Kantor BI Cirebon merupakan perwujudan salah satu pilar pengembangan UMKM Bank Indonesia. Terkait hal itu telah dilaksanakan beberapa kegiatan ekonomi syariah dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi, mengintegrasikan sektor keuangan dan sektor riil, serta mengembangkan kebijakan ekonomi berbasis pemberdayaan masyarakat yang berkesinambungan sesuai dengan nilai-nilai syariah.

Kegiatan ekonomi syariah berfokus pada *halal value chain* sebagai berikut. Pertama, Program Sertifikasi Produk UMKM, berupa fasilitasi kepada Wirausaha Unggulan Bank Indonesia; berbentuk pendampingan halal produk bekerja sama dengan Majelis Ulama Indonesia Provinsi Jawa Barat. Fasilitasi halal produk telah dilaksanakan bagi 40 UMKM pada 2019-20.

Kedua, Program Kemandirian Ekonomi Pesantren, berupa pembinaan kepada pesantren melalui Program Sosial Bank Indonesia dengan memfasilitasi kegiatan keberlanjutan berbagai usaha ekonomi

di lingkungan pondok pesantren. Program ini dimulai sejak 2017, merupakan bagian dari pengembangan ekonomi berbasis model bisnis halal *value chain* sesuai dengan model yang dikembangkan dalam kajian Departmen Ekonomi Syariah Bank Indonesia. Fokus kegiatan ialah mendorong unit-unit usaha ekonomi di lingkungan pondok pesantren dengan tujuan meningkatkan skala usaha yang akan berdampak pada pengelolaan keuangan pondok pesantren bersangkutan. Sebanyak 14 pondok pesantren telah dikembangkan melalui program ini (Tabel 6.5).

**Tabel 6.5.**
**Program Kemandirian Ekonomi Pesantren**

| No. | Nama Pesantren | Usaha | Domisili/ Kabupaten |
|---|---|---|---|
| 1 | YPLI Buntet | Buntet mart; pengelolaan sampah | Cirebon |
| 2 | Khas Kempek | Toko kelontong; lembaga jasa keuangan mikro syariah | Cirebon |
| 3 | Saung Balong | Tanaman hidroponik; restoran | Majalengka |
| 4 | Almuminien | Pertanian terpadu | Indramayu |
| 5 | Al Islah Tajug | Usaha kue-kue; toko kelontong; jasa penatu | Indramayu |
| 6 | Attaqwa Digital | Pemasaran digital | Cirebon |
| 7 | Al Islah Bobos | Koperasi; batu alam; toko serba ada | Cirebon |
| 8 | Nadwatul Banin | Pengelolaan sampah | Cirebon |
| 9 | Madinantun Najah | Pariwisata; pertanian | Kuningan |
| 10 | Kebon Jambu Al Islamy | Toko kelontong; jasa menjahit | Cirebon |
| 11 | Sabilul Mardiyah | Pertanian; air minum | Majalengka |
| 12 | Sain Salman Assalam | Perikanan | Cirebon |
| 13 | Annur Dukuhdalem | Jasa penatu; toko kelontong | Kuningan |
| 14 | Busntanun Najah | Perikanan | Kuningan |

Sumber: Data Internal Bank Indonesia Cirebon

Bank Indonesia memiliki program pembinaan bagi UMKM disebut Wirausaha Unggulan Bank Indonesia. Saat ini telah dikembangan melalui program terpadu yang diseleksi oleh Bank Indonesia berdasarkan kriteria

dan rencana bisnis. Jumlah UMKM Binaan Kantor BI Cirebon sebanyak 71 orang yang tersebar di beberapa wilayah. Berdasarkan data SIKEPANG (Sistem Informasi Ketahanan Pangan) tahun 2017, 35 UMKM berkategori aktif, 20 mengalami *passing out*, dan 16 nonaktif.

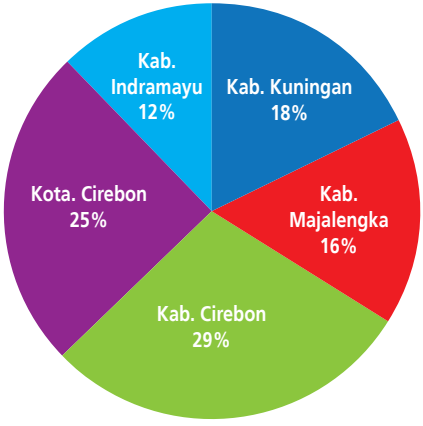


**Gambar 6.9.** Program Wirausaha Bank Indonesia
Sumber: Data Internal Bank Indonesia Cirebon

Kantor BI Cirebon juga memiliki program pengembangan UMKM tematik yang lain seperti program pengembangan garam. Industri garam di Kabupaten Cirebon sangat potensial untuk dikembangkan dengan kelayakan lahan seluas 3.205 hektar; 3.000 hektar di antaranya telah dikelola secara aktif. Produksi garam Cirebon tahun 2012 (s.d. September) mencapai 183.237 ton, sementara kebutuhan garam Cirebon hanya 20.000 ton. Kelebihan produksi dijual ke Jakarta dan wilayah sekitarnya, Jawa Tengah, Sumatera, Batam, dan Kalimantan. Namun, kemampuan produsen menghasilkan garam berkualitas tinggi (Kw-1) sesuai dengan SNI sangat terbatas.

Produktivitas garam rakyat masih terbatas dan sebagian besar berkualitas rendah (Kw-3/Kw-4); lahan garam dikelola secara tradisional sehingga harga jual juga rendah. Kondisi diperburuk dengan penguasaan penjualan garam oleh pengepul atau tengkulak yang menekan harga

garam rakyat. Soalnya, banyak petani garam terlibat utang kepada pengepul/tengkulak, baik untuk biaya proses pembuatan dan panen garam maupun biaya hidup sehari-hari.

Untuk membantu meningkatkan mutu dan produktivitas garam rakyat, Kantor BI Cirebon menandatangani perjanjian kerja sama dengan Koperasi Unit Desa Harumsari (2013) yang beranggotakan petani garam di Kecamatan Suranenggala dan Kapetakan, Kabupaten Cirebon. Program pemberdayaan masyarakat petani garam ini menindaklanjuti bantuan pembangunan gudang untuk menambah kapasitas daya tampung yang sudah dimiliki oleh KUD Harumsari. Gudang berkapasitas 900 ton tersebut selesai dibangun pada Desember 2012 dengan menggunakan dana PSBI Reguler yang tersedia di Kantor BI Cirebon.

Selain itu terdapat program pengembangan Bank Indonesia *Village Care*. Program Desa BI Peduli Desa Sidamukti, Kabupaten Majalengka, dilaksanakan pada 2016-17, merupakan program pembangunan desa terintegrasi dalam kesehatan, pendidikan, kewirausahaan pariwisata yang memperhatikan usaha-usaha pelestarian kehidupan sosial-budaya masyarakat lokal dan lingkungan hidup di daerah tujuan pembangunan desa. Program ini memberikan manfaat ekonomi kepada masyarakat lokal secara berkelanjutan yang dapat diwariskan kepada generasi selanjutnya.

Desa Sidamukti merupakan penghasil buah gedong gincu unggulan Kabupaten Majalengka, yang banyak melibatkan aktivitas perempuan. Oleh karena itu, program Bank Indonesia Village Care 2018 diarahkan pada pengembangan wirausaha dan pemberdayaan perempuan. Peran Kantor BI Cirebon bersama pemerintah adalah mendorong kegiatan tersebut melalui usaha penguatan produk, kelembagaan, dan promosi produk melalui pameran.

Program lainnya ialah kampung inflasi yang merupakan salah satu upaya Bank Indonesia (Cirebon) dalam pengendalian inflasi dari sisi *supply* melalui optimalisasi pengembangan program kegiatan yang melibatkan sinergi pemerintah dan warga berbasis pemberdayaan masyarakat yang berkelanjutan. Dari pemantauan diketahui terdapat dua kelompok masyarakat yang masih terus melaksanakan program tersebut. Kedua kelompok berada di kelurahan Lemahwungkuk dan Larangan, Kota Cirebon, masing-masing beranggotakan 20 orang dan 40 orang.

# KEBIJAKAN MONETER, SISTEM PEMBAYARAN DAN SISTEM KEUANGAN

Stabilitas sistem keuangan merupakan upaya untuk menjamin bahwa sistem keuangan dapat berjalan secara efektif dan efisien sehingga alokasi sumber pendanaan dan pembiayaan dapat berkontribusi dalam stabilitas pertumbuhan dan stabilitas perekonomian nasional. Pengertian ini tertuang dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 16/11/PBI/2014 tentang Pengaturan dan Pengawasan Makroprudensial. Stabilitas keuangan dilakukan dengan menggunakan kebijakan makroprudensial. Kebijakan ini bertujuan untuk memelihara stabilitas keuangan yang menyeluruh melalui pembatasan risiko sistemik. Mengacu pada PBI Nomor 16/11/PBI/2014 tersebut, risiko sistemik didefinisikan sebagai potensi instabilitas akibat terjadinya gangguan yang menular (contagion) pada sebagian atau seluruh sistem keuangan karena interaksi dari faktor ukuran (size), kompleksitas usaha (complexity), keterkaitan antarinstitusi dan/atau pasar keuangan (interconnectedness), serta kecenderungan perilaku yang berlebihan dari pelaku atau institusi keuangan untuk mengikuti siklus perekonomian (procyclicality).

Pendekatan yang digunakan dalam penerapan kebijakan ini adalah *top-down* yang dapat menjangkau setiap elemen sistem keuangan yang meliputi lembaga keuangan, pasar keuangan, infrastruktur keuangan, serta perusaahaan non-keuangan dan rumah tangga. Adapun strategi operasional kebijakan makroprudensial adalah sebagai berikut.

1. Identifikasi sumber risiko sistemik; selain berdasarkan asesmen internal, BI melakukan survei dan kelompok diskusi terpumpun kepada *stakeholder* untuk dapat menangkap potensi risiko sistemik dari sudut pandang pemangku kepentingan, seperti perbankan, pakar ekonomi, media, akademisi, dan pelaku pasar lainnya.
2. Pengawasan makroprudensial BI memiliki wewenang untuk melakukan pengawasan secara langsung ataupun tidak langsung pada institusi keuangan terkait, dengan berkoordinasi dengan Otoritas Jasa Keuangan. Pengawasan makroprudensial dilakukan melalui

monitoring, *stress identification* serta *risk assessment* terhadap potensi risiko yang telah teridentifikasi sebelumnya. Berdasarkan proses tersebut, BI akan mengeluarkan sinyal risiko. Jika asesmen menunjukkan bahwa stabilitas sistem keuangan terjaga dengan baik, BI akan melakukan proses pengawasan seperti biasa. Dalam hal risiko menunjukkan peningkatan yang patut diwaspadai, BI akan megambil respon kebijakan melaui perumusuan kebijakan makroprudensial. Terakhir, jika sinyal risiko menunjukkan potensi krisis, BI akan mengaktifkan Protokol Manajemen Krisis.

3. Respons kebijakan melalui desain dan implementasi instrumen kebijakan makroprudensial. Instrumen kebijakan makroprudensial diterapkan untuk mencegah terjadinya risiko sistemik. Berdasarkan cakupannya, instrumen dapat diterapkan secara umum (misalnya *Countercyclical Buffer*) maupun ditargetkan ke sektor tertentu (*Loan to Value Ratio*). Sedangkan dari sisi obyek, instrumen dapat ditujukan untuk mengatur permodalan, kredit, likuiditas ataupun intermediasi.
4. Protokol Manajemen Krisis (PMK); apabila hasil asesmen menunjukkan peningkatan risiko yang menuju ke krisis, BI akan segera mengaktifkan PMK.

Bank Indonesia memiliki kepentingan paling tinggi dalam menjaga stabilitas sistem keuangan. Bank Indonesia memiliki mandat dan wewenang dalam menjaga stabilitas keuangan berdasarkan peraturan yang berlaku, yaitu Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan; Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan; Peraturan Bank Indonesia Nomor 16/11/PBI/2014 tentang Pengaturan dan Pengawasan Makroprudensial; dan Peraturan Dewan Gubernur Nomor 17/17/PDG/2015 tentang Kerangka Kebijakan Makroprudensial.

UMKM dinilai berkontribusi dalam perekonomian yang juga berperan dalam stabilitas keuangan melalui produk domestik bruto dan penyediaan tenaga kerja. Bahkan UMKM merupakan sektor ekonomi yang tangguh saat terjadi krisis. Sebagai bank yang mengemban fungsi intermediasi, Bank Indonesia dituntut senantiasa menjaga kualitas sistem keuangan dan peningkatan akses keungan secara seimbang. Upaya yang dilakukan Bank Indonesia dalam menjalankan mandat menjaga stabilitas sistem

keuangan di antaranya adalah perhatian intensif kepada UMKM yang berfokus pada akses pendanaan/pembiayaan serta peningkatan kualitas manajemen dan sumber daya yang dibutuhkan. Upaya ini dilakukan oleh Kantor BI Cirebon dengan melakukan pendampingan kepada UMKM dengan memfasilitasi aspek akses permodalan, produksi, pemasaran, pengelolaan usaha, inovasi, serta penyusunan laporan keuangan yang relevan dan reliabel yang dapat merefleksikan realitas bisnis.

## PERKEMBANGAN SISTEM PEMBAYARAN

Perkembangan sistem pembayaran tidak terlepas dari kebutuhan masyarakat dalam melakukan transaksi. Mekanisme pembayaran dituntut untuk selalu mengakomodasi setiap kebutuhan masyarakat dalam hal perpindahan dana secara cepat, aman dan efisien, maka inovasi teknologi pembayaran makin bermunculan dengan sangat pesat. Dapat dikatakan bahwa perkembangan sistem pembayaran saat ini sangat mengandalkan teknologi informasi. Meski demikian, seluruh mekanisme pembayaran harus berada dalam koridor ketentuan yang berlaku demi kelancaran dan keamanan sistem pembayaran. Kondisi sistem pembayaran saat ini lebih diarahkan melalui sistem nontunai. Hal ini tercermin melalui Gerakan Nasional Non Tunai.

Bank Indonesia berupaya mensukseskan gerakan nasional tersebut melalui program elektronifikasi. Berbagai bentuk transaksi secara elektronik antara lain elektronifikasi jalan tol, Bandar Udara Internasional Kertajati, elektronifikasi parkir, penyaluran bantuan sosial nontunai, pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah nontunai, implementasi transaksi pemasukan dan pengeluaran nontunai pemerintah daerah. Kerja sama antara Bank Indonesia dengan Bank BJB, Indomaret, Alfamart, dan PT Posindo terbukti mampu memperluas transaksi nontunai untuk pembayaran pajak melalui produk layanan bernama BJB TAX. Kota Cirebon dan Kabupaten Karawang menduduki peringkat tertinggi dengan persentase hampir mencapai 100 persen untuk transaksi nontunai penerimaan pemerintah di Jawa Barat; sedangkan peringkat terendah terdapat pada Kabupaten Sumedang dengan persentase pencapaian sebesar 43 persen.

Sistem pembayaran dilakukan baik secara tunai maupun nontunai. Sistem pembayaran tunai dilakukan dengan menggunakan uang kartal. Uang kartal adalah uang kertas dan logam sebagai alat pembayaran sah yang diedarkan oleh Bank Indonesia. Berbagai hal yang berkaitan dengan transaksi secara tunai dengan menggunakan uang kartal adalah kondisi uang tidak layak edar (lusuh/rusak) dan keberadaan uang palsu. Saat terjadi indikasi uang tidak layak edar, Kantor BI Cirebon akan melakukan Pemberian Tanda Tidak Berharga dengan cara memusnahkan uang yang tidak layak edar. Selama periode triwulan IV/2013 Kantor BI Cirebon telah memusnahkan uang senilai 1,1 miliar rupiah. Dari uang yang dimusnahkan itu, pecahan terbanyak adalah Rp5.000 dan Rp50.000. Untuk meminimalisasi jumlah uang tidak layak edar, Bank Indonesia melakukan kampanye 3-D (Didapat, Disimpan, Disayang). Kini, jumlah uang palsu di Wilayah III Cirebon makin menurun. Rasio uang palsu terhadap jumlah *inflow*, *outflow* dan jumlah kas di perbankan hanya sebesar 0,000015 pada triwulan IV/2013.

Berlakunya undang-undang yang mengatur uang dan peredarannya menjadikan pengawasan terhadap peredaran uang palsu menjadi makin ketat dan sanksi hukum yang makin berat. Rasio uang palsu terhadap uang tunai yang diedarkan oleh Kantor BI Cirebon sebesar 15 lembar berbanding 1 juta lembar. Kantor BI Cirebon menjalin kerja sama dengan pihak kepolisian untuk memerangi peredaran uang palsu. Selain itu, sosialisasi mengenai pengenalan uang palsu makin digencarkan berbagai pihak di kalangan perbankan, industri keuangan, hingga masyarakat umum dan pelajar.

Ditinjau dari jumlah *inflow* dan *outflow*, rata-rata uang kartal yang masuk di Wilayah III Cirebon sebesar 51,4 miliar rupiah per hari. Jumlah tersebut menurun 27,55 persen (yoy) dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun sebelumnya. Sementara jumlah uang kartal yang keluar sebesar 26,7 miliar rupiah per hari atau menurun sebesar 22,5 persen (yoy). Transaksi yang dilakukan melalui transaksi elektronik yang makin meningkat juga berperan dalam penurunan jumlah *inflow* dan *outflow* uang kartal di Wilayah III Cirebon.

Selain menggunakan sistem pembayaran tunai, Bank Indonesia menyediakan sistem pembayaran secara nontunai yang dilakukan melalui kliring lokal dan Bank Indonesia *Real Time Gross Settlement* (BI-RTGS; atau RTGS). Selama 2013, transaksi masyarakat melalui kliring lokal dan BI-RTGS mengalami perlambatan. Kliring pada kuartal IV/2013 melambat sebesar 5,05 persen (yoy) dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun sebelumnya. Nilai rata-rata kliring sebesar 74,845 miliar rupiah per hari. Hal berbeda terjadi pada transaksi dengan penyelesaian BI-RTGS yang mengalami peningkatan secara nominal dan secara nilai. Rata-rata volume RTGS meningkat sebesar 78,14 persen (*yoy*) dari periode sebelumnya. Sementara dilihat dari sisi nilai transaksi, mengalami peningkatan sebesar 111,6 persen (*yoy*). Rata-rata nilai transaksi sebesar 1 miliar rupiah per hari. Nilai transaksi RTGS tertinggi terdapat di Kabupaten Kuningan yang mencapai 591 miliar rupiah, sedangkan volume transaksi tertinggi terdapat di Kabupaten Cirebon dengan volume transaksi mencapai 826 transaksi.

BAB 7

# Gedung Kantor Perwakilan Bank Indonesia dan Bangunan Cagar Budaya di Cirebon

Keberadaan Gedung De Javasche Bank di jantung Kota Cirebon dapat dilihat sebagai konsekuensi logis dari perkembangan kota itu sendiri. Kilas balik tentang sejarah awal memperlihatkan bahwa kesibukan Cirebon sebagai pusat kegiatan ekonomi pedagang telah dimulai sejak masa kerajaan klasik pasundan di wilayah itu. Pembukaan kantor yang diikuti pembangunan gedung DJB mempertegas kehadiran modernitas di sana pada awal pergantian abad. Dilihat dari langgam arsitekturalnya, gedung itu mencerminkan unsur budaya kosmopolit Eropa yang dibawa oleh perancangnya. Telah ditetapkan menjadi Bangunan Cagar Budaya bersama bangunan lain yang sangat kaya—keraton, pendapa kabupaten, taman, masjid, gereja, kelenteng, perkantoran dan pabrik komersial hingga stasiun kereta api. Mewujudkan mozaik lintas-kultural yang sangat bermakna. Suatu gedung biasanya berumur lebih panjang daripada manusia pada umumnya sehingga apa yang dilihat saat ini akan dilihat dan dialami generasi selanjutnya. Artinya, menjadi suatu urgensi untuk terus melakukan perawatan, pelindungan, dan pelestariannya.

# TOPONIMI DAN MORFOLOGI KOTA CIREBON

Cerita rakyat dan perkisahan lama, *Carub Kandha,* menyebutkan bahwa toponimi Cirebon berasal dari nama sungai yang bermuara di sisi selatan pelabuhan lama sekarang. Nama itu merupakan gabungan dari kata *ci*[1] yang berarti 'batang air' dan *rebon*[2] 'udang kecil' sebagai nama sungai. Kini, sungai kecil itu tidak bisa ditemukan lagi karena telah ditutup dan bagian hulunya diluruskan ke laut sebagai Kali Baru.[3]

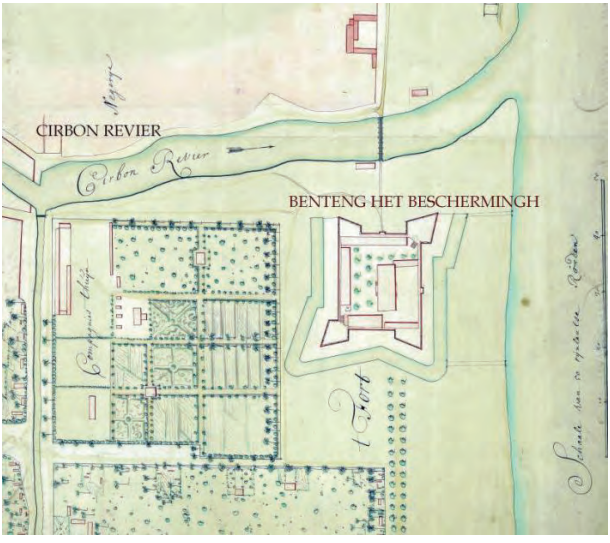


**Gambar 7.1.** Peta Kali Cirebon (Cirbon Revier) akhir abad ke-17
Sumber: Arsip Nasional Kerajaan Belanda.

Pada masa pra-Islam, di bawah kekuasaan Kerajaan Galuh-Sunda, keberada-an Kali Cirebon sangat penting sehingga penamaannya menggunakan bahasa Sunda. Baru ketika pesisir utara Jawa menjadi persinggahan—bagian dari Jalur Sutra yang didominasi saudagar Muslim

1 Lihat Satjadibrata (1954: 435); Lembaga Basa & Sastra Sunda (1985: 91).
2 Satjadibrata (1954: 329); Lembaga Basa & Sastra Sunda (1985: 423).
3 Molsbergen (1931: 14).

sejak abad ke-14—muara Kali Cirebon menjadi pelabuhan utama menggantikan Muarajati di muara Kali Bondet di sebelah utara. Pada 1681, sebagai hasil perjanjian dengan penguasa lokal, kongsi dagang VOC membangun Benteng Beschermingh (atau Beschermer) di sisi muara sungai ini.

**Gambar 7.2.** Peta Cirebon akhir abad ke-17
Sumber: Arsip Nasional Kerajaan Belanda.

Asal kata kedua Cirebon adalah *caruban*1,[4] yang kemudian berubah menjadi *cerbon* dan akhirnya *cirebon*. Konon nama ini diberikan karena Cirebon pada abad ke-15 dan awal abad ke-16 ramai dikunjungi orang dari berbagai tempat. Saudagar Jawa, Koja, Arab dan Cina, singgah dan

4 *Caruban* tidak terdapat dalam bahasa Sunda, tetapi bermakna dalam bahasa Jawa; lihat misalnya dalam Pigeaud (1938: 575); Poerwadarminta (1939: 626).

berdiam di sana sehingga orang-orang Demak dan Gresik[5] menyebutnya *caruban* yang berarti tempat bercampur orang dari berbagai asal. Satu istilah lagi yang sering digunakan oleh orang Cirebon untuk menyebut kota mereka yaitu *gragé*, pengucapan singkat dari *nagara gedé*.2F[6] Mestinya nama yang terakhir ini diberikan setelah Cirebon mencapai kejayaannya sebagai kerajaan.

Pada awalnya, Cirebon merupakan bawahan dari kerajaan Galuh-Pajajaran[7] yang terhubung ke selatan, menyisir lereng timur Gunung Ciremai, melalui Kuningan menuju Kawali (pusat Kerajaan Galuh). Jalur itu menjadikan Cirebon sebagai pelabuhan penting yang menghubungkan pedalaman dengan Laut Jawa, memiliki tiga sampai empat perahu jung dan beberapa *lanchara*, sedangkan Losari hanya memiliki dua jung dan lima *lanchara,* dan Tegal memiliki dua jung serta beberapa *lanchara*[8] untuk mengekspor beras.

Cirebon juga menjadi simpul pertemuan jalur jalan kuno sepanjang pantai utara Jawa dengan dua persimpangan, ke selatan dan barat daya hingga Sumedang melalui Gunung Kromong. Jalur terakhir inilah yang pada awal abad ke-19, dikembangkan menjadi Jalan Raya Pos (*Groote Postweg*) dan menghubungkan Ukur (Bandung), Cianjur, Buitenzorg (Bogor) hingga Batavia. Namun, jalur ini sangat berat karena harus menyisir Gunung Pangrango melalui Puncak, kemudian menyeberangi sungai Cimanuk di Rajamandala dan sungai besar lain, selanjutnya Cimanuk di Karangsambung, yang terlalu lebar untuk dibuatkan jembatan pada masa itu.

Mula-mula bagian Cirebon yang berkembang berada di sisi utara, yaitu sepanjang Kali Bondet (Jamblang) dengan Pelabuhan Muarajati dan Sindangkasih (sekarang Sirnabaya) sebagai tempat kedudukan kuwu, penguasa lokal. Di sebelah selatan, kedudukan kuwu berada di Cirebon

5 Pada akhir abad ke 15, bahkan sebelum menjadi kerajaan Islam, kedua kota, Demak (dan Jepara) serta Gresik (juga Tuban dan Sedayu) sudah menjadi bandar dagang yang terkemuka di Pulau Jawa.

6 Bandingkan dengan ibu kota Mataram yang juga disebut Sargĕdé, singkatan dari Pasar Gĕdé.

7 De Graaf (1985: 137).

8 Lapian (2008: 49–50); jung adalah perahu berkapasitas muatan 150 ton. Lihat juga Cortesao (1990: 183).

Girang, agak jauh ke hulu. Naskah *Purwaka Caruban Nagari*F[9] mencatat bahwa syahbandar (juru labuhan) dengan gelar Ki Gedheng Tapa, yang menguasai sepanjang pesisir Cirebon, adalah putra kuwu Cirebon Girang, Ki Gedheng Kasmaya.[10] Dari keterangan ini, Cirebon atau Caruban tampaknya memusat ke muara Kali Bondet, yaitu Muarajati. Disebutkan, pelabuhan itu disinggahi orang dari berbagai negeri dan tempat: Cina, Arab, Parsi, India, Malaka, Tumasik, Pasai, Jawa Timur, Madura, Palembang.[11]

Sementara itu, seorang pangeran yang memeluk Islam, pindah ke Lemah-wungkuk atau Tegal Alang-alang yang terletak di antara Kali Cirebon dan Kali Suba atau Kasunean. Artinya, sebuah pemukiman baru dibuka dan diketuai oleh Ki Danusela, yang masih berkerabat dan kemudian menjadi mertuanya, sepulang ia naik haji dan menggantikan kedudukannya dengan nama Ki Cakrabuwana.

Naskah lain, *Carub Kandha*,[12] memberikan gambaran lebih jelas mengenai keadaan Cirebon. Ki Cakrabuwana mendirikan *dalem* baru lengkap dengan sebuah tajuk (masjid kecil) bernama Masjid Pajagrahan. Jika kuwu sebelumnya tinggal di Lemahwungkuk, di Bale Witana yang hingga sekarang masih ada di belakang kompleks Keraton Kanoman, maka *dalem* baru terletak di Kebon Pesisir (arah tenggara)—sekarang disebut Dalem Agung Pakungwati di dalam kompleks Keraton Kasepuhan. Sebagai penguasa yang mandiri, Ki Cakrabuwana bergelar Sri Mangana dan mengangkat pembantu utamanya, yaitu lembaga Jaksa Pepitu. dikepalai oleh Ki Buyut Narapatih dan bertempat tinggal di Kajaksan, sisi utara kota.[13] Kemudian Ki Tunjung Keling datang dan berdiam di sisi barat Kajaksan, sedangkan Maulana Magribi memilih tinggal di sebelah barat dalem, dan adiknya, Pangeran Makdum, mendirikan padepokan di sebelah selatan dalem, di seberang Kali Kasunean, yang hingga sekarang

9 Terjemahan Dasuki (1978).

10 Dasuki (1978: 6).

11 Dasuki (1978: 12).

12 Terdapat beberapa versi *Carub Kandha* dengan beberapa perbedaan detail; dalam tulisan ini digunakan Sudibjo (1980).

13 Sudibyo (1980: 112), pupuh XV 16.

disebut Desa Makdum.[14] Maulana Magribi berhasil mengalahkan Patih Magelung lalu memotong rambutnya di Sukalila, sebelah barat Kajaksan. Di situ pula nama Karanggetas lahir, sekarang menjadi nama jalan.[15]

**Gambar 7.3.** Kota Cirebon awal
Sumber: Arsip Nasional Kerajaan Belanda.

Cirebon berkembang pesat sesudah menantu dan keponakan Ki Cakrabuwana, Syarif Hidayatullah yang dikenal dengan gelar anumerta Sunan Gunung Jati, menggantikannya. Ia kemudian mengangkat dirinya menjadi penguasa mandiri, lepas dari hegemoni Demak dan tampaknya peristiwa itu dinyatakan dengan memperluas dan membangun Keraton

14 Sudibyo (1980: 128), pupuh XVII 112.

15 Sudibyo (1980: 132), pupuh XVII 28–9.

Dalem Agung Pakungwati. Sebagai kediaman raja yang mandiri, keraton dibangun menghadap ke utara,[16] sedangkan sebelumnya, sebagai penguasa bawahan, *dalem* menghadap ke timur. Keraton itu dikelilingi dinding (*kutha*) tinggi dan dilengkapi dengan alun-alun di sisi utara dan masjid agung di barat alun-alun. Peristiwa ini tidak tercatat secara jelas, mungkin pada perempat terakhir abad ke-15. Yang pasti, Cirebon mandiri setelah Syarif Hidayatullah kembali dari Banten, sesudah penguasa Demak ketiga, Tranggana, meninggal pada 1546.[17]

Disebutkan pula bahwa di batas kota terdapat sebuah *lawang sakéthéng* menghadap ke utara, di Jagabayan (sekitar pertigaan Jalan Pasuketan dan Jalan Karanggetas sekarang), sedangkan di sisi lain pintu *kasunéan* menghadap ke selatan.[18] Letaknya tidak jelas, mungkin di bangunan Lawang Sanga yang menghadap Kali Kasunean, seperti tampak pada Gambar 7.3. Batas-batas ini membuat permukiman orang asing berada di luarnya, seperti padepokan Pangeran Makdum (Arab) di seberang Kali Kasunean, dan kelenteng Cina Tiao Kak Sie[19] di seberang Kali Cirebon. Batas kota barat dalam peta itu tampaknya di Jagasatru, sesuai dengan namanya yang masih dipakai sampai sekarang.

Gambar 7.3 yang berjudul *Aftekeningh van de Stadt, en s'Comps Fortres tot Cheribon* dibuat pada akhir abad ke-17, bisa dianggap memberikan gambaran kota pada masa seabad sebelumnya. Peta ini menunjukkan dua pasar, yaitu di sisi utara alun-alun Kasepuhan dan satu lagi di belokan Kali Cirebon ke utara. Keduanya menunjukkan pusat kegiatan di dalam kota (alun-alun) dan luar kota (pelabuhan), pola yang tampak di kota-kota lama di pesisir Jawa. Juga menarik adalah tempat adu ayam (*hannenvechtrerij*), warisan tradisi lama, bahkan di Bali masih hidup sebagai bagian kegiatan keagamaan. Masih ada tanah lapang kecil di beberapa tempat strategis, di sisi alun-alun dan di persimpangan jalan, mungkin digunakan sebagai pasar tak berkala atau tempat menunggu dan bersosialisasi.

16 Herwindo (2019: 5). Arah hadap ini melanjutkan tradisi Keraton Majapahit. Lihat naskah *Nagarakrtagama*, penyunting Th. Pigeaud, misalnya.

17 De Graaf (1985: 143).

18 Irianto (2013: 6).

19 Menurut Ezerman (1922: 5), catatan tertua di kelenteng ini adalah tahun 1653.

Cirebon jatuh ke bawah pengaruh Mataram sejak Sultan Agung berkuasa, tetapi benar-benar direndahkan ketika Panembahan Ratu II (1640-62) dipanggil dan disandera di Mataram oleh Amangkurat I sejak 1648 hingga wafat pada 1662. Bersamanya ikut dua anak tertuanya, Pangeran Mertawijaya dan Pangeran Kertawijaya, yang baru bisa kembali setelah pemberontakan Trunajaya (1677), membuat Sultan Ageng Tirtayasa dari Banten menjemput mereka. Di Banten, Sultan Ageng mengangkat keduanya menjadi Sultan Cirebon sebagai usaha untuk melemahkan dan membuat Cirebon tergantung pada Banten. Pangeran Mertawijaya menjadi Sultan Sepuh Samsudin dan Pangeran Kertawijaya bergelar Sultan Anom Badrudin. Saudara muda mereka, Pangeran Wangsakerta menjadi Panembahan Cirebon.[20]

Dalam keadaan sangat dilemahkan itu, Cirebon memilih meninggalkan baik Mataram maupun Banten dan berpaling kepada kekuatan baru di Batavia.[21] Melalui perjanjian 1681, Cirebon menerima perlindungan penuh dari VOC dan sebagai gantinya menyerahkan segenap kegiatan perniagaan di bawah monopoli VOC.[22] Makna perjanjian ini jelas tampak pada nama benteng yang didirikan di muara Kali Cirebon, Bescherming, atau 'perlindungan'. Sejak itu, kegiatan kota terpusat di benteng yang sekaligus menjadi kediaman Residen, barak tentara, penjara, gudang persenjataan dan barang dagangan. Jelas, benteng itu memperkuat posisi Kali Cirebon (lihat Gambar 7.2) menjadi batas antara keraton di sisi selatan, dengan kawasan orang asing, Cina dan Arab, di seberang Kali Cirebon. Keletakan ini sekaligus memperlihatkan statusnya sebagai penengah sekaligus penguasa di Cirebon.

## PERKEMBANGAN KOTA CIREBON

Pada sekitar 1700, Cirebon, menurut Molsbergen, bisa dikatakan sebagai kota besar berpenduduk 7.000 jiwa, dengan rumah-rumah bambu dan sedikit bangunan dari bata atau papan milik para pangeran dan pembesar

20 Poesponegoro (2010: 60).

21 Poesponegoro (2010: 60).

22 Molsbergen (1931: 7).

keraton. Sementara itu, sebagai bandingan, Sumedang, Parakanmuncang dan Bandung masih berupa desa. Pelabuhan Cirebon mengapalkan lada, benang kapas, tarum dan kopi. Ekspor kopi pertama terjadi pada 1712.[23]

Lahan yang dikuasai dan dimiliki VOC makin luas, terutama setelah 1705, ketika Mataram melepaskan haknya atas Cirebon. Tanah-tanah ini sejak 1746 disewakan melalui lelang tiap tiga tahun sekali dan menghasilkan pemasukan sangat besar. Biasanya lelang dimenangkan oleh saudagar-saudagar Cina yang kemudian memeras petani penggarapnya tanpa belas kasihan untuk memperoleh hasil sebesar mungkin.0[24] Sebagai reaksinya sering terjadi kerusuhan dan perlawanan terhadap para penyewa ataupun pejabat pemerintahan, baik kompeni maupun sultan.

Hingga awal abad ke-19, Cirebon sama sekali belum bisa disebut sebagai kota dalam pengertian modern. Cirebon bahkan dikenal sebagai kota paling tidak sehat, terbukti dengan wabah disentri hebat yang melanda kota itu (1772-73 dan 1805-06) yang mengakibatkan sekitar seperempat jumlah penduduknya menjadi korban.[25] Hingga 1817, Cirebon dilaporkan mengalami polusi amat parah. Sungai tersumbat dan mampet, bau busuk di mana-mana, penduduk mengubur mayat di liang dangkal dan dekat rumah tinggal mereka, lahan terbuka menjadi tempat penimbunan sampah, selokan dan kolam penuh tinja dan bangkai ikan, sampai-sampai penduduk desa takut membawa hasil bumi mereka ke kota.[26] Binatang buas berkeliaran dekat kota; pada 1808 dua orang dilaporkan diterkam harimau, seekor harimau ditembak di belakang Keraton Kasepuhan pada 1825.

Sementara itu, untuk menenangkan keresahan penduduk, Gubernur Jenderal Daendels memulangkan Pangeran Raja Kanoman dari pengasingan di Amboina sejak 1802 dan mengangkatnya menjadi Sultan Kacirebonan. Pada 1809, Daendels membagi Cirebon menjadi dua, sebelah utara tetap milik para Sultan (*Sultanslanden*), sedangkan bagian selatan, Limbangan, Sukapura, dan Galuh, menjadi Cheribonsche Preangerlanden di bawah kekuasaan Batavia. Selain itu ketiga Sultan

23 Molsbergen (1931: 10).

24 Molsbergen (1931: 11).

25 Molsbergen (1931: 12).

26 Molsbergen (1931: 14).

dijadikan pegawai Kerajaan Belanda dan menerima gaji masing-masing 8.000 *rixdollar* per tahun. Mereka tetap diizinkan mempertahankan tanda-tanda kehormatan, tetapi tidak boleh lagi terlibat dalam perdagangan. Seminggu sekali mereka hadir dalam rapat dengan Residen untuk membahas masalah dalam wilayah Cirebon.[27]

**Gambar 7.4.** Denah Kota Cirebon (1866)
Sumber: Arsip Nasional Kerajaan Belanda.

Pada masa jabatan Residen Jean Guillaume Landré, gudang mesiu Benteng Bescherming meledak karena kecerobohan seorang sersan. Ledakan itu sangat hebat sehingga seluruh bangunan di dalam benteng hancur. Benteng yang sudah lapuk itu ditinggalkan dan kediaman serta kantor Residen dibangun kembali di dekatnya.[28] Parit di sekeliling benteng, termasuk Kali Cirebon, diuruk menjadi jalan pada 1855,[29] sedangkan

27 Roorda van Eysinga (1842 [II]: 448).

28 Molsbergen (1931: 14); Roorda van Eysinga (1842 [II]: 448).

29 Molsbergen (1931: 15).

kediaman resmi Residen yang dibangun pada 1841 di Kampung Tangkil, sisi utara kota, sekarang menjadi Gedung Negara.

## CIREBON SEBAGAI KOTA MODERN

Cirebon menjadi pelabuhan pendukung Batavia semasa perseteruan Prancis terhadap Inggris akibat Perang Napoleon (1803-15) meluas ke Asia. Belanda, berikut jajahannya, jatuh di bawah kekuasaan Prancis dan Kaisar Louis Bonaparte mengirim Herman Willem Daendels ke Hindia Belanda dengan tugas melindungi Pulau Jawa dari ancaman Inggris pada 1807, tetapi baru bisa mendarat di Batavia pada 5 Januari 1808. Segera ia memulai pembangunan Jalan Raya Pos yang menghubungkan berbagai pelabuhan di pantai utara Jawa, dari Anyer sampai Panarukan. Jalur jalan sepanjang hampir seribu kilometer itu dibuat untuk menjaga kepentingan ekonomi agar ekspor hasil bumi Jawa tidak hanya tergantung pada Batavia, serta memungkinkan pergerakan militer dengan cepat.[30]

Cirebon menjadi mata rantai pertama di sisi timur Batavia, dihubungkan melalui Buitenzorg (Bogor), Cianjur (Rajamandala), Bandung, Sumedang, dan Karangsambung, melintasi tanah pegunungan dan menyeberangi dua sungai besar, Citarum dan Cimanuk. Jalur ini ternyata sangat berat sehingga segera dibangun jalur lain melalui Karawang yang lebih pendek, berupa dataran, dan mudah ditempuh. Dengan demikian Cirebon dilalui dua jalur Jalan Raya Pos, dari arah barat (Karangsambung) dan dari arah utara (Karangampel).

Pembangunan Jalan Raya Pos membawa perubahan hadapan (orientasi) kota di sepanjang pantai utara Jawa—dari semula menghadap ke batang air (sungai dan laut) menjadi berbalik ke jalur jalan darat yang lebih mudah dicapai. Apalagi jalan raya itu dirawat dengan baik dan di sepanjang kedua sisinya ditanami pohon kenari atau asam jawa yang bersuasana sejuk. Para pelintas yang melalui jalur itu pada pertengahan abad selalu tidak lupa akan suasana itu.[31]

30 https://nl.wikipedia.org/wiki/Grote_Postweg.

31 Buddingh (1867: 136), Roorda van Eysinga (1842 [II]: 448).

Hadapan ke darat makin diperkuat dengan pembangunan jalur kereta api yang menghubungkan pelabuhan (Mundu) dengan 27 pabrik gula di sekeliling Cirebon. Tahap pertama dibangun pada 1897 merangkai Mundu-Sindanglaut-Ciledug-Losari, sedangkan pembangunan tahap kedua (1901) ke arah barat lintasan Cirebon-Jamblang-Klangenan-Gunung Giwur-Kadipaten. Jalur ini dibangun oleh SCS (Semarang-Cheribonsche Stoomtrammaatschappij) yang juga menghubungkan kota-kota Semarang, Tegal dan Cirebon, yang selesai dibangun pada 1899.[32] Pada dasarnya, lintasan rel kereta itu mengikuti, bahkan sebagian besar bersebelahan, dengan Jalan Raya Pos yang sudah terbangun.

Baru pada 1912 jalur kereta api milik negara (SS; Staatsspoorwegen) antara Cirebon-Cikampek dibangun, menghubungkan Cirebon dan Batavia; disusul dengan pembukaan jalur SS Cirebon-PurwokertoKroya (1917), memungkinkan hubungan Cirebon dengan Yogyakarta. Jika kereta yang dioperasikan SCS pada umumnya kereta barang, rangkaian kereta SS sepenuhnya merupakan kereta penumpang, di atas lebar rel yang berbeda.[33]

Jalan-jalan di dalam kota juga mulai ditata dan menghadap ke jalan darat. Untuk memperbaiki lingkungan kota yang sangat buruk, Kali Cirebon bagian hulu—sekarang disebut Sukalila—diluruskan ke pantai sehingga cabang yang bermuara ke Kali Cirebon lama, di pelabuhan, yang bersisian dengan bekas Benteng Bescherming, diuruk menjadi jalan pada 1855, menyisakan cabang ke selatan yang bermuara di Kali Kasunean. Cabang ini, dikenal sebagai Kali Bacin, akhirnya juga diuruk dan ditata menjadi jalan Laan Eyken (1919)—sekarang Jalan Merdeka.[34]

Penanaman tebu dan pembuatan gula sudah "diwajibkan" semasa VOC. Di Desa Cikeleng ditemukan penanda awal penanaman tebu, tertulis pada prasasti bercandrasangkala "*naga obah gunung goneng*" atau 1768 tahun Jawa (1839 Masehi). Gula dari Cirebon diekspor dengan logo VOC dan cap C.C. (*Cheribon Cabessa* 'mutu nomor satu'), dibeli dengan harga sangat rendah dari petani. Itu sebabnya umumnya Residen Belanda memiliki atau ikut memiliki saham di kilang gula. Pada masa kolonial,

32 Laksana (2016: 7–10).

33 Laksana (2016: 17).

34 *Gedenkboek* (1931: 82).

industri gula di Pulau Jawa meningkat pesat, dipicu pemberontakan budak di San Domingo, Karibia (1802), yang menghancurkan banyak pabrik gula di sana sehingga membuat harga gula dunia menanjak tajam. Hingga saat itu (1803), hanya ada dua kilang gula di Cirebon dan dua lagi di Gebang.[35]

Rangkaian kerusuhan menghambat percepatan perkembangan industri gula di Cirebon. Pada 1824, mulai dibangun beberapa pabrik gula kecil; menghasilkan hanya 4.500 pikul pada 1828, tetapi melonjak menjadi 15.000 pikul pada 1832. Sejak itu, selama tiga dasawarsa berikutnya menjadi masa keemasan industri gula di Cirebon, didukung harga gula dunia yang menanjak tinggi dan temuan teknik penanaman yang lebih baik di Jawa Timur. Pemerintah kolonial kemudian menawarkan pinjaman untuk membeli mesin-mesin produksi modern. Salah satu tokoh awal adalah Luis Gonsalves yang mempopulerkan jenis tebu hitam Cirebon ke dunia pada 1850.[36]

**Gambar 7.5.** Peta Cirebon (1921)
Sumber: Arsip Nasional Kerajaan Belanda.

35 Molsbergen (1931:19).
36 Molsbergen (1931: 20).

Berkat industri gula yang mendunia, Cirebon berkembang menjadi kota modern. Perusahaan jasa keuangan dan pelayaran internasional bermunculan dan menuntut bangunan serta fasilitas modern. Pelabuhan Cirebon dibangun secara modern pada 1865,2.[37] kemudian diperluas dengan pembangunan kolam pelabuhan dan pergudangan pada 1890.[38] Sejak 1875, pengiriman ekspor gula dilakukan oleh agen-agen perusahaan langsung dari Cirebon.

Perusahaan besar seperti NHM, Internatio, dan De Javasche Bank yang membuka cabang di Cirebon menambah keramaian kota. Mereka membuka kantornya di pusat kota, yaitu di Kampung Cangkol, dekat bekas benteng dan pelabuhan. Kawasan itu berkembang menjadi pusat kegiatan perdagangan dan sosial masyarakat Belanda di Cirebon dengan berdirinya Sociëteit Phoenix (1872), tempat berkumpul kalangan atas yang terkenal dengan program pertunjukannya.[39] Masa itu pula Cirebon makin tampak sebagai kota modern. Pada 1858, berdiri lima toko Eropa dan dua perusahaan dagang besar. Kemudian, pada 1864 dibuka kantor konsulat Denmark, Prancis, Swedia dan Norwegia.[40]

Berdasarkan Staatsblad Nomor 122 (1906), Pemerintah Hindia Belanda menetapkan Cirebon sebagai kota (*gemeente*) pada 1 April 1906. Selanjutnya, pada 1929 Dewan Provinsi Jawa Barat menerbitkan Surat Keputusan Nomor W.Ch. 121/1/2, 25 April 1929 untuk memperluas wilayah Kota Cirebon. Dengan status baru itu penataan kota lebih terarah dan berdayaguna.[41]

## GEDUNG LAMA DE JAVASCHE BANK

Letak gedung lama Kantor De Javasche Bank pada abad ke-19[42] tidak diketahui lagi secara pasti, sementara kantor baru kala itu menyewa di

37 https://www.indonesiaport.co.id/cirebon.

38 https://id.wikipedia.org/wiki/Pelabuhan_Cirebon

39 Cohen (2002: 352).

40 Molsbergen (1931: 22).

41 *Gedenkboek* (1931: 47).

42 Tentang sejarah De Javasche Bank, lihat kembali Bab 2 buku ini.

gedung biasa milik partikelir. Pada 1867, Direksi DJB baru mengirimkan surat permohonan untuk membeli tanah milik pemerintah seluas 600 meter persegi. Pada rapat 16 Agustus, Residen Cirebon menyampaikan surat yang menanyakan apakah pihak DJB bersedia membiayai pembangunan tembok dermaga senilai 1.050 gulden[43] di pantai Kampung Cangkol.[44]

Ternyata tanah itu tidak seluruhnya milik pemerintah sehingga proses jual-beli baru bisa diselesaikan lebih dari satu tahun (30 Desember 1868)[45]; berupa surat tanah *Verponding* nomor 31 dan *Eigendom* (hak milik) *Verponding* nomor 78 senilai 1.110 gulden, dengan rincian harga lahan 60 gulden dan biaya penembokan dermaga (*kaaimuur*) 1.050 gulden.[46]

Tapak Gedung DJB Cirebon dipilih di kawasan perniagaan dekat dengan pelabuhan. Sejak akhir abad ke-17, kawasan itu menjadi pusat kekuasaan VOC dan lokasi Benteng Bescherming. Ketika terjadi kebakaran besar (1835), benteng itu tetap menjadi pusat kegiatan orang-orang Belanda yang semula tinggal di dalamnya. Letak lahan tapak Gedung DJB sangat strategis, berbatasan dengan Sociëteit Phoenix di sisi utara; batas di sebelah selatan adalah Kantor Pos dan Kantor Residen di seberangnya. Jarak ke pelabuhan tidak sampai 250 meter. Luas lahan tidak seberapa, tetapi letak strategisnya menempatkan DJB berada di pusat kegiatan politik dan ekonomi.

Jelas gedung tersebut tidak dibangun oleh arsitek, tetapi kemungkinan besar oleh insinyur sipil (zeni, *genie*) atau bahkan pengawas (*opzichter*) yang bekerja di BOW (Dinas Pekerjaan Umum) yang umum pada masa itu. Mereka tidak pernah mendapat pendidikan arsitektur (*bouwkunst*) dan membuat bangunan hanya berdasarkan kebiasaan dan contoh yang tersedia. Untuk mempercantik gedung, satu-satunya hiasan yang mereka kenal hanyalah penggunaan unsur-unsur bangunan

43 Mualim (tanpa tahun, tanpa nomor halaman)

44 Lokasi Gedung Bank Indonesia Cirebon hingga sekarang.

45 Enas Sumarna, pensiunan pegawai Bank Indonesia Cirebon, menyatakan bahwa tanah di Kampung Cangkol itu dibeli pada 1868 (Wawancara, 20 Juli 2020); sedangkan Nur (2006: 49), menuliskan pembelian itu pada 31 Desember 1868; Mualim (t.t.) mencatat 30 Desember 1868.

46 Mualim (t.t., tanpa nomor halaman).

**Gambar 7.6.** Gedung De Javasche Bank Agentschap Cheribon (tengah) dan Pelabuhan Cirebon di sisi utara

Sumber: Koleksi KITLV.

**Gambar 7.7.** Gedung lama De Javasche Bank dan Sociëteit Phoenix di sampingnya (1901).

Sumber: Koleksi KITLV.

klasik Yunani dari beberapa buku pegangan pada masa itu.[47] Bangunan semacam itulah yang dikeluhkan oleh para arsitek yang baru datang ke Hindia Belanda pada awal abad ke-20.[48]

Berdasarkan gambar, ukuran bangunan itu diperkirakan tidak lebih dari 15 x 8 meter persegi sehingga tidak dapat dikatakan besar, tetapi rupanya sudah cukup memadai untuk suatu kantor agen pada masa itu. Biasanya, ruangan terbagi menjadi 4-6 ruang, masing-masing berukuran 5 x 4 meter persegi, ruang tengah-depan sebagai *foyer* untuk tamu/nasabah, berhubungan langsung dengan ruang kasir yang terlindung jendela loket. Pada sisi kiri dan kanan digunakan sebagai ruang kerja direktur/kepala dan penyetoran/penghitungan uang. Dua ruangan belakang dipakai untuk khazanah dan tata usaha (*boekhouding*). Satu-satunya jalan masuk melalui pintu utama, baik bagi tamu maupun pegawai, kiriman uang, dan lain-lain.

Seiring dengan perkembangan ekonomi dunia yang telah pulih dan menguat setelah krisis 1890, Hindia Belanda terbuka bagi investasi non-Belanda, terutama dari Inggris. Ekspor hasil bumi perkebunan di Jawa, berupa kopi, teh, karet, kina, dan gula, juga tembakau dari Sumatera Utara, yang baru dibuka pada dasawarsa 1860-an pun maju pesat. Ditambah dengan penambangan batubara dan minyak bumi yang mengalami lonjakan permintaan global, memacu jasa keuangan juga meningkat pesat.

De Javasche Bank yang telah menjadi bank sirkulasi harus menyesuaikan diri dengan seluruh perkembangan tersebut. Kantor-kantor dianggap telah ketinggalan zaman; tata ruang dan ukurannya tidak memadai lagi dengan kegiatan rutin administrasi; keamanan penyaluran dan penyimpanan uang dan barang berharga rentan kacau, bahkan berbahaya, karena banyak bersinggungan dengan kegiatan lain; dan jalur lintasan perlu dipisahkan antara tamu, pegawai, dan barang. Oleh karena itu dipandang perlu membangun gedung baru secara menyeluruh, baik di kantor pusat maupun kantor cabang. Keputusan itu kemudian dilaksanakan secara bertahap.[49]

47 Roosmalen (2009: tanpa nomor halaman).

48 Snuyf (1908: 130–1).

49 Akihary (1990: 16).

## SANG ARSITEK

Untuk melaksanakan proyek pembangunan berskala besar jelas perlu konsultan arsitektur andal. Pada dasawarsa pertama abad ke-20, perancangan bangunan penting di Hindia Belanda selalu menggunakan jasa arsitek dari Belanda[50] karena belum ada arsitek tempatan yang dianggap mumpuni. Sebenarnya ada beberapa arsitek muda yang berpendidikan teknik arsitektur seperti P. A. J. Moojen yang datang di Hindia Belanda pada 1903; dan M. J. Hulswit yang pernah mengawasi pelaksanaan proyek pembangunan gedung di Medan (1880) dan Surabaya (1890) menetap di Hindia Belanda sejak 1893.[51] Namun, Presiden DJB waktu itu, Gerard Vissering yang belum lama tiba dari Negeri Belanda (1903), tidak puas dengan rancangan mereka.

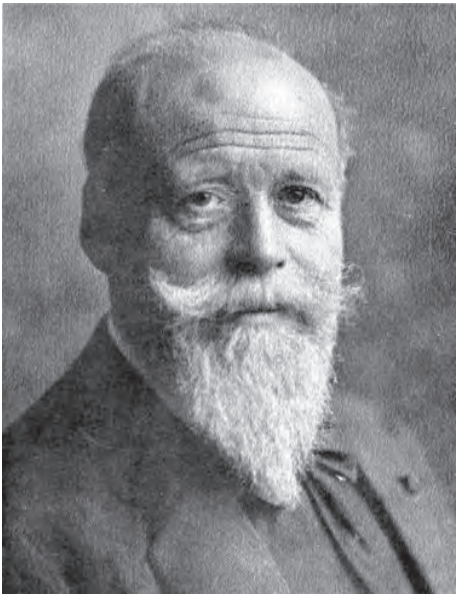

**Gambar 7.8.** Eduard Gerardus Hendricus Hubertus Cuypers (1859-1927)
Sumber: *Het Nederlandsch-Indië Huis Oud en Nieuw 1928*.

50 Akihary (1990: 16).

51 Norbruis (2018: 7).

Gerard Vissering diangkat menjadi Presiden DJB di Batavia seakan-akan "ditakdirkan" untuk membenahi dan memperbarui gedung-gedung DJB di tanah jajahan.[52] Seperti telah disebutkan, ia pernah menghubungi arsitek Moojen dan Boon,[53] tetapi keduanya tidak memuaskan hatinya. Vissering segera teringat akan Eduard Gerardus Hendricus Hubertus Cuypers, sahabat lamanya semasa di Amsterdam. Di Negeri Belanda, Ed Cuypers—panggilan singkatnya—sendiri, dikenal sebagai arsitek andal; rancangannya menarik perhatian banyak orang karena dianggap orisinal dan segar. Lebih dari 60 proyek di negerinya ia kerjakan dengan baik, termasuk gedung De Amsterdamsche Bank yang pada waktu itu dipimpin oleh Vissering. Karya-karya arsitektural Ed Cuypers menunjukkan kefasihannya dalam perancangan, selain keragaman bangunan yang ditanganinya.

Oleh komunitas arsitek Belanda, Ed Cuypers dinilai sebagai profesional yang terbuka terhadap gagasan dan pendapat orang lain. Ia menunjukkan totalitas dalam proses kreatif dan kerjanya, terlibat dalam semua aspek kearsitekturan, termasuk penataan interior, perabot dan kelengkapan bangunan, bahkan hingga ornamen terkecil.[54] Itu sebabnya ia dijuluki sebagai 'Bapak Aliran Amsterdam' meski ia sendiri tidak terlalu sepakat dengan penabalan itu. Ia juga dianugerahi bintang *Ridder in de Orde van Oranje Nassau* oleh Kerajaan Belanda pada 1910[55] atas jasanya menyiapkan anjungan Kerajaan Belanda pada Brussels Wereldtentoon-stelling.[56]

Ed Cuypers lebih senang melihat dirinya sebagai arsitek modern pada masanya. Modern, menurutnya, adalah individualisme, berseberangan dengan keseragaman yang cenderung menyamakan semua bahan, teknik konstruksi dan ragam hias. Modern berarti bahwa tiap orang wajib

52 Van Nispen (2016: 34).

53 Moojen diminta untuk merancang gedung DJB Agentschap Makassar dan Boon merancang gedung serupa di Medan (Van Nispen 2016: 34).

54 Vissering (1928a)

55 Menurut *De Ingenieur* (9 Juli1910), Ed Cuypers dianugerahi Ridder in de Orde van Oranje Nassau pada 30 Juni 1910; tetapi dalam berita kematiannya dalam harian *Het nieuws van den dag voor Nederlandsch-Indië*" (3 Juni 1927), disebutkan bahwa ia menyandang gelar Oranje Nassau dan Leopold Orde.

56 https://www.bie-paris.org/site/en/1910-brussels

menampilkan kepribadiannya seutuh dan semurni mungkin.[57] Semua itu tampil dalam 'keindahan'. Menurutnya, sudah terlalu lama keindahan terpancang pada *stijl* atau langgam. Semestinya yang terpancar adalah keindahan individual. Arsitektur harus mampu menampung tujuan pembangunannya, dibangun dengan bahan yang sesuai, mutakhir, dan indah.[58] Oleh karena itu, karya-karya Ed Cuypers tidak pernah memperlihatkan satu kesamaan langgam, semua bangunan memiliki kepribadian dan ciri sendiri.

Vissering yang mengenal baik kemampuan Ed Cuypers, dan sangat memercayainya, memintanya merancang gedung perkantoran dan bank.[59] Vissering merasa puas dengan sketsa-sketsa Ed Cuypers, dan segera menunjuknya merancang gedung DJB di Medan dan Solo. Bagi Ed Cuypers, perancangan gedung DJB merupakan proyek pertamanya di Hindia Belanda.[60] Vissering bahkan menyarankan Ed Cuypers membuka kantor perwakilan di Hindia Belanda. Memenuhi saran itu, Ed Cuypers, bersama Hulswit, akhirnya mendirikan kantor arsitek NV Architecten- en Ingenieursbureau Hulswit te Weltevreden en Ed Cuypers te Amsterdam (September 1910).[61] Kantor itu berkembang pesat berkat proyek-proyek besar yang terus berdatangan, apalagi Hulswit dekat dengan Zeillinga yang menggantikan Vissering sebagai Presiden DJB. Pada 1914, biro tersebut diperkuat oleh arsitek A. A. Fermont dan menjadi NV Architecten-Ingenieursbureau Hulswit en Fermont te Weltevreden en Ed Cuypers te Amsterdam yang bertahan hingga 1958. Biro arsitektur itu menjadi yang paling produktif dalam setengah abad pertama di Indonesia.[62]

57 Van Nispen (2016: 5), kutipan C (1904:132).

58 Van Nispen (2016: 53).

59 Vissering (1928a); Vissering (1928b).

60 Norbruis (2018: 7).

61 Akihary (1990: 35).

62 Akihary (1990: 36).

# GEDUNG BARU DE JAVASCHE BANK AGENTSCHAP CIREBON

Pembangunan gedung Kantor De Javasche Bank Agentschap Cirebon [ejaan asli Cheribon] ditandai dengan peletakan batu pertama oleh Jan Marianus Gerritzen (anak Direktur M. J. Gerritzen) pada 21 September 1919[63] dan dihadiri Hulswit. Denah bangunan baru itu memanjang, berukuran 11,75 x 40 meter persegi di atas bekas bangunan lamanya. Lahan tapak yang memanjang ke belakang memaksa arsitek membuat bidang tampak (depan) sempit sedangkan bidang lebar justru di bagian samping. Tetapi batasan ini memudahkan Ed Cuypers dan Hulswit meninggalkan pola *façade* simetri layaknya langgam Neo-Renaisans dan menghasilkan sosok yang berbeda dengan tampilan gedung DJB umumnya, tetapi tetap, atau bahkan lebih, anggun dan modern. Perancangan ini di mata khalayak menjadi sangat menarik karena merupakan satu-satunya gedung yang berkubah tunggal seperti gedung Bank Indonesia lainnya. Mungkin keanggunan itu pula yang membuat bangunan ini dijadikan penghias pecahan uang Rp500 terbitan 1988.

**Gambar 7.9.** Sisi belakang uang kertas pecahan Rp500 terbitan 1988
Sumber: *https://www.idntimes.com/hype/fun-fact/rully-bunga/wajah-uang-rupiah-dari-masa-ke-masa/25*

63 Nur (2006: 49).

Memasuki pintu utama gedung, pengunjung akan ketemu *vestibule*, yaitu serambi paling depan sesudah gang masuk ruang penerima, tempat menyimpan payung dan mantel yang biasa terdapat di daerah empat musim sekaligus sebagai ruang tunggu depan. Dari ruang ini tersua "pencabangan" arah, yaitu ke bangsal tamu di sebelah dalam; ke lantai bawah (*souterrein*) tempat khazanah; dan ke lantai atas tempat kediaman direktur/kepala kantor. Dua arah yang terakhir menggunakan tangga di sisi kanan.

Bangsal tamu berupa ruangan seluas 8,20 x 6,85 meter persegi dengan deretan loket kasir pelayanan umum di sisi kanan. Jadi, arah tujuan digeser ke selatan dari semula ke arah timur. Susunan arah ruangan ini berbeda dengan kebiasaan lama yang menuju lurus ke dalam. Tamu khusus bisa terus ke dalam melalui gang sisi utara (bukan di tengah) untuk mencapai ruang tata usaha, kepala kantor, dan toilet, yang tampaknya terbatas karena dekat tangga ke lantai bawah di ujung belakang.

Lantai atas (*verdieping*) digunakan sebagai kediaman dinas direktur dan keluarganya. Untuk masuk ke bagian ini hanya ada satu jalan, yaitu menggunakan tangga dari serambi tanpa melalui ruangan kantor. Begitu keluar dari tangga, akan langsung mencapai serambi rumah (*voorgalerij*) tertutup sekaligus berfungsi sebagai ruang tamu dan memiliki bukaan ke arah balkon yang menghadap ke arah jalan. Kediaman terdiri dari satu kamar utama dan dua kamar lebih kecil yang dibelah oleh gang menuju serambi belakang (*achtergalerij*) yang luas dengan pemandangan ke laut di arah timur. Serambi ini sebenarnya berfungsi sebagai ruang duduk keluarga. Di luar *achtergalerij* terdapat teras tanpa atap untuk rehat atau bersantai, sedangkan di sisi selatan ada toilet, dapur dan gudang.

Keseluruhan bangunan gedung ditata dengan pendekatan historisisme, yaitu menggunakan tatanan dan hiasan klasik Renaisans dan Gotik ke dalam kebutuhan modern saat itu dengan memanfaatkan bahan dan teknologi modern pula. Jelas sekali, Ed Cuypers terpengaruh pamannya, P. J. H. Cuypers, tokoh utama Neo-Renaisans abad ke-19.

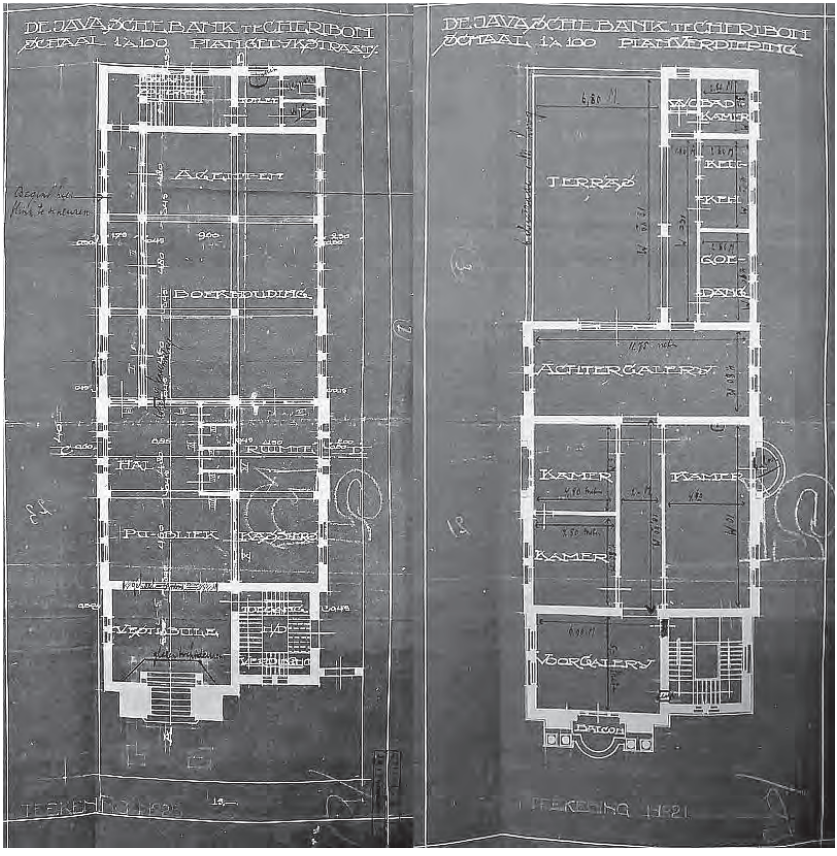


**Gambar 7.10.** Gambar rencana Gedung De Javasche Bank Agentschap Cheribon oleh Ed Cuypers en Hulswit (1909)

Sumber: Koleksi Arsip Bank Indonesia.

**Gambar 7.11.** Gedung Javasche Bank Agentschap Cheribon (1926)
Sumber: Kaptijn, M.

Untuk memenuhi citra perusahaan perbankan yang ingin menonjolkan keandalan dan tanggung jawab, pendekatan itu sangat tepat. Dengan sengaja lantai utama (*bel-etage*) ditinggikan kira-kira satu meter sehingga tamu harus naik tangga untuk mencapai bank. Selain itu, lantai bawah memiliki jendela sehingga cahaya bisa masuk. Seluruh permukaan dinding dihiasi garis-garis mendatar yang berasal dari tradisi Kota Firenze, tempat lahir gagasan Renaisans, untuk memecah pandangan terhadap kepejalan bangunan yang tidak bisa dihindari karena ukuran bangunannya.

Bagian penerima (paruh utara tampak) dibuat menonjol ke depan, dibentuk dengan ambang atas gerbang berupa lengkungan, sebagai kosabentuk Renaisans awal untuk menerima tamu terhormat. Tepat di atasnya ditampilkan kembali ciri khas Renaisans, yaitu jendela besar

dengan balkon tempat para raja dan pangeran menyapa khalayak dengan aman. Jendela kaca itu diapit oleh pasangan kolom ganda berordo Doria yang lugas dan gagah layaknya kuil Yunani Kuno.

Arsitektur Renaisans mengutamakan simetri, tapi Ed Cuypers yang modern menghindarinya sehingga, untuk mengimbangi sisi yang indah, ia melengkapi komposisi itu dengan unsur Renaisans yang lain, yaitu unsur tangga. Rongga tangga ditonjolkan dengan menara yang bermahkota kubah berbadan, bukan kubah Bizantium yang langsung terletak. Selain itu, lubang kerawang di atas menjamin masuknya cahaya ke ruang tangga.

Seperti lazimnya pada masa itu, bangunan besar yang dirancang oleh arsitek akan dilaksanakan oleh *aannemer* (pemborong) dan anak buahnya. Sayang sekali tidak ditemukan catatan mengenai proses pembangunan gedung itu sendiri. Namun, jika menengok rekaman pembangunan gedung serupa dan semasa, dapat diperoleh sedikit gambaran akan apa yang terjadi di Cirebon. Pada saat yang berdekatan, di Bandung sedang dibangun beberapa gedung penting seperti Technische Hoogeschool (1918, sekarang ITB), dan gedung Gouvernements Bedrijven (1920, sekarang Gedung Sate). Pada umumnya, pemborong adalah perusahaan milik orang Belanda atau orang Tionghoa yang bermodal besar dan memiliki kemampuan berorganisasi. Sebagai contoh, untuk mengerjakan gedung Gouvernements Bedrijven, pemborongnya, Lim A Goh, mendatangkan tukang kayu dan pemahat batu dari negeri Cina, didukung oleh tenaga lokal yang diambil dari Kampung Sekeloa, Coblong, Dago, Gandok, dan Cibarengkok, di sekitar Bandung sehingga jumlahnya mencapai lebih dari 2.000 orang.[64]

Pekerjaan pembangunan gedung DJB Cirebon mungkin bisa saja dikerjakan oleh pemborong walaupun tidak menutup kemungkinan Biro Arsitektur Hulswit/ Fermont/Cuypers melaksanakannya sendiri sebab, sebelumnya, Hulswit bekerja pada perusahaan pemborong bangunan.F[65] Tidak ada dokumen catatan yang tertinggal dari masa itu.

Bangunan selalu berkembang mengikuti kegiatan penggunanya. Begitu gedung utama DJB selesai dibangun, di sisi utara ditambahkan garasi

64 Kartodiwirio (2009: 20).

65 Norbruis (2018: 7).

mobil dan kamar-kamar pembantu mengikuti kebiasaan rumah tangga Nusantara yang selalu dikelilingi pembantu rumah tangga. Penambahan bangunan dilakukan pada 1921, tak lama setelah pembangunan seluruh gedung selesai. Di antara tahun 1921 dan 1927, lantai kedap air tempat khazanah juga diperbaiki berhubung debit air tanah di Cirebon, seperti umumnya di pantai Laut Jawa, sangat tinggi dan korosif. Dalam gambar kerja tertulis bahwa perencana bangunan tambahan atau perbaikan adalah 'Fermont en Cuypers'. Hulswit telah meninggalkan selamanya mitra kerjanya pada 1921, sedangkan Ed Cuypers menyusul pada 1927.

## GEDUNG KANTOR PERWAKILAN BANK INDONESIA CIREBON

Sampai diambil alih oleh Pemerintah Republik Indonesia, tampaknya tidak terjadi perubahan pada Gedung DJB yang sudah berganti nama menjadi Bank Indonesia. Dalam perkembangannya, sedini 1968, dirasakan kebutuhan akan penambahan ruang pada Gedung Bank Indonesia di Cirebon, seperti dinyatakan dalam surat pemimpin cabang kepada Kantor Pusat di Jakarta walaupun pemecahannya masih pada soal penataan kembali ruangan.[66]

Pengembangan dalam skala besar terjadi pada masa kepemimpinan Tom Hartono (1971/72), sedangkan pembangunan rumah dinas telah terlaksana pada masa kepemimpinan N. Hartono sebelumnya (1968/69). Pada waktu itu Kantor BI Cirebon memperluas kegiatannya; lantai atas, semula kediaman pemimpin cabang, diubah menjadi tempat kerja.[67] Sekat-sekat lantai dibongkar, ruangan diperluas untuk menampung ruang pimpinan, ruang rapat dan ruang kerja baru. Teras ditutup dengan atap tambahan dan dipasangi dinding baru mengikuti pola lama. *Lift* penghubung ketiga lantai juga dipasang di sisi ruang tangga.

66 Arsip BNI Unit I Tjabang Tjirebon (1968).

67 Wawancara dengan Linandi Wongkar, Cirebon, 20 Juli 2020.

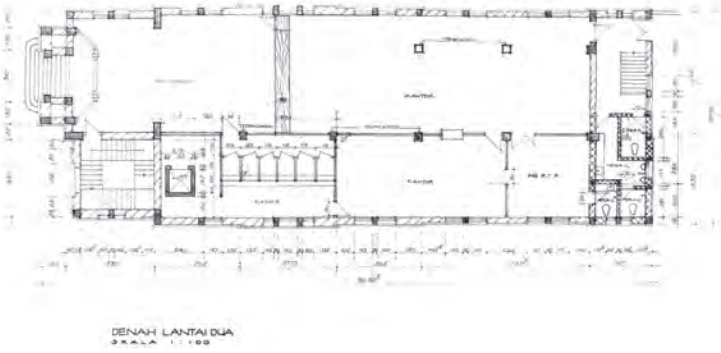


**Gambar 7.12.** Denah lantai dasar gedung setelah perubahan (1972)
Sumber: Koleksi Arsip Bank Indonesia

Perluasan lahan ke arah timur diisi dengan bangunan baru untuk menampung ruang pembakaran uang lama dan ruang arsip. Bekas kamar pembantu dijadikan perluasan garasi untuk menampung mobil staf baru, di sampingnya dibangun musala kecil. Tempat parkir sepeda motor yang menjadi kendaraan pegawai juga disediakan di bagian belakang gedung. Kali ini perancangan bangunan dilakukan oleh PT Perentjana Djaja.

## GEDUNG PERLUASAN

Pada 1980, makin jelas bahwa kegiatan perbankan sudah terlalu besar untuk ditampung dalam gedung yang ada saat itu. Kantor BI Cirebon mengajukan usulan memperluas lahan tapak dengan mengambil alih bangunan di sebelahnya, yaitu bekas Sociëteit Phoenix. Gagasan itu disambut baik oleh pimpinan Bank Indonesia kantor Pusat di Jakarta.[68]

Proses perluasan gedung cukup rumit karena lahan yang direncanakan sebagai perluasan sudah menjadi milik negara, dalam hal ini Pemerintah Daerah Tingkat II Kotamadya Cirebon, dan sedang dalam pengelolaan PT Propelat sebagai pemegang Surat Izin Perumahan atas nama Toni

68 Arsip No. 16-12080-KT-SKA. Sertifikat dan Surat Tanah BI Cirebon.

Artono dan digunakan sebagai El Mundu Amusement Centre.[69] Kantor BI Cirebon memiliki sosok yang tepat untuk menjalankan proses panjang itu. Linardi Wongkar yang telah bekerja di Kantor BI Cirebon sejak 1955 mengenal secara pribadi Komandan Komando Distrik Militer dan Wali Kota Cirebon saat itu sehingga pendekatan menjadi jauh lebih mudah dan sederhana. Kedua pejabat pemerintah daerah bersepakat dengan rencana perluasan Kantor BI. Prosedur selanjutnya ialah melalui Sub-Direktorat Agraria Kotamadya, kemudian ke tingkat provinsi di Bandung untuk memperoleh pengantar perolehan Izin Prinsip dari Direktorat Jenderal Agraria Departemen Dalam Negeri di Jakarta. Instansi yang terakhir ini kemudian menerbitkan sertifikat dan surat tanah atas nama Kantor BI Cirebon.[70] Selanjutnya, pada 27 Agustus 1980 dilaksanakan penyerahan Akte Pelepasan Hak di depan Notaris Iskandar Wiramihardja, S.H.[71] Lahan seluas 3.875 meter persegi itu akhirnya menjadi milik Bank Indonesia.

Pada 15 Januari 1998, Kantor Pusat menyetujui perancangan gedung baru Kantor BI Cirebon dan beberapa bulan kemudian ditunjuk PT Bita Enarcon Eng sebagai pelaksana perencanaan. Namun, keadaan tidak memungkinkan untuk melaksanakan pembangunan sehingga diterbitkan memorandum untuk menundanya sementara (Juli 1999). Bahkan pekerjaan perancangan dihentikan sampai tahap Dokumen Pelelangan.[72] Baru pada Januari 2003, Kantor Cirebon mengabarkan bahwa keadaan sudah mendesak untuk perluasan karena sarana yang ada tidak memadai lagi. Kantor Pusat akhirnya menyetujui pembiayaan pembangunan gedung baru dengan prioritas pembangunan khazanah karena sudah tidak cukup untuk menampung kegiatan. Jika musim hujan air tanah akan naik dan membanjiri khazanah gedung lama.[73]

69 Arsip No. 16-12080-KT-SKA. Sertifikat dan Surat Tanah BI Cirebon.

70 Wawancara dengan Linardi Wongkar, 20 Juli 2020.

71 Arsip No. 16-12080-KT-SKA. Sertifikat dan Surat Tanah BI Cirebon.

72 Arsip No. 14-2170-KT-SKA. Penghapusan Bangunan Gedung Kantor Bank Indonesia Cirebon Jalan Yos Sudarso 5, Cirebon.

73 Wawancara dengan Yousep Suharno, 20 Juli 2020.

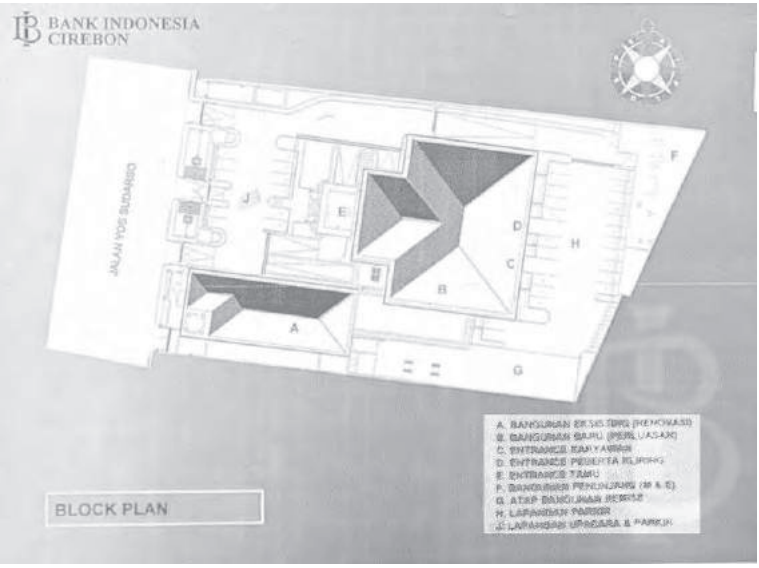


**Gambar 7.13.** Rencana gedung baru Kantor Bank Indonesia Cirebon
Sumber: Arsip Bank Indonesia.

Rencana pembangunan gedung baru meliputi tiga bagian, yaitu (1) bangunan utama, sama sekali baru, tiga lantai dan *basement*, dengan luas lantai keseluruhan 5.200 meter persegi; (2) bangunan lama diubah menjadi fasilitas sosial (poliklinik, perpustakaan, ruang serba guna) dan arsip; dan (3) bangunan penunjang, baru, untuk gardu listrik, genset, pompa dan lain-lain.[74]

Tampilan gedung baru menyesuaikan dengan gedung lama, mengikuti langgam Romantik, memanfaatkan unsur-unsur Neo-Renaisans. Sekilas bangunan baru akan menyatu secara visual dengan gedung lama walaupun pengolahan pintu masuk lebih mencerminkan Neoklasik. Juga fenestrasi atau penataan bukaan jendela dan pintu cenderung terlalu modern terutama pengaturan proporsinya. Secara keseluruhan rancangan bangunan ini cukup berhasil mendampingi gedung lama, apalagi pewarnaan putih sepenuhnya sangat mendukung.

74 Arsip No. 14-2170-KT-SKA. Penghapusan Bangunan Gedung Kantor Bank Indonesia Cirebon, Jalan Yos Sudarso 5, Cirebon.

Dengan berdirinya gedung baru, bangunan serba guna lama harus dihapus untuk memberi jarak yang diperlukan bagi proporsi dan skala bangunan setinggi tiga lantai dan lebar lebih dari 20 meter. Ruangan yang terbentuk dimanfaatkan untuk pertamanan, parkir tamu dan lapangan upacara. Gerbang masuk dihiasi candi bentar seperti terdapat di keraton-keraton Cirebon, hanya sosoknya agak bebas, mungkin disesuaikan dengan ukuran dan letaknya. Warna candi bentar meniru konstruksi *kuta kosod* [75]dari bata merah menyamarkan semuanya.

Kontraktor pelaksana pembangunan adalah PT Duta Graha Indah, sedangkan konsultan manajemen konstruksi dipegang oleh PT Indah Karya. Diperkirakan pembangunan memakan waktu dua tahun—selesai pada 2007 tetapi baru bisa diserahterimakan pada Agustus 2008. Peresmian penggunaannya pada Desember oleh Gubernur Bank Indonesia Burhanudin Abdullah.[76]

**Gambar 7.14.** Kompleks Kantor Perwakilan Bank Indonesia Cirebon sekarang
Sumber: Arsip Bank Indonesia Institute.

75 *Kuta kosod* adalah teknik menyusun batu bata tanpa spesi (aduk), jadi hanya digosokkkan satu sama lain, sehingga tidak menyisakan rongga udara di antaranya

76 Wawancara dengan Yousep Suharno, 20 Juli 2020.

# BANGUNAN CAGAR BUDAYA KANTOR BANK INDONESIA DI CIREBON

Arsitektur hanya bisa diapresiasi jika diketahui riwayat sebelum dan sesudahnya. Umumnya, bangunan bersejarah dijajarkan dalam langgam arsitektural sehingga dapat dipahami latar kesejarahannya dan dampaknya terhadap kebudayaan, selain memberi kesempatan menilai layak atau tidaknya bangunan itu untuk mewakili zamannya.[77] Dengan demikian, tujuan pertama pelestarian ialah menyajikan contoh gedung atau bangunan yang mewakili suatu masa atau memiliki peran dalam sejarah, kebudayaan, dan ilmu pengetahuan.

Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya, Pasal 5, suatu bangunan cagar budaya harus memenuhi kriteria:[78]

a. berusia 50 (lima puluh) tahun atau lebih;
b. mewakili masa gaya paling singkat berusia 50 (lima puluh) tahun;
c. memiliki arti khusus bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan; dan
d. memiliki nilai budaya bagi penguatan kepribadian bangsa.

Bangunan lama Kantor Perwakilan Bank Indonesia Cirebon dengan mudah memenuhi kriteria (a). Tampilan dan bagian terbesar bangunan utama Gedung DJB—sebelum berubah menjadi BI—didirikan pada 1919. Artinya, bangunan itu telah berumur lebih dari seratus tahun, meski pernah dilakukan beberapa kali perubahan terutama pada 1972 yang mengubah sosok bangunan dengan penambahan atap di bagian belakang.

Berikut adalah langgam arsitektur Gedung DJB Cirebon yang kemudian beralih menjadi Gedung Bank Indonesia. *Façade* atau bidang tampak muka bangunan adalah bagian terpenting suatu gedung karena memberikan gambaran mengenai bangunan tersebut secara keseluruhan. Dalam langgam klasik dan neoklasik bidang tampak selalu secara proporsional, bandingan dengan ukuran manusia, harus cukup

77 Tyler (2009: 63).

78 Lihat selanjutnya dalam Lampiran Khusus Bab 7.

menguasai sudut pandang atau lebar, terlebih lagi harus memperlihatkan simetri kiri dan kanan.

Lahan Gedung DJB Cirebon tidak memungkinkan *façade* yang cukup untuk itu karena hanya selebar 15 meter, sedangkan bangunan diinginkan untuk berkesan andal, kokoh dan megah. Ditambah lagi luas lantai mengharuskan adanya lantai bawah dan lantai atas untuk kediaman pimpinan. Jadi, diputuskan membangun bidang tampak yang menonjolkan sisi depan dan menyederhanakan kedua sisi sampingnya. Berhubung menghadap ke pantai, sisi belakang tidak diolah, melainkan dimanfaatkan sebagai pemandangan bagi teras di lantai atas, kediaman direktur.[79]

Oleh karena itu, kedua sisi bangunan tidak banyak diolah, dinding datar dengan pola alur aslar (*ashlar line*), yaitu alur mendatar sepanjang dinding, peniruan dari susunan klasik *ashlar* atau batu paras. Pola ini berasal dari masa klasik Yunani-Romawi serta dihidupkan kembali sejak akhir abad ke-18 (masa Neoklasik) tetapi dengan bahan yang lebih mudah dikerjakan. Demikian pula jendela menggunakan pola *biforate*, yaitu

**Gambar 7.15.** Gedung eks-DJB; Bank Indonesia Cirebon sekarang, tampak samping utara

Sumber: Arsip Bank Indonesia Institute.

79 Lihat denah asli pada Gambar 7.12.

dua bukaan, di atas dan di bawah— merupakan salah satu ciri langgam Neoklasik. Jendela bagian atas biasanya mati karena hanya digunakan untuk pencahayaan, tetapi di Indonesia justru bisa dibuka karena sekaligus meningkatkan aliran udara.

Untuk mengurangi keserbasamaan, bidang dinding utara diberi *tympanum* atau bidang segitiga tebarlayar yang memahkotai satu jendela Venesia (setengah lingkaran) di atas jendela yang sama dengan yang lain. Jendela bermahkota ini sekaligus mengimbangi kelebihan di sisi lainnya, yaitu balkon di kamar tidur utama.[80] Ketiga jendela di sudut timur (kiri pada Gambar 7.15) adalah tambahan pada 1972, ketika lantai atas digunakan untuk perluasan dan teras belakang disatukan dengan bangunan kediaman.

**Gambar 7.16.** Tampak samping selatan bangunan
Sumber: Arsip Bank Indonesia Institute.

80 Lihat denah asli pada Gambar 7.12.

Sisi selatan agak lebih 'ramai' karena di ujung barat tampak jelas menara yang sebenarnya dimaksudkan sebagai pengimbang bidang tampak, tetapi karena letaknya di sudut pertemuan dinding barat dan selatan, maka menguasai tampak dari sisi ini. Masalah ini terselesaikan dengan kepanjangan dinding sisi selatan, karena lantai atas bagian belakang digunakan sebagai gudang dan kamar mandi, berbeda dengan sisi utara yang berupa teras terbuka tanpa atap. Bidang penyeimbang ini menjadi lebih panjang, ditambah lagi dengan *tympanum* dan jendela Venesia besar sehingga berfungsi sebagai pintu ke balkon pemandangan. Balkon ini sekaligus menjadi penanda bahwa ruangan di belakangnya adalah bagian terpenting dari lantai itu, yaitu kamar tidur utama direktur DJB.

**Gambar 7.17.** Tampak depan bangunan
Sumber: Arsip Bank Indonesia Institute.

Tampak depan inilah yang menampilkan kepiawaian Ed Cuypers meramu berbagai unsur klasik ke dalam tatanan *façade* neoklasik yang anggun, berimbang dan mampu mencerminkan citra yang diinginkan oleh suatu bank modern (awal abad ke-20).

Bidang tampak dibagi menjadi tiga bagian yang saling mendukung, yaitu bagian pintu masuk yang teduh dan menawarkan kenyamanan kepada tamu dan pelanggan yang terhormat. Kediaman direktur di lantai atas disamarkan oleh balkon yang diapit tiang klasik, memberikan citra kuasa, andal, mantap dan dengan demikian layak dipercaya. Susunan penuh makna ini diimbangi menara yang menjulang di sisinya, menaungi dan melindungi segenap bangunan dengan bentuk yang monolit dan jauh lebih tinggi daripada bangunan. Terakhir, kubah Renaisans bersegi delapan menjadi puncak yang kokoh tetapi ramah.

**Gambar 7.18.** Gerbang masuk bangunan
Sumber: Arsip Bank Indonesia Institute.

Bagian pintu masuk benar-benar terbuka, mengundang, tanpa daun pintu yang menghalang, melainkan lengkung setengah lingkaran Romawi Klasik selebar tiga meter, jauh lebih lebar dari kebutuhan. Pada zaman Renaisans, gerbang serupa itu sering dibuat sangat megah sehingga disebut lengkung kejayaan (*triumphal arch*). Gerbang masuk ini dilindungi oleh atap datar dengan lisplang (*entablature*) klasik lengkap, terdiri dari *cornice*, *frieze* dan *architrave* yang menaungi sejak anak tangga pertama. Bidang atap ini pada kedua sisinya diberi penyangga (*console*) mengikuti langgam klasik, berbentuk lengkung landai dengan penyelesaian profil berundak di kedua ujungnya—kembali tersua unsur neoklasik yang sering ditemui.

**Gambar 7.19.** Balkon pada lantai atas
Sumber: *https://alamat-kantor-bank.blogspot.com/2018/10/alamat-bank-indonesia-bi-cirebon.html*

Tepat di atas gerbang masuk terdapat balkon lantai atas. Bentuk dan keletakannya membuat balkon itu menjadi pusat perhatian utama. Balkon yang banyak dipakai sejak masa Renaisans bukan sekadar hiasan, tetapi menjadi tempat pemimpin atau penguasa berjumpa dengan orang banyak. Letaknya yang tinggi ditambah dengan bentuk yang menjorok keluar bangunan membuat khalayak harus menengadah untuk mengelu-elukan sang pemimpin. Meskipun balkon di Gedung BI Cirebon tidak digunakan untuk kegiatan politis atau pengumpulan massa seperti era Renaisans, tetap memberi kesan keunggulan dan kepemimpinan.

Untuk mengusung kesan itu, dengan cerdik Ed Cuypers menata balkon kecil itu dengan membuat lantai balkon lebih menonjol, berbentuk bulat, yang berasal dari langgam Barok, dengan pagar (*balustrade*) bertiang model guci. Bukaan yang hanya berupa pintu berukuran biasa

**Gambar 7.20.** Menara dan kubah
Sumber: Arsip Bank Indonesia Institute.

diperbesar dengan bidang kaca pada kedua sampingnya dan tambahan jendela Venesia di ambang atas. Tetapi yang paling berpengaruh adalah tatanan layaknya kuil klasik Yunani-Romawi. Di kedua sisi dipasang tiang ganda mengikuti ordo Doria langgam Romawi yang menyangga *entablature* penuh, lengkap dengan *tympanum* di atasnya. Susunan ini selalu menarik perhatian dan menyiratkan citra kuil yang keramat dan berwibawa.

Melengkapi sekaligus memberi pengakhiran pada tatanan bangunan ini, Ed Cuypers membangun menara di sudut pertemuan antara bidang tampak depan dengan sisi selatan. Menara inilah yang menjadi penanda utama atau pumpunan komposisi arsitekturalnya sehingga jauh sebelum sosok bangunan tertampak orang sudah dapat mengenali dan mengarah ke gedung penting ini. Selain itu, penempatan menara juga menjadi penyeimbang bagi bidang tampak yang, mau tidak mau, sempit dan terbatas.

Menara ini dibangun secara bersusun, makin ke atas makin mengecil meski penyusutan itu tidak drastis seperti kemuncak (*spire*) yang melancip dengan pertimbangan bahwa proporsi ketinggiannya tidak banyak melampaui tinggi bangunan. Untuk menekankan pemisahan antara menara dengan badan bangunan keseluruhan, bangunan menara dibedakan dengan meletakkannya sedikit masuk lebih dalam dari kedua sisi yang mengapitnya. Ceruk dangkal ini memberi kesan menara terpisah atau lepas dari bangunan utamanya.

Demikian pula dengan pengaturan setiap tingkatnya diselaraskan dengan jumlah lantai. Bagian paling bawah, sejajar dengan gerbang masuk hampir polos agar tidak menyaingi gerbang masuk di sebelahnya, hanya berupa dinding dengan lanjutan alur aslar untuk menjaga kesatuan. Satu-satunya yang membedakan adalah jendela bulat (*oeil-de-boeuf*) yang pada masa Barok biasanya dipasang di ketinggian dinding istana, namun di sini justru dipasang di bagian paling bawah, sejajar dengan lengkung gerbang utama. Jelas langkah ini menjadi salah satu ciri pendekatan Neoklasik. Pada lantai kedua di atasnya, dinding menara juga sekadar melanjutkan irama jendela persegi dari sisi selatan,[81] kembali untuk menghindari 'bentrok' dengan balkon megah di sebelahnya.

81 Lihat Gambar 7.20, kiri.

Pada tingkat di atasnya lagi, ketika badan menara sudah tampil menyeluruh dan keempat sisinya 'lepas' dari bangunan utama, sosok menara diolah dengan lebih canggih, dihias dengan jendela Venesia, melanjutkan pola kemegahan yang sudah ditampilkan di kedua balkon (depan dan sisi selatan) serta jendela utama di sisi utara. Tetapi jendela menara ini dihias jauh lebih rumit dengan pola silang dan tanpa kaca sama sekali,[82] sedangkan dinding sisi tetap menggunakan pola alur aslar sehingga tetap tampak jelas kesatuannya dengan bagian lain bangunan.

Baru pada bagian teratas, puncak menara, terdapat mahkota bangunan. Penutup menara ini mengikuti kubah berlanggam Renaisans awal, yaitu kubah bersegi delapan yang pada masanya dianggap sebagai keajaiban teknologi. Kubah itu berukuran kecil, tetapi mengikuti kaidah klasik dengan ketat. Landasan berbentuk bujur sangkar melanjutkan bentuk dasar menara, tetapi dasar kubah berupa segi delapan lebih kecil daripada landasannya sehingga pada tiap keempat sudutnya perlu dipasang hiasan sudut (*arcoteria*). Agar kubah lebih anggun, perlu ditinggikan sehingga berada di atas badan kubah (*tholodate*), di atas pelipit pembatasnya barulah kubah segi delapan yang mengikuti mahakarya arsitek Brunelleschi di Firenze.

Kubah terdiri dari delapan juring, masing-masing diberi penghias yang sebenarnya adalah pelat penghubung antarjuring. Pada bagian atas kubah asli biasa dipasang lentera tempat meletakkan lampu penanda, tetapi pada kubah kecil langsung dipasang kemuncak.

Gaya atau langgam yang ditampilkan adalah Neo-Renaisans atau Romantik yang populer pada akhir abad ke-19 hingga dasawarsa 1930-an, yaitu bangunan untuk kegiatan modern, terutama perkantoran, tetapi menggunakan kosa-bentuk Renaisans yang berakar pada arsitektur masa Romawi. Langgam ini menyurut ketika Arsitektur Modern yang rasionalsitik melepaskan diri dari perjalanan sejarah. Di Eropa sendiri langgam ini dianggap hanya peniruan masa lalu dan diabaikan masyarakatnya, baru pada akhir dasawarsa 1970-an perhatian dan penghargaan bangkit kembali.[83]

82 Lihat Gambar 7.20, kanan.

83 Norbruis (2018: 10).

Lebih penting adalah kenyataan bahwa bangunan ini karya arsitek besar Ed Cuypers. Pendekatan yang dilakukan Cuypers sekaligus menjadi tonggak bagi perkembangan Arsitektur Indonesia. Cuypers menyadari perlu konsep bagi suatu Indo-Europeeschearchitectuur, arsitektur bagi Indonesia modern, yang mampu menampung kegiatan modern, namun tetap berakar pada kebudayaan Indonesia— atau Hindia-Belanda sebutan kala itu—seperti tampak terutama pada penggunaan ragam hias Candi Borobudur di gedung utama DJB di Batavia

Masalah Arsitektur Indonesia menjadi polemik yang hangat beberapa tahun kemudian, ketika tiga arsitek menawarkan pendekatan yang berbeda-beda. C. P. Wolff-Schoemaker memandang Arsitektur Modern hanya bisa menggunakan pendekatan modern; unsur kebudayaan Indonesia hanya sebagai hiasan bangunan. Sementara itu, H. Maclaine-Pont berusaha mencari akar-akar pertukangan asli sebagai dasar Arsitektur Indonesia; sedangkan T. Karsten beranggapan bahwa sikap dan bentukan ruang Indonesia wajib dipahami untuk melahirkan pendekatan arsitektur yang membawa kepribadian Indonesia. Hingga kini, perdebatan masih belum selesai. Gedung Kantor Perwakilan Bank Indonesia di Cirebon bisa menjadi contoh penting perjalanan sejarah arsitektur Indonesia.

Dapat disimpulkan bahwa dari keempat kriteria dalam Undang-Undang Nomor 11/2010, setidaknya tiga kriteria terpenuhi untuk menetapkan Gedung BI Cirebon sebagai Bangunan Cagar Budaya, yakni umur bangunan, langgam yang digunakan, serta arti bagi sejarah khususnya sejarah arsitektur dan sejarah perbankan di Indonesia. Dari kenyataan ini, jelas pula bahwa Kantor Perwakilan Bank Indonesia di Cirebon bisa berperan dalam ilmu pengetahuan dan pendidikan. Oleh karena itu, bangunan Kantor Perwakilan Bank Indonesia Cirebon, sekali lagi, sangat layak dilestarikan dan diangkat menjadi Bangunan Cagar Budaya.

Bangunan Kantor Perwakilan Bank Indonesia Cirebon sebenarnya sudah diakui dan dinyatakan sebagai Bangunan Cagar Budaya melalui Surat Keputusan Walikota Cirebon Nomor 19 Tahun 2001 tentang Perlindungan dan Pelestarian dan Kawasan dan Bangunan Cagar Budaya di Cirebon. Surat Keputusan ini menetapkan enam Kawasan Cagar

Budaya[84] dan 52 Bangunan Cagar Budaya yang terbagi dalam tiga kelas/peringkat.[85] Gedung Kantor Perwakilan BI Cirebon termasuk dalam peringkat A, yaitu Bangunan dengan Tingkat Perlindungan Sangat Ketat.

Tindakan tersebut diperkuat dengan terbitnya Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM 58/PW.007/MKP/2010 tentang Penetapan Sebagai Benda Cagar Budaya, Situs, dan/atau Kawasan Cagar Budaya yang Dilindungi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya. Peraturan Menteri ini menetapkan 42 bangunan di Provinsi Jawa Barat sebagai Benda Cagar Budaya, Situs atau Kawasan Cagar Budaya yang dilindungi. Kantor Perwakilan Bank Indonesia di Cirebon pada urutan ke-16.

Berlandaskan Surat Keputusan Walikota dan Peraturan Menteri tersebut Kota Cirebon membuktikan perhatiannya kepada bangunan, situs dan kawasan cagar budaya di wilayahnya yang amat kaya; mencakup kurun waktu setidaknya sejak seribu tahun terakhir. Mulai dari prasasti Huludayeuh[86] yang berasal dari abad ke-9/10, tinggalan megalitik dan kepurbaan di lereng Gunung Ciremai,[87] peninggalan bangunan masa kejayaan kerajaan Cirebon, arsitektur kota, dan industri pengaruh Belanda abad ke-19/20.

Hanya saja kedua penetapan tersebut dibuat berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya yang sudah ketinggalan zaman dan banyak ketidakjelasan. Tidak mengherankan jika peraturan itu tidak diterapkan dengan ketat di lapangan karena tidak jelas juga tindakan yang harus dijalankan untuk melaksanakan perlindungan dan pelestarian tersebut. Kota Cirebon dan Kementerian terkait perlu memperbarui kedua penetapan tersebut dengan menggunakan landasan Undang-Undang Nomor 11/2010.

---

84 Terdiri atas: Kawasan Keraton Kasepuhan, Kawasan Keraton Kanoman, Kawasan Keraton Kacerbonan, Kawasan Gua Sunyaragi, Kawasan Etnis Arab (Panjunan), dan Kawasan Etnis Cina (Pecinan).

85 Tiga peringkat itu adalah: A. Bangunan dengan Tingkat Perlindungan Sangat Ketat (32 bangunan); B. Bangunan dengan Tingkat Perlindungan Ketat (13 bangunan); dan C. Bangunan dengan Tingkat Perlindungan Cukup Ketat (7 bangunan).

86 https://cagarbudaya.kemdikbud.go.id/public/objek/newdetail/PO20180604000017/huludayeuh

87 Wilsen (1855: 146–7).

Selain itu, Cirebon telah masuk dalam Program Penataan dan Pelestarian Kota Pusaka (P3KP) yang dikelola oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat melalui Direktorat Jenderal Cipta Karya Direktorat Bina Penataan Bangunan. P3KP merupakan insentif program kepada Kabupaten/Kota peserta P3KP yang telah menetapkan Peraturan Daerah Rencana Tata Ruang dan Wilayah dan Peraturan Daerah Bangunan Gedung. Selain itu, P3KP merupakan *platform* untuk mensinergikan program lintas-sektor baik di tingkat pusat maupun daerah dalam rangka mewujudkan pembangunan kota berkelanjutan berbasis pusaka.[88]

## BANGUNAN CAGAR BUDAYA DI CIREBON

Beberapa bangunan di daerah Cirebon wajib dilestarikan dan dipelihara sebagai Bangunan Cagar Budaya. Walaupun Cirebon sudah memiliki peraturan tentang pelestarian, tetapi belum semua bangunan memperoleh status Cagar Budaya yang dapat dilindungi oleh aturan hukum atau undang-undang. Masalah utamanya adalah menentukan dan mempertanggungjawabkan bangunan yang memang layak dilestarikan.

Pelestarian bangunan cagar budaya harus dilaksanakan sebaik-baiknya sambil tetap memungkinkan pengembangannya, baik kegiatan maupun pemanfaatannya.[89] Pelestarian yang efektif akan mengikuti kaidah perkembangan berkesinambungan, pendekatannya menggunakan konsep gunalaras (*adaptive reuse*). Sering kali bangunan cagar budaya masih menjadi bagian dari kesatuan yang tetap digunakan dan berkembang, terutama yang terletak pada lahan atau kawasan bernilai tinggi. Guna mencapai hasil optimal, diperlukan landasan pengelolaan cagar budaya secara lengkap sehingga seluruh pemangku kepentingan—yaitu pemilik, pemerintah, masyarakat luas, dan lembaga terkait—mengenal dan mampu menjalankan hak dan tugas masing-masing. Cirebon memiliki sejarah yang panjang sehingga usaha pelestarian masih perlu terus diperjuangkan.

88 http://sim.ciptakarya.pu.go.id/kotapusaka/

89 Benson: 51.

Beberapa bangunan dan situs dalam deskripsi berikut ini memperlihatkan kekayaan warisan budaya bangunan Cirebon. Secara garis besar, bangunan dan situs ini bisa dilihat "mewakili" unsur peradaban kerajaan abad ke-15 hingga abad ke-18, dan masa perkotaan modern abad ke-19 di Cirebon. Perlu diingat bahwa tidak semua bangunan dan situs ini telah memperoleh status bangunan atau situs Cagar Budaya karena berbagai faktor.

## MASA KERAJAAN

Era keemasan kesultanan di Cirebon terjadi di bawah dinasti yang diawali oleh Syeh Syarif Hidayatullah atau Sunan Gunung Jati pada pertengahan abad ke-15 dan diteruskan oleh para ahli warisnya, terutama Kesultanan Kasepuhan dan Kanoman. Kurun itu mulai mengalami kemerosotan kemandirian sejak jatuh di bawah pengaruh Mataram dan kemudian

**Gambar 7.21.** Keraton Kasepuhan, bagian depan, *sitihinggil* atau *lemah duwur*.
Sumber: Arsip Bank Indonesia Institute.

Batavia sepanjang abad ke-17. Kesultanan di Cirebon tidak lagi memiliki kekuasaan politik dan hanya menjadi unsur pemerintah jajahan Hindia Belanda yang diatur dalam *Reglement op het Beheer van de Cheribonsche Landen* (1809) oleh Gubernur Jenderal H. W. Daendels.[90]

**Keraton Kasepuhan.** Keraton ini tertua di Cirebon. Bagian Dalem Agung Pakungwati, kediaman Sunan Gunung Jati, dibangun sekitar pertengahan abad ke-15, merupakan ikon utamanya. Awalnya *dalem* ini merupakan kediaman seorang *kuwu*, penguasa bawahan, baru kemudian diperluas dan menjadi kediaman penguasa mandiri. Sebagai keraton, hadapan yang semula ke arah timur, diubah menghadap ke utara, layaknya keraton, dan dilengkapi dengan alun-alun, sitinggil (*sitihinggil*), tamansari (*rara denok*) dan berbagai pekarangan, selain perumahan untuk menampung sanak keluarga dan para pengikut.

Pada masa penerusnya, Panembahan Ratu (1570-1640), didirikan keraton baru di sisi selatan, kemudian menjadi Keraton Kasepuhan yang masih ada sampai sekarang. Bangsal Panembahan, yaitu tempat sultan dalam *pisowanan*, dianggap bagian tertua keraton ini. Selama 450 tahun berikutnya, banyak penambahan dan perubahan terjadi; bangsal-bangsal ditambahkan ke arah utara, mencapai gerbang Pangrawit, yang mungkin dahulu adalah batas kedaton atau pekarangan terdalam keraton. Hanya sitinggil di bagian terdepan yang dipertahankan utuh sampai sekarang.

Keraton Kasepuhan merupakan satu-satunya peninggalan tradisi arsitektur pasisiran, yaitu penerus tradisi Keraton Majapahit. Susunan dan bagian-bagiannya memperlihatkan tata cara pembangunan keraton yang jauh lebih tua daripada keraton-keraton Mataram. Kawasan ini telah dinyatakan sebagai Kawasan Cagar Budaya berdasarkan Surat Keputusan Walikota Cirebon (2001) dan diperkuat oleh Penetapan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata (2010).[91]

90 Sunardjo (1983: 163).

91 Lihat Surat Keputusan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata, Nomor 238/M/1999, 4 Oktober 1999; Sistem Registrasi Nasional Cagar Budaya, Nomor RNCB.19991004.02.000894.

**Gambar 7.22.** Keraton Kanoman, di bagian depan, *sitihinggil* atau *lemah duwur*.
Sumber: Arsip Bank Indonesia Institute.

**Keraton Kanoman.** Keraton Kanoman didirikan oleh Sultan Anom tiga tahun setelah naik tahta pada 1681. Sebelum itu, Sultan Anom berdiam bersama Sultan Sepuh di Keraton Kasepuhan. Tapak Keraton Kanoman berada di sisi utara kediaman Ki Gedheng Alang-alang, kuwu Cirebon pertama. Bangunan lama ini masih dipertahankan sesuai dengan aslinya dan biasa disebut Bale Witana— berasal dari dialek Cirebon *wiwit ana* bermakna 'asal (semua) yang ada'.

Tradisi arsitektur lama tampak pada pengaturan berdasarkan rangkaian latar (pekarangan), masing-masing dikelilingi dinding pemisah dengan gapura, seperti ditemukan pada puri di Bali hingga sekarang. Namun, tampak jelas pula pengaruh unsur Mataram dan Eropa di keraton ini, seperti alun-alun bujur sangkar dan hadapannya lurus ke utara, sedangkan bangsal-bangsal utama menggunakan proporsi dan ketukangan Eropa (Belanda). Bangunan menara lonceng dan Bangsal Pulantara di sisi timur keraton makin memperjelas unsur pengaruh itu.

Di luar pengaruh tersebut, ada upaya mempertahankan unsur lama yang dikemas dalam ketukangan baru seperti tampak pada bangunan

sitinggil yang tetap mengikuti pola lama, tetapi memanfaatkan konstruksi batu bata yang terhitung baru pada waktu itu. Bale Paseban menampilkan bentuk denah dan konstruksi yang tidak dikenal lagi di Jawa, dibuat mengikuti contoh Mande Mangu di Astana Gunung Jati. Perwujudan keraton ini sangat berharga karena memperlihatkan berbagai pengaruh yang membentuknya.

Kawasan Kanoman juga telah dinyatakan sebagai Bangunan Cagar Budaya berdasarkan keputusan Walikota Cirebon (2001)[92] yang diperkuat Penetapan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata (2010). Hanya saja kenyataan di lapangan masih jauh dari yang dicita-citakan kedua aturan itu. Harus ada langkah yang lebih terarah untuk menjalankannya. Apalagi dalam Sistem Registrasi Nasional Cagar Budaya, Keraton Kanoman belum terdaftar.

**Masjid Agung Sang Cipta Rasa.** Masjid Agung dibangun sebagai tanda bahwa penguasa tempat itu sudah mandiri dan berdaulat sebagai kerajaan Islam. Masjid ini terawal dibangun semasa Sunan Gunung Jati

**Gambar 7.23.** Masjid Agung Sang Cipta Rasa di Alun-alun Kasepuhan
Sumber: Arsip Bank Indonesia Institute,

92 Surat Keputusan Walikota Cirebon Nomor 19/2001.

pada perempat terakhir abad ke-15. Bagian ini dikelilingi dinding batu bata *kuta kosod*, yaitu susunan bata tanpa perekat (spesi), menampilkan hiasan yang sangat indah, terutama di bagian mihrab yang diapit ukiran sulur-sulur bermahkota bunga teratai. Di tengah ceruk tergantung seperti lentera, kuncup teratai yang sangat indah.

Atap mesjid awal pernah terbakar sehingga tidak diketahui lagi bentuk aslinya. Kemungkinan besar yang terbakar hanya bagian atap tetapi tiang-tiang penyangganya masih ada dan tetap digunakan, tampak dari persambungan pada tiang-tiang itu. Atap masjid masa ini berbeda dengan masa Mataram berikutnya. Pada bangunan lama, konstruksi dinding dan tiang penyangga atap sama sekali terpisah, sedangkan pada masa Mataram, usuk atap bertumpu pada dinding keliling—mungkin pengaruh *ringbalk* pada bangunan Eropa.

Kini, bangunan Masjid Agung jauh lebih luas dari aslinya karena ditambah emperan berupa perpanjangan atap ke luar pada keempat sisinya, kemudian ditambah pula bangunan serambi pada ketiga sisinya—timur, utara dan selatan. Renovasi atap (1990) mengganti penutup atap dari sirap jati menjadi genting modern, kemudian lubang di antara atap tumpang ditutup dengan kaca. Selain itu, bagian lama yang semula hanya dibuka pada hari-hari khusus dibuat terbuka untuk umum dan lelangit bambu anyamannya dilepas sehingga menjadi terang- benderang. Selain itu, masjid ini terawat baik dibandingkan dengan keraton.

Masjid Agung Sang Cipta Rasa dilindungi dan dilestarikan berdasarkan keputusan Walikota Cirebon (2001), tetapi anehnya tidak termasuk dalam Penetapan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata (2010),[93] meski dalam Sistem Registrasi Nasional Cagar Budaya telah terdaftar.[94] Data tersebut perlu diperiksa lagi dengan lebih saksama demi kejelasan status Cagar Budaya salah satu masjid tertua di Pulau Jawa itu.

93 Penetapan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.58/PW.007/MKP/2010.

94 Surat Keputusan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor 238/M/1999, 4 Oktober 1999; Sistem Registrasi Nasional Cagar Budaya, Nomor RNCB.19991004.02.000896.

**Gambar 7.24.** Masjid Panjunan
Sumber: Arsip Bank Indonesia Institute.

**Masjid Panjunan.** Masjid ini dibangun oleh Pangeran Panjunan, seorang pengikut Sunan Gunung Jati, konon berasal dari Bagdad, di Kampung Panjunan, kampung orang Arab. Masjid kecil ini sering dilupakan padahal sangat menarik dan berharga untuk dikunjungi. Bangunan utamanya berukuran 9 x 9 meter persegi, lebih besar dari ukuran rata-rata masjid masa itu. Masjid Pejagrahan, di bagian Dalem Agung Pakungwati Keraton Kasepuhan, berukuran hanya 5 x 7 meter persegi. Bisa jadi perbedaan ukuran ini mengisyaratkan status pendirinya.

Mihrab masjid ini juga sangat menarik perhatian karena hiasannya, walaupun tidak sehalus Masjid Agung. Mihrab diapit oleh dua tiang bermahkota kuncup teratai, seperti landasan (*umpak*) batu tiang-tiang utamanya, sekarang dicat putih. Paling menarik adalah pintu masuk masjid, di atasnya diberi ukiran bersayap, yang mengingatkan pada peninggalan di Sendang Duwur, Tuban, Jawa Timur.

Sesudah pemugaran (1940), ruangan masjid lama tidak digunakan lagi. Umat melakukan sembahyang di ruangan depan, perluasan dari serambi masjid sehingga pintu masjid lama dijadikan mihrab salat sehari-hari. Pada sisi selatan, terdapat pintu rendah ke ruang *pawadonan* atau

*pawestren*, ruang sembahyang khusus untuk wanita, sejajar dengan ruang sembahyang utama.

Masjid itu dikelilingi dinding batu bata merah dengan pintu masuk di sisi timur menghadap ke Jalan Panjunan; di sisi selatan terdapat sisa pintu masuk kecil yang dihias dengan makara, mungkin dulu sebagai jalan masuk untuk jamaah wanita. Sepanjang dinding batas luar dihiasi pola belah ketupat dengan piring keramik Cina di bagian tengah.

Dalam Surat Keputusan Walikota Cirebon 19/2001, kawasan ini disebut sebagai Kawasan Etnis Arab yang dilindungi dan dilestarikan, termasuk bangunan masjidnya. Namun, Penetapan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata (2010) hanya memasukkan Masjid Panjunan sebagai bangunan yang dilindungi. Sayang sekali belum masuk dalam Sistem Registrasi Nasional Cagar Budaya.

**Gambar 7.25.** Astana Gunung Jati
Sumber: Arsip Bank Indonesia Institute.

**Astana Gunung Jati.** Kompleks permakaman tokoh suci Sunan Gunung Jati ini dibangun pada pertengahan abad ke-16; selanjutnya menjadi permakaman bagi anggota keluarga kesultanan sampai sekarang. Bangunan kompleks layaknya pura di Bali yang bertingkat-tingkat, makin

tinggi makin suci. Rangkaian pelatarannya memperlihatkan tradisi punden berundak yang telah dikenal di Jawa sejak masa purba.

Di kawasan permukiman tersebar bangunan tua dan hiasan yang sangat halus pengerjaannya. Pada kedua tingkat terbawah terdapat Mande Mangu dan Mande Jajar, dua bentuk bangunan kayu yang tidak ditemui lagi di Jawa, mungkin karena kerumitan konstruksi dan pengerjaannya. Kini, jumlah pelataran ada sembilan tingkat, mulai dari alun-alun, pelataran terbawah, hingga puncak lokasi Gedung Jinem, makam Sunan Gunung Jati dan kerabat terdekatnya. Khalayak hanya bisa mencapai tingkat kedua, di depan Pintu Pasujudan. Pintu ini hanya dibuka pada hari-hari tertentu atau apabila ada pemakaman. Untuk naik ke puncak harus mendapat izin khusus dari Sultan Sepuh atau Sultan Anom.

Pada sisi timur, tepat di bawah puncak, terdapat Masjid Keramat Astana Gunung Jati. Karena terletak di lereng yang terjal, ruangan sembahyang di masjid ini bertingkat-tingkat mengikuti kemiringannya. Mungkin masjid awal berada di bagian teratas dan ditambahkan perluasan pada masa selanjutnya. Selain itu, seluruh dinding, baik pembatas maupun bangunan, berhias pola belah ketupat yang ditempeli piring dan mangkok keramik biru Cina kuno. Ada pula berbagai ragam pot bunga keramik

**Gambar 7.26.** Tamansari Sunyaragi
Sumber: Arsip Bank Indonesia Institute.

yang sama besar maupun kecil. Seluruh tinggalan itu disimpan di Museum Keramik dan tidak terbuka untuk umum.

Baik Surat Keputusan Walikota maupun Penetapan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata tidak menyebutkan Astana Sunan Gunung Jati sama sekali; juga tidak tercatat dalam Sistem Registrasi Nasional Cagar Budaya. Seharusnya, kawasan ini masuk dalam perlindungan pelestarian.

**Tamansari Sunyaragi.** Situs unik yang memperlihatkan peralihan dari budaya membangun Majapahit dengan unsur-unsur Islam dan Cina. Penataan taman ini sangat rumit, terdiri dari kumpulan kolam dan parit, gua dan bukit, bangunan dan lorong; seluruhnya terbalut dalam pola *wadasan* atau *mega mendung*, tersebar dalam situs seluas 4.000 meter persegi di atas lahan 15 hektar. Sebagai taman kerajaan, fungsinya bukan hanya untuk rekreasi tetapi lebih sebagai tempat bertapa atau menenangkan batin. Jelas sekali taman ini merupakan penggambaran alam semesta menurut mitologi Jambudwipa dari kepercayaan lama.

*Babad Cerbon* menyebutkan bahwa pembuatan Tamasari Sunyaragi terjadi pada 1666 tarikh Jawa atau 1741 tarikh umum. Namun, *candrasangkala* pada arca garuda menunjukkan angka tahun 1628 tarikh Jawa atau 1704 tarikh umum. Rupanya, Sunyaragi dibangun bertahap dalam kurun waktu cukup panjang. Sumber arsip VOC mencatat taman ini dibangun oleh Pangeran Aria Cirebon (1697-1768) pada 1703.

Situs taman berada di tepi rawa atau danau yang luas dan dapat dicapai dari Keraton Kasepuhan melalui jalur darat ataupun jalur Kali Kasunean menggunakan perahu. Tata ruangnya terdiri dari tiga pelataran. Bagian timur adalah gerbang masuk dari arah darat berupa Bangsal Jinem yang diapit oleh dua bukit buatan, yaitu Gua Pengawal di sisi selatan dan Mande Kemasan di sisi utara. Sesudah Bangsal Jinem—dengan melintasi pekarangan kecil yang menjadi persimpangan lalu lintas keempat arah—tampak Mande Beling di puncak bukit kecil yang menjadi pembatas ke pelataran berikutnya, dimulai dari Gua Padang Ati dan Gua Peteng.

Batas pelataran kedua yang terbuka dan berkesan lega adalah Bale Kambang, tempat berlabuh perahu yang masuk melalui jalur air. Sisi barat adalah bagian terdalam, kompleks Gua Arga Jumut yang letaknya paling tinggi, melambangkan Mahameru, pusat dunia di tepi samudra. Dalam

Sistem Registrasi Nasional Cagar Budaya, Tamansari Sunyaragi termasuk kategori Cagar Budaya Nasional.[95]

**Gambar 7.27.** Kelenteng Tiao Kak Si atau Vihara Dewi Welas Asih
Sumber: Arsip Bank Indonesia Institute.

**Kelenteng Tiao Kak Si.** Merupakan salah satu kelenteng tertua di Jawa, dibangun pada 1658. Namun, sebuah kelenteng biasanya tidak dibangun sekali jadi; kemungkinan besar tahun itu menunjukkan tahap perbaikan atau perluasan pertama. Perbaikan selanjutnya dilakukan pada 1791, 1829 dan 1889. Dari peta lama tampak jelas bahwa kelenteng tersebut dibangun di sisi utara Kali Cirebon. Kelenteng ini juga menjadi bukti bahwa kegiatan orang-orang Cina sudah berakar di Cirebon, bahwa Cirebon telah menjadi pelabuhan internasional jauh sebelum kedatangan orang Belanda melalui Benteng Beschermer di sisi selatan Kali Cirebon di seberangnya.

Kelenteng Tiao Kak Si termasuk kelenteng besar, disusun layaknya istana pembesar atau bangsawan. Pekarangan depan dicapai melalui gerbang yang menghalangi pandangan langsung ke dalam. Seberang

95 Surat Keputusan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata No. 139/M/1998, dikuatkan Surat Keputusan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata No. 006/M/2016; Sistem Registrasi Nasional Cagar Budaya, Nomor RNCB.19980616.04.000709.

pekarangan merupakan bangunan terdepan berupa ruangan tempat meja utama yang diduduki Dewa Hok Tek Cing Sin—dipercaya orang Cina pengikutnya sebagai penguasa lahan dan dewa kemakmuran. Di belakang bangunan muka ini tersua pekarangan lain; bangunan yang terletak paling belakang merupakan tempat bersemayam Dewi Welas Asih atau Koan Im Po Sat sebagai 'tuan rumah'. Dua bangunan sayap yang memanjang dari depan ke belakang berupa ruangan bagi dewa-dewa lain dan para 'tamu'.

Nama Tiao Kak Si berarti 'vihara' pada kata *si*; sedangkan *tiao kak* sulit diterjemahkan karena merupakan kata ungkapan: *tiao* berarti 'air pasang', *kak* adalah 'muncul', 'bangkit'; digabungkan sebagai nama kelenteng, bisa bermakna 'meninggikan budi'. Kini, kelenteng tersebut dinamai Vihara Dewi Welas Asih. Dalam Surat Keputusan Walikota Cirebon (2001), kelenteng ini termasuk Kelas A, yakni Bangunan dengan Tingkat Perlindungan Sangat Ketat; Penetapan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata (2010) menguatkan perlindungan bangunan ini.[96]

## MASA MODERN

Di sini, masa modern diperhitungkan sejak kedaulatan kesultanan Cirebon dicabut mengikuti kebijakan Gubernur Jenderal H. W. Daendels dan diteruskan oleh T. S. Raffles. Ketika kekuasaan dikembalikan ke pemerintahan kolonial Belanda, Cirebon dengan sendirinya menjadi bagian dari Hindia Belanda. Pada masa pemerintahan Gubernur Jenderal G. A. G. P. Baron van der Capellen diterbitkan Peraturan Komisaris Jenderal yang membagi Pulau Jawa menjadi 20 keresidenan (*residentie*), termasuk Cirebon.[97]

Dalam sistem keresidenan, Residen menjadi wakil dan lambang Pemerintah Hindia Belanda dengan kekuasaan mutlak dalam bidang legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Residen dibantu beberapa asisten residen dan bupati untuk urusan dengan rakyat. Susunan ini berubah

96 Pada 31 Agustus 2014 telah didaftarkan ke Sistem Registrasi Nasional Cagar Budaya dan masih dalam proses verifikasi.

97 Peraturan Komisaris Jenderal No. 3 tanggal 9 Januari 1819; dimuat dalam *Staatsblad*, No. 16 (1819).

ketika Cirebon ditetapkan sebagai kota mandiri (*gemeente*) pada 1 April 1906, dengan batas di sebelah utara berupa selokan yang membelah Desa Tangkil dan Kejaksan dari pantai sampai sudut barat laut kediaman Residen. Batas di sisi barat adalah kediaman Residen, mengikuti jalan antara Tangkil dan Sunyaragi sampai Kali Sigarampak, dan di tepi kiri hingga titik perbatasan Desa Sunyaragi dan Kanggraksan. Batas di sebelah selatan ditarik dari titik tersebut sampai Kali Kasunean, pada tepi kanannya sampai pantai. Batas ini diperluas pada 1929.[98]

Dalam tiga dasawarsa pertama abad ke-20 Cirebon melambung menjadi kota besar dengan jumlah penduduk lebih dari 25.000 jiwa terdiri dari berbagai etnis. Pelabuhannya terbesar nomor lima di seluruh Hindia Belanda, industri gulanya menjadi andalan dunia. Perusahaan multinasional dan perwakilan diplomatik dari berbagai penjuru dunia dijumpai di Cirebon. Namun, Perang Dunia II mengubah kejayaan Cirebon.

Setelah kemerdekaan, berdasarkan Undang-Undang Nomor 22/1948 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Daerah, status Keresidenan

**Gambar 7.28.** Gedung Negara, bekas Keresidenan Cirebon
Sumber: Arsip Bank Indonesia Institute.

98 *Gedenkboek* (1931: 46).

tidak dikenal lagi; disusul Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah, status Cirebon menjadi Kota Besar setingkat Kabupaten. Titik ini bisa dijadikan akhir pembahasan mengenai penetapan Cagar Budaya di Cirebon.

**Gedung Negara.** Gedung ini mulai dibangun pada 1841 untuk menggantikan rumah dinas residen yang ikut musnah akibat kebakaran Benteng Beschermer pada 1835. Pada awalnya, bangunan hanya digunakan sebagai kediaman residen, sementara kantor residen berada di Lemahwungkuk, di gedung eks-Keresidenan Kebumen yang sekarang tidak ditemukan lagi. Baru pada 1865, setelah diperluas, kantor residen dipindahkan ke Gedung Negara. Gedung ini menjadi batas utara kota (*hoofdplaats*) Cirebon sehingga ke arah selatan, sampai alun-alun Kejaksan, berkembang menjadi kawasan permukiman eksklusif orang Eropa.

Gedung Negara dibangun mengikuti *empirestijl* 'langgam kerajaan' yang megah dengan tampak depan lebar dan lega di tengah-tengah lahan yang terbuka luas. Pada serambi depan dipasangi tiang-tiang berlanggam klasik Yunani dan di kedua sisi bangunan dibuat gerbang jalan keluar-masuk kendaraan kereta berkuda pada waktu itu. Denahnya amat sederhana; paling depan berupa teras terbuka, kemudian masuk ke ruangan depan yang lebarnya sama dengan teras. Di tengah adalah ruang besar yang menghubungkan teras depan dan belakang, kedua belah sisinya berupa kamar kerja dengan lelangit yang tinggi pada semua ruangan. Seperti di tempat lain, gedung keresidenan dirancang oleh bagian Waterstaat en 's-Lands Gebouwen—dinas yang mengurus bangunan pemerintah—biasanya ditangani oleh mantan perwira zeni sehingga pengetahuan arsitekturnya terbatas dan hanya meniru contoh dari buku.

Kini Gedung Negara dimiliki oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Telah ditetapkan sebagai Bangunan Cagar Budaya yang dilindungi dan dilestarikan berdasarkan Surat Keputusan Walikota Cirebon (2001) dan Penetapan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata.[99]

99 Surat Keputusan Walikota Cirebon Nomor 19/2001; Penetapan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata 2010 No. PM.58/PW.007/MKP/2010; Sistem Registrasi Nasional Cagar Budaya, Nomor RNCB.20100622.02.000910

**Gambar 7.29.** Pendapa, Rumah Dinas Bupati Cirebon
Sumber: Arsip Bank Indonesia Institute.

**Pendapa Kabupaten.** Bangunan rumah dinas Bupati Cirebon ini terletak di persilangan dua jalan besar masuk ke Cirebon, yaitu jalur ke barat menuju Karangsambung, dan jalur ke utara ke Karangampel. Di sisi utara merupakan kawasan perumahan orang Eropa yang dibuka sejak kediaman Residen (sekarang Gedung Negara) didirikan. Hadapan bangunan—seperti umumnya kabupaten—di wilayah Mancanagari Mataram, lurus ke arah utara. Keletakan ini memperlihatkan bahwa kediaman bupati didirikan sebelum standardisasi kota kolonial di Jawa yang baru ditetapkan seusai Perang Jawa (1825-30).

Susunan dan ukuran bangunan pendapa sangat besar dan megah. Di seberang terletak alun-alun Kejaksan dan masjid, biasa disebut Tajug Agung Kabupaten, di sisi barat. Bagian paling depan pendapa mengambil bentuk joglo berukuran besar dan mendominasi pandangan pendatang. Joglo adalah hasil pengembangan konstruksi kayu di zaman Mataram dan tidak dikenal dalam tradisi Cirebon lama. Kembali memperkuat fakta bahwa bupati adalah pegawai, bawahan pemerintah jajahan, dan tidak ada hubungannya dengan masa lalu kerajaan Cirebon.

Di belakang pendapa adalah kediaman bupati yang, mengikuti pola Indisch, berupa rumah induk berukuran besar, tempat sekalian keluarga

bupati tinggal. Di belakangnya terdapat taman terbuka dan deretan bangunan pelayanan, gudang, dapur, kamar mandi, kamar pembantu, garasi, dan lain-lain, pada kedua sisinya. Rumah ini berdiri di lahan sekitar 18.150 meter persegi, sedangkan luas bangunan pendapa dan tempat kediaman meliputi 3.200 meter persegi.

Walikota Cirebon memutuskan Pendapa Kabupaten sebagai Kelas A, yakni Bangunan dengan Tingkat Perlindungan Sangat Ketat. Penetapan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata 2010 menguatkan perlindungan bangunan tersebut.[100]

**Gambar 7.30.** Balai Kota Cirebon.
Sumber: Arsip Bank Indonesia Institute.

**Balai Kota Cirebon.** Gedung Balai Kota Cirebon mengikuti langgam Art Deco yang berasal dari Amerika Serikat tetapi berlandaskan pada paham Aliran Amsterdam yang populer pada dasawarsa ketiga abad lalu. Bangunan ini dirancang oleh Direktur Gemeentewerken Cirebon, Joost Jacob Jiskoot, dan selesai dibangun pada 1 September 1927.

100 Sistem Registrasi Nasional Cagar Budaya, Nomor RNCB.20100622.02.000912.

Gedung ini menjadi sangat menarik karena Jiskoot menyelipkan enam ekor udang di puncak dua menara yang mengapit gerbang masuk bangunan. Sebagai orang yang lama tinggal di Cirebon, ia menyadari benar makna udang (*rebon*) bagi kotanya. Bangunan ini sebenarnya untuk menampung kegiatan Dewan Kota (*Raadhuis)*, tetapi juga dapat digunakan sebagai tempat pertemuan dan pesta pernikahan orang Eropa. Mungkin karena bentuk Art Deco identik dengan dunia hiburan, lantai bagian dalam bangunan menggunakan bahan gemerlap sehingga makin menunjang citranya. Sejak berlangsung pemerintahan pendudukan militer Jepang, gedung ini diubah menjadi pusat pemerintahan Kotapraja Cirebon sampai sekarang.

Bangunan unik ini dilindungi dan dilestarikan berdasarkan Surat Keputusan Walikota Cirebon sebagai Kelas A yakni Bangunan dengan Tingkat Perlindungan Sangat Ketat. Kemudian dikuatkan dengan Penetapan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata.[101]

**Gambar 7.31.** Kompleks Gedung British American Tobacco, Co.
Sumber: Arsip Bank Indonesia Institute.

101 Surat Keputusan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata, Nomor PM.58/PW.007/MKP/2010; Sistem Registrasi Nasional Cagar Budaya, Nomor RNCB.20100622.02.000911.

**Kompleks Gedung British American Tobacco, Co.** Kompleks bangunan ini berupa rangkaian banyak bangunan industri yang saling terhubung. Di bagian belakang tampak yang tenang terdapat ruang perkantoran, ruang rapat beserta segala kelengkapannya, dan bangunan pabrik dengan instalasi mesinnya, mampu menampung 1.700 pekerja pada keadaan puncak (1930). Selain itu, ada bangunan gudang bahan dan ruangan penunjang lain.

Bangunan BAT ramah kepada pejalan kaki. Pada keempat sisi bangunan ruang pejalan kaki sama tinggi dengan lantai teras bangunan sehingga peralihan antara ruang luar (jalan) dan dalam (bangunan) tidak terasa—suatu pendekatan yang manusiawi. Reaksi atas pengaruh paham liberal-sosialis yang pada masa itu mulai masuk dalam percaturan arsitektur Indonesia.

Ketika bangunan itu dirancang biro arsitek trio Hulswit-Fermont-Cuypers, Marius Hulswit sudah meninggal dan Ed. Cuypers mulai uzur. Tampaknya faktor Ed Cuypers sangat penting untuk mendapatkan proyek besar itu karena ia pula yang merancang Kantor BAT di Amsterdam sebelumnya. Kemungkinan besar perancangan dipegang oleh Arthur Fermont dengan kelompok arsitek mudanya. Penampilan bangunan ini lebih modern meski sentuhan romantik Cuypers masih kuat ditemui pada hiasan di bidang tampak dan pemakaian lengkung sebagai unsur utamanya.

Setelah mengalami pasang-surut hampir satu abad lamanya, Pabrik BAT berpindah tangan beberapa kali dan akhirnya menghentikan kegiatan sama sekali pada 2010. Dibutuhkan perhatian semua pihak untuk melestarikan bangunan istimewa ini. Wali Kota Cirebon memasukkan bangunan ini sebagai Bangunan dengan Tingkat Perlindungan Sangat Ketat. Sistem Registrasi Nasional Cagar Budaya menerima pendaftaran pada 6 Agustus 2014 dengan catatan obyek ini baru terdaftar pada sistem dan masih dalam proses verifikasi dan kajian untuk menentukan apakah termasuk cagar budaya ataukah bukan.

**Gambar 7.32.** Stasiun Kereta Api Kejaksan
Sumber: Arsip Bank Indonesia Institute.

**Stasiun Kereta Api Kejaksan.** Arsitek besar pada awal abad ke-20, Berlage, pernah mengatakan bahwa salah satu pelopor arsitektur modern di Hindia Belanda adalah P. A. J. Moojen. Ia terdidik sebagai arsitek dan datang ke Hindia Belanda pada 1903 untuk bekerja sendiri. Ia pernah mencaci arsitektur Hindia abad ke-19 sebagai "penjiplakan *ngawur* Neo-Helenisme tanpa penjiwaan, salinan contoh yang buruk, saksi-saksi tolol abad yang terbelakang dan ketidakmampuan untuk mencipta."

Stasiun Kereta Api Kejaksan dipesan oleh perusahaan Staatsspoorwegen sebagai stasiun akhir jalur Batavia-Cirebon. Staatsspoorwegen bukan perusahaan kereta api yang pertama di Cirebon. Rangkaian keretanya dibuat khusus untuk penumpang; fasilitasnya jauh lebih baik daripada kereta api sebelumnya yang difungsikan mengangkut barang dan kebutuhan pabrik gula. Ruangan dalam stasiun ditata lebih baik. Lantai peron keberangkatan ditutup ubin bertekstur sehingga tidak licin. Di peron ini pula terdapat ruangan kios yang diisi toko, kafe dan ruang tunggu.

Stasiun Kejaksan dibangun pada 1912 setelah Moojen menyelesaikan gedung Nederlandsch-Indische Levensverzekering- en Lijfrente Mij. (1909) dan mendapat banyak pujian. Sosok tampak utama stasiun memperlihatkan pengaruh proyek sebelumnya itu dengan menonjolkan bidang tebar-layar (*gevel*) di atas bidang kaca. Hanya saja, di sini ia cenderung lebih sederhana, persegi dan sudut siku, sedangkan pola lengkung hanya digunakan untuk jendela dan pelindungnya pada pintu masuk, agar lebih berkesan ramah kepada para tamu.

Bangunan stasiun yang amat estetik ini layak menerima perlindungan dan pelestarian. Walikota Cirebon dan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata telah menetapkan Stasiun Kejaksan sebagai Bangunan Cagar Budaya.[102]

**Gereja Kristen Pasundan dan Gereja Katolik Santo Yusuf.** Kedua gereja ini dibahas bersama karena sejarahnya berkaitan erat, meski berbeda mazhab. Bukan hanya itu, pembangunan kedua gereja itu mencerminkan nilai-nilai kemasyarakatan Cirebon yang patut diteladani

**Gambar 7.33.** Gereja Kristen Pasundan Jemaat Cirebon
Sumber: Arsip Bank Indonesia Institute.

102 Sistem Registrasi Nasional Cagar Budaya, nomor registrasi RNCB.20100622.02.000798.

**Gambar 7.34.** Gereja Katolik Santo Yusuf
Sumber: Arsip Institut Bank Indonesia

sampai sekarang, mungkin lebih tepat untuk ditiru dalam jalinan antaragama masa kini.

Untuk menggantikan tempat ibadah umat Nasrani yang semula tersedia di dalam benteng yang habis terbakar pada 1835, perlu dibangun gereja yang baru. Jemaat gereja mengumpulkan dana untuk pembangunan itu. Dalam proses ini, sumbangan terbesar—di luar pengumpulan dana oleh umat Kristen sendiri— datang dari Bupati Cirebon Kyai Adipati Aria Sura Adiningrat. Bukan hanya itu, Penghulu Besar dan umatnya juga menyediakan batu dan bata bagi pembangunan kedua gereja tersebut.

Dalam tulisannya, W. R. van Hoevell yang berkhotbah pada pembukaan gereja menyatakan bahwa pembangunan gereja itu merupakan bukti kehidupan beragama di Kota Cirebon sangat selaras, semua agama hidup berdampingan dalam damai. Ia sangat bersyukur bahwa jalinan kasih sudah mendarah daging pada masyarakat Cirebon. Pada saat yang sama, setelah kebaktian pembukaan secara Kristen selesai, umat Katolik yang jumlahnya lebih kecil, melanjutkan acara dengan

mengadakan upacara misa yang dipimpin oleh Pastor J. van Dijk dari Batavia. Selanjutnya gereja ini digunakan bersama baik oleh umat Kristen Protestan maupun Katolik secara bergantian.

Gereja berukuran kecil tersebut digambar oleh kepala Waterstaat en 's-Landsgebouwen (Bagian Irigasi dan Bangunan Negara) J. Tromp. Peletakan batu pertama dilakukan pada 7 Juli 1842 oleh Residen, dihadiri hampir seluruh warga Eropa di Cirebon dan semua pembesar serta penghulu. Proses pekerjaan diawasi sekretaris Residen, W. D. Musquetier hingga bangunan berdenah segi delapan itu diresmikan penggunaannya pada 27 November.

Pada 1877, stasi baru di Cirebon diresmikan, mencakup Karesidenan Cirebon, Tegal, dan Priangan, tetapi gereja belum tersedia. Luis Theodore Gonsalves, seorang pengusaha gula besar yang menemukan tebu hitam, membeli tanah di seberang rumahnya dan mulai membangun gereja baru pada 1878. Dua tahun kemudian gereja itu siap dan diresmikan pada 10 November 1880. Beberapa bulan sesudahnya, pastoran juga rampung dibangun sehingga jemaat tidak perlu lagi menumpang di gereja lain seperti sebelumnya.

St. Jozefkerk merupakan salah satu gereja Katolik tertua di Jawa. Dari sosoknya tampak menggunakan langgam Neo-Renaisans yang memang sedang populer di Negeri Belanda. Penggunaan langgam itu membuktikan bahwa gereja tersebut tidak dibangun oleh pemerintah. Kemungkinan besar Luis Gonsalves mendapat bantuan seorang arsitek terdidik dalam perancangan gereja ini, yang sayang tidak tercatat. Kedua gereja tersebut telah dilindungi dan dilestarikan sebagai Bangunan Cagar Budaya.[103]

103 Surat Keputusan Wali Kota Cirebon Nomor 19/2001; Surat Keputusan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata, Nomor PM.58/PW.007/MKP/2010; Sistem Registrasi Nasional Cagar Budaya, Nomor RNCB.20100622.02.000775 (Gereja Kristen Pasundan Jemaat Cirebon), dan Nomor RNCB.20100622.02.000786 (Gereja Katolik Santo Yusuf).

# BAB 8
# Penutup

Dalam sejarah panjang yang membentang, Bank Indonesia—sebelumnya De Javasche Bank—kantor perwakilan Cirebon senantiasa berperan, secara langsung ataupun tidak langsung, dalam berbagai perubahan penting dalam perekonomian dan kehidupan masyarakat di wilayah tugasnya. Sebagai institusi ekonomi modern, BI hadir di Cirebon dengan pertimbangan yang sangat matang dan tepat: wilayah itu kaya akan sumber daya alam, manusia, ekonomi, juga budaya, yang menarik minat dan perhatian pelaku ekonomi nasional ataupun internasional—bahkan sejak era pramodern.

Terletak di titik persimpangan jaringan pelayaran maritim dan jalur tansportasi darat, Cirebon berkembang menjadi salah satu kota pelabuhan dan pusat perdagangan penting di Nusantara, sekaligus menjadi mata rantai jaringan perdagangan regional sejak periode modern awal. Perkembangan itu didukung oleh wilayah pedalamannya yang subur dan masyarakatnya yang relatif terbuka terhadap pengaruh dan stimulan ekonomi dari luar, termasuk kedatangan agama baru, budaya, dan dinamika politik. Itu sebabnya, sejak sebelum kedatangan kongsi dagang Belanda VOC, Cirebon telah berkembang sebagai kota kosmopolitan, *locus* perdagangan interlokal dan ekonomi uang yang menjadi kenyataan keseharian masyarakatnya. Tidak mengherankan jika para kolonialis Belanda, setelah berhasil melemahkan kekuatan politik kekeratonan dan mengukuhkan dominasi politik kolonialnya, menjadikan Cirebon sebagai salah satu wilayah eksploitasi yang dikeruk sumber dayanya secara maksimal.

Sejak awal abad ke-18, kuasa asing yang diwakili VOC memasukkan Cirebon sebagai wilayah pelaksanaan *Preangerstelsel,* yaitu sistem tanam

wajib kopi bersama dengan wilayah lain di kawasan Priangan. Sistem budidaya tanaman ekspor berbasis tenaga kerja paksa itu merupakan cikal bakal sistem eksploitasi perkebunan berskala besar dan masif di tanah jajahan, yakni Sistem Tanam Paksa, yang dikembangkan kolonialisme Belanda sejak dekade ketiga hingga akhir abad ke-19. Tak terkecuali di Cirebon, lantaran ketersediaan lahan subur dan irigasi alam yang melimpah, jumlah tenaga kerja yang besar, dan infrastruktur transportasi yang memadai, Pemerintah Kolonial Belanda leluasa menerapkan STP di Cirebon secara maksimal. Komoditas ekspor terpenting seperti kopi, tebu (gula), indigo, teh, dan kina, dibudidayakan pada hampir semua wilayah Keresidenan Cirebon. Untuk mendukung kebijakannya, pemerintah terus melakukan perbaikan dan memodernisasi infrastruktur transportasi dan perekonomian, termasuk membangun jalur kereta api, pelabuhan, jalan raya, dan irigasi.

Hingga STP berakhir, Cirebon merupakan salah satu wilayah di Pulau Jawa yang mengalami proses eksploitasi paling intensif. Hal itu menimbulkan beragam konsekuensi jangka pendek dan jangka Panjang. Secara umum, dalam jangka pendek, kebijakan itu memberikan keuntungan ekonomi yang berlipat ganda bagi Pemerintah Kolonial Belanda, tetapi berakibat buruk bagi penduduk pribumi, terutama kemunduran pertanian pangan yang mencapai puncaknya dalam bencana kelaparan dan kemunduran kesejahteraan petani pada periode awal pelaksanaan sistem tersebut. Meski demikian, dalam jangka panjang, penduduk pribumi mampu memanfaatkan berbagai kesempatan ekonomi baru yang muncul sebagai dampak tak langsung ekspansi ekonomi kapitalistik tersebut, khususnya dalam sektor non-pertanian seperti perdagangan, industri kerajinan, industri pengolahan makanan dan beragam kerja upahan. Hal itu menunjukkan sisi lain bahwa penduduk Cirebon bukanlah masyarakat pasif, melainkan aktif dan responsif terhadap berbagai kesempatan baru sekalipun berada dalam cengkeraman sistem yang eksploitatif.

Sementara itu, pendirian kantor cabang De Javasche Bank di Cirebon merupakan kebijakan ekonomi penting lain dari pemerintah kolonial di wilayah itu. Tujuan utamanya cukup jelas, yaitu untuk mendorong dan menjamin keberlanjutan sektor ekonomi kapitalistik di bidang agro-

ekonomi, khususnya perkebunan dan industri gula di wilayah Cirebon dan sekitarnya, yang kala itu dikelola para pengusaha swasta Eropa (bukan lagi pemerintah) setelah STP berakhir dan Undang-Undang Agraria (1870) diberlakukan. Pada periode awal tersebut dan berlanjut hingga awal abad ke-20, DJB tidak sepenuhnya berfungsi sebagai bank sentral melainkan sekaligus sebagai bank komersial. Implikasinya, DJB Cirebon juga beroperasi sebagai penyedia kredit bagi pengusaha swasta, khususnya yang memperoleh lisensi mengembangkan perkebunan berskala besar, terutama perkebunan dan pabrik gula yang berjumlah cukup banyak.

Sebagian besar pengusaha "kakap" di Cirebon adalah orang Belanda, Indo-Belanda, dan orang Eropa yang lain seperti Belgia dan Italia. Dalam perkembangannya terdapat sejumlah pemain baru di luar lingkaran orang Eropa/Indo yang turut "bermain" dalam ekonomi perkebunan skala besar. Tercatat sejumlah pengusaha Tionghoa dan seorang Inggris keturunan India yang muncul sebagai pengusaha perkebunan/gula. Selain itu, pada awal abad ke-20 DJB Cirebon memiliki banyak klien dari kalangan pengusaha Tionghoa yang bergerak di sektor perdagangan ekspor berskala besar dan menengah, serta industri manufaktur di luar sektor pertanian. Secara keseluruhan, para pelaku ekonomi klien DJB merupakan mesin penggerak utama perekonomian Cirebon, termasuk pendorong modernisasi kota hingga ditetapkan oleh pemerintah di Batavia sebagai sebuah kotapraja yang berstatus otonom.

Sisi kritikalnya ialah tidak ada satu pun pengusaha atau bidang usaha pribumi di Cirebon yang menjadi mitra dan memperoleh manfaat finansial-ekonomis—dalam bentuk kredit atau modal—dari DJB dan lembaga perbankan kolonial lain yang muncul kemudian. Bukan hal aneh, karena hampir semua sektor usaha yang digeluti penduduk pribumi merupakan usaha kecil bersifat tradisional dan subsisten (*non-bankable sector*) yang tidak memenuhi kriteria standar penerima kredit modern. Selain itu, pemerintah kolonial tidak memiliki kemauan politik untuk memberdayakan sektor ekonomi pribumi. Hal itu menyebabkan penduduk pribumi harus bergantung pada berbagai lembaga atau skema kredit lokal atau tradisional, seperti *cina mindring*, *bank plecit*, dan sejenisnya, yang tumbuh berkembang mengisi kekosongan yang ditinggalkan DJB dan perbankan modern lainnya.

Barulah pada awal abad ke-20, sejalan dengan penerapan Politik Etis, pemerintah kolonial mulai memberikan perhatian pada persoalan kredit dan permodalan bagi pelaku ekonomi pribumi. Selain mengenalkan lembaga dan skema perkreditan rakyat (*volkscredietwezen*) seperti bank desa, lumbung padi, koperasi, dan pegadaian, pemerintah kolonial menunjukkan upaya serius memberantas berbagai praktik rentenir dan bunga uang, khususnya di wilayah perdesaan. Namun, sejauh itu kebijakan baru tersebut tampaknya tidak efektif mendorong peningkatan produktivitas perekonomian dan kesejahteraan masyarakat pribumi. Jelang dekade ketiga abad ke-20, pemerintah kolonial bahkan menghentikan kebijakan "eksperimental" pro-rakyat tersebut karena berbagai faktor, terutama krisis ekonomi (1930) yang melemahkan pemerintah kolonial secara finansial dan politik, dan kemudian invasi tentara Jepang yang mengakhiri secara definitif eksistensi Hindia Belanda sekaligus mengawali periode perang dan transisi panjang menuju Indonesia merdeka.

Periode pendudukan militer Jepang yang singkat menjadi babak akhir eksistensi DJB agensi Cirebon. Bersama lembaga keuangan lain milik Belanda, DJB dibekukan oleh penguasa militer Jepang. Peran DJB agensi Cirebon sebagai bank sentral dan pengatur lalu lintas uang diambil alih oleh NKG dan YKS Bandung—dua lembaga perbankan terpenting yang ditugasi membantu agenda perang Jepang di Indonesia. Tugas tersebut gagal dipenuhi seiring dengan kekalahan Jepang di tangan Sekutu dalam Perang Dunia II. Eksistensi DJB agensi Cirebon, kembali dihidupkan oleh tentara Belanda NICA yang, dengan membonceng Sekutu, berhasil menduduki kembali Cirebon setelah kekalahan Jepang. Tugas utama DJB agensi Cirebon saat itu ialah mengedarkan uang NICA sebagai bagian dari kampanye politik Belanda untuk menghidupkan kembali kekuasaan kolonialnya. Namun, upaya itu menuai perlawanan dari Republik Indonesia yang, pada saat hampir bersamaan, telah mendirikan lembaga perbankan dan menerbitkan mata uang sendiri yakni Oeang Repoeblik Indonesia (ORI), sebagai bagian dari upaya menguatkan posisi dan kedaulatan negara-bangsa yang merdeka.

Setelah pengakuan kedaulatan penuh oleh Belanda (1949), Pemerintah Republik Indonesia berupaya membangun sistem perbankan

nasional. Awalnya terjadi perbedaan pendapat tentang pembentukan bank sentral antara kelompok yang menginginkan Bank Nasional Indonesia 1946 sebagai bank nasional pertama di satu pihak, dan kelompok yang menghendaki DJB dijadikan sebagai bank sentral Republik Indonesia melalui nasionalisasi. Kompromi akhirnya tercapai dengan menetapkan DJB sebagai bank sentral, antara lain berdasarkan pertimbangan bahwa DJB memiliki infrastruktur yang lebih baik dibandingkan BNI, sehingga lebih siap sebagai bank sentral. Pemerintah pun kemudian menasionalisasi DJB dan mengubahnya menjadi Bank Indonesia (1951) yang diperkuat melalui sebuah undang-undang khusus sejak awal Juli 1953. Penggantian nama dan status hukum tersebut mengubah secara drastis lembaga ini dari sebuah lembaga perbankan swasta kolonial namun berfungsi sebagai pseudo-bank sentral yang melayani kepentingan negara kolonial dan pengusaha Belanda/Eropa, menjadi lembaga perbankan nasional milik Pemerintah Indonesia yang difungsikan sebagai bank sentral nasional dan diarahkan untuk mendukung pembangunan perekonomian dan pemberdayaan masyarakat Indonesia.

Setelah diresmikan menjadi Bank Indonesia, Kantor BI Kas Cabang Cirebon langsung terlibat dalam proses rekonstruksi dan perbaikan kondisi perekonomian Cirebon dan sekitarnya yang rusak akibat peperangan. Bank Indonesia menjadi salah satu lembaga yang mengambil bagian dalam panitia rekonstruksi perekonomian kota Cirebon dan sekitarnya, termasuk menghidupkan kembali perekonomian rakyat melalui berbagai program kredit dan pendampingan. Namun, dalam pelaksanaannya, BI cabang Cirebon menghadapi berbagai kendala yang sebagian besar dipengaruhi oleh kebijakan politik ekonomi pemerintah pusat dan dinamika politik nasional yang merembet ke tingkat lokal hingga kurun 1960-an. Selain harus berurusan dengan sisa-sisa perusahaan kolonial yang masih dalam proses nasionalisasi, BI Cirebon juga harus menghadapi tantangan berat berupa lesunya perekonomian lokal karena inflasi berkepanjangan dan kemunduran aktivitas produksi dan perdagangan ekspor akibat kebijakan "revolusioner" pemerintahan Sukarno, yang diperparah oleh kompetisi politik antarpartai dan golongan yang memuncak pada gejolak politik 1965–66. Situasi tersebut menghambat upaya BI Cirebon memperbaiki kondisi perekonomian lokal dan membantu ekonomi rakyat yang

sebenarnya tengah menggeliat setelah perang berakhir dan pengenalan kebijakan populer seperti Program Benteng.

Puncak proses nasionalisasi atas DJB, dalam arti menanggalkan seluruh warisan kolonialnya, tampaknya terjadi pada masa Orde Baru. Pertama-tama, BI menanggalkan sepenuhnya karakter *profit oriented* yang sebelumnya cukup menonjol pada masa DJB, dan selebihnya berkonsentrasi penuh sebagai bank sentral yang bertugas menjaga stabilitas moneter dan tingkat inflasi. Selain itu, dengan dukungan berkah finansial dari *oil-boom*, untuk pertama kali Pemerintah Indonesia menciptakan sistem perkreditan nasional yang memberi kesempatan luas kepada masyarakat kecil, terutama di wilayah pedesaan, menjangkau perkreditan guna memenuhi kebutuhan mereka akan permodalan. Selama tiga dasawarsa (1970–90), selain memberi bimbingan teknis kewirausahaan bagi masyarakat luas, BI mengembangkan program bantuan pinjaman atau kredit yang bertujuan membantu perkembangan usaha mikro, kecil, dan menengah di perdesaan dan perkotaan. Program tersebut merupakan bukti nyata komitmen BI mendukung program pembangunan pemerintah yang berorientasi kerakyatan, dan tidak lagi hanya berpihak pada kalangan kapitalis atau pelaku ekonomi skala besar sebagaimana terjadi pada DJB di masa kolonial.

Program perkreditan BI bagi usaha mikro hingga menengah tersebut memperkuat karakteristik ekonomi lokal yang sejak dekade akhir kolonial hingga awal kemerdekaan dimotori oleh sektor-sektor ekonomi kreatif, industri manufaktur, kerajinan, pengolahan makanan dan produk laut berskala rumah tangga, serta perdagangan berskala kecil dan menengah. Sektor-sektor ekonomi tersebut, bersama-sama sektor pertanian, terus menjadi primadona ekonomi di wilayah Cirebon dan sekitarnya hingga dewasa ini, justru ketika sektor ekonomi kapitalistik warisan kolonial berskala besar makin menunjukkan penurunan bahkan kehancuran secara bertahap. Hal itu memperlihatkan kelenturan sektor ekonomi kerakyatan yang mampu bertahan meski harus menghadapi berbagai perubahan dan tantangan besar di tingkat nasional maupun global. Selain itu, keberlanjutan ekonomi kerakyatan di Cirebon juga menunjukkan karakter penduduknya yang kreatif, terbuka terhadap perubahan dan pengaruh luar yang positif, serta mampu membaca peluang ekonomi yang muncul.

Dengan demikian, di sepanjang sejarahnya yang panjang Bank Indonesia di Cirebon telah menempatkan dirinya sebagai mitra sekaligus penyokong berkembangnya kawasan ini sebagai pusat perkembangan ekonomi kreatif, industri kerajinan dan manufaktur, serta perdagangan berskala kecil dan menengah. Dengan kata lain, Bank Indonesia telah membantu membentuk kawasan Cirebon sebagai salah satu konsentrasi aktivitas ekonomi kerakyatan, bersama-sama dengan ekonomi perdagangan dan jasa.

Secara retrospektif, dari sejarah panjang perjalanan Bank Indonesia Cirebon di atas sejumlah hal penting bisa digarisbawahi sebagai bahan pelajaran dan renungan bagi Lembaga ini khususnya dan siapapun yang tertarik dengan sejarahnya, sebagai bekal untuk menjawab berbagai tantangan di masa mendatang. *Pertama-tama,* Bank Indonesia menyadari sepenuhnya bahwa sebagai simbol kedaulatan bangsa dan penjaga stabilitas ekonomi-moneter, ia telah berusaha membersihkan dirinya dari berbagai karakteristik dasar De Javasche Bank, terutama sebagai Lembaga 'kapitalistik kolonial modern' yang sepenuhnya melayani kepentingan politik-ekonomi dan agenda imperialistik penguasa asing dan kelompok-kelompok yang diuntungkan olehnya dengan mengeksploitasi rakyat kecil bumiputra. Hal ini sangat penting mengingat sejumlah literatur telah menunjukan bahwa di sejumlah negara bekas jajahan di Asia dan Afrika 'warisan kolonial' menunjukan keberlanjutan institusional, baik secara sengaja maupun tidak disengaja. Melihat kiprahnya sejak proses Indonesianisasi dan nasionalisasi, Bank Indonesia sepertinya telah berhasil memutus 'kesinambungan kolonial' semacam itu.

Selanjutnya*,* sebagai bank sentral, Bank Indonesia sejak awal periode kemerdekaan senantiasa terlibat langsung dalam proses rekonstruksi ekonomi lokal, membantu pemerintah Cirebon untuk menghidupkan dan menggairahkan kembali ekonomi lokal, baik melalui bantuan kredit maupun pendampingan terutama kepada para pelaku usaha kecil dan menengah. Meski demikian, catatan penting dari proses tersebut adalah bahwa Bank Indonesia harus menjalankan fungsinya sebagai bank sentral secara independen dan terbebas dari intervensi politik, baik dari eksekutif, legislatif maupun yudikatif. Meskipun harus bersinergi dengan kebijakan pemerintah, namun Bank Indonesia harus diberikan keleluasaan

dalam mengendalikan stabilitas moneter, melakukan pengawasan dan pembinaan bank, dan melancarkan lalu lintas pembayaran. Pengalaman di tahun 1950an dan awal 1960an menunjukan bahwa intervensi politik terhadap kinerja Bank Indonesia, baik oleh pemerintah maupun kelompok kepentingan di luar pemerintahan tidak hanya menciptakan kekacauan moneter dalam bentuk inflasi berkelanjutan, tetapi juga melemahkan kondisi perekonomian baik nasional maupun lokal.

Pada perkembangannya kemudian, meskipun tidak lagi terlibat langsung dalam penyaluran kredit, Bank Indonesia Cirebon harus tetap menjadikan ekonomi kerakyatan sebagai prioritas untuk dibantu dan diberdayakan. Melalui fungsi pengawasan dan pembinaan yang dimilikinya, Bank Indonesia mengarahkan Lembaga-lembaga perbankan nasional untuk mendukung program pemerintah setempat untuk mengembangkan potensi ekonomi lokal dan memperkuat ekonomi kerakyatan melalui berbagai macam kredit dan bantuan finansial. Selain itu, Bank Indonesia Cirebon juga menyelenggarakan berbagai program pendampingan, pelatihan, dan fasilitasi bagi pelaku UMKM, sehingga membantu mereka untuk mempertahankan eksistensinya serta memainkan peran penting sebagai tulang punggung perekonomian lokal di Cirebon dan sekitarnya.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, sudah sepantasnya komitmen atas dan 'keberpihakan' terhadap ekonomi kerakyatan, khususnya para pelaku UMKM harus dijadikan sebagai 'identitas' dan 'pusaka warisan sejarah' tidak kasat mata (*intangible heritage*) dari Bank Indonesia Cirebon. Eksistensi *intangible heritage* tersebut harus terus dipelihara keberlanjutannya seiring dengan upaya memelihara warisan kasat mata (*tangible heritage*) Bank Indonesia Cirebon – terutama Gedung dan arsitekturnya, yang dikenal karena kekhasan dan distingsinya, yang memperkaya lanskap arsitektural kota Cirebon, sebagai salah satu kota bersejarah di Indonesia. Upaya-upaya untuk mempertahankan warisan-warisan tersebut sudah sepantasnya pula dijadikan sebagai visi kelembagaan (*institutional vision*) Bank Indonesia Cirebon dalam menghadapi berbagai tantangan di masa mendatang. Dalam konteks itu, penulisan dan penerbitan buku ini merupakan upaya awal yang strategis untuk mewujudkan visi tersebut.

# DAFTAR ACUAN


**Arsip/Dokumen Arsip Nasional Republik Indonesia**

ANRI (1977), *Memori Serah Terima Jabatan 1921–1930 (Jawa Barat)*. Jakarta.

Inventarisasi Arsip Bank Indonesia 1956–1957; 1960–1964. Jakarta: Direktorat Pengelolaan Deputi Bidang Konservasi Arsip-Arsip Nasional Republik Indonesia, 2006.

*Oeang Republik Indonesia* (ORI). Jakarta: Direktorat Layanan dan Pemanfaatan, 2018.

**Arsip/Dokumen Bank Indonesia**

Arsip BNI Unit I NO. DJB 1520.

Bank Indonesia (1971), *Bank Indonesia, Report for the Financial Year 1970/1971*. Jakarta.

— (1976), *Bank Indonesia, Report for the Financial Year 1975/1976*. Jakarta.

— (1981), *Bank Indonesia, Report for the Financial Year 1980/1981*. Jakarta.

Crediet Verleening van DJB No. 1708 (1931–1941).

De Javasche Bank (1918), *The Java Bank (De Javasche Bank): A Short Description of Its Organization, Operation, and General Policy*. Batavia.

Hartono, Noek (1976), *Bank Indonesia: Sejarah Lahir dan Pertumbuhannya*, Naskah tidak diterbitkan, Jakarta: Bank Indonesia.

Laporan Pemimpin Tjabang Tjirebon pada tanggal 6-2-1961.

Laporan Pemimpin Tjabang Bandung, Tjirebon, Semarang, Jogjakarta, Solo, pada Konperensi para Pemimpin Tjabang Jang Diadakan di Kantor Pusat. Jakarta 25–30 November 1963.

Laporan Semester Kedua Mengenai Keadaan Ekonomi dari Wilajah Bank Indonesia Tjabang Tjirebon (Tahun Buku ke-XI), Oktober 1963–Maret 1964.

Museum Bank Indonesia (t.t.), *Sekilas Sejarah Kantor Bank Indonesia Cirebon*. Jakarta.

*Notulen van de Vergadering der Directie van De Javasche Bank*, 3 Agustus 1866.

Pengumuman Bersama Bank Nasional Indonesia Unit I s/d IV dan Bank Dagang Negara. Cirebon, 24 Desember 1968.

*Sekilas Sejarah Kantor Bank Indonesia Cirebon*. Dokumen tidak diterbitkan, 2003.

Surat Direksi Bank Nasional Indonesia Unit I kepada Pemimpin Tjabang BNI Unit I Tjirebon, No. 3/5/UOP/OT. Jakarta, 6 April 1967.

Surat Direksi Bank Nasional Indonesia Unit I kepada Pemimpin Tjabang BNI Unit I Tjirebon, No. 3/10/UOP/OT. Jakarta, 4 Agustus 1967.

Surat Kuasa Noerdin kepada H. A. M. Widjajakusumah. Cirebon, 28 Januari 1968.

Surat Pejabat Bank Nasional Indonesia Unit I kepada Pemimpin Tjabang Bank Negara Unit Indonesia Unit I Tjirebon No. 4/2/UOP/AP. Jakarta, 25 Djanuari 1968.

Surat Pejabat Unit I Kepada Pemimpin Tjabang Bank Negara Indonesia Unit I Tjirebon, No. 4/1/UOP/OT. Jakarta, 22 Januari 1968.

Surat Pemimpin Tjabang Bank Nasional Unit I kepada Bank Nasional Indonesia Kantor Pusat Unit I Djakarta, No.3/…/UOP/OT. Cirebon 22 Mei 1967.

Surat Pimpinan Tjabang Bank Negara Indonesia Unit I Tjirebon kepada Bank Nasional Indonesia Kantor Pusat Unit I Djakarta, No. 4/8/UAO/OT Tjirebon 27 Desember 1968.

*Verslag over het 114e t/m 118e Boek Jaar (19941–1946) en het 119e Boekjaar (1946–1947) van De Javasche Bank*. Koninklijk Octrooi in 1828, t.t.

Vertrouwelijk brieven van DJB Cheribon No. 1406 (1909–1942).

**Dokumen Lain-lain**

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Cirebon (2005), *Laporan Akhir Rencana Pengembangan Klaster Industri Delapan Kawasan Andalan Kabupaten Cirebon*. Cirebon: Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Cirebon; Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Universitas Muhammadiyah Cirebon, 2005.

Badan Pusat Statistik (1981), *Kabupaten Cirebon Dalam Angka Tahun 1981*. Cirebon.

— (2006), *Kabupaten Cirebon dalam Angka Tahun 2005*. Cirebon.

*Buku Peringatan 50 Tahun Kota Besar Tjirebon 1906–1956* (t.t.; t.p.).

Kantor Statistik Kotamadya Cirebon (1985), *Kotamadya Cirebon Dalam Angka 1984–1985.* Cirebon.

Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat (1992), *Laporan Hasil Pembangunan Desa Dalam Data dan Angka di Propinsi Jawa Barat Tahun 1992/1993*. Bandung: Direktorat Pembangunan Desa, Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat, 1992.

*Volkstelling 1930,* Deel I, Stuk X. Batavia: Departement van Economische Zaken, 1931.

**Disertasi/Tesis/Skripsi/Makalah/Karya tidak Diterbitkan**

Awal. Han (2011), "Pengantar Panduan Konservasi Bangunan Bersejarah Masa Kolonial." Jakarta: Pusat Dokumentasi Arsitektur.

Farihah, Noviatin (1999), "Pasang Surut Industri Batik di Cirebon 1930–1970," skripsi Sarjana. Yogyakarta: Fakultas Sastra Universitas Gadjah Mada.

Fauzi, Ahmad (2012), "Perjuangan Petani Kaplongan terhadap Penjajah Jepang April 1944," skripsi Sarjana. Cirebon: Institut Agama Islam Negeri Syekh Nurjati.

Fernando, M. Radin (1982), "Peasant and Plantation Economy: The Social Impact of the European Plantation Economy in Cirebon Residency from the Cultivation System to the End of First Decade of the Twentieth Century," disertasi Ph.D. Monash: Monash University.

Harkatiningsih, M. Tn. Namiek (1982), "Catatan Singkat tentang Masyarakat dan Kota Banten Lama Abad ke-18/19," makalah Seminar Sejarah Nasional III. Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia.

Herwindo, Rahadhian Prajudi dan Sutrisno Murtiyoso (2019), "Virtual Reconstruction Dalem Agung Pakungwati Keraton Kasepuhan," Laporan Penelitan. Bandung: Balai Arkeologi Provinsi Jawa Barat.

Inomata, Aiko Kurasawa (1987), "Mobilization and Control: A Study of Social Change in Rural Java 1942–1945," disertasi Ph.D. Ithaca, N.Y.: Cornell University.

Masduqi, Zaenal (2010), "Pemerintahan Kota Cirebon 1906–1942," tesis Magister. Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada Yogyakarta.

Molsbergen, E. C. G. (1931), "Uit Cheribon's geschiedenis," dalam *Gedenkboek der Gemeente Cheribon 1906–1931*. Cirebon: De Staadsgemeente Cheribon.

Muhsin Z, Mumuh (2009), "Cirebon Masa Pendudukan Jepang (1942–1945)," makalah Seminar Rencana Penyusunan Buku Sejarah Cirebon (12 Agustus 2009). Cirebon: Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jawa Barat.

van Nispen, Contant (2016), "Eduard Cuypers en zijn betekenis als ziekenhuisarchitect," tesis Master. Leiden: Universitet Leiden.

Padmo, Soegijanto (1989), "Beberapa Catatan Awal tentang Sejarah Kabupaten Cirebon: 1900–1968," makalah Lokakarya Evaluasi Penelitian Peluang Usaha Kerja Luar Pertanian di Jawa Barat (30–31 Agustus 1989). Bogor: Institut Pertanian Bogor; Institut Teknologi Bandung; Institute of Social Sciences (Den Haag).

Purwanto, Bambang (1991), "Krisis di Awal Kebangkitan: Pengguntingan Uang pada Masa RIS 1950," makalah Seminar Sejarah Nasional IV. Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia.

Rahayu, Sri Kusumastuti, dkk. (2002), "Kegiatan Ekonomi Penduduk Desa di Luar Pertanian: Sebuah Cerita dari Satu Desa di Cirebon," Laporan Kerja. Jakarta: Lembaga Penelitian Smeru.

Roosmalen, P. K. M. (2009), "No More Greek Tempels: The Strive of Architects in Indonesia for Good Architecture," naskah tidak diterbitkan.

Sartono, Hudi, dkk. (2000), "Kredit Perdesaan di Kabupaten Cirebon Jawa Barat," Laporan Kerja. Jakarta: Lembaga Penelitian Smeru.

Siddique, Sharon (1977), "Relics of the Past? A Sociological Study of the Sultanates of Cirebon West Java," disertasi Ph.D. Bielefeld: Universität Bielefeld.

Sulistiyono, Singgih Tri (1994), "Perkembangan Pelabuhan Cirebon dan Pengaruhnya terhadap Kehidupan Sosial-Ekonomi Masyarakat Kota Cirebon 1850–1930," tesis Magister. Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada.

Tim Peneliti Smeru (2002), "Kegiatan Ekonomi Penduduk Desa di Luar Pertanian: Sebuah Cerita dari Satu Desa di Kabupaten Cirebon," Laporan Penelitian Smeru-Ausaid-Ford Foundation.

Wiseman, Roger (2001), "Three Crises: Management in the Colonial Java Sugar Industry, 1880s–1930s," disertasi Ph.D. Adelaide: University of Adelaide.

**Artikel**

Alexander, Jennifer dan Paul Alexander (1991), "Protecting Peasant from Capitalism: The Subordination of Javanese Traders by the Colonial State," *Comparative Studies in Society and History*, Vol. 33 (2).

Bennet, Michael S. (1995), "Banking Deregulation In Indonesia," *University of Pennsylvania Journal of International Law*, Vol. 16 (3).

Bijlard, H. J. A. (1928), "Bij de reproducties van werken van wijlen Eduard Cuypers: Architect te Amsterdam I," *Het Nederlandsch en Ned.-Indische huis oud en nieuw*, Tahun ke-17 (5–21).

Bosma, Ulbe. "The Cultivation System (1830–1870) and Its Private Entrepreneurs on Colonial Java," *Journal of Southeast Asian Studies*, 38 (2).

Brakel, L. F. dan Massarik Herta (1982), "A Note on the Panjunan Mosque in Cirebon," *Archipel*, Vol. 23 (119–34).

Bruce, R. Bolnick dan Eric R. Nelson (1999), "Evaluating Economic Impact of a Special Credit Program: KIK/KMKP in Indonesia," *The Journal of Development Studies*, Vol. 26 (2).

Eijkelboom, Gert (2015), "Een werkelijk monumentale gevel," *Bulletin KNOB*, No. 2 (104–6).

Fernando, M. Radin (2010), "Famine in a Land of Plenty: Plight of a Rice-growing Community in Java 1883–84," *Journal of Southeast Asian Studies*, 41 (2).

— (2010), "The Worst of Both Worlds: Commercial Rice Production in West Indramayu," *Journal of Southeast Asian Studies*, 41 (3).

Iryana, Wahyu (2017), "Perjuangan Rakyat Cirebon–Indramayu Melawan Imperialisme," *Jurnal al-Tsawafa*, Vol. 14 (02), Januari.

van der Kemp, P. H. (1920), "De Cheribonsche onlusten van 1818 naar oorsprongkelijke stukken," *Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde*, 76, (1).

Nas, Peter dan Pratiwo (2002), "Java and the Grote Postweg, La Grande Route, The Great Mail Road, Jalan Raya Pos," *Bijdragen tot de Taal-, Land-, en Volkenkunde* (Special Issue on the Social Impact of New Roads in Southeast Asia), 158 (4).

Schrikker, Alicia, "Restoration in Java 1815–1830: A Review," *BMGN-Low Countries Historical Review*, 130 (4).

Snuyf, S. (1908), "Over bouwkunde en bouwkunst in Indië," *Indisch Bouwkundig Tijdschrift*, Agustus (130–1).

Vissering, G. (1928a), "Eduard Cuypers," *Het Nederlandsch en Ned.-Indisch Huis Oud en Nieuw*, Tahun ke-17 (1–4).

Wahid, Abdul (2012), "Revenue Farming and Imperial Transition: An Economic Dimension of Early Colonial State Formation in Java ca. 1800s–1820s," *Humaniora*, Vol. 24, (3), Oktober.

Wardoyo, Stedi (2013), "Jawa dalam Pandangan Imigran Jepang di Hindia Belanda pada Awal Abad Ke-20," *Izumi: Jurnal Bahasa, Sastra, dan Budaya Jepang*, Vol. 1 (1).

White, Nicholas J. (2012), "Surviving Sukarno: British Business in Post-Colonial Indonesia, 1950–1967," *Modern Asia Studies*, 46, (5).

Wilsen, F. C. (1855), "Oudheden in Cheribon," *Tijdschrift voor Indische taal-, land-, en volkenkunde*, Jilid 4 (146–66).

**Buku/Bagian Buku**

Abdurachman, Paramita R. (ed.) (1982), *Cerbon*. Jakarta: Yayasan Mitra Budaya Indonesia; Penerbit Sinar Harapan.

Akihary, Huib (1990), *Architectuur & stedebouw in Indonesië 1870/1970*. Zutphen: De Walburg Press.

Ambary, Hasan Muarif (1982), "Peninggalan-peninggalan Kuno," dalam Paramita Abdurachman (ed.), *Cerbon*. Jakarta: Yayasan Mitra Budaya Indonesia; Penerbit Sinar Harapan.

— (1997), "Peranan Cirebon sebagai Pusat Perkembangan dan Penyebaran Islam," dalam Susanto Zuhdi (peny.), *Cirebon sebagai Bandar Jalur Sutra: Kumpulan Makalah Diskusi Ilmiah*. Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia.

Andrieu, Sarah Anaïs (2017), *Raga Kayu, Jiwa Manusia*; terj. Paris: Ecole fra**ç**aise d'Extrême-Orient; Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia; Forum Jakarta–Paris.

Anonim (t.t.), "Simpang-Siur Revolusi," dalam *Buku Peringatan 50 Tahun Kota Besar Tjirebon 1906–1956*. Cirebon: t.p.

Arovah, Eva Nur (2019), *Pesantren dan Pasar di Pedesaan Cirebon: Agama dan Ekonomi di Tegalgubug pada Abad XX*. Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia.

Aruman (t.t.), "Perkembangan Perekonomian," dalam *Buku Peringatan 50 Tahun Kota Besar Tjirebon 1906–1956*. Cirebon: t.p.

van Baardewijk, Frans (1993), *Changing Economy in Indonesia*, *Volume 14: The Cultivation System in Java 1834–1880*. Amsterdam: Royal Tropical Institute.

Bagelaar, J. J. (1931), "De haven van Cheribon," *Gedenkboek der Gemeente Cheribon 1906–1931*. Bandung/Cirebon: N.V. AC Nix & Co.

Bastin, John (1954), *Raffles' Ideas on the Land Rent System in Java and the Mackenzie Land Tenure Comission*. 's-Gravenhage: Martinus Nijhoff.

Basyri, Hasan (1989), *Sekitar Komplek Makam Sunan Gunung Jati dan Sekilas Riwayatnya*. Cirebon: Penerbit Zulfana.

Boeke, J. H. (1953), *Economics and Economic Policy of Dual Societies as Exemplified by Indonesia*. New York: Institute of Pacific Relations.

Boomgaard, Peter (1989), *Children of the Colonial State: Population Growth and Economic Development in Java 1795–1880*. Amsterdam: Free University Press.

Boomgaard, Peter dan Jan Luiten van Zanden (1990), *Changing Economy Indonesia, Volume 10: Food Crops and Arable Lands Java 1815–1942*. Amsterdam: Royal Tropical Institute.

Boomgaard, Peter dan A. J. Gooszen (1991), *Changing Economy Indonesia, Volume 11: Population Trends 1795–1942,* Amsterdam: Royal Tropical Institute, 1991.

Bosma, Ulbe dan Remco Raben (2008), *Being 'Dutch' in The Indies: A History of Creolisation and Empire 1500–1920*. Singapore: National University of Singapore Press; Athens: Ohio University Press.

Boxer, C. R. (1983), *Jan Kompenni: Dalam Perang dan Damai 1602–1799*; terj. Bakri Siregar. Jakarta: Penerbit Sinar Harapan.

de Bree, L., (1928), *Gedenkboek van De Javasche Bank 1828–1928*, Deel I. Weltevreden: Kolff.

Breman, Jan (1983), *Control of Land and Labour in Colonial Java*. Leiden: KITLV.

— (1986), *Penguasaan Tanah dan Tenaga Kerja Jawa di Masa Kolonial*; terj. Jakarta: LP3ES.

— (2014), *Keuntungan Kolonial dari Kerja Paksa: Sistem Priangan dari Tanam Paksa Kopi di Jawa 1720–1870*; terj. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.

Breman, Jan dan Gunawan Wiradi (2004), *Masa Cerah dan Masa Suram di Pedesaan Jawa: Studi Kasus Dinamika Sosio-Ekonomi di Dua Desa Menjelang Akhir Abad ke-20*. Jakarta: LP3ES dan KITLV.

van der Broek, J. A. (1891) "De Cheribonsche Opstand van 1806," *De Tijdspiegel*, Derde Deel, 's-Gravenhage.

Buddingh, S. A. (1867), *Neërlands Oost-Indië reizen*, 3 jilid. Amsterdam: Wed. J. C. van Keestern & Zoon.

Butcher, John dan Howard Dick (ed.) (1993), *The Rise and Fall of Revenue Farming: Business Elites and the Emergence of the Modern State in Southeast Asia*. New York: St. Martin's Press, Inc.

Cohen, Matthew Isaac (2002), "Multiculturalism and Performance in Cirebon," dalam Peter J. M. Naas (ed.), *The Indonesian Town Revisited*. LIT Verlag.

Cortesão, Armando (1944, 1990), *The 'Suma Oriental of Tomé Pires: An Account of the East from the Red Sea to China*, 2 jilid. London: Hakluyt Society.

— (2018), *Suma Oriental Karya Tome Pires: Perjalanan dari Laut Merah ke Cina & Buku Fransisco Rodrigues*; terj. Adrian Perkasa dan Anggita Pramesti, Yogyakarta: Penerbit Ombak.

Claver, Alexander (2014), *Dutch Commerce and Chinese Merchant: Colonial Relationship in Trade and Finance 1800–1942*. Leiden/Boston: KITLV/Brill.

Cragoe, Carol Davidson (2008), *How to Read Buildings: A Crash Course of Architecture*. Oxford: Oxford University Press.

Creutzberg, Peter dan J. T. M. van Laanen (1987), *Sejarah Statistik Ekonomi Indonesia*; terj. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1987.

Cribb, Robert dan Audrey Kahin (2004), *Historical Dictionary of Indonesia*, Edisi II. Oxford: The Scarecrow Press Inc.

Curl, James Stevens (2003), *Oxford Dictionary of Architecture*. Oxford: Oxford University Press.

Dahlan (t.t.), "Tjirebon dari Gelap menudju Terang," dalam *Buku Peringatan 50 Tahun Kota Besar Tjirebon, 1906-1956*. Cirebon: t.p.

Darsono, dkk., (2016), *Perjuangan Mendirikan Bank Sentral Republik Indonesia*. Jakarta: Rajagrafindo, 2016.

Dasuki, H. A. (penerj.) (1978), *Purwaka Caruban Nagari*. Indramayu: Pustaka Nasional Sudiam.

Day, Clive (1904), *The Policy and Administration of the Dutch in Java,* London: The Mac Millan Company.

Dick, Howard, dkk. (ed.) (2002), *The Emergence of A National Economy: An Economic History of Indonesia 1800–2000*. Crow Nest, NSW: Allen & Unwin; University of Hawaii Press.

Djadjadiningrat, P. A. Hoesein (1973), "Beberapa Catatan mengenai 'Kerajaan Jawa Cerbon pada Abad-abad Pertama Berdirinja'," dalam Koentjaraningrat (peny.) *Masa Awal Kerajaan Cirebon*. Jakarta.

Djiwandono, J. Soedradjad, dkk. (2005), *Sejarah Bank Indonesia I: 1945–1959*. Jakarta: Bank Indonesia, Unit Khusus Museum Bank Indonesia.

— (2006), *Sejarah Bank Indonesia III: 1966–1983. Bank Indonesia pada Masa Stabilisasi, Rehabilitasi, dan Pembangunan Ekonomi*. Jakarta: Bank Indonesia, Unit Khusus Museum Bank Indonesia.

Drake, P. J. (1969), *Financial Development in Malaya & Singapore*. Canberra: Australian National University Press.

Ekadjati, Edi S. (1995), *Kebudayaan Sunda: Suatu Pendekatan Sejarah*. Jakarta: PT Dunia Pustaka Jaya.

Elson, Robert E. (1988), "Kemiskinan dan Kemakmuran Kaum Petani pada Masa Sistem Tanam Paksa," dalam Anne Booth, William J. O'Malley, Anna Weidemann (peny.), *Sejarah Ekonomi Indonesia*; terj. Jakarta: LP3ES.

— (1994), *Village Java under the Cultivation System 1830–1870*, Sydney: Allen & Unwin.

ENI (1896), *Encyclopaedie van Nederlandsch-Indië*, Eerste Deel, Cet. II. 's-Gravenhage: Martinus Nijhoff; Leiden: E. J. Brill.

— (1918), *Encyclopaedie van Nederlandsch-Indië*, Vol. 1. 's-Gravenhage: Martinus Nijhoff.

Enoeh, R. H. (t.t.), "Kata-Sambutan R. H. Enuh Kepala Daerah Kota-Besar Bandung: Bekas Penduduk K.B. Tjirebon Terkemuka," dalam *Buku Peringatan 50 Tahun Kota Besar Tjirebon, 1906–1956*. Cirebon: t.p.

Ezerman, J. L. J. F. (1922), *Perihal Kelenting Koan Iem Tiao Kak Sie di Tjirebon* (terj. S. M. Latif). Batavia: Bataviaasch Genootschap voor Kunsten en Wetenschappen.

Fajrie Alatas, Ismail (2010), "Menjadi Arab: Komunitas Hadrami, Ilmu Pengetahuan Kolonial & Etnisitas, dalam pengantar L. W. C. van den Berg, *Orang Arab di Nusantara*. Jakarta: Komunitas Bambu.

Fakih, Farabi, dkk. (2020), *Bersinergi dalam Keistimewaan: Peran Bank Indonesia dalam Pembangunan Ekonomi Yogyakarta*. Jakarta: Bank Indonesia Institute.

Fasseur, Cees (1992). *The Politics of Colonial Exploitation: Java, the Dutch, and the Cultivation System*. Ithaca, N.Y.: Cornell University Press.

Fatimah, Siti (2010), "Fujinkai Women Associations," dalam Peter Post, dkk. (ed.), *The Encyclopedia of Indonesia in the Pacific War: Handbook of Oriental Studies*, III, Vol. 19, Leiden/Boston: Brill.

Fernando, M. Radin (1998), "Pertumbuhan Kegiatan Ekonomi Non-pertanian Pribumi," dalam J. Thomas Lindblad (ed.), *Sejarah Ekonomi Modern Indonesia: Berbagai Tantangan Baru*; terj. Jakarta: LP3ES.

Fernando, M. Radin dan William J. O'Malley (1988), "Petani dan Pembudidayaan Kopi di Karesidenan Cirebon, 1800–1900", dalam Anne Booth, William J. O'Malley, Anna Weidemann (peny.), *Sejarah Ekonomi Indonesia*; terj. Jakarta: LP3ES, 1988.

Furnivall, John Sydenham (1976), *Netherlands India: A Study of Plural Economy.* Cambridge: Cambridge University Press.

Gedenkboek (1931), *Gedenkboek der Gemeente Cheribon 1906–1931*. Bandung/Cirebon: NV AG Nix & Co.

de Graaf, H. J. dan Th. G. Th. Pigeaud (1985a), *Kerajaan-Kerajaan Islam di Jawa: Peralihan dari Majapahit ke Mataram*; terj. Jakarta: Grafiti Pers.

— (1985b), *Awal Kebangkitan Mataram: Masa Pemerintahan Senapati*; Jakarta: Grafiti Pers.

— (1987a), *Runtuhnya Istana Mataram*; terj. Jakarta: Grafiti Pers.

— (1987b), *Disintegrasi Mataram di Bawah Mangkurat I*; terj. Jakarta: Grafiti Pers.

Guritno, Sri dan Binsar Manulang (1999), *Budaya Masyarakat di Lingkungan Kawasan Industri Rotan Desa Tegalwangi Kabupaten Cirebon Propinsi Jawa Barat*. Jakarta: Direktorat Sejarah dan Nilai Tradisional, Direktoral Jenderal Kebudayaan, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia.

Hadi, Kuncoro, dkk. (2017), *Kronik '65: Catatan Hari per Hari Peristiwa G30S Sebelum hingga Setelahnya (1963–1971)*. Yogyakarta: Media Pressindo.

Hanusz, Mark (2000), *Kretek: The Culture and Heritage of Indonesia's Clove Cigarettes,* Jakarta: Equinox Publishing/Asia.

Harris, Cyril M. (2006), *Dictionary of Architecture and Constructuion*, Edisi IV. New York: McGraw-Hill.

Hayashi, Yoko dan Yasuki Hikita (2010), "Japanese Busines in War-Time Indonesia," dalam Peter Post, dkk. (ed.), *The Encyclopedia of Indonesia in the Pacific War: Handbook of Oriental Studies*, III, Vol. 19. Leiden/Boston: Brill.

Hoadley, Mason C. (1994), *Toward A Feudal Mode of Production: West Java 1680–1800.* Singapura: ISEAS dan NIAS.

van Hoorn, Nico (2010), "Monetary Issues," dalam Peter Post, dkk. (ed.) *The Encyclopedia of Indonesia in the Pacific War: Handbook of Oriental Studies*, III, Vol. 19. Leiden/ Boston: Brill.

Houben, Vincent J. H. (2002), "Java in the 19th Century: Consolidation of a Territorial State," dalam Howard Dick, dkk., *The Emergence of a National Economy: An Economic History of Indonesia. 1800–2000*. Leiden: ASAA; KITLV Press.

Hugenholtz, W. R. (1994), "The Landrent Question and Its Solution 1850–1920," dalam Robert Cribb (ed.), *The Late Colonial State in Indonesia: Political and Economic Foundation of the Netherlands Indies 1880–1942*. Leiden: KITLV.

Irianto, H. R. B. dan T. Sutarahardja (2013), *Sejarah Cirebon: Naskah Keraton Kacirebonan, Alih Aksara dan Bahasa Teks KCR 04*. Yogyakarta: Deepublih.

Jacobs, Els M. (2006), *Merchant in Asia: The Trade of the Dutch East India Company during the Eighteenth Century*. Leiden: CNWS Publication 146.

Joe, Liem Thian, *Riwayat Semarang*, Edisi 2, Jakarta: Hasta Wahana.

Johan, Irma M. (1997), "Penelitian Sejarah Kebudayaan Cirebon dan Sekitarnya antara Abad XV–XIX: Tinjauan Bibliografi," dalam Susanto Zuhdi (peny.), *Cirebon sebagai Bandar Jalur Sutra: Kumpulan Makalah Diskusi Ilmiah*. Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia.

Joustra F. dan J. Mooij (2003), "Archive Survey: The Records of De Nederlandsche Bank," dalam *Research Memorandum WO No. 724*. Amsterdam: De Nederlandsche Bank NV.

Kasenda, Peter (2015), *Sarwo Edhie dan Tragedi 1965*. Jakarta: Penerbit Buku Kompas.

Kartodirdjo, Sartono, Marwati Djoened Poesponegoro, Nugroho Notosusanto (ed.) (1976), *Sejarah Nasional Indonesia*, Jilid VI. Jakarta: Balai Pustaka; Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia.

Kartodirdjo, Sartono (1988), *Pengantar Sejarah Indonesia Baru: 1500–1900, Dari Emporium sampai Imperium*. Jilid 1. Jakarta: Gramedia.

Keppy, Peter (2010), "Japanese Control of Enemy Property," dalam Peter Post, dkk. (ed.), *The Encyclopedia of Indonesia in the Pacific War: Handbook of Oriental Studies*, III, Vol. 19. Leiden/Boston: Brill.

Kern, R. A. (1973), "Kerajaan Jawa Cerbon pada Abad-abad Pertama Berdirinya," dalam Koentjaraningrat (peny.) *Masa Awal Kerajaan Cirebon*. Jakarta: Bhratara.

Knaap, Gerrit J. dan Peter Boomgaard (1989), *Changing Economy in Indonesia, A Selection of Statistical Sources Material from the Early 19th up to 1940, Vol. 9: Transport, 1819–1940,* Amsterdam: Royal Tropical Institute.

Knight, Roger (1996), "Did 'Dependency' Really Get it Wrong? The Indonesian Sugar Industry 1880–1942," dalam J. Th. Lindblad (ed.), *Historical Foundation of a National Economy in Indonesia 1890s–1990s,* Amsterdam: North-Holland.

Koch, D. M. G. (1951), *Menuju Kemerdekaan: Sedjarah Pergerakan Kebangsaan Indonesia sampai 1942*. Jakarta: Jajasan Pembangunan.

Kusnandar, Dadang (2002), *Cirebon: Silang Peradaban*. Yogyakarta: Yogyakarta Publishing.com.

Kusuma, Erwien (2014), *Dari De Javasche Bank Menjadi Bank Indonesia: Fragmen Sejarah Bank Sentral di Indonesia*. Jakarta: Gramedia.

van Laanen, J. T. M. (1980), *Changing Economy Indonesia, Volume 6, Money and Banking 1816–1940*. Amsterdam: Royal Tropical Institute.

Laksana, Aditya Dwi, dkk. (2016), *Susur Jejak Kereta Api Cirebonan*. Pusat Data, Informasi dan Kepustakaan Anak Bangsa.

Lapian, A. B. (2008), *Pelayaran dan Perniagaan Nusantara Abad ke-16 dan 17*. Jakarta: Komunitas Bambu.

Lapian A. B. dan Edi Sedyawati (1997), "Kajian Cirebon dan Kajian Jalur Sutra," dalam Susanto Zuhdi (peny.), *Cirebon sebagai Bandar Jalur Sutra: Kumpulan Makalah Diskusi Ilmiah*. Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia.

Lembaga Basa & Sastra Sunda (1985), *Kamus Umum Basa Sunda*. Bandung: Lembaga Basa & Sastra Sunda.

Lemmens R. M. H. J. dkk (1997), "Pendahuluan," dalam R. M. H. J. Lemmens dan N. Wulijarni-Soetjipto (ed.), *Tumbuh-tumbuhan Penghasil Pewarna dan Tanin*. Jakarta: Prosea dan Balai Pustaka.

Lombard, Denys (2019), *Gardens in Java* (terj. John Miksic). Paris: EFEO; Jakarta: Komunitas Bambu.

Lubis, Firman (2008), *Jakarta 1960-an: Kenangan Semasa Mahasiswa*. Jakarta: Penerbit Masup Jakarta.

Luthfi, Ahmad Nasih (2011), *Melacak Sejarah Pemikiran Agraria: Sumbangan Pemikiran Mazhab Bogor*. Yogyakarta: STPN Press dan Pustaka Ifada.

Mansvelt, W. M. F. (1924/26), *Geschiedenis van de Nedelandsch Handels-Maatschappij (1824–1924)*, Deel I. Haarlem: XV.

Molsbergen, E. C. Godée (1931), "Uit Cheribon's geschiedenis," *Gedenkboek der Gemeente Cheribon 1906–1931*. Bandung/Cirebon: NV AG Nix & Co.

Murtiyoso, Sutrisno (1996), "The Kratons of Cirebon: A Description of the Oldest Palaces in Java," dalam National Committee, *Monuments and Sites Indonesia*. Bandung: ICOMOS Indonesia.

Musthofa, J. (t.t.), "Kota Besar Tjirebon Dilihat dari Sudut Perdagangan," dalam *Buku Peringatan 50 Tahun Kota Besar Tjirebon 1906–1956*. Cirebon: t.p.

Nas, Peter J. M. (ed.) (2009), *Masa Lalu dalam Masa Kini: Arsitektur di Indonesia* (terj.). Leiden: NAI/KITLV; Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

Nierstrasz, Chris (2012), *In the Shadow of the Company: the Dutch East India Company and Its Servants in the Period of Its Decline* (1740–1796). Leiden: Brill.

van Niel, Robert (1992), *Java Under the Cultivation System: Collected Writing* Leiden: KITLV Press.

— (2005), *Java's Northeast Coast 1740–1840: A Study in Colonial Encroachment and Dominance*. Leiden: CNWS Publication.

Norbruis, Obbe (2018), *Alweer een sieraad vor de stad: Het werk van Ed Cuypers en Hulswit-Fermont in Nederlands-Indië 1897 1927*. Volendam: LM Publishers.

Nur, Adin Imaduddin (ed.) (2006), *Potensi Wisata Budaya Kota Cirebon*. Cirebon: Neo Technology; Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kota Cirebon.

Onghokham (1987), *Runtuhnya Hindia Belanda,* Jakarta: Penerbit PT Gramedia.

Oostindie, Geert (2016), *Serdadu Belanda di Indonesia 1945–1950: Kesaksian Perang pada Sisi Sejarah yang Salah*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia; Leiden: KITLV.

Padmo, Soegijanto (1991), "The Development of Non-farm Employment Opportunity in the Residency of Cirebon 1830–1930," dalam J. Thomas Lindblad (ed.), *New Challenges in the Modern Economic History of Indonesia*. Leiden: Programme of Indonesian Studies, Leiden University.

— (2000), "Perkembangan Kesempatan Kerja Non-pertanian di Karesidenan Cirebon, 1830–1930," dalam J. Thomas Lindblad (ed.), *Sejarah Ekonomi Modern Indonesia: Berbagai Tantangan Baru*; terj. Jakarta: LP3ES.

Passchier, Cor (2016), *Building in Indonesia 1600 1960*. Volendam: LM Publishers.

Pigeaud, Th. (1938), *Javaans-Nederlands Handwoordenboek*. Batavia.

Poerwadarminta, W. J. S. (1939), *Baoesastra Djawa*. Batavia.

Poesponegoro, Marwati Djoened dan Nugroho Notosusanto (ed.) (1984), *Sejarah Nasional Indonesia*, Jilid II. Jakarta: Balai Pustaka.

— (2008), *Sejarah Nasional Indonesia*, Jilid V. Jakarta: Balai Pustaka.

— (2010), *Sejarah Nasional Indonesia*, Jilid III (pemutakhiran). Jakarta: Balai Pustaka.

Poesponegoro (t.t.), *Buku Peringatan 50 Tahun Kota Besar Tjirebon 1906–1956*. Cirebon: t.p.

Post, Peter dan Thio, May Ling (2019), *The Kwee Family of Ciledug: Family, Status, and Modernity in Colonial Java. Visualising the Private Life of the Peranakan Chinese Sugar Elite*. Volendam: LM Publisher.

Post, Peter (2010), "Policy Society," dalam Peter Post, dkk. (ed.), *The Encyclopedia of Indonesia in the Pacific War: Handbook of Oriental Studies*, III, Vol. 19. Leiden/Boston: Brill.

Prince, G. H. A. (1996), "Monetary Policy in Colonial Indonesia and the Position of the Javasche Bank," dalam J. Thomas Lindblad (ed.), *Historical Foundation of a National Economy in Indonesia, 1890s–1990s*. Amsterdam: Royal Netherlands Academy of Arts and Science.

Priyono, A. E. (1991), "Periferalisasi, Oposisi, dan Integrasi Islam di Indonesia: Menyimak Pemikrian Dr. Kuntowijoyo," Kata Pengantar dalam Kuntowijoyo, *Paradigma Islam Interpretasi untuk Aksi*. Bandung: Penerbit Mizan.

Radjab, Suryadi (2013), *Dampak Pengendalian Tembakau terhadap Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya*. Serikat Kerakyatan Indonesia dan Center for Law and Order Study.

Raffles, Thomas Stanford (1965), *The History of Java*, Vol. 2 Oxford/Kuala Lumpur: Oxford University Press.

Rahardjo, Dawam (1995), *Bank Indonesia dalam Kilasan Sejarah Bangsa.* Jakarta: LP3ES.

Ricklefs, M. C. (2001), *A History of Modern Indonesia Since c. 1200*. Basingstoke, Hamsphire: Palgrave, 2001.

Robson, Marugerite S. (2002), *The Microfinance Revolution, Sustainable Finance for the Poor: Lesson from Indonesia.* Washington DC: The World Bank.

Roorda van Eysinga, P. P. (1842), *Handboek der Land- en Volkenkunde, Geschied-, Taal-, Aardijks- en Staatkunde van Nederlandsch-Indië*, 4 jilid. Amsterdam: L. van Bakkenes.

Rush, James (1990), *Opium to Java: Revenue Farming and Chinese Enterprise in Colonial Java, 1860-1910*. Ithaca, N.Y.: Cornell University Press.

Sadoko, Isono. dkk. (1995), *Pengembangan Usaha Kecil: Pemihakan Setengah Hati*. Bandung: Penerbit Yayasan Akatiga.

Santosa, R. Hardjo (2000). *De Javasche Bank pada Masa Peperangan (Perang Dunia II di Asia Pasifik (1941–1945),* Jakarta: t.p.

Satjadibrata, R. (1954), *Kamus Basa Sunda*. Jakarta: t.p.

Saubari, Muhammad (1986), "Perjuangan Uang Republik Indonesia," dalam Ajip Rosidi (ed.) *75 Tahun Sjafruddin Prawiranegara dalam Pandangan Tokoh-tokoh*. Jakarta: Panitia Buku 75 Tahun Sjafruddin Prawiranegara.

*Sekilas Sejarah Pemerintahan Kota Cirebon 1906–2008* (t.t.). Cirebon: Badan Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Kota Cirebon.

Sewaka, M. (t.t.), "Sambutan M Sewaka," dalam *Buku Peringatan 50 Tahun Kota Besar Tjirebon 1906–1956*. Cirebon: t.p.

Sjamsudin, Helius dkk. (1992), *Menuju Negara Kesatuan: Negara Pasundan*. Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia.

Soekmono (1992), "50 Tahun Lembaga Purbakala dan Peninggalan Nasional 1913–1963," dalam *50 Tahun Lembaga Purbakala dan Peninggalan Nasional 1913–1963*. Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia.

Soemioto, R. (2007), *Buku Tjoretan dan Tjatatan serta Sorotan Kabupaten Tjirebon*. Cirebon: Kantor Kearsipan dan Dokumen Kabupaten Cirebon.

Soesilo (t.t.), "Perdjoeangan Masa Pendudukan," dalam *Buku Peringatan 50 Tahun Kota Besar Tjirebon 1906–1956*. Cirebon: t.p.

Stapel, F. W. (1940), *Geschiedenis van Nederlandsch Indië*, Deel V. Amsterdam: N.V. Uitgeverij.

Sudibjo, Z. H. dan T. D. Sudjana (penerj.) (1980), *Carub Kandha Carang Seket*. Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia.

Sudjana, T. D. (1997), "Pelabuhan Cirebon Dahulu dan Sekarang," dalam Susanto Zuhdi (peny.) *Cirebon Sebagai Bandar Jalur Sutra: Kumpulan Makalah Diskusi Ilmiah*. Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia.

Sulendraningrat, P. S. (1987), *Sejarah Cirebon*. Jakarta: PT Balai Pustaka.

Sulistiyono, Singgih Tri (1997), "Dari Lemah Wungkuk hingga Cheribon: Pasang Surut Perkembangan Kota Cirebon Sampai Awal Abad XX," dalam Susanto Zuhdi (peny.), *Cirebon sebagai Bandar Jalur Sutra: Kumpulan Makalah Diskusi Ilmiah*. Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia.

Sumalyo, Yulianto (1995), *Arsitektur Kolonial di Indonesia*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.

Sunami (2016), *Sejarah Hukum*. Jakarta: Penerbit Kencana.

Sunardjo, Unang (1983), *Kerajaan Cerbon 1479–1809*. Bandung: Penerbit Tarsito.

Suroto, R. S. (t.t.), "Tjirebon Dipandang dari Beberapa Segi," dalam *Buku Peringatan 50 Tahun Kota Besar Tjirebon 1906–1956*. Cirebon: t.p.

Suwarno, P. J. (2010), "Romusha from Yogyakarta," dalam Peter Post, dkk. (ed.), *The Encyclopedia of Indonesia in the Pacific War: Handbook of Oriental Studies*, III, Vol. 19. Leiden/Boston: Brill.

Taryoto, Andin H., dkk. (1992), *Perkembangan Perkreditan Pertanian di Indonesia*. Jakarta: Pusat Penelitian Sosial Ekonomi Pertanian, Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian.

Thee Kian Wie (1994), "Reflection on Indonesia's Emerging Industrial Nationalism," Working Paper 41, Asia Research Centre. Murdoch University.

Tjandrasasmita, Uka (1997), "Bandar Cirebon dalam Jaringan Pasar Dunia," dalam Susanto Zuhdi (peny.), *Cirebon sebagai Bandar Jalur Sutra: Kumpulan Makalah Diskusi Ilmiah*. Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia.

Thorn, William (2004), *Penaklukan Pulau Jawa: Pulau Jawa di Abad Sembilan Belas dari Amatan Seorang Serdadu Kerajaan Inggris*; terj. Jakarta: PT Elex Media Komputido.

Tyler, Norman; Ted J. Tyler; Ilene R. Tyler (2009), *Historic Preservation: An Introduction to Its History, Principles, and Practice*, Edisi II. New York/London: W. W. Norton Company.

Valentijn, François (1726), *Oud en Nieuw Oost-Indiën*, Deel IV: Beschrijving van Groot Java ofte Java Major. Dordrecht/Amsterdam: Joannes van Braam dan Gerard Onder der Linden.

Vissering, G. (1928b), "Levensbericht van Eduard Cuypers," dalam *Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandsche Letterkunde 1928*. Leiden.

Wahid, Abdul (2009), *Bertahan di Tengah Krisis: Komunitas Tionghoa dan Ekonomi Kota Cirebon*. Yogyakarta: Penerbit Ombak.

— (2011), "Rethinking the Legacy of Toean Besar Guntur: Daendels and the Making of 'De Grote Postweg' in Java 1808–1810," dalam Agus Suwignyo, dkk. (ed.), *Sejarah Sosial (di) Indonesia: Perkembangan dan Kekuatan, 70 Tahun Prof. Dr. Suhartono*. Yogyakarta: Jurusan Sejarah, Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Gadjah Mada.

Wertheim, W. F. (1964), *East-West Parallels: Sociological Approaches to Modern Asia*. The Hague: W. van Hoeve.

van Zanden, Jan Luiten (2009), "Credit and the Colonial State: The Reform of Capital Market on Java 1900–1930," dalam David Henley dan Peter Boomgaard (ed.), *Credit and Debt in Indonesia 1860–1930.* Singapore: ISEAS; Leiden: KITLV Press.

van Zanden, Jan Luiten dan Daan Maarks (2012), *An Economic History of Indonesia 1800–2012*. London/New York: Routledge.

**Internet**

"Mengintip Pelabuhan Cirebon (I), Sampai Masuk Iklan Bioskop Segala," *Kompas,* 26 Oktober 1981.

"Kawasan Industri dan Pelabuhan, Prioritas Pembangunan Cirebon," *Kompas,* 17 Maret 1988.

"Penyaluran KUK Sudah Capai Rp 27,7 Trilyun," *Kompas,* Kamis 14 April 1994.

"Kerajinan Cirebon, Produk Lokal Pasaran Global," *Kompas,* 12 Februari 2001.

"Mebel Rotan Cirebon, dari Industri Rumahan sampai Eksportir," Liputan Khusus Furniture, *Kompas,* 24 Februari 2005.

"HUT ke-637 Kota Cirebon: Kota Dagang dan Industri, Tetapi Daya Beli Rendah," *Kompas,* 19 Januari 2007.

"Sejumlah Kendala Hadang Industri Cirebon. Pemkab Kucurkan Modal dan Siapkan Padat Karya," *Kompas,* 14 April 2009.

"DJB pada Masa Pendudukan Jepang (1942-1945)," dalam Unit Khusus Museum Bank Indonesia: Sejarah Pra Bank Indonesia, https://www.bi.go.id/museum/sejarah-bi/pra-bi/Default.aspx, diunduh 1 Juni 2020.

"Periode Pengakuan Kedaulatan RI s.d. Nasionalisasi," dalam Unit Khusus Museum Bank Indonesia: Sejarah Pra Bank Indonesia, https://www.bi.go.id/museum/sejarah-bi/pra-bi/Default.aspx, diunduh 1 Juni 2020.

"PG Sindanglaut," http://pg-rajawali2.com/pg-sindang-laut/ diakses pada 9 Juni 2020).

"Sejarah," https://www.bni.co.id/id-id/perusahaan/tentangbni/sejarah, diunduh 1 Juni 2020.

Ardanareswari, Indira, "Untung Tentara dalam Nasionalisasi Perusahaan Belanda," https://tirto.id/untung-tentara-dalam-nasionalisasi-perusahaan-belanda-egpr, diakses 9 Juni 2020; https://gramho.com/media/2136820206444570108, diakses 11 Juni 2020.

Cirebon.go.id/sekilas-kab-cirebon/nama-nama-bupati, diunduh 6 Juni 1981.

Isnaeni, Hendri F., "Inilah Bidang Usaha yang Dinasionalisasi," https://historia.id/politik/articles/inilah-bidang-bidang-usaha-yang-dinasionalisasi-6joz1, diunduh 12 Juni 2020.

Nurdin M. Noor "Raden Slamet Ahmad Prabowo Kader PKI, Menaranya Sambut Kota Cirebon," https://www.radarcirebon.com/2019/02/11/raden-slamet-ahmad-prabowo-kader-pki-menaranya-sambut-kota-cirebon/ diakses 17 Juni 2020; "Kader PKI pernah Jadi Walikota" dalam https://www.rakyatcirebon.id/kader-pki-pernah-jadi-walikota-20151001.html, diunduh 18 Juni 2020.

Raharjo, Paksi Suyo, "Gedung BAT Cirebon, Saksi Bisu Kejayaan Tembakau di Cirebon," https://merahputih.com/post/read/gedung-bat-cirebon-saksi-bisu-kejayaan-tembakau-di-cirebon, diunduh 9 Juni 2020.

Sjafari, Irvan, "Bandung 1965, Runtuhnya PKI Jabar," https://www.kompasiana.com/jurnalgemini/5e5bb682d541df6da514b532/bandung-1965-keruntuhan-pki-jabar?page=all, diunduh 17 Juni 2020.

Wikatno, Adi, "Pakto 88 dan Booming Perbankan Indonesia," https://lipsus.kontan.co.id/v2/perbankan/read/318/pakto-88-dan-booming-perbankan-indonesia, diunduh 28 Agustus 2020.

**Wawancara**

Bapak Sutejo, Enas Sumarna, Yousep Suharno, dan Linardi Wongkar dalam Focus Group Discussion dengan pensiunan pegawai Bank Indonesia Cabang Cirebon, Cirebon, 23 Juli 2020.

# SERI BUKU SEJARAH DAN *HERITAGE* KANTOR PERWAKILAN BANK INDONESIA

**1. BERJUANG DENGAN UANG MEMPERTAHANKAN DAN MEMAJUKAN REPUBLIK INDONESIA: SEMANGAT JUANG OTORITAS DAN MASYARAKAT SUMATERA UTARA**

Sumatera timur pada abad ke-19 merupakan pusat perkebunan dengan komoditas bernilai jual tinggi. Namun, intensitas ekspor impor dalam perdagangan berimbas pada maraknya peredaran uang asing. Sejak masa kolonial, setidaknya ada sembilan mata uang asing yang beredar dan lebih populer dibanding mata uang gulden. Buku ini bercerita sejarah peredaran mata uang di sumatera timur yang tidak hanya dijadikan sebagai sekadar alat tukar, namun memberikan kita pemahaman baru bahwa uang sebagai alat perjuangan.

**2. MEMBANGUN INFRASTRUKTUR, MEMPERKUAT KETAHANAN EKONOMI: DINAMIKA KOTA SURABAYA DAN JAWA TIMUR SEBAGAI PENYANGGA EKONOMI BANGSA**

Sejak ratusan tahun berdirinya Surabaya, kota ini telah menjadi daerah strategis, baik dalam perdagangan maupun pertahanan. Pada masa Vereenigde Oostindische Compagnie (VOC), Surabaya dijadikan sebagai kota pertahanan, ditandai dengan berdirinya benteng serta pabrik senjata. Surabaya juga menjadi kota pertama bagi Belanda untuk mendirikan pabrik pencetakan uang logam di Nusantara. Buku berjudul "Membangun Infrastruktur, Memperkuat Ketahanan Ekonomi: Dinamika Kota Surabaya dan Jawa Timur sebagai Penyangga Ekonomi Bangsa" ini menjelaskan sejarah Perekonomian Kota Surabaya dan Jawa Timur serta peran De Javasche Bank hingga Bank Indonesia di kota ini.

### 3. MENGAWAL SEMANGAT KEWIRAUSAHAAN: PERAN SAUDAGAR DALAM MEMAJUKAN RODA EKONOMI SUMATERA BARAT

Buku "Mengawal Semangat Kewirausahaan: Peran Saudagar Dalam Memajukan Roda Ekonomi Sumatera Barat" mengangkat sejarah perekonomian dan kisah perjuangan para saudagar Minang yang menjadi aktor ekonomi bersanding dengan pengusaha-pengusaha Belanda dan Tionghoa di Sumatera Barat. Perdagangan yang marak terjadi di Sumatera Barat sudah berlangsung jauh sebelum kedatangan Belanda. Pada masa klasik itu, Pantai Barat Sumatera mendatangkan komoditas-komoditas langka berkualitas, seperti kamfer, kemenyan dan emas. Kedatangan pedagang Arab, Tionghoa dan Tamil membuka gerbang yang lebih luas bagi pedagang Minang untuk berjejaring dengan negeri luar dan semangat merantau.

### 4. MENEGAKKAN KEDAULATAN DAN KETAHANAN EKONOMI: BANK INDONESIA DALAM PUSARAN SEJARAH KALIMANTAN BARAT

Sebagai salah satu provinsi di Pulau Kalimantan yang luasnya seperlima pulau tersebut, Kalimantan Barat memiliki garis pantai yang menghadap langsung ke jalur perdagangan maritim dunia, yakni Selat Malaka dan Laut China Selatan. Berdasarkan kondisi demografisnya, perekonomian wilayah barat dari bumi Kalimantan ini digerakkan oleh jaringan perdagangan dari hulu ke hilir melalui wilayah pedalaman ke pesisir pantai. Karakteristik wilayah dengan sungai yang panjang, lebar dan dalam menjadi moda transportasi andalan, di samping keberadaan pelabuhan di pesisir pantai yang ramai disinggahi pedagang dan pelaut asing. Kekayaan hasil bumi dan tambang telah menjadi magnet yang mendatangkan para penambang dari Cina dan pedagang dari Eropa.

## 5. HARMONI DALAM PERBEDAAN: BANK INDONESIA DALAM DINAMIKA EKONOMI SOLO RAYA

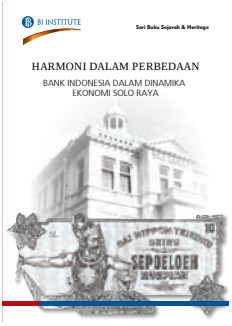


Buku "Harmoni dalam Perbedaan: Bank Indonesia dalam Dinamika Ekonomi Solo Raya" ini merupakan hasil kajian terhadap sejarah ekonomi Solo yang sarat akan kearifan lokal. Buku ini sekaligus menjadi kontribusi Bank Indonesia melalui knowledge asset yang dapat menjadi referensi bagi pembuat kebijakan pembangunan daerah yang didasari oleh kearifan lokal. Kehadiran buku ini juga sekaligus melengkapi keberadaan tangible asset dalam bentuk museum sebagai *heritage* eks Kantor De Javasche Bank Solo.

## 6. PUSAT EKONOMI MARITIM MAKASSAR DAN PERANAN BANK INDONESIA DI SULAWESI SELATAN

Makassar lekat dengan identitas sebagai pusat ekonomi maritim sejak berabad lalu, berkat keberadaan bandar niaga yang selalu ramai. Aktivitas perdagangan yang ramai mampu menstimulus perekonomian Makassar untuk berkembang menjadi yang paling maju di wilayah timur Nusantara. Untuk memperluas jaringan operasinya, DJB melebarkan sayap dengan membuka kantor-kantor cabang di seluruh Hindia Belanda, salah satunya di Makassar pada tahun 1864. Pertimbangan utama pembukaan De Javasche Bank Agentschap Makassar adalah keberadaan pelabuhan yang ramai, yang tentunya terjadi peredaran uang yang besar.

## 7. GELIAT KOTA BANDUNG: DARI KOTA TRADISIONAL MENUJU MODERN

Sejak awal pendiriannya, Kota Bandung telah menjadi pedoman dalam pengembangan dan perencanaan tata kota. Berada di wilayah pedalaman, letak geografis Kota Bandung telah mendukung kota ini yang sempat diusulkan sebagai ibu kota Hindia Belanda menggantikan Batavia pada masa kolonial. Bandung terus berbenah diri, pasca pengakuan kedaulatan,

Bandung mendadak sibuk manakala kota ini dipilih sebagai tuan rumah penyelenggaraan Konferensi Asia Afrika tahun 1955. Zaman terus berganti, Kota Bandung terus bertransformasi. Buku berjudul "Geliat Kota Bandung Dari Kota Tradisional Menuju Modern" menjabarkan sisi lain Kota Bandung dalam lintasan sejarah, mulai dari perekonomian Kota Bandung dan Jawa Barat serta peran De Javasche Bank hingga Bank Indonesia di kota ini.

### 8. BERSINERGI DALAM KEISTIMEWAAN: PERAN BANK INDONESIA DALAM PEMBANGUNAN EKONOMI YOGYAKARTA

Berada di jantung wilayah Jawa sekaligus sebagai pusat dari kebudayaan Jawa, Yogyakarta tampil begitu istimewa. Di bidang ekonomi, perkebunan tumbuh menjadi basis perekonomian Yogyakarta pada masa kolonial. Sempat menjadi ibu kota revolusioner Republik Indonesia di awal kemerdekaan, Yogyakarta memainkan peran penting sebagai lokasi yang tepat guna menyempurnakan organisasi dalam negeri. Keunikan kebudayaan dan kreativitas masyarakatnya telah berhasil mengubah perekonomiannya dari ekonomi kolonial perkebunan menjadi ekonomi lokal yang mandiri berbasis kerakyatan. Buku berjudul "Bersinergi Dalam Keistimewaan: Peran Bank Indonesia Dalam Pembangunan Ekonomi Yogyakarta" menguraikan sejarah perekonomian Yogyakarta serta peran De Javasche Bank hingga Bank Indonesia di era kontemporer.

### 9. OEDJAN MAS DI BUMI SRIWIJAYA: BANK INDONESIA DAN *HERITAGE* DI SUMATRA SELATAN

Dikenal sebagai budaya maritim warisan Kerajaan Sriwijaya, Sumatra Selatan hadir dengan kekayaan alamnya dan menjadi salah satu kantung ekonomi Pemerintah Hindia Belanda. Kemajuan ekonomi membawanya pada puncak kemakmuran atau masa "Oedjan Mas." Riuhnya aktivitas perekonomiannya

melandasi pendirian De Javasche Bank Agentschap Palembang yang menjadi cikal bakal kehadiran Bank Indonesia di Sumatra Selatan. Sebagai upaya mendokumentasikan *institutional memory*, buku ini hadir sebagai kontribusi Bank Indonesia untuk memperkaya kajian ilmu sejarah ekonomi.

### 10. DARI RIMBA MENJADI KOTA: BANK INDONESIA DALAM EVOLUSI MALANG RAYA

Malang merupakan wilayah yang mulanya kurang dianggap penting oleh pemerintah kolonial. Evolusi ekonomi di sektor perkebunan membawanya menjadi salah satu wilayah penopang ekonomi di Jawa Timur dan berhasil menjawab keraguan pemerintah kolonial sebagai salah satu wilayah yang diperhitungkan. Perkembangan ekonomi wilayah yang masif menginisiasi berdirinya De Javasche Bank Agentschap Malang pada 1916 dan menjadi awal mula lahirnya Bank Indonesia di Kota Malang. Sebagai upaya mendokumentasikan *institutional memory*, buku ini hadir sebagai kontribusi Bank Indonesia untuk memperkaya kajian ilmu sejarah ekonomi.

### 11. MENDUKUNG PERTUMBUHAN EKONOMI DI DAERAH MODAL: BANK INDONESIA DALAM DINAMIKA PEREKONOMIAN ACEH

Posisi geografis, potensi alam yang melimpah, serta kegigihan perjuangan rakyat Aceh terangkum dalam rangkaian kisah dan peristiwa yang telah tercatat dalam sejarah. Aceh pada masa Kesultanan Aceh Darussalam telah berhasil menjelma menjadi satu kekuatan politik dan ekonomi di Selat Malaka dan Lautan Hindia. Seiring perkembangannya, Aceh era Revolusi menjadi satu-satunya wilayah yang gagal dikuasai kembali oleh Belanda sekaligus menjadi tumpuan harapan bagi Republik. Berbagai bantuan fisik maupun materi diberikan rakyat Aceh, salah satunya sumbangan untuk pembelian pesawat pertama Republik Indonesia.

Atas segala kontribusi yang diberikan, Sukarno pun menjuluki Aceh sebagai "daerah modal". Sebagai upaya mendokumentasikan *institutional memory*, buku ini hadir guna memperkaya referensi akademis di bidang ilmu sejarah ekonomi.

### 12. SEMARANG SEBAGAI SIMPUL EKONOMI: BANK INDONESIA DALAM DINAMIKA PEREKONOMIAN JAWA TENGAH

Sejak abad ke-8 M Semarang telah menjelma sebagai Kota Dagang. Letaknya yang strategis dan kekayaan alam yang melimpah telah mengantarkan Semarang terhubung dengan kota-kota pantai utara Jawa sejak era Kerajaan Majapahit. Dalam perkembangannya, Semarang tumbuh sebagai pelabuhan penting di Jawa dan turut berimplikasi terhadap ramainya aktivitas perekonomian dan perdagangan di wilayah tersebut. Keberhasilan Semarang di bidang ekonomi telah nampak melalui interaksi yang terjalin antara wilayah pedalaman dan pesisir yang mampu membawa Semarang dikenal sebagai wilayah simpul ekonomi. Bergeliatnya perekonomian dan perkembangan yang begitu masif berhasil mendatangkan atensi khusus bagi Direksi DJB untuk mendirikan kantor cabang pertamanya di Semarang pada 1 Maret 1829. Sebagai upaya mendokumentasikan *institutional memory*, buku ini hadir guna memperkaya referensi akademis di bidang ilmu sejarah ekonomi.

## Drs. Nasrudin Azis, S.H.
### (Walikota Cirebon 2018-2023)

Jauh sebelum kedatangan bangsa Barat, posisi strategis Cirebon telah masyhur dalam peta perdagangan nusantara. Oleh sebab itu, Cirebon tumbuh sebagai salah satu Bandar perdagangan utama di Pantai Utara Jawa. Hiruk pikuk perdagangan di Cirebon nyatanya didukung oleh kekayaan dan kesuburan wilayah pedalaman sebagai produsen komoditas ekspor dan keterbukaan masyarakatnya yang terbuka dan mudah beradaptasi, Kombinasi tersebut mengantarkan kemajuan ekonomi bagi Kota Cirebon sekaligus menjadi simpul ekonomi yang menghubungkan wilayah pedalaman dengan pesisir. Kegemilangan dan kemakmuran ekonomi Cirebon sepatutnya tidak hanya sekadar menjadi romanitsme sejarah. Namun, hal tersebut harus menjadi pelecut semangat bagi generasi hari ini agar mampu memaksimalkan potensi Cirebon untuk peningkatan perekonomian.

Pemerintah Daerah Kota Cirebon menyambut baik penerbitan buku berjudul "Memperkuat Simpul Ekonomi Kerakyatan Wilayah Pesisir: Bank Indonesia dan Perkembangan Ekonomi Cirebon" Sebab, buku ini secara komprehensif mengurai sejarah ekonomi kota dan wilayah Cirebon. Oleh sebab itu, kehadiran buku ini sejatinya dapat menambah khazanah dan literatur mengenai peran infrastruktur perekonomian dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Buku ini tidak semata menjadi rujukan edukatif bagi masyarakat dan akademisi tetapi juga bagi para pembuat kebijakan daerah dalam menemukan solusi atas permasalahan yang dihadapi melalui perspektif sejarah. Di dalam buku ini, kita juga disajikan dokumentasi historis mengenai sinergi yang kuat antara Pemerintah Daerah Kota Cirebon dengan Kantor Perwakilan Bank Indonesia Cirebon dalam mengawal dan meningkatkan perekonomian di Kota Cirebon dan sekitarnya untuk mewujudkan masyarakat yang sejahteran.

## Sultan Sepuh XV Luqman Zulkaedin
### Sultan Kasepuhan Cirebon

Keberadaan "Negeri Cirebon" berawal dari sebuah pemukiman kecil di sekitar Pelabuhan Muara Jati hingga kemudian tumbuh menjadi mata rantai penting pada perdagangan di Jalur Sutra, serta menjadi pusat kerajaan Islam di Jawa bagian Barat. Pada puncak kejayaannya, Kesultanan Cirebon menguasai wilayah yang cukup luas hingga ke pedalaman timur Priangan hingga menjadi pusat penyebaran dan studi Islam di Jawa Barat. Terletak di titik persimpangan jaringan pelayaran maritim dan jalur tansportasi darat, Cirebon berkembang menjadi salah satu kota Pelabuhan dan pusat perdagangan penting di Nusantara, sekaligus menjadi mata rantai jaringan perdagangan regional sejak periode pra-kolonial. Memasuki masa kolonial Hindia Belanda, Cirebon tampil sebagai wilayah dengan corak ekonomi pertanian dan perkebunan yang tumbuh subur dan mencapai puncaknya pada awal abad ke-20. Kisah kegemilangan politik dan ekonomi Cirebon dapat kita lihat di dalam buku ini.

Banyak pelajaran yang dapat kita petik dalam perjalanan sejarah ekonomi di Cirebon dari masa ke masa. Pelajaran-pelajaran berharga tersebut dapat kita lihat dalam buku berjudul **"Memperkuat Simpul Ekonomi Kerakyatan Wilayah Pesisir: Bank Indonesia dan Perkembangan Ekonomi Cirebon"** yang disusun dengan apik oleh tim penulis dari Bank Indonesia. Kehadiran buku ini dapat menjadi media pembelajaran serta inspirasi bagi kita untuk bekontribusi dalam upaya mendorong warga Cirebon agar mampu menjadi masyarakat yang sejahtera, berkepribadian, dan berbudi luhur.

## Prof. Dr. Reiza D. Dienaputra
### (Guru Besar Ilmu Sejarah Universitas Padjadjaran)

Aktivitas BI Institute dalam melakukan riset sejarah sekaligus menerbitkan buku-buku sejarah perlu diberi apresiasi yang tinggi. Terlebih manakala aktivitas tersebut masih tetap dilakukan di tengah Pandemi Covid-19 yang hingga Agustus 2021 belum memperlihatkan tanda-tanda akan mereda secara nasional. Sebagaimana buku-buku sebelumnya yang diinisiasi BI Institute, buku berjudul **"Memperkuat Simpul Ekonomi Kerakyatan Wilayah Pesisir: Bank Indonesia dan Perkembangan Ekonomi Cirebon"**, tidak hanya berupaya merekonstruksi proses kelahiran dan perkembangan Bank Indonesia Cirebon akan tetapi mengungkap pula kontribusi Bank Indonesia Cirebon dalam menggerakan roda perekonomian Cirebon, baik Kota Cirebon maupun Kabupaten Cirebon. Model rekonstruksi sejarah yang disajikan buku ini tidak hanya menjadikan buku tersebut sebagai karya sejarah lokal yang komprehensif dalam membahas sejarah Cirebon dari sudut pandang ekonomi, akan tetapi menjadikannya sebagai buku yang mampu memperkaya informasi perjalanan sejarah Cirebon, sejak sebelum kemerdekaan hingga era kemerdekaan, khususnya yang bersentuhan dengan keberadaan Bank Indonesia Cirebon. Pada akhirnya, siapapun yang berkeinginan memahami sejarah Cirebon dengan baik maka buku ini menjadi buku wajib yang harus dibaca, terutama bila pendekatan yang ingin dilakukan dalam memahami sejarah Cirebon tersebut adalah pendekatan ekonomi atau pendekatan institusi. Selamat untuk BI Institute atas konsistensinya dalam menerbitkan buku-buku sejarah lokal. Semoga ke depan akan lebih banyak lagi buku sejarah yang dipublikasikan BI Institute.

BI INSTITUTE
www.bi.go.id/id/institute

ISBN 978-623-90661-4-7